



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
TAHUN 2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN ACEH BESAR**

**Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim No. 3, Janto, Barueh, Kec.
Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23951**



BUPATI ACEH BESAR

PROPINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 - 2029

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
- 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Keuangan Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat kabupaten yang berpedoman pada RPJP Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah Rencana Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Daerah.

14. Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
15. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah kerangka kerja lima tahunan yang dijabarkan menjadi persatu tahunan guna mencapai target sasaran dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
16. Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Nasional Jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
17. Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang harusnya tersedia.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus di perhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
19. Karakteristik wilayah adalah karakter wilayah dari sisi geografis, luas wilayah, dan sosial wilayah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah Jangka Menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan RTRW.
- (2) RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan serta program Bupati dan Wakil Bupati, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 8

BAB III

RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan :
L

- a. visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi; dan
 - b. arah kebijakan dan program prioritas
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menjalankan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas.

BAB IV

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025-2029

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
 - BAB III : Visi, Misi dan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - BAB V : Penutup
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB V

PANGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

Pasal 7

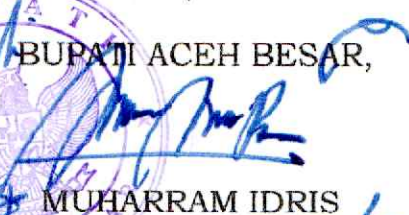
- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Mmenengah Kabupaten hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengedalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Memenanga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD Kabupaten, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD Kabupaten tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

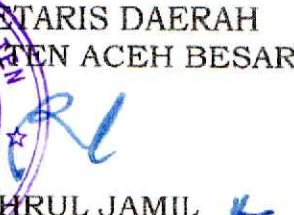
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Januari 2026 M
4 Sya'ban 1447 H


BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Januari 2026 M
4 Sya'ban 1447 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BAHRUL JAMIL

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : 1/9/2026

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat.

Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan kepada Daerah untuk melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Asta Cita Tahun 2025-2029, Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun.

RPJMD nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun, khususnya tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 91



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Dasar Hukum.....	I - 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I - 9
1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Aceh Besar dengan RPJPD Kabupaten Aceh Besar.....	I - 11
1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan Rancangan RPJMN (RPJMN tahun 2025 – 2029)	I - 12
1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Aceh Besar dengan RPJMD Aceh.....	I - 12
1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.....	I - 12
1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	I - 13
1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	I - 13
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 14
1.4.1 Maksud	I - 14
1.4.2 Tujuan.....	I - 14
1.5 Sistematika Penulisan	I - 15
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II - 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 53
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	II - 112
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II - 154
2.2. Gambaran Keuangan Daerah.....	II - 190
2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	II - 191
2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	II - 239
2.2.3. Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah ...	II - 242
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis.....	II - 258
2.3.1. Permasalahan	II - 258
2.3.1.1 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ketahanan bencana masih rendah	II - 260
2.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh besar Belum Maksimal dan Fluktuatif.....	II - 262
2.3.1.3 Implementasi Pelaksanaan Syariat Islam, Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Belum Optimal	II - 293
2.3.1.4 Sumber Daya Manusia Yang masih Rendah.....	II - 312
2.3.1.5 Masih Tingginya Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah.....	II - 326
2.3.1.6 Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah Yang Belum Optimal	II - 330
2.3.2. Isu strategis.....	II - 333
2.3.2.1 Megatren isu Global.....	II - 333
2.3.2.2 Isu Strategis Nasional.....	II - 341
2.3.2.3 Isu Strategis Aceh.....	II - 341
2.3.2.4 Isu Strategis Rencana Jangka Menengah Aceh Besar Tahun 2025 - 2029	II - 355

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 1

3.1. Visi dan Misi Daerah	III - 2
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	III - 10
3.3. Penyelarasan dengan Visi dan Misi Aceh Besar dan Nasional.....	III - 11
3.4. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Pembangunan.....	III - 13
3.5. Strategi, Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	III - 25
3.5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	III - 26

3.5.2. Kebijakan Pembangunan Daerah	III - 50
3.5.3. Program Ketahanan Pangan dalam RPJM Kabupaten Aceh Besar 2025–2029 dalam mendukung arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029	III - 92
3.5.4. Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	III - 96
3.5.5. Keselarasan Arah Pembangunan RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Aceh Besar	III - 107
3.6. Prioritas Aceh Besar.....	III - 141
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV - 1
4.1 Rencana Program Perangkat Daerah	IV - 1
4.2. Indikator Kinerja.....	IV - 49
4.2.1 Indikator Makro Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2029	IV - 49
4.2.2 Indikator Kinerja Utama	IV - 82
4.2.3 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci.....	IV - 60
BAB V PENUTUP	V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar	II - 2
Tabel 2.2.	Kondisi Kelerengan di Kabupaten Aceh Besar.....	II - 4
Tabel 2.3.	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar	II - 9
Tabel 2.4.	Cekungan Air Tanah di Kabupaten Aceh Besar	II - 11
Tabel 2.5.	Keadaan Curah Hujan Rata-Rata (mm) dan Hari Hujan Rata-Rata Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024	II - 13
Tabel 2.6.	Keadaan Suhu Udara Rata-rata, Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024	II - 13
Tabel 2.7.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Besar	II - 14
Tabel 2.8.	Luas Status Penyediaan Air Kabupaten Aceh Besar	II - 15
Tabel 2.9.	Ringkasan daya dukung Kabupaten Aceh Besar dalam jasa Penyediaan Ekosistem	II - 17
Tabel 2.10.	Hasil Analisis, Alternatif Skenario, Strategi dan Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Besar 2025-2029.....	II - 30
Tabel 2.11.	Pembangunan Pola Pangan Harapan dan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024.....	II - 38
Tabel 2.12.	Capaian IKA,IKU,IKL dan IKLH Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024.....	II-41
Tabel 2.13.	kses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak Aceh Besar 2019-2024.....	II-42
Tabel 2.14.	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan di Kabupaten Aceh Besar.....	II - 43
Tabel 2.15.	Wilayah Potensi Bencana dalam Kabupaten Aceh Besar.....	II - 46
Tabel 2.16.	Jumlah Kasus Bencana per Kecamatan di Kabupaten Aceh BesarTahun 2020-2024	II - 47
Tabel 2.17.	Indeks Resiko Bencana Kabuapet Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II - 47
Tabel 2.18.	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024.....	II - 48

Tabel 2.19.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Aceh Besar Tahun 2019-2024.....	II - 49
Tabel 2.20.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar Menurut Kecamatan Tahun 2019 - 2024.....	II - 49
Tabel 2.21.	Luas Wilayah, Persentase Penduduk Berdasarkan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024	II - 50
Tabel 2.22.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024	II - 51
Tabel 2.23.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024	II - 51
Tabel 2.24.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029.....	II - 53
Tabel 2.25.	Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024	II - 57
Tabel 2.26.	Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024.....	II - 59
Tabel 2.27.	Kemiskinan Berdasarkan Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.....	II - 64
Tabel 2.28.	Indikator Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024	II - 69
Tabel 2.29.	Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024.....	II - 74
Tabel 2.30.	Nilai Location (LQ) Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Besar Aceh.....	II - 75
Tabel 2.31.	Angka Usaha Harapan Hidup Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019–2024..	II - 78
Tabel 2.32.	Angka Prevalensi dan Balita Stunting di Kabupaten Aceh Besar	II - 83
Tabel 2.33.	Jumlah Kasus Penyakit Menular Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024.....	II - 84
Tabel 2.34.	Indikator Kesehatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024.....	II - 85
Tabel 2.35.	Anggaran Jaminan Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019–2024..	II - 85
Tabel 2.36.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Di Kabupaten Aceh Besar	II - 86
Tabel 2.37.	Rasio RSUD /Puskesmas/Pustu Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024	II - 87
Tabel 2.38.	Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019– 2024	II - 87
Tabel 2.39.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024	II - 88

Tabel 2.40.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019–2024	II - 88
Tabel 2.41.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya di Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 - 2024	II - 88
Tabel 2.42.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II - 89
Tabel 2.43.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II - 90
Tabel 2.44.	Nilai Literasi dan Numerasi SD dan SMP Tahun 2021-2024.....	II - 93
Tabel 2.45.	Jumlah Guru Bersertifikasi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.....	II - 96
Tabel 2.46.	Akreditasi Sekolah Jenjang SMP,SD dan TK Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024	II - 96
Tabel 2.48.	Rekapitulasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024	II - 99
Tabel 2.49.	Indikator Sosial di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024	II - 100
Tabel 2.50.	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2024..	II - 100
Tabel 2.51.	Data Mesjid dan Meunasah i di Kabupaten Aceh Besar yang melaksanakan Riya'ah,Idarah dan Imarah Tahun 2019-2023	II - 102
el 2.52.	Data Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023	II - 102
Tabel 2.53.	Rekapitulasi Penerimaan Zakat dan Infak SEkretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024	II - 104
Tabel 2.54.	Jumlah Dayah yang Bersertifikasi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024	II - 105
Tabel 2.55.	Seni, Festival Budaya yang diselenggarakan serta diikuti oleh Kabupaten Aceh Besar	II - 107
Tabel 2.56.	Jumlah Cagar Budaya dan Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024	II - 107
Tabel 2.57.	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Nasional Tahun 2020-2024.....	II - 108

Tabel 2.58.	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019– 2024.....	II - 109
Tabel 2.59.	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024	II -110
Tabel 2.60.	Skor dan Predikat Kabupaten Layak Anak (KLH)i Kabupaten Aceh Besar	II - 110
Tabel 2.61.	Peserta KB Aktif di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024.....	II - 111
Tabel 2.62.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Besar tahun 2020-2024	II - 112
Tabel 2.63.	Laju Pertumbuhan Produk Doimestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Aceh Besar ahun 2019 - 2024 (Persen)	II - 118
Tabel 2.64.	Jenis Industri, Jumlah dan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023	II - 127
Tabel 2.65.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar dan Tahun 2021 - 2024.....	II - 129
Tabel 2.65.	Luas Irigasi Teknis, Luas Sawah Tadah Hujan dan Luas Lahan Baku Sawah di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023	II - 129
Tabel 2.67	Jumlah Polpulasi Ternak Berdasarkan Jenis di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023	II - 130
Tabel 2.68.	Jumlah Produksi Daging Ternak Berdasarkan Jenis di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024	II - 131
Tabel 2.69.	Jumlah Pemotongan Ternak Berdasarkan Jenis Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 - 2024	II - 131
Tabel 2.70.	Hasil Produksi Perikanan Kabupaten Aceh Besar (Tangkap dan Budidaya) .	II - 132
Tabel 2.71.	Jenis dan Jumlah Alat Tangkap yang digunakan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024.....	II - 133
Tabel 2.72.	Luas Lahan Perikanan Budidaya di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020- 2024.....	II - 134
Tabel 2.73.	Realisasi Investasi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024	II - 136
Tabel 2.74.	Capaian Kinerja Infrastruktur Kabupaten Aceh Besar tahun 2020-2024	II - 137

Tabel 2.75.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 137
Tabel 2.76.	Tabel Kemantapan Jalan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024.....	II - 138
Tabel 2.77.	Perkembangan kondisi Jalan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024	139
Tabel 2.78.	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Besar.....	II - 141
Tabel 2.79.	Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 – 2024.....	II - 143
Tabel 2.80.	Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	II - 143
Tabel 2.81.	Luas Irigasi Teknis dan Tadah Hujan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024	II - 144
Tabel 2.82.	Panjang Irigasi Teknis di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2023.....	II - 145
Tabel 2.83.	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Aceh Besar 2019 – 2024	II - 149
Tabel 2.84.	Desa Mandiri, desa Maju, desa Berkembang dan Desa Tertinggal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2025.....	II - 150
Tabel 2.85.	Kasus Kecelakaan Bermotor Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 151
Tabel 2.86.	Pelabuhan Penyebrangan Umum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023.....	II - 151
Tabel 2.87.	Jumlah Penumpang dan Pesawat di Bandara SIM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024	II - 152
Tabel 2.88.	Kecamatan yang dapat diJangkau Fasilitas Telekomunikasi Telkom di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023	II - 154
Tabel 2.89.	Daerah Blank Spot di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.....	II - 156
Tabel 2.90.	Ketersediaan Aplikasi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 - 2023	II - 158
Tabel 2.91.	Jumlah Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Aceh Besar.....	II - 162
Tabel 2.92.	Jumlah ASN Berdasarkan Eselon Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2023.....	II - 163
Tabel 2.93.	Capaian Indikator Kepegawaian Kabupaten Aceh Besar	II - 164

Tabel 2.94.	Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Kabupaten Aceh Besar.....	II - 167
Tabel 2.95.	OPINI BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024.....	II - 168
Tabel 2.96.	Capain Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.....	II - 168
Tabel 2.97.	Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Aceh Besar.....	II - 171
Tabel 2.98.	Jumlah Produk Hukum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2024.....	II - 172
Tabel 2.99.	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar 2019 - 2024.....	II - 172
Tabel 2.100	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Besar	II - 173
Tabel 2.101.	Nilai SAKIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2023.....	II - 173
Tabel 2.102.	Nilai EKPPD Kabupaten Aceh Besar.....	II - 174
Tabel 2.103.	Ketersedian dan Persentase Qanun Yang Diselesaikan Pembahasan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2024	II - 175
Tabel 2.104.	Nama Kecamatan, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Gampong/Desa Kabupaten Aceh Besar	II - 176
Tabel 2.105.	Jenis dan Jumlah Angka Kriminalitas Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2023.....	II - 177
Tabel 2.106.	Jumlah Organisasi, yayasan dan Partai Politik masyarakat di Kabupaten Aceh Besar	II - 178
Tabel 2.107.	Capaian indikator Kinerja untuk ketertiban dan ketentraman umum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024	II - 180
Tabel 2.108.	Partai Politik Nasional, Lokal, Keterwakilan Perempuan di DPRK dan Partisipasi Pemilu di Kabupaten Aceh Besar.....	II - 181
Tabel 2.109.	Rekapitulasi Daftar Pemilu Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.....	II - 182
Tabel 2.110.	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 - 2024.....	II - 183
Tabel 2.111.	Capaian Indikator Makro Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 184
Tabel 2.112.	Capaian Indikator Kinerja Utama	II - 184
Tabel 2.113.	Perbandingan Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani Menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 186
Tabel 2.114.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2020-2024	II - 192
Tabel 2.115.	Penetapan APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 193

Tabel 2.116	Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II -194
Tabel 2.117	Rata Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 195.
Tabel 2.118	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 -2024.....	II - 201
Tabel 2.119	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 s.d 2024.....	II - 203
Tabel 2.120	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 204
Tabel 2.121	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 205
Tabel 2.122	Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 206
Tabel 2.123	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 206
Tabel 2.124	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 207
Tabel 2.125	Anggaran dan Realisasi Transfer Dana Pemerintah Pusat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 208
Tabel 2.126	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024.....	II - 212
Tabel 2.127	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024.....	II - 212
Tabel 2.128	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 214
Tabel 2.129	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 215
Tabel 2.130	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024.....	II - 217

Tabel 2.131	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 218
Tabel 2.132	Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 219
Tabel 2.133	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 s.d 2024.....	II - 219
Tabel 2.134	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 220
Tabel 2.135	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 221
Tabel 2.136	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020- 2024.....	II -222
Tabel 2.137	Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 224
Tabel 2.138	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 225
Tabel 2.139	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 226.
Tabel 2.140	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 227
Tabel 2.141	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 228
Tabel 2.142	Rata Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 232
Tabel 2.143	Balance Sheet Ratio Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 237
Tabel 2.144	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 241
Tabel 2.145	Proyeksi Pendapatan Daerah Asli Daerah.....	II - 246

Tabel 2.146	Proyeksi Pendapatan Transfer Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2030.....	II - 249
Tabel 2.148	Proyeksi Berdasarkan Kelompok dan Jenis Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 - 2030.....	II - 253
Tabel 2.149	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2030.....	II - 257
Tabel 2.150	Capaian Indikator Makro Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.....	II - 258
Tabel 2.151	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.....	II - 274
Tabel 2.152	Luas Lahan Irigasi Teknis dan Tadah Hujan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.....	II - 281
Tabel 2.153	Perbandingan Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani Menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024.....	II - 287
Tabel 2.154	Ringkasan Permasalahan Kependudukan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.....	II - 304
Tabel 2.155	Capaian Indikator Tata Kelola Pemerintah kabupaten Aceh Besar.....	II - 331
Tabel 3.1.	Visi RPJM, RPJMA dan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2029	III - 4
Tabel 3.2.	Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2029	III - 5
Tabel 3.3.	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 - 2029.....	III - 9
Tabel 3.4.	Penyelarasan Misi Nasional, Aceh dan Aceh Besar.....	III - 11
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Besar 2025 – 2029 Berdasarkan Misi	III - 15
Tabel.3.6.	Analisis SWOT Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	III - 25
Tabel.3.7.	Tujuan, sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029	III - 28
Tabel 3.8.	Pentahapan Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2029	III - 50
Tabel 3.9.	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Besar 2025 - 2029..	III - 52
Tabel. 3.10	Ringkasan Adaptasi Kebijakan	III - 95
Tabel 4.1.	Program Perangkat Daerah.....	IV - 2

Tabel 4.2	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Aceh Besar	
	Tahun 2025 - 2030.....	IV - 50
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama	IV - 51
Tabel. 4.4	Indikator Kinerja Daerah	IV - 69
Tabel. 4.5	Indikator Kinerja Kunci.....	IV - 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD	I - 3
Gambar 1.2. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	I - 11
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar	II - 1
Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Aceh Besar	II - 4
Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Aceh Besar	II - 6
Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Besar	II - 7
Gambar 2.5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Aceh Besar	II - 9
Gambar 2.6. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Aceh Besar	II - 12
Gambar 2.7. Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Besar	II - 12
Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Besar	II - 14
Gambar 2.9. Indeks Ketahanan Pangan Aceh Besar Tahun 2019 – 2024.....	II - 40
Gambar 2.10. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2024.....	II - 40
Gambar 2.11. Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Aceh Besar 2019 – 2024	II - 42
Gambar 2.12. Perbandingan Produksi Sampah, Volume sampah yang tertangani dan persentase penanganan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023	II - 44
Gambar 2.13. Perbandingan Produksi Limbah B3, Volumen Limbah B3 yang tertangani dan persentase penanganan dari Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023.....	II - 44
Gambar 2.14. Grafik jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok umum dan jenis kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024	II - 52
Gambar 2.15. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar Periode Tahun 2019 – 2024	II - 54
Gambar 2.16. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2024	II - 57
Gambar 2.17. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Besar	II - 58
Gambar 2.18. Perkembangan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021-2024	II - 60

Gambar 2.19. Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional	Tahun 2019 – 2024	II - 70
Gambar 2.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024		II - 71
Gambar 2.21. Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024		II - 74
Gambar 2.22. Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tahun 2020– 2024		II - 80
Gambar 2.23. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024		II - 81
Gambar 2.24. Perkembangan Gizi Buruk pada Bayi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024		II - 81
Gambar 2.25. Cakupan dan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Anak Aceh Tahun 2020-2024		II - 82
Gambar 2.26. Prevelansi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh		II - 83
Gambar 2.27. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024		II - 91
Gambar 2.28. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024		II - 92
Gambar 2.29. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024		II 93
Gambar 2.30. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Besar 2019 – 2022		II - 94
Gambar 2.31. Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023		II - 95
Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Syariah Aceh Tahun 2024		II - 103
Gambar 2.33. Dimensi Indeks Pembangunan Syariat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024		II - 104
Gambar 2.34. Perbandingan Jumlah Santri dan Tenaga Pengajar Pesantren ..		II - 105
Gambar 2.35. Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024		II - 112

Gambar 2.36. Persentase Organisasi Pemuda Aktif Kabupaten Aceh Besar	
Tahun 2020-2024.....	II - 113
Gambar 2.37. Persentase Wirausaha Muda di Kabupaten Aceh Besar	
Tahun 2020-2024.....	II - 114
Gambar 2.38. Jumlah Cabang Olahraga Binaan di Kabupaten Aceh Besar	
Tahun 20197– 2024	II - 115
Gambar 2.39 Jumlah Atlit Binaan (Orang)di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024	
.....	II - 116
Gambar 2.40 PDRB Perkapita Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan HDHB Tahun	
2019-2024 (Juta Rupiah).....	II-116
Gambar 2.41. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar	
tahun 2024	II - 117
Gambar 2.42. PDRB dan Laju Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar Tahun	
2019 – 2024	II - 119
Gambar 2.43. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten	
Aceh Besar tahun 2020 – 2024	II - 120
Gambar 2.44. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin	
Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 – 2024.....	II - 120
Gambar 2.45. Persentase Kontribusi PDRB ADBH Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan	
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Aceh Besar tahun 2019	
– 2024	II - 122
Gambar 2.46. Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Kabupaten Aceh	
Besar Tahun 2019-2024	II - 122
Gambar 2.47. Persentase Kontribusi PDRB ADBH Lapngan Industri Pengolahan Di	
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024.....	II - 123
Gambar 2.48. .. Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten	
Aceh Besar Tahun 2019 – 2024	II - 124
Gambar 2.49. Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) di Kabupaten	
Aceh Besar Tahun 2019 – 2023	II - 125
Gambar 2.50. Jumlah PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Aceh besar Tahun	
2020-2024.....	II - 126
Gambar 2.51. Jumlah Koperasi , Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten	
Aceh Besar Tahun 2020-2024	II - 126

Gambar 2.52. Kontribusi Sektor Perikanan, Kehutanan, dan Perikanan Dibanding Sektor Lain terhadap PDRB di Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2020-2024.....	II - 128
Gambar 2.53. Produksi Padi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024	II - 130
Gambar 2.54. Produksi Perikanan (Ton) Kabupaten Aceh Besar	II - 132
Gambar 2.55. Tingkat Konsumsi Ikan (Persen) di Kabupaten Aceh Besar 2020 – 2024	II - 134
Gambar 2.56. Tingkat Kemantapan Jalan Per Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023	II - 139
Gambar 2.57. Luas RTH Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2023.....	II - 142
Gambar 2.58. Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024	II - 143
Gambar 2.59. Perkembangan Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023.....	II - 146
Gambar 2.60. Persentase Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Permasyarakatan.....	II - 147
Gambar 2.61. Persentase PKK Aktif di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023.....	II - 148
Gambar 2.62. Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Aceh Besar 2019 – 2023.....	II - 149
Gambar 2.63. Perbandingan Inflasi Umum Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024.....	II - 153
Gambar 2.64. Jumlah Tower Telekomunikasi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 154
Gambar 2.65. Jumlah Kunjungan Perpustakaan (Orang) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023	II - 159
Gambar 2.66. Jumlah Judul Buku Koleksi Perpustakaan Kabupaten Aceh Besar	II - 159
Gambar 2.67. Jumlah Buku (Eksamplar) Yang Tersedia di Perpustakaan Aceh Besar Tahun 2019-2023	II - 160
Gambar 2.68. ASN Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II - 162
Gambar 2.69. ASN Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Golongan Tahun 2020-2024	II - 163
Gambar 2.70. Jumlah Perizinan Yang diberikan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023	II - 165
Gambar 2.71. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024	II - 170

Gambar 2.72	Jumlah Total Angka Kriminalitas di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2023.....	II - 178
Gambar 2.73.	Persentase Penyelesaian Perkara Jinayat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024	II - 180
Gambar 2.74.	Proporsi Realisasi Kelompok Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024.....	II - 202
Gambar 2.75.	Perkembangan Realisasi Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024	II - 209
Gambar 2.76.	Kontribusi Realisasi Kelompok Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024	II - 215
Gambar 2.77.	Kontribusi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Jenis Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024.....	II - 216
Gambar 2.78.	Kontribusi Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Jenis Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024	II - 223
Gambar 2.79.	Kontribusi Realisasi Belanja Transfer Berdasarkan Jenis Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024	II - 225
Gambar 2.80.	Pertumbuhan Realisasi Neraca Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024	II - 236
Gambar 2.81.	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2030	II - 244
Gambar 2.82.	Proyeksi Belanja Kabupaten Aceh Besar tahun 2025-2030.....	II - 250
Gambar 2.83.	Proyeksi Berdasarkan Kelompok Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2030.....	II - 251
Gambar 2.84.	Perbandingan IRBI Kabupaten Aceh Besar Dan Aceh Tahun 2020-2024.....	II - 261
Gambar 2.85.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Periode Tahun 2020 – 2024	II - 263
Gambar 2.86.	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional (Ketimpangan Pendapatan) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024 ..	II - 265
Gambar 2.87.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II - 266
Gambar 2.88.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024	II - 271

Gambar 2.89. Status pekerjaan penduduk di Kabupaten Aceh Besar	II - 276
Gambar 2.90. PDRB Per Kapita Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024.....	II - 277
Gambar 2.91. TPAK Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024	II - 278
Gambar 2.92. Luas Lahan Sawah di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023	II - 279
Gambar 2.93. Produksi Padi di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota (ribu ton GKG), 2023	II - 279
Gambar 2.94. Produksi Padi Per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023	II - 280
Gambar 2.95. .Produktivitas, Produksi, Luas Panen dan Luas Tanam Padi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023	II - 283
Gambar 2.96. Perbandingan Produksi Padi Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tahun 2018-2023.....	II - 284
Gambar 2.97. Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	II - 284
Gambar 2.98. Indek Pemberdayaan Gender Nasional , Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024	II - 293
Gambar 2.99. Indek Ketimpangan Gender Nasional , Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024	II - 296
Gambar 2.100. Rata-rata Pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 – 2024	II - 302
Gambar 2.101. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Nasional, Aceh dan Kabupaten Aceh Besar 2020 – 2024	II - 306
Gambar 2.102. Persentase Perbandingan ASN Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024	II - 307
Gambar 2.103. Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017-2023.....	II - 308.
Gambar 2.104. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Aceh Besar 2017-2023.....	II - 309
Gambar 2.105. Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2024.....	II - 310
Gambar 2.106. Perbandingan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan nasional Tahun 2018-2024.....	II - 311

Gambar 2.107.	Indek Pembangunan Manusia Nasional , Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024.....	II - 316
Gambar 2.108.	Rata – rata Lama Sekolah Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2020 – 2024.....	II - 317
Gambar 2.109.	Harapan Lama Sekolah Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024.....	II - 319
Gambar 2.110.	Usia Harapan Sekolah Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024.....	II - 320
Gambar 2.111.	Peringkat Angka Kematian Bayi (AKB)Kabupaten/Kota Tahun 2024...	II - 321

Lampiran :
Qanun Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2026
Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Besar
Tahun 2025-2029

SINGKATAN DAN AKRONIM

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
AKB	Angka Kematian Bayi
AKBa	Angka Kematian Balita
AKI	Angka Kematian Ibu
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASFR	<i>Age Specific Fertility Rate</i>
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

B

B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BASAJAN	Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Banda Aceh Sabang Jantho
BAZNAS	Badan Zakat Nasional
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BI	Bank Indonesia
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BLK	Balai Latihan Kerja
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BLUD	Balan Layanan Umum Daerah
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOR	<i>Bed Occupancy Rate</i>
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPBJ	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

BPPBM	Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
BTT	Belanja Tidak Terduga
BUMA	Badan Usaha Milik Aceh
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMG	Badan Usaha Milik Gampong
BUMN	Badan Usaha Milik Negara

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

C

CAT	Cekungan Air Tanah
CKG	Cek Kesehatan Gratis
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CPP	Cadangan Pangan Pemerintah
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>

D

D3TLH	Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
DAK	Dana Lokasi Khusus
DALKARHUTLA	Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
DAS	Daerah Aliran Sungai
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DI	Daerah Irigasi
DID	Dana Insentif Daerah
Disparpora	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Dishub	Dinas Perhubungan
DLHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DOKA	Dana Otonomi Khusus Aceh
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPMG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
DPRK	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
DPT	Difteri, Pertusis dan Tetanus

E

EBT	Energi Baru Terbarukan
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral

G

GAP	<i>Good Agriculture Practice</i>
GK	Garis Kemiskinan
GKG	Gabah Kering Giling
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	Garis Kemiskinan Non Makanan

H

Ha	Hektar
HAM	Hak Asasi Manusia
HGU	Hak Guna Usaha
HIV/AIDS	<i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
HL	Hutan Lindung
HLS	Harapan Lama Sekolah
HM	Hak Milik

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

HPH Hak Pegusahaan Hutan

I

iBANGGA Indeks Pembangunan Keluarga
IDG Indeks Pemberdayaan Gender
IDM Indeks Desa Membangun
IDSD Indeks Daya Saing Daerah
IEBI Indeks Ekonomi Biru Indonesia
IGRK Inventarisasi Gas Rumah Kaca
IID Indeks Inovasi Daerah
IKA Indeks Kualitas Air
IKD Indeks Ketahanan Daerah
IKD Indek Kinerja Daerah
IKG Indeks Ketimpangan Gender
IKK Ibukota Kecamatan
IKL Indeks Kualitas Lahan
IKLH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM Industri Kecil dan Menengah
IKP Indeks Ketahanan Pangan
IKS Indeks Kesejahteraan Sosial
IKU Indeks Kualitas Udara
IKU Indikator Kinerja Utama
IKUB Indeks Kerukunan Umat Beragama
IPA Indeks Perlindungan Anak
IPG Indeks Pembangunan Gender
IPHP Industri Pengolahan Hasil Pertanian
IPLM Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
IPM Indeks Pembangunan Manusia
IPP Indeks Profesionalisme Pegawai
IPPKU Indeks Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
IPS Indeks Pembangunan Statistik
IPTEK Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRB Indeks Risiko Bencana

J

JEP1 Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan
JKN Jaminan Kesehatan Nasional

K

Kab Kabupaten
KARHUTLA Kebakaran Hutan dan Lahan
KB Keluarga Berencana
KEK Kawasan Ekonomi Khusus

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Kemenhub	Kementerian Perhubungan
Kg	Kilogram
KI	Kawasan Industri
KIA	Kawasan Industri Aceh
KIR	Uji Kelayakan
KK	Kepala Keluarga
KLA	Kabupaten kota menuju layak anak
KLB	Kondisi Luar Biasa
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kop UKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KSA	Kawasan Strategis Aceh
KSA	Kawasan Suaka Alam
KSN	Kawasan Strategis Nasional
KSP	Kebijakan Satu Peta
KSPA	Kawasan Strategis Pariwisata Aceh
KSPP	Kawasan Sentra Produksi Pangan
KTD	Kehamilan Tidak Direncanakan

L

LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LKS	Lembaga Keuangan Syariah
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MAA	Majelis Adat Aceh
MCK	Mandi Cuci Kakus
MCP	Monitoring Centre For Prevention
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MINERBA	Mineral dan Batubara
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPU	Majelis Permusyawaratan Ulama

N

NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
NTN	Nilai Tukar Nelayan
NTP	Nilai Tukar Petani
NTPt	Nilai Tukar Peternakan

O

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OTSUS	Otonomi Khusus

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAP	Pajak Air Minum
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PD3I	Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
PDRB	Product Domestic Regional Bruto
Perpres	Peraturan Presiden
Perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHBS	Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
PIT	Penangkapa Ikan Terukur
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PKH	Program Keluarga Harapan
PKL	Pusat Kegiatan Lokal
PKSN	Pusat Kegiatan Strategis Nasional

PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMTB	Peran Pembentukan Modal Tetap Bruto
Pol WH	Polisi Wilayahul Hisbah
PON	Pekan Olah Raga Nasional
PPH	Pola Pangan Harapan
PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSU	Prasarana, Sarana, dan Utilitas
PUPR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RAD	Rencana Aksi Daerah
RAT	Rencana Aksi Tahunan

R

Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKT	Rencana Kerja Tahunan
RKU	Rencana Kegiatan Usaha
RLH	Rumah Layak Huni
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
ROA	<i>Return On Asset</i>
Rp	Rupiah

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

RPJMA	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPA	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUZA	Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin
RT	Rumah Tangga
RTH	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah

S

Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
Setda	Sekretariat Daerah
SIDa	Sistem Inovasi Daerah
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SNI	Standar Nasional Indonesia
SPAL	Sistem Pengolahan Air Limbah
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SRAP	Strategi Rencana Aksi Pengelolaan

T

TBC	Tuberkulosis
TBM	Tanaman Belum Menghasilkan
TFR	<i>Total Fertility Rate</i>
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TJLSP	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TM	Tanaman Menghasilkan
TP2DD	Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah
TPA	Tempat Pemrosesan Akhir
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TR	Tanaman Rusak

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

TTC	Tuna, Tongkol dan Cakalang

U

UHH	Usia Harapan Hidup
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
UPLM	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
USK	Universitas Syiah Kuala
USPPS	Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
UTP	Usaha Pertanian Perorangan
UU	Undang-Undang
UUPA	Undang-Undang Pemerintahan Aceh

W

WBTB	Warisan Budaya Tak Benda Budaya
WMK	Wilayah Manajemen Kebakaran
WS	Wilayah Sungai
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Z

ZISWAF	Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Aceh Besar akan memasuki periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Periode ini merupakan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Periode pertama merupakan tahapan strategis yang menentukan efektivitas pembangunan pada tahap-tahap berikutnya hingga ikut mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 memiliki tema pembangunan berupa penguatan fondasi transformasi, Penguatan modal dasar ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan Kesehatan, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah pada berbagai sektor; pengembangan pusat-pusat perekonomian baru serta penguatan riset dan inovasi; peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola konservasi lingkungan, sumber daya alam, dan kebencanaan; Pengembangan sinergi dan akuntabilitas pemerintahan; dan peningkatan fungsi pusat-pusat pelayanan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Periode ini memiliki agenda penting untuk memperkuat fondasi bagi transformasi pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya intergrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah pusat dan daerah. Antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara perencanaan antar pusat dan daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yang dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Bupati dan wakil Bupati Aceh Besar periode tahun 2025-2029 telah dilatih pada tanggal 12 Februari 2025. Atas dasar ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2013 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Peraturan Daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal sesuai dengan amanat kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal sesuai dengan amanat pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045. Agar pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal, maka RPJMD harus pula memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan spasial yang telah digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Setiap perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah, sehingga dapat tepat sasaran dan tujuan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyusun rancangan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan RPJMD. Pemerintah daerah diwajibkan untuk dokumen RPJMD yang memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah.

Meskipun demikian, Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan untuk memperkuat fondasi transformasi. Tantangan memperkuat daya saing sumber daya manusia (capaian IPM tahun 2024 sebesar 76,57), tantangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 13,21 persen), hingga menyiapkan daya saing dan inovasi

daerah yang relatif masih rendah. Berbagai tantangan tersebut perlu mendapat respon yang tepat di dalam pembangunan jangka menengah.



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD

Dokumen ini merupakan instrumen untuk merancang perencanaan pembangunan jangka menengah yang sesuai kebutuhan daerah dan sinergis untuk merespon isu global, nasional dan Provinsi Aceh. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan kerangka berpikir dan metode ilmiah. Dokumen memberikan gambaran kondisi daerah yang komprehensif yang dijadikan sebagai basis untuk merumuskan pemetaan masalah dan isu strategis. Rumusan pemetaan masalah dan isu-isu strategis yang diperkuat dengan analisis lingkungan strategis, kemudian dijadikan dasar perumusan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan di dalam dokumen rancangan terdiri dari rekomendasi kinerja dan kerja.

RPJPD yang diperkuat dengan dokumen RPJMD merupakan acuan penting bagi Calon Kepala Daerah untuk menyusun visi, misi dan program. Dengan demikian diharapkan terdapat keterpaduan antara pendekatan perencanaan teknokratik dan politis, *top-down* dan politik, serta tahap berikutnya akan dipadukan dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up. Keterpaduan berbagai pendekatan perencanaan tersebut akan membentuk perencanaan jangka menengah yang berkualitas sebagai instrumen penting untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Besar **“Aceh Besar Maju, Sejahtera, Islami dan Berkelanjutan”** serta visi pencapaian Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2029 yaitu **“Aceh Besar Bermarwah dan Bermartabat, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bersyariah dalam Bingkai Ahlussunnah wal Jama'ah”**.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah (Drt) Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
15. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
28. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
29. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
30. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
 39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2049;
 40. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Lembaran Aceh Nomor 62);
 41. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

42. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
43. Qanun Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025 – 2045;
44. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
45. Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh tahun 2013 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 41);
46. Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang penyusunan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
47. Qanun Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dokumen Rancangan RPJMD sebagai bagian dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional menganut sistem yang terintegrasi antara pusat dan daerah, serta antar jangka waktu perencanaan. Hal ini sebagaimana definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

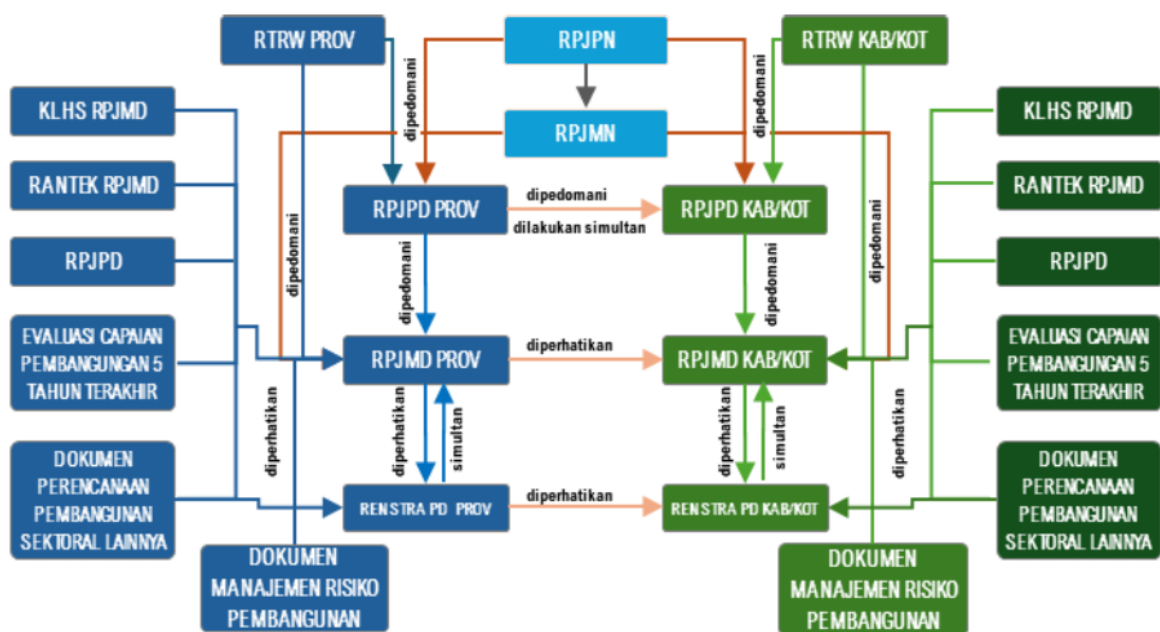
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 mengamanahkan bahwa Daerah sesuai kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dikoordinasikan, disinergikan dan

diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Sesuai ketentuan pasal 41, Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai salah satu dari rangkaian persiapan Penyusunan RPJMD adalah penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Aceh Besar, RTRW Kabupaten Aceh Besar, dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Aceh, dan RTRW Kabupaten/Kota lain disekitarnya agar tercipta sinergitas perencanaan dalam pembangunan kewilayahan, serta kebijakan pemanfaatan ruang.

Permendagri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rancangan Teknokratik RPJMD juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS Rancangan Teknokratik dipakai sebagai dasar penentuan permasalahan dan isu strategis, yang merupakan identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dokumen RPJMD sebagai satu kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan demikian harus membangun keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Substansi keterkaitan antar dokumen perencanaan sebagai berikut:



Gambar 1.2. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Aceh Besar dengan RPJPD Kabupaten Aceh Besar

Rancangan RPJMD harus membangun keterkaitan dengan RPJPD Kabupaten Aceh Besar tahun 2025-2045. Rancangan RPJMD ini merupakan tahapan pertama untuk memulai agenda transformasi pembangunan untuk mencapai visi Kabupaten Aceh Besar **“Aceh Besar Maju, Sejahtera, Islami dan Berkelanjutan”** Tahapan pertama memiliki tema pembangunan berupa **Penguatan Fondasi Transformasi**.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini akan menelaah isu strategis jangka panjang sebagai acuan untuk merumuskan isu strategis jangka menengah. Substansi berikutnya dari RPJPD yang ditelaah berupa arah kebijakan periode pertama setiap misi, rumusan arah kebijakan transformasi dan game changers, serta sasaran visi, sasaran pokok dan indikator. Telaah berbagai muatan RPJPD tersebut dalam rangka merumuskan indikasi prioritas pembangunan periode pertama dan rekomendasi kebijakan di dalam dokumen RPJMD. Adanya rumusan rekomendasi kebijakan yang salah satunya merupakan prioritas tahap pertama dari RPJPD, diharapkan semakin memberikan gambaran yang jelas bagi Kepala Daerah untuk menjalankan visi, misi dan program prioritas dalam waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan Rancangan RPJMN (RPJMN tahun 2025 – 2029)

Penyusunan Rancangan RPJMD memiliki kesesuaian waktu dengan Rancangan RPJMN. Kondisi ini merupakan modal penting untuk membangun keterkaitan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan nasional. Berbagai muatan Rancangan RPJMN yang ditelaah dan diacu yaitu isu strategis jangka menengah nasional, tema pembangunan Pulau Sumatera dan Provinsi Aceh, target kinerja makro serta indikasi intervensi pembangunan yang akan dijalankan.

Kabupaten Aceh Besar yang memiliki visi jangka panjang Aceh Besar Maju, Sejahtera, Islami dan Berkelanjutan, peran penting untuk mewujudkan tema pembangunan jangka menengah Aceh di dalam RPJMN, yaitu “Serambi Barat Indonesia yang Mengedepankan Pengembangan *Agriculture* dan Agroindustri, Ekonomi Hijau dan Syariah, serta Menjadi Rujukan Pendidikan Islam global”.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Aceh Besar dengan RPJMD Aceh

Penyusunan rancangan RPJMD harus membangun keterkaitan dengan rencana pembangunan Aceh. Rancangan kinerja dan agenda pembangunan yang akan dijalankan oleh Aceh akan ditopang oleh Kabupaten Aceh Besar. Beberapa substansi RPJPD Aceh yang ditelaah dan diacu, yaitu identifikasi kondisi Kabupaten Aceh Besar di dalam konteks pembangunan provinsi Aceh, isu strategis, visi, misi, dan arah kebijakan periode pertama. Kabupaten Aceh Besar dalam konteks pembangunan Provinsi Aceh ditempatkan sebagai salah satu lokus pengembangan komoditas unggulan berbasis pertanian, perhutanan dan perikanan yang menjadi sentra produksi pangan. Arah pembangunan tersebut selaras dan akan dikembangkan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Besar sebagai sentra pertanian. Namun di sisi lain, Kabupaten Aceh Besar juga ditempatkan sebagai salah satu kantong kemiskinan yang memerlukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar

Rancangan RPJMD harus membangun keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Atau RTRW. Adanya keterkaitan antara kedua dokumen tersebut

agar rencana pembangunan makro yang menaungi seluruh sektor selaras dengan tujuan, kebijakan, strategi dan indikasi program penataan ruang. Keterkaitan tersebut juga menjadi salah satu instrumen untuk menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dokumen rancangan ini akan menelaah RTRW Aceh dan RTRW Kabupaten Aceh Besar. Tujuan Penataan Aceh yaitu mewujudkan ruang wilayah Aceh yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan serta pengelolaan sumber daya pesisir dan daerah terpencil dan daerah kepulauan. Adapun tujuan Penataan Ruang Aceh Besar, yaitu “mewujudkan ruang Kabupaten Aceh Besar yang mampu mempertahankan sektor pertanian, mendukung pengembangan pariwisata, perindustrian pertambangan dan energi yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan”. Konsep kunci yang termuat di dalam tujuan RTRW Aceh dan Kabupaten Aceh Besar tersebut memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan jangka panjang Aceh Besar terutama melalui pengembangan perekonomian daerah berbasis agro.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengertian KLHS RPJMD di dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yaitu analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Muatan hasil analisis KLHS antara lain berupa capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Aceh Besar, rumusan isu-isu strategis dan skenario pembangunan akan ditelaah dan diintegrasikan ke dalam dokumen Rancangan RPJMD. Integrasi ini dalam rangka mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Keselarasan antara dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah perlu diperkuat mulai tahap persiapan. Oleh karena itu, Rancangan RPJMD merupakan pedoman penting bagi Perangkat Daerah untuk

persiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikutnya, ketika telah ditetapkan, RPJMD dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan. Proses penjabaran yang selaras antara RPJMD dengan RKPD dan Renja menjadi modal penting bagi keselarasan antara perencanaan jangka menengah dengan penganggaran, sehingga terwujud penganggaran yang berorientasi kinerja.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud Penyusunan RPJMD Aceh Besar Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Aceh Besar untuk lima tahun, yang memuat visi, misi kepala daerah, tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Aceh Besar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan kabupaten yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Aceh Besar;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar dengan daerah sekitarnya, Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dengan prioritas yang terencana.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2029 disusun dengan menggunakan sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang menyusun dokumen; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029; serta sistematika penulisan (Pasal 20 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Mengemukakan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Aceh Besar saat ini yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah dan Pelayanan Umum. Serta menggambarkan kondisi keuangan daerah periode 5 tahun sebelumnya dan proyeksi keuangan daerah periode 2025 – 2029, dan menggambarkan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Aceh Besar.

BAB III Visi , Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029.

BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam Bab ini memuat paling sedikit Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah (IKU, IKD dan IKK) tahun 2025 – 2029.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

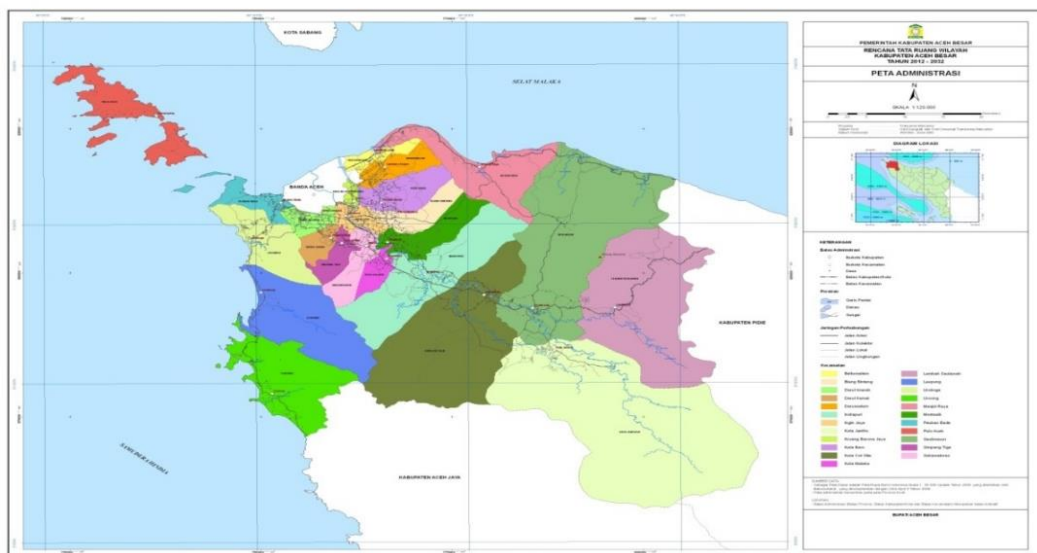
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Gambaran umum kondisi daerah digambarkan dalam beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan Kabupaten Aceh Besar sampai dengan tahun 2029. Dengan gambaran ini dapat diformulasikan kebijakan pembangunan daerah untuk mengoptimalkan capaian keberhasilan pembangunan Tahun 2025-2029.

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi. Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5°3'1,2" - 5°45'9,007" Lintang Utara dan 95°55'43,6" - 94°59'50,13" Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Aceh Besar memiliki batas-batas wilayah yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia sebagaimana di sajikan pada Gambar 2.1.



Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km². Sebagian besar merupakan wilayah daratan, dan hanya sebagian kecil berupa kepulauan. Berdasarkan posisi letak, sekitar 10 persen wilayah gampong merupakan daerah pesisir. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Wilayah kecamatan yang paling luas adalah Seulimeum yang meliputi 404,35 km² atau lebih dari 13,93 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Krueng Barona Jaya, luasnya 6,96 Km² atau hanya 0,24 `persen dari luas Kabupaten Aceh Besar. Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh berjarak 106 Km dengan pusat Ibukota Kabupaten (Kota Jantho).

Kabupaten Aceh Besar juga memiliki areal berupa Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung memiliki luas 103.822,02 Ha, terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 69.624,17 Ha, kawasan perlindungan setempat pantai 2.392,36 Ha, kawasan perlindungan sempadan sungai 4.768 Ha, kawasan sekitar waduk 27,64 Ha, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 25.507,41 Ha. Hutan Lindung merupakan area terluas, yaitu mencapai 69.624,17 Ha. yang tersebar di beberapa kecamatan. Disusul Taman Wisata Alam (TWA) pinus Aceh yang berlokasi di Kecamatan Kota Jantho seluas 2.556,02 Ha dan TWA Kuta Malaka seluas 1.544,08 Ha serta Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan seluas 6.122,85 Ha. Sedangkan Kawasan Budidaya yang merupakan Hutan Produksi Tetap seluas 67.998,71 Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 4.368,52 Ha dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) seluas 1.866,95 Ha.

Dari keseluruhan luas lahan yang ada, sekitar 136.519,80 Ha merupakan kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan erosi, banjir, tanah longsor, gunung berapi, dan rawan tsunami. Profil Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1	Lhoong	Lhoong	149,03	5,13
2	Lhoknga	Lhoknga	87,95	3,03
3	Leupung	Leupung	169,15	5,83
4	Indrapuri	Indrapuri	197,04	6,79

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
5	Kuta Cot Glie	Lampakuk	332,25	11,44
6	Seulimeum	Seulimeum	404,35	13,93
7	Kota Jantho	Kota Jantho	593	20,42
8	Lembah Seulawah	Lamtamot	319,6	11,01
9	Mesjid Raya	Krueng Raya	129,93	4,47
10	Darussalam	Lambaro Angan	38,43	1,32
11	Baitussalam	Lambada Lhok	20,84	0,72
12	Kuta Baro	Peukan Ateuk	61,07	2,1
13	Montasik	Montasik	59,73	2,06
14	Ingin Jaya	Lambaro	24,34	0,84
15	Krueng Barona Jaya	Cot Iri	6,96	0,24
16	Sukamakmur	Sibreh	43,45	1,5
17	Kuta Malaka	Samahani	22,82	0,79
18	Simpang Tiga	Krueng Mak	27,59	0,95
19	Darul Imarah	Lampeuneurut	24,35	0,84
20	Darul Kamal	Peukan Biluy	23,04	0,79
21	Peukan Bada	Peukan Bada	36,25	1,25
22	Pulo Aceh	Lampuyang	90,56	3,12
23	Blang Bintang	Cot Meuraja	41,76	1,44
Jumlah			2.903,49	100

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

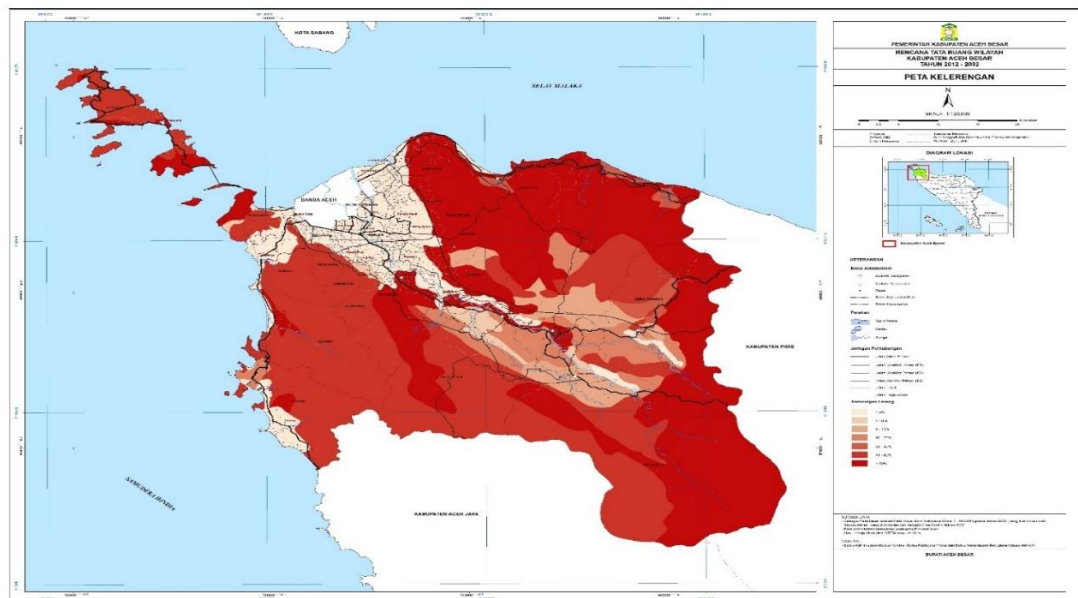
A. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Aceh Besar relatif beragam, yakni dataran rendah (<2%), berombak (2-8 %), bergelombang (9-15 %), berbukit-bukit (16-40 %), dan bergunung (>41 %), dan sebagiannya wilayah kepulauan. Daerah dataran umumnya terdapat di wilayah Pesisir Timur dan Utara serta Pesisir Barat. Keadaan lereng sangat bervariasi, dari bentuk dataran sampai curam. Kabupaten Aceh Besar memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi atas kelas kelerengan yaitu : < 2%, 2-8%, 9-15%, 16-25%, 26-40%, 41-60% dan >60%. Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, tampak didominasi oleh lahan berkelerengan <60% dengan luasan yang mencapai 118.888,57 Ha atau sebesar 40,81% dari total luas wilayah kabupaten yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2.
Kondisi Kelerengan di Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan	Klas Kelerengan								Total Ha
	Curam 26 - 40%	Curam Sedang 16 - 25%	Datar < 2%	Ekstra Curam	Ekstra Curam > 60%	Landai 9 - 15%	Sangat curam 41 - 60%	Sangat Landai 2 - 8%	
Baitussalam			1416,32	667,77					2084,09
Blang Bintang			1786,82		2388,68				4175,5
Darul Imarah			1884,85				549,84		2434,69
Darul Kamal			491,18				1777,09	36,66	2304,93
Darussalam			1659,79		2183,25				3843,04
Indrapuri		699,96	1616,68		11466,75	900,75	4651,26	368,47	19703,87
Ingin Jaya			2433,51						2433,51
Kota Jantho		856,15	730,12		32050,15	4738,99	20742,47	182,28	59300,16
Krueng Barona Jaya			696,13						696,13
Kuta Baro			3218,07		2888,99				6107,06
Kuta Cot Glie		3909,09	661,73		6547,57	1073,7	18783,71	2249,64	33225,44
Kuta Malaka			420,46		1662,53		171,22	27,45	2281,66
Lembah Seulawah	2132,67	4344,3	737,04		17338,38	1618,63	5788,99		31960,01
Leupung		23,04	490,12		851,79		15550,45		16915,4
Lhoknga			2724,78		137,97		5693,58	238,29	8794,62
Lhoong		962,72	2860,55		589,06		10490,35		14902,68
Mesjid Raya	632,56	19,08	861,34		11480,33				12993,31
Montasik			1897,79		3541,47	534,07			5973,33
Peukan Bada			1216,79		1339,24		1069,01		3625,04
Pulo Aceh					2365,01		6690,71		9055,72
Seulimeum	1440,65	6671,25	350,62		20990,75	4496,37	6169,33	316,49	40435,46
Simpang Tiga			528,02				1951,22	280,56	2759,8
Sukamakmur			1420,44		31		2636,22	257,64	4345,3
T o t a l	4205,88	17485,59	30103,15	667,77	117852,92	13362,51	102715,45	3957,48	290350,75

Sumber data : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032



Sumber : data : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Aceh Besar

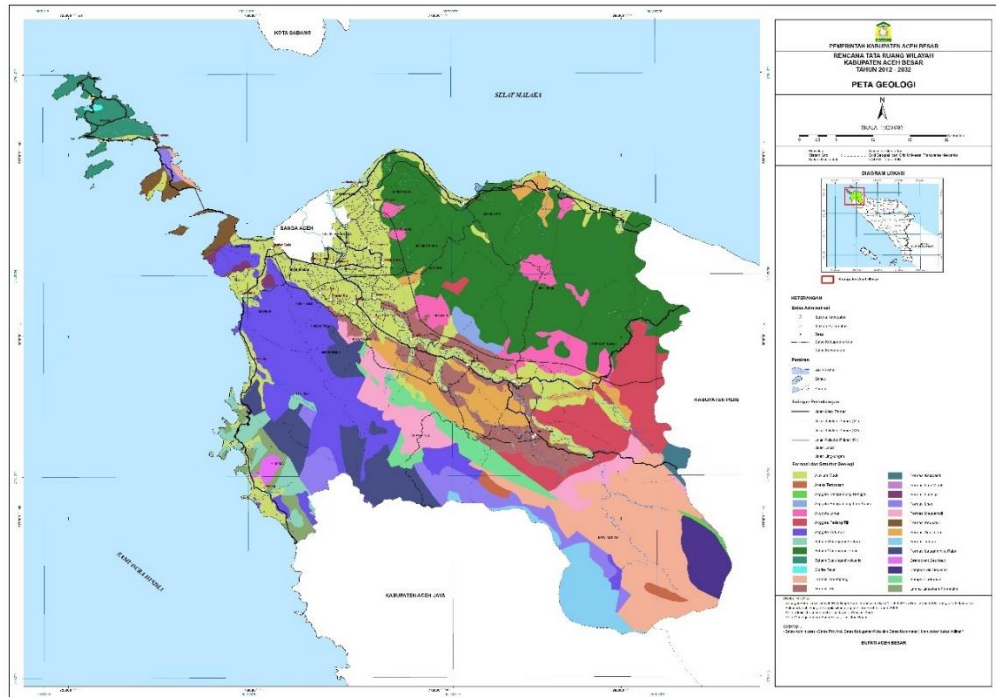
B. Kondisi Geologi

Indonesia terletak di antara pertemuan 4 lempeng bumi besar, yaitu: Lempeng Hindia dan Australia, Lempeng Eurasia, serta Lempeng Pacific. Lempeng

Hindia dan Australia bergerak ke utara menumbuk Lempeng Eurasia dengan kecepatan 50 – 70 mm/ tahun. Lempeng Eurasia bergerak sangat lambat ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4 cm/tahun. Zona tumbukan dua lempeng ini adalah di sepanjang palung laut Sumatra – Jawa – Bali – Lombok. Lempeng Pasific bergerak dengan kecepatan 120 mm/ tahun ke arah barat-barat daya menabrak tepian utara dari Pulau Papua New Guinea – Irian Jaya, dan terus ke arah barat sampai ke daerah tepian timur Sulawesi. Pulau Sumatera merupakan bagian tepi barat daya-selatan dari lempeng benua Eurasia yang berinteraksi dengan lempeng Samudera Hindia-Australia. Gerakan lempeng tersebut telah menghasilkan bentuk-bentuk gabungan penunjaman (subduction) dan sesar mendatar dekstral.

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm per tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Berdasarkan struktur geologi Sumatera, daerah bagian barat mulai dari daerah sekitar Teluk Semangka (Lampung) sepanjang Pegunungan Bukit Barisan ke arah Barat Laut dan Utara sampai ke Aceh, merupakan daerah labil atau rawan gempa dan diduga dapat menimbulkan gempa-gempa tektonik yang cukup membahayakan. Pada jalur tersebut dijumpai banyak patahan-patahan. Salah satu diantaranya yang dapat dilihat di Kabupaten Aceh Besar adalah patahan turun (slenk) Lembah Krueng Aceh, yang secara fisik (struktural), menandakan bahwa wilayah ini mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa. Struktur geologi ini berkelanjutan ke dasar laut dan di ujung yang lain terlihat sampai ke Kota Jantho.

Penunjaman yang terjadi di bawah Pulau Sumatera juga mengakibatkan terbentuknya jalur busur magma yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Penunjaman yang terbentuk secara berkala telah dilepaskan melalui sesar transform yang sejajar dengan tepian lempeng dan terpusat di sepanjang Sistem Sesar Sumatera yang membentang sepanjang Sumatera. Sistem Sesar Sumatera (*Sumatera Fault System*) yang berarah Barat Laut-Tenggara, membentang mulai dari Pulau Weh di Aceh sampai Teluk Semangko di Lampung. Sistem Sesar Sumatera ini paling sedikit tersusun oleh 8 segmen sesar berarah orientasi Barat Laut-Tenggara dengan pergerakan yang mendatar (dextral). Patahan Lokop - Kutacane, Patahan Blangkejeren - Mamas, Patahan Kla - Alas, Patahan Reunget - Blangkejeren, Patahan Anu - Batee, Patahan Samalanga - Sipopoh, Patahan Banda Aceh - Anu, Patahan Lamteuba – Baro, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3.

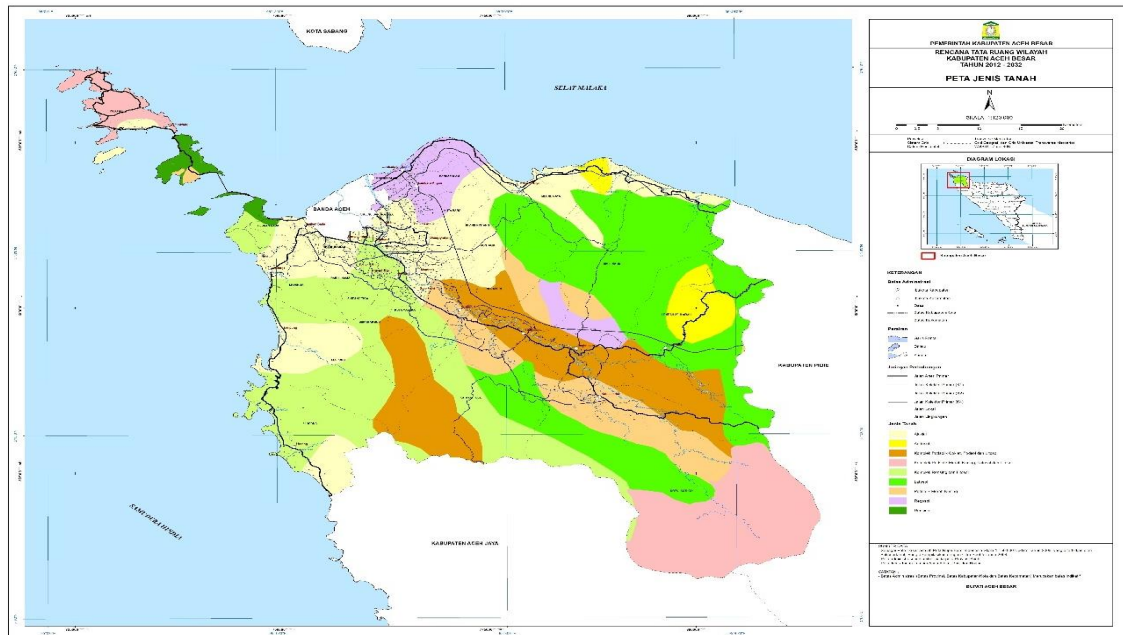


Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2032

Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Aceh Besar

C. Jenis Tanah

Wilayah Kabupaten Aceh Besar terdapat 8 (delapan) jenis tanah : (1) Aluvial, (2) Andosol, (3) Komplek Padsolik Coklat, Padsol, dan Litosol, (4) Komplek Padsolik Merah Kuning (PMK) dan Litosol, (4) kompleks Padsolik Merah Kuning (PMK) dan Litosol, (5) Komplek Renzina dan Litosol, (6) Latosol, (7) Padsolik Merah Kuning (PMK), dan (8) Regosol, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2032

Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Besar

D. Kondisi Hidrologi

Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 -2032, bahwa kondisi hidrologi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Aceh Besar mempunyai peranan yang cukup penting dalam mendukung pengembangan wilayah. Hidrologi ini terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah, dengan penjelasan sebagai berikut:

D.1. Air Permukaan

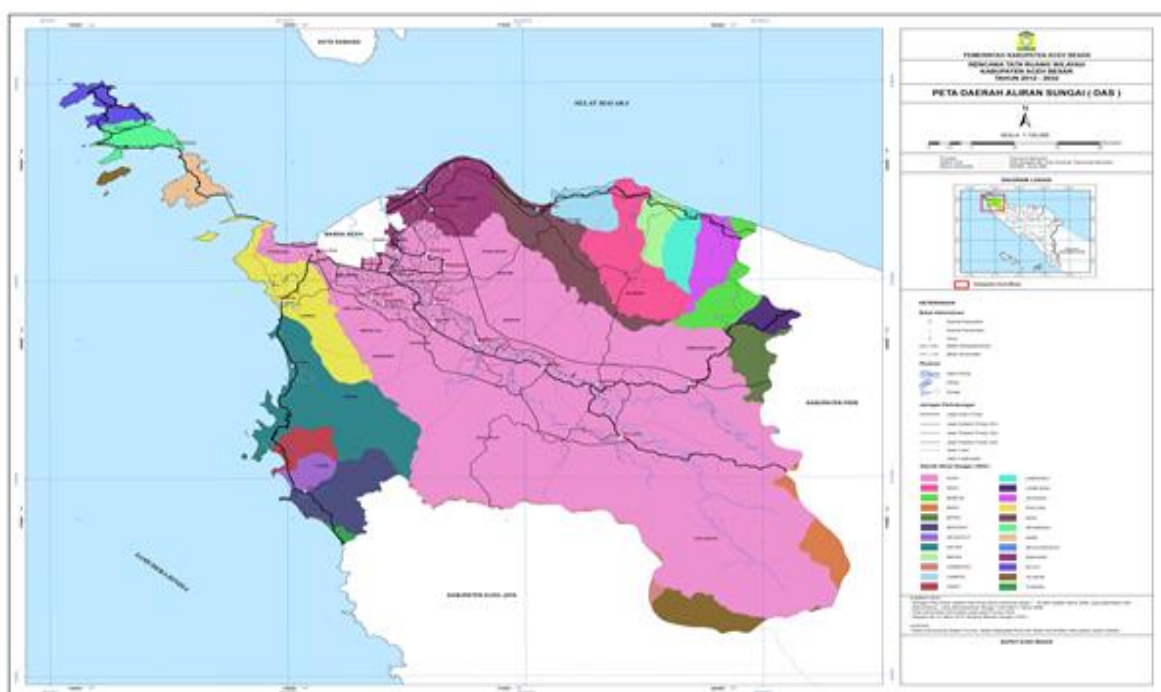
Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya.

D.1.1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Aceh Besar relatif cukup memadai dikarenakan terdapat sejumlah aliran sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar dibagi 2 (dua) yaitu :

- 1) Wilayah Sungai Aceh-Meureudu yang merupakan wilayah sungai strategis nasional, dengan luas total 274.858,70 ha. Daerah Aliran sungai ini terdiri dari:
 - a. Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh seluas 172.328,07 Ha, meliputi Kecamatan Jantho, Lembah Seulawah, Seulimuem, Kuta Cot Glie, Montasik, Kuta Malaka, Sukamakmur, Blang Bintang, Peukan Bada, Simpang Tiga, Darul Imarah, Darul Kamal, Ingin Jaya, Kuta Baro, Sebagian Kecamatan Krueng Barona Jaya dan sebagian Kecamatan Baitussalam.
 - b. DAS Krueng Batee seluas 4.2016,31 Ha. Meliputi sebagian Kecamatan Lembah Seulawah;
 - c. DAS Krueng Laweung seluas 2.007,38 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lembah Seulawah;
 - d. DAS Krueng Babeu seluas 5.051,20 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lembah Seulawah dan Sebagian Kecamatan Seulimeum.
 - e. DAS Krueng Leungah seluas 4.898.18 Ha, meliputi Kecamatan Seulimeum;
 - f. DAS Krueng Lampanah seluas 3.521,77 Ha, meliputi Kecamatan Seulimuem;
 - g. DAS Krueng le Masin seluas 3.236,09 Ha, meliputi Kecamatan Seulimuem;
 - h. DAS Krueng Areu Seluas 11.576.86 Ha, meliputi Kecamatan Seulimuem dan sebagian Kecamatan Mesjid Raya;
 - i. DAS Krueng Lambok seluas 3.821,35 Hs, meliputi Kecamatan Mesjid Raya dan sebagian Kecamatan Seulimeum;
 - j. DAS Krueng Raya seluas 10.090,18 Ha, meliputi Kecamatan Mesjid Raya dan Seulimeum;
 - k. DAS Krueng Sibayang seluas 9.777,14 Ha, meliputi Kecamatan Baitussalam, Darussalam, sebagian Kecamatan Kuta Baro dan Krueng Barona Jaya;
 - l. DAS Krueng Pincung seluas 11.058,98 Ha, meliputi Kecamatan Lhoknga, sebagian Kecamatan Peukan Bada dan Kecamatan Leupung;
 - m. DAS Krueng Geupe seluas 18.106,04 Ha meliputi Kecamatan Leupung dan Sebagian Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Lhoong;
 - n. DAS Krueng Lamih seluas 2.808,23 Ha, meliputi Kecamatan Lhoong;
 - o. DAS Krueng Seulenggoh seluas 17.60 Ha, meliputi Kecamatan Lembah Seulawah;
 - p. DAS Krueng Baro seluas 3.287,50 Ha meliputi Kecamatan Kota Jantho;

- q. DAS Krueng Reundrah seluas 3.076,87 Ha, meliputi Kecamatan Pulo Aceh;
 - r. DAS Krueng Same seluas 2.735,16 Ha, meliputi Kecamatan Pulo Aceh;
 - s. DAS Krueng Sotoy seluas 2.782,08 Ha, meliputi Kecamatan Pulo Aceh;
- 2) Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso yang merupakan wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan total luas 15.492,07 Ha, dan terdiri dari
- a. DAS Krueng Teunom seluas 4.573,69 Ha Meliputi Kecamatan Kuta Jantho;
 - b. DAS Krueng Geunteut seluas 2.173,87 Ha meliputi Kecamatan Lhoong;
 - c. DAS Krueng Bentaro seluas 7.294,77 Ha, meliputi Kecamatan Lhoong;
 - d. DAS Krueng Tunong seluas 422.64 Ha, meliputi Kecamatan Lhoong; dan
 - e. DAS Krueng Lambeso seluas 1.027,11 Ha, meliputi Kecamatan Kuta Cot Glie dan Kecamatan Kuta Jantho.



Sumber data: Peta Data RTRW Kab. Aceh Besar 2013-2032

Gambar 2.5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Aceh Besar

Potensi sumber daya air berdasarkan wilayah sungai yang ada di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Besar

No	Wilayah Sungai / DAS	Luas (Ha)
Wilayah Sungai Aceh – Meureudu		274.858,70
1	DAS Krueng Aceh	172.328,07
2	DAS Krueng Batee	4.216,31

No	Wilayah Sungai / DAS	Luas (Ha)
3	DAS Krueng Laweung	2.007,38
4	DAS Krueng Babeue	5.051,20
5	DAS Krueng Areu	11.576,86
6	DAS Krueng Leungah	4.898,18
7	DAS Krueng Raya	10.090,18
8	DAS Krueng Lampanah	3.521,77
9	DAS Krueng Lambok	3.821,35
10	DAS Krueng Seuleunggoh	17,60
11	DAS Krueng Teunom	461,61
12	DAS Krueng Baro	3.287,60
13	DAS Krueng Lamih	2.808,23
14	DAS Krueng Pincung	11.058,98
15	DAS Krueng Geupe	18.106,04
16	DAS Krueng Reundrah	3.076,87
18	DAS Krueng Sibayang	9.777,14
19	DAS Krueng Same	2.735,16
20	DAS Krueng Sotoy	2.782,08
Wilayah Sungai Teunom – Lambeuso		15.492,07
1	DAS Krueng Teunom	4.573,69
2	DAS Krueng Geunteut	2.173,87
3	DAS Krueng Tunong	422,64
4	DAS Krueng Lambeuso	1.027,11
5	DAS Krueng Bentaro	7.294,27

Sumber : RTRWK Aceh Besar, 2012 – 2032

Krueng Aceh memisahkan kompleks vulkan dan teras marin dengan kompleks pegunungan/perbukitan kapur yang mengalir ke arah barat sampai ke daerah sekitar Banda Aceh yang berupa dataran, teras marin, dataran aluvial dan dataran marin.

Disamping sungai, terdapat pula waduk dan embung yang merupakan fasilitas pendukung bangunan pengelolaan sumber daya air. Waduk yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar adalah Waduk Keliling seluas 259,95 Ha yang berada di Gampong Bak Sukon di Kecamatan Kuta Cot Glie dan Waduk Seulimeum yang berada di Gampong Alue Gintung di Kecamatan Seulimeum.

D.1.2. Embung, Waduk dan Tampungan Air Lainnya

Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan/atau pasangan batu yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan. Dalam skala lebih besar, bentuk tampungannya dinamakan waduk. Berdasarkan kegunaannya, waduk bisa dikategorikan dalam 2 jenis yaitu waduk single purpose dan waduk multi purpose. Propinsi Aceh mempunyai potensi–potensi tampungan air yang dapat dikembangkan dan diberdayakan. Potensi–potensi tersebut diantaranya dapat

disebutkan adalah Waduk Keliling di kecamatan Indrapuri Embung yang berlokasi di kecamatan Peukan Bada dan Embung Lambirah di kecamatan Sukamakmur.

D.1.3. Air Tanah

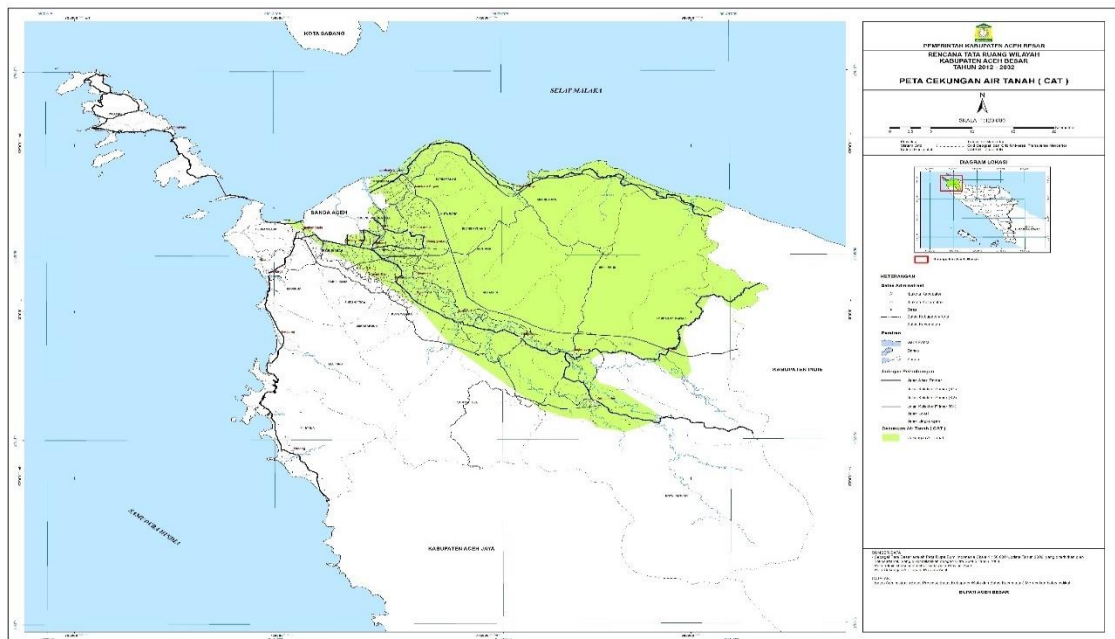
Air bawah tanah merupakan sumber daya alam yang terbarukan (renewal natural resources), dan memainkan peranan penting di dalam penyediaan pasokan kebutuhan air bagi berbagai keperluan. Mengingat peranan air bawah tanah yang semakin vital, maka pemanfaatan air bawah tanah harus juga memperhatikan keseimbangan dan pelestarian sumber daya itu sendiri. Dalam UU Sumber Daya Air daerah aliran air tanah disebut Cekungan Air Tanah (CAT) atau groundwater basin. Definisi CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Dengan mengacu kepada Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009, pada halaman lembar Aceh, dapat diidentifikasi ada 1 (satu) Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh Besar dengan luasan mencapai sekitar 125.200 Ha, yaitu jumlah Imbuhan Air Tanah bebas sebesar 375 juta m³/tahun dan jumlah air tertekan sebesar 72 juta m³/tahun. Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud di atas lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.4.
Cekungan Air Tanah di Kabupaten Aceh Besar

NO	KECAMATAN	LUAS HA	NO	KECAMATAN	LUAS HA
1	Peukan Bada	309	11	Blang Bintang	4.189
2	Darul Imarah	1.228	12	Kuta Baro	6.128
3	Ingin jaya	2.442	13	Darussalam	3.856
4	Krueng Barona Jaya	698,50	14	Baitussalam	2.005
5	Darul Kamal	223,70	15	Mesjid Raya	12.820
6	Simpang Tiga	402,80	16	Seulimeum	38.790
7	Suka Makmur	1.333	17	Lembah Seulawah	14.110
8	Kuta Malaka	561,65	18	Kuta Cotglie	12.020
9	Indrapuri	12.330	19	Kota Jantho	5.725
10	Montasik	5.993	T O T A L		125.165

Sumber data: RTRWK Aceh Besar, 2012 – 2032

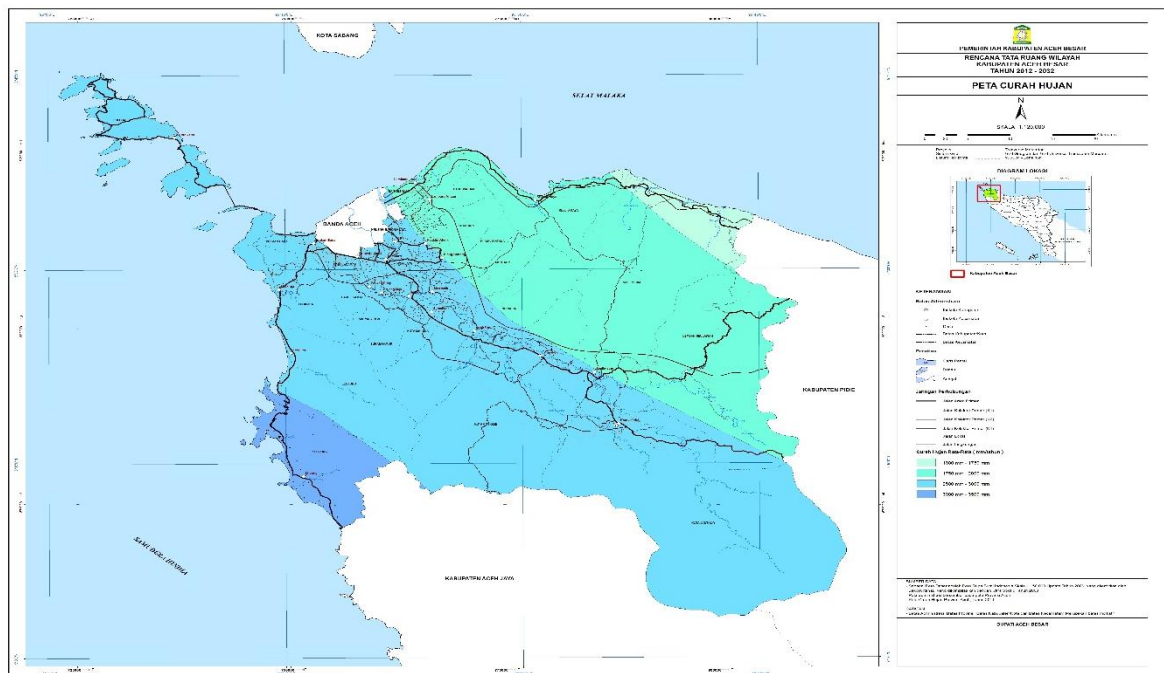


Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2013 – 2032

Gambar 2.6. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Aceh Besar

E. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Aceh Besar terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini tergolong beriklim tropis. Menurut data yang dikutip dari Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2025 bahwa pada tahun 2024 suhu udara rata-rata berkisar antara 26.6°C – 29.97°C.



Sumber data : Peta Data RTRW Kab. Aceh Besar 2013-2032

Gambar 2.7. Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Besar

Tabel 2.5.
Keadaan Curah Hujan Rata-rata (mm) dan Hari Hujan Rata-rata Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024

Curah Hujan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	88	8	8	395.4	603.7	243
Ferbruari	106	119.9	119.9	420.2	355.9	29.5
Maret	76	214.7	214.7	336.5	235.6	67
April	116	333.1	333.1	69.8	59.8	142.5
Mai	81	660.9	660.9	153.0	64.5	174.2
Juni	42	96.1	96.1	296.4	72.3	20.8
Juli	82	202.2	202.2	154.9	111.6	31
Agustus	370	102.4	102.4	193.9	53.7	215.8
September	172	233.7	233.7	118.8	131.6	195.8
Oktober	108	196.1	196.1	405.5	199.6	70.5
November	209	480.1	480.1	366.0	411.9	255.6
Desember	120	237.6	237.6	461.8	217.9	228.9

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Besar 2020-2025 dan Aceh Besar Dalam Angka 2025

Tabel 2.6.
Keadaan Suhu Udara Rata-rata, Dirinci Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024

Suhu Udara	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	28.5	27.56	27.56	26.9	26	26.6
Ferbruari	28.9	27.48	27.48	26.7	26.3	26.97
Maret	29.1	27.83	27.83	27	26.8	27.88
April	29.6	27.64	27.64	27.7	27.8	28.27
Mai	30	27.57	27.57	28.2	28.6	28.51
Juni	29.8	28.1	28.1	27.3	28.8	28.87
Juli	29.7	27.6	27.6	28.2	28.8	28.63
Agustus	30	28.26	28.26	27.5	28.2	27.8
September	29.2	27.14	27.14	27.5	27.5	29.97
Oktober	27.1	27.23	27.23	26.6	26.8	27.48
November	28.2	26.42	26.42	26.5	26.6	27.04
Desember	28	26.55	26.55	26	26.7	23.13

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Besar 2020-2025 dan Aceh Besar Dalam Angka 2025

F. Penggunaan Lahan

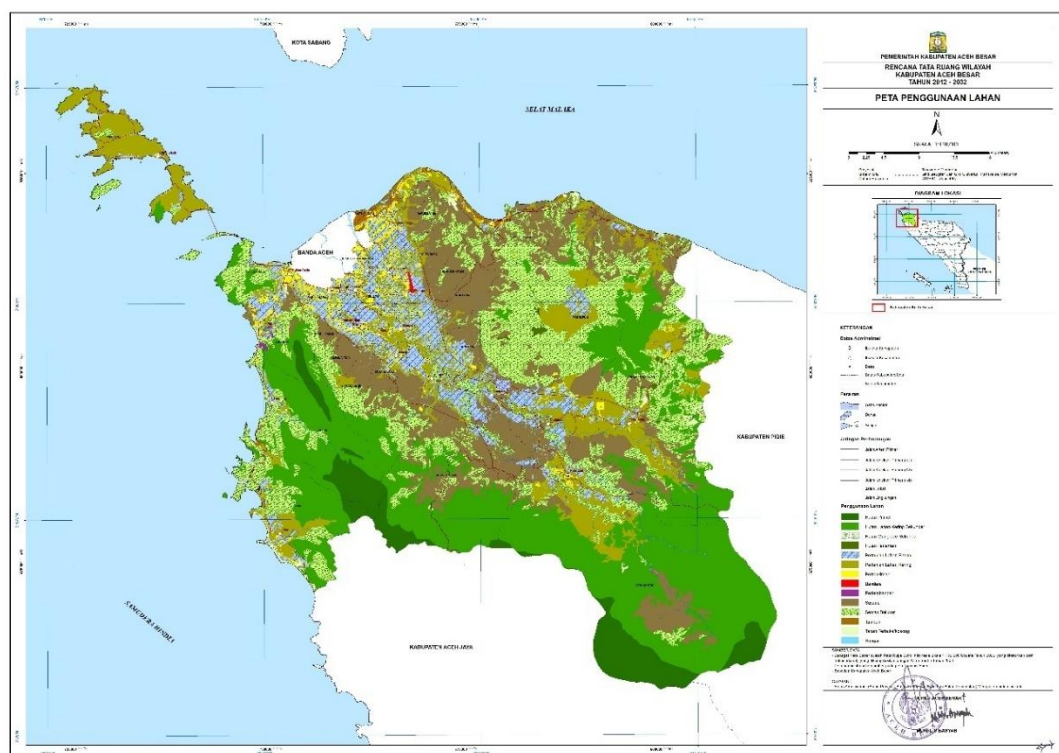
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan bahwa Penatagunaan Tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar 2012-2032 didominasi oleh hutan lahan kering sekunder seluas 82.843,20 Ha, kemudian semak belukar seluas 61.146,79 Ha, savanna seluas 54.777,99 Ha, pertanian lahan kering seluas 40.165,63 Ha dan pertanian lahan basah seluas 22.094,01 Ha. Rincian penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel 2.8 dan Gambar 2.8:

Tabel 2.7.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Besar

No	Penggunaan Lahan	Luas Ha	No	Penggunaan Lahan	Luas Ha
1	Bandara	110,12	8	Pertanian Lahan Basah	22.094,01
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	82.843,20	9	Pertanian Lahan Kering	40.165,63
3	Hutan Mangrove Sekunder	2,43	10	Savana	54.777,99
4	Hutan Primer	15.282,16	11	Semak Belukar	61.146,79
5	Hutan Tanaman	381,42	12	Sungai	1.049,51
6	Permukiman	9.806,15	13	Tambak	1.321,14
7	Pertambangan	146,27	14	Tanah Terbuka/kosong	1.233,39

Sumber data : Peta Data RTRW Kab. Aceh Besar 2013-2032



Sumber data : Peta Data RTRW Kab. Aceh Besar 2013-2032
Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Besar

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Air Bersih

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (*water supply*) dan kebutuhan air (*water demand*) terdapat perhitungan melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik. Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) (Permen LH No. 17/2009).

Status daya dukung penyedia air bersih diperoleh melalui penentuan ambang batas. Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang ada atau tersedia. Status DDLH kemudian ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum (Norvyani, dkk., 2018). Penentuan ambang batas dan status DDLH ini dilakukan melalui pendekatan menggunakan jasa lingkungan penyedia bahan pangan dan jasa lingkungan penyedia air bersih dengan asumsi tidak terjadi aliran materi/energi (*closed system*).

Hasil analisis untuk status DDLH air terlihat bahwa sebagian besar status penyediaan air di Kabupaten Aceh Besar berada pada status daya dukung air belum melampaui sebesar 258.740,00 Ha. Status daya dukung air belum melampaui terbesar berada di Kecamatan Kota Jantho dengan luas sebesar 57.719,30 Ha. Sedangkan status daya dukung air yang sudah melampaui sebesar 30.464,58 ha, sebagian besar berada di Kecamatan Seulimeum dengan luas sebesar 4.726,74 Ha, Informasi lebih detil terkait status daya dukung air dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.8.
Luas Status Penyediaan Air Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Bersih (Ha)		Total
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui	
1	Baitussalam	1.338,75	692,22	1.965,73
2	Blang Bintang	4.161,34	9,91	4.175,51
3	Darul Imarah	913,97	1.534,07	2.396,86
4	Darul Kamal	2.192,43	11.057	2.304,93

No	Kecamatan	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Bersih (Ha)		Total
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui	
5	Darussalam	3.427,84	42.513	3.845,15
6	Indrapuri	19.683,55		19.703,87
7	Ingin Jaya	1.725,16	706,30	5.908,61
8	Kota Jantho	59.041,17	-	58.094,60
9	Krueng Barona Jaya	223,76	426,41	647,81
10	Kuta Baro	6.03,47	97,55	6.107,07
11	Kuta Cot Glie	32.997,01	-	32.888,21
12	Kuta Malaka	2.279,36	-	2.281,66
13	Lembah Seulawah	31.454,87	-	31.263,28
14	Leupung	16.862,00	3.569	16.854,43
15	Lhoknga	8.608,27	193,33	8.753,87
16	Lhoong	14.981,39	17,14	14.862,78
17	Mesjid Raya	12.704,99	297,26	12.987,64
18	Montasik	5.965,21	192	5.973,33
19	Peukan Bada	3.206,38	380,31	3.532,19
20	Pulo Aceh	8.619,71	34.576	8.966,86
21	Seulimum	40.399,04	4.238	38.912,83
22	Simpang Tiga	2.757,27	14	2.759,80
23	Suka Makmur	4.205,39	13.6	4.345.30
	Total	283.752,32	5.452,26	289.532,30

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Besar 2025-2029

B. Jasa Ekosistem Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah jasa ekosistem berupa barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Pada kajian ini, ambang batas jasa lingkungan penyediaan digunakan untuk menganalisis kemampuan lingkungan yang dikuantifikasi sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Pangan, air, serat, bahan bakar dan sumberdaya genetik merupakan variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH), namun dalam analisis daya dukung dan daya tampung Kabupaten Aceh Besar pangan dan air menjadi hal utama yang penting dibahas karena terkait dengan ambang batas.

Ambang batas didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang ada atau tersedia. Status DDLH kemudian ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum (Norvyani, dkk., 2018). Penentuan ambang batas dan status DDLH ini dilakukan melalui pendekatan menggunakan jasa lingkungan penyedia bahan pangan dan jasa lingkungan penyedia air bersih dengan asumsi tidak terjadi aliran materi/energi (*closed system*).

Tinggi rendahnya daya dukung tersebut dipengaruhi oleh ekoregion dan tutupan lahan yang mendukung jasa penyediaan tersebut. Dalam jasa penyediaan, ekoregion yang berpengaruh untuk kategori sangat tinggi dan tinggi diantaranya adalah Lembah antar perbukitan/pegunungan lipatan (Intermountain Basin) dan dataran fluvio gunung api. Daya dukung yang tinggi atas jasa-jasa serat dan bahan bakar sebagian besar berada wilayah dimana ekoregionnya adalah Lembah antar perbukitan/pegunungan lipatan (Intermountain Basin) dan dataran fluvio gunung berapi, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.9.
Ringkasan Daya Dukung Kabupaten Aceh Besar dalam Jasa Penyediaan Ekosistem

No	Nama Jasa Penyediaan	Sangat Tinggi & Tinggi		Persentase Ekoregion Terbesar Ekoregion Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)eser (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)		Persentase Tutupan Lahan Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)		
		Luas (Ha)	Persentas (dari luas Kab)	Dataran Fluvio Gunung api	Lembah antar perbukitan/ Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin)	Perkebunan Kelapa Sawit	Ladang/ Tegala n dengan Palawija	Perkebunan Karet
1	Pangan	81,481.49	27.01	60.08	1.85	78.02	5.71	5.27
2	Air Bersih	25,943.12	8.60	31.59	16.47	-	17.93	24.06
3	Serat	298,806.10	99.06	16.40	39.59	62.58	2.57	13.45
4	Bahan Bakar	229,452.90	76.07	21.66	41.17	75.73	2.03	3.95

No	Nama Jasa Penyediaan	Sangat Tinggi & Tinggi		Persentase Ekoregion Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)		Persentase Tutupan Lahan Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)		
		Luas (Ha)	Persentas (dari luas Kab)	Dataran Fluvio Gunungapi	Lembah antar perbukitan/ Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin)	Perkebunan Kelapa Sawit	Ladang/ Tegalan dengan Palawija	Perkebunan Karet
5	Sumberdaya Genetik	77,057.71	25.55	9.86	7.17	-	6.04	15.84

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Besar 2025 – 2029

C. Serat

Potensi serat di Kabupaten Aceh Besar memiliki peluang yang cukup besar, meskipun saat ini belum menjadi komoditas utama. Serat alam dimanfaatkan untuk industri tekstil dan manufaktur, sehingga harus dipilih tanaman yang berkelanjutan. Beberapa tanaman serat potensial yang bisa dikembangkan di Kabupaten Aceh Besar adalah:

1. Rami (*Boehmeria nivea*): Tanaman ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, termasuk tanah di Aceh Besar yang relatif subur. Rami menghasilkan serat yang kuat dan sering digunakan dalam pembuatan tekstil.
2. Kenaf (*Hibiscus cannabinus*): Kenaf merupakan tanaman serat yang cepat tumbuh dan tahan terhadap berbagai kondisi tanah. Seratnya banyak digunakan dalam industri tekstil dan pembuatan produk ramah lingkungan, seperti karung goni dan kertas.
3. Kapas (*Gossypium spp*): Kapas memiliki potensi besar, terutama karena seratnya banyak digunakan dalam pembuatan kain dan produk tekstil. Meskipun belum menjadi fokus utama, iklim tropis Aceh Besar memungkinkan pengembangan budidaya kapas dengan pendekatan teknologi pertanian yang tepat.
4. Nanas Serat (*Ananas comosus*): Selain buahnya, tanaman nanas juga memiliki daun yang dapat menghasilkan serat alami berkualitas tinggi, yang dikenal sebagai serat piña. Ini bisa menjadi peluang diversifikasi bagi petani nanas di Aceh Besar.

Kabupaten Aceh Besar memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang relatif stabil, yang sangat cocok untuk tanaman serat. Tanaman seperti rami dan kenaf, misalnya, dapat tumbuh dengan baik di iklim ini, selama teknik pertanian yang tepat diterapkan. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi pengembangan serat di Aceh Besar dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi wilayah ini, baik untuk kebutuhan domestik maupun pasar internasional.

D. Bahan Bakar

Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar, baik yang berasal dari sumber energi fosil maupun energi terbarukan. Berikut adalah beberapa sumber bahan bakar yang potensial di Aceh Besar:

1. Bahan Bakar Fosil

- a. Gas Alam: Aceh secara umum memiliki potensi gas alam, termasuk di Aceh Besar. Wilayah-wilayah tertentu di Aceh Besar mungkin memiliki cadangan gas alam yang belum dieksplorasi secara optimal. Gas alam dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga.
- b. Minyak Bumi: Meskipun Aceh dikenal memiliki cadangan minyak bumi di beberapa lokasi, seperti di Blok B dan Arun di Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Besar belum banyak dikenal sebagai penghasil utama minyak bumi. Namun, ada kemungkinan adanya cadangan minyak bumi di kawasan yang belum dieksplorasi secara mendalam.

2. Energi Terbarukan

Potensi bahan bakar terbarukan di Aceh Besar cukup besar mengingat wilayahnya yang kaya akan sumber daya alam dan iklim yang mendukung.

a. Biomassa:

- Limbah Pertanian: Potensi bahan bakar dari biomassa di Aceh Besar dapat berasal dari limbah pertanian seperti sekam padi, sisa-sisa tanaman, dan batang jagung. Limbah ini bisa diolah menjadi briket biomassa atau dimanfaatkan untuk produksi biogas.
- Perkebunan Kelapa Sawit: Aceh Besar juga memiliki perkebunan kelapa sawit, dan limbah dari industri sawit seperti cangkang sawit dan tandan kosong bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi biomassa.

- Kayu Energi: Tanaman cepat tumbuh seperti kaliandra atau akasia dapat ditanam untuk bahan bakar biomassa. Kayu dari tanaman ini dapat diolah menjadi pelet kayu atau dimanfaatkan sebagai bahan bakar langsung.
- b. Biogas:
- Limbah Peternakan dan Pertanian: Limbah dari peternakan sapi, ayam, dan kambing di Aceh Besar dapat dimanfaatkan untuk produksi biogas. Selain menjadi sumber energi, biogas juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan.
 - Pemanfaatan Sampah Organik: Sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga atau pasar tradisional juga bisa diolah menjadi biogas, memberikan solusi bagi pengelolaan sampah dan penyediaan energi.
- c. Energi Matahari:
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS): Aceh Besar memiliki potensi besar untuk pengembangan energi matahari. Dengan intensitas sinar matahari yang tinggi, pembangkit listrik tenaga surya bisa menjadi alternatif yang berkelanjutan untuk menyediakan energi bagi daerah-daerah pedesaan yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional.
- d. Energi Air:
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): Kabupaten Aceh Besar memiliki beberapa sungai yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air. Sungai-sungai di wilayah ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik skala kecil (micro-hydro) yang dapat mendukung kebutuhan energi lokal.
- e. Energi Angin:
- Pembangkit Listrik Tenaga Angin: Di beberapa wilayah pesisir Aceh Besar yang terpapar angin kencang, potensi energi angin bisa dimanfaatkan. Meski belum banyak dikembangkan, ini bisa menjadi alternatif energi terbarukan yang menjanjikan, terutama di daerah pesisir.
3. Biofuel
- a. Biodiesel dari Kelapa Sawit: Aceh Besar memiliki perkebunan kelapa sawit yang berpotensi untuk pengembangan biodiesel. Minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi biodiesel, yang merupakan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil.

- b. Bioetanol dari Tanaman Penghasil Gula atau Pati: Beberapa tanaman penghasil gula atau pati seperti ubi kayu, jagung, atau sorgum bisa diolah menjadi bioetanol. Ini menjadi salah satu potensi besar untuk diversifikasi sumber bahan bakar di Aceh Besar.

4. Energi Panas Bumi (Geothermal)

- a. Geothermal: Meski belum banyak dieksplorasi, Aceh Besar memiliki potensi panas bumi di wilayah pegunungannya. Panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

5. Energi Laut

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Ombak dan Arus Laut: Mengingat Aceh Besar memiliki wilayah pesisir yang luas, potensi energi laut, seperti pembangkit listrik tenaga ombak dan arus laut, bisa menjadi salah satu alternatif energi terbarukan. Ini sangat relevan mengingat posisi Aceh di dekat Samudra Hindia.

Tantangan Pengembangan:

- a. Infrastruktur: Pengembangan potensi bahan bakar, terutama yang terbarukan, memerlukan infrastruktur yang memadai. Misalnya, pembangunan PLTS atau PLTA membutuhkan investasi besar.
- b. Pendanaan dan Teknologi: Meskipun potensi ada, investasi dalam teknologi dan pendanaan merupakan tantangan tersendiri untuk mengoptimalkan sumber daya bahan bakar ini.
- c. Kesadaran dan Dukungan Lokal: Pengembangan energi terbarukan memerlukan dukungan dari masyarakat lokal serta pelatihan dan penyuluhan agar mereka memahami manfaat dan cara pemanfaatannya.

Secara keseluruhan, potensi bahan bakar di Aceh Besar sangat beragam, dari sumber daya fosil hingga energi terbarukan. Dengan investasi yang tepat dalam infrastruktur dan teknologi, Kabupaten Aceh Besar bisa menjadi salah satu penghasil energi yang signifikan di Aceh.

E. Sumberdaya Genetik

Penyediaan sumber daya genetik di Kabupaten Aceh Besar berkaitan dengan keberagaman hayati yang ada di wilayah ini, baik dari sisi pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Sumber daya genetik ini memiliki nilai penting

untuk keberlanjutan pertanian, ketahanan pangan, serta upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam.

1. Keanekaragaman Hayati

Aceh Besar merupakan bagian dari wilayah Sumatera yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Wilayah ini memiliki beragam jenis flora dan fauna yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya genetik.

- a. Tanaman Pertanian Lokal: Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi genetik dari berbagai tanaman lokal yang telah lama dibudidayakan oleh masyarakat. Contohnya, varietas padi lokal, jagung, kacang-kacangan, serta tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan buah-buahan lokal seperti durian dan manggis.
- b. Tumbuhan Obat: Aceh Besar juga kaya akan tanaman obat tradisional yang memiliki potensi sebagai sumber daya genetik untuk dikembangkan menjadi bahan baku obat atau produk kesehatan. Beberapa tanaman seperti kunyit, temulawak, dan jahe telah dikenal dalam pengobatan tradisional.
- c. Sumber Daya Hutan: Kawasan hutan di Aceh Besar menjadi penyimpanan penting bagi beragam jenis pohon, tanaman, dan satwa yang memiliki nilai genetik tinggi. Hutan ini menjadi tempat tinggal bagi spesies-spesies yang mungkin langka dan penting untuk konservasi.

2. Sumber Daya Genetik Hewan

- a. Hewan Ternak Lokal: Kabupaten Aceh Besar memiliki populasi hewan ternak lokal yang memiliki keunggulan genetik tersendiri, misalnya sapi Aceh, kambing, ayam lokal, dan itik. Sumber daya genetik ini penting untuk mendukung pengembangan peternakan yang adaptif terhadap kondisi lokal.
- b. Keanekaragaman Satwa Liar: Di kawasan hutan Aceh Besar, masih banyak ditemukan spesies satwa liar yang memiliki nilai genetik penting, seperti gajah, harimau Sumatera, serta berbagai jenis burung dan primata. Satwa-satwa ini memiliki potensi genetik yang dapat dikaji lebih lanjut, baik untuk konservasi maupun pemanfaatan berkelanjutan.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik untuk Ketahanan Pangan

- a. Varietas Padi Lokal: Aceh Besar memiliki varietas padi lokal yang telah beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan setempat. Varietas ini

memiliki nilai penting untuk mempertahankan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan gangguan produksi pangan.

- b. Pengembangan Varietas Unggul: Potensi sumber daya genetik di Aceh Besar bisa dimanfaatkan untuk pengembangan varietas unggul yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, hama, dan penyakit. Ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

4. Konservasi dan Penyimpanan Sumber Daya Genetik

- a. Konservasi In Situ dan Ex Situ: Konservasi sumber daya genetik dilakukan baik secara in situ (di habitat aslinya) maupun ex situ (di luar habitat aslinya, misalnya di kebun raya atau bank genetik). Upaya konservasi in situ di Aceh Besar dilakukan melalui pelestarian hutan dan ekosistem alamnya, sementara konservasi ex situ dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pusat konservasi genetik.
- b. Bank Genetik Lokal: Pengembangan bank genetik di Aceh Besar akan membantu menyimpan plasma nutfah (materi genetik) tanaman dan hewan lokal yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Bank genetik ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan mengantisipasi ancaman hilangnya keanekaragaman hayati.

Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik di Aceh Besar memerlukan dukungan dari lembaga penelitian dan akademisi. Kerjasama ini dapat menghasilkan inovasi dalam pemuliaan tanaman dan hewan, serta pengembangan produk-produk berbasis sumber daya genetik lokal. Sumber daya genetik di Aceh Besar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk bernilai tambah, misalnya produk pangan lokal yang unik, bahan obat tradisional, dan produk ramah lingkungan dari bahan hayati.

Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Genetik:

- 1) Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat mempengaruhi keberlanjutan sumber daya genetik di Aceh Besar, terutama dalam hal adaptasi tanaman dan hewan terhadap kondisi lingkungan yang berubah.
- 2) Degradasi Lingkungan: Kerusakan hutan dan konversi lahan menjadi ancaman bagi konservasi keanekaragaman hayati. Upaya untuk melindungi dan merestorasi ekosistem alami perlu menjadi prioritas.
- 3) Kurangnya Kesadaran dan Dukungan: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sumber daya genetik masih perlu ditingkatkan. Dukungan dari

pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk melindungi dan mengoptimalkan potensi ini.

Secara keseluruhan, sumber daya genetik di Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya ini dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

E.1 Jasa Ekosistem Pengaturan

Jasa Ekosistem Pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem. Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia. Pendukung habitat kehati (keanekaragaman hayati) adalah elemen penting dalam menjaga keragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Jasa lingkungan memiliki peran krusial dalam mendukung dan memelihara habitat kehati.

Jasa ekosistem pengaturan di Kabupaten Aceh Besar mencakup berbagai layanan yang diberikan oleh ekosistem alam yang membantu menjaga keseimbangan lingkungan, mendukung kehidupan manusia, dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Jasa pengaturan ini sangat penting untuk keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa jasa ekosistem pengaturan yang signifikan di Aceh Besar:

1. Pengaturan Iklim dan Penyerapan Karbon

- a. Hutan dan Penyerapan Karbon: Kawasan hutan di Aceh Besar, terutama di daerah pegunungan dan lereng-lereng bukit, berperan penting dalam penyerapan karbon. Vegetasi di hutan menyerap karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Ini juga berkontribusi pada pengaturan iklim mikro di sekitar wilayah tersebut.
- b. Penyediaan Oksigen: Pohon-pohon dan vegetasi lainnya di Aceh Besar berfungsi sebagai penyedia oksigen, yang penting bagi kehidupan manusia dan hewan.

2. Pengaturan Siklus Air

- a. Penyerapan Air dan Penyimpanan Air Tanah: Ekosistem hutan dan lahan basah di Aceh Besar berperan penting dalam penyerapan air hujan dan penyimpanan air di dalam tanah. Ini membantu mengurangi risiko banjir selama musim hujan dan menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.

- b. Pengendalian Banjir: Kawasan hutan yang ada di pegunungan dan perbukitan membantu mengatur aliran air sehingga mengurangi potensi banjir di dataran rendah. Vegetasi berfungsi sebagai penahan air dan memperlambat aliran air permukaan.
 - c. Pengaturan Aliran Sungai: Ekosistem sungai dan daerah aliran sungai (DAS) di Aceh Besar memainkan peran penting dalam mengatur aliran air, baik untuk kebutuhan pertanian, sungai, maupun rumah tangga. Pengelolaan DAS yang baik dapat menjaga kualitas dan kuantitas air serta mengurangi erosi tanah.
3. Pengaturan Erosi dan Kesuburan Tanah
- a. Pengendalian Erosi Tanah: Vegetasi alami di lereng-lereng bukit dan dataran tinggi berperan penting dalam mengurangi erosi tanah. Tanaman dan akar-akar pohon membantu menahan tanah dan mencegah hilangnya lapisan tanah subur akibat air hujan atau angin.
 - b. Penyediaan Nutrisi untuk Tanah: Hutan dan ekosistem alami juga berkontribusi pada penyediaan nutrisi bagi tanah melalui proses dekomposisi daun dan bahan - bahan lainnya. Ini membantu menjaga kesuburan tanah dan mendukung produktivitas pertanian.
4. Pengaturan Kualitas Udara
- a. Pemurnian Udara: Vegetasi di Aceh Besar berfungsi sebagai pemurni udara alami. Tumbuhan menyerap polutan dari udara, termasuk karbon dioksida dan partikel debu, serta menghasilkan oksigen. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas udara di daerah tersebut, terutama di dekat sungai hutan dan masyarakat.
 - b. Pengurangan Polusi Udara: Pohon-pohon dan tumbuhan di daerah perkotaan dan pedesaan Aceh Besar dapat membantu mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor dan aktivitas.
5. Pengaturan Suhu dan Iklim Mikro
- a. Pengaturan Suhu: Kawasan hijau dan hutan di Aceh Besar berperan dalam pengaturan suhu dan iklim mikro. Hutan memberikan efek pendinginan alami melalui proses transpirasi dan penyediaan keteduhan. Hal ini sangat penting untuk mengurangi efek pemanasan global dan menjaga keseimbangan suhu di lingkungan sekitar.

- b. Pengurangan Urban Heat Island (UHI): Di daerah perkotaan, seperti di kota Jantho dan sekitarnya, ruang hijau dapat mengurangi fenomena Urban Heat Island, di mana suhu di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan sekitarnya.
- 6. Pengaturan Habitat dan Keanekaragaman Hayati
 - a. Konservasi Habitat: Ekosistem hutan di Aceh Besar menyediakan habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, termasuk yang terancam punah. Pengaturan ekosistem yang baik membantu menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah punahnya spesies lainnya.
 - b. Koridor Ekologis: Hutan dan alami lainnya berfungsi sebagai koridor ekologis yang memungkinkan pergerakan dan migrasi satwa liar. Ini penting untuk menjaga populasi satwa dan mendukung ekosistem secara keseluruhan.
- 7. Pengaturan Penyakit dan Hama
 - a. Pengendalian Penyakit: Ekosistem yang seimbang dapat membantu mengendalikan penyebaran penyakit. Misalnya, keanekaragaman hayati di hutan dapat menekan populasi vektor penyakit seperti nyamuk pembawa malaria atau demam berdarah, melalui interaksi predator alami dan ekosistem yang sehat.
 - b. Pengendalian Hama Pertanian: Hutan dan ekosistem alami yang berdekatan dengan lahan pertanian dapat membantu mengatur populasi hama melalui kehadiran predator alami. Ini membantu mengurangi kebutuhan pestisida kimia dan menjaga keseimbangan ekologis.
- 8. Pengaturan Nutrisi di Perairan
 - a. Pemurnian Air dan Pengendalian Eutrofikasi: Ekosistem lahan basah, rawa, dan mangrove di Aceh Besar berfungsi sebagai filter alami yang membersihkan air dari polutan seperti zat organik berlebih, logam berat, dan bahan kimia lainnya. Ini membantu mencegah eutrofikasi (peningkatan alga berlebihan) di perairan, yang dapat merusak ekosistem akuatik.

Tantangan dalam Pengelolaan Jasa Ekosistem Pengaturan:

- 1) Perubahan Lahan dan Deforestasi: Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, atau permukiman dapat mengurangi efektivitas jasa ekosistem pengaturan. Deforestasi berpotensi merusak siklus air, meningkatkan risiko banjir, dan menyebabkan degradasi tanah.

- 2) Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi kemampuan ekosistem dalam menyediakan jasa pengaturan, seperti penyimpanan karbon dan pengaturan suhu.
- 3) Polusi dan Pencemaran: Polusi air dan tanah akibat limbah pertanian, 27asyarakat, atau rumah tangga dapat mengganggu fungsi alami ekosistem, termasuk kemampuan mereka dalam mengatur kualitas air dan udara.

Secara keseluruhan, jasa ekosistem pengaturan di Kabupaten Aceh Besar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan masyarakat. Perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa jasa ekosistem ini tetap dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

E.2 Jasa Ekosistem Pendukung

Jasa Ekosistem Pendukung adalah jasa ekosistem yang diperlukan untuk menghasilkan jasa ekosistem lainnya. Jasa ekosistem pendukung di Kabupaten Aceh Besar merupakan layanan yang disediakan oleh ekosistem yang memungkinkan berjalannya fungsi ekosistem lainnya, termasuk jasa pengaturan, penyediaan, dan budaya. Jasa pendukung ini adalah dasar bagi seluruh kehidupan dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa jasa ekosistem pendukung yang signifikan di Aceh Besar:

1. Pembentukan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

- a. Pembentukan Tanah: Proses alamiah seperti dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme, cacing tanah, dan organisme lain di dalam tanah memainkan peran penting dalam pembentukan lapisan tanah subur. Di Aceh Besar, ekosistem hutan dan lahan pertanian berkontribusi besar terhadap pembentukan dan regenerasi tanah, yang mendukung produktivitas pertanian.
- b. Pemeliharaan Kesuburan Tanah: Ekosistem alami, termasuk hutan dan semak belukar, berperan dalam mempertahankan kesuburan tanah melalui penyediaan bahan organik dan nutrisi bagi tanah. Dekomposisi daun dan sisa tanaman oleh mikroorganisme memperkaya tanah dengan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium.

2. Siklus Nutrisi

- a. Daur Ulang Nutrisi: Ekosistem di Aceh Besar mendukung daur ulang nutrisi melalui proses-proses seperti dekomposisi bahan organik, siklus nitrogen, dan siklus fosfor. Proses-proses ini memungkinkan nutrisi yang ada dalam tanaman dan hewan mati kembali ke tanah dan air, di mana mereka dapat digunakan kembali oleh organisme lain. Ini adalah proses penting untuk memastikan tanah tetap subur dan mendukung pertumbuhan tanaman.
- b. Mikroorganisme dalam Tanah: Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur di dalam tanah membantu dalam penguraian bahan organik dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Peran mikroorganisme ini sangat penting dalam pertanian dan keberlanjutan ekosistem di wilayah Aceh Besar.

3. Siklus Air

- a. Infiltrasi dan Penyimpanan Air: Ekosistem di Aceh Besar, terutama hutan dan lahan basah, memainkan peran penting dalam mendukung siklus air. Tanaman dan tanah membantu mengatur infiltrasi air hujan ke dalam tanah, mengisi kembali sumber air tanah, dan mendukung keberlanjutan sungai dan sumber air lainnya.
- b. Penguapan dan Transpirasi: Proses penguapan air dari permukaan tanah dan transpirasi dari tanaman membantu menjaga kelembaban udara dan memainkan peran penting dalam siklus hidrologi global dan lokal. Ini mendukung keseimbangan iklim mikro di Aceh Besar.

4. Habitat bagi Keanekaragaman Hayati

- a. Penyediaan Habitat: Ekosistem alami seperti hutan, lahan basah, dan sungai di Aceh Besar menyediakan habitat yang penting bagi berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman habitat ini memungkinkan spesies-spesies tersebut berkembang biak dan berfungsi dalam ekosistem mereka.
- b. Kehidupan Satwa Liar dan Flora Lokal: Hutan di Aceh Besar adalah rumah bagi berbagai spesies satwa liar seperti gajah, harimau Sumatera, dan burung-burung eksotis. Selain itu, hutan ini mendukung flora yang langka dan endemik yang penting bagi konservasi genetik dan penelitian ilmiah.

5. Pemeliharaan Proses Ekologis

- a. Polinasi: Jasa ekosistem pendukung lainnya yang signifikan adalah pemeliharaan proses penyerbukan (polinasi) oleh serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan burung. Proses penyerbukan ini mendukung reproduksi tanaman dan kelestarian ekosistem pertanian serta hutan. Di Aceh Besar, ekosistem alami mendukung populasi polinator yang penting bagi produksi pangan lokal, seperti buah-buahan dan sayuran.
- b. Dispersi Benih: Banyak hewan liar di Aceh Besar, termasuk burung dan mamalia, berperan dalam menyebarkan benih tanaman. Proses ini penting untuk regenerasi hutan, memperluas habitat tanaman, dan memastikan kelangsungan hidup spesies tanaman di berbagai ekosistem.

6. Siklus Energi

- a. Aliran Energi dalam Jaringan Makanan: Ekosistem di Aceh Besar mendukung aliran energi melalui rantai makanan, di mana energi dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Energi ini kemudian ditransfer ke herbivora, karnivora, dan organisme lainnya. Proses ini mendukung kehidupan di seluruh ekosistem, mulai dari mikroorganisme tanah hingga predator puncak.

7. Keseimbangan Ekosistem

- a. Pengaturan Dinamika Populasi: Ekosistem di Aceh Besar membantu mengatur dinamika populasi spesies, termasuk predator dan mangsa. Keseimbangan ini penting untuk mencegah ledakan populasi spesies tertentu yang bisa merusak ekosistem secara keseluruhan. Sebagai contoh, predator alami membantu mengendalikan populasi hama yang bisa merusak tanaman pertanian.
- b. Ketahanan terhadap Gangguan: Ekosistem yang sehat mendukung ketahanan terhadap gangguan seperti perubahan iklim, serangan hama, atau bencana alam. Proses ekosistem yang mendukung seperti pemulihan alami hutan dan tanah memungkinkan lingkungan untuk pulih dari gangguan ini dan mempertahankan fungsi ekologisnya.

Memperhatikan isu strategis, kondisi DDDTLH dan capaian tujuan berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Aceh Besar maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Hasil Analisis, Alternatif scenario, Strategis dan rekomendasi KLHS
RPJMD Kabupaten Aceh Besar 2025-2029

No.	Hasil analisis	Alternatif Skenario	Strategis	Rekomendasi
1	Daya dukung Pangan rendah	Intensifikasi pertanian	a. Peningkatan Produktivitas Tanaman melalui adopsi teknologi pertanian modern seperti benih unggul, pupuk organik, dan pestisida ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil panen per hektar. b. Mengembangkan sistem irigasi yang lebih efisien c. Pemanfaatan lahan marginal dengan mengubah lahan yang kurang subur atau lahan marginal menjadi lahan produktif melalui penggunaan teknik agroforestri atau rehabilitasi lahan.	a. Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada petani terkait teknologi pertanian modern dan praktik terbaik. b. Memberikan insentif atau subsidi bagi petani yang menerapkan metode pertanian intensif dan ramah lingkungan. c. Menetapkan kebijakan dan regulasi terkait alih fungsi lahan pertanian
		Diversifikasi sumber pangan	a. Penanaman komoditas alternatif dari berbagai komoditas pangan yang tahan terhadap kondisi iklim dan tanah setempat. b. Pengembangan dan integrasi sistem pertanian dan perikanan serta peternakan untuk menyediakan sumber protein yang berkelanjutan agar mengurangi tekanan pada lahan pertanian. c. Peningkatan agroindustri lokal untuk mendorong pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan yang bernilai tambah sehingga mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah.	a. Meningkatkan akses petani terhadap benih komoditas alternatif dan teknologi yang mendukung diversifikasi tanaman. b. Mengembangkan program penyuluhan dan pelatihan untuk petani tentang manfaat dan teknik diversifikasi tanaman.

No.	Hasil analisis	Alternatif Skenario	Strategis	Rekomendasi
		Pengelolaan resiko dan ketahanan pangan	Melakukan pemetaan risiko pertanian terkait dengan perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan serangan hama. Mendorong penanaman varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrem, seperti varietas padi tahan kekeringan atau banjir. Membangun dan memelihara cadangan pangan daerah untuk menghadapi masa-masa kelangkaan pangan atau krisis.	a. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk bencana alam yang berdampak pada produksi pangan, serta memberikan dukungan cepat kepada petani yang terdampak. b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan faktor-faktor lingkungan lainnya.
		Pengembangan infrastruktur pangan	a. Membangun fasilitas penyimpanan yang memadai, seperti gudang pendingin, untuk mengurangi kerusakan hasil panen dan memperpanjang umur simpan produk pertanian. b. Memperbaiki infrastruktur jalan dan transportasi untuk memastikan hasil pertanian dapat dijual ke pasar dengan cepat dan efisien. c. Mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka akses ke pasar yang lebih luas.	a. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur pertanian dan fasilitas distribusi, baik melalui anggaran pemerintah maupun kemitraan dengan sektor swasta. d. Mendorong pembentukan koperasi petani yang dapat membantu dalam penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian.

No.	Hasil analisis	Alternatif Skenario	Strategis	Rekomendasi
		Edukasi dan keterlibatan komunitas	a. Mengadakan program edukasi tentang pentingnya diversifikasi pangan, gizi seimbang, dan praktik pertanian berkelanjutan. b. Mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam inisiatif pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk program pertanian organik dan komunitas berbasis pangan. c. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan melakukan urban farming untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.	a. Mengembangkan kampanye kesadaran publik dan program pendidikan yang berkelanjutan tentang pentingnya ketahanan pangan dan praktik pertanian yang baik. b. Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan proyek-proyek pangan lokal.
2	Daya dukung air sedang/bersyarat	Konservasi sumberdaya air	a. Melakukan penanaman kembali di daerah tangkapan air yang terdegradasi untuk meningkatkan penyerapan air tanah dan mengurangi run-off. b. Membangun waduk atau embung untuk menampung air hujan dan mengurangi ketergantungan pada air tanah. c. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk program penanaman pohon dan konservasi air.	a. Prioritaskan kebijakan yang mendukung konservasi sumber daya air, termasuk insentif untuk masyarakat yang terlibat dalam kegiatan konservasi. b. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya konservasi air di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan.

No.	Hasil analisis	Alternatif Skenario	Strategis	Rekomendasi
		Pengelolaan air berbasis teknologi	a. Implementasi teknologi irigasi hemat air seperti irigasi tetes dan sprinkler untuk sektor pertanian. b. Menggunakan sensor dan teknologi pemantauan untuk memantau penggunaan air secara real-time dan mengatur distribusi air secara optimal. c. Meningkatkan fasilitas pengolahan air limbah untuk mengurangi pencemaran dan memungkinkan penggunaan kembali air limbah yang telah diolah.	a. Mendorong adopsi teknologi yang mendukung penghematan air melalui program insentif atau subsidi bagi petani dan industri. b. Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi pengolahan air dan manajemen air yang canggih.
		Pengaturan Tata Ruang Berbasis Daya Dukung	a. Mengidentifikasi dan menetapkan zonasi yang jelas untuk kawasan lindung, perkebunan, pertanian, dan pemukiman berdasarkan daya dukung air. b. Memperketat pengaturan alih fungsi lahan dari hutan atau lahan hijau menjadi kawasan perkebunan atau pemukiman yang dapat mengurangi daya dukung air. c. Mendorong pembangunan infrastruktur hijau, seperti taman kota dan koridor hijau, yang membantu meningkatkan infiltrasi air dan mengurangi run-off.	a. Mengintegrasikan evaluasi daya dukung air dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah. b. Mengembangkan peraturan daerah yang mengatur tata guna lahan berdasarkan hasil evaluasi daya dukung air.

No.	Hasil analisis	Alternatif Skenario	Strategis	Rekomendasi
3	Daya dukung fungsi lindung rendah	Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem	a. Melakukan penanaman kembali di kawasan hutan yang telah rusak atau mengalami deforestasi untuk memulihkan fungsi hutan sebagai kawasan lindung. b. Mengembalikan fungsi ekosistem mangrove dan lahan basah yang berfungsi sebagai penahan erosi, penyangga banjir, dan penyerap karbon. c. Memulihkan vegetasi di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengurangi erosi, meningkatkan penyerapan air tanah, dan menjaga kualitas air.	a. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program rehabilitasi dan restorasi ekosistem di dalam RPJMD. b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, dan komunitas lokal dalam pelaksanaan program restorasi ekosistem.
		Pengelolaan Kawasan Lindung yang Terintegrasi	a. Membuat zona penyangga di sekitar kawasan lindung untuk mengurangi dampak dari aktivitas manusia seperti pertanian, perkebunan, dan pemukiman. b. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di kawasan lindung seperti penebangan liar, perburuan, dan konversi lahan yang tidak sah. c. Mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan di kawasan lindung sebagai alternatif pendapatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan.	a. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan lindung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, pemerintah lokal, dan swasta. b. Menerapkan kebijakan zonasi yang jelas dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk melindungi kawasan yang memiliki fungsi lindung.

No.	Hasil analisis	Alternatif Skenario	Strategis	Rekomendasi
		Adaptasi Berbasis Ekosistem (Ecosystem-Based Adaptation)	a. Mengelola hutan dengan mempertimbangkan potensi karbon yang tersimpan, jasa ekosistem, dan keanekaragaman hayati. b. Membangun infrastruktur yang ramah lingkungan seperti taman kota, koridor hijau, dan taman air untuk meningkatkan daya dukung ekosistem perkotaan. c. Menggunakan pendekatan alamiah seperti konservasi tanah dan air, serta pemanfaatan tanaman lokal yang tahan iklim ekstrem untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana.	a. Mengintegrasikan pendekatan adaptasi berbasis ekosistem ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan iklim lokal. b. Mendorong penelitian dan pengembangan (R&D) terkait potensi adaptasi berbasis ekosistem di Aceh Besar.
		Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi	a. Mendorong pembentukan kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas konservasi hutan, lahan basah, dan ekosistem penting lainnya. b. Melaksanakan program pendidikan dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya kawasan lindung dan partisipasi aktif dalam konservasi. c. Mengembangkan skema pembiayaan konservasi berbasis komunitas seperti pembayaran jasa lingkungan (PES) dan ekowisata berbasis masyarakat.	a. Meningkatkan dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan teknis dan finansial kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan konservasi. b. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan lindung.

No.	Hasil analisis	Alternatif Skenario	Strategis	Rekomendasi
		Diversifikasi dan Pengembangan Mata Pencarian Berkelanjutan	a. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang tidak merusak kawasan lindung, seperti agroforestri dan pertanian organik. b. Memberikan pelatihan dan dukungan kepada masyarakat untuk mengembangkan UMKM yang berfokus pada produk-produk ramah lingkungan. c. Membuka akses bagi masyarakat lokal ke pasar hijau yang menghargai produk-produk yang dihasilkan melalui praktik berkelanjutan.	a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelatihan dan sumber daya yang mendukung pengembangan mata pencarian yang berkelanjutan. b. Mengintegrasikan pendekatan pengembangan ekonomi berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
4	Daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem	Fungsi DDDTLH Jasa Ekosistem Rendah	a. Melakukan rehabilitasi dan restorasi ekosistem yang rusak melalui reforestasi, pemulihan lahan basah, dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). b. Menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan lahan yang ketat di kawasan dengan daya dukung rendah, misalnya dengan melarang konversi lahan untuk kegiatan non-ekosistem. c. Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak ekosistem, seperti penebangan liar, perburuan, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan.	a. Alokasikan dana khusus untuk program rehabilitasi ekosistem dalam RPJMD, dan fokus pada pemulihan kawasan kritis. b. Libatkan masyarakat dalam upaya konservasi melalui program edukasi dan insentif bagi prakarsa lokal yang mendukung pemulihan ekosistem.

No.	Hasil analisis	Alternatif Skenario	Strategis	Rekomendasi
		Fungsi DDDTLH Jasa Ekosistem Sedang	a. Menerapkan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti agroforestri, pertanian organik, dan pengelolaan hutan lestari. b. Mengintegrasikan teknologi hijau untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, misalnya irigasi hemat air, energi terbarukan, dan teknologi pengolahan limbah. c. Membentuk kawasan penyangga (buffer zones) di sekitar daerah dengan ekosistem yang sedang untuk melindungi dari tekanan eksternal dan memelihara jasa ekosistem.	a. Mendorong penerapan standar pengelolaan berkelanjutan dalam semua sektor ekonomi yang memanfaatkan jasa ekosistem, dengan memasukkan indikator-indikator keberlanjutan dalam RPJMD. b. Perkuat kerjasama dengan sektor swasta untuk mempromosikan investasi dalam teknologi hijau dan praktik berkelanjutan.
		Fungsi DDDTLH Jasa Ekosistem Tinggi	a. Memperkuat upaya konservasi untuk melindungi kawasan dengan ekosistem yang baik, seperti kawasan hutan primer, terumbu karang, dan hutan mangrove. b. Memanfaatkan potensi ekowisata di kawasan dengan daya dukung tinggi untuk meningkatkan perekonomian lokal tanpa merusak ekosistem. c. Menerapkan skema pembayaran jasa lingkungan untuk mendorong konservasi oleh masyarakat lokal dan pengguna jasa ekosistem.	a. Mengintegrasikan strategi konservasi yang kuat ke dalam RPJMD, dengan menetapkan kawasan lindung yang lebih luas dan memastikan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW). b. Promosikan ekowisata sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan, dengan menetapkan standar lingkungan yang ketat untuk pelaku usaha wisata.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Pola Pangan Harapan dan Daerah Rawan Pangan

Ketahanan dan kemandirian pangan merupakan isu strategis yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini selaras dengan Undang-Undang tentang pangan mengamanatkan pemerintah agar menjamin terpenuhinya pangan bagi setiap individu masyarakat dalam jumlah yang cukup, gizi seimbang, dan aman. Ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan oleh individu.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk melihat tingkat ketahanan pangan suatu daerah di tunjukkan dengan Indeks Ketahanan Pangan. Berikut tabel di bawah yang menggambarkan kondisi Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Pola Pangan Harapan Konsumsi di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.11.
Pola Pangan Harapan dan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

No.	Indikator (Skor)	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	83.85	75.77	89.8	84.59	76	76
2	Pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	74.8	75.5	88	76.9	75.5	75.1

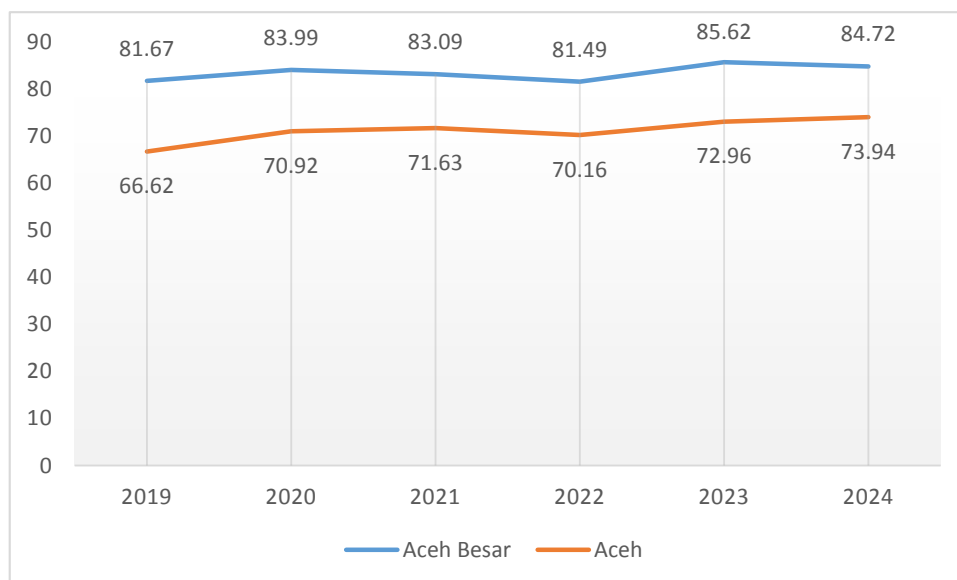
No.	Indikator (Skor)	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Daerah Rawan Pangan	5 desa	10 desa	-	167 Desa	178 Desa	100 Desa

Sumber data : Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar, 2025

B. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut: 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. 8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) 9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Indeks ketahanan pangan kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung meningkat, kemudian menurun sampai tahun 2022 dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 85,62 kemudian di tahun 2024 menjadi 84,72 penurunan indeks ketahanan pangan ini disebabkan oleh ketersediaan pangan tetap pada posisi 76 persen sedangkan kebutuhan akan pangan semakin meningkat. Indeks ketahanan pangan Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai tahun 2024 berada di atas indeks ketahanan pangan Aceh. Gambaran perkembangan indeks ketahanan pangan Kabupaten Aceh Besar dan Aceh dapat dilihat pada gambar berikut ini berikut.

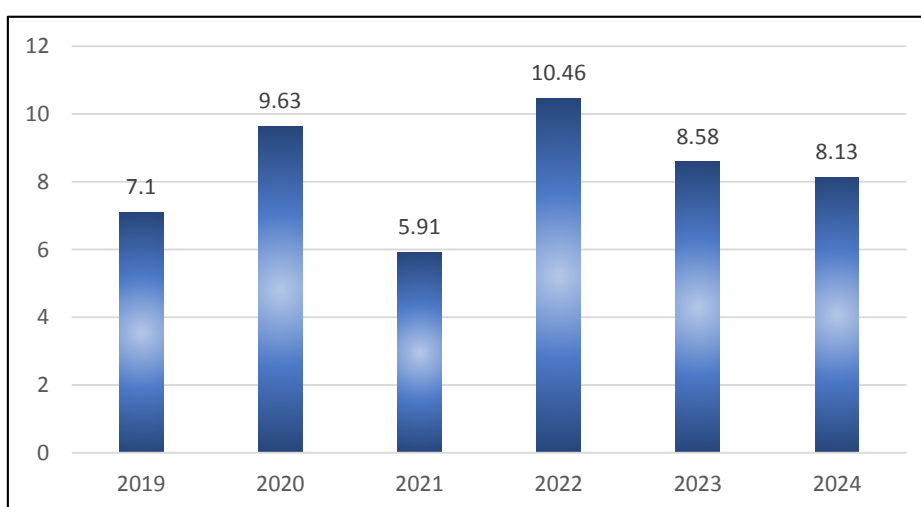


Sumber : Buku Index Ketahanan Pangan, 2019 – 2024

Gambar 2.9. Indeks Ketahanan Pangan Aceh Besar dan Aceh Tahun 2019 – 2024

C. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan estimasi proporsi atau indikator dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase serta dimana penduduk dapat memenuhi konsumsi pangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik angka ketidacukupan konsumsi pangan kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dalam kondisi fluktuatif untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut ini.



Sumber : Dinas Pangan Aceh Besar, 2025

Gambar 2.10. Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2024

Dari gambar di atas dilihat ketidacukupan konsumsi pangan tahun 2022 naik dari tahun 2021 dari 5,91 persen naik menjadi 10,46 persen namun tahun 2024 ketidacukupan konsumsi pangan turun menjadi 8,13 persen, ini menunjukkan penduduk dapat memenuhi konsumsi pangan lebih besar dari tahun 2022.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. Capaian IKLH beserta dengan indikator pendukung di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12.
Capaian IKA, IKU, IKL dan IKLH Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019-2024

No	Indeks	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	IKA	60	74.65	56.67	50	55.88	60.67
2	IKU	85.11	92.18	89.74	90.37	90.76	93.85
3	IKL	96.73	56.07	63.58	63.58	63.06	63.41
4	IKLH	80.61	77.82	71.58	69.32	71.58	74,71
5	Kriteria	Baik	Baik	Baik	Sedang	Baik	Baik

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar,2025

Kenaikan Indeks Lingkungan Hidup pada tahun 2024 dipengaruhi oleh kenaikan nilai indeks kualitas air, indeks kualitas udara, walaupun kualitas lahan terjadi penurunan dari tahun 2022 namun tidak berpengaruh terhadap nilai IKLH tahun 2024.

B. Sanitasi dan Air minum

Pembangunan disektor keciptakaryaannya yaitu pembangunan Perumahan, Air Bersih, Sanitasi, Air Limbah dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, serta sarana lainnya di kawasan permukiman yang memadai guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan bersih. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyediaan kebutuhan air bersih di Aceh Besar adalah kondisi topografi dan luas wilayah, serta terbatasnya ketersediaan air baku yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan

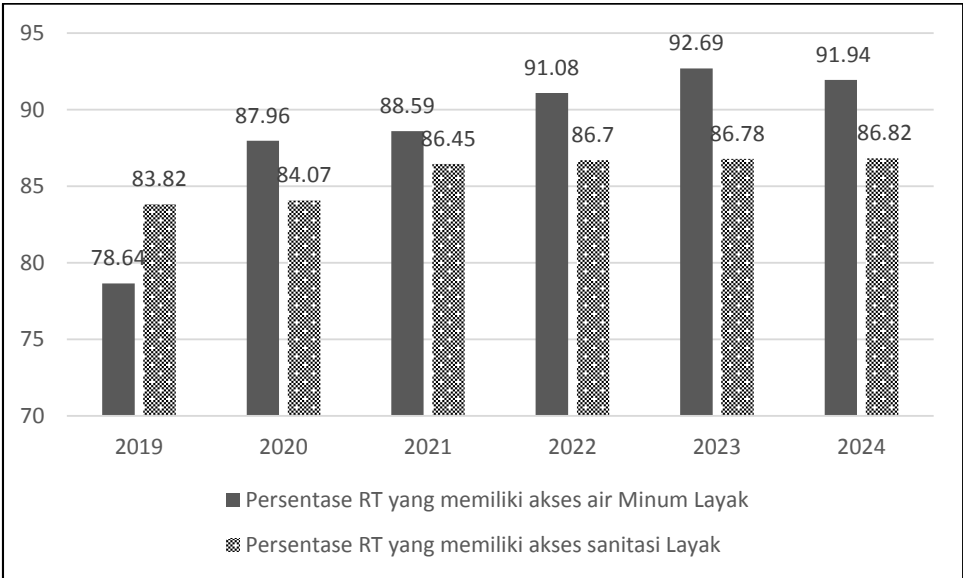
membutuhkan anggaran yang memadai. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi menunjukkan peningkatan yang cukup baik, pada Tahun 2019 sebesar 78,64 persen untuk Akses air minum dan 83,82 persen untuk sanitasi, pada Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 91,94 persen pada akses air minum dan sanitasi menjadi 86,82 persen.

Tabel 2.13.
Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak Aceh Besar 2019 – 2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase RT yang memiliki akses air Minum Layak	78,64	87,96	88,59	91,08	92,69	91.94
Persentase RT yang memiliki akses sanitasi Layak	83,82	84,07	86,45	86,7	86,78	86.82

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2025

Berdasarkan data tersebut diatas kondisi sanitasi di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai tahun 2024 mengalami fluktuatif setiap tahunnya.



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.11. Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Aceh Besar 2019 – 2024

Kabupaten Aceh Besar kurun waktu 2020 – 2024 telah melakukan penanganan baik berupa pembagunan dan rehabilitas drainase sepanjang 25.392,76 meter dengan rincian dapat di lihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.14.
Pembangunan/rehabilitas saluran Drainase Lingkungandi Kabupaten Aceh Besar

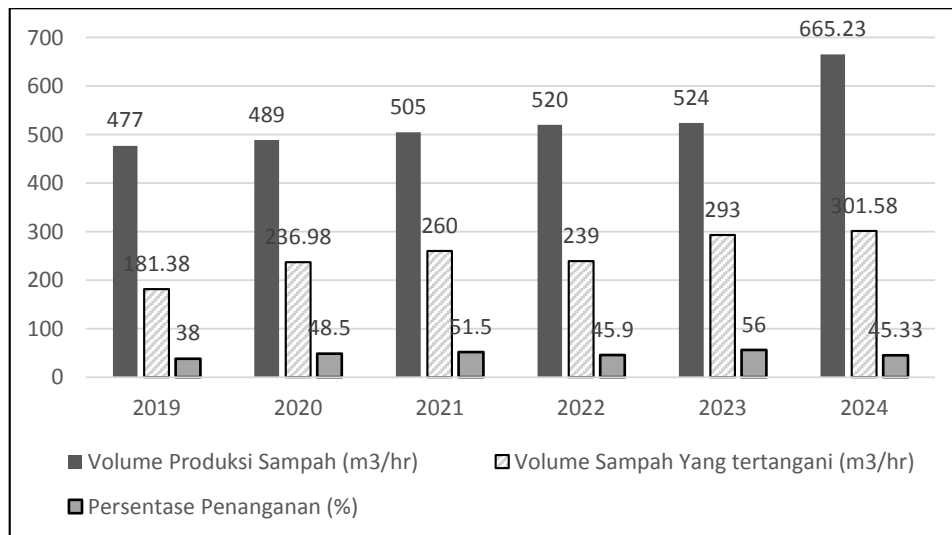
NO	KEGIATAN						TOTAL
		2020 (M)	2021 (M)	2022 (M)	2023 (M)	2024 (M)	2019-2023
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1	PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALURAN DRAINASE	18,032.30	3,234.80	1,911.91	1,341.55	872.20	25,392.76

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Aceh Besar, 2025

C. Timbulan Sampah yang Tertangani

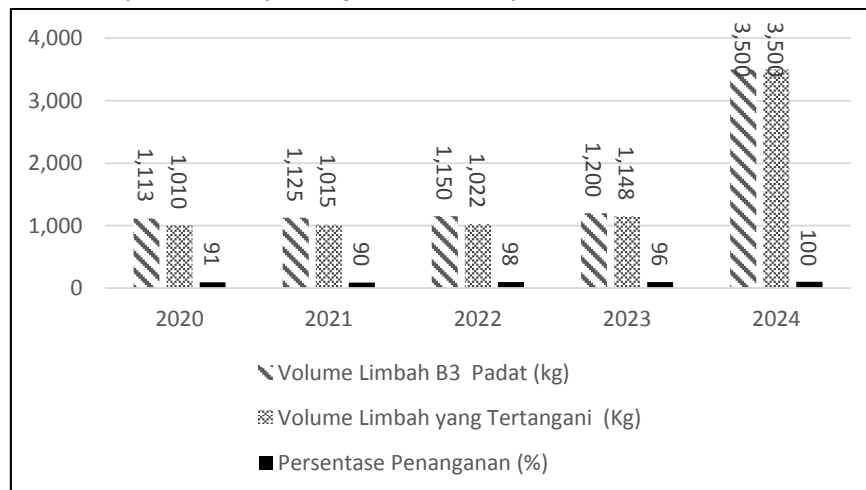
Pola operasional penanganan sampah Kabupaten Aceh Besar masih bertumpu pada penanganan sampah dari sumber sampai di TPA. Sampah yang masuk ke TPA setiap tahunnya sebanyak 524 m² /tahun berdasarkan data terakhir pada tahun 2023. Tahapan operasional penanganan sampah meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA. Pengelolaan ini dapat direalisasikan melalui tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Tantangan yang masih dihadapi terkait dengan tugas pengendalian lingkungan hidup terutama luasnya daerah kerja dalam hubungannya dengan besarnya volume sampah yang belum sebanding dengan ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana untuk penampungan/mobilisasi sampah masyarakat. Pada tahun 2019 volume yang ditangani tercatat sebesar 181,38 m³/hari dan volume produksi sampah tercatat sebesar 477 m³/hari, sedangkan pada tahun 2023 volume yang ditangani tercatat sebesar 293 m³/hari dan volume produksi sampah tercatat sebesar 524 m³/hari dimana pada tahun 2024 volumen produksi sampah naik menjadi 665.23 m³/hari hal ini pertambahan penduduk dengan peningkatan konsumsi serta peningkatan aktivitas ekonomi terutama pada wilayah yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh. Berdasarkan hal tersebut maka masalah persampahan merupakan hal yang harus ditangani secara serius agar dapat meningkatkan pengendalian lingkungan hidup masyarakat. gambar di bawah, kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar, 2025

Gambar 2.12. Perbandingan Produksi Sampah, Volume sampah yang tertangani dan persentase penanganan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar

Gambar 2.13. Perbandingan Produksi Limbah B3, Volumen Limbah B3 yang tertangani dan persentase penanganan dari Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023

Dari gambar diatas diatas dapat dilihat besarnya produksi Limbah B3 yang berasal dari puskesmas dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus meningkat dan dapat di tangani semua sampai 100 persen dari limbah B3 dari puskesmas. Selain penanganan limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar masih bersifat pembinaan dan pemantauan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap penanganan limbah B3 medis yang berasal dari Pukesmas hanya beru limbah padat serta Limbah Oli Bekas yang berada di Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya di serah kan penanganan kepada pihak ke 3. Pemantauan terhadap penangan limbah Oli Bekas barus dilakukan pada tahun 2022 dan tahun 2023.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan Materi Teknis Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032, Kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Besar sebagian besar berupa bencana geologi, yaitu gempa bumi, tanah longsor, dan banjir serta tsunami. Wilayah bahaya bencana alam dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a) Wilayah rawan bencana tanah longsor seluas 16.509 Ha berupa fisiografi pegunungan dengan lereng 25-40% sampai dengan > 40% dan mempunyai sifat fisik batuan mudah lepas. Kawasan ini meliputi wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie bagian selatan, Kota Jantho, dan Kuta Malaka.
- b) Wilayah rawan bencana erosi tanah di wilayah pegunungan terjal dengan vegetasi jarang dan batu di permukaan seluas 27.109,8 Ha. Wilayah ini menyebar di Kecamatan Seulimeum, Masjid Raya, dan Lembah Seulawah.
- c) Wilayah rawan bencana banjir di samping DAS Krueng Aceh bagian hilir seluas 11.434,7 Ha, meliputi Kecamatan Ingin Jaya, Montasik, Darul Imarah, dan Kuta Malaka.
- d) Wilayah rawan bencana gunung berapi berupa bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi aktif seperti lahar panas, material batu, lahar dingin, abu dan sebagainya. Gunung berapi aktif dimaksudkan adalah Gunung Seulawah. Wilayah dalam kategori bahaya I, II, dan III letusan Gunung Berapi Seulawah seluas 65.044 Ha, meliputi Kecamatan Seulimeum, Masjid Raya dan Lembah Seulawah.
- e) Wilayah bahaya tsunami meliputi kawasan pesisir radius 5 km dari garis pantai dengan ketinggian dibawah 50 meter dari permukaan laut (seluas 16.422 Ha). Wilayah dengan mempunyai ancaman bahaya tsunami cukup luas adalah Kecamatan Peukan Bada, Baitusalam, Masjid Raya, Lhoknga, Pulo Aceh, Lhoong, dan Leupung.

Kawasan rawan bencana tersebar dan menyatu pada kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Total luas wilayah yang termasuk rawan bencana sebesar 136.519 Ha atau 45% dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar. Beberapa kawasan di wilayah Kabupaten Aceh Besar memiliki keterbatasan untuk dikembangkan akibat wilayahnya tinggi ancaman erosi, abrasi, dan daerah genangan.

Tabel 2.15.
Wilayah Potensi Bencana dalam Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Potensi Jenis Bencana
1	Lembah Seulawah	Gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
2	Seulimeum	Gempa, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
3	Kota Jantho	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.
4	Kuta Cot Glie	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, dan kecelakaan lain.
5	Indrapuri	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
6	Sukamakmur	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran dan kecelakaan lain.
7	Montasik	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
8	Ingin Jaya	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran, dan kecelakaan lain.
9	Kuta Baro	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.
10	Darussalam	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, arus tsunami kebakaran dan kecelakaan lain.
11	Kuta Malaka	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
12	Simpang Tiga	Gempa Bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, kebakaran dan kecelakaan lain.
13	Darul Kamal	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan dan kecelakaan lain.
14	Darul Imarah	Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, arus tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
15	Baitussalam	Gempa bumi, banjir genangan, tanah longsor, hama tanaman, pasang purnama, gelombang tsunami, kebakaran, kekeringan, dan kecelakaan lain.
16	Pulo Aceh	Gempa bumi, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran dan kecelakaan lain.
17	Peukan Bada	Gempa bumi, banjir genangan, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
18	Lhoknga	Gempa bumi, banjir genangan, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
19	Leupung	Gempa bumi, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

20	Lhoong	Gempa bumi, banjir, pasang purnama, tanah longsor, kekeringan, hama tanaman, gelombang tsunami, kebakaran, dan kecelakaan lain.
21	Blang Bintang	Gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hama tanaman, dan kecelakaan lain.

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir Aceh Besar mengalami bencana Alam seperti banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran dan gempa bumi. Jumlah kejadian bencana dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dilaporkan sebanyak 999 kejadian bencana Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.16.
Jumlah kasus Bencana Per Kecamatan di kab. Aceh Besar Tahun 2020- 2024

No	Jenis Bencana	Tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)
1	Angin topan	23	4	29	14	11	81
2	Banjir	10	17	4	12	3	46
3	Tanah Longsor	2	3	2	2	0	9
4	Kebakaran	46	49	71	61	59	286
5	Gempa	0	0	0	0	0	-
6	Karhutla	31	22	41	143	106	343
7	Pohon Tumbang	31	49	23	40	91	234
Jumlah		143	144	170	272	270	999

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Aceh Besar, 2025

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana, yaitu: kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (>144). Data Tahun 2023, menunjukkan Kabupaten Aceh Besar memiliki tingkat risiko bencana tinggi mencapai 202,01 dan sampai tahun 2024 sudah mencapai 195,61. Seluruh bagian kabupaten Aceh Besar terkategori memiliki risiko tinggi. Untuk itu perlu dilakukan upaya mitigasi, adaptasi, dan resilience yang massif, terstruktur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar IRB di Kabupaten Aceh Besar turun menjadi kategori rendah, Berikut perbandingan IRB Aceh Besar, Aceh dan Nasional, dimana Aceh Besar berada di atas Provinsi dan Nasional seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.17.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Kebencanaan Kabupaten Aceh Besar	Provinsi Aceh	Nasional
2020	211.2	153.58	141.85
2021	209.78	149.99	138.81
2022	207.78	149.1	135.56
2023	202.01	149.9	132.25
2024	195.61	146.9	132.25

Sumber: Buku IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia)

B. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Indeks Ketahanan Daerah juga merupakan komponen untuk melihat ketahanan sebuah daerah dalam kebencanaan. IKD kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.18.
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Indeks Ketahanan Daerah
1	2020	0,30
2	2021	0,33
3	2022	0,34
4	2023	0,36
5	2024	0,38

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana , 2025

2.1.1.7. Demografi

A. Jumlah Penduduk

Kurun periode 2019 – 2024, Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil sensus penduduk Tahun 2019 adalah 425.216, di Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 405.535 dan terus menurun di Tahun 2021 adalah 409.527 jiwa. Jumlah penduduk kembali meningkat pada tahun 2022 yaitu 414.490 jiwa sampai tahun 2023 jumlah penduduk Aceh Besar 435.294 jiwa dan tahun 2024 sebanyak 442,987 jiwa, pertambahan penduduk di sebabkan karena angka migrasi dan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 sebesar 1,39 persen. Perkembangan penduduk di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Aceh Besar Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Kepadatan Penduduk per KM
1	2019	425.216	1,90	144
2	2020	405.535	1,40	140
3	2021	409.527	1,31	141
4	2022	414.490	1,48	142
5	2023	435.294	1,43	149
6	2024	442.987	1,39	153

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

B. Distribusi Jumlah Penduduk

Tabel 2.20.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar Menurut Kecamatan Tahun 2019 – 2024

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lhoong	149,02	10,981	9,860	9,893	9,948	10,444	10,656
2	Lhoknga	87,94	17,931	16,927	17,064	17,239	17,932	18,218
3	Indrapuri	197,03	24,064	22,372	22,518	22,714	24,166	24,506
4	Seulimeum	404,35	2,611	23,652	23,763	23,926	24,257	24,831
5	Montasik	59,73	21,405	20,261	20,432	2,065	21,480	21,615
6	Sukamakmur	43,45	16,754	15,488	15,581	15,708	16,748	17,004
7	Darul Imarah	24,34	56,400	54,145	54,714	20,650	58,494	59,602
8	Peukan Bada	36,25	18,871	22,654	23,402	24,227	24,070	24,550
9	Mesjid Raya	129,93	25,227	21,231	21,172	21,159	22,195	22,369
10	Ingin Jaya	24,33	33,921	33,993	34,475	3,039	18,516	37,285
11	Kuta Baro	61,07	28,419	25,959	26,089	26,276	28,455	18,962
12	Darusalam	38,43	27,417	22,834	22,751	22,718	24,076	24,557
13	Pulo Aceh	90,55	4,576	4,463	4,513	4,574	4,834	4,942
14	Lembah Seulawah	319,6	1,299	11,927	11,993	12,086	13,265	13,490
15	Kota Jantho	593	10,216	9,440	9,500	9,581	9,483	9,594
16	Kuta Cot Glie	332,25	14,931	14,075	14,186	14,330	15,135	15,377
17	Kuta Malaka	22,81	7,123	6,896	6,971	7,061	7,298	7,403
18	Simpang Tiga	27,59	6,419	6,269	6,336	6,418	7,072	7,180
19	Darul Kamal	23,04	818	8,472	8,620	8,789	9,132	9,356
20	Baitussalam	20,84	20,024	22,943	23,568	24,264	25,176	25,842
21	Kr. Barona Jaya	6,96	17,091	16,471	16,646	16,860	18,516	18,962
22	Leupung	169,15	3,095	3,392	3,471	3,560	3,707	3,774
23	Blang Bintang	41,75	13,071	11,811	11,869	11,953	12,649	12,814
Jumlah		2.903,50	425,216	405,535	409,527	414,490	435,294	442,987

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

Jika dilihat dari jumlah penduduk di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah sampai tahun 2024 yang berjumlah 59.602 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya sampai tahun 2024 adalah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 3,774 jiwa. Walaupun penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya ternyata menjadi Kecamatan terpadat. Pada tahun 2024, ada sekitar 2.724 jiwa/km² di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Darul Imarah menjadi kecamatan terpadat kedua dengan rata-rata 2.448 jiwa/km². Sedangkan yang terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 16 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21.
Luas Wilayah, Persentase Penduduk Berdasarkan dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km2
1	Lhoong	149,02	2,41	72
2	Lhoknga	87,94	4,11	207
3	Leupung	169,15	0,85	22
4	Indrapuri	197,03	5,53	124
5	Seulimeum	404,35	5,61	61
6	Montasik	59,73	4,88	362
7	Sukamakmur	43,45	3,84	391
8	Darul Imarah	24,34	13,45	2.448
9	Peukan Bada	36,25	5,54	677
10	Mesjid Raya	129,93	5,05	172
11	Ingin Jaya	24,33	8,42	1.532
12	Kuta Baro	61,07	6,56	476
13	Darusalam	38,43	5,54	639
14	Pulo Aceh	90,55	1,12	55
15	Lembah Seulawah	319,6	3,05	42
16	Kota Jantho	593	2,17	16
17	Kuta Cot Glie	332,25	3,47	46
18	Kuta Malaka	22,81	1,67	324
19	Simpang Tiga	27,59	1,62	260
20	Darul Kamal	23,04	2,11	406
21	Baitussalam	20,84	5,83	1.240
22	Kr. Barona Jaya	6,96	4,28	2.724
23	Blang Bintang	41,75	2,89	307
Jumlah		2.903,50	100	153

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

C. Struktur Penduduk

Berdasarkan proporsi penduduk menurut jenis kelamin, dari total penduduk Tahun 2024 yaitu sebesar 442.987 jiwa, proporsi penduduk laki-laki adalah sebesar 221.967 jiwa dan perempuan sebesar 221.020 jiwa. Pada tahun 2023 dari total jumlah penduduk sebesar 479.298 jiwa, proporsi penduduk laki-laki mencapai 208.118 jiwa dan perempuan sebesar 271.180 jiwa. Jika dilihat dari struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, namun pertumbuhan jumlah penduduk perempuan tahun 2024 cenderung mengalami penurunan. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.22.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk	
		Laki – Laki	Perempuan
1	2019	218.135	207.081
2	2020	204.458	201.107
3	2021	204.428	201.107
4	2022	209.017	205.473
5	2023	208.118	217.180
6	2024	221.967	221.020

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten Aceh Besar yang disajikan pada Tabel berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2024.

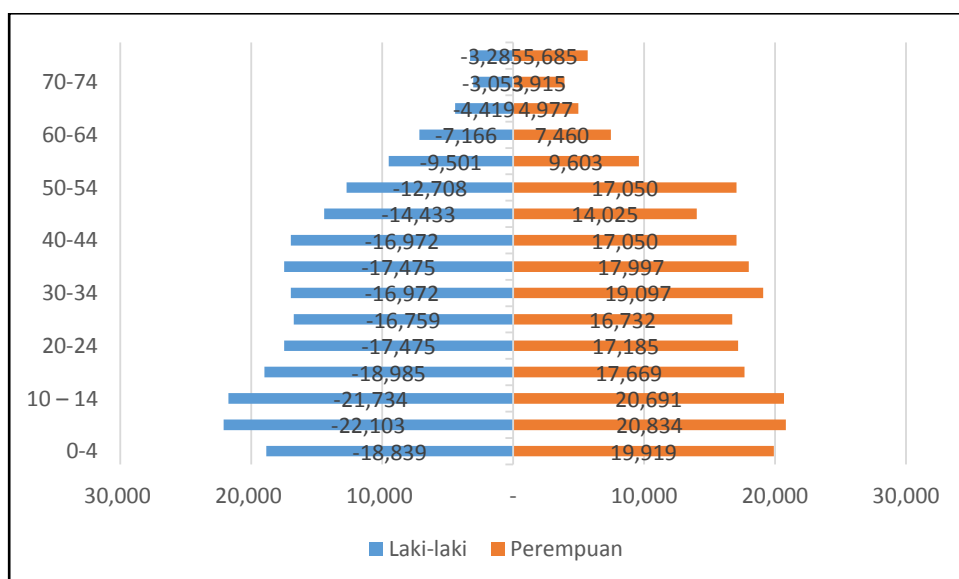
Tabel 2.23.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan
1	0-4	18.839	17.919
2	5-9	22.103	20.834
3	10 – 14	21.734	20.691
4	15-19	18.985	17.669
5	20-24	17.982	17.185
6	25-29	16.759	16.732
7	30-34	16.553	17.097
8	35-39	17.475	17.997
9	40-44	16.972	17.050
10	45-49	14.433	14.025

Sumber : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

11	50-54	12.708	12.180
12	55-59	9.501	9.603
13	60-64	7.166	7.460
14	65-69	4.419	4.977
15	70-74	3.053	3.915
16	75+	3.285	5.686

Secara garis besar, karakteristik penduduk di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Aceh Besar adalah piramida penduduk muda yang menunjukkan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Karakteristik penduduk ini menunjukkan ada laju pertumbuhan yang cukup cepat dengan populasi yang masih muda dan berkembang. Kelompok umur dengan populasi paling banyak adalah kelompok umur 5 – 9 tahun disusul dengan kelompok umur 10 – 14 tahun. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat distribusi setara di dalam tiap kelompok umur, generasi millenial yaitu generasi usia produktif yang lahir pada tahun 1981-1996 (atau berumur 26-41 tahun mendominasi karakteristik penduduk di Kabupaten Aceh Besar. Generasi Z dan Generasi X kemudian menyusul di urutan kedua dan ketiga secara berurutan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2025

Gambar 2.14. Grafik jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok umum dan jenis kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

D. Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan

Tabel 2.24.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar 2025 - 2029

Kecamatan	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Lhoong	10.208	10.271	10.330	10.390	10.447
Lhoknga	17.939	18.134	18.323	18.516	18.704
Leupung	3.876	3.978	4.081	4.157	4.233
Indrapuri	23.527	23.746	23.958	24.173	24.381
Kuta Cot Glie	14.907	15.068	15.224	15.383	15.538
Seulimeum	24.647	24.831	25.007	25.185	25.356
Kota Jantho	9.919	10.009	10.097	10.186	10.272
Lembah Seulawah	12.483	12.588	12.688	12.790	12.888
Mesjid Raya	21.354	21.367	21.372	21.406	21.433
Darussalam	22.927	22.941	22.946	23.005	23.057
Baitussalam	26.722	27.528	28.347	29.156	29.979
Kuta Baro	27.092	27.303	27.505	27.709	27.906
Montasik	21.514	21.757	21.994	22.234	22.470
Blang Bintang	12.321	12.416	12.506	12.598	12.686
Ingin Jaya	37.126	37.756	38.382	39.020	39.656
Krueng Barona Jaya	17.680	17.918	18.152	18.390	18.625
Sukamakmur	16.244	16.386	16.523	16.662	16.797
Kuta Malaka	7.406	7.506	7.604	7.704	7.803
Simpang Tiga	6.732	6.823	6.913	7.004	7.094
Darul Imarah	58.082	58.859	59.618	60.394	61.156
Darul Kamal	9.402	9.592	9.782	9.976	10.171
Peukan Bada	27.128	28.102	29.099	29.930	30.774
Pulo Aceh	4.806	4.874	4.941	5.009	5.077
Jumlah	434.042	439.753	445.392	450.977	456.503

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Dari table proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2025 – 2029 pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat, kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Peukan Bada dan kecamatan Krueng Barona Jaya, kecamatan-kecamatan ini merupakan kecamatan yang berbatasan dengan dengan Kota Banda Aceh.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

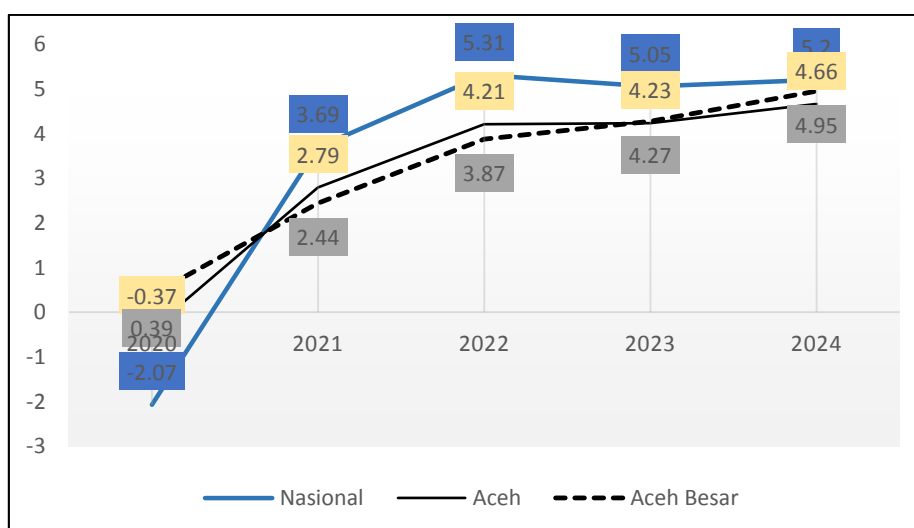
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang

bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada Gambar di bawah dapat di lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar mengalami fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Pada periode tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar berada di angka 4,35 persen dan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar sempat mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 0.39 persen hal ini disebabkan karena terpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan ekonomi negative akibat pandemi Covid-19, akan tetapi ditahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar secara perlahan kembali mengalami kenaikan sampai di tahun 2024 menjadi sebesar 4,95 persen berada di atas provinsi aceh dan di bawah nasional.



Sumber Data : BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.15. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar Periode Tahun 2020 – 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 telah melampaui target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 – 2026, hal ini disebabkan oleh peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stagnan dan berada di bawah rata-rata

Provinsi Aceh maupun nasional. Rendahnya laju pertumbuhan ini disebabkan oleh sejumlah faktor struktural, sektoral, dan eksternal yang saling berkaitan, di antaranya: Kabupaten Aceh Besar, sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Aceh, menghadapi tantangan serius dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonominya. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan posisi geografis yang mendukung, laju pertumbuhan ekonomi daerah ini masih tergolong rendah dan cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan kebijakan yang belum optimal. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten Aceh Besar antara lain:

1. Ketergantungan pada Sektor Primer

Struktur ekonomi Aceh Besar masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang rentan terhadap fluktuasi iklim, bencana alam, dan harga komoditas. Rendahnya hilirisasi dan minimnya diversifikasi produk menyebabkan nilai tambah ekonomi dari sektor ini belum optimal.

2. Minimnya Investasi dan Aktivitas Industri Pengolahan

Kurangnya daya tarik investasi, baik dari sektor swasta lokal maupun nasional, turut memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan infrastruktur industri, perizinan yang belum optimal, serta belum terbentuknya kawasan industri yang terintegrasi.

3. Rendahnya Produktivitas dan Kualitas SDM

Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum merata menjadi hambatan dalam peningkatan produktivitas. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar juga menghambat penciptaan sektor-sektor ekonomi baru yang lebih dinamis.

4. Keterbatasan Infrastruktur Ekonomi dan Konektivitas

Aksesibilitas antar wilayah, khususnya ke kawasan produksi dan pemasaran, masih terbatas. Infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan logistik belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan dan agribisnis.

5. Masalah lainnya adalah kurangnya diversifikasi ekonomi. Perekonomian Aceh Besar

Belum berkembang ke sektor-sektor bernilai tinggi seperti industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi digital. Ketergantungan pada sektor tradisional

membuat ekonomi daerah rentan terhadap guncangan eksternal, seperti perubahan cuaca, fluktuasi harga komoditas, atau bencana alam.

6. Kinerja Sektor UMKM yang Belum Optimal

Meskipun UMKM mendominasi struktur usaha di Aceh Besar, keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan pasar menyebabkan sektor ini belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Banyak UMKM juga belum terintegrasi dalam rantai pasok yang lebih luas.

7. Ketergantungan terhadap Belanja Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada belanja pemerintah, terutama dari dana transfer pusat. Ketika realisasi belanja daerah melambat, maka pertumbuhan ekonomi pun ikut menurun. Kondisi ini mencerminkan belum kuatnya sektor ekonomi yang tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

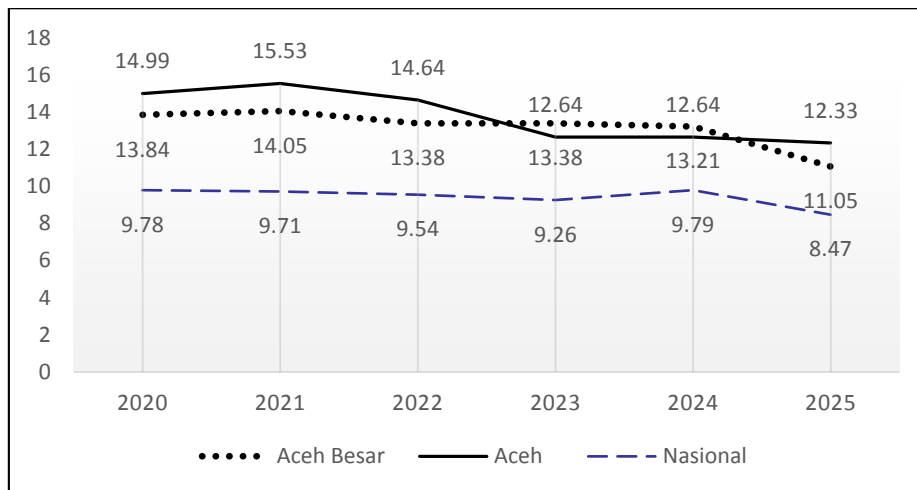
8. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang belum terintegrasi dan berkelanjutan

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang belum terintegrasi dan berkelanjutan menyebabkan berbagai potensi daerah belum tergarap secara optimal. Beberapa program pembangunan hanya berfokus pada infrastruktur fisik tanpa didukung oleh pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, diperlukan pendekatan pembangunan yang menyeluruh, meliputi perbaikan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing investasi, modernisasi sektor pertanian, serta pengembangan sektor ekonomi baru. Kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Besar.

B. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar sebesar 13,92 persen, dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan sampai 14,05 persen dan turun Kembali pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menjadi sebesar 13,21 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.16. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2025

Berdasarkan data BPS, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 sebesar 13,21 persen ,berada dibawah persentase penduduk miskin Propinsi Aceh sebesar 14,23 persen tetapi masih berada diatas Persentase Kemiskinan Nasional sebesar 9,03 persen, dan di tahun 2025 kemiskinan Kabupaten Aceh Besar terjadi penurun sebesar 2 poin dari tahun 2024 yaitu menjadi 11.05 persen. Penurunan angka kemiskinan ini tidak dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin karena turunnya persentase kemiskinan tidak selalu berarti bahwa jumlah penduduk miskin berkurang, terutama jika terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketimpangan ekonomi, perubahan garis kemiskinan, atau adanya migrasi penduduk, seperti pada Tabel 2.22

Tabel 2.25.
Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

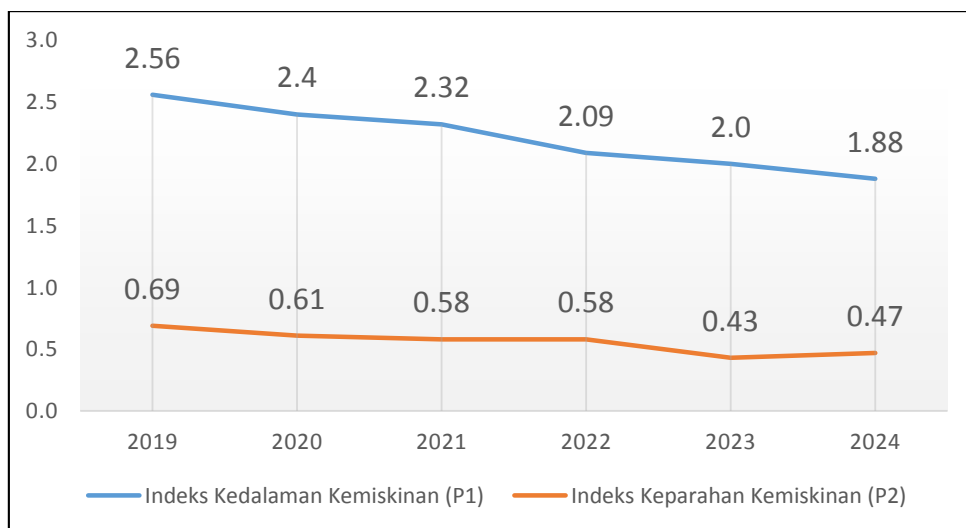
Tahun	Penduduk Miskin Aceh Besar (Jiwa)	Persentase Kemiskinan Aceh Besar (%)
2019	58.903	13,92
2020	59.700	13,84
2021	60.260	14,05
2022	58.180	13,38
2023	58.940	13,38
2024	58.980	13,21

Sumber : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Ada beberapa variabel untuk melihat angka kemiskinan. Variabel tersebut adalah :

- ✓ Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
- ✓ *Head Count Index* (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- ✓ Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- ✓ Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Gambar 2.17. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Besar

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2024, Indeks Keparahannya kemiskinan Kabupaten Aceh Besar sebesar 0,47 dan berada di bawah Aceh yang mencapai 0,71. Sementara itu, Indeks Kedalaman kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar sebesar 1,88 dan berada di bawah Aceh yang mencapai angka 2,62.

Tabel 2.26.
 Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2019	477.563	2,56	0,69
2020	477.938	2,40	0,61
2021	489.498	2,32	0,58
2022	519.320	2,09	0,58
2023	564.431	2,00	0,43
2024	586.860	1,88	0,47

Sumber : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

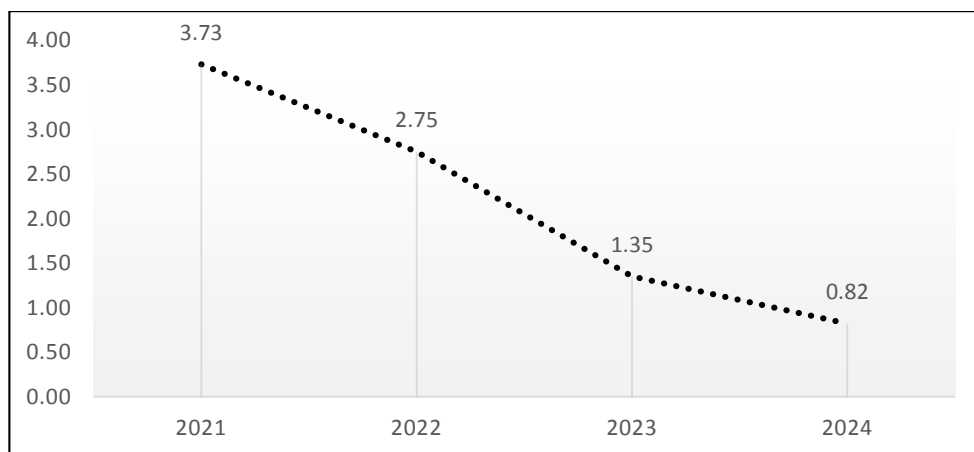
Dari Tabel diatas menginformasikan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2019 semakin meningkat sampai dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2019, garis kemiskinan Kabupaten Aceh Besar berada di Rp. 477.563, dan terus meningkat sampai Tahun 2024 menjadi Rp. 586.860,-.

Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang menurun di setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Aceh Besar tercatat sebesar 2,59 persen dan sampai Tahun 2024 menjadi sebesar 1,88 persen. Kemudian untuk Indeks Keparahannya kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Besar walaupun fluktuatif akan tetapi cenderung menurun setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 sebesar 0,69 persen dan pada Tahun 2024 sebesar 0,47 persen. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar rumah tangga miskin ini bertambah Besar.

Pengurangan Angka Kemiskinan ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Angka kemiskinan ekstrem secara Nasional pada tahun 2021 sebesar 3,73 persen dan pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem Kabupaten Aceh Besar menjadi 0,82 persen berada dibawah kemiskinan provinsi yaitu sebesar 1,83 persen. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan *USD 1.9 PPP* = Rp10.195,6 per kapita per hari, untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan perubahan IHK periode tahun yang bersesuaian (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Kabupaten Aceh Besar dikategorikan masuk dalam persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi. (diatas rata-rata). Kemiskinan ekstrem terus menurun dikarenakan adanya program-program pemerintah yang terus dilakukan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, bantuan sosial dan pendampingan-pendampingan kewirausahaan dan pelatihan bagi masyarakat miskin seperti disajikan pada Gambar 2.18.



Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.18. Perkembangan Kemiskinan Ektrem Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 – 2024

B.1. Sebaran kemiskinan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Aceh Besar

Pada bulan Maret tahun 2023, persentase penduduk yang tergolong miskin di Kabupaten Aceh Besar tercatat sebesar 14,45 persen. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan data sebelumnya pada bulan September tahun 2022, di mana tingkat kemiskinan berada di angka 14,75%. Penurunan

tersebut menggambarkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi di wilayah ini, meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk menurunkan angka kemiskinan lebih jauh lagi.

Selain itu, jika dilihat dari sisi kemiskinan ekstrem, data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar memiliki tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 6,73 persen. Angka ini berarti bahwa dari total populasi sekitar 414.000 jiwa, terdapat sekitar 30.160 jiwa yang hidup dalam kondisi sangat miskin dan menghadapi kesulitan yang lebih berat dibandingkan dengan mereka yang hanya tergolong miskin secara umum. Penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem ini biasanya mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Kemiskinan masih menjadi persoalan krusial di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar mencapai 428.132 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51.180 orang atau sekitar 14,64 persen hidup dalam kategori kemiskinan ekstrem, yaitu kelompok masyarakat yang masuk dalam Desil 1, sementara sebanyak 110.099 orang atau sekitar 29,17 persen termasuk dalam kategori miskin, mencakup Desil 1 hingga Desil 4.

Jika ditelusuri lebih dalam, distribusi kemiskinan ini tidak merata di seluruh kecamatan. Beberapa wilayah menunjukkan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Salah satu contoh paling mencolok adalah Kecamatan Seulimuem, di mana hampir 38,41 persen penduduknya tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara seluruh kecamatan, menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga warganya hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan. Diikuti oleh Kuta Cot Glie dengan 36,82 persen, Lembah Seulawah dengan 32,38 persen, dan Pulo Aceh dengan 31,66 persen, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan dasar cenderung mengalami tingkat kemiskinan ekstrem yang lebih tinggi.

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa di beberapa kecamatan, kemiskinan secara keseluruhan (Desil 1-4) juga berada pada angka yang mengkhawatirkan. Misalnya, Kecamatan Leupung mencatat angka kemiskinan umum tertinggi yaitu 42,48 persen, disusul oleh Lhoong (37,89 persen), Mesjid Raya (35,15 persen), dan Kuta Cot Glie (33,49 persen). Data ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut dalam hal

akses terhadap penghidupan yang layak, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan.

Sebaliknya, beberapa kecamatan yang relatif lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan menunjukkan angka kemiskinan yang lebih rendah. Contohnya adalah Kecamatan Peukan Bada, dengan tingkat kemiskinan ekstrem hanya 1,05 persen, menjadikannya yang terendah di seluruh kabupaten. Disusul oleh Baitussalam (2,37 persen) dan Darussalam (4,11 persen), yang juga menunjukkan angka kemiskinan relatif rendah, baik dalam kategori ekstrem maupun keseluruhan. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa keterjangkauan terhadap infrastruktur dasar, peluang kerja, dan layanan publik memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tren yang ditampilkan oleh data ini memberikan gambaran jelas bahwa meskipun Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi besar dalam aspek sumber daya alam dan manusia, masih terdapat kesenjangan sosial yang signifikan antarwilayah. Wilayah pedalaman dan kepulauan kecil tampaknya masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses terhadap pembangunan ekonomi dan sosial yang merata. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang terarah, berbasis data, dan mengedepankan pendekatan inklusif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Pemerintah daerah, bersama dengan pihak terkait, perlu menaruh perhatian khusus pada kecamatan-kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi, terutama dalam hal perencanaan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka kemiskinan ekstrem sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Aceh Besar.

Data terbaru mengenai kondisi kemiskinan di wilayah kabupaten ini menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Dari total penduduk sebanyak 428.132 jiwa, sekitar 14,64 persen di antaranya berada dalam kategori kemiskinan ekstrem, sementara total penduduk miskin secara keseluruhan mencapai 29,17 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa hampir sepertiga masyarakat di wilayah ini hidup dalam keterbatasan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Jika ditelisik lebih detail berdasarkan wilayah kecamatan, beberapa kecamatan memperlihatkan angka kemiskinan ekstrem yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Misalnya, Kecamatan Kuta Cot Glie yang memiliki jumlah penduduk sekitar 14.994 jiwa, tercatat memiliki 36,82 persen penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Hal ini menjadi perhatian utama karena angka ini jauh melampaui angka kemiskinan ekstrem rata-rata kabupaten yang hanya 14,64 persen. Angka kemiskinan total di kecamatan ini juga tinggi, mencapai 33,49 persen, menandakan kebutuhan akan intervensi sosial dan ekonomi yang intensif.

Begitu pula dengan Kecamatan Seulimuem, yang dari total 24.315 penduduknya, sebanyak 38,41 persen tergolong miskin ekstrem. Ini merupakan angka yang sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa di kecamatan ini akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan masih sangat terbatas. Selain itu, Kecamatan Pulo Aceh, meskipun memiliki jumlah penduduk relatif kecil yaitu 4.721 jiwa, juga mencatat angka kemiskinan ekstrem sebesar 31,66 persen, dengan total kemiskinan mencapai 40,02 persen. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis yang menjadikan wilayah ini sulit dijangkau dan minimnya akses infrastruktur.

Di sisi lain, terdapat kecamatan yang meskipun memiliki jumlah penduduk besar, tingkat kemiskinannya relatif lebih rendah. Contohnya Kecamatan Darussalam yang memiliki 23.728 penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem hanya 4,11 persen dan total kemiskinan 20,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan ini memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas dasar lainnya.

Kecamatan Indrapuri, dengan jumlah penduduk hampir sama dengan Darussalam yaitu 23.788 jiwa, justru memiliki angka kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi, yaitu 17,21 persen, dan total kemiskinan mencapai 31,60%. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan jumlah penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan potensi wilayah masing-masing kecamatan.

Secara umum, kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah pesisir atau pedalaman cenderung memiliki angka kemiskinan ekstrem dan total kemiskinan yang lebih tinggi. Kecamatan seperti Leupung, Lhoong, dan Mesjid Raya juga menunjukkan tren serupa dengan angka kemiskinan ekstrem masing-masing sebesar 11,41%, 17,61%, dan 8,74%, serta total kemiskinan mencapai 42,48%,

37,89%, dan 35,15%. Faktor geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama kondisi ini.

Kecamatan-kecamatan seperti Kota Jantho dan Kuta Baro juga menunjukkan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, dengan angka kemiskinan ekstrem di atas 15% dan total kemiskinan mendekati atau di atas 30%. Angka ini menandakan adanya kebutuhan peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara kecamatan seperti Peukan Bada menonjol dengan angka kemiskinan ekstrem sangat rendah, hanya 1,05%, dan total kemiskinan 23,84%. Kondisi ini menjadi contoh bahwa dengan dukungan infrastruktur dan program sosial yang tepat, kemiskinan dapat ditekan meski kondisi geografis mungkin tidak selalu menguntungkan.

Tabel 2.27.
Kemiskinan Berdasarkan Kecamatan Kabupateten Aceh Besar tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Desil 1 /ekstrem (orang)	Desil 2-4 (orang)	Ekstrem	Miskin
1	Baitussalam	24725	603	6366	2,37%	23,45%
2	Blang Bintang	12371	2124	3604	15,21%	29,21%
3	Darul Imarah	57756	3161	11206	8,53%	23,20%
4	Darul Kamal	8921	1038	2234	11,07%	26,93%
5	Darussalam	23728	1043	4502	4,11%	20,76%
6	Indrapuri	23788	4381	7503	17,21%	31,60%
7	Ingin Jaya	35587	2282	8534	7,69%	25,77%
8	Kota Jantho	9478	1616	2608	23,43%	32,76%
9	Krueng Barona Jaya	18005	977	4239	5,37%	23,62%
10	Kuta Baro	28077	3775	7595	15,70%	28,84%
11	Kuta Cot Glie	14994	5709	4915	36,82%	33,49%
12	Kuta Malaka	7127	1063	2032	14,06%	27,08%
13	Lembah Seulawah	13079	3033	3862	32,38%	29,90%
14	Leupung	3678	436	1592	11,41%	42,48%
15	Lhoknga	17779	677	3774	4,34%	23,71%
16	Lhoong	10388	1820	3916	17,61%	37,89%
17	Mesjid Raya	21267	1725	6128	8,74%	35,15%
18	Montasik	21174	2705	6107	12,74%	29,58%
19	Peukan Bada	23719	247	4646	1,05%	23,84%
20	Pulo Aceh	4721	1433	1938	31,66%	40,02%
21	Seulimuem	24315	9319	6907	38,41%	28,86%
22	Simpang Tiga	6941	706	2059	9,02%	29,57%
23	Sukamakmur	16514	1307	3832	7,91%	23,12%
Total		428132	51180	110099	14,64%	29,17%

Sumber: P3KE. 2025

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran penting mengenai situasi kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar, yang menunjukkan adanya progres

positif dengan penurunan angka kemiskinan umum, namun juga menegaskan perlunya upaya lebih intensif untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih menjadi persoalan serius bagi sebagian warga masyarakat di wilayah ini. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu terus berupaya menghadirkan program-program yang efektif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberikan dukungan bagi mereka yang paling rentan agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan komitmen nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan sebuah target ambisius namun sangat mulia, yakni menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2024. Target ini menjadi bagian integral dari upaya strategis yang dirancang secara menyeluruh untuk menghapuskan kondisi hidup yang paling memprihatinkan di tengah masyarakat, di mana sebagian warga masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal yang layak, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Untuk mencapai tujuan besar ini, pemerintah daerah menyadari bahwa diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan semata, tetapi juga harus didukung oleh sistem pendataan yang akurat dan selalu diperbarui secara berkala. Pemutakhiran data kemiskinan menjadi elemen kunci yang memungkinkan identifikasi tepat terhadap siapa saja yang benar-benar membutuhkan intervensi, serta jenis bantuan apa yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga atau individu.

Selain itu, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan ekstrem ini juga sangat bergantung pada alokasi anggaran yang dilakukan secara cermat dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk menyusun kebijakan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak langsung dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Tak kalah penting, sinergi antarberbagai pihak menjadi pilar utama yang menunjang keberhasilan program ini. Diperlukan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, aparaturnya, pemerintah desa, serta partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat efektivitas program,

mempercepat pelaksanaan kebijakan, serta menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi yang erat dari seluruh elemen, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar optimistis bahwa cita-cita untuk menghapus kemiskinan ekstrem dari wilayahnya dapat terwujud, demi masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka rekomendasi untuk Penyusunan dokumen RPJMD ini antara lain. Pemutakhiran data kemiskinan: Melakukan pembaruan data kemiskinan secara rutin untuk memastikan akurasi. Pemetaan berbasis data: Menggunakan peta digital untuk memetakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, guna memfokuskan intervensi. Sinergi program Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor untuk efektivitas yang maksimal. Partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

B.2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar dapat dipahami sebagai berbagai kondisi atau situasi yang menyebabkan sebagian masyarakat di wilayah tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka secara layak. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Penyebab kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, sosial, ekonomi, dan kebijakan. Untuk mendukung penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Besar tahun 2025–2029. Berikut ini adalah beberapa faktor utama penyebab kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar:

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Keterbatasan infrastruktur di Aceh menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya aksesibilitas terhadap infrastruktur yang memadai berdampak signifikan pada tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di provinsi tersebut. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, karena terbatasnya kesempatan kerja dan peluang usaha.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di kalangan penduduk, terutama di daerah pedesaan, membatasi kemampuan mereka untuk mengakses lapangan pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada sektor informal dengan pendapatan rendah. Selain itu, kurangnya fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan memperburuk situasi ini.

3. Ketergantungan pada Sektor Pertanian yang Rentan

Sebagian besar penduduk Aceh Besar bekerja di sektor pertanian. Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, seperti lahan pertanian yang terbatas, rendahnya produktivitas, dan ketergantungan pada musim. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani tidak stabil dan sering kali berada di bawah garis kemiskinan.

4. Pengelolaan Dana yang Tidak Efektif

Meskipun Aceh Besar menerima alokasi dana desa dan dana otonomi khusus (otsus) yang signifikan, pengelolaannya sering kali tidak tepat sasaran. Contohnya, proyek pembangunan sering kali dikerjakan oleh pihak luar desa, bukan oleh masyarakat setempat, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi langsung kepada penduduk desa.

5. Praktik Rentenir yang Membebani Masyarakat

Praktik rentenir di Aceh Besar menyebabkan masyarakat terjatuh utang dengan bunga tinggi. Hal ini menguras pendapatan mereka dan menghambat kemampuan untuk berinvestasi dalam usaha produktif. Masyarakat yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan justru terperangkap dalam lingkaran utang yang tidak berujung.

6. Keterbatasan Akses terhadap Teknologi dan Informasi

Terbatasnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi pasar, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha. Hal ini memperburuk kesenjangan ekonomi antara daerah maju dan tertinggal di Aceh Besar.

7. Ketimpangan Sosial dan Budaya

Struktur sosial dan budaya di Aceh Besar juga berperan dalam keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Adanya kesenjangan akses pendidikan dan kesempatan ekonomi antara kelompok masyarakat tertentu dapat memperburuk ketimpangan. Norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam kegiatan ekonomi juga perlu diperhatikan.

Berdasarkan faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar maka Rekomendasi Strategis untuk RPJMD 2025–2029

- 1) Peningkatan Infrastruktur Dasar: Fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung kegiatan ekonomi.
- 2) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- 3) Diversifikasi Ekonomi dan Penguatan Sektor Pertanian: Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor non-pertanian dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui teknologi dan manajemen yang lebih baik.
- 4) Pengelolaan Dana yang Transparan dan Tepat Sasaran: Memastikan bahwa dana desa dan otsus dikelola secara transparan dan tepat sasaran untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- 5) Pemberantasan Praktik Rentenir: Membentuk lembaga keuangan mikro syariah untuk menyediakan akses permodalan yang adil dan mengurangi ketergantungan pada rentenir.
- 6) Peningkatan Akses terhadap Teknologi dan Informasi: Mengembangkan infrastruktur TIK dan program literasi digital untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan peluang ekonomi.
- 7) Pemberdayaan Sosial dan Budaya: Mengembangkan program pemberdayaan yang inklusif dan sensitif terhadap norma sosial dan budaya lokal untuk memastikan partisipasi aktif semua kelompok masyarakat.

Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor penyebab kemiskinan ini, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Besar 2025–2029 dapat dirancang untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan

non makanan. Tingkat Konsumsi Makanan penduduk Kabupaten Aceh Besar mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada pada tahun 2019 sebesar 49,21 persen , pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan konsumsi sebesar 49,22 persen, pada tahun 2021 naik sebesar 49,25 persen dan terus naik menjadi 55,85 persen pada tahun 2024. Untuk Tingkat Konsumsi Non Makanan penduduk Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2019 sebesar 50,79 persen, pada Tahun 2020 turun sebesar 50,78 persen, pada Tahun 2021 sebesar 50,75 persen dan pada Tahun 2022 turun sebesar 49,86 persen. Dan terus menurun di tahun 2024 sebesar 44,15 persen. Adapun pengeluaran perkapita masyarakat di kabupaten Aceh Besar dari Rp. 1.279.822 pada Tahun 2019 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sampai Tahun 2022 pengeluaran perkapita masyarakat di kabupaten Aceh Besar menjadi Rp. 1.452.582 dan tahun 2024 terjadi kenaikan menjadi Rp. 1.305.397, dengan konsumsi makanan sebesar 55,85 persen dan non makanan sebesar 44,15 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.28

Tabel 2.28.
Indikator Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

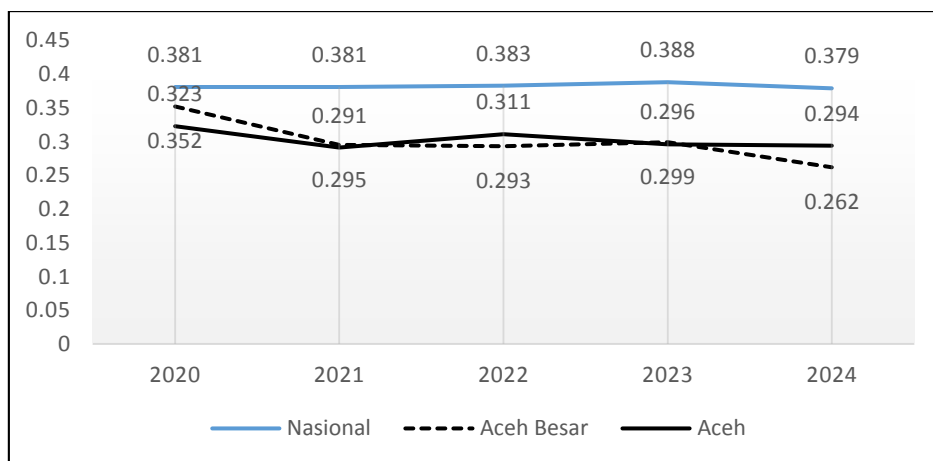
Indikator Konsumsi	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Makanan (%)	49,21	49,22	49,25	50,14	53,29	55,85
Konsumsi Non Makanan (%)	50,79	50,78	50,75	49,86	46,71	44,15
Rata – Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	1.279.822	1.359.655	1.458.495	1.452.582	1.200.938	1.305.397

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Aceh Besar Dalam Angka, 2025

D. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan dan Regional)

Indeks Gini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Nilai tersebut diukur berdasarkan klasifikasi pendapatan masyarakat sehingga dihasilkan indeks dengan kisaran 0–1. Menurut Michael Todaro bahwa nilai Indeks Gini yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan

sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi atau merata. Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.19.



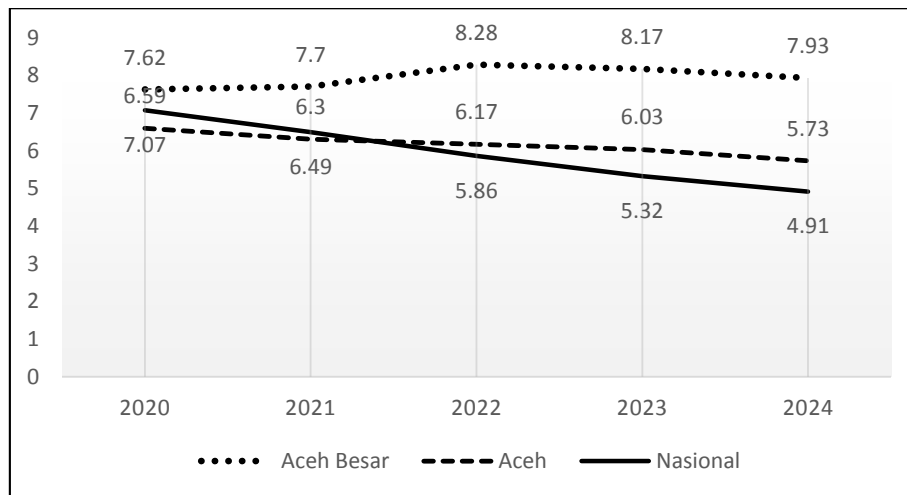
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.19 Indeks Gini Kabupten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024

Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2019 sebesar 0,288, pada pada Tahun 2020 meningkat kembali menjadi 0,352, di Tahun 2021 turun menjadi 0,296 dan pada Tahun 2023 kembali naik sebesar 0,299 dan turun turun sebesar menjadi 0,262 pada tahun 2024 yang berada di bawah provinsi. Penurunan indeks gini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten Aceh Besar semakin mengecil sehingga terjadi pada penurunan pengeluaran penduduk.

E. Pengangguran

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kategori penganggur terbuka, terdiri dari yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2025

Gambar 2.20 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Dari gambar diatas tingkat pengangguran dilihat pada tahun 2022 naik menjadi 8,28 menunjukan tren kenaikan yang besar dari tahun 2019 – 2021, kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi , investasi dan upah, namun tahun 2023 tingkat pengangguran turun kembali menjadi 8,17 atau turun sebesar 0,11 poin. Dan kembali turun di tahun 2024 menjadi 7,93 persen tapi masih berada di atas TPT Provinsi Aceh dan Nasional.

Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi tantangan serius dalam hal ketenagakerjaan, salah satunya ditunjukkan oleh angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih tergolong tinggi. TPT merupakan indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan meskipun sedang aktif mencari kerja. Kondisi ini menjadi sinyal adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang layak.

Beberapa faktor mendasari tingginya angka pengangguran terbuka di wilayah ini. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Banyak lulusan pendidikan, terutama dari sekolah menengah dan perguruan tinggi, tidak memiliki keterampilan teknis atau kejuruan yang dibutuhkan oleh sektor usaha. Hal ini memperparah *mismatch* tenaga kerja, sehingga lulusan yang seharusnya siap kerja justru kesulitan terserap di pasar kerja.

Selain itu, terbatasnya sektor industri dan jasa yang berkembang di Aceh Besar juga menjadi penyebab utama. Sebagian besar lapangan kerja masih

terkonsentrasi di sektor pertanian dan usaha mikro, yang daya serapnya terhadap angkatan kerja baru relatif rendah. Kurangnya investasi sektor swasta dan terbatasnya infrastruktur penunjang ekonomi seperti kawasan industri, pelabuhan, dan jaringan logistik juga memperlambat pertumbuhan lapangan kerja baru.

Tingginya angka pengangguran ini membawa dampak luas terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan keluarga terganggu, daya beli menurun, dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan sosial pun meningkat. Jika kondisi ini tidak segera ditangani secara sistematis, maka dapat memperparah kemiskinan dan memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah di Aceh Besar.

Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan ini, seperti memperkuat pendidikan vokasi, mendorong pelatihan kerja berbasis pasar, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor-sektor padat karya. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk menurunkan angka TPT secara berkelanjutan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih tinggi di Kabupaten Aceh Besar mencerminkan adanya permasalahan struktural dan sistemik dalam sektor ketenagakerjaan. Meskipun berbagai program pembangunan telah diluncurkan, kenyataannya ribuan penduduk usia kerja di daerah ini masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Beberapa penyebab utama dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. keterbatasan lapangan kerja di sektor formal menjadi penyebab dominan. Kabupaten Aceh Besar belum memiliki basis industri yang kuat yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebagian besar kegiatan ekonomi masih bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan usaha kecil menengah yang sifatnya musiman dan kurang stabil.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara kualifikasi, keterampilan, atau pendidikan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. (mismatch antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja). Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi tidak memiliki keahlian teknis atau keterampilan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Pendidikan yang bersifat teoritis dan kurangnya pelatihan praktis menyebabkan tenaga kerja tidak siap untuk langsung terjun ke dunia kerja.

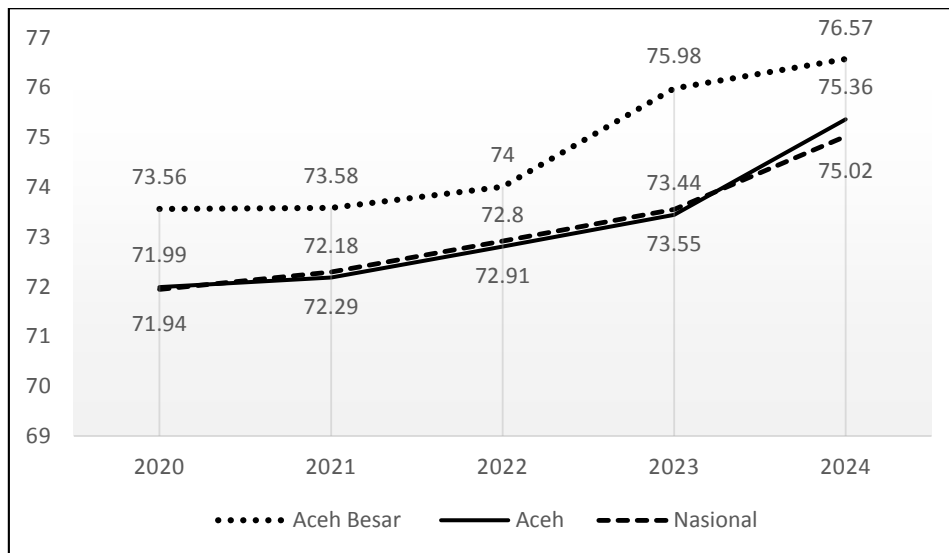
3. Rendahnya akses terhadap informasi pasar kerja juga menjadi hambatan. Banyak pencari kerja di pedesaan tidak mengetahui peluang kerja yang tersedia, baik di dalam maupun di luar daerah. Kurangnya peran aktif lembaga penyalur tenaga kerja dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi memperburuk situasi ini.
4. Minimnya investasi sektor swasta di wilayah ini turut mempersempit peluang kerja baru. Faktor keamanan, keterbatasan infrastruktur, dan prosedur perizinan yang berbelit menjadi penghalang bagi investor untuk membuka usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
5. Tingginya pertumbuhan angkatan kerja tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang seimbang. Setiap tahunnya, lulusan baru dari berbagai tingkat pendidikan terus bertambah, sementara pasar kerja tetap sempit dan stagnan.

Faktor-faktor tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain, sehingga menciptakan kondisi pengangguran yang sulit diatasi dalam jangka pendek. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi terpadu yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penguatan sektor produktif, peningkatan investasi, serta penyediaan layanan informasi kerja yang lebih efektif.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Pengetahuan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita dan kapitas daya beli.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.21 Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Pada Gambar diatas dapat dilihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Besar yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 angka IPM Aceh Besar berada diangka 73,55 persen sampai pada tahun 2024 terus meningkat di angka 76,57 persen.

IPM Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 masih berada diatas rata-rata Propinsi Aceh yaitu sebesar 75,36 dan Nasional sebesar 75,02. Berikut perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.29.
Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Aceh Besar
1	2019	73,55
2	2020	73,56
3	2021	73,58
4	2022	74,00
5	2023	75,98
6	2024	76,57

Sumber : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

G. Analisis Sektor Basis/unggul (Location Quotient (LQ)) Kabupaten Aceh Besar

Tabel di bawah ini menunjukkan nilai Location Quotient (LQ) untuk berbagai sektor lapangan usaha di Kabupaten Aceh Besar selama periode 2020 hingga 2024. LQ menggambarkan keunggulan komparatif suatu sektor dalam suatu

wilayah, di mana nilai $LQ > 1$ menandakan sektor tersebut memiliki keunggulan dan berpotensi menjadi sektor unggulan, sedangkan $LQ < 1$ menunjukkan sektor tersebut relatif kurang dominan dibandingkan rata-rata nasional. Berikut tabel LQ Kabupaten Aceh besar.

Tabel 2.30. Nilai Location (LQ) Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Besar

Lapangan Usaha	HASIL LQ Kabupaten Aceh besar				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,77	0,78	0,77	0,78	0,78
Pertambangan dan Penggalian	0,77	0,83	0,78	0,77	0,75
Industri Pengolahan	0,48	0,48	0,47	0,46	0,48
Pengadaan Listrik dan Gas	0,60	0,60	0,59	0,59	0,60
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,12	1,12	1,13	1,13	1,13
Konstruksi	1,96	1,94	1,95	1,53	1,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,16	1,17	1,15	1,15	1,17
Transportasi dan Pergudangant	1,14	0,91	1,07	1,80	1,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,26	1,26	1,13	1,14
Informasi dan Komunikasi	1,36	1,39	1,39	1,31	1,30
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,71	0,71	0,72	0,74	0,71
Real Estat	1,47	1,47	1,48	1,46	1,47
Jasa Perusahaan	0,52	0,53	0,52	0,53	0,52
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,69	0,70	0,70	0,66	0,69
Jasa Pendidikan	0,61	0,65	0,65	0,60	0,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67
Jasa lainnya	0,94	0,96	0,95	0,91	0,91

Dari hasil analisis LQ Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 sampai tahun 2024 diperoleh :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Nilai LQ stabil di kisaran 0,77-0,78 selama lima tahun, yang berarti sektor ini kurang dominan dibandingkan rata-rata nasional. Meskipun Aceh Besar memiliki potensi alam, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah relatif rendah dan belum menjadi sektor unggulan.

2. Pertambangan dan Penggalan

Nilai LQ fluktuatif, tertinggi di 0,83 pada 2021, kemudian menurun menjadi 0,75 di 2024. Hal ini menunjukkan sektor ini mengalami penurunan daya saing dan peranannya dalam ekonomi daerah cenderung menurun selama lima tahun terakhir.

3. Industri Pengolahan

LQ konsisten rendah, sekitar 0,46-0,48, menunjukkan bahwa industri pengolahan belum menjadi kekuatan ekonomi di Aceh Besar. Potensi pengembangan sektor ini masih besar, terutama untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan sumber daya lokal.

4. Pengadaan Listrik dan Gas

Nilai LQ stabil di kisaran 0,59-0,60, menandakan sektor ini memiliki peranan yang relatif kecil dalam struktur ekonomi lokal. Meski penting untuk mendukung sektor lain, belum menunjukkan keunggulan komparatif.

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Sektor ini memiliki nilai LQ di atas 1, sekitar 1,12-1,13, menunjukkan sebagai sektor unggulan yang stabil. Artinya Aceh Besar memiliki keunggulan dalam pengelolaan lingkungan dan infrastruktur terkait, berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

6. Konstruksi

Merupakan sektor paling dominan dengan nilai LQ tertinggi antara 1,53 sampai 1,96. Walau terjadi penurunan signifikan pada 2023, sektor ini tetap menunjukkan peran sangat penting dalam perekonomian Aceh Besar, sebagai penggerak utama pembangunan fisik dan investasi.

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LQ berada di kisaran 1,15-1,17, menunjukkan sektor ini stabil dan unggul sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa terkait. Perdagangan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

8. Transportasi dan Pergudangan

Fluktuasi besar dari 0,91 di 2021 menjadi puncak 1,80 di 2023, lalu sedikit menurun ke 1,59 di 2024. Hal ini mencerminkan dinamika sektor logistik yang sangat penting, dengan kemungkinan adanya proyek besar atau peningkatan layanan transportasi di beberapa tahun terakhir.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

LQ di atas 1,13 hingga 1,26, mengindikasikan sektor pariwisata dan layanan konsumsi makanan cukup kuat dan menjadi sektor unggulan yang memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi lokal.

10. Informasi dan Komunikasi

Stabil di kisaran 1,30-1,39, menunjukkan keunggulan dalam teknologi informasi dan komunikasi, yang menjadi salah satu sektor jasa penting di era digital.

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Nilai LQ sekitar 0,71-0,74, menunjukkan sektor ini masih relatif kecil dan belum menjadi kekuatan utama ekonomi daerah.

12. Real Estat

LQ stabil di 1,46-1,48, menunjukkan real estat sebagai sektor unggulan yang mendukung pembangunan dan aktivitas ekonomi lainnya.

13. Jasa Perusahaan

Nilai LQ sekitar 0,52-0,53, mengindikasikan sektor ini kurang dominan, meskipun berpotensi dikembangkan untuk mendukung bisnis lokal.

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

LQ di bawah 1, sekitar 0,66-0,70, menunjukkan sektor ini belum menjadi sektor unggulan dalam struktur ekonomi lokal.

15. Jasa Pendidikan

Nilai LQ di kisaran 0,60-0,65, mengindikasikan sektor pendidikan kurang menonjol secara ekonomi, meski memiliki peranan sosial penting.

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

LQ sekitar 0,67-0,68, menunjukkan sektor ini berkontribusi namun belum menjadi kekuatan ekonomi utama.

17. Jasa Lainnya

Nilai LQ mendekati 1 (0,91-0,96), menandakan sektor jasa lain cukup berperan dan mendukung kegiatan ekonomi lokal, namun tidak terlalu dominan.

Dari analisis LQ Kabupaten Aceh Besar diatas dapat di simpulkan

- a. Sektor unggulan utama: Konstruksi, Pengadaan Air dan Pengelolaan Lingkungan, Perdagangan, Transportasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, serta Real Estat.
- b. Sektor dengan potensi pengembangan: Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, Jasa Perusahaan, dan sektor pertambangan yang cenderung menurun saat ini.
- c. Sektor kurang dominan: Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Administrasi Pemerintahan.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

A. Angka Umur Harapan hidup

Salah satu pengukuran kualitas derajat kesehatan adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Secara umum, Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Aceh Besar terus mengalami peningkatan selama Tahun 2019 - 2024. Capaian Angka Usia Harapan Hidup (UHH) pada Tahun 2019 sebesar 69,77 dan terus meningkat setiap tahunnya, di Tahun 2024 Angka Usia harapan Hidup sebesar 73,24. Dengan angka usia harapan hidup provinsi pada Tahun 2024 sebesar 73,20 dan nasional sebesar 72,39.

Tabel 2.31.
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)
1	2019	69,77
2	2020	72,78
3	2021	72,79
4	2022	72,97

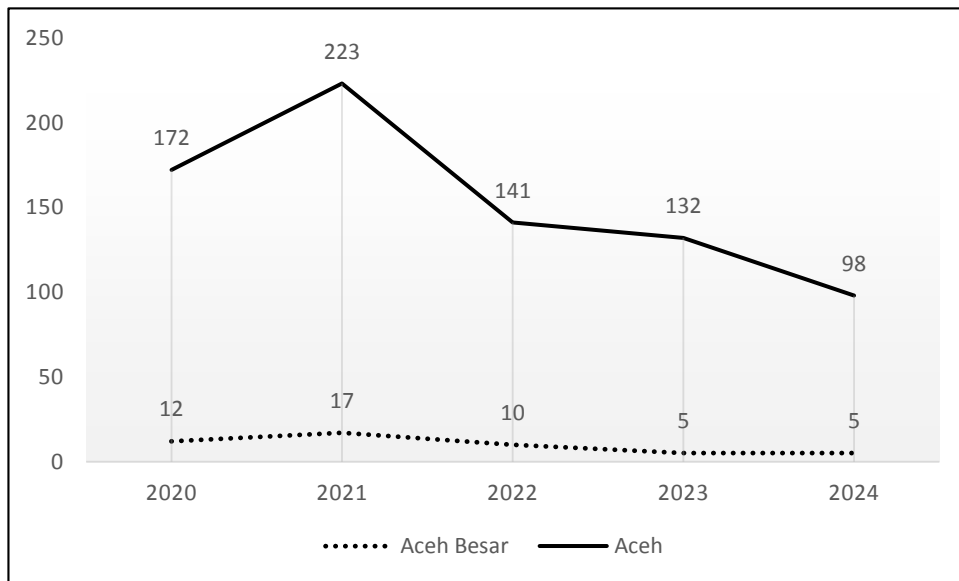
No	Tahun	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)
5	2023	73,11
6	2024	73,24

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

Selama tiga tahun, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Besar menunjukkan peningkatan Begitu juga dengan indikator pendukungnya juga menunjukkan angka peningkatan.

B. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan, sosial budaya serta hambatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Angka kematian ibu di Kabupaten Aceh Besar cenderung naik turun pada Tahun 2019 angka kematian ibu mencapai 11 kasus, dan tahun 2021 naik menjadi 17 kasus dan pada Tahun 2022 kembali menurun menjadi 10 kasus dan terjadi penurunan kembali di tahun 2024 menjadi 5 kasus kematian, penurunan ini sudah mulai diterapkan beberapa strategies seperti peningkatan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan serta fasilitas pelayanan kesehatan dengan tersedianya posyandu. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Aceh dan Aceh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Aceh Besar, 2025

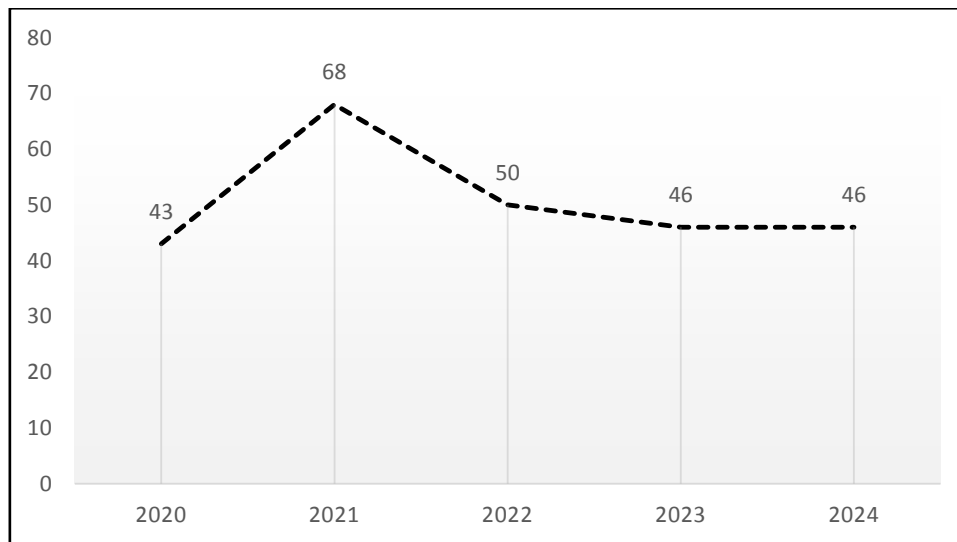
Gambar 2.22 Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tahun 2020 – 2024

C. Angka Kematian Bayi (AKB)

Dinas Kesehatan Aceh Besar telah mencatat, Pada tahun 2019 angka kematian bayi sebanyak 36 kasus dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 68 kasus dan pada tahun 2022 menurun menjadi 50 kasus dan tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 46 kasus. Dimana menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menangani kasus kematian bayi yang semakin meningkat telah dilakukan.

Angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Besar disebabkan oleh faktor persalinan oleh tenaga kesehatan, komplikasi kebidanan yang ditangani, bayi lahir berat badan rendah, penduduk miskin, dan perempuan kawin dibawah 17 tahun.

Jumlah angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

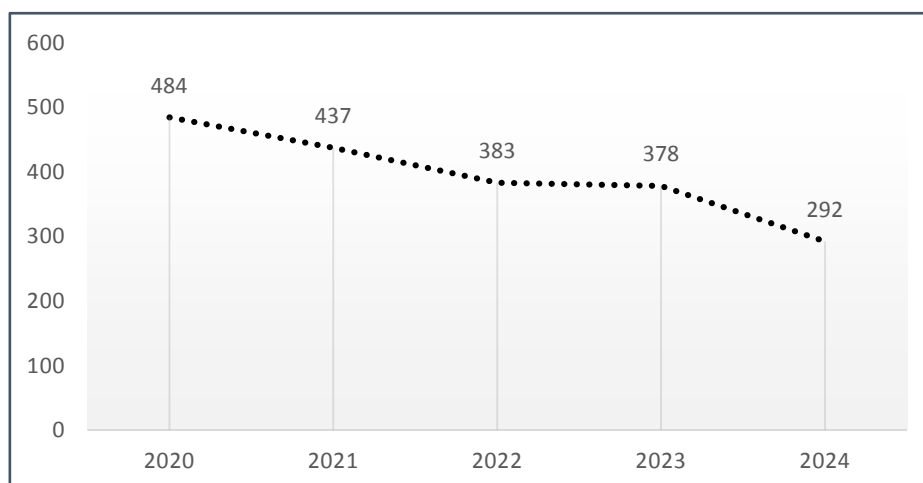


Sumber: Dinas Kesehatan Aceh Besar, 2025

Gambar 2.23 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

D. Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan kondisi serius, dimana asupan makan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya diperlukan. Tentunya, kondisi ini merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Pada tahun 2019 angka gizi buruk pada bayi di kabupaten Aceh Besar sebanyak 412 bayi, sampai pada tahun 2022 angka bayi gizi buruk di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 383 bayi menurun yang dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 437 bayi yang menderita gizi buruk sampai tahun 2023 menjadi 378 bayi atau turun sebesar 59 poin dari tahun 2021. Jumlah angka gizi buruk di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut.

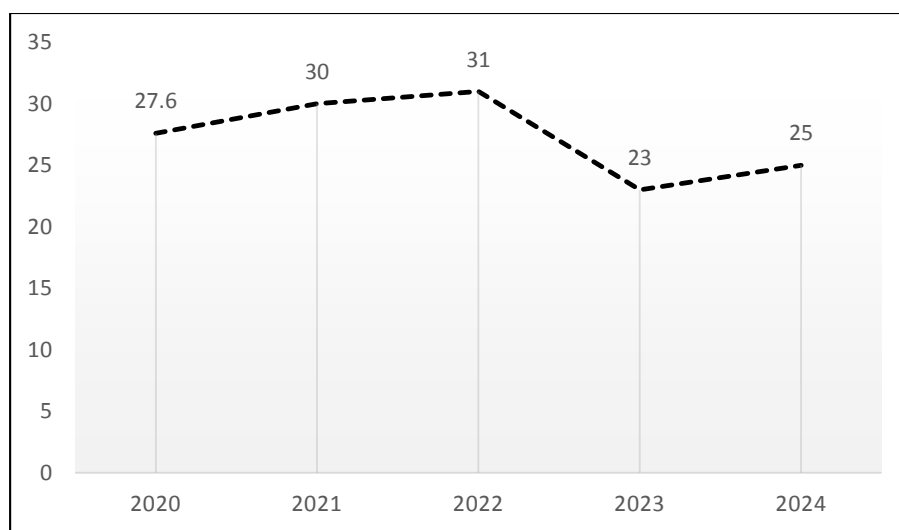


Sumber: Dinas Kesehatan Aceh Besar, 2025

Gambar 2.24 Perkembangan Gizi Buruk pada Bayi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

E. Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tujuan utama imunisasi untuk menurunkan angka kesakitan, kecatatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten Aceh Besar berfluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Perkembangan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.25 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Anak Aceh Tahun 2020 - 2024

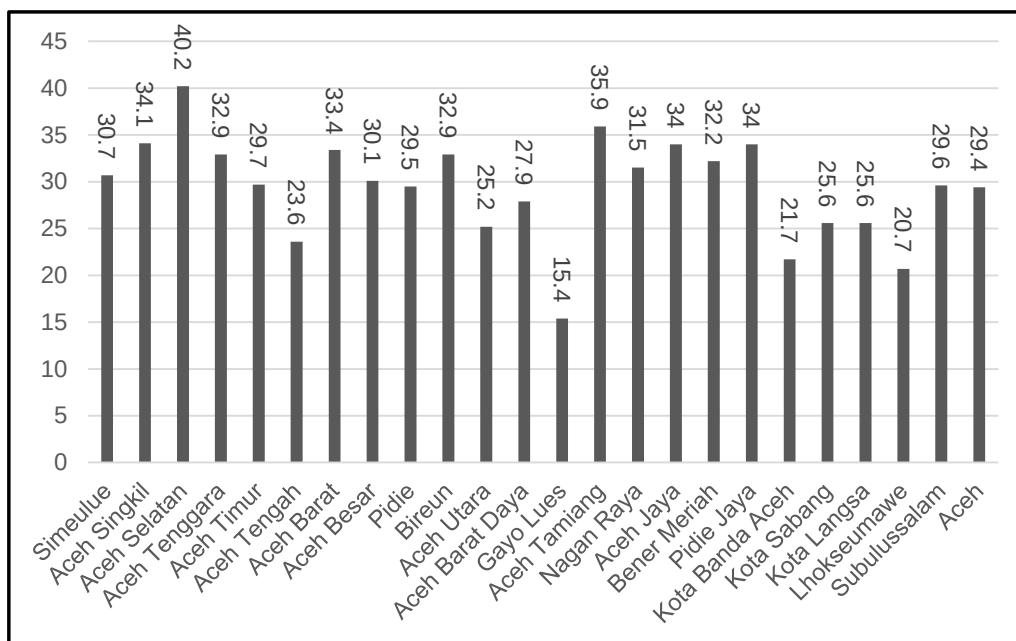
F. Stunting

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama. Angka stunting Kabupaten Aceh Besar menurut data dari Balitbangkes Kemenkes RI pada tahun 2018 adalah sebesar 38,7 persen atau tercatat 18.240 orang balita dalam keadaan kurang gizi dan mengalami stunting. Gambaran data stunting dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Propinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32. .
Angka Prevalensi dan Balita Stunting di Kabupaten Aceh Besar

No.	Tahun	Stunting
1	2018	38.7
2	2019	N/a
3	2020	N/a
4	2021	23.8
5	2022	27
7	2023	30.1
8	2024	32.3

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan data dari SSGI (Studi Kasus Gizi Indonesia) tidak mengeluarkan data pengukuran stunting kabupaten kota dan di terbitkan Kembali pada tahun 2021, angka prevalensi stunting Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 berdasarkan data SKI menjadi 32.3 persen dan lebih tinggi dari angka stunting tahun 2022 yaitu 27.0 persen. Berikut Gambar 2.25 menggambarkan kondisi prevalensi stunting Kabupaten Aceh Besar di bandingkan dengan daerah lain pada tahun 2023:



Sumber data : SSGI, Kemenkes RI, 2025

Gambar 2.26 Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh,

Angka prevalensi stunting tahun 2022 di Kabupaten Aceh Besar berada di bawah angka prevalensi stunting Provinsi Aceh sebesar 31,20 dan berada di atas Indonesia yaitu sebesar 21,6 persen sedangkan Kabupaten Aceh Besar angka

prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 27,0. Tahun 2023 angka prevalensi stunting Kabupaten Aceh Besar menjadi 30.1 ini berada diatas provinsi yaitu sebesar 29,4. Angka stunting semakin tinggi ini dikarenakan kurangnya asupan gizi pada ibu sejak hamil dan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak yang dapat menghambat pertumbuhan hidup mereka.

G. Pengendalian Penyakit (TBC, Phenoumia dan lain-lain)

Kasus penyakit menular di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2019 yang paling banyak terjadi adalah kasus TB Paru yaitu sebanyak 5.209 kasus. Tahun 2022 yang paling banyak terjadi adalah kasus penyakit diare yang tercatat sebanyak 4.605 kasus pada tahun 2022, kemudian disusul dengan penyakit TB sebanyak 437 kasus, Pneumonia sebanyak 244 kasus, DBD sebanyak 296 kasus, kusta banyak 11 kasus dan malaria sebanyak 7 kasus dan di tahun 2023 malaria naik menjadi 48 kasus. Jumlah kasus penyakit menular di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 secara rinci dapat di lihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.33. .
Jumlah Kasus Penyakit Menular Kabupaten Besar Aceh 2019 – 2024

Penyakit Menular						
No	Tahun	DBD	Malaria	TB Paru	Diare	Pneumonia
1	2019	84	-	5,209	3,690	125
2	2020	71	65	274	356	65
3	2021	30	9	354	2,118	129
4	2022	296	7	433	4,605	344
5	2023	293	48	487	3511	321
6	2024	354	43	408	1897	347

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Untuk indikator angka kesakitan (%), rata-rata lama sakit (hari) dan rata-rata lama balita diberi ASI (bulan) di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34. .
Indikator Kesehatan di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kesehatan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kesakitan (%)	12	10.09	7.1	169	92	117	105
Rata-rata Lama Sakit (Hari)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
Rata-rata Lama Balita Diberi ASI (Bulan)	6	9	10	12	20	21	22

Sumber Data: Dinas Kesehatan Aceh Besar, 2025

H. Cakupan Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah salah satu sistem pendanaan kesehatan yang menggunakan prinsip – prinsip asuransi kesehatan sosial yang berlaku untuk seluruh penduduk di Kabupaten Aceh Besar. Penyaluran anggaran ini melalui dua OPD yakni Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Berikut dapat dilihat anggaran jaminan kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.35.
Anggaran Jaminan Kesehatan Aceh Besar dari Tahun 2019 - 2024

Tahun	Anggaran Jaminan Kesehatan RSUD	Anggaran Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan	Total
2019	15.000.000.000	27.757.550.000	42.757.550.000
2020	15.000.000.000	28.067.385.200	43.067.385.200
2021	15.000.000.000	26.013.445.431	41.013.445.431
2022	16.500.000.000	30.000.000.000	46.500.000.000
2023	20.409.011.630	30.000.000.000	50.409.011.630
2024	22.086.979.730	30.070.000.000	52.456.979.730

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Aceh Besar, 2025

Kurun waktu dari Tahun 2019 sampai dengan 2020 jumlah anggaran jaminan Kesehatan terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 jumlah anggaran jaminan kesehatan mengalami penurunan yang sebelumnya berjumlah 43 milyar rupiah turun menjadi 41 milyar rupiah dan di Tahun 2022 hingga 2024 kembali meningkat menjadi 52 milyar rupiah.

I. Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan kesehatan Ibu dan Anak

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM merupakan salah satu indeks paling penting bagi sebuah Rumah Sakit dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. RSUD Kabupaten Aceh Besar melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat setiap tahunnya, adapun hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Aceh Besar baru hanya dilakukan pada tahun 2018 dan 2022 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Kabupaten Aceh Besar

Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kabupaten Aceh Besar		
No	Tahun	IKM
1	2018	81
2	2019	Tidak dilakukan Survey
3	2020	Tidak dilakukan Survey
4	2021	Tidak dilakukan Survey
5	2022	84
6	2023	79
7	2024	83

Sumber data : RSUD Kabupaten Aceh Besar, 2025

J. Rasio Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkat mutu pelayanan Kesehatan, Tahun 2020 – 2024 telah optimal dengan peningkatan sarana prasarana Kesehatan. Kabupaten Aceh Besar telah memiliki 1 (satu) 1 unit rumah sakit umum daerah dan 2 (dua) unit rumah sakit swasta, 29 (dua sembilan) unit puskesmas, 69 (enam puluh Sembilan) unit puskesmas pembantu yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) kecamatan, serta Rasio antara total jumlah penduduk dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersedia, seperti rasio rumah sakit umum, rasio Puskesmas, Pustu, adalah 1 : 1.000 penduduk. Artinya, 1 unit sarana pelayanan kesehatan telah dapat melayani 1.000 penduduk.

Tabel 2.37.
Rasio Rumah Sakit/Puskesmas/Pustu di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019-2024

Tahun	Rasio RSUD terhadap jumlah penduduk	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio Pustu terhadap jumlah penduduk
2019	0.24	6.58	16.23
2020	0.24	6.58	16.23
2021	0.24	6.84	16.85
2022	0.24	6.84	19.05
2023	0.37	6.43	15.85
2024	0.68	6.55	14.90

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2025

K. Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Jumlah ketersediaan dokter yang ada di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 meningkat terutama untuk dokter umum. Tercatat ada 16 orang Dokter Spesialis, 106 orang Dokter Umum dan 41 orang Dokter Gigi. Terjadi peningkatan pada jumlah dokter umum dapat disebabkan oleh adanya penerimaan pegawai baru dilingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sedangkan di tahun 2023 jumlah dokter umum meningkat menjadi 169 orang. Rincian tenaga dokter dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.38.
Jumlah Tenaga Dokter Di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019 – 2024

No	Uraian (orang)	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter Spesialis	13	16	16	21	21	86
2	Dokter Umum	107	114	106	152	169	160

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Secara umum, jumlah tenaga kesehatan juga telah ditempatkan di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Total jumlah tenaga kesehatan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2022. Terutama pada tenaga perawat bidan yang Tahun 2022 tercatat 1.437 orang meningkat pada Tahun 2023 menjadi 1.630 orang. Begitu juga dengan tenaga medis lainnya. Rincian tenaga kesehatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.39.
Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

No	Uraian (orang)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perawat	235	330	475	475	549	597
	Bidan	817	942	880	880	1082	1,204
2	Farmasi	40	84	71	106	165	100
3	Tenaga Kesling	59	90	82	72	96	108
4	Tenaga Kesmas	204	185	53	215	248	288
5	Ahli Gizi	75	87	87	80	102	112
6	Tenaga Medis(DOKTER UMUM+SPESIALIS)	120	130	122	173	188	246
7	Teknisi Medis	49	162	82	73	151	246

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan rasio dokter dan penduduk adalah 1:1.000. artinya setiap 1.000 penduduk tersedia satu dokter, untuk Kabupaten Aceh Besar jumlah dokternya telah sesuai dengan jumlah penduduk, tapi untuk penyebarannya belum merata masih tertumpu di puskesmas di perbatasan kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh.

Tabel 2.40.
Rasio Dokter Per satuan Penduduk Di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019 – 2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RASIO DOKTER PERSATUAN PENDUDUK	25.2	23.8	33.5	23.9	27.34	36.1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2025

L. Fasilitas Kesehatan Lainnya (Apotik, Toko Obat Berizin)

Selain Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu di Kabupaten Aceh Besar mempunyai fasilitas Kesehatan lainnya. Rincian fasilitas kesehatan lainnya yang telah memperoleh izin operasi di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.41.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2021– 2024

No.	Jenis Fayankes Lainnya	2024			
		2021	2022	2023	2024
1	Praktek Dokter Gigi	18	20	20	20
2	Praktek Dokter Spesialis	28	30	30	30
3	Praktik Dokter Umum	28	30	30	30
4	Klinik Umum	23	30	30	30
5	Apotek	50	45	45	45
6	Toko Obat	51	46	46	46

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2025

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Angka Rata Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan kualitas pendidikan. Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan baik dalam kelulusan maupun yang saat mengulang. Pada Tahun 2019 angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh besar sebesar 10,31 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai pada Tahun 2024 sebesar 10.37 persen. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Besar terindikasi cukup baik dan berada diatas rata-rata nasional serta rata-rata provinsi di Aceh. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.42.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Aceh Besar	Aceh	nasional
1	2020	10.32	9.33	8.48
2	2021	10.33	9.37	8.54
3	2022	10.35	9.44	8.69
4	2023	10.36	9.55	8.77
5	2024	10.37	9.64	8.85

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2019 berada pada angka 14.71. Harapan Lama Sekolah secara rata-rata terus tumbuh setiap tahunnya. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Aceh Besar yang bersekolah. Pada Tahun 2023, angka harapan Lama Sekolah di Kabupaten Aceh Besar telah mencapai 14,76 dan di tahun 2024 naik menjadi 14,77 dan tahun 2023 lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Propinsi Aceh sebesar 14,39 tahun dan harapan lama sekolah nasional 13,21 tahun. Ini berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Aceh Besar memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga kuliah semester 5 atau lulus D2. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal dasar dalam membangun kualitas manusia Aceh Besar yang lebih baik.

Tabel 2.43.
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2020– 2024

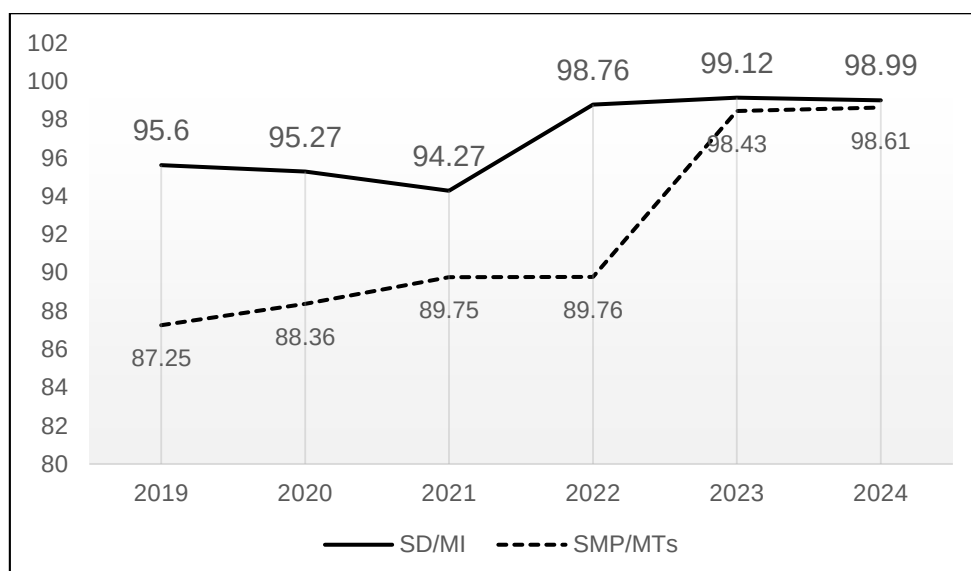
No	Tahun	Aceh Besar	Aceh	Nasional
1	2020	14.72	14.31	12.98
2	2021	14.73	16.63	13.08
3	2022	14.75	14.37	13.1
4	2023	14.76	14.38	13.15
5	2024	14.75	14.37	13.21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan disuatu wilayah adalah tingkat partisipasi sekolah. Tingkat partisipasi sekolah bisa dilihat dengan nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah.

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yaitu jumlah warga negara usia sekolah yang berpartisipasi dalam satuan pendidikan sesuai dengan jenjang yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah dengan target 100 persen setiap tahun.



Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2025

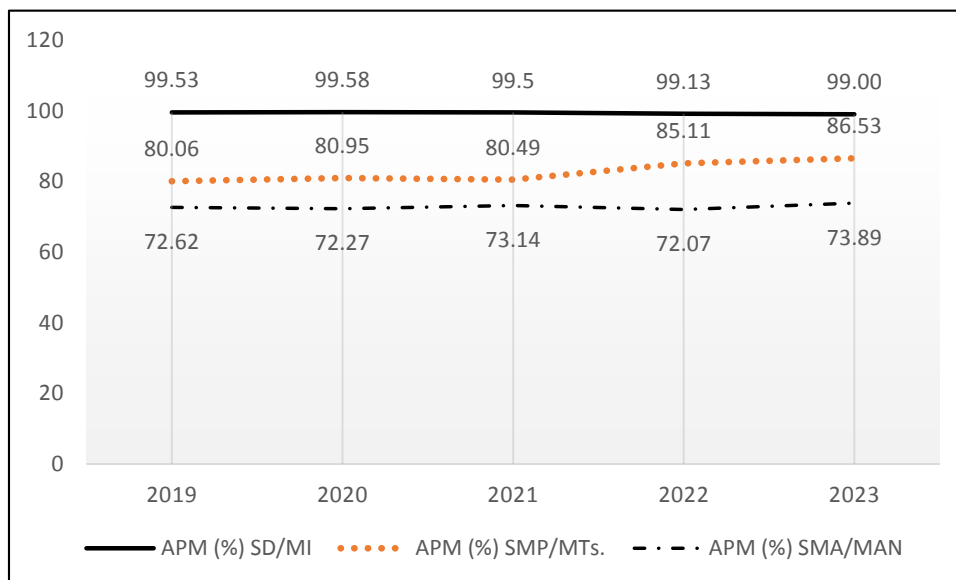
Gambar 2.27 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

Gambar diatas, menjelaskan bahwa perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. APS Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 untuk SD/MI sebesar 98,99 persen, berarti masih ada 1.01 persen anak usia sekolah tingkat SD/MI yang tidak mengenyam pendidikan. Selanjutnya APS Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 untuk SMP/MTs sebesar 98,61 persen, berarti masih ada 1,39 persen anak usia sekolah tingkat SMP/MTs yang tidak mengenyam pendidikan.

D. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Pada tahun 2022 APM tingkat SD/MI sebesar 99,13 persen turun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 99,50 persen dan di Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 99,00 persen ini berarti hanya 99,00 persen penduduk pada usia SD/MI yang dapat mengenyam Pendidikan tingkat SD/MI dan kembali naik 99,07 di tahun 2024. APM untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2022 sebesar 85,11 persen naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 80,49 persen dan tahun 2023 APM SMP/MTs sebesar 86,53 dimana terjadi kenaikan dari tahun 2022 sebesar sebesar 1,42 poin dan Kembali turun sebesar 86,23 di tahun 2024. Sedangkan APM untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2022 sebesar 72,07 persen turun dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 73,14 persen dan tahun 2023 APM

SMA/MA Kabupaten Aceh Besar menjadi 73,89 dimana terjadi kenaikan sebesar 1,82 poin dan naik menjadi 74,22 di tahun 2024. Perkembangan APM di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

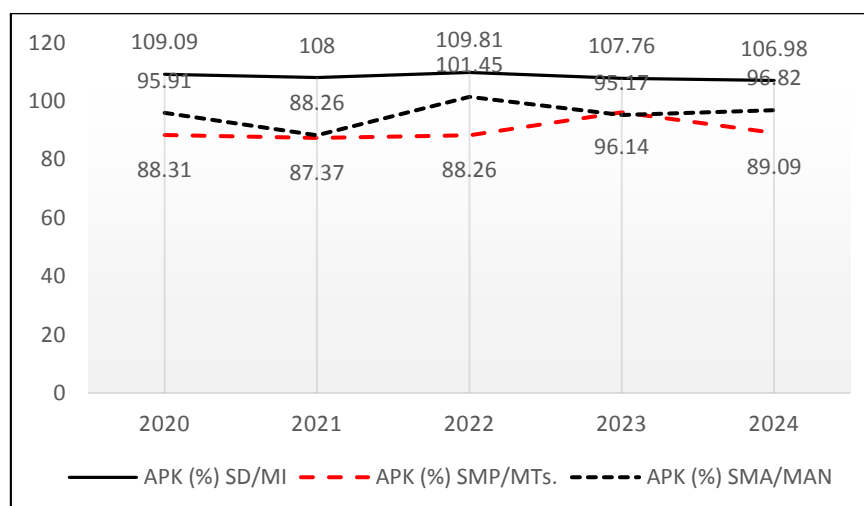


Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.28 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019 – 2024

E. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Pada tahun 2024 APK tingkat SD/MI sebesar 106,98 persen turun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 107,78 persen. APK untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2024 sebesar 89,04 persen turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 96,14 persen. Sedangkan APK untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2024 sebesar 96,82 persen naik dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 95,17 persen. Jika dilihat data dua tahun terakhir perkembangan angka partisipasi kasar di Kabupaten Aceh Besar cenderung menurun. APK Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.29 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

F. Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan dan memanipulasi angka. Nilai literasi dan numerasi Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

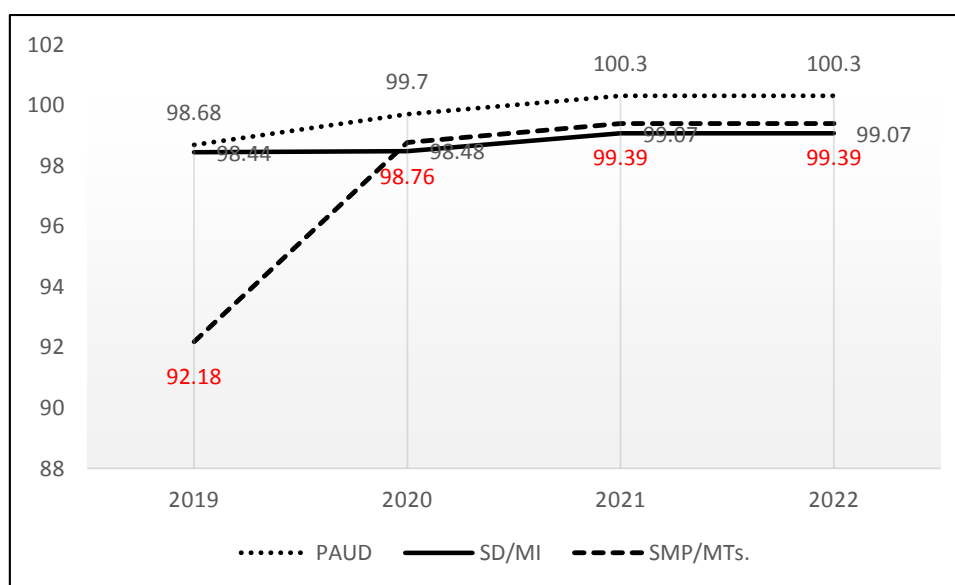
Tabel 2.44.
Nilai Literasi dan Numerasi SD dan SMP tahun 2021 - 2024

Tahun	Literasi SD	Literasi SMP	Numerasi SD	Numerasi SMP
2021	01.57	0,0909722	01,49	0,085416667
2022	skor dalam persentase 50,06. Naik 10,95	skor dalam persentase 52,31. Naik 6,75	skor dalam persentase 37,31. Naik 15,48	skor dalam persentase 35,15. Naik 4,77
2023	Capaian Tahun 2023 (50,06%)	Capaian Tahun 2023 (52,31%)	Capaian Tahun 2023 (37,31%)	Capaian Tahun 2023 (35,14%)
2024	Capaian Tahun 2024 (59,93%)	Capaian Tahun 2024 (61,07%)	Capaian Tahun 2024 (55,11%)	Capaian Tahun 2024 (59,72%)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2025

G. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah bergerak stagnan di dua tahun terakhir. Pada tahun 2022 Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah untuk tingkat PAUD sebesar 100,30, tingkat SD/MI sebesar 99,07 dan tingkat SMP/MTs sebesar 99,39. Rasio ketersediaan sekolah berhubungan dengan ketejangkaun penduduk usia sekolah dalam mencapai rumah sekolah, untuk SMP/MTs tahun 2019 terjadi penurunan rasio karena di barengin dengan pertambahan jumlah penduduk usia sekolah, sedangkan tahun 2020 rasio terjadi peningkatan untuk SMP/MTs di karenakan adanya sekolah swasta menjadi negeri sehingga terjadi penambahan jumlah sekolah negeri. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

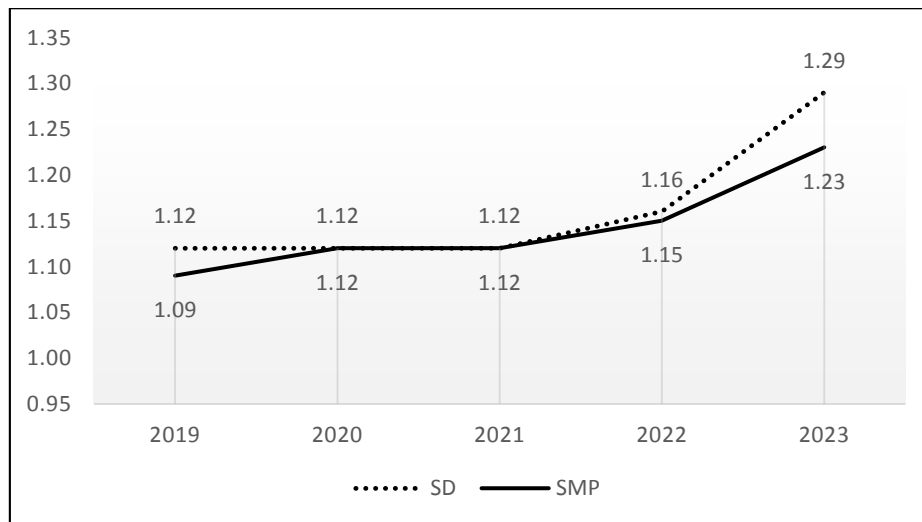


Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.30 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Besar 2019 – 2022

H. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.31 Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat rasio guru dan murid di Kabupaten Aceh untuk tingkat sekolah dasar Tahun 2019 untuk Sekolah dasar berkisar 1 (satu) guru untuk 12 (dua belas murid dan sampai Tahun 2023 rasio 1 (satu) guru untuk 29 (dua puluh Sembilan) murid dimana terjadi penurunan jumlah guru. Pada Pendidikan Menengah Pertama rasio guru dan murid terus meningkat dari Tahun 2019 rasio guru dan murid berkisar 1 (satu) guru untuk 9 (sembilan) murid. Dan di Tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 1 (satu) guru 23 (dua puluh tiga) murid, terjadi kenaikan dari Tahun 2022 dimana rasio guru dan murid 1:15 dimana 1 (satu) guru untuk 15 (lima belas murid) dan telah memenuhi standar dan bersertifikat, tahun 2024 dari total 2417 guru di Kabupaten Aceh Besar hanya 59,58 persen yang bersertifikasi dan mencukupi.

I. Kompetensi Tenaga Pendidik

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Sertifikasi guru merupakan sebuah upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional. Guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik dapat diartikan

bahwa Guru tersebut sudah dianggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas sehingga Guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun outputnya. Untuk menguji kompetensi pendidik berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada data sertifikasi Guru Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.45.
Jumlah Guru Bersertifikasi di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

No	Keterangan	TK	SD	SMP	Total
1	Guru Sertifikasi	146	900	467	1.513
2	Jumlah Guru PNS	183	1,215	662	846
Total		329	901	1.129	2.359

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, 2025

Sertifikasi Guru merupakan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Total jumlah guru di Kabupaten Aceh Besar adalah 7.380 orang guru dengan guru yang bersertifikasi sebanyak 1.513 orang atau sekitar 64,13 persen dari total keseluruhan guru. Guru yang paling banyak sertifikasi berada di tingkat sekolah dasar yaitu sebanyak 2.359 guru.

J. Akreditasi Sekolah

Terkait proses kegiatan penilaian kelayakan serta kinerja sekolah sebagai penyedia layanan Pendidikan formal, indikator yang dapat menjadi acuan adalah status akreditasi. hasil akreditasi diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Peringkat tersebut menjadi bukti sejauh mana sekolah/madrasah memperhatikan mutu pendidikannya. Status akreditasi pada sekolah yang diampu oleh Kabupaten Aceh Besar (SMP, SD dan TK) saat ini memperlihatkan tantangan yang besar untuk terus meningkatkan mutu dan kinerja sekolah.

Tabel 2.46.

Tabel 2.47. Akreditasi Sekolah Jenjang SMP, SD dan TK Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

Jenjang SMP		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Peringkat	A	18	24.32	18	24.32	16	20.25	15	18.29	64	0.30
	B	46	62.16	46	62.16	49	62.03	47	57.32	116	0.54
	C	10	13.51	10	13.51	13	16.46	13	15.85	33	0.15
	TT	-	-	-	-	1	-	7	8.54	2	0.01

Total		74		74		79		82		215	
Jenjang SD		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Peringkat	A	67	32.37	67	33.17	64	30.33	57	26.64	16	0.20
	B	112	54.11	110	54.46	116	54.98	115	53.74	49	0.60
	C	28	13.53	25	12.38	30	14.22	30	14.02	14	0.17
	TT	-	-	-	-	1	0.47	12	5.61	3	0.04
Total		207		202		211		214		82	
Jenjang TK		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Peringkat	A	-	-	1	4.76	2	6.25	6	1.88	6	0.04
	B	-	-	16	76.19	21	65.63	84	26.25	81	0.54
	C	-	-	4	19.05	8	25.00	48	15.00	46	0.30
	TT	-	-	-	-	1	3.13	182	56.88	18	0.12
Total				21		32		320		151	

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Pada tabel di atas memperlihatkan kondisi status akreditasi sekolah (SMP, SD, dan TK) yang berada di Kabupaten Aceh Besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2023 Sekolah yang telah terakreditasi A yang terdiri dari 15 (lima belas) SMP, 57 (lima puluh tujuh) SD terjadi penurunan akreditasi Tipe A pada tahun 2022 sebanyak 64 sekolah Sekolah Dasar, dan 6 (enam) Taman Kanak-kanak atau sekitar 1,88 persen terjadi penurunan dari 6,25 persen pada tahun 2022. Mayoritas peringkat sekolah baik SMP, SD, maupun TK di Aceh Besar berada pada peringkat B yang mendominasi lebih dari 50 persen dari total keseluruhan. Penurunan nilai tipe akreditasi sekolah adanya penurunan standar proses, standar kompetensi lulusan, standar Pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian Pendidikan.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan data terbaru, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan perkembangan yang signifikan. Data dari Open Data Aceh mencatat bahwa pada tahun 2024, sebagian besar Kabupaten/kota di Provinsi Aceh, termasuk Aceh Besar, telah mencapai tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 100 persen.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, yang mencakup wilayah Kabupaten Aceh Besar, melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah peserta aktif. Hingga November 2024, terdapat 3.861 pemberi kerja/ badan usaha dan 63.609 penerima upah yang terdaftar sebagai peserta. Selain itu, sektor proyek

jasa konstruksi menyumbang 847 peserta, sementara pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdaftar mencapai 610 orang. Sebanyak 11.004 peserta lainnya terdaftar sebagai pekerja bukan penerima upah (BPU) .

Berdasarkan data dari BPJS ketenagakerjaan.go.id, pada tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh telah membayarkan klaim sebesar Rp136,2 miliar kepada 1.044 penerima manfaat. Pembayaran klaim ini mencakup berbagai program perlindungan sosial bagi pekerja, antara lain:

- 1) Jaminan Hari Tua (JHT): Rp121,2 miliar dari 7.284 kasus
- 2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Rp4,89 miliar untuk 299 kasus
- 3) Jaminan Kematian (JKM): Rp7,47 miliar untuk 178 kasus
- 4) Jaminan Pensiun (JP): Rp1,6 miliar dari 1.429 kasus
- 5) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Rp116 juta untuk 96 kasus
- 6) Beasiswa Pendidikan: Rp. 744 juta untuk 118 anak peserta

Pemerintah Provinsi Aceh telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung perluasan cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan, antara lain:

1. Instruksi Gubernur Aceh No. 02/INSTR/2024: Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh
2. Qanun Aceh No. 1 Tahun 2024: Tentang Perubahan atas Qanun No.7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Gubernur Aceh No. 10 Tahun 2024: Tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Aceh

Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan .

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, yang mencakup wilayah Aceh Besar, juga telah mencatatkan pembayaran klaim sebesar Rp136,2 miliar sepanjang Januari hingga 20 November 2024. Pembayaran klaim ini mencakup berbagai program perlindungan sosial bagi pekerja, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga beasiswa pendidikan untuk anak peserta.

Dengan dukungan regulasi dari pemerintah daerah, seperti Instruksi Gubernur Aceh No. 02/INSTR/2024 dan Qanun Aceh No. 1 Tahun 2024, serta upaya sinergis dari BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah, diharapkan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Besar

dapat terus meningkat dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pekerja di wilayah tersebut.

Perkembangan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan tren positif. Dengan dukungan regulasi dari pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, diharapkan perlindungan sosial bagi pekerja di wilayah ini dapat terus diperluas dan dirasakan manfaatnya.

B. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial.

Adapun capaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial bahwa selama kurun waktu 5 (tahun) tahun sejak 2020 sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Aceh Besar telah memberikan pelayanan yang optimal untuk pelaksanaan kegiatan SPM Bidang Sosial kewenangan provinsi dan Kabupaten. Semua jenis pelayanan rehabilitasi dasar yang diberikan untuk disabilitas. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48.
Rekapitulasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Anak Terlantar	Anak Berhadapan dengan hukum	Lanjut Usia terlantar	Penyandang Disabilitas	Pengemis	Bekas warga binaan lembaga masyarakat	NAPZA
1	2020	131	0	5,178	2,363	25	0	0
2	2021	75	38	4,587	1,351	16	0	0
3	2022	21	97	4,587	1,474	20	10	54
4	2023	23	46	725	1,476	0	10	126
5	2024	21	41	725	1476	6	10	126

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Penanganan masalah sosial di Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang terfokus dan mencapai hasil yang cukup signifikan. Beberapa capaian indikator jumlah penyandang masalah sosial setiap tahunnya masih menjadi kendala dikarenakan rendahnya kemauan penyandang sosial itu sendiri untuk berubah. Adapun PPKS yang mendapatkan bantuan sosial dari tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan pada komponen usia lanjut terlantar dimana pada tahun 2022 sebesar 4.587 orang dan tahun 2024 sebesar 725 orang. Capaian indikator SPM bidang Sosial di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49.
Indikator Sosial di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Jumlah yang tertangani					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PPKS yang memperoleh bantuan sosial (KK)	8,649	12,456	15,715	12,761	3,428	2758
2	PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE/kelompok dan perorangan sosial ekonomi sejenis lainnya (KK)	100	289	722	744	599	328
3	Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (anak)	210	210	117	70	31	31
4	Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Lembaga)	18	20	22	22	22	22
5	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (jiwa)	325	2546	871	1220	1816	1401
6	Penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial (orang)	155	250	519	249	60	150
7	Anak Yatim yang mendapatkan santunan	4722	4539	6000	6060	0	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, 2025

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

A1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. Indeks kerukunan umat beragama di bangun berdasarkan kerjasama ,toleransi dan kesetaraan. Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama yakni toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Pertama toleransi itu adalah sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kedua kesetaraan, maksudnya kemampuan melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain.

Indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2023 sebesar 66,20 dan tahun 2024 masih sama sebesar 66,20. Indeks kerukunan umat beragama dari Tahun 2018 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2018 - 2024

No	Tahun	Indikator
		Indeks Kerukunan Beragama (Poin)
1	2018	64,12
2	2019	60,24
3	2020	67,46
4	2021	57,51
5	2022	65,87
6	2023	66,20
7	2024	66,20

Sumber Data : Badan Kesbangpol, Kabupaten Aceh Besar, 2025

A2. Syariat Islam

Syariat Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia, baik hubungannya terhadap Allah SWT maupun hubungan terhadap sesama manusia, alam dan kehidupan. Syari'at Islam meliputi semua tingkah laku manusia yang disandarkan pada wahyu Allah SWT (Al-Quran) dan sunnah Rasul-Nya (Al-Hadits). Pusat dari kegiatan keislaman terletak di mesjid dan TPA di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Adapun jumlah mesjid yang melaksanakan riya'ah, idarah dan imarah dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 2.51.
Data Mesjid dan Meunasah di Kabupaten Aceh Besar yang Melaksanakan
Riya'ah, Idarah dan Imarah Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Masjid Agung	Masjid Besar	Masjid Jamik	Masji yang tidak melaksanakan Jum'at	MasJid Bersejarah	Masjid di Tempat Publik	Meunasah/ Musalla Gampong
1	2019	1	23	122	19	5	7	620
2	2020	1	23	122	19	5	7	620
3	2021	1	23	122	19	5	7	620
4	2022	1	23	122	19	5	7	620
5	2023	1	23	122	19	5	7	620

Sumber Data : Dinas Syariat Islam 2025

Pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Undang-Undang tersebut sebagai landasan yuridis memberi wewenang kepada Aceh secara umum untuk melaksanakan Syariat Islam dalam ranah hukum negara, sehingga lahir Qanun dan aturan pelaksana lainnya dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar. Selama pemberlakuan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar terdapat pelanggaran terhadap syariat Islam di bidang jinayah. Data pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

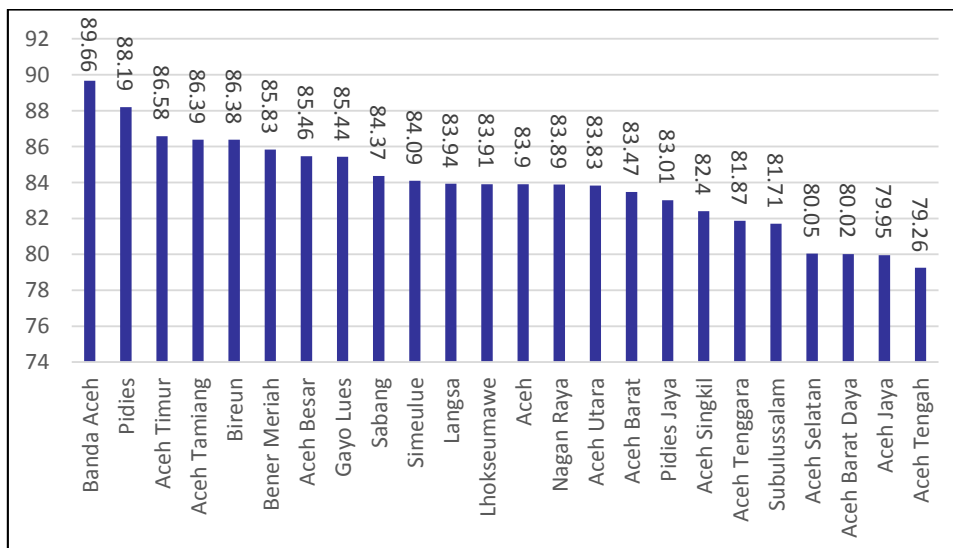
Tabel 2.52.
Data Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019 – 2023

No.	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Khamar	-	-	-	4	-
2	Maisir	5	2	5	9	-
3	Khalwat	1	-	-	4	15
4	Ikhtilah	3	5	10	6	-
5	Zina	5	6	6	-	-
6	Pelecehan Seksual	1	1	4	-	-
7	Pemeriksaan	7	4	13	28	-
8	Liwath	-	1	1	-	-

Sumber data: Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar 2025

Indeks Pembangunan Syariah (IPS) di Aceh adalah pengukuran untuk mengetahui kemajuan pengamalan syariah yang terjadi di Aceh setelah adanya izin bahkan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menjalankan syariat islam sebagai

tugas wajib Pemerintahan Aceh dan izin menyusun hukum positif Aceh berdasar syariat melalui Qanun Aceh (dengan kata lain adanya keterlibatan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota di Aceh secara penuh untuk melaksanakan syariat sebagai kebijakan daerah dan sebagai hukum positif).



Gambar 2.32 Indeks Pembangunan Syariah Aceh Tahun 2024

Indeks pembangunan syariah dilakukan dengan dengan menilai beberapa dimensi yaitu terdiri dari dimensi Aqidah, dimensi kelembagaan keuangan syariah, dimensi kesadaran membayar zakat di Baitul Mall, dimensi meleak Al-quran, dimensi manajemen mesjid, dimensi hukum jinayat, dan dimensi ahlak, berikut ini pengukur dimensi dalam penilaian indeks pembangunan syariah kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024.

A3. Pengelolaan Harta Agama

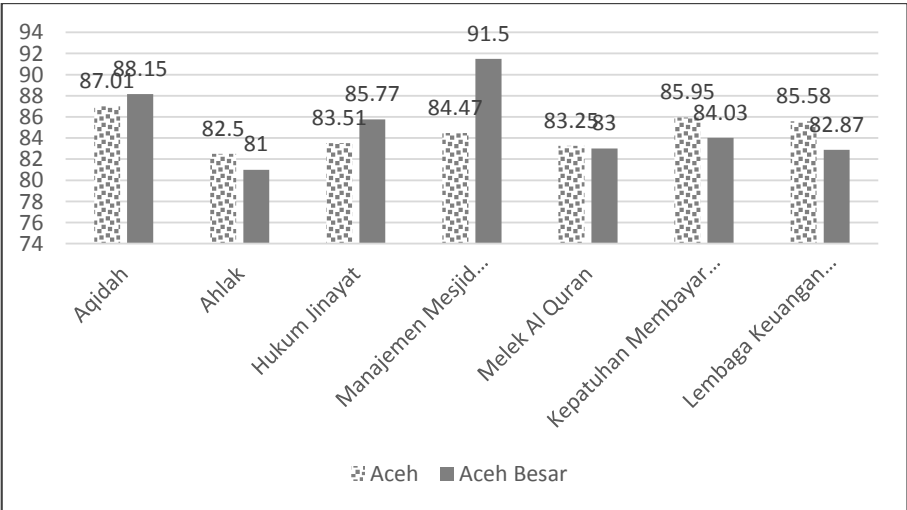
Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Dalam implementasi syariah islam dan capaiannya salah satunya adalah dari kepatuhan dalam membayar Zakat di Baitul Mal. Jumlah penerimaan zakat setiap tahunnya sangatlah fluktuatif. Dimana pada tahun 2019 jumlah zakat yang diterima oleh Baitul Mal sebesar 15,6 milyar, penerimaan zakat kembali menurun hingga tahun 2022 menjadi 12,24 milyar sangat jauh dari angka yang di targetkan untuk Tahun 2022 sebesar 27 milyar dan tahun 2024 terjadi kenaikan baik pada penerimaan zakat maupun infak

dengan target di tahun 2024 sebesar 17 milyar. Jumlah penerimaan Zakat Infaq realisasi dan target dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.53.
Rekapitulasi Penerimaan Zakat dan Infaq Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

TAHUN	PENERIMAAN ZAKAT	PENERIMAAN INFAQ	TOTAL REALISASI	TARGET
2020	12,259,540,330.93	2,103,820,829.03	14,363,361,159.96	17,000,000,000
2021	10,687,800,010.00	3,494,377,454.00	14,182,177,464.00	17,000,000,000
2022	9,182,584,281.19	3,060,658,753.44	12,243,243,034.63	27,000,000,000
2023	9,185,409,159.36	3,266,991,334.38	12,452,400,493.74	17,000,000,000
2024	8,399,294,705.46	4,297,570,607.62	12,696,865,313.08	17,000,000,000

Sumber : Baitul Mall Aceh Besar, 2025



Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh 2024

Gambar 2.33 Dimensi Indeks Pembangunan Syariat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

A4. Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Peran Ulama

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman di dalam bermasyarakat Aceh. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistim dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimipin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Dan jika adat ini bertentangan Ajaran Syariat maka hukum adat

itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi Nilai-nilai keagamaan. Di kabupaten Aceh besar, dalam hal penyelenggaraan adat, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 061/046/2020 tanggal 30 desember 2020 tentang Penggunaan Bahasa Aceh sebagai Bahasa Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dalam surat edaran ini menetapkan bahwa setiap hari Kamis dalam berbagai acara dan kehidupan sehari-hari diwajibkan berbahasa Aceh. Kabupaten Aceh Besar dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat beberapa Lembaga adat yaitu Tuha Peut, Mukim, Peradilan Adat, Kejrung Blang, Pawang Glee, Pawang Laot, Petua Seunubok, Hari Peukan.

A5. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

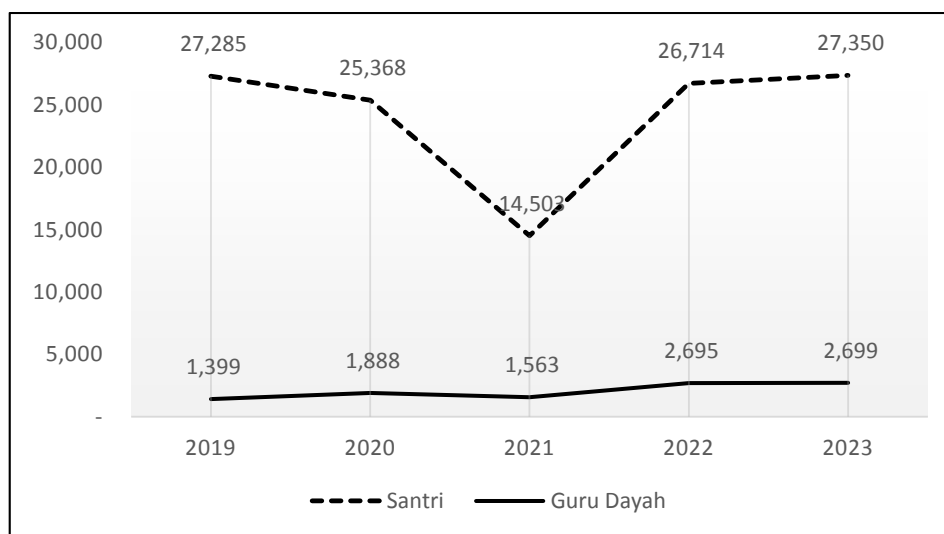
Pendidikan Dayah menjadi pilihan alternatif bagi pendidikan anak-anak di Kabupaten Aceh Besar, mengingat sebagian masyarakat memandang pentingnya pendidikan berbasis agama. Hingga akhir tahun 2022, ada sekitar 15 pondok Pesantren dengan tipe A, 18 Pondok Pesantren dengan tipe B, 37 pesantren dengan tipe C dan 62 Pesantren merupakan dayah non tipe atau tipe D. Namun pada tahun 2023 adanya peningkatan Tipe dayah yaitu kenaikan pada Tipe A, Tipe B dan Tipe C, dan tahun 2023 adanya penambahan dayah menjadi 156 dayah. Tahun 2024 tidak ada penambahan dayah yang bersertifikasi sehingga jumlah dayah sama dengan tahun 2023. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi perkembangan jumlah dayah di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.54.
Jumlah Dayah yang Bersertifikasi di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019-2024

Tipe	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A+	6	7	0	6	6	6
A	16	13	23	15	20	20
B	16	13	14	18	32	32
C	33	30	31	37	40	40
D (Non Tipe)	52	53	104	62	58	58
TOTAL	123	116	172	138	156	156

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Propinsi Aceh, 2025

Jumlah tenaga pengajar/guru dayah tahun 2022 di Kabupaten Aceh Besar sebesar 2.695 orang sedangkan jumlah santri dayah tahun 2022 sebesar 26.714 orang sedangkan tahun 2023 terjadi peningkatan dengan jumlah guru sebanyak 27.350 orang dengan jumlah santri 2.699 orang, dan jumlah guru sangat jauh di bawah santri yang mengakibatkan aktifitas belajar mengajar terhambat. Perbandingan jumlah tenaga pengajar dan santri untuk pondok pesantren tradisional dan pondok pesantren terpadu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Sumber data: Dinas Pendidikan Dayah Aceh Besar, 2025

Gambar 2.34. Perbandingan Jumlah Santri dan Tenaga Pengajar Pesantren

B. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil dinamika kehidupan yang ada di masyarakat. Hasil kebudayaan dari zaman dahulu cenderung dipertahankan karena memiliki nilai tersendiri dan sebagian di antaranya masih relevan dengan zaman sekarang, oleh karena itu beberapa hal yang dapat dijadikan indikator dalam urusan kebudayaan adalah penyelenggaraan festival seni budaya dan pelestarian wujud-wujud kebudayaan

Festival seni budaya merupakan wujud apresiasi pada kebudayaan. Dengan mengapresiasi seni dan budaya, maka aktor-aktor yang ada didalamnya dapat berperan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Di tahun 2021 Kabupaten Aceh Besar tidak menyelenggarakan di karena dalam kondisi covid-19.

Tabel 2.55.
Seni, Festival Budaya yang Diselenggarakan serta Dilkuti oleh
Kabupaten Aceh Besar

No.	Tahun	Jumlah Festival Seni dan Budaya yang Pernah Diadakan di Kabupaten Aceh Besar	Bimtek/Pelatihan Seni Budaya yang Pernah Diadakan di Kabupaten Aceh Besar	Jumlah Festival dan Seni Budaya yang di Buat Oleh Provinsi Aceh
1	2019	Festival Takbir Akbar	Sosialisasi Sistem Pendidikan Terpadu Melalui Seni Budaya	
		Festival Seni Budaya Piala Bupati Aceh Besar		
2	2022	Festival Kuliner		Sebagai Peserta Festival Kuliner Provinsi Aceh
3	2023	Pekan Kebudayaan Aceh	Lokakarya Tata Kelola Festival Piasan Aceh Rayeuk (Indonesiana Platform Kebudayaan)	Sebagai Peserta Pekan Kebudayaan Aceh
		Festival Piasan Aceh Rayeuk		
		Kemah Seni dan Budaya Aceh Besar		

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Kabupaten Aceh Besar memiliki kekayaan budaya berupa warisan peninggalan masa lalu terdiri dari makam kuno, mesjid kuno, tugu, rumah tradisional, benteng kuno, perpustakaan kuno, bangunan/gedung bersejarah, gua dan benda kuno. Selain situs cagar budaya Kabupaten Aceh Besar memiliki kekayaan budaya menarik lainnya, seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Gambaran sebaran kekayaan budaya di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Jumlah Cagar Budaya dan group Kesenian di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

No	Tahun	Uraian		Total
		Group Kesenian	Situs Cagar Budaya	
1	2020	68	180	248
2	2021	45	227	272
3	2022	45	227	272
4	2023	42	282	324
5	2024	67	282	391
Jumlah		267	1,198	1,507

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, 2025

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Adapun kegunaan IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living). Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Berikut tabel di bawah ini yang menunjukkan perkembangan IPG di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.57.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Nasional
Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Aceh Besar	Aceh	Nasional
1	2020	94.9	92.07	91.06
1	2021	94.93	92.23	91.63
3	2022	95.22	92.24	91.63
4	2023	95.29	92.53	91.85
5	2024	95.29	92.64	91.85

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari data BPS tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dimana Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 masih berada di atas Provinsi Aceh yaitu sebesar 92,64 dan juga di atas Nasional yaitu sebesar 91,85.

B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IPG berhubungan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berdasarkan data BPS Tahun 2024, dapat dilihat bahwa IDG Aceh Besar sampai dengan tahun 2023 masih dibawah angka 50 yaitu 47,20 dan angka lebih rendah dari tahun 2022 yaitu sebesar 47,65 yang menunjukkan bahwa masih sedikit perempuan terlibat aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar. Berikut Perkembangan IDG Aceh Besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58.
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Aceh Besar
1	2019	47,73
2	2020	47,37
3	2021	48,11
4	2022	47,65
5	2023	47,20
6	2024	47,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender adalah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan Perempuan dalam kehidupan keluarga bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pencapaian IKG Aceh belum mengalami perubahan yang signifikan dalam kategori capaian. Status capaian ketimpangan “rendah” bila angka IKG dibawah 0,36 persen , “Sedang” bila $0,36 \leq IKG \leq 0,67$; dan “Tinggi” bila $IKG \geq 0,67$. IKG Aceh Besar dari tahun 2019 sampai tahun 2024 masuk dalam sedang. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender dari tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.59.
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Aceh Besar
1	2019	0,544
2	2020	0,543
3	2021	0,524
4	2022	0,532
5	2023	0,500
6	2024	0,500

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

D. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem Pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk terpenuhi hak dan perlindungan anak. Kabupaten Aceh Besar terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program Kabupaten Layak Anak, hasil pencapaian kabupaten layak anak di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 2.60.
Skor dan Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Aceh Besar

Tahun	Skor	Predikat	Keterangan
2019	507	pratama	
2020	-	-	masa covid
2021	-	-	tidak ada nilai
2022	620	Madya	
2023	624,63	Madya	
2024	624,63	Madya	

Sumber Data: Dinas PPKBPPPA Kabupaten Aceh Besar, 2025

E. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)

Indeks pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBANGGA adalah data status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang dan rentan.

Berdasarkan data Dinas PPKBPPPA Kabupaten Aceh Besar hasil pendataan keluarga Tahun 2022, iBANGGA Kabupaten Aceh Besar sebesar 58,14

berada di atas provinsi yaitu sebesar 57,79, sedangkan provinsi sebesar 57,00, untuk tahun 2023 Indeks Pembangunan Keluarga meningkat menjadi 67,64 sedangkan provinsi menjadi 66,15. iBANGGA Kabupaten Aceh Besar diharapkan terus mengalami peningkatan seiring dengan tingginya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM dan Kualitas keluarga kedepannya.

F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas yang menciptakan rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan keluarga, kesehatan dan keselamatan ibu, anak serta perempuan. Peserta KB aktif di Kabupaten Aceh Besar dalam kurun waktu 2019 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuasi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.61.
Peserta KB Aktif di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

Tahun	Jumlah PUS	Peserta Aktif KB
2019	58.651	26.120
2020	60.231	28.526
2021	61.751	29.638
2022	59.518	32.100
2023	63.891	39.328
2024	64.597	39.330

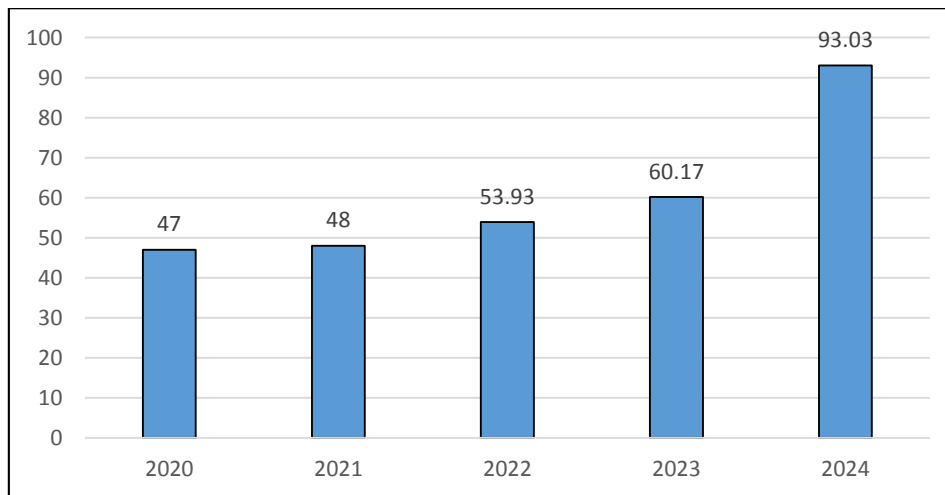
Sumber : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Aceh Besar, 2025

a. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)

Angka kelahiran total merupakan rata-rata anak yang dilahirkan seorang Wanita selama masa subur. Angka kelahiran total digunakan sebagai indikator keberhasilan program KB, membantu pengmabilan kebijakan untuk meningkatkan rata-rat usian kawin. Meningkatkan program pelayanan Kesehatan ibu hamil dan anak, serta mengembangkan program penurunan Tingkat kelahiran. Nilai total fertility rate di peroleh sesuai Dimana dilakukan sensus penduduk setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, untuk TFR tahun 2010 sebesar 2,85 dan tahun 2020 sebesar 2,25.

b. Cakupan Persentase Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB Aktif atau contraceptive Prevalence Rate (CPR) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pengendalian penduduk. Cakupan peserta KB aktif dihitung dari perbandingan antara angka peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur.



Sumber Data : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.35 Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Cakupan persentase peserta KB Aktif di Kabupaten Aceh Besar cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan persentase terus meningkat.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Dependency Ratio (Angka Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja/usia produktif). Semakin kecil angka rasio ketergantungan penduduk akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Rincian angka rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 -2024

No	Tahun	Angka ketergantungan
1	2020	51.71
2	2021	50.92
3	2022	49.35
4	2023	49.06
5	2024	47.51

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

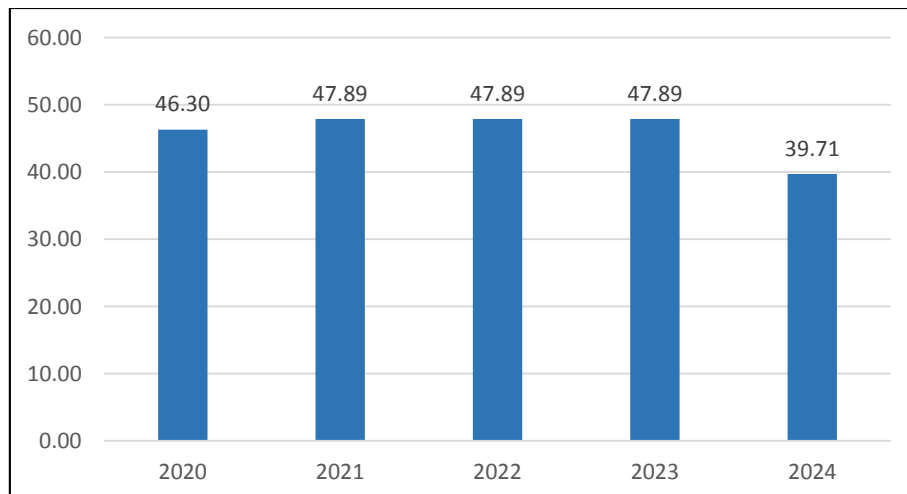
Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, dapat diketahui pada tahun 2023 bahwa *dependency ratio* penduduk Kabupaten Aceh Besar adalah 49,06 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 49.06 penduduk yang berusia tidak produktif. Rasio ini lebih tinggi daripada rasio nasional yang berada di angka 44,4, namun lebih rendah dibandingkan dengan Aceh 48,01. Jika dilihat dari trend rasio ketergantungan, rasio ketergantungan Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan sebesar 2,57 persen selama sepuluh tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) berkurang dan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Aceh Besar.

B. Kepemudaan dan Olahraga

B1. Kepemudaan

1) Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif memberikan gambaran seberapa besar keaktifan organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Organisasi pemuda dapat diberbedayakan untuk mendukung pembangunan daerah.



Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Aceh Besar, 2025

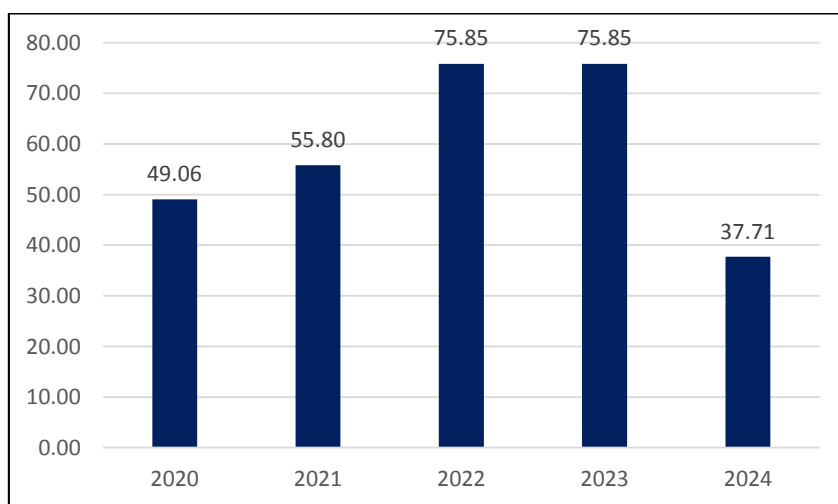
Gambar 2.36 Persentase Organisasi Pemuda Aktif Kabupaten Aceh Besar 2020 – 2024

Semakin besar persentasenya, maka peluang dalam mendukung pembangunan daerah semakin besar. Dari gambar di bawah, organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Aceh Besar yang aktif dari tahun 2021 sampai tahun 2022

kondisi masih di bawah 50 persen namun meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2024.

2) Persentase wirausaha Muda

Wirausaha muda adalah satu bentuk representasi kesehatan ekonomi di suatu daerah. Dalam ini Kabupaten Aceh Besar menganalisis melalui pertumbuhan wirausaha muda yang turut berperanaktif dalam membangun ekonomi. Indikator ini dapat membantu memotivasi lebih banyak orang muda untuk menjadi wirausaha, dapat dilihat pada gambar di bawah persentase wirausaha muda terjadi penurunan dan naik kembali dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Penurun ini terjadi disebabkan faktor ekonomi di masa covid-19 dimana pertumbuhan ekonomi dari 4,35 pada tahun 2019 dan 0,39 di tahun 2020.



Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Aceh Besar, 2024

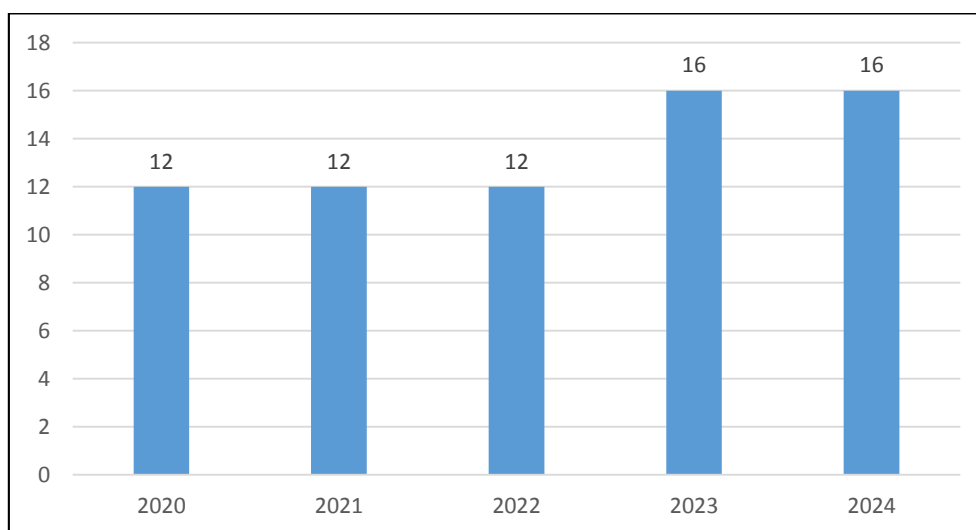
Gambar 2.37 Persentase Wirausaha Muda di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

B2. Keolahragaan

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu daerah yang sangat memprioritaskan kegiatan tersebut dengan melakukan pembinaan-pembinaan khusus dan kontinue untuk beberapa cabang olahraga antara lain cabang Olahraga Karate, cabang Olahraga Atletik, cabang Olahraga Bola Voly, cabang olahraga Taekwondo, cabang olahraga Sepakbola, cabang Olahraga panahan, cabang olahraga Pencak Silat, cabang olahraga Tenis Meja, cabang olahraga Tenis Lapangan, cabang olahraga Basket, cabang olahraga Bulu Tangkis dan cabang olahraga Sepak Takraw. Selain itu ketersediaan pendukung lainnya yang saling berkaitan.

1). Cabang Olah Raga Binaan

Pembinaan cabang olah raga bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet muda. Serta mendukung peningkatan prestasi olah raga di tingkat daerah, nasional dan internasional. Dalam pengembangan olah raga, cakupan pembinaan olahraga mencakup beberapa aspek seperti pelatihan atlet muda yang berprestasi, pengembangan program pelatihan fisik, hingga pemberian fasilitas olah raga yang memadai. Dari gambar di bawah dapat dilihat jumlah cabang olah raga yang telah dilakukan pembinaan di Kabupaten Aceh Besar.

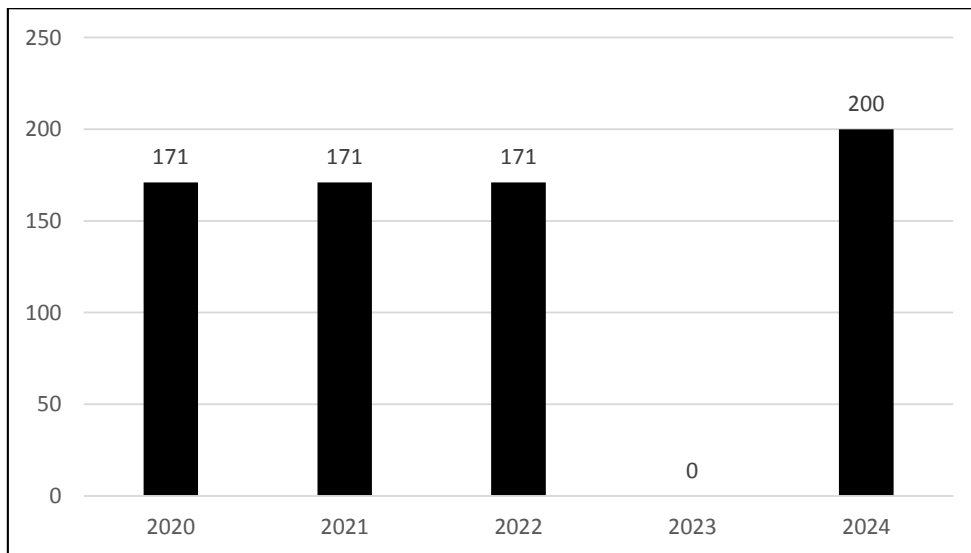


Sumber Data: Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Aceh Besar, 2025

Gambar 2. 38 Jumlah Cabang Olah Raga Binaan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

2). Cakupan Pembinaan Atlet

Cakupan pembinaan atlet meliputi berbagai hal yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah. Dalam pengembangan olahraga, cakupan pembinaan atlet ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pengembangan olahraga di tingkat daerah serta mencetak atlet yang berprestasi. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 jumlah atlet yang dibina hanya 171 orang namun di tahun 2024 atlet yang di bina meningkat menjadi 200 orang.



Sumber Data: Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Aceh Besar, 2025

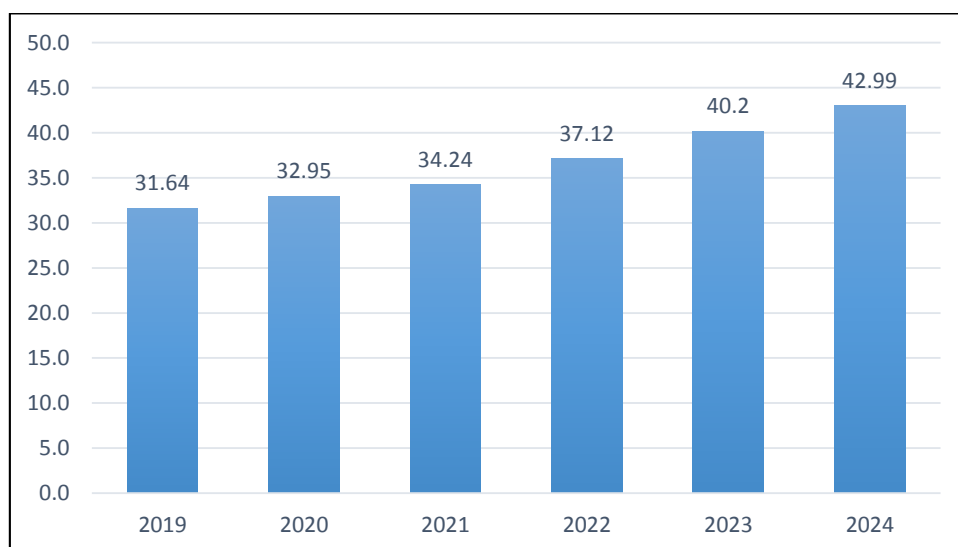
Gambar 2.39 Jumlah Atlet Binaan (orang) di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

Persentase Atlet yang mengikuti even Olah raga kabupaten Aceh Besar tahun 2023 sebesar 29.23 persen dan tahun 2024 sebesar 42.39 persen.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Pendapatan Per Kapita

Secara umum pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Aceh Besar semakin meningkat setiap tahunnya. Gambaran pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

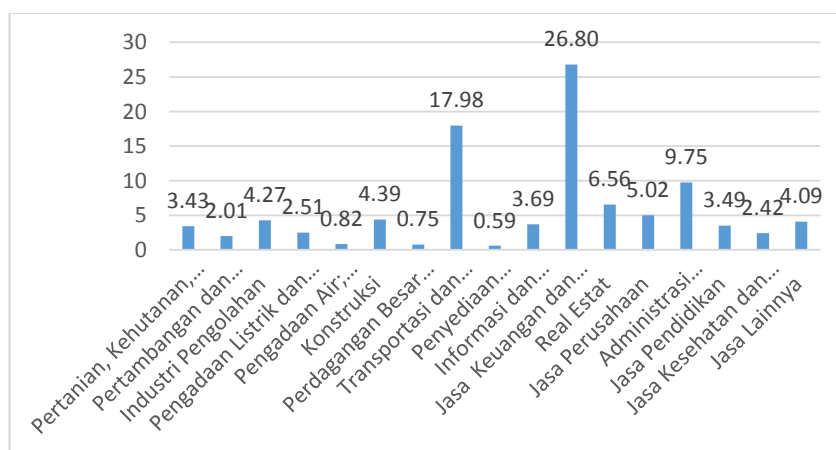


Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.40 PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Besar berdasarkan ADHB Tahun 2019 – 2024 (Juta Rupiah)

B. Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024

Kontribusi per lapangan usaha yang paling tinggi untuk tahun 2023 adalah pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 22,46 persen, untuk tahun 2024 kontribusi terbesar terdapat pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Adapun kontribusi menurut lapangan usaha terhadap PDRB Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.41 Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

C. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

Laju pertumbuhan PDRB Menurut lapangan usaha dari tahun 2019 sampai tahun 2024 didominasi oleh penyediaan akomodasi dan makan minum kemudian disusul oleh transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara itu lapangan usaha yang mengalami stagnasi yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha industri pengolahan, sedangkan jasa keuangan dan asuransi terus menurun Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

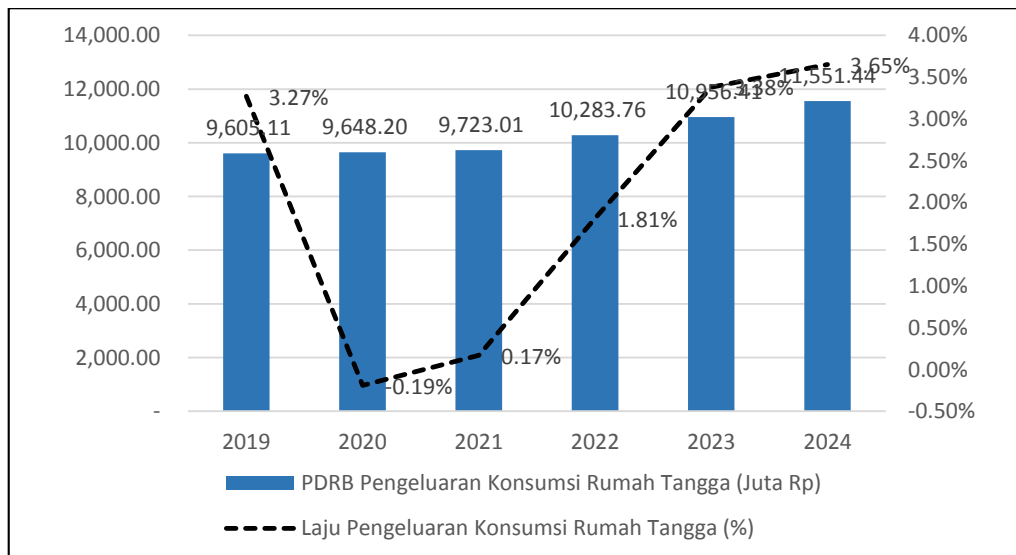
Tabel 2.63.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019–2024 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,32	2,90	1,10	1,97	-1,36	3,43
Pertambangan dan Penggalian	4,12	10,78	7,78	-3,11	2,22	2,01
Industri Pengolahan	3,38	-2,29	0,99	2,72	2,41	4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	8,97	2,90	-1,02	0,96	4,89	2,51
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	24,03	-2,83	2,11	9,75	5,88	0,82
Konstruksi	13,01	33,07	-2,01	-1,77	4,31	4,39
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,84	-5,74	4,80	4,36	7,76	0,75
Transportasi dan Pergudangan	-9,07	-48,49	-4,21	25,01	22,46	17,98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,57	-4,13	0,20	32,12	9,17	0,59
Informasi dan Komunikasi	4,66	17,93	9,90	10,99	3,43	3,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	0,60	-4,38	-5,33	-9,03	26,80
Real Estat	8,16	-0,93	4,08	4,02	5,38	6,56
Jasa Perusahaan	3,75	-2,20	0,56	9,73	-0,79	5,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,21	-2,32	7,31	-0,25	-2,83	9,75
Jasa Pendidikan	7,68	6,28	7,22	3,71	4,14	3,49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,86	6,23	9,72	9,81	6,70	2,42
Jasa Lainnya	7,20	5,29	4,72	11,59	6,11	4,09
Produk Domestik Regional Bruto	4,35	0,39	2,44	3,87	4,37	4,95

Sumber Data :BPS Kabupaten Aceh Besar , 2025

D. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri di bagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tersebut, pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup.

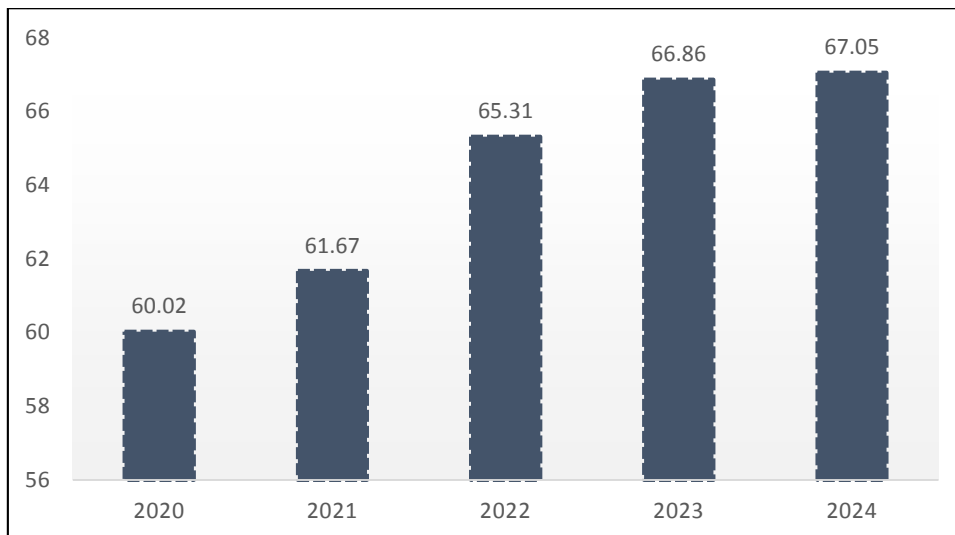


Gambar 2.42 PDRB dan Laju Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan grafik di atas bahwa PDRB ADHB pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 sebesar 10.956,41 milyar rupiah dengan laju pertumbuhan sekitar 3,38 persen dan Tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 11.551,44 milyar dengan laju pertumbuhan konsumsi sebesar 3,65 persen. Pada tahun 2020 -2021 terjadi penurunan dratis laju PDRB pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari pandemi terjadi penurunan pendapatan Masyarakat.

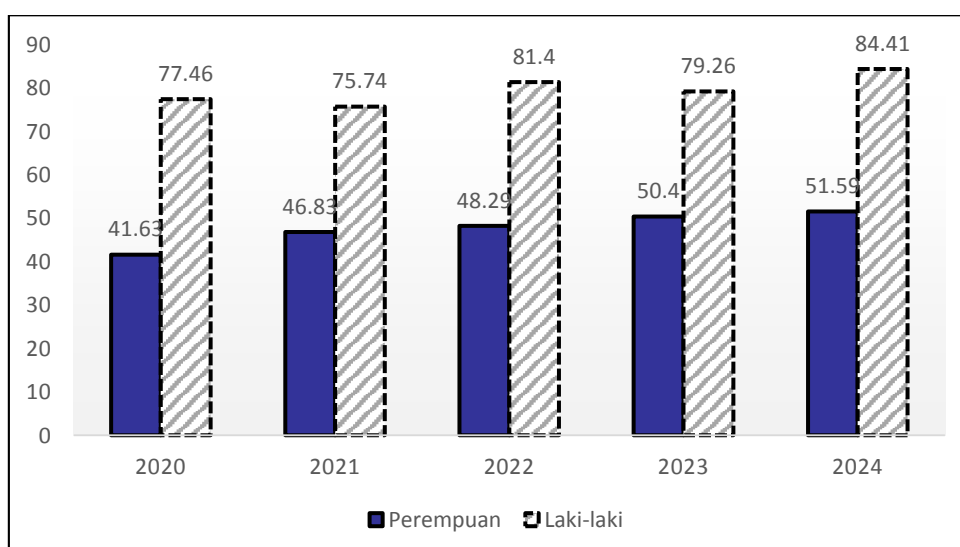
E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Besar mengalami trend peningkatan setiap tahunnya. TPAK Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2020 sebesar 60.02 persen sampai Tahun 2024 sebesar 67,05 persen. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah .



Gambar 2.43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. TPAK juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, di Kabupaten Aceh Besar TPAK jenis kelamin laki-laki lebih besar dan TPAK Perempuan, tahun 2019 TPAK laki-laki sebesar 74,71 sedangkan Perempuan sebesar 36,64 dan tahun 2023 TPAK laki-laki sebesar 79,26 dan TPAK perempuan sebesar 50,4, hal ini menggambarkan bahwa laki-laki masih mendominasi memiliki kesempatan kerja, berikut ini adalah gambar perbandingan jumlah TPAK laki-laki dan Perempuan dari tahun 2020 sampai tahun 2024.



Gambar 2.44 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

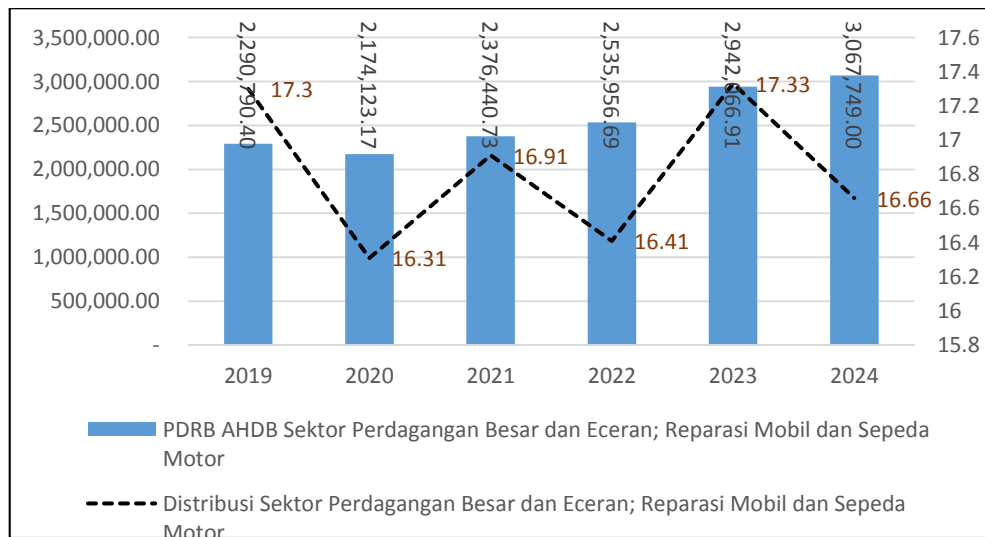
Tenaga kerja tidak terlepas tidak terlepas dari kualitas tenaga kerja berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja Kabupaten Aceh Besar pendidik tenaga kerja yang di bekerja di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 lulusan SD sederajat berjumlah 18,52 persen, SMP sederajat sebesar 17,10 persen, SMA sederajat sebesar 39,50 persen sedangkan $\geq$ PT sebesar 16,60 persen.

Penyerapan tenaga kerja persektor ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 970.000 jiwa. Tahun 2022 produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian berdasarkan PDRB dengan migas sebesar Rp. 44.000.000. Jumlah penduduk bekerja terbanyak kedua terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil sebanyak 320.000 orang dengan produktivitas sebesar Rp. 57.000.000. Sektor Real estat memiliki penyerapan tenaga kerja sebesar 900 jiwa dan merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari semua sektor, pertambangan menjadi sektor dengan produktivitas tertinggi dengan produktivitas sebesar Rp. 677.000.000. Sedangkan Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang menjadi sektor dengan produktivitas terendah sebesar Rp. 43.000.000.

Meskipun secara umum jumlah tenaga kerja sektor pertanian dominan dari semua sektor, namun bila dibandingkan dengan sektor lainnya produktivitas pertanian masih jauh lebih rendah karena serapan tenaga kerja dan nilai PDRB nya lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi tenaga kerja, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usaha tani. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. Kurangnya dukungan terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani. Padahal, apabila produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut dapat ditingkatkan maka kontribusi terhadap PDRB juga dapat meningkat.

F. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Lapangan usaha perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang menopang perekonomian Kabupaten Aceh Besar. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB digunakan untuk melihat performan kinerja dan nilai tambah lapangan usaha perdagangan dalam ekonomi wilayah Kabupaten Aceh Besar.



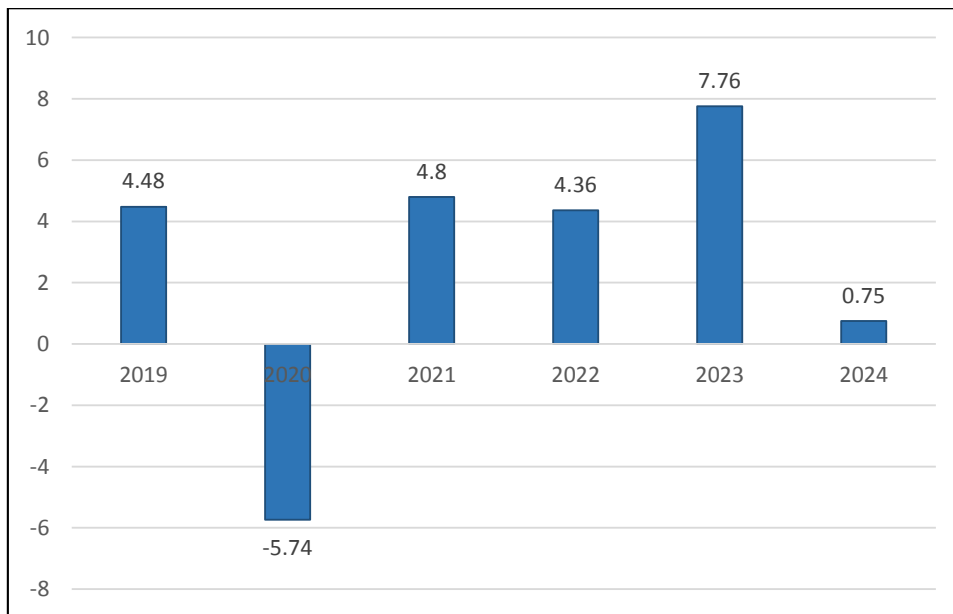
Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar (diolah), 2025

Gambar 2.45 Presentase Kontribusi PDRB ADBH Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 – 2024

Berdasarkan grafik di atas, distribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terjadi penurunan dan berfluktuasi pada tahun 2019 sampai tahun 2022 dan naik kembali di tahun 2024, seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat .

G. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dimana tahun 2020 dengan pertumbuhan minus dan tahun 2021 sampai tahun 2023 laju pertumbuhan terus meningkat lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

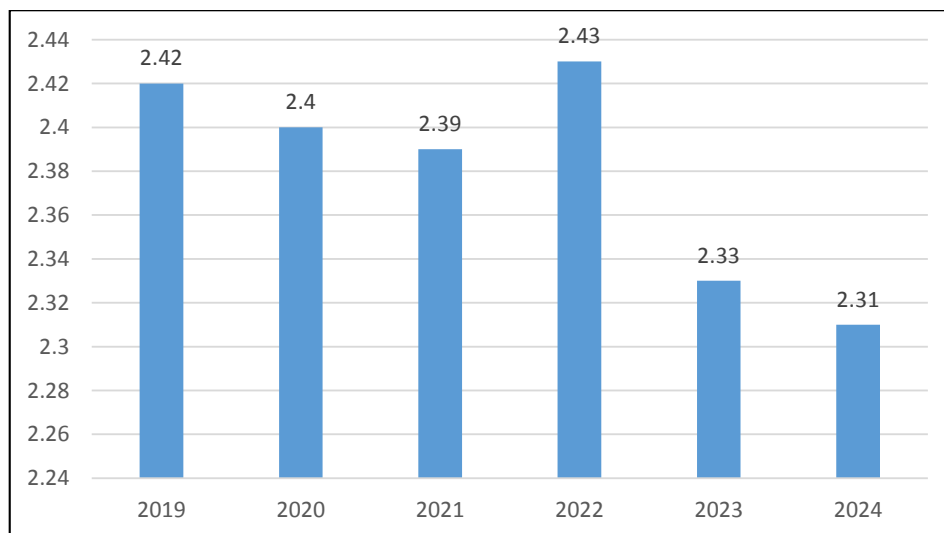


Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar dan Aceh 2025(diolah)

Gambar 2. 46 Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 – 2024

H. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Berdasarkan Gambar dibawah ini yaitu distribusi industri pengolahan di Kabupaten Aceh Besar berada di bawah distribusi Provinsi Aceh, untuk tahun 2022 industri pengolahan Aceh mencapai 5,1 persen dan Kabupaten Aceh Besar sebesar 2,44 persen.

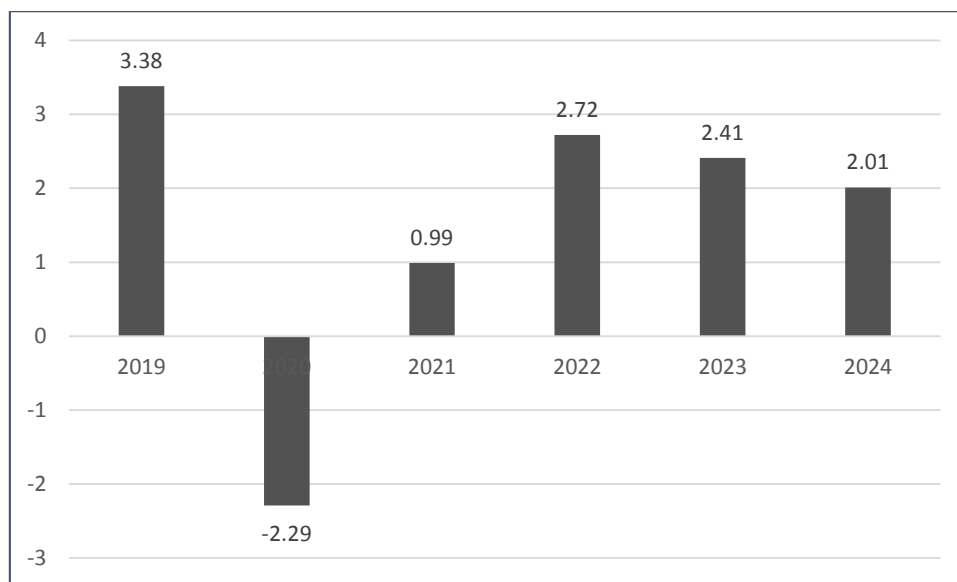


Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar (diolah)

Gambar 2.47 Persentase Kontribusi PDRB ADBH Lapangan Industri Pengolahan Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 – 2024

I. Laju Peningkatan PDRB di Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan gambar diatas di tahun 2019 mulai terjadi penurunan sampai tahun 2020 mencapai -2,29 persen dan pada tahun tahun 2022 telah meningkat kembali mencapai 2,72 persen dan di tahun 2023 kembali turun menjadi 2,41 penurunan disebabkan oleh kondisi covid di tahun 2019 dan tahun 2020.



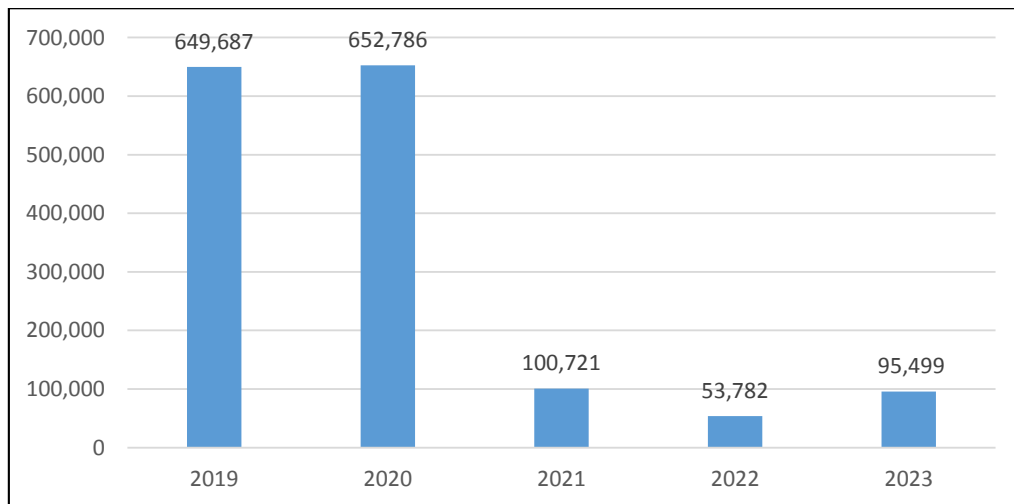
Sumber data: BPS Kabupaten Aceh Besar (diolah)

Gambar 2.48 Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

J. Pariwisata

I). Jumlah Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah atau kegiatan rekreasi lainnya.



Sumber Data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Aceh Besar, 2025

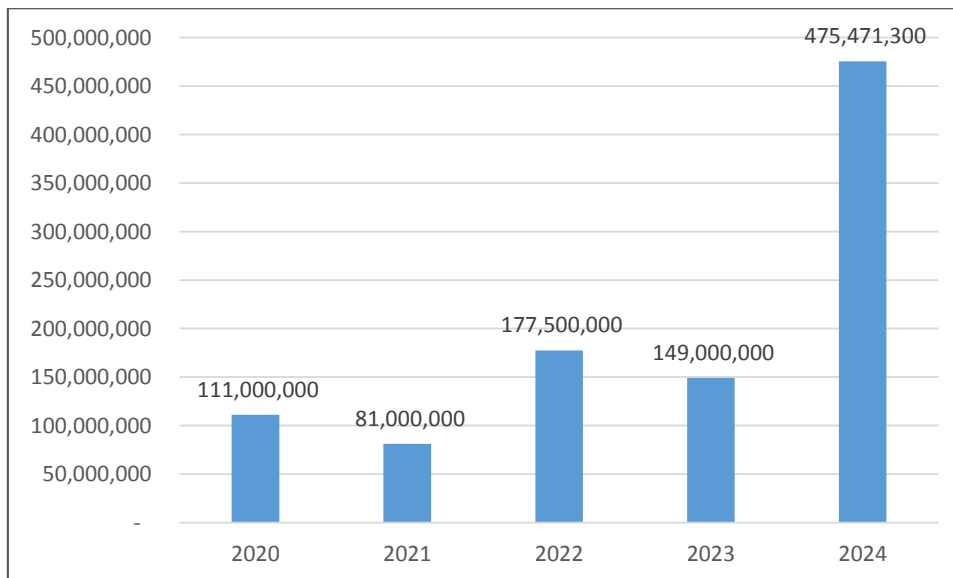
Gambar 2.49 Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023

Jumlah Kunjungan wisata di Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2019 sampai tahun 2020 angka kunjungan wisata tinggi kemudian tahun 2021 terjadi penurunan secara signifikan, dikarenakan terjangkitnya virus covid-19 dari tahun 2021 sampai tahun 2022, tapi tahun 2023 mulai terjadi peningkatan kembali terhadap kunjungan wisatawan mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 41,17 poin.

2). Kontribusi PAD Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peran dalam perekonomian Kabupaten Aceh Besar, kunjungan wisatawan, terutama dari luar daerah Kabupaten Aceh Besar, meningkatkan jumlah pendapatan di kabupaten Aceh Besar.

PAD sektor pariwisata dalam kondisi tahun 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2021 dan terjadi kenaikan di tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan kembali dan tahun 2024 terjadi kenaikan hal ini disebabkan karena adanya even PON XXI, yang di pengaruhi oleh kenaikan jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, sehingga memberikan dampak pada kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.



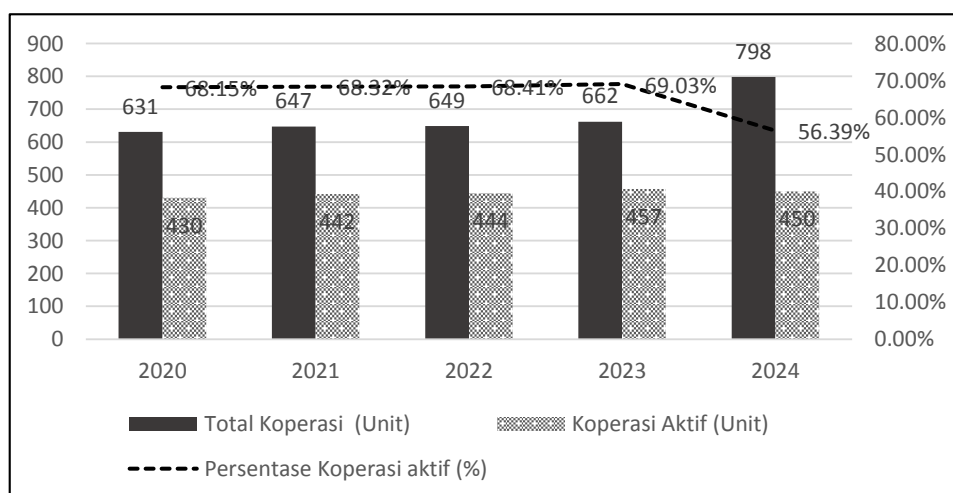
Sumber Data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Aceh Besar, 2024

Gambar 2.50. Jumlah PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Koperasi

Persentase Koperasi aktif menunjukkan kinerja eksistensi, layanan, dan produktivitas koperasi. Jumlah dan persentase koperasi aktif di Kabupaten Aceh Besar dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat, tahun 2023 total jumlah koperasi 662 koperasi yang aktif sebesar 457 koperasi dengan persentase koperasi aktif sebesar 69,00 persen dengan kondisi meningkat. Perkembangan Koperasi di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dapat di lihat pada gambar berikut.



Sumber: Disperindakop Aceh Besar, 2025

Gambar 2.51 Jumlah Koperasi, Jumlah Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Besar 2020 – 2024

b. Usaha Kecil , Mikro dan Menengah

Sampai dengan tahun 2022 jumlah industri kecil, makro dan menengah di kabupaten Aceh Besar mencapai 3.335 buah yang terdiri dari 937 industri formal dan 2.398 buah industri non formal terdiri dari industri pangan, Sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika serta kerajinan, jenis industri, jumlah dan banyak tenaga kerja yang terserap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64.
Jenis Industri, Jumlah dan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2023

No	Jenis industri	JUMLAH			
		Unit Kerja		Tenaga Kerja	
		Formal	Non Formal	Formal	Non Formal
1	Pangan	695	1.394	1.408	3.838
2	Sandang	151	190	223	420
3	Kimia dan Bahan Bangunan	53	453	221	2.691
4	Logam dan Elektronika	15	121	229	519
5	Kerajinan	23	240	48	969
JUMLAH		937	2.398	2.129	8.437

Sumber data : Buku Aceh Besar dalam Angka, 2025

L. Kelitbangan

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahanan untuk penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah. Inovasi daerah diukur melalui indeks inovasi yang dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2019 sedangkan Kabupaten Aceh Besar baru menginput data Indeks inovasi Daerah mulai tahun 2022.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.65.
Indeks inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tahun 2021 - 2024

No	Tahun	IID Aceh Besar	IID Aceh
1	2021		46.4
2	2022	37.11	51.67
3	2023	35.41	55.38
4	2024	47.55	55.87

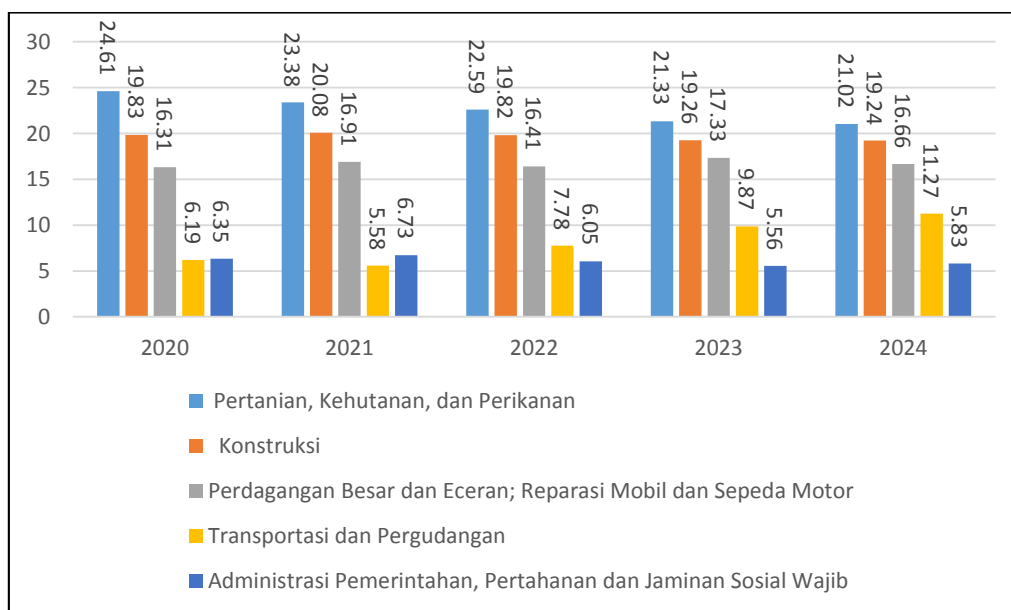
Sumber : BRIN ,2025

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Pertanian

Dalam 5 tahun terakhir, dari 5 sektor distribusi produk domestik regional bruto berdasarkan lapangan usaha, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menempati urutan tertinggi dibandingkan dari sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2020, dan menurun kembali pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dan pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali di sektor pertanian tapi masih berada di atas sektor lainnya. Produksi pertanian tidak terlepas dari luas lahan sawah, luas lahan tadah hujan dan prasarana yang mendukung seperti luas irigasi teknis. Mengenai pertumbuhan sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat pada gambar 2,52 dan luasnya lahan baku sawah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, BPS, 2025

Gambar 2. 52 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibanding Sektor Lain Terhadap PDRB di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Luas sawah dengan irigasi teknis tahun 2022 sebesar 17,747 ha sedangkan di tahun terjadi penurunan menjadi 16.904 Ha, untuk sawah tadah hujan tahun 2022 seluas 8,850 ha dan di tahun 2024 seluas 8.770 ha, dengan luas lahan baku sawah tahun 2022 seluas 25.697 ha dan di tahun 2024 adanya penurunan dengan luas

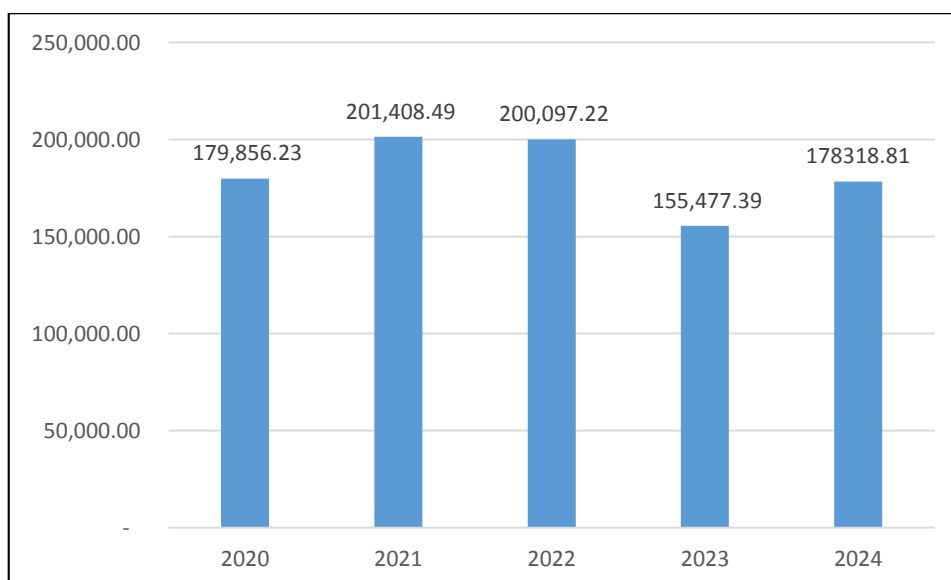
25.692 Ha. Untuk lebih jelas luas lahan sawah tiap kecamatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66.
Luas Irigasi Teknis, Luas Sawah Tadah Hujan dan Luas Lahan Baku Sawah di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

No	Kecamatan	Irigasi Tehnis (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Jumlah Lahan Baku Sawah (Ha)
1	Lhoong	750	40	790
2	Lhoknga	-	862	825
3	Indrapuri	2.102	815	2.917
4	Seulimeum	2.890	632	3.522
5	Montasik	2.043	70	2.113
6	Sukamakmur	995	220	1.215
7	Darul Imarah	-	656	656
8	Peukan Bada	-	547	547
9	Mesjid Raya	-	30	30
10	Ingin Jaya	995	220	1.215
11	Kuta Baro	1.943	140	2.083
12	Darusalam	-	225	225
13	Pulo Aceh	-	323	323
14	Lembah Seulawah	596	50	646
15	Kota Jantho	449	769	1.218
16	Kuta Cot Glie	799	2.028	2.827
17	Kuta Malaka	530	152	700
18	Simpang Tiga	626	160	786
19	Darul Kamal	170	393	563
20	Baitussalam	-	225	225
21	Kr. Barona Jaya	65	112	177
22	Leupung	135	143	278
23	Blang Bintang	1.082	67	1.149
Jumlah		16.904	8.770	25.692

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2025

Irigasi di Kabupaten Aceh sebagian besar digunakan untuk pengairan sawah dengan tanaman padi, dengan air yang mencukupi akan berpengaruh pada produksi padi di Kabupaten Aceh Besar. Penurunan produksi tahun 2023 disebabkan kekeringan yang panjang dan di tahun 2024 terjadi kenaikan produksi kembali, sehingga sangat berpengaruh pada sawah tadah hujan dan luasnya panen. Berikut ini produksi padi di kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 sampai tahun 2024.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2025

Gambar 2.53 Produksi Padi Kabupaten Aceh besar Tahun 2020 - 2024

B. Peternakan

Produk hasil peternakan merupakan salah satu sumber penyediaan protein hewani selain hasil perikanan. Peternakan merupakan bagian dari pertanian yang terbagi dalam kelompok ruminansia besar (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda), ruminansia kecil (kambing, domba, dan babi), dan unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik). Selama 5 (lima) tahun di Kabupaten Aceh Besar populasi terbesar terdapat pada ayam ras petelur dan ayam buras pedaging. Jumlah populasi ternak dan daging ternak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67.
Jumlah Populasi Ternak Berdasarkan Jenis Di Kabupaten Aceh Besar
]Tahun 2019 - 2023

Tahun	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Kuda (Ekor)	Kambing (Ekor)	Domba (Ekor)	Ayam Ras (Ekor)	Ayam Buras (Ekor)	Itik (Ekor)
2019	77.192	10.727	13	57.777	3.241	822.655	544.204	123.861
2020	79.743	12.287	23	59	4.057	886.514	571.137	127.972
2021	81.276	13.536	24	60	4.166	1.005.519	1.573.874	132.604
2022	77.73	11.579	27	56	682	983.947	538	134
2023	84.134	13.038	39	52.645	7.603	1.222.533	453.393	138.115

Sumber data : Badan Pusat Statistik Aceh Besar, 2025

Tabel 2.68.
Jumlah Produksi Daging Ternak Berdasarkan Jenis di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

Tahun	Sapi (Kg)	Kerbau (Kg)	Kambing (Kg)	Domba (Kg)	Ayam Buras (Kg)	Ayam Ras Petelur (Kg)	Ayam Ras Pedaging (Kg)	Itik (Kg)
2020	1.333.337	100.321	136.99	23.584	204,78	256,363	1.221.694	355,152
2021	1.879.338	563.121	321.324	132.713	147,18	937,642	1.0697.06	121,357
2022	1.006.017	63.750	123.688	14.543	210.824	5.532	983,947	166,285
2023	1.117.778	33.908	1.462.648	140.269	128.804	73.2	1.458.481	100.711
2024	1,030,966	65.916	124.545	14.721	209.946	5,665	1,355,704	167.334

Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar dan BPS, 2025

Pemotongan ternak ditunjukan untuk mengambil dagingnya. Pemotongan ternak sendiri merupakan suatu proses yang dimulai dari pemilihan ternak sampai daging. Jumlah pemotongan hewan ternak dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terbanyak pada ayam pedaging yang merupakan permintaan konsumsi terbanyak oleh masyarakat, jumlah pemotongan hewan ternak dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69.
Jumlah Pemotongan Ternak Berdasarkan Jenis di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

Tahun	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Kambing (Ekor)	Domba (Ekor)	Ayam Buras (Ekor)	Ayam Ras Petelur(ekor)	Ayam Ras Pedaging (ekor)	Itik (Ekor)
2020	9	600	14	1.779	157.523	221.895	933	404
2021	11	696	14	1.725	158.08	220.759	958.888	305.915
2022	5	340	10	1.163	140.549	4.128	901.087	134
2023	6.342	192	8.439	807	85.869	48.8	972.425	67.215
2024	6,364	276	8,806	815	91,869	84,928	4,656,491	67,065

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Aceh Besar 2025

C. Kelautan dan Perikanan

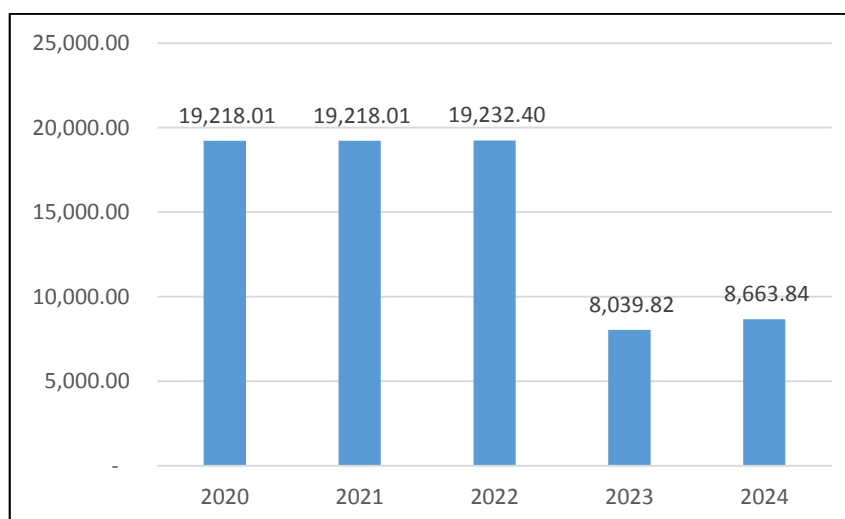
C1. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah bagian dari industri yang termasuk di dalamnya kegiatan mendapatkan dan mengolah hasil laut dan air tawar di antara ikan, udang, dan hasil perikanan lainnya, hasil produksi perikanan berasal dari kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum, serta kegiatan budidaya di tambak, kolam, sawah, jaring apung maupun budidaya laut. Perikanan tidak hanya berkontribusi sebagai sumber protein masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencarian.

Tabel 2.70.
Hasil Produksi Perikanan Kabupaten Aceh Besar
(Tangkap dan Budidaya)

No	Kecamatan	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Lhoong	229,08	290,37	290,37	293,27	1046,34	Ton
2	Lhoknga	76,50	80,3	80,30	81,11	682,03	Ton
3	Indrapuri	3,80	16,89	16,89	17,06	12,08	Ton
4	Seulimeum	112,40	185,42	185,40	187,26	966,94	Ton
5	Montasik	9,10	10,33	10,37	10,47	8,04	Ton
6	Sukamakmur	9,10	20,45	20,50	20,71	13,05	Ton
7	Darul Imarah	8,70	32,34	32,34	32,66	14,26	Ton
8	Peukan Bada	48,45	55,12	55,21	55,76	597,51	Ton
9	Mesjid Raya	313,87	362,57	362,57	366,20	2307,75	Ton
10	Ingin Jaya	15,90	10,74	10,78	10,89	8,04	Ton
11	Kuta Baro	18,8	18,77	18,8	18,99	13,01	Ton
12	Darusalam	5,00	18,75	18,75	18,94	9,02	Ton
13	Pulo Aceh	15,25	17,01	17,05	17,06	975,59	Ton
14	Lembah Seulawah	6,50	20,24	20,24	20,44	13,02	Ton
15	Kota Jantho	71,96	20,87	20,87	21,08	13,01	Ton
16	Kuta Cot Glie	7,80	18,94	18,97	19,16	13,04	Ton
17	Kuta Malaka	9,90	18,42	18,45	18,63	11,07	Ton
18	Simpang Tiga	8,80	27,90	27,89	28,17	12,07	Ton
19	Darul Kamal	11,40	23,21	23,23	23,46	8,53	Ton
20	Baitussalam	90,88	109,31	109,31	110,40	641,90	Ton
21	Kr. Barona Jaya	7,90	12,91	12,94	13,07	20,71	Ton
22	Leupung	73,09	78,08	78,08	78,79	642,95	Ton
23	Blang Bintang	8,90	11,79	11,90	12,02	9,96	Ton

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Aceh Besar, 2025



Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.54 Produksi Perikanan (Ton) Kabupaten Aceh Besar

Produksi perikanan di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024, terutama di Kecamatan Lhoong, Lhoknga dan Seulimuem.

C2. Alat Penangkapan Ikan

Produksi perikanan tidak lepas tidak lepas dari alat tangkap yang digunakan terutama untuk perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Besar yang penangkapan dilakukan di perairan umum.

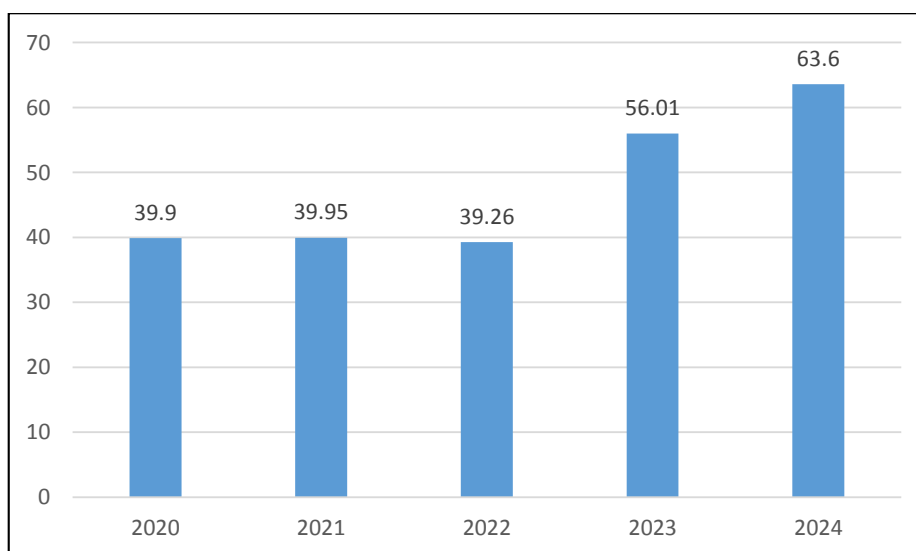
Tabel 2.71.
Jenis dan Jumlah Alat Tangkap Yang digunakan, di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020-2024

No.	Jenis Alat Tangka Ikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jukung	43	43	43	38	38
2	Perahu tanpa Motor Kecil	-	-	-	-	-
3	Perahu tanpa Motor Sedang	-	-	-	-	-
4	Perahu tanpa Motor Besar	-	-	-	-	-
5	Peharu Motor Tempel	237	237	237	224	197
6	Kapal Motor GT 0-5	178	178	178	810	765
7	Kapal Motor GT 5-10	68	68	68	68	16
8	Kapal Motor GT 10 – 20	9	9	9	21	0
9	Pukat	28	28	28	-	25
10	Jaring angkat began	56	56	56	-	65
11	Pancing	816	816	816	-	700
12	Jaring Ikan	159	159	159	-	146

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 2025

C3. Konsumsi Ikan Per Kapita

Angka konsumsi ikan adalah nilai konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversikan dalam kg per kapita setiap tahun. Dalam 5 tahun, angka konsumsi ikan di Kabupaten Aceh Besar terus mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat naik. Dari gambar di bawah ini konsumsi ikan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terus meningkat disebabkan oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan masyarakat.



Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.55 Tingkat Konsumsi Ikan (persen) Di Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2020-2024

C4. Luas Lahan Perikanan

Secara umum, lahan perikanan Kabupaten Aceh Besar terbagi 2 (dua) jenis berdasarkan jenis usaha perikanan, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan di area laut dengan garis pantai sepanjang 228,72 Km, dan aria perairan umum seperti rawa, situ, bekas galian pasir, maupun sungai. Sementara itu, perikanan budidaya dilakukan di area tambak, sawah, jaring apung, dan budi daya laut. Luas lahan perikanan budi daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.72.
Luas Lahan Perikanan Budidaya di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 – 2024

No	Jenis	Luas Lahan Perikanan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tambak (Ha)	749,1	759,1	759,1	792	798
2	Kolam (Ha)	96,5	96,5	96,5	95,5	95.5
3	Sungai (Ha)	719,9	719,9	719,9	719,9	719.9
4	Waduk (Ha)	259,8	259,8	259,8	259,8	259.8
5	KJA (Ha)	3,8	3,8	3,8	4,5	5
6	Total (Ha)	1829,1	1839,1	1839,1	1872,7	1878.2

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, 2025

2.1.3.4. Transformasi Digital

A. Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait keamanan informasi sektor pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek penerapan persandian dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta pengembangan teknologi persandian dan keamanan informasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Isu permasalahan terkait persandian dan keamanan informasi adalah: 1) Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka ketersediaan, autentikasi dan kerahasiaan informasi, baik informasi berklasifikasi maupun non klasifikasi, serta 2) Terbatasnya sumber daya di bidang persandian dan keamanan informasi, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian dan keamanan informasi.

Sejalan dengan meningkatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka semakin meningkat pula tindakan illegal/kejahatan yang akan terjadi pada Sistem Infrastruktur TIK, yaitu berupa serangan siber baik berbentuk ransomware, Sql Injection, DDos, Phising maupun social engineering. Hal ini perlu perhatian yang mendalam dikarenakan perkembangan disektor TIK semakin pesat, terlebih pemanfaatan teknologi AI (Artificial Intelligence) dan IoT (Internet of things) yang dapat disalahgunakan dalam berselancar di dunia siber.

B. Statistik

B1. Buku Profil Pembangunan Aceh Besar

Profil Pembangunan Aceh Besar Tahun 2025 merupakan dokumen data dan informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar sampai dengan Tahun 2024. Publikasi ini menyajikan data dari berbagai bidang yang bersumber dari berbagai instansi dan profil Kabupaten Aceh Besar merupakan hasil Kerjasama Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.

B2. Buku Tinjauan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025

Buku Tinjauan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 merupakan data statistik makro kegiatan perekonomian yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, buku ini bertujuan memberikan informasi kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2024.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Penanaman Modal

Dalam penanaman modal kegiatan berusaha terbagi menjadi dua status permodalan, yaitu Penanaman modal Dalam Negeri (PMDM) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Nilai investasi Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan hal ini terjadi karena pengaruh dari kondisi covid-19 serta faktor ekonomi dan faktor politik pada tahun 2023 yang merupakan adanya pemilu.

Tabel 2.73.
Realisasi Investasi di Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 - 2024

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Nilai Investasi	Trilyun	3,058,080,785,654	1,606,608,872,159	600,681,093,183	440,553,083,837	384,923,314,320
2	Jumlah perizinan	Unit	7022	3,558	3,559	5,909	6,748

Sumber data : Dinas DPMTSP, Kab. Aceh Besar, 2025

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Capaian Kinerja Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini.

Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kabupaten/kota tersebut semakin baik.

Demikian pula capaian Infrastruktur dari tahun 2020 - 2024 terus memperlihatkan peningkatan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 2.74.
Capaian Kinerja Infrastruktur Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Capain Kinerja Infrastruktur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase RT yang memiliki akses air bersih	87.96	88.59	91.08	92.69	92,98
Persentase RT yang memiliki akses sanitasi	84.07	86.45	86.7	86.78	87,07
Persentase RT yang memiliki akses Listrik	98.87	98.87	99.8	99.8	99.8
Persentase RT yang memiliki akses Telepon	84	86	90	90	99

Sumber data: Dinas PUPR, 2025

A1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 -2024 di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.75.
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			
	Total Panjang Jalan (km) (Kab,Prov,Nasional)	Total Jumlah Kendaraan (unit)	Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%)	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (%)
2020	1,644.36	212,327	129.12	0.77
2021	1,644.36	221,372	134.63	0.74
2022	1,644.36	230,414	140.12	0.71
2023	1,644.36	94,719	57.60	1.74
2024	1,644.36	462747	281.41	0.36

Sumber data: Dinas Perhubungan, 2025

Panjang jalan yang diperhitungkan adalah panjang jalan nasional, panjang jalan provinsi, dan panjang jalan Kabupaten dalam Kabupaten Aceh Besar, kendaraan yang diperhitungkan terdi dari kendaraan roda dua dan roda empat.

A2. Kemantapan Jalan Kabupaten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, bawah permukaan tanah dan/atau air. Kondisi jalan menjadi suatu yang berpengaruh tingkat transportasi suatu daerah, kondisi ini di tandai dengan tingkat kemantapan jalan.

Kemantapan jalan merupakan kondisi pelayanan sejak kontruksi masih baru sampai kondisi pelayanan pada batas kemantapan (akhir umur rencana), dengan nilai kemantapan wajar seperti yang diperhitungkan, yang termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang, sampai tahun 2024 tingkat kemantapan jalan Kabupaten Aceh Besar sebesar 63,32 persen dimana pada tahun 2020 masih sebesar 66,08 persen. Perkembangan kondisi kemantapan jalan Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

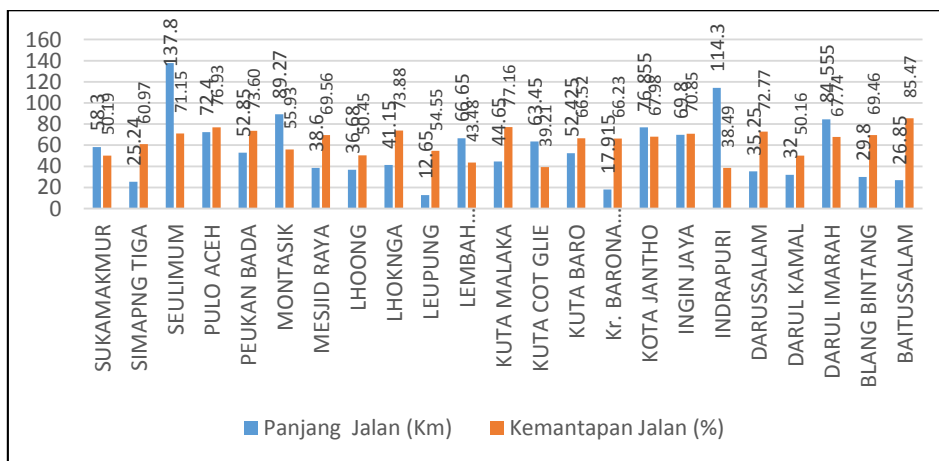
Tabel 2.76.
Tabel Kemantapan Jalan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Persentase Kemantapan (%)
1	2020	66,08
2	2021	62,07
3	2022	60,92
4	2023	62,48
5	2024	63.32

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 270 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Ruang Jalan Kabupaten di Kabupaten Aceh Besar tanggal 25 April Tahun 2025 dengan jumlah ruang jalan sebanyak 841 ruas jalan dengan panjang jalan sepanjang 1.344.03 Km, sedangkan surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 135 tahun 2017 dengan ruas jalan sebanyak 629 ruas dengan panjang 1.279.44 Km, sehingga dengan peningkatan status jalan pada tahun 2025 berpengaruh pada penentuan capaian target kemantapan jalan di Kabupaten Aceh Besar.

Hingga sampai tahun 2023 terus melakukan peningkatan kinerja kemantapan jalan serta konektifitas dengan memperbaiki ruas jalan kabupaten yang berada pada setiap kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar. Jalan dengan kemantapan terting tahun 2023 berada di kecamatan Baitussalam dengan tingkat kemantapan sebesar 85,47 persen dan kemantapan terendah di Kecamatan Kuta Cot Glie sebesar 39,21 persen dengan panjang jalan 24,88 Km. untuk lebih jelas Panjang dan tingkat kemantapan tiap kecamatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.56 Tingkat Kemantapan Jalan Per Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

A3. Kondisi Panjang Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi di suatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio pada bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dan jalan desa. Pengelompokkan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jaringan Jalan sampai tahun di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari jalan Nasional sepanjang 37.53 Km, Jalan Kabupaten sepanjang 1.279.44 Km, dan Jalan Provinsi sepanjang 166.24 Km. Rincian kondisi jalan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77.
Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan (Km)			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
2020	1.279.44	724,760	120.64	301.48	132.56
2021	1.279.44	528.26	320.47	247.65	183.07

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan (Km)			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
2022	1.279.44	534.99	281.51	146.46	316.49
2023	1.279.44	447.78	351.56	164.28	317.82
2024	1.279.44	457,162	353.01	157.66	311,608

Sumber Data : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

B. Penataan Ruang (RTRW)

B1. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang Terhadap RTRW

Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar telah disusun sesuai tahapan dan mekanisme yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dokumen RTRW Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 telah di qanun kan dengan Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032. RTRWK Aceh Besar yang diatur dalam Qanun tersebut di atas memuat substansi berupa tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada Tahun 2018, sudah disusun RDTR Kecamatan Ingin Jaya yang sudah memasuki tahap persetujuan substansi di tingkat TKPRD Aceh Besar, RTBL sudah ada 2 buah yang sudah di jadikan Peraturan Bupati Aceh Besar yaitu RTBL Kawasan Lambaro Ingin Jaya dan RTBL kawasan Desa Wisata Lubok. Pada Tahun 2018 RTRW Aceh Besar sudah dilakukan penyesuaian kembali yang rencananya pada Tahun 2021 sedang melakukan Revisi RTRW Aceh Besar.

Pola Ruang di Aceh Besar secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya berdasarkan Qanun RTRW Aceh Besar 2012 – 2032, luas Kawasan Lindung 144.755.03 Ha dan kawasan Budidaya 622.615.73 Ha. Luas Pola ruang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78.
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Besar

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Hutan Lindung	69624.14	Permukiman Perkotaan	68806.44
Cagar Alam Pinus Jantho	15281.37	Permukiman Perdesaan	7378.14
Cagar Budaya	3.09	Holtikultura	2050.48
Hutan Pendidikan STIK	50.41	Hutan Pendidikan STIK	132.87
Embung	6.03	Hutan Produksi	196024
Kebun Plasma Nutfah	694.54	Hutan Produksi Konversi	4368.52
RTH	36.44	Hutan Produksi Terbatas	40.2
Sempadan Embung	3.5	Hutan Rakyat	1128.7
Sempadan Pantai	19303.05	Kawasan HANKAM	291.51
Sempadan Sungai	16957.84	Kawasan Peruntukkan Transmigrasi	122142.29
Sempadan Waduk	27.64	Kawasan Peternakan	409.27
Sungai	12531.31	Perkebunan	124763.16
Tahura Pocut Meurah Intan	7299.41	Perkebunan Kakao	1936.49
Taman Wisata Alam Kuta Malaka	367.52	Pertambangan	57064.79
Taman Wisata Alam Pinus Jantho	2556.02	Pertanian Lahan Basah	23054.48
Waduk	12.72	Pertanian Lahan Kering	13024.39
		Tambak	1146.09

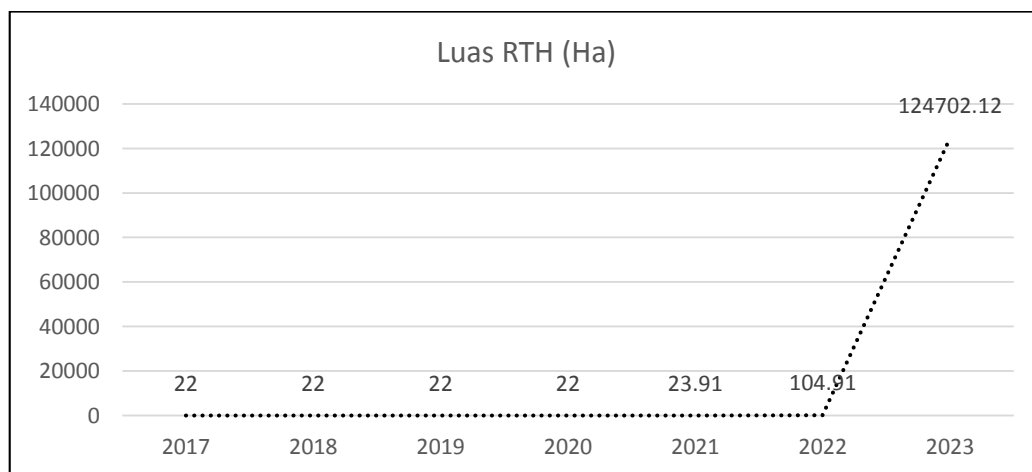
Sumber data : RTRW Kabupaten Aceh Besar 2012-2032

Pola ruang yang diuraikan di dalam tabel di atas menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan sejauh mana pelaksanaan penataan ruang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar yang diukur dengan membandingkan antara tahap kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang sudah dilakukan dengan penyelesaian kegiatan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Aceh Besar yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang sesuai struktur dan pola ruang. Adapun penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari perencanaan, pembinaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

B2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang disengaja di tanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Adapun ketersediaan RTH publik di Kabupaten

Aceh Besar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 seluas 22,00 hektar. Pada tahun 2021 meningkat dengan luasan 23, 91 hektar dan pada tahun 2022 naik dengan luasan 104,91 hektar dan di tahun 2023 RTH Kabupaten Aceh Besar telah mencapai 124.702,1 Ha. Rincian ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar, 2024

Gambar 2.57 Luas RTH Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2023

C. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi

Pembangunan disektor keciptakaryaan yaitu pembangunan Perumahan, Air Bersih, Sanitasi, Air Limbah dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, serta sarana lainnya di kawasan permukiman yang memadai guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan bersih. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyediaan kebutuhan air bersih di Aceh Besar adalah kondisi topografi dan luas wilayah, serta terbatasnya ketersediaan air baku yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan membutuhkan anggaran yang memadai.

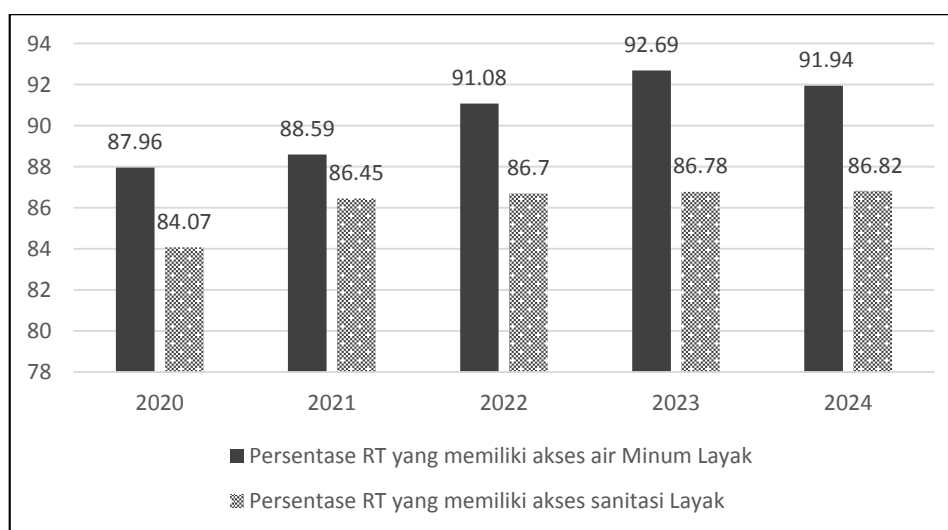
Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi menunjukkan peningkatan yang cukup baik, pada Tahun 2019 sebesar 78,64 persen untuk akses air minum dan 83,82 persen untuk sanitasi, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 92,89 persen pada akses air minum dan sanitasi menjadi 86,78 persen.

Tabel 2.79.
Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak Aceh Besar 2020 - 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase RT yang memiliki akses air Minum Layak	87.96	88.59	91.08	92.69	92.96
Persentase RT yang memiliki akses sanitasi Layak	84.07	86.45	86.7	86.78	86.82

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar, 2025

Berdasarkan data tersebut di atas kondisi sanitasi di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuatif setiap tahunnya.



Gambar 2. 58 Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Aceh Besar 2020 – 2024

Kabupaten Aceh Besar kurun waktu 2020 – 2024 telah melakukan penanganan baik berupa pembangunan dan rehabilitasi drainase sepanjang 48.30,01 meter dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80.
Pembangunan/rehabilitas saluran Drainase Lingkungan

NO	KEGIATAN	Tahun					TOTAL
		2020 (M)	2021 (M)	2022 (M)	2023 (M)	2024 (M)	2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1	PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALURAN DRAINASE	18,032.30	3,234.80	1,911.91	1,341.55	872.20	25,392.76
TOTAL		18,032.30	3,234.80	1,911.91	1,341.55	872.20	24,520.56

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Aceh Besar, 2024

D. Pengairan

D1. Jaringan Irigasi

Urusan pekerjaan umum lainnya yang terkait dengan pelayanan dasar adalah jaringan irigasi. Kabupaten Aceh Besar memiliki 2 Daerah Irigasi dengan kewenangan nasional yaitu D.I Krueng Aceh dan D.I Krueng Jreu. Untuk Daerah Irigasi Kewenangan nasional terdapat 117 daerah Irigasi yang tersebar di 23 kecamatan. Terkait dengan daerah irigasi kewenangan Kabupaten, selama Tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendapatkan bantuan untuk mengembangkan pengelolaan jaringan berbasis partisipatif atau yang dikenal dengan Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*. Jumlah Daerah Irigasi yang menjadi wilayah Kerja IPDMIP sampai pada Tahun 2021 adalah sebanyak 17 Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang sudah pengerjaan desain SID dan sebanyak 11 Daerah Irigasi untuk pengerjaan fisiknya dengan total pengelola perkumpulan petani pemakai air (P3A) sebanyak 13 kelompok yang tersebar di 11 Daerah Irigasi ini.

Secara keseluruhan dari 117 Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dan 2 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat yang terletak di Kabupaten Aceh Besar mampu mengairi lahan sawah seluas 17.147 ha. Kemudian untuk lahan sawah lainnya didukung dengan sistem tadah hujan seluas 8.550 hektar. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai gambaran luas lahan sawah yang diairi dengan jaringan irigasi teknis.

Tabel 2.81.
Luas Irigasi Teknis dan Tadah Hujan Di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2024

No	Kecamatan	Irigasi Tehnis (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Jumlah Lahan Baku Sawah (Ha)
1	Lhoong	750	40	790
2	Lhoknga	-	862	825
3	Indrapuri	2.102	815	2.917
4	Seulimeum	2.890	632	3.522
5	Montasik	2.043	70	2.113
6	Sukamakmur	995	220	1.215
7	Darul Imarah	-	656	656
8	Peukan Bada	-	547	547
9	Mesjid Raya	-	30	30
10	Ingin Jaya	995	220	1.215
11	Kuta Baro	1.943	140	2.083

No	Kecamatan	Irigasi Tehnis (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Jumlah Lahan Baku Sawah (Ha)
12	Darusalam	-	225	225
13	Pulo Aceh	-	323	323
14	Lembah Seulawah	596	50	646
15	Kota Jantho	449	769	1.218
16	Kuta Cot Glie	799	2.028	2.827
17	Kuta Malaka	530	152	700
18	Simpang Tiga	626	160	786
19	Darul Kamal	170	393	563
20	Baitussalam	-	225	225
21	Kr. Barona Jaya	65	112	177
22	Leupung	135	143	278
23	Blang Bintang	1.082	67	1.149
Jumlah		16.904	8.770	25.692

Sumber Data : Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2025

Untuk saluran irigasi, panjang saluran irigasi teknis primer, sekunder, tersier dan saluran pembuang di Kabupaten Aceh Besar tahun 2020-2023 seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.82.
Panjang Irigasi Teknis Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2023

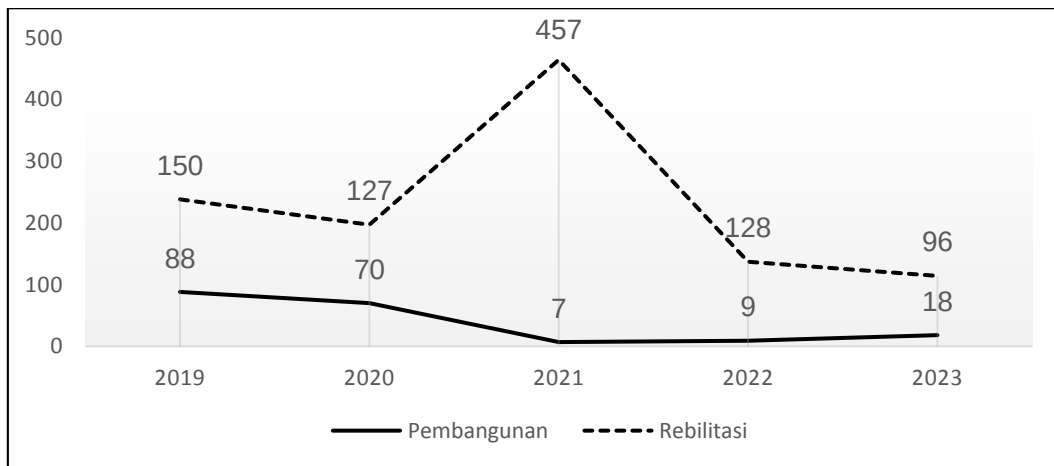
Tahun	Saluran			
	Primer (m)	Sekunder (m)	Tersier (m)	Pembuang (m)
2020	129.497	25.950	60.120	3.680
2021	132.527	26.370	60.320	3.680
2022	132.366	38.323	62.758	4.593
2023	133.220	37.743	62.765	4.593

Sumber Data : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Besar, 2025

E. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

E1. Rumah Layak Huni dan Korban Bencana

Untuk penyediaan rumah layak huni, berdasarkan data dari Dinas PUPR Aceh Besar sampai tahun 2022, masih sangat minim. Penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Aceh Besar terdiri pembangunan rumah layak huni dan rehab rumah tidak layak huni seperti disajikan pada gambar berikut.



Sumber data: Dinas PUPR Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.59 Perkembangan Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023

Pembangunan rumah tidak layak huni di Kabupaten Aceh Besar sampai pada tahun 2023 sebanyak 404 unit sedangkan rehabilitasi pembangunan rumah layak huni sampai pada tahun 2023 sebanyak 1,226 unit, rehab pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Aceh Besar paling banyak dilakukan pada tahun 2021 sejumlah 445 unit sedangkan pembangunan rumah layak huni paling banyak pada tahun 2019 sejumlah 88 unit. Penanganan rumah tidak layak huni ini dilakukan dengan dana APBD yang bersumber dari DAK, DAU dan juga dari dana ZIS.

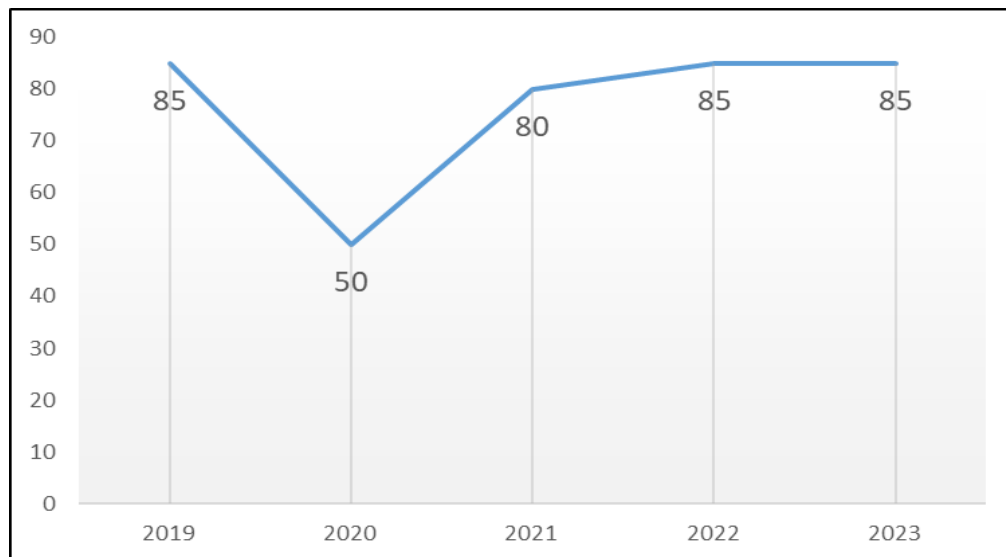
E2. Penanganan Kawasan Kumuh

Indikator Kawasan Kumuh juga menjadi prioritas dalam sektor keciptakaryaan. Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2019 seluas 60,4 ha, kemudian pada tahun 2020 bertambah seluas 5,13 ha dan pada tahun 2021 menjadi 38,22 ha.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

F1. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak menyebutkan pengertian pembinaan. Pengertian pembinaa dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2005 adalah pemberian pedoman, standar, pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.



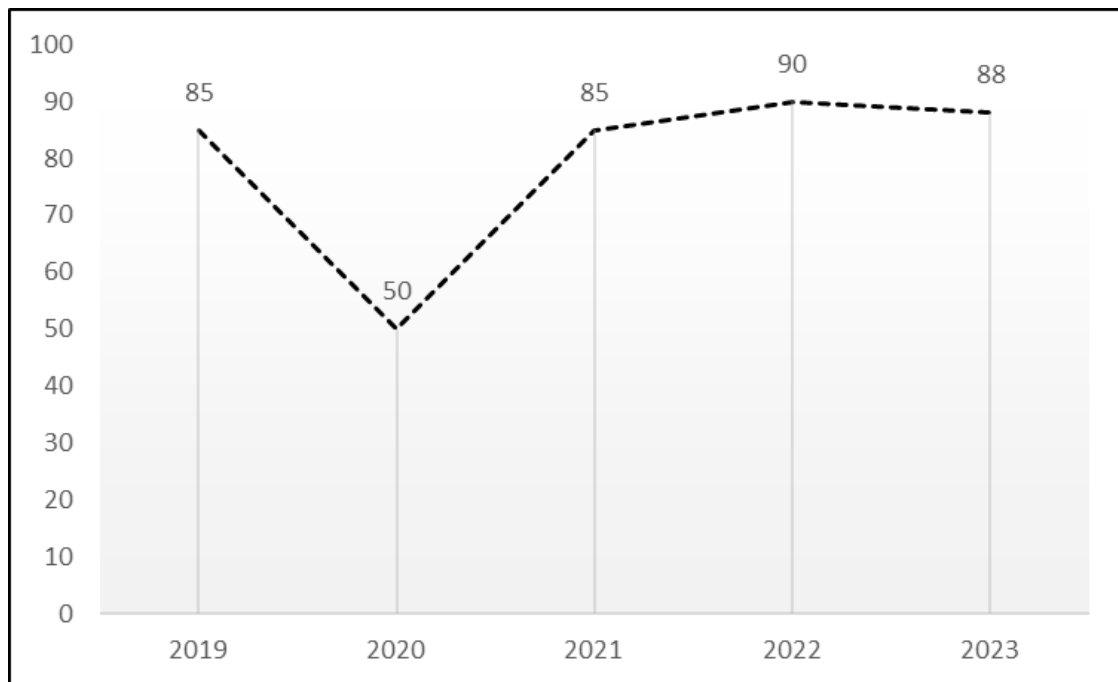
Sumber Data : Dinas DPMG Kabupaten Aceh Besar 2025

Gambar 2.60 Persentase Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan Desa”. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Di Kabupaten Aceh Besar pembinaan lembaga masyarakat desa baru di mulai sejak tahun 2019, tahun 2020 terjadi penurunan terhadap Lembaga binaan dari 80 di tahun 2019 turun menjadi 50 lembaga binaan kondisi ini di pengaruhi oleh kondisi Covid-19.

F2. Persentasi PKK Aktif

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan sebuah organisasi sosial yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta dalam upaya pembangunan di Indonesia. Persentase partisipasi aktif dalam PKK mencerminkan efektifitas dari program ini. Persentase PKK aktif di Kabupaten Aceh Besar seperti disajikan pada Gambar dibawah ini.



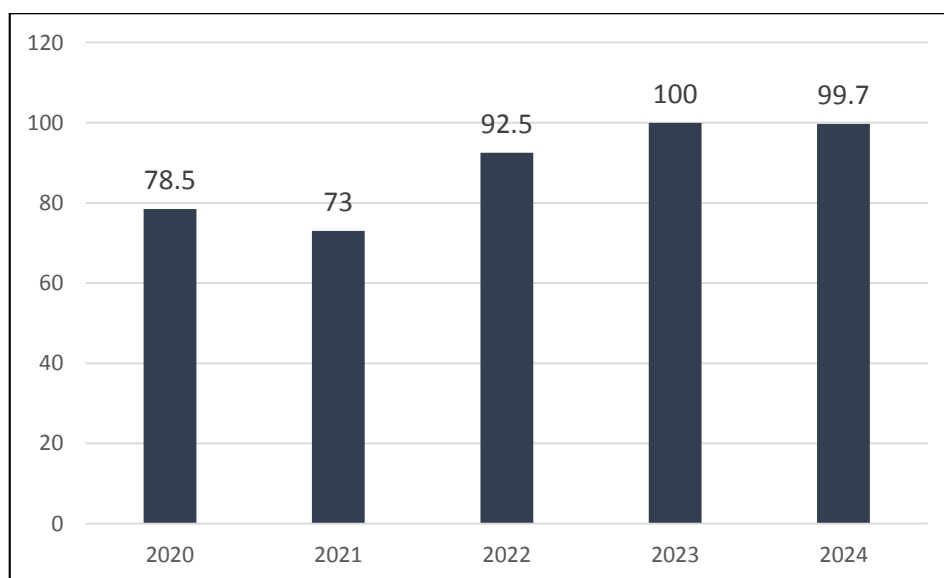
Sumber Data : Dinas DPMG Kabuapten Aceh Besar,2025

Gambar 2. 61 Persentase PKK Aktif Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023

Tingkat partisipasi yang tinggi mengidentifikasi berhasilnya program PKK serta antusiasme Masyarakat dalam memanfaatkan peran organisasi ini dalam memberdayakan Perempuan untuk berkontribusi dalam Pembangunan, disisi lain, Tingkat partisipasi yang rendah menggambarkan adanya tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan program, atau mungkin ada kendala yang menghalangi masyarakat untuk mengambil manfaat dari layanan yang diberikan oleh PKK.

F3. Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu (posyadu) aktif adalah pusat pelayanan Kesehatan primer yang secara rutin melaksanakan kegiatan utama setiap bulan, seperti pelayanan Kesehatan Ibu dan anak (KIA), imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare, serta Keluarga Berencana (KB), dengan tingkat cakupan minimal 50% untuk masing-masing layanan tersebut seperti pada gambar di bawah. Selain itu, posyandu ini juga melaksanakan kegiatan tambahan sebagai bagian komitmennya. Tingkat kinerja posyandu aktif diukur melalui persentase keterlibatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Angka yang tinggi dalam persentase posyandu aktif mengidentifikasi bahwa posyandu berfungsi secara efektif dan Masyarakat secara optimal memanfaatkan layanan yang disediakan di dalamnya.



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2023

Gambar 2. 62 Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2023

F4. Indeks Desa Membangun

Ukuran yang digunakan untuk melihat apakah suatu daerah itu sudah maju atau tidak ditentukan dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Aceh Besar setiap tahun mengalami kenaikan. Berikut tabel untuk melihat perkembangan nilai IDM di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 2.83.
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019-2024

No.	Tahun	IDM	Status IDM
1	2019	0,68	Berkembang
2	2020	0,68	Berkembang
3	2021	0,69	Berkembang
4	2022	0,69	Berkembang
5	2023	0,69	Berkembang
6	2024	0,703	Berkembang

Sumber data: Dinas DPMG Kabupaten Aceh Besar, 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa Desa adalah salah satu dari bagian pemerintahan yang terkecil yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dasar Undang-Undang ini, maka Pemerintah mengucurkan dana desa untuk semua desa, agar pembangunan desa dapat merata dan dapat mengatasi kesenjangan antar wilayah dan mengurangi angka kemiskinan berikut ini perkembangan desa mandiri, desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2020 – 2025 jumlah desa di Kabupaten Aceh Besar berjumlah 604 desa.

Tabel 2.84. Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2025

Tahun	Desa Mandiri		Desa Maju		Desa Berkembang		jumlah Desa tertinggal	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2020	1	0.2	35	5.8	116	19.2	1	0.2
2021	3	0.5	49	8.1	71	11.8	0	0.0
2022	3	0.5	64	10.6	57	9.4	0	0.0
2023	15	2.5	131	21.7	31	5.1	0	0.0
2024	29	4.8	165	27.3	16	2.6	0	0.0
2025	45	7.5	191	31.7	12	2.0	0	0.0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, 2025

G. Perhubungan

Kabupaten Aceh Besar telah memiliki 2 lokasi rest area yaitu di Kecamatan Lhoong dan Kecamatan Lembah Seulawah. Di Kabupaten Aceh Besar juga telah tersedia gedung pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas penunjangnya di Sibreh Kecamatan Suka Makmur. Awal tahun 2012 sudah mulai difungsikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai objek PAD. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, pada tahun 2020, Fasilitas perlengkapan jalan juga telah dibangun antara lain adalah tempat penyeberangan pejalan kaki sebanyak 40 unit dan halte sebanyak 25 unit. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan dan Polisi Resort Aceh Besar juga telah mencatat terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor. Pada tahun 2019 kasus kecelakaan meningkat menjadi 333 kasus dari tahun 2021 angka kematian mencapai 702 orang ,begitu juga kerugian materil akibat kecelakaan juga menurun. Pada tahun 2023 jumlah kasus kecelakaan sebanyak 273 kasus terjadi penurunan dari tahun 2022 dengan 3.123 kasus begitu dengan jumlah korban. Hal ini menandakan bahwa kesadaran berlalu lintas pengemudi sudah mulai meningkat dan mematuhi

peraturan berlalu lintas, Berikut jumlah kecelakaan bermotor dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.85.
Kasus Kecelakaan Bermotor Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Kejadian	Jumlah Korban		
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
1	2020	278	37	4	457
2	2021	3,107	702	290	4,628
3	2022	3,123	606	242	4,781
4	2023	273	47	3	469
5	2024	264	34	6	511

Sumber Data : Polres Aceh Besar dan Dinas Perhubungan Aceh Besar, 2025

Untuk pembangunan daerah terpencil dan terisolir, terutama dalam kawasan Kecamatan Pulo Aceh, telah dibangun pelabuhan penyeberangan di Lamteng guna memperlancar arus barang dan penumpang antar pulau dengan daratan Aceh, sekaligus untuk membuka keterisolasian kawasan tersebut. Agar memudahkan akses angkutan penumpang dan atau barang, termasuk hasil laut di kawasan Lampuyang Pulo Aceh, telah dibangun dermaga tambatan boat atau perahu di Lampuyang, dengan data pelabuhan penyebrangan umum seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.86.
Pelabuhan Penyeberangan Umum di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian (Unit)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelabuhan Kapal Ferry	1	1	1	1	1
2	Pelabuhan Kapal Perintis	-	-	-	-	-
3	Dermaga	9	9	9	9	9
Total		10	10	10	10	10

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, 2025

Untuk memperlancar pelayanan angkutan laut antara Pulo Aceh dengan Banda Aceh dan antar pulau di Kecamatan Pulo Aceh telah disediakan 2 (dua) unit Boat berkapasitas 12 GT guna mendukung kelancaran tugas para guru dan tenaga medis yang bertugas di pulau tersebut dan 1 (satu) unit Kapal Ferry untuk pelayanan transportasi laut.

Untuk transportasi udara, Kabupaten Aceh Besar mempunyai Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda dari Tahun 2020 sampai 2023, jumlah pesawat yang datang dan berangkat mengalami penurunan yang signifikan begitu juga dengan jumlah penumpang baik domestik maupun internasional dan Tahun 2021 di karenakan kondisi Covid -19, kondisi transportasi udara di Kabupaten Aceh Besar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87.
Jumlah Penumpang dan Pesawat di Bandara SIM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jenis penerbangan	Pesawat		Penumpang	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2020	Domestik	1808	2,101	182,752	200,733
	Internasional	293	289	27,505	26,099
2021	Domestik	112	115	7.598	7,218
	Internasional	6	1	0	0
2022	Domestik	2,956	2,956	204,113	208,597
	Internasional	103	101	8,295	10,555
2023	Domestik	3,018	3,030	278,788	297,756
	Internasional	735	719	77,027	90,564
2024	Domestik	3,485	3,545	313,473	329,726
	Internasional	895	885	105,901	110,988

Sumber data: Dirjen Perhubungan Wilayah 1 Bandara Sultan Iskandar Muda, 2025

H. Transmigrasi

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar memiliki program transmigrasi lokal yang dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi lokal dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan penduduk.

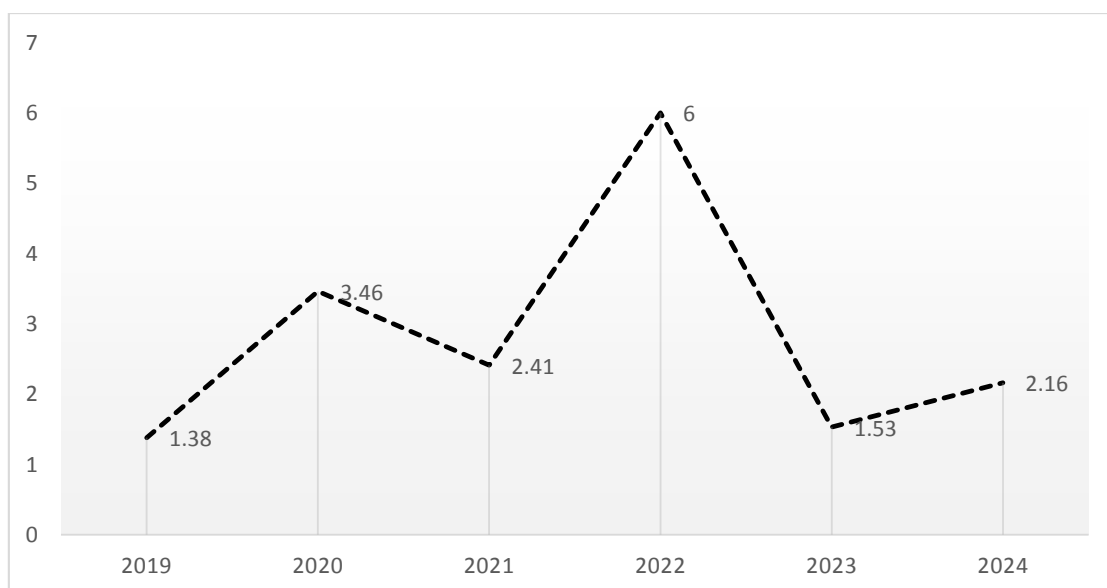
Berdasarkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang penetapan kawasan transmigrasi Jantho. Wilayah lain di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2018 tentang penetapan kawasan transmigrasi Seulimeum yang tepatnya unit permukiman transmigrasi Leungah.

Berdasarkan Ketetapan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia baru 2 (desa) yang saat ini yang sudah dilakukan penentuan yaitu desa Leungah di Kecamatan Seulimeum dan Desa Data Cut di Kecamatan Jantho.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

A. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Januari 2019, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan.



Sumber data: Bank Indonesia 2025

Gambar 2.63 Perbandingan Inflasi Umum Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2024

Gambar di atas menginformasikan bahwa laju inflasi di Kabupaten Aceh Besar diproyeksikan sama dengan angka laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2019 laju inflasi Kabupaten Aceh Besar berada di angka 1,38 persen dan mengalami perkembangan yang fluktuatif naik dan turun di setiap tahunnya. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka inflasi di Aceh

Besar/Banda Aceh tahun 2024 sebesar 2,16 persen di bawah Provinsi Aceh sebesar 2,17 dan di atas Nasional sebesar 1,57 persen hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditi pendukung antara lain bahan bakar minyak, bahan bakar rumah tangga, sewa rumah dan bahan pokok makanan, kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok penyediaan makanan dan minuman dan restoran. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang merupakan penyebab terjadi inflasi tinggi ini salah satunya adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik, yang mengakibatkan semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi harga barang dan jasa di pasaran sehingga daya beli konsumen melemah.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Komunikasi dan Informatika

Mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan guna memberikan kemudahan dalam akses informasi pembangunan, telah tersedia Bandwidht melalui jaringan internet. Pengelolaan situs website Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan alamat telah dilakukan untuk penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat. Begitu juga untuk pelayanan komunikasi bagi masyarakat. Jaringan komunikasi seluler di Kabupaten Aceh Besar telah merata menjangkau seluruh daratan kecuali di Kecamatan Pulo Aceh. Sedangkan untuk jaringan internet masih terdapat beberapa spot yang belum terjangkau. Berikut lokasi kecamatan yang sudah tersedia jaringan komunikasi, baiki jaringan seluler maupun jaringan internet dapat dilihat pada tabel berikut.

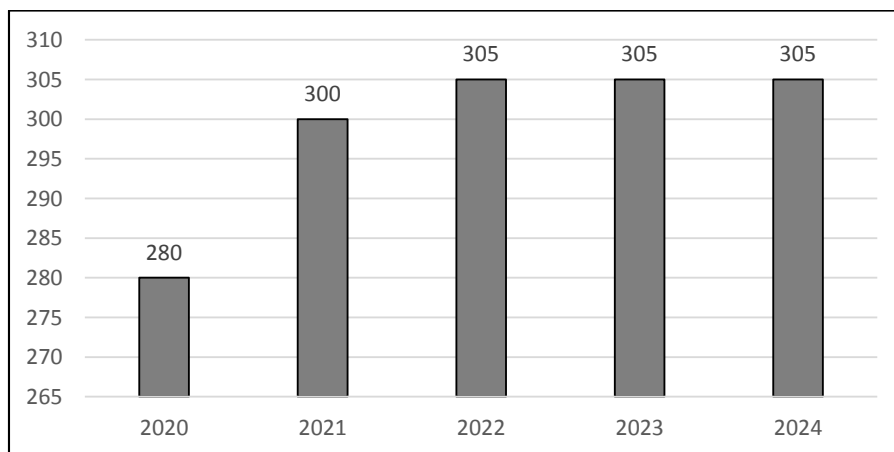
Tabel 2.88.
Kecamatan Yang Dapat Dijangkau Fasilitas Telekomunikasi Telkom Di Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2023

No.	Kecamatan	Nama Fasilitas	Jenis Fasilitas
1	L h o o n g		Menara Telekomunikasi dan Layanan Internet
2	Lhoknga	Speedy + POTS	Layanan Telepon Kabel dan layanan Internet
3	Leupung		Layanan Internet
4	Indrapuri	Speedy + POTS	Layanan Internet
5	Kuta Cot Glie		-
6	Seulimeum	Speedy + POTS	Layanan Telepon Kabel dan layanan Internet
7	Kota Jantho	Speedy + POTS	Layanan Internet
8	Lembah Seulawah	Speedy + POTS	Layanan Internet

No.	Kecamatan	Nama Fasilitas	Jenis Fasilitas
9	Mesjid Raya	POTS	Layanan Internet
10	Darussalam	Speedy + POTS	Layanan Telepon Kabel dan Layanan Internet
11	Baitussalam	Speedy + POTS	Layanan Internet
12	Kuta Baro	Speedy + POTS	Layanan Internet
13	Montasik	Speedy + POTS	Layanan Internet
14	Blang Bintang	Speedy + POTS	Layanan Internet
15	Ingin Jaya	Speedy + POTS	Menara Telekomunikasi, Layanan Telepon Kabel dan Layanan Internet
16	Krueng Barona Jaya	Speedy + POTS	Layanan Internet
17	Sukamakmur		Layanan Internet
18	Kuta Malaka	Speedy + POTS	-
19	Simpang Tiga		Layanan Internet
20	Darul Imarah	Speedy + POTS	Menara Telekomunikasi, Layanan Telepon Kabel dan Layanan Internet
21	Darul Kamal	Speedy + POTS	Layanan Internet
22	Peukan Bada	Speedy + POTS	Layanan Internet
23	Pulo Aceh		-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Besar, 2025

kebutuhan masyarakat akan jaringan komunikasi ini, maka banyak provider swasta membangun tower-tower telekomunikasi secara sporadis. Pemerintah Aceh Besar pada Tahun 2020 telah melakukan penataan kembali terhadap tower-tower dari provider ini. Pada Tahun 2020 telah mendata sejumlah 280 tower dengan memberikan nomor register dan harus membayar retribusi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, jumlah tower di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber Data : Dinas Informatika dan Komunikasi Aceh Besar, 2025

Gambar 2.64 Jumlah Tower Telekomunikasidi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Untuk wilayah kepulauan yaitu di Kecamatan Pulo Aceh, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan kerjasama dengan telkomsel untuk meningkatkan luas layanan jaringan seluler dan jaringan internet. Begitu juga dengan jaringan internet desa. Telah melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun 6 titik di Kecamatan Pulo Aceh. Hal ini juga untuk kepentingan pendidikan di Kecamatan Pulo Aceh yang mana sekarang system ujian sudah berbasis online. Untuk wilayah terisolir seperti pedalaman Kota Jantho, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bekerjasama dengan provider untuk meninggikan tower. Hal ini untuk mengatasi blank spot yang ada di beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Besar dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.89. Daerah Blank Spot di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

Kecamatan	Desa/Gampong	Titik/Lokasi Blankspot
Lhoong	MEUNASAH KRUENG KALA	5.284413853038744, 95.24463534380793
	JANTANG	5.271146397752146, 95.25437248640567
	BAROH KRUENG KALA	5.287089551257152, 95.25126736858331
	TUNONG KRUENG KALA	5.28612465414456, 95.26428077461625
	SENGKO MULAT	5.2952279525645585, 95.24256592249311
	BIREK	5.302848720589881, 95.22058572989488
	KAREUNG	5.288245252444069, 95.22206930120936
	PAROY	5.312479131491681, 95.22943028472507
	TEUNGOH BLANG MEE	5.248791666529641, 95.25533288812747
	LAMKUTA BLANG MEE	5.242886770259651, 95.25419103954174
	BAROH BLANG MEE	5.2562300367238874, 95.24718115571875
	UMONG SEURIBEE	5.245951412168844, 95.2633864534407
	TEUNGOH GEUNTEUT	5.260226835248499, 95.27259539119325
	BAROH GEUNTEUT	5.254679708275554, 95.26074415336825
	LAM JUHANG	5.230997589195049, 95.2666894362129
	UTAMONG	5.226393406062642, 95.25788748456999
	GAPUY	5.21890257140987, 95.2601097964317
	LAMSUJEN	5.233653680149046, 95.28634450745187
	MON MATA	5.218766426943233, 95.27000058644477
	LAMGEURIHEU	5.235450165315935, 95.26029856336626
	KEUTAPANG	5.226450695217679, 95.2729074096654
	SANEY	5.225958219739208, 95.2598577243594
	CUNDIN	5.208020515352682, 95.27305105077846

Kecamatan	Desa/Gampong	Titik/Lokasi Blankspot
	GLEE BRUEK	5.201447610913378, 95.28495098181092
	PASI	5.195245556778981, 95.2969609901301
	PUDENG	5.195058410585267, 95.29877046366944
	COT	5.214199807621998, 95.28573136840605
	MEUNASAH LHOK	5.184598640780292, 95.29763895123722
Seulimeum	LAMTEUBA DRO	5.493688442751359, 95.61345012983189
	PULO	5.491383200713305, 95.61998455990955
	LAMPANTE	5.500776625059963, 95.61503592545398
	LAMBADA	5.498928727627593, 95.61205402803391
	BLANG TINGKEUM	5.504959499080953, 95.60432741160466
	ATEUK	5.512061032334163, 95.60027270224553
	LAM APENG	5.530470578069325, 95.62382592806142
	MEURAH	5.4999938184097195, 95.61848140038428
	LAMPANAH	5.58377792481839, 95.67237629806552
	UJONG KEUPULA	5.585398120525891, 95.66930393956946
	LEUNGAH	5.576291592032163, 95.7089749101736
	BEUREUNUT	5.609464640348211, 95.62612716952931
	UJONG MESJID LP	5.58333795062446, 95.6759357944186
Leupung	LAYEUN	5.35410940302569, 95.24392266341297
	PULOT	5.364686670065587, 95.25340937639035
	LAMSENIA	5.37550395394266, 95.26387430060313
	MNS. MESJID	5.378035422977933, 95.27474268864286
	MEUNASAH BAK U	5.392425592084889, 95.25572892259562
	DAYAH MAMPLAM	5.413344310743511, 95.25021499956607

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak terlepas dari ketersediaan berbagai Aplikasi yang ada pada setiap OPD. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Komunikasi Informatika Aceh Besar sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 telah mengembangkan sebanyak 10 (sepuluh) aplikasi baik berbasis web maupun berbasis mobile. Selanjutnya untuk Pengembangan Aplikasi Kedepan disesuaikan dengan kebutuhan OPD yang tergambar dalam arsitektur SPBE. Ketersediaan berbagai Aplikasi yang ada pada setiap OPD di Pemerintah Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.90.
Ketersediaan Aplikasi Kabupaten Aceh Besar 2018 – 2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Aplikasi yang tersedia	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah Aplikasi yang akan tersedia					1	1

Sumber data : Diskominfo Kabupaten Aceh Besar, 2025

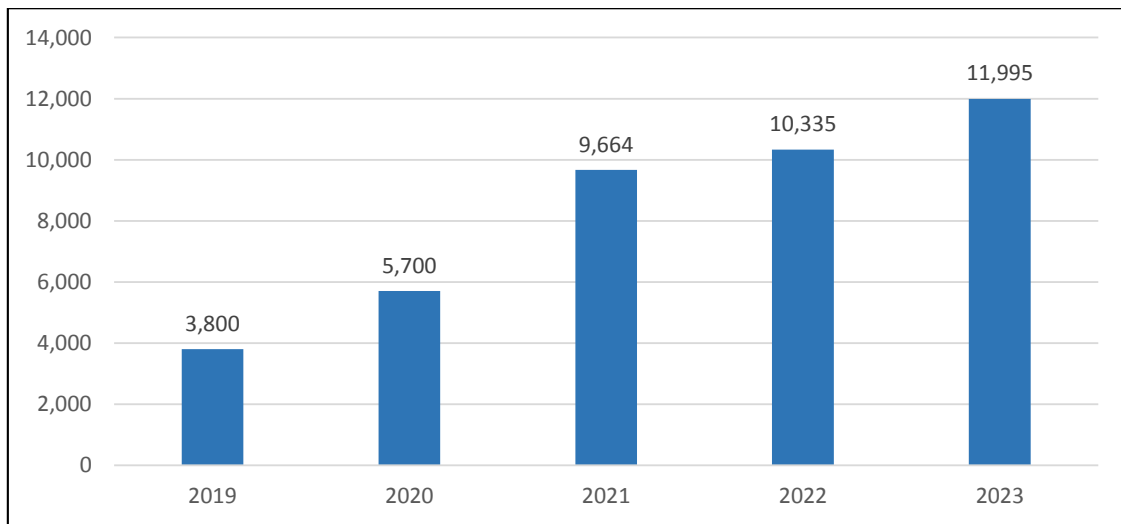
Satu Data Terpadu Keberadaan website milik pemerintah Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu implementasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Aceh Besar. Indek SPBE Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 sampai tahun 2023 sebesar 1,8 dan tahun 2024 sebesar 2.39.

B. Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat disimpannya buku-buku dan sumber bacaan. Pengelolaan perpustakaan yang baik dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi dan membaca. Hal tersebut dapat membantu pembangunann daerah melalui tambahan pengetahuan kepada masyarakat yang membaca.

B1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah kunjungan terbanyak sampai tahun 2023 turun meningkat namun terjadi penurunan pada tahun pada tahun 2020 dimana terjadi covid-19. Saat ini teknologi telah banyak menyediakan sarana membaca secara online, oleh karena itu strategi baru untuk dapat mendata masyarakat yang mengunjungi perpustakaan secara *offline* dan *online*. Setiap tahunnya perpustakaan daerah Kabupaten Aceh Besar selalu menerima kunjungan, kunjungan masyarakat dapat di lihat pada Gambar dibawah ini.

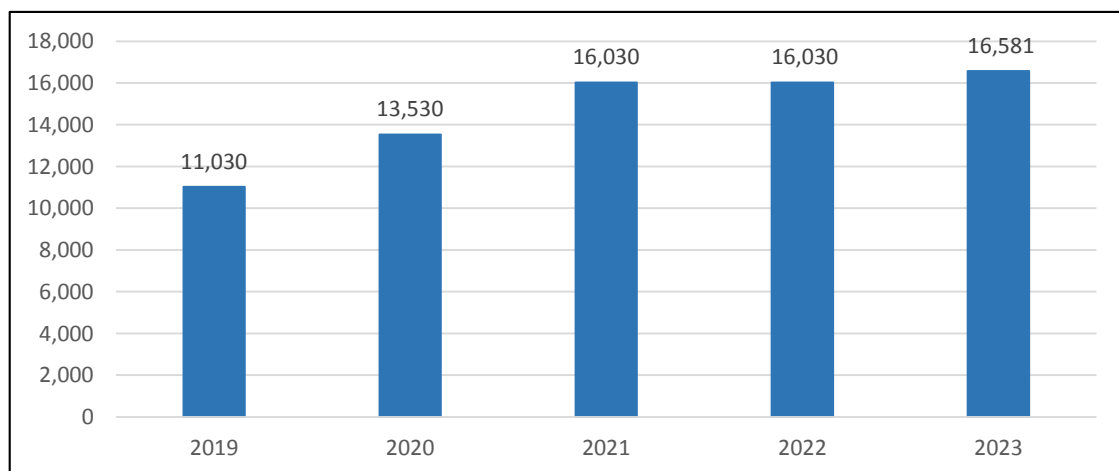


Sumber data: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aceh Besar, 2025

Gambar 2. 65 Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang)
Kabupaten Aceh Besar 2019 – 2023

B2. Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku yang banyak menandakan semakin banyaknya bahan bacaan tersedia tersedia di perpustakaan, tahun 2023 jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Besar berjumlah 16.581 judul buku.



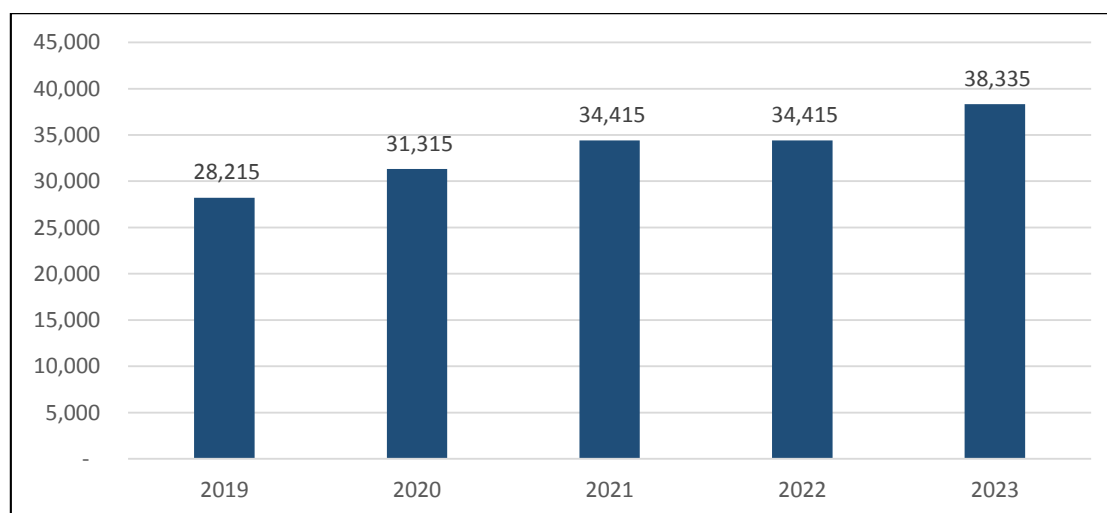
Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aceh Besar, 2025

Gambar 2. 66 Jumlah Judul Buku Koleksi Perpustakaan Kabupaten Aceh Besar

Jumlah judul buku berdasarkan jumlah judul buku yang di lakukan pengandaan setiap tahun nya, dan pada tahun 2023 tidak dilakukan pengadaan buku yang dibutuhkan oleh perpustakaan.

B3. Jumlah Buku Yang tersedia di Perpustakaan

Salah bahan bacaan mungkin sekali untuk dibaca oleh lebih dari satu orang pada saat yang sama. Oleh karena itu jumlah buku dari satu judul buku juga perlu untuk didata. Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Aceh Besar dapat dilihat pada Gambar 2.54.



Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aceh Besar, 2025

Gambar 2. 67 Jumlah Buku (Eksemplar) yang Tersedia di Perpustakaan Aceh Besar Tahun 2019 – 2023

Jumlah buku yang tersedia dari tahun 2019 dengan jumlah buku sebanyak 28.215 eksemplar sampai 2023 berjumlah 38.335 eksemplar.

B4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Kegiatan perpustakaan yang berupa sensus atau pendataan untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) adalah komponen pembentuk indeks yang terdiri atas pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat pemberdayaan layanan perpustakaan, ketersediaan perpustakaan ber-SNP, tingkat keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, indikator kunci urusan perpustakaan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2022, IPLM Kabupaten Aceh Besar adalah 47,83 Angka tersebut masuk dalam kategori sedang sedangkan Aceh sebesar 58,46, meningkat sangat tajam dari tahun 2019 hanya sebesar 11,16.

Sasaran Strategisnya adalah terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 naik menjadi 71,2 berada di atas Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Aceh yaitu sebesar 66,23. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, selain itu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2023 didukung oleh rasio pemerataan layanan perpustakaan kabupaten Aceh Besar sebesar 0,2036, rasio kecukupan koleksi perpustakaan sebesar 0,6316, rasio kecukupan tenaga perpustakaan sebesar 1, rasio tingkat kunjungan masyarakat per hari sebesar 0,1487, rasio perpustakaan yang dibangun sesuai SNP sebesar 1, rasio keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan sebesar 1 serta rasio jumlah anggota perpustakaan sebesar 1.

C. Kearsipan

C1. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Sumber daya manusia pengelola kearsipan perlu untuk ditingkatkan agar menunjang dan meningkatkan kualitas kinerja. Tidak tersedianya sumber daya arsiparis yang kompeten menjadi salah satu permasalahan yang ada di bidang urusan kearsipan kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui program pelatihan SDM pengelola kearsipan agar mampu mengelola arsip sesuai standar dan berkualitas. Seperti pada Tabel berikut.

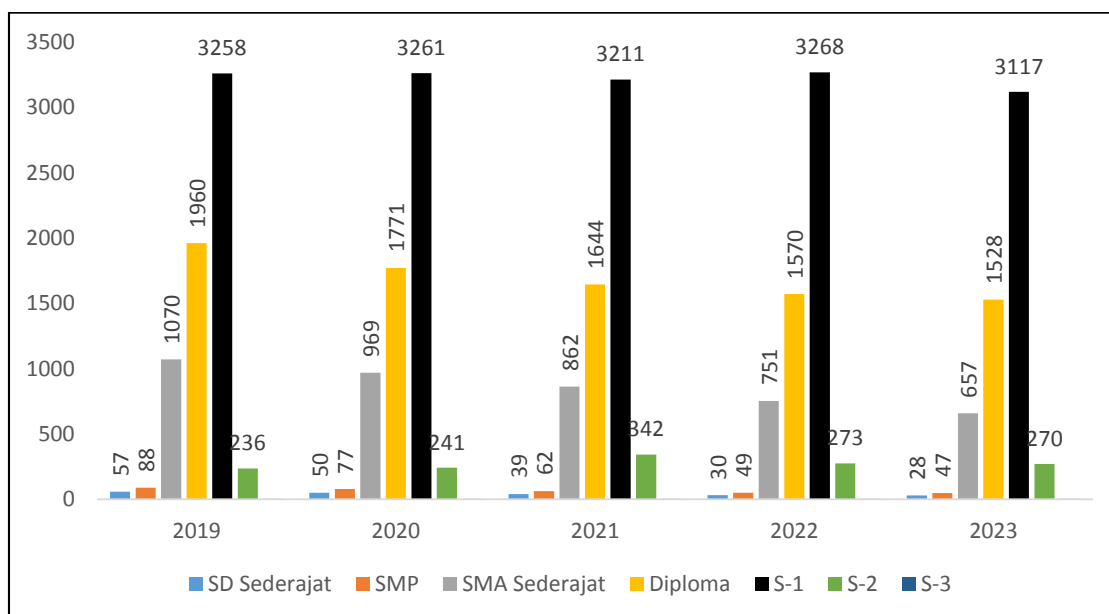
Tabel 2.91.
Jumlah Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Aceh Besar

No	Perpustakaan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Arsiparis (Orang)			2	2	2

Sember Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aceh Besar, 2025

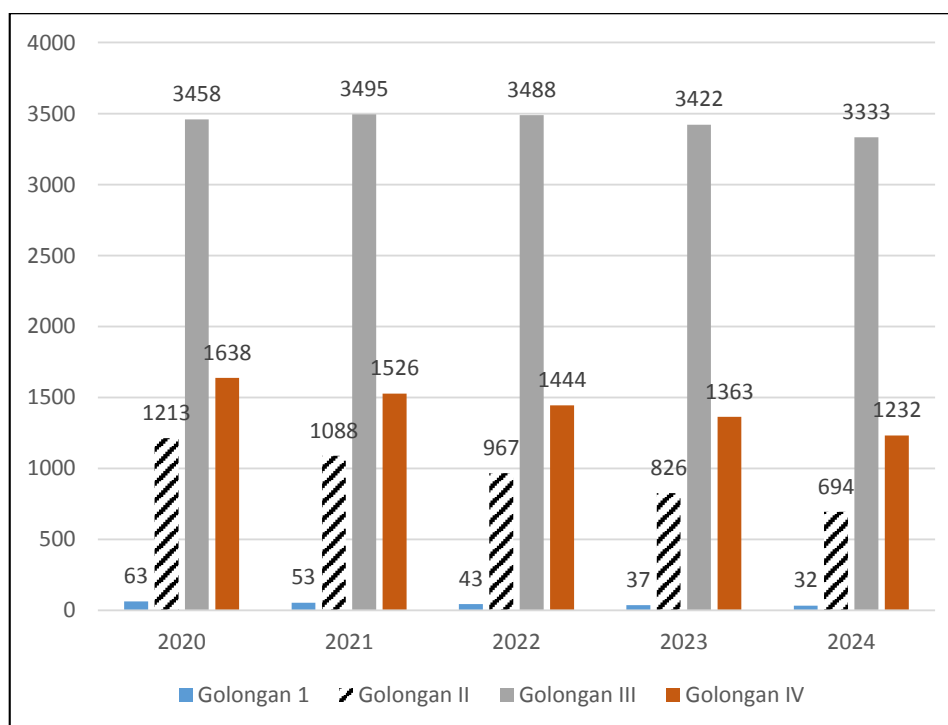
D. Kepegawaian

Faktor pendukung yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sumber daya manusia aparatur pemerintah. Kualitas SDM Aparatur menjadi penting dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten Aceh Besar setiap periode di dominasi Tingkat Pendidikan strata 1, diploma, SMA, Strata 2, SMP dan SD. Untuk tingkatan golongan ASN yangter besar dari golongan III, golongan IV, golongan II dan golongan I. untuk jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber data: BPKSDM Kabupaten Aceh Besar, 2025 (diolah)

Gambar 2.68 ASN Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber data: BPKSDM Kabupaten Aceh Besar, 2025 (diolah)

Gambar 2.69 ASN Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Golongan Tahun 2020-2024

ASN di kabupaten Aceh Besar berdasarkan Eselon di dominasi oleh Fungsional tertentu serta fungsional Umum/staf, fungsional tertentu terdiri dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh. Fungsional umum merupakan staf di setiap organisasi Perangkat Daerah. Dan untuk eselon di dominasi oleh Eselon III baik III a, III.b dan eselon IV, eselon II. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92.
Jumlah ASN Berdasarkan Eselon Di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019 - 2023

Jabatan Eselon	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Eselon II.a	1	0	1	1	1
Eselon II.b	32	27	31	33	30
Eselon III.a	64	69	70	70	69
Eselon III.b	118	121	115	123	114
Eselon IV.a	481	452	453	173	182
Eselon IV.b	40	33	38	41	49
Fungsional Tertentu	3,980	4,153	4,042	4,036	3,563
Fungsional Umum/Staf	1,956	1,517	1,412	1,465	1,640

Sumber data: BPKSDM Kabupaten Aceh Besar, 2025 (diolah)

Selain secara umum PNS memiliki sertifikat kompetensi atau jenis penilaian lainnya. Penilaian umum terhadap PNS dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. Berikut ini adalah capaian indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.93.
Capaian Indikator Kepegawaian Kabupaten Aceh Besar

Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
Indek Profesionalitas ASN	57	Sangat Rendah	76,58	Sedang	74.91	Sedang
Nilai Indek Sistem Merit	113,5	Buruk	N/a		N/a	

Sumber Data : BPKSDM Kabupaten Aceh Besar, 2024

Tahun 2022 Indeks Profesional ASN Kabupaten Aceh Besar 57, indeks Profesional ASN Kabupaten Aceh Besar masih berada pada kategori sangat rendah (<60) dan tahun 2024 Indeks Profesional ASN Kabupaten Aceh Besar sebesar 74.91 dengan kategori sedang (71 – 80) tetapi terjadi penurunan. Capaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2022 sebesar 113,5 dan termasuk dalam kategori buruk. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa ada diskriminasi.

E. Standard Pelayanan Minimal (SPM)

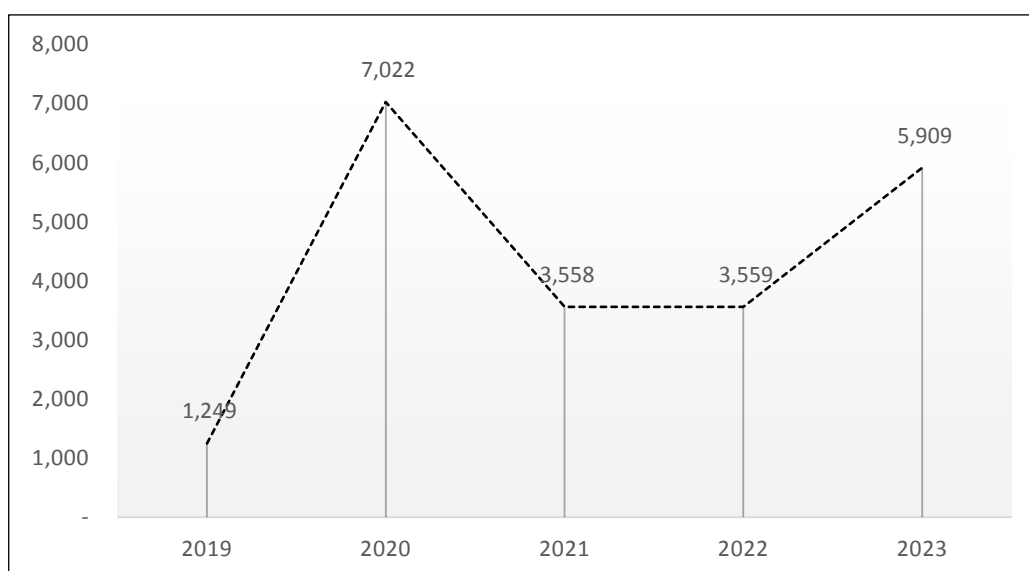
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Pelayanan dasar terdiri dari pelayanan kesediaan air minum, sanitasi yang layak, Pendidikan, Kesehatan, sosial serta ketertiban dan ketentraman.

Persentase terhadap Penerima Pelayanan dasar dibandingkan dengan Mutu Pelayanan dasar di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 masih belum mencapai persentase di atas 80 persen sehingga belum terpenuhinya penerimaan pelayanan dasar dikarenakan belum adanya data yang valid dan akuntabel, perencanaan serta anggaran yang terbatas.

F. Perizinan

Perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata kelola pemerintahan. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik yaitu setiap institusi.

Di Kabupaten Aceh Besar Proses dikoordinir di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di berikan jenis-jenis perizinan kepada masyarakat, sampai tahun 2023 telah diberikan jumlah perizinan sebesar 5.909, jumlah perizinan samapai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber data : Dinas PMTSP Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.70 Jumlah Perizinan Yang diberikan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah perizinan yang diberikan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 jumah perizinan naik mencapai 7.022 buah dan terjadi penurunan secara signifikan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 disebabkan karena kan covid-19.

G. Perencanaan

G1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Besar atau disingkat dengan RPJPD Kabupaten Aceh Besar 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 57).

G2. Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan Qanun

Dokumen RTRW Kabupaten Aceh Besar yang telah ditetapkan dengan qanuan adalah jangka menengah yang tersedia di Kabupaten Aceh Besar adalah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 – 2032.

G3. Tersedianya dokumen perencanaan RPK yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Dokumen jangka menengah yang tersedia di Kabupaten Aceh Besar adalah dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Besar Tahun 2023 - 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 9).

G4. Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Untuk mengukur konsistensi antar dokumen, maka ada tiga dokumen yang akan ditelaah untuk dievaluasi. Dokumen-dokumen tersebut adalah RPJMD,

RKPD, dan APBK. Adapun metode yang digunakan adalah dengan membandingkan program masing-masing dokumen tersebut. Capaian konsistensi RPJMD, RKPD dan APBD seperti pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.94.
Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan
Kabupaten Aceh Besar

Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan	Tahun'				
	2020	2021	2022	2023	2024
Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD (%)	90	90	100	90	90
Persentase Konsistensi Program RKPD dalam APBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber : (diolah) dan Hasil Evaluasi

H. Keuangan

Urusan keuangan dapat dinilai dari SAKIP dan Indek Kemandirian Fiskal (IKF). Penilaian SAKIP bertujuan untuk menilai Tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sementara itu, IKF digunakan untuk menilai tingkat kemandirian daerah dalam menyuplai fiskal (sumber keuangannya) sendiri.

Pada tahun 2022 nilai SAKIP Kabupaten Aceh Besar adalah 52,69. Nilai tersebut berpredikat CC dan tahun nilai SAKIP Kabupaten Aceh Besar 2023 adalah 53,31 dengan predikat CC . Untuk indek kemandirian fiskal tahun 2022 Kabupaten Aceh Besar sebesar 2,096 dengan kategori Tinggi..

H1. Opini BPK

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan per Undang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk menilai pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah, diperlukan penilaian dan/atau opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Opini BPK menjadi salah satu parameter kualitas

pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga maupun di level pemerintahan daerah. Capaian Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2024 Kabupaten Aceh Besar mendapatkan Opini BPK adalah WTP.

Tabel 2.95.
OPINI BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKD Kabupaten Aceh Besar, 2025

H2. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Pengukuran IPKD dilakukan oleh Kemendagri melalui Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri yang mana nilai didapat dengan menjumlahkan seluruh indek pada setiap dimensi. Sedangkan untuk pemeringkatan menjadi 3 kategori yaitu kategori Baik, dengan nilai B, kategori perlu perbaikan dengan nilai B, kategori sangat perlu perbaikan dengan nilai C.

Keterangan pemeringkatan berdasarkan hasil pengukuran IPKD instansi di kategorikan baik jika nilai Indeks total seluruh dimensi lebih besar dari $MEAN + (1x \text{ standar deviasi})$, instansi dikategorikan perlu perbaiki jika nilai indeks total seluruh dimensi lebih kecil dari $MEAN - (1x \text{ standar deviasi})$. Hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.96.
Capain Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator	2021	2022	2023
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	68.65	75.78	74
2	Kategori	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan
3	Nilai	C	C	C

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di mulai pada tahap uji coba pada tahun 2021 dengan mengukur 3 tahun berturut turut yaitu tahun 2018,2019 dan 2020, namaun hasil pengukuran tidak dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri.

H3. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan Indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat Kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan Permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif.

Tujuan dari Indeks Akses Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan dan implementasi program inklusi keuangan di daerah berbasis data dan informasi yang komprehensif;
2. Memperkuat pemantau kinerja dan efektivitas program TPAKD di tingkat daerah (Kabupaten/kota) dan memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam merancang program dan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan akses keuangan yang inklusif;
3. Melengkapi survei Nasional literasi dan inklusi (SNLIK), memperluas cakupan serta memberikan potret kondisi inklusif keuangan yang lebih mendalam.

IKAD berfungsi sebagai alat pemantauan untuk menganalisis capaian program inklusif keuangan TPAKD serta sebagai masukan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, interpretasi penggunaannya mencakup:

1. Peringkat dan nilai agregat, IKAD menyajikan peringkat atau nilai agregat yang mencerminkan pencapaian program inklusif keuangan di berbagai daerah. Interpretasi dapat dilakukan melalui :
 - a. Nilai Absolut : daerah dengan skor lebih tinggi menunjukkan capaian yang lebih baik.
 - b. Kategori Kinerja : capaian program inklusif keuangan diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu 1. Dasar, 2. Mulai Berkembang, 3. Berkembang, 4. Hampir Unggul, dan 5. Unggul.
2. Analisis Perbandingan, IKAD memungkinkan perbandingan capaian antar daerah, analisis tren perkembangan program di setiap daerah maupun nasional, serta indentifikasi pola pencapaian di berbagai wilayah.

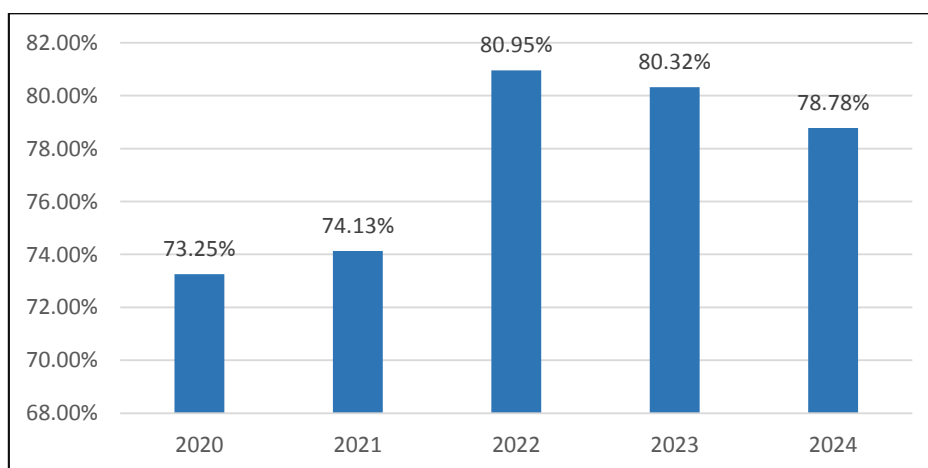
3. Masukan bagi kebijakan, sebagai masukan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif yang didasarkan pada data dan praktik baik dari daerah lain.
4. Evaluasi keberhasilan program, berfungsi sebagai alat untuk menilai keberhasilan program serta mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Capaian IKAD Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 sebesar 2,91 dengan kategori mulai unggul.

I. Pengawasan

I1. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak lanjut temuan BPK merupakan proses untuk pengetasan dalam pemeriksaan di BPK dengan tujuan untuk memastikan permasalahan telah teratasi dan mencegah permasalahan tersebut terulang kembali. Gambar dibawah menunjukkan persentase temuan BPK di Kabupaten Aceh Besar dalam tren 5 (lima) tahun menunjukkan peran APIP semakin Optimal dalam menjalankan tugas nya.



Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Aceh Besar. 2025

Gambar 2.71 Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

I2. Nilai Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, MCP dan SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat dijadikan alat ukur pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam mengukurnya, aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) berperan besar dalam mensukseskan usaha pengawasan pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berinovasi melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan system. Salah satunya dengan *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK melalui monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Tabel 2.97.
Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Aceh Besar

Tahun	Indikator			
	Nilai MCP	Nilai SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Nilai Kapabilitas APIP
2020	60,53		Level 3	Level 2
2021	76,29	67,99	Level 3	Level 2
2022	85,90	65,75	Level 3	Level 2
2023	85,54	65,00	Level 3	Level 2
2024	86,22	3,031	Level 3	Level 3

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Aceh Besar, 2025

Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik Ketika penilaian maturitas minimal level 3. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada nilai tahun 2023 nilai maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Aceh Besar adalah 3 dengan kategori terdefinisi. Walaupun dapat dinilai baik, nilai tersebut berada di KKM dan masih dapat ditingkatkan. Untuk nilai MCP Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 86,22 terjadi kenaikan dari tahun 2023 dengan nilai MCP sebesar 85,54 terjadi kenaikan sebesar 0,68 poin.

SPI (Survei Penilaian Integritas atau indeks Indeks integritas) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang memiliki hasil akhir berupa rekomendasi perbaikan system pencegahan korupsi. Dengan sasaran adalah PNS (internal), pengguna layanan (Ekstern) dan Ekspert (tokoh Pemerintahan). Dapat di lihat pada tabel di atas nilai SPI Kabupaten Aceh Besar terjadi penurunan di tahun 2023 dengan nilai 65,0 persen sedangkan tahun 2021 sebesar 67,99, tahun 2024 sebesar 68,87.

J. Sekretariat Daerah

J1. Produk Hukum

Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan Keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, sedangkan produk hukum daerah adalah peraturan kepala daerah, Keputusan kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut ini adalah jumlah produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.98.
Jumlah Produk Hukum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2024

No	Tahun	Jumlah Produk Hukum		
		Surat Keputusan	Perbub	Qanun/Peraturan Daerah
1	2019	551	51	9
2	2020	658	39	4
3	2021	661	39	10
4	2022	620	31	9
5	2023	919	38	4
6	2024	965	39	3

Sumber data : Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar,2025

J2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik dilingkungan Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah. IPP diukur berdasarkan enam aspek, yaitu (1) kebijakan pelayanan; (2) professional SDM; (3) sarana dan prasarana; (4) system informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) konsultasi dan Pengaduan; serta (6) inovasi pelayanan. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 sebesar 3,72 dengan kategori “baik” sedangkan pada tahun 2021 sebesar 3,58 dengan kategori “baik”. Dan tahun 2023 kembali turun menjadi 2,86 dan Kembali naik di tahun 2024 sebesar 3,58 dengan kategori “baik”. Beberapa penyebab terjadi penurunan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja orgasnisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, prilaku birokrasi, system dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional serta struktur organisasi.

Tabel 2.99.
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar 2019 - 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	C	B	3,58	3,72	2,86	3,58 (B)

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdakab Aceh Besar, 2025

J3. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata Kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 indeks reformasi birokrasi sebesar 49,22 dengan kategori “memadai atau cukup baik” naik dari tahun 2023 yaitu sebesar 44,99.

Tabel 2.100.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Besar

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	40,02	40,19	42,17	43,27	44,99	49,22

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdakab Aceh Besar, 2025

J4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem. Nilai SAKIP Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101.
Nilai SAKIP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Nilai SAKIP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
1	2019	52,08	CC
2	2020	52,13	CC
3	2021	52,59	CC
4	2022	52,69	CC
5	2023	53,31	CC
6	2024	54,90	CC

J5. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD)

Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan informasi dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja. Sedangkan LPPD merupakan laporan

yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas perbantuan selama 1 tahun .

Tabel 2.102.
Nilai EKPPD Kabupaten Aceh Besar

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
EKPPD	2,556	2,655	2,56	26,074	2,8399

J6. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenaturan dengan regulasi yang ada di Tingkat atas. Capaian IRH Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 sebesar 50.52 dengan termasuk kategori “Buruk”

Indeks Reformasi hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 201-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang kemudian menjadi pedoman Peraturan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil penilaian IRH Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 dan 2023 masih 0.

K. Sekretariat Dewan

K1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota

Penyediaan RKT ini penting untuk memastikan bahwa alat-alat kelengkapan DPRD memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. RKT juga akan membantu alat kelengkapan DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggungjawab dilaksanakan secara efektif dan efisien.

K2. Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi

Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Penyusunan dan Integrasi program-program kerja DPRD dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) dan Rencana Tahunan (RKPD) merupakan hal yang penting agar program-program kerja DPRD memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur. RPJM dan RKPD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta memastikan bahwa program-program kerja DPRD dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif.

K3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD.

Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan memastikan bahwa program-program yang akan dilaksanakan sudah terintegrasi dan terukur. Hal ini akan membantu DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal adanya temua bahwa program-program DPRD belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD, maka hal tersebut dapat ditindak lanjuti dengan memastikan bahwa program-program DPRD sudah terintegrasi ke dalam Dokumen perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD. Tindak lanjut ini akan membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan lebih baik.

K4. Tersusunnya Produk Hukum Kabupaten Aceh Besar

DPRD Bersama executive akan melakukan pembahasan terhadap Peraturan Daerah atau Qanun yang akan menjadi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tertentu. DPR Kabupaten Aceh Besar dalam waktu kurun waktu 6 (enam) tahun telah melakukan pembahasan terhadap Peraturan Daerah atau Qanun dengan persentase hasil pembahasan setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103.

Ketersediaan dan Persentase Qanun Yang Diselesaikan Pembahasan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2019-2024

Tahun	Ketersediaan Qanun yang diselesaikan Pembahasan

	Proleg.	Realisasi	Persentase
2019	29	5	17,24%
2020	24	8	33,33%
2021	16	3	18,75%
2022	18	3	16,67%
2023	14	2	14,29%
2024	11	3	27,27%

Sumber data : Sekretariat Dewan Kabupaten Aceh Besar,2025

L. Kecamatan

Kabupaten Aceh Besar dengan luas 2.903,49 Km² yang terdiri dari 23 Kecamatan,604 (enam ratus empat) gampong/desa, berikut nama kecamatan dengan jumlah gampong/desa dan luas setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.104.

Nama Kecamatan, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Gampong/Desa Kabupaten Aceh Besar

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa
1	Lhoong	Lhoong	149,03	28
2	Lhoknga	Lhoknga	87,95	28
3	Leupung	Leupung	169,15	6
4	Indrapuri	Indrapuri	197,04	52
5	Kuta Cot Glie	Lampakuk	332,25	32
6	Seulimeum	Seulimeum	404,35	47
7	Kota Jantho	Kota Jantho	593	13
8	Lembah Seulawah	Lamtamot	319,6	12
9	Mesjid Raya	Krueng Raya	129,93	13
10	Darussalam	Lambaro Angan	38,43	29
11	Baitussalam	Lambada Lhok	20,84	13
12	Kuta Baro	Peukan Ateuk	61,07	47
13	Montasik	Montasik	59,73	39
14	Ingin Jaya	Lambaro	24,34	50
15	Krueng Barona Jaya	Cot Iri	6,96	12
16	Sukamakmur	Sibreih	43,45	35
17	Kuta Malaka	Samahani	22,82	15
18	Simpang Tiga	Krueng Mak	27,59	18
19	Darul Imarah	Lampeuneurut	24,35	32
20	Darul Kamal	Peukan Biluy	23,04	14
21	Peukan Bada	Peukan Bada	36,25	26
22	Pulo Aceh	Lampuyang	90,56	17
23	Blang Bintang	Cot Meuraja	41,76	26
Jumlah			2.903,49	604

Sumber Data : BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial

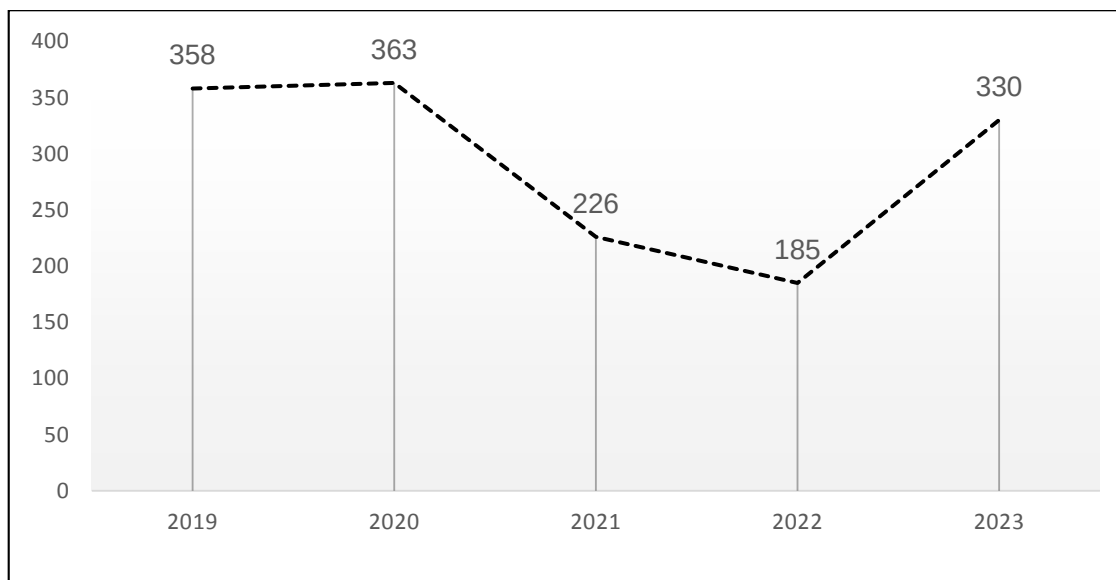
A. Angka Kriminalitas

Kriminalitas menjadi salah satu faktor pembentuk iklim berinvestasi, semakin kecil tingkat kriminalitas pada suatu wilayah maka semakin besar tingkat keamanan dari gangguan oknum masyarakat pada wilayah tersebut. Jenis kriminal di Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.105.
Jenis dan Jumlah Angka Kriminalitas Di Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019 - 2023

No.	JENIS KRIMINAL	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	NARKOTIKA	228	245	130	85	215
2.	PENCURIAN	53	37	32	20	31
3.	PENGANIAYAAN	27	18	15	16	16
4.	PENGGELOPAN	11	22	11	8	10
5.	ITE	1	2	1	1	1
6.	PERLINDUNGAN ANAK	9	13	8	2	5
7.	LALU LINTAS	5	6	8	7	4
8.	PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA	3	2	-	1	4
9.	MINYAK DAN GAS BUMI	1	-	4	2	-
10.	KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN	2	-	-	17	17
11.	PEMERKOSAAN	1	2	9	8	7
12.	PELECEHAN SEKSUAL	2	3	2	2	16
13.	PERJUDIAN	7	11	4	10	4
14.	PEMBUNUHAN	-	2	-	6	-
15.	PERZINAHAN	8	-	2	-	-

Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar,



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar, 2024

Gambar 2.72 Jumlah Total Angka Kriminalitas di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 - 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat terjadi penurunan jumlah total angka kriminalitas di kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 angka kriminalitas menjadi 185 kasus dan tahun 2023 terjadi kenaikan kembali menjadi 330 kasus dengan kasus terbanyak kriminal narkotika.

B. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

B1. Jumlah Organisasi Masyarakat

Organisasi kemasyarakatan atau bisa disebut dengan ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam mendorong perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa, jumlah organisasi masyarakat berjumlah 20 organisasi masyarakat, 16 buah yayasan dan kantor partai politik yang tersebar di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar. Adanya keberadaan organisasi kemasyarakatan muncul seiring dengan timbulnya organisasi masyarakat sipil (*civil society*). Pada tabel berikut ini jumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.106.

Jumlah Organisasi, Yayasan dan Partai Politik Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar

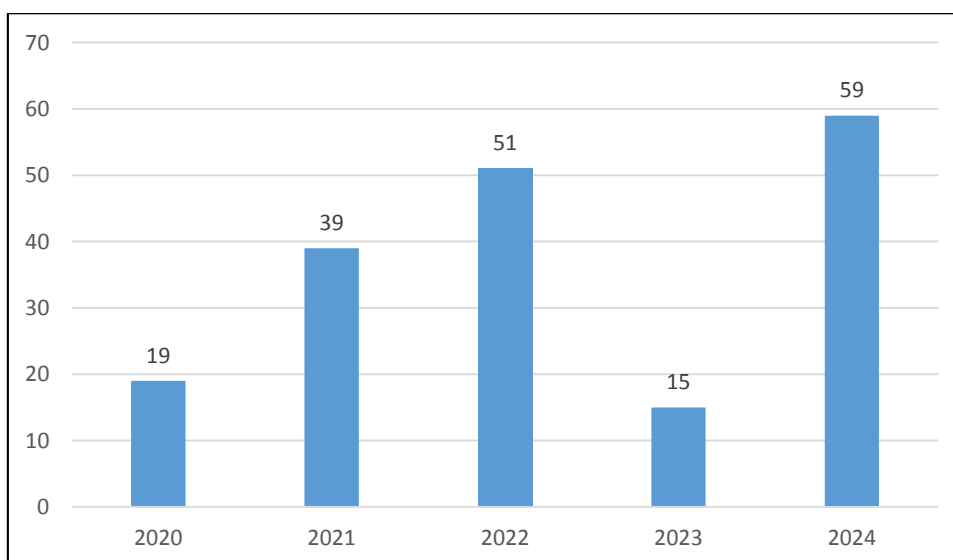
No	Yayasan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Yayasan	Jumlah Partai Politik (Parpol)
1	Kecamatan Baitussalam	4	1	1

No	Yayasan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Yayasan	Jumlah Partai Politik (Parpol)
2	Kecamatan Darussalam	-	2	-
3	Kecamatan Kuta Malaka	1	2	-
4	Kecamatan Montasik	1	-	-
5	Kecamatan Sukamakmur	-	1	2
6	Kecamatan Indrapuri	-	-	-
7	Kecamatan Kuta Baro	-	3	-
8	Kecamatan Ingin Jaya	5	-	12
9	Kecamatan Lembah Seulawah	-	-	-
10	Kecamatan Lhoknga	1	-	1
11	Kecamatan Seulimeum	-	-	1
12	Kecamatan Kota Jantho	4	-	-
13	Kecamatan Blang Bintang	-	-	-
14	Kecamatan Simpang Tiga	-	-	-
15	Kecamatan Krueng Barona Jaya	2	-	2
16	Kecamatan Lhoong	-	1	-
17	Kecamatan Leupung	-	-	-
18	Kecamatan Mesjid Raya	2	-	1
19	Kecamatan Darul Imarah	1	4	4
20	Kecamatan Kuta Cot Glie	-	-	-
21	Kecamatan Darul Kamal	1	-	-
22	Kecamatan Peukan Bada	-	2	-
23	Kecamatan Pulo Aceh	-	-	-
Total		22	16	24

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aceh Besar 2025.

B2. Angka Penyelesaian Perkara/Pelanggaran Jinayat

Perkembangan penyelesaian perkara/kasus pelanggaran jinayat yang terdiri dari khamar, maisir, khalwat, Ikhtilah, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan dan liwat di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Sumber data : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar, 2025

Gambar 2.73 Persentase Penyelesaian Perkara Jinayat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat tahun 2022 terjadi pelanggaran meningkat qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelanggaran Syariat islam, peningkatan ini terjadi pada kasus pemerkosaan sebanyak 28 kasus yang paling besar di tahun 2022, kemudian kasus maisir sebanyak 9 kasus, namun di tahun 2024 hanya terjadi kasus khlawat sebanyak 57 kasus dan kasus istilah 2 Kasus, ini sebabkan terus dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang qanun nomor 6 tahun 2014.

B2. Penegakan Perda.

Untuk penegakan peraturan daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Aceh Besar dari terdapat beberapa indikator pendukungnya. Berikut pada tabel di bawah menggambarkan capaian kinerja ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2.107.

Capaian indikator Kinerja untuk ketertiban dan ketentraman umum Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Orang	74	74	70	70	85

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	90	90	90	98.6	95.82
3	Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten	Orang	40	45	-	41	41
4	Proporsi penanganan penyakit Masyarakat	%	90	92	-	-	-
5	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa / Kelurahan	Nilai	1	1	1	1	1
6	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Orang	11	13	-	6	6
7	Penegakan dan penanganan syariat Islam	Orang	74	74	-	74	75

Sumber data : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar, 2025

B3. Pemilu

Pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Aceh Besar diikuti oleh 15 (lima belas) partai politik , terdiri dari 12 (dua belas) partai politik nasional dan 3 (tiga) partai politik lokal dengan total kursi di DPRK berjumlah 34 (tiga puluh empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Pada tahun 2019 pemilu legislatif di Kabupaten Aceh Besar di ikuti oleh 20 (dua puluh) partai politik, terdiri dari 16 (enam belas) partai politik nasional dan 4 (empat) partai politik lokal dengan total kursi di DPRK berjumlah 34 (tiga puluh empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Selanjutnya pada tahun 2024 pemilu legislatif di Kabupaten Aceh Besar di ikuti oleh 24 (dua puluh empat) parpol, terdiri dari 18 (delapan belas) partai politik nasional dan 6 (enam) partai politik lokal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.108.

Partai Politik Nasional, Lokal, Keterwakilan Perempuan di DPRK dan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Aceh Besar

No	Uraian	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
1	Partai Politik Nasional	12	16	18
2	Partai Politik Lokal	3	4	6
3	Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRK	1	1	-

No	Uraian	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
4	Jumlah Keterwakilan Laki-laki di DPRK	34	34	-
5	Jumlah Partisipasi Pemilih	201.033	228.919	291.783
	Laki-laki	99.318	110.539	143.752
	Perempuan	101.715	118.380	148.031

Sumber data: Kesbangpol Kabupaten Aceh Besar, 2023

Adapun daftar pemilih tetap berdasarkan data dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.109.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	Lhoong	34	3.575	3.426	7.001
2	Lhoknga	54	6.161	6.057	12.218
3	Leupung	10	1.165	1.124	2.289
4	Indrapuri	80	7.919	8.550	16.469
5	Kuta Cot Glie	50	5.193	5.236	10.429
6	Seulimeum	77	8.370	8.570	16.940
7	Kota Jantho	28	3.311	3.192	6.503
8	Lembah Seulawah	35	4.301	4.384	8.685
9	Mesjid Raya	56	7.464	7.364	14.828
10	Darussalam	71	8.089	8.599	16.688
11	Baitussalam	60	8.082	7.924	16.006
12	Kuta Baro	89	9.580	10.043	19.623
13	Montasik	69	7.264	7.415	14.679
14	Ingin Jaya	107	12.403	12.267	24.670
15	Krueng Barona Jaya	46	5.980	6.330	12.310
16	Sukamakmur	56	5.569	5.885	11.454
17	Kuta Malaka	26	2.512	2.474	4.986
18	Simpang Tiga	22	2.378	2.460	4.838
19	Darul Imarah	146	18.156	20.155	38.311
20	Darul Kamal	27	2.949	3.110	6.059
21	Peukan Bada	63	7.534	7.668	15.202
22	Pulo Aceh	18	1.678	1.547	3.225
23	Blang Bintang	40	4.119	4.251	8.370
T O T A L		1.264	143.752	148.031	291.783

Sumber data: Kesbangpol Kabupaten Aceh Besar, 2025

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

A. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia. Badan Riset dan inovasi nasional (BRIN) mengeluarkan indek daya saing daerah (IDSD) tahun 2022

Tabel 2.110.
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 - 2024

Tahun 2022													
Kabupaten	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar				Ekosistem Inovasi	SKOR IDSI
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Aceh Besar	3.95	2.78	2.72	2.53	3.85	4.02	3.22	2.58	1.46	0.67	5.00	1.68	2.87
Tahun 2023													
Aceh Besar	3.92	2.54	3.55	3.28	3.84	3.97	3.30	3.31	0.95	4.13	2.40	3.34	3.21
Tahun 2024													
Aceh Besar	4.58	3.46	3.91	3.99	3.77	3.70	3.87	3.40	1.96	4.15	4.27	2.55	3.63
Pilar 1 : Institusi													
Pilar 2 : Infrastruktur													
Pilar 3 : Adopsi TIK													
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro													
Pilar 5 : Kesehatan													
Pilar 6 : Ketrampilan													
Pilar 7 : Pasar Produk													
Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja													
Pilar 9 : Sistem Keuangan													
Pilar 10 : Ukuran Pasar													
Pilar 11 : Dinamisme Bisnis													
Pilar 12 : Kapanilitas Inovasi													

2.1.4.4. Evaluasi Capaian Kinerja

indikator makro Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sampai tahun 2024 yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka kemiskinan dan PDRB per kapita, capain indikator makro dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.111.
Capaian Indikator Makro Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB)	%	0.39	2.44	3.87	4.27	4.95
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73.56	73.58	74	75.98	76.57
3	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7.62	7.7	8.28	73.24	7.93
4	Angka Kemiskinan	%	13.84	14.05	13.38	13.38	13.05
5	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp. Juta	32.95	34.24	37.12	40.41	42.993
6	Indek Gini	Indeks	0.352	0.296	0.293	0.299	0.262

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah, berikut ini capaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.112. Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
			CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN
1	2	3					
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	83.99	83.09	81.49	85.62	84.72
2	Persentase Rumah Tangga dengan air minum layak	%	68.12	88.59	91.7	92.64	92.98
3	Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak	%	84.00	84.40	86.84	86.82	87.07
4	Persentase pengurangan area Kawasan Kumuh terhadap luas	%	21.05	25.41	31.33	33.33	43.35

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
			CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN
	Kawasan permukiman penduduk perkotaan						
5	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	CC	CC	CC	CC	CC
6	Perolehan Opini/Predikat terhadap Audit Laporan Keuangan oleh BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Nilai Hasil Evaluasi (LKJIP)	Skor	52.13	52.59	52.59	53.31	54.9
8	Nilai Kapabilitas APIP	Level	II	II	II	III	III
9	Tingkat Maturitas SPIP	Level	II	III	II	III	III
10	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	0	0	1.85	1.88	2.39
11	PDRB ADHB Total Daerah	Rp. Juta	13,336,275	14.022.48	15.381.86	16,977,976.8	18.412.05
12	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	41.29	40.01	41.81	31.50	35.73
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77.82	71.58	69.32	71.58	74.71
14	Indeks ketahanan daerah	Indeks	0.41	0.45	0.34	0.36	0.36
15	Kabupaten layak anak	Strata	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya

C. Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja kunci

Indikator Kinerja Daerah dan Indikator kinerja kunci digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut. Capaian indikator kinerja daerah dan kinerja kunci dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.113.

Capain Indikator Kinerja Daerah dan Kinerja kunci

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Inflasi	%	3.46	2.41	6.00	1.53	2.16
2	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69.78	72.79	72.97	73.24	73.20
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Indeks	14.72	14.73	14.75	14.76	14.77
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.32	10.33	10.35	10.36	10.37
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60.02	61.67	65.31	66.86	67.05
6	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa (Ribuan)	59.7	60.26	58.18	58.94	58.98
7	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	2.4	2.32	2.09	2	1.88
8	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0.61	0.58	0.58	0.43	0.47
9	Jumlah Penduduk yang bekerja	Jiwa (Ribuan)	173332	181191	194117	189576	194714
10	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	58.14	58.14	59.53	65.38	65.66
11	Pertumbuhan sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	%	-4.13	0.2	32.12	9.17	0.59
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	%	2.51	4.89	-4.6	9.36	8.70
2	Pengeluaran Per Kapita	Rp (Ribuan)	9,641	9,644	9,894	10,309	10,810
3	Angka Beban Ketergantungan	%	51.77	50.94	50.03	49.06	48.17
III	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
1	Pendidikan						
1	Persentase guru yang bersertifikasi	%	83.98	80.09	74.93	61.35	59.58
2	Kesehatan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Umum Daerah	Indeks	50.00	55.00	60.00	79.00	86.00
2	Angka Stunting	%	34.3	32.40	27.00	30.10	32.30
3	Persentase kematian kasus covid-19	%	0	2.00	0.00	0.00	0.00
4	Rasio keterisian tempat tidur (Bed Occupation Rate)	Rasio	19.00	2.00	23.00	30.50	35.10
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Pekerjaan Umum						
1	Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi	%	33.07	-2.01	-1.77	3.81	4.39
2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	N/A	58.27	60.50	60.77	63.27
2	Penataan Ruang:						
1	Ketaatan terhadap RTRW	%	85	87.00	89.00	90.00	91
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
1	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	%	N/A	62.00	64.00	65.00	68.00
2	Persentase Pemukiman yang menerapkan RTBL	%	N/A	5.17	5.17	6.78	8.40

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase penanganan kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TRIBUMTRAMAS)	%	90	90.00	95.00	98.60	95.80
2	Persentase Pelanggaran Qanun yang tertangani	%	90	35.00	91.46	95.00	90.12
6	Sosial						
1	Jumlah PPKS yang memperoleh Bansos	%	21.38	40.51	33.3	15.52	18.1
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Naker						
1	Persentase yang mendapatkan sertifikat terampil	%	25.25	120.25	84.25	15.75	28.00
2	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	73.75	79.05	64.77	80.53	81.00
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.9	94.93	95.22	95.55	95.6
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57.22	56.69	57.09	63.56	61.78
4	Pangan						
1	Ketersediaan pangan utama (padi)	kg/kapita/tahun	330.5	295.7	439.3	298	301
2	Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	%	27.12	27.12	19.4	19.4	25.44
5	Tanah						
1	Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan	%	56.45	77.32	-	82.16	84.97
6	Lingkungan Hidup						
1	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	47	49.7	45.1	48.26	66.72
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92.18	89.74	90.37	90.76	93.85
3	Indek Kualitas Air (IKA)	Indeks	74.65	56.67	50	55.88	60.67
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	56.7	63.58	63.58	63.06	63.41
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	N/A	0.6553	0.6773	0.6905	0.703
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Total Fertility Rate (TFR)	Rate	2,50	,2,50	2.42	2.34	2.19
9	Perhubungan						
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	77.00	74.00	71.00	56.00	36.00
2	Persentase ketersediaan Prasarana Pendukung Jalan kabupaten	%	56	71	80	90	91
10	Komunikasi dan Informatika						
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	-	-	-	30	N/A
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
1	Rasio Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dan UMKM	Rasio		0.26			

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
12	Penanaman Modal						
1	Jumlah Nilai Investasi	Trilyun	3.06	1.61	0.6	0.44	0.38
2	Jumlah perizinan	Unit	7022	3,558	3,559	5,909	6,748
13	Kepemudaan dan Olahraga						
1	Persentase Atlit yang mengikuti even Olahraga	%	N/A	38.51	N/A	29.23	42.36
2	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	N/A	47.89	N/A	51.72	39.71
14	Kebudayaan						
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Objek	N/A	8	N/A	8	8
15	Perpustakaan						
1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	2	2.32	3.5	4.66	4.85
16	Kearsipan						
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsip Secara Baku	%	2.35	2.5	2.78	2.78	2.78
	Layanan Urusan Pilihan						
1	Pariwisata						
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	N/A	0.15	N/A	0.10	3.51
2	Pertanian						
1	Pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2.9	1.1	1.97	-1.36	3.43
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama (padi)	Ton/Ha	6.037	6.41	6.79	6.83	6.79
3	Persentase keberhasilan panen pangan utama (padi)	%	97.00	98.00	98.00	98.00	98.00
4	Persentase penyakit hewan yang tertanggulangi	%	85.00	95.00	50.00	70.00	80.00
3	Perdagangan						
1	Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	-5.74	0,99	2,72	2,41	0.75
4	Perindustrian						
1	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	-2,29	2,39	2,43	2,33	4,27
5	Transmigrasi						
1	Kawasan Transmigrasi Terbangun	Kawasan	1	1	1	1	1
6	Kelautan dan Perikanan						
1	Persentase pembinaan usaha perikanan	%	N/A	5.00	5.75	6.00	6.20
2	Produktivitas perikanan Tangkap	Ton	N/A	981	17.757	5,923	6,280
3	Produktivitas Perikanan Budidaya	Ton	N/A	21,244	1,461	0	2,384
	Penunjang Urusan						
1	Perencanaan Pembangunan						
1	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	90	90.00	90.00	100.00	100.00
2	Persentase penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100
2	Keuangan						
1	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	N/A	20.69	22.91	21.37	21.95

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
2	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	N/A	13.81	16.83	18.26	19.52
3	Penetapan APBD Tepat Waktu	Ya / Tidak	N/A	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	N/A	8.89	8.85	8.65	10.09
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
1	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	71.15	71.15	N/A	76.59	75.47
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2	2.00	6.15	10.80	8.84
4	Penelitian dan pengembangan						
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	N/A	7.00	9.00	11.00	17.00
5	Pengawasan						
1	Persentase Objek Pemeriksaan yang telah terbebas dari temuan hasil pengawasan	%	80	78.8	88.75	84.37	89.91
2	Capaian Supervisi Aksi Pencegahan Korupsi	%	60.53	75.00	85.90	85.54	86.22
6	Kewilayahan						
1	Cakupan pelayanan umum pemerintahan di tingkat kecamatan	Desa	604	604	603	603	603
7	Sekretariat DPRD						
1	Persentase Qanun yang ditetapkan	%	36.36	37.50	37.60	14.29	27.27
	Pendukung						
1	Sekretariat Daerah						
1	Pemerintahan dan Otonomi Daerah						
1	Nilai LPPD	Nilai	2.61	2.7	2.609	2.84	N/A
2	Ekonomi						
1	Persentase Realisasi Pembangunan Fisik dan Keuangan ditahun berkenaan	%	fisik (80,19) keuangan (90,99)	fisik (91,91) keuangan (87,10)	fisik (87,53) keuangan (81,60)	fisik (67,08) keuangan (86,11)	fisik (71,23) keuangan (88,71)
3	Organisasi						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	40.9	42.17	43.27	44.99	50.23
2	Kesatuan Bangsa						
	Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Jumlah Organisasi Masyarakat, LSM, OKP dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial di masyarakat	Ormas	8	26	33	37	39
2	Persentase parpol yang mendapatkan kursi	%	64.71	57.89	47.83	45.83	45.83
	Keistimewaan Aceh						
1	Syariat Islam						
1	Persentase menurunnya pelanggaran Syariat Islam	%	N/A	5.64	5.64	6.90	27.8
2	Jumlah masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan ri'ayah sesuai klasifikasinya	Unit	140	145	150	160	175
2	Adat Istiadat Aceh						
1	Persentase pelestarian dan pembinaan adat Aceh	%	69	71.00	73.00	75.00	77.00
3	Peran Ulama Aceh						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	Persentase Ulama yang dilatih	%	65	67.31	68	72	77
5	Pendidikan Khusus Aceh						
1	Persentase komite sekolah yang disupervisi dan difasilitasi	%	28.00	36.00	43.37	50.6	57.83
6	Zakat dan Infaq Aceh						
1	Penerimaan ZIS yang dikumpulkan	Rp. Milyar	14.36	14.18	12.24	12.45	12.69
7	Pendidikan Dayah						
1	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah	%	72.73	36.36	73.02	69.68	65.85

Sumber : Hasil Evaluasi RPJMD 2017 – 2022 dan RPD 2023-2026

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Ukuran dari tingkat kemampuan keuangan daerah dinilai melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio PAD terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu mencermati kondisi kinerja keuangan, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Dalam bab ini diuraikan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar secara rinci, yaitu mengenai perkembangan APBD dalam periode 2020 sampai dengan 2024 yang meliputi akun pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan neraca daerah. Pemanfaatan data bersumber dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) tahun 2020 s.d 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Audited. Namun demikian, untuk mendukung perencanaan keuangan daerah ke depan, proyeksi anggaran untuk periode tahun 2025-2030 dalam dokumen ini disusun berdasarkan capaian kinerja masa lalu serta pendekatan atau metode perencanaan lainnya yang relevan, dengan memperhatikan tren realisasi keuangan yang telah diaudit.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat memerlukan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah tersebut dipengaruhi perekonomian global, nasional dan daerah, kinerja keuangan di masa lalu, serta regulasi maupun kebijakan pemerintah. Kebijakan keuangan sebagai instrumen untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi keuangan daerah, diharapkan dapat memastikan penggunaan sumber daya ekonomi milik daerah dimanfaatkan secara tepat dan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien dalam pembangunan. Memperhatikan kondisi tersebut, maka proyeksi kerangka pendanaan keuangan Kabupaten Aceh Besar tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada analisis kapasitas fiskal daerah dan kinerja keuangan daerah tahun 2020-2024.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Besar selama 5 (lima) tahun terakhir menggambarkan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, Kinerja APBD Kabupaten Aceh Besar dievaluasi berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagai indikator efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Stabilitas keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta sejauh mana optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diwujudkan. Analisis terhadap data empiris pembangunan daerah ini menjadi rujukan dalam merumuskan strategis keuangan untuk menyusun proyeksi kemampuan keuangan daerah periode 2025-2029.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan

Transfer, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, Belanja Daerah dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Komponen Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yang mencakup antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta penerimaan pembiayaan lainnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah dan bentuk pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Regulasi menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk memahami struktur APBD, serta membantu dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kemandirian fiskal dan optimalisasi alokasi belanja untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengukuran indikator kinerja keuangan daerah pada bab ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal. Penilaian kinerja Daerah berdasarkan indikator kinerja yang mencerminkan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan salah satu indikator kriteria utama penilaian capaian kinerja keuangan daerah, yang mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan selama periode tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.114.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2020-2024

Tahun	Capaian	Nomor Laporan	Tanggal Laporan
2020	WTP	12.A/LHP/XVIII.BAC/04/2021	Wednesday, April 28, 2021
2021	WTP	13.A/LHP/XVIII.BAC/04/2022	Tuesday, April 26, 2022
2022	WTP	22.A/LHP/XVIII.BAC/05/2023	09 Mei 2023
2023	WTP	10.A/LHP/XVIII.BAC/04/2024	Tuesday, April 30, 2024
2024	WTP	7.A/LHP/XVIII.BAC/05/2025	21 Mei 2025

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Besar, 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Aceh Besar diklasifikasikan masih dalam kategori rendah dengan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,048. Kondisi ini

menunjukkan perbaikan nilai dari tahun sebelumnya 2023 yaitu pada kategori rendah dengan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,026 berdasarkan penghitungan peta kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023, dengan perubahan perhitungan dan nilai Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah pada kedua regulasi tersebut. Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 berada dalam kategori yang sama dengan 8 (delapan) kabupaten/kota lainnya yaitu Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, dan Bener Meriah.

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka. KFD yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan membiayai berbagai kegiatan prioritas daerah. Sebaliknya, KFD yang rendah bisa menjadi indikasi perlunya dukungan atau intervensi dari pemerintah pusat.

Kondisi fiskal daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Besar dari tahun ke tahun, khususnya dalam proses penetapan APBD yang setiap tahunnya tepat waktu, hasil kesepakatan bersama kepala daerah dan DPRD, yang sejalan dengan ketentuan pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.115.
Penetapan APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Nomor	Tanggal Penetapan APBD	Pagu (Rp.)
2020	Qanun Nomor 3 Tahun 2019	12 September 2019	2.037.750.221.680,-
2021	Qanun Nomor 35 Tahun 2020	29 Desember 2020	1.996.230.768.424,-
2022	Qanun Nomor 10 Tahun 2021	31 Desember 2021	1.941.358.229.434,-
2023	Qanun Nomor 9 Tahun 2022	30 Desember 2022	1.807.075.434.841,-
2024	Qanun Nomor 4 Tahun 2023	30 Desember 2023	1.953.475.965.618,-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar

Memperhatikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited tahun 2020 s.d 2024, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.108 bahwa persentase realisasi anggaran terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2022, yakni sebesar 88,81 persen, atau sebesar Rp. 1.724.039.755.268,- dari total anggaran Rp. 1.941.358.229.434,-

, dengan SILPA sebesar Rp. 60.963.390.653,-. Sebaliknya, persentase realisasi keuangan APBD tertinggi tercatat pada tahun 2024 yang mencapai 95,23 persen yaitu sebesar Rp. 1.860.372.130.232,- dari anggaran sebesar Rp. 1.953.475.965.618,- dengan SILPA sebesar Rp. 77.836.858.441,-.

Tabel 2.116.
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		SILPA
		Rp.	%	
2020	2.037.750.221.680,-	1.910.394.127.884,-	93,75	100.213.737.824,-
2021	1.996.230.768.424,-	1.891.445.772.027,-	94,75	36.103.024.334,-
2022	1.941.358.229.434,-	1.724.039.755.268,-	88,81	60.963.390.653,-
2023	1.807.075.434.841,-	1.710.628.620.469,-	94,66	76.594.703.014,-
2024	1.953.475.965.618,-	1.860.372.130.232,-	95,23	77.836.858.441,-

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur keuangannya secara optimal dan meningkatkan kinerja keuangan daerah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Daerah diharapkan mampu menjalankan otonomi secara mandiri dengan mengurangi tingkat ketergantungan pada keuangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Salah satu keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat diperhatikan dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dijelaskan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah belanja daerah, dan pembiayaan daerah Tahun 2020-2024, dengan penjabaran akun, kelompok, dan jenis yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.117.
Rata Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 - 2024

Kode	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	PENDAPATAN	1.879.904.774.163,89	1.827.341.049.370,88	1.749.900.121.587,55	1.726.272.469.456,78	1.862.088.963.028,14	(0,13)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	188.775.264.132,89	168.823.930.632,88	164.877.818.368,87	173.606.890.505,78	151.682.250.109,14	(5,06)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	114.461.077.054,57	99.408.493.122,40	91.323.354.023,07	95.444.701.760,46	99.186.188.365,70	(3,21)
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.681.853.580,00	7.169.734.960,00	6.562.272.530,00	28.988.984.968,00	29.698.006.342,00	97,22
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.934.586.511,00	7.245.942.947,00	7.492.529.100,00	6.758.220.780,00	5.860.673.196,00	(7,09)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.697.746.987,32	54.999.759.603,48	59.499.662.715,80	42.414.982.997,32	16.937.382.205,44	(22,86)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.645.666.728.562,00	1.617.234.603.085,00	1.575.258.800.945,68	1.552.434.742.651,00	1.683.963.651.606,00	0,68
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	988.729.623.692,00	1.001.684.111.599,00	994.627.192.672,00	1.021.236.117.296,00	1.131.472.113.106,00	3,52

Kode	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	504.383.950.034,00	475.073.358.200,00	422.944.648.320,00	442.291.223.700,00	452.236.429.377,00	(2,49)
4.2.3	Transfer Pemerintah Daerah	152.553.154.836,00	140.477.133.286,00	157.686.959.953,68	88.907.401.655,00	100.255.109.123,00	(6,63)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.462.781.469,00	41.282.515.653,00	9.763.502.273,00	230.836.300,00	26.443.061.313,00	2.793,04
4.3.1	Pendapatan Hibah	45.462.781.469,00	2.868.583.653,00	9.263.502.273,00	230.836.300,00	0,00	(17,07)
4.3.2	Pendapatan Hibah IPDMIIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi)	0,00	38.413.932.000,00	500.000.000,00	0,00	26.443.061.313,00	(49,67)
4.3.4	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Pendapatan Hibah Dana BOS Pendapatan Dana Kapitasi JKN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.3.5	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Pendapatan Hibah Dana BOS Pendapatan Dana Kapitasi JKN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	1.910.394.127.884,00	1.891.445.772.026,50	1.724.039.755.268,00	1.710.628.620.469,00	1.860.372.130.232,00	(0,47)
5.1	BELANJA OPERASI	991.835.470.937,00	1.061.663.361.282,00	1.022.776.948.828,00	1.039.743.737.399,00	1.128.129.575.444,00	3,38
5.1.1	Belanja Pegawai	671.430.409.146,00	574.336.771.393,00	536.632.469.662,00	550.447.481.754,00	565.881.118.537,00	(3,91)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	225.109.424.070,00	382.520.657.258,00	373.227.838.282,00	359.411.906.885,00	431.330.932.829,00	20,95
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	1.006.695.000,00	574.500.000,00	(10,73)
5.1.4	Belanja Hibah	66.274.785.352,00	92.111.494.367,00	95.084.271.822,00	118.736.801.483,00	113.595.001.299,00	15,69
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.132.961.350,00	12.028.520.000,00	17.832.369.062,00	10.140.852.277,00	16.748.022.779,00	3,26
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	887.891.019,00	665.918.264,00	0,00	0,00	0,00	(31,25)
5.2	BELANJA MODAL	277.249.482.327,00	215.169.455.612,50	158.040.633.052,00	95.315.206.876,00	162.158.418.573,00	(4,63)

Kode	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
5.2.1	Belanja Tanah	3.202.801.978,00	17.125.772.707,00	514.974.971,00	0,00	0,00	59,43
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	82.886.394.974,00	48.466.507.293,50	43.301.000.142,00	28.019.617.976,00	43.187.950.225,00	(8,34)
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	76.398.961.349,00	56.915.160.270,00	38.468.915.610,00	20.437.075.025,00	56.043.106.370,00	17,36
5.2.4	Belanja Jalan, Jaringan Dan Irigasi	110.482.493.677,00	92.202.965.342,00	75.463.782.329,00	45.867.293.975,00	54.547.911.303,00	(13,75)
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.278.830.349,00	459.050.000,00	291.960.000,00	991.219.900,00	8.379.450.675,00	214,80
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	36.211.997.775,00	3.136.896.468,00	1.288.956.875,00	459.841.000,00	172.050.892,00	(69,29)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	36.211.997.775,00	3.136.896.468,00	1.288.956.875,00	459.841.000,00	172.050.892,00	(69,29)
5.4	BELANJA TRANSFER	605.097.176.845,00	611.476.058.664,00	541.933.216.513,00	575.109.835.194,00	569.912.085.323,00	(1,28)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kota dan Desa	6.686.811.338,00	9.483.669.768,00	10.294.663.344,00	10.737.061.887,00	13.245.870.885,00	19,51

Kode	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
5.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	706.552.893,00	728.985.066,00	789.175.810,00	2.635.966.067,00	2.499.705.381,00	60,07
5.4.3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	597.703.812.614,00	601.263.403.830,00	530.849.377.359,00	561.736.807.240,00	554.166.509.057,00	(1,66)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.489.353.720,11)	(64.104.722.655,62)	25.860.366.319,55	15.643.848.987,78	1.716.832.796,14	(39,65)
6	PEMBIAYAAN						0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	131.703.091.544,48	100.207.746.989,37	36.103.024.333,75	60.950.854.026,30	76.620.025.645,22	1,66
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	131.703.091.544,48	100.207.746.989,37	36.103.024.333,75	60.950.854.026,30	76.620.025.645,22	1,66
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	(50,00)

Kode	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	(50,00)
6.3	PEMBIAYAAN NETTO	130.703.091.544,48	100.207.746.989,37	35.103.024.333,75	60.950.854.026,30	76.120.025.645,22	2,56
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	100.213.737.824,37	36.103.024.333,75	60.963.390.653,30	76.594.703.014,08	77.836.858.441,36	8,04

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

2.2.1.1. Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat, dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus (Otsus), dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah dan dana darurat serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020 s.d 2024, menjelaskan bahwa pencapaian realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengalami tren yang cenderung fluktuatif, atau kondisi di mana besaran pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-Lain pendapatan daerah yang sah naik-turun dari satu periode ke periode berikutnya. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp. 1.879.904.774.164, dan terus menurun hingga 2023 dengan tingkat pertumbuhan negatif. Peningkatan realisasi pendapatan kembali menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 7,87 persen pada tahun 2024, dengan bertambahnya pendapatan transfer. Perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan ditunjukkan tabel di bawah ini.

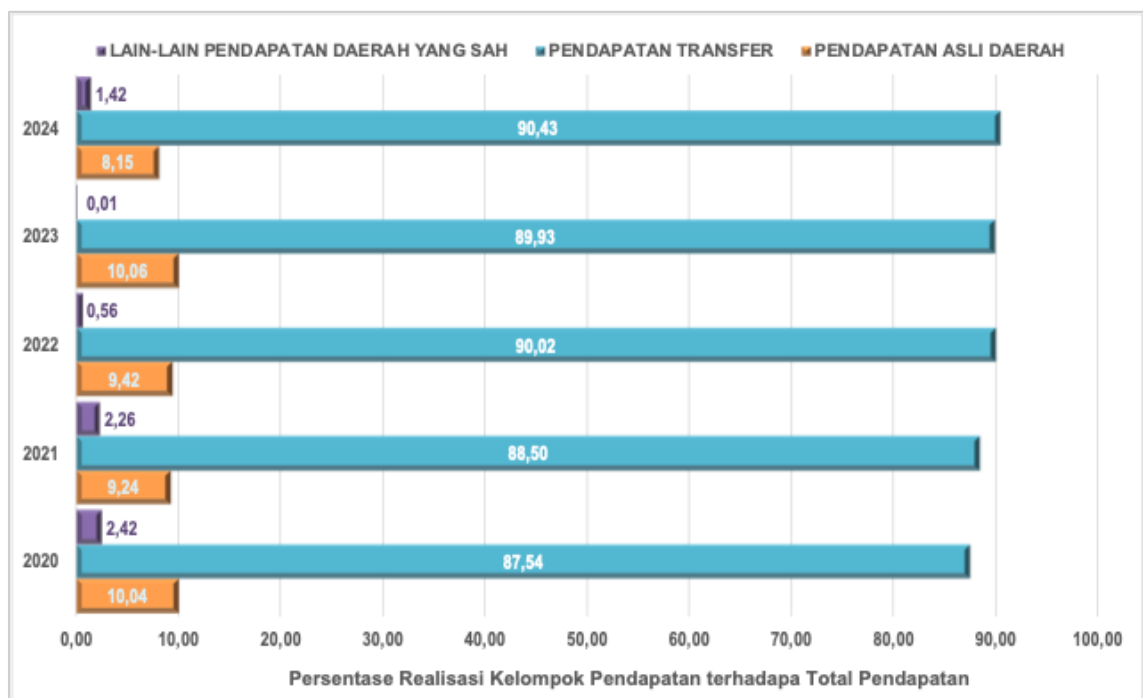
Tabel 2.118.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 -2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	1.907.047.130.135	1.879.904.774.164	98,58	0,00
2021	1.896.017.030.600	1.827.341.049.371	96,38	-2,80
2022	1.906.255.205.100	1.749.900.121.588	91,80	-4,24
2023	1.746.112.044.188	1.726.272.469.457	98,86	-1,35
2024	1.877.381.262.604	1.862.088.963.028	99,19	7,87

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Realisasi pendapatan Kabupaten Aceh Besar tahun 2020-2024, menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang negatif sebesar -0,13 persen, dengan proporsi akumulasi kelompok pendapatan selama lima tahun yaitu sebesar 89,27 persen bersumber dari pendapatan transfer, sebesar 9,37 persen dari pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,36 persen. Tren realisasi persentase masing-masing komponen Pendapatan (Gambar 2.111), menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah cenderung fluktuatif, dengan rasio PAD tertinggi terhadap pendapatan pada tahun 2023 sebesar 10,06 persen, meskipun nominal tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp. 188.775.264.133.

Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga menunjukkan ketidak stabilan. Rasio pendapatan transfer tertinggi terhadap pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 90,43 persen dengan nominal sebesar Rp. 1.683.963.651.606. Sedangkan rasio lain-lain pendapatan daerah yang sah tertinggi pada tahun 2020 sebesar 2,42 persen dengan nominal Rp. 45.462.781.469.



Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited), diolah

Gambar 2.74 Proporsi Realisasi Kelompok Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

Kondisi ini menggambarkan Rasio Ketergantungan Daerah masih sangat tinggi terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta Derajat Kemandirian Daerah yang masih rendah. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan PAD melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga sesuai dengan potensinya. Selanjutnya pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) harus mampu memberikan daya ungkit terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan prioritas kepada belanja modal yang lebih produktif. Secara terperinci gambaran pendapatan kabupaten Aceh Besar dapat dijelaskan berdasarkan kelompok pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah atau qanun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, sebagai perwujudan prinsip desentralisasi. Penguatan PAD juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah, sekaligus sebagai solusi dalam mengantisipasi berakhirnya dana Otonomi Khusus Aceh. Realisasi PAD dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Realisasi capaian tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 188.775.264.133, dan persentase pertumbuhan positif hanya pada tahun 2023 sebesar 5,29 persen. Perkembangan anggaran dan realisasi PAD sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 2.119.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	170.987.155.300	188.775.264.133	110,40	0,00
2021	189.825.800.000	168.823.930.633	88,94	-10,57
2022	268.000.000.000	164.877.818.369	61,52	-2,34
2023	200.567.537.929	173.606.890.506	86,56	5,29
2024	175.777.368.965	151.682.250.109	86,29	-12,63

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Pencapaian realisasi PAD selama periode Tahun 2020 s.d 2024 menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar merupakan sumber utama PAD, dengan kontribusi sebesar 58,96 persen dari total realisasi PAD. Komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi kontributor terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 27,78 persen. Sedangkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing berkontribusi sebesar 9,09 persen dan 4,16 persen. Selanjutnya, kontribusi menurut jenis-jenis pendapatan asli daerah dijelaskan sebagai berikut:

A.1 Pendapatan Pajak Kabupaten Aceh Besar

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pendapatan dari sektor pajak Kabupaten Aceh Besar terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Pemerintah kabupaten Aceh Besar perlu terus melakukan berbagai upaya yang komprehensif dan keberlanjutan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan dari sektor ini, melihat selama periode 2020-2024, pendapatan dari sektor pajak daerah menunjukkan tren peningkatan yang fluktuatif. Perkembangan pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.120.
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
 Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	87.221.000.000	114.461.077.055	131,23	0,00
2021	94.931.000.000	99.408.493.122	104,72	-13,15
2022	145.049.000.000	91.323.354.023	62,96	-8,13
2023	107.479.490.000	95.444.701.760	88,80	4,51
2024	104.778.398.672	99.186.188.366	94,66	3,92

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

A.2. Pendapatan Retribusi Kabupaten Aceh Besar

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, baik dalam bentuk pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Selama periode 2020 - 2024, pendapatan retribusi kabupaten Aceh Besar menunjukkan tren yang dinamis, dengan lonjakan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2023, yaitu sebesar 341,75 persen, dan kembali tumbuh sebesar 2,45 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan retribusi daerah, namun dari sisi jumlah harus dapat terus ditingkatkan, serta diperlukan strategi untuk menjaga kesinambungan peningkatan tersebut. Perkembangan pendapatan retribusi daerah ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.121.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	6.479.502.000	4.681.853.580	72,26	0,00
2021	8.622.800.000	7.169.734.960	83,15	53,14
2022	7.904.800.000	6.562.272.530	83,02	-8,47
2023	26.403.156.293	28.988.984.968	109,79	341,75
2024	27.858.508.293	29.698.006.342	106,60	2,45

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

A.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya dari hasil penyertaan modal Pemerintah kabupaten Aceh Besar selama periode 2020 - 2024 menunjukkan tren penurunan. Pendapatan ini bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.934.586.511, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp. 5.860.673.196. Perkembangan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 2.122.
Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	7.000.000.000	7.934.586.511	113,35	0,00
2021	8.000.000.000	7.245.942.947	90,57	-8,68
2022	8.000.000.000	7.492.529.100	93,66	3,40
2023	8.080.000.000	6.758.220.780	83,64	-9,80
2024	5.860.673.196	5.860.673.196	100,00	-13,28

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

A.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang sah selama periode 2020 s.d 2024 mencapai Rp. 235.549.534.509. Pendapatan ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, serta pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Perkembangan lain lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.123.
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	70.286.653.300	61.697.746.987	87,78	0,00
2021	78.272.000.000	54.999.759.603	70,27	-10,86
2022	107.046.200.000	59.499.662.716	55,58	8,18
2023	58.604.891.636	42.414.982.997	72,37	-28,71
2024	37.279.788.804	16.937.382.205	45,43	-60,07

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

2. Pendapatan Transfer

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pendapatan transfer terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer meliputi dana perimbangan seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta transfer lainnya seperti Dana Otonomi Khusus (DOKA), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.124.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	1.682.104.234.835	1.645.666.728.562	97,83	0,00
2021	1.642.929.377.324	1.617.234.603.085	98,44	-1,73
2022	1.622.538.552.339	1.575.258.800.946	97,09	-2,60
2023	1.545.544.506.259	1.552.434.742.651	100,45	-1,45
2024	1.673.753.201.932	1.683.963.651.606	100,61	8,47

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Secara umum, komponen terbesar dari pendapatan transfer Kabupaten Aceh Besar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dengan kontribusi realisasi sebesar 47,50 persen terhadap total pendapatan transfer. Komponen terbesar kedua adalah Dana Desa dengan kontribusi sebesar 21,42 persen. Diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai komponen terbesar ketiga dengan kontribusi sebesar 14,73 persen. Berdasarkan jenis pendapatan dari kelompok pendapatan transfer, kontribusi terbesar bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar 63,63 persen, selanjutnya sebesar 28,45 persen dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan sebesar 7,92 persen bersumber dari Transfer Pemerintah Provinsi melalui Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

B.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat merupakan alokasi dan penyaluran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mendukung desentralisasi, pemeratakan kemampuan keuangan, meningkatkan pembangunan daerah, dan membiayai layanan publik. Perkembangan dan realisasi transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama tahun 2020 - 2024 tercatat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.125.
Anggaran dan Realisasi Transfer Dana Pemerintah Pusat
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	1.518.002.647.072	1.493.113.573.726	98,36	0,00
2021	1.484.823.271.999	1.476.757.469.799	99,46	-1,10
2022	1.450.851.442.000	1.417.571.840.992	97,71	-4,01
2023	1.463.450.611.853	1.463.527.340.996	100,01	3,24
2024	1.580.808.613.130	1.583.708.542.483	100,18	8,21

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Penyesuaian. Komposisi masing-masing jenis pendapatan transfer pemerintah pusat akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.



Gambar 2.75 Perkembangan Realisasi Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

B1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan/atau berdasarkan kinerja tertentu. DBH dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah pusat dan Daerah serta kepada daerah non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

DBH Pajak mencakup pendapatan dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta cukai hasil tembakau. Sementara itu, DBH Sumber Daya Alam meliputi hasil dari sektor kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi serta perikanan. Berdasarkan perkembangan DBH, realisasi pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp. 28.496.557.000, dan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 17.651.855.945.

B1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan serta meningkatkan kualitas layanan public antar daerah. DAU diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan tingkat

capaian kinerja layanan daerah. Penggunaan DAU terdiri atas dua bagian, yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan. Berdasarkan data realisasi, DAU menunjukkan tren naik-turun setiap tahunnya, dengan realisasi pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp. 810.823.209.962, dan terendah pada tahun 2023 sebesar Rp. 744.913.619.271.

B1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional serta membantu operasionalisasi layanan publik di daerah, yang mana penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK diperuntukkan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu: (a) mencapai prioritas nasional, (b) mempercepat pembangunan daerah, (c) mengurangi kesenjangan layanan publik, (d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan (e) mendukung operasionalisasi layanan publik.

DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang bersifat fisik dan sesuai prioritas nasional, yang mencakup DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi. Selanjutnya, DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas melalui dukungan biaya operasional dan lainnya. DAK menunjukkan tren yang fluktuatif setiap tahunnya, dengan realisasi pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp. 292.152.346.144, dan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 211.898.416.747.

B.1.4. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tidak termasuk dalam Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK). Pada kelompok pendapatan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencatat jenis pendapatan dari Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal, yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan daerah atau daerah dengan kekhususan tertentu. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya juga menunjukkan tren fluktuatif setiap tahunnya, dengan realisasi pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp. 504.383.950.034, dan terendah pada tahun 2022 sebesar Rp. 422.944.648.320.

B.2. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya terdiri dari jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah provinsi yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Penerimaan Pajak Rokok. Besarannya sangat tergantung pada jenis pajaknya dan akan disalurkan berdasarkan persentase yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah terkait. Pendapatan ini sangat fluktuatif setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -6,63 persen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang bertujuan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Selanjutnya, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 10 ditegaskan bahwa dana otonomi khusus diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan dibidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial, kesehatan, serta pembiayaan program pembangunan dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Aceh.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dari sumber DOKA sesuai hasil formulasi oleh Pemerintah Aceh, menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun, terutama pada tahun 2023-2024, sebagai dampak dari penurunan alokasi transfer Dana OTSUS dari Pemerintah Pusat menjadi 1 persen dari/atau setara DAU Nasional. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Aceh Besar dari sumber DOKA dalam lima tahun terakhir sebesar 4,80 persen. Perkembangan transfer pemerintah provinsi untuk periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.126.
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	164.101.587.763	152.553.154.836	92,96	0,00
2021	158.106.105.325	140.477.133.286	88,85	-7,92
2022	171.687.110.339	157.686.959.954	91,85	12,25
2023	82.093.894.406	88.907.401.655	108,30	-43,62
2024	92.944.588.802	100.255.109.123	107,87	12,76

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pencapaian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah selama periode 2020 s.d 2024 mencapai Rp. 123.182.697.008. Realisasi pendapatan cenderung menunjukkan tren penurunan, hingga yang terendah pada tahun 2023 sebesar Rp. 230.836.300, dengan rata-rata pertumbuhan negatif yang mencapai -97,64 persen. Perkembangan lebih rinci terkait anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk periode 2020 - 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.127.
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	53.955.740.000	45.462.781.469	84,26	0,00
2021	63.261.853.276	41.282.515.653	65,26	-9,19
2022	15.716.652.761	9.763.502.273	62,12	-76,35
2023	0,00	230.836.300	0,00	-97,64
2024	27.850.691.707	26.443.061.313	94,95	11.355,33

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

2.2.1.1. Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengelompokkan belanja daerah menjadi beberapa komponen sebagai berikut:

1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah di bawahnya, yang meliputi belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan.

Secara umum, realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan realisasi belanja ini berdampak negatif terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah, termasuk tertundanya pelaksanaan program pembangunan, inefisiensi dan ketidakefektifan penggunaan anggaran, serta terganggunya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak ini bisa terjadi karena proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang kurang baik, hambatan birokrasi, serta masalah manajemen.

Selama periode 2020-2024, realisasi belanja Kabupaten Aceh Besar mencapai Rp. 9.096.880.405.880, atau 93,44 persen dari total anggaran sebesar Rp. 9.735.890.619.997, dengan tren realisasi yang fluktuatif. Persentase realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2024 yang capaian 95,23 persen atau sebesar Rp. 1.860.372.130.232 dari total anggaran Rp. 1.953.475.965.618. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja Kabupaten Aceh Besar periode 2020-2024 sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 2.128.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2020	2.037.750.221.680	1.910.394.127.884	93,75
2021	1.996.230.768.424	1.891.445.772.027	94,75
2022	1.941.358.229.434	1.724.039.755.268	88,81
2023	1.807.075.434.841	1.710.628.620.469	94,66
2024	1.953.475.965.618	1.860.372.130.232	95,23

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Berdasarkan perkembangan realisasi 4 (empat) kelompok belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer, yang menjadi kontributor terbesar selama periode waktu lima tahun terakhir adalah belanja operasi dengan tren yang cenderung meningkat hingga tahun 2024.

Peningkatan belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah seperti pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia berdaya saing, reformasi birokrasi, dan pemantapan pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah juga fokus mendorong pengembangan usaha di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan mengatasi masalah pengangguran.



Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited), diolah

Gambar 2.76 Kontribusi Realisasi Kelompok Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

A. Belanja Operasi

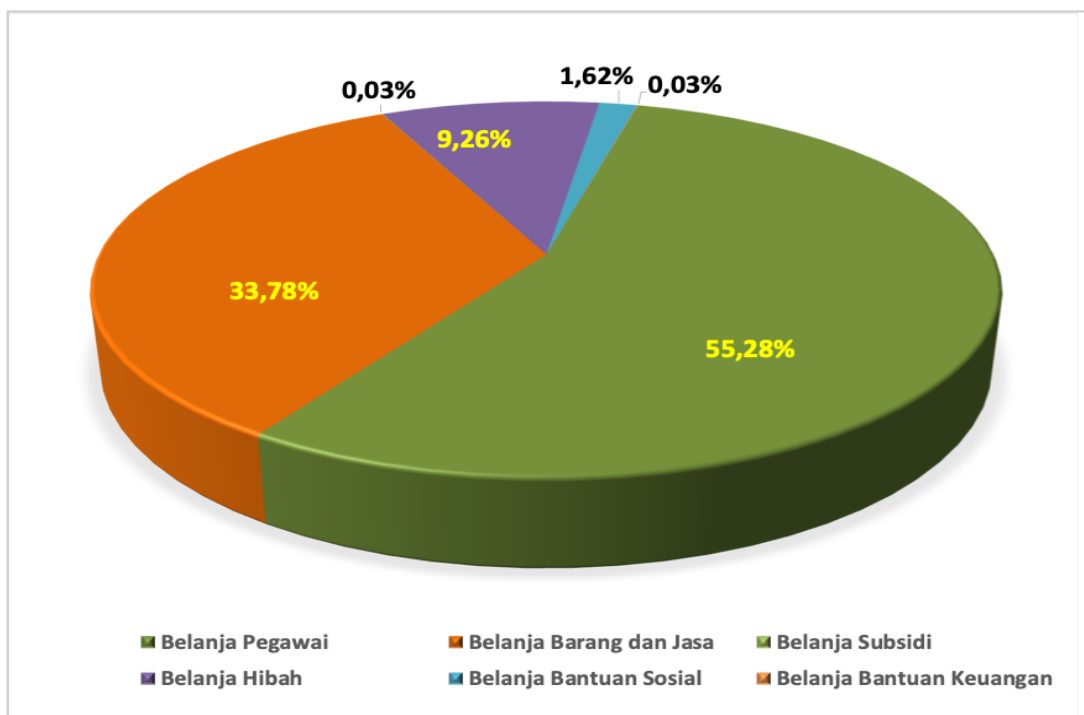
Realisasi belanja operasi Kabupaten Aceh Besar terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Selama periode tahun 2020 - 2024 realisasi belanja operasi sebesar Rp. 5.244.149.093.890, atau 57,65 persen dari total realisasi belanja daerah dan sebesar 81,18 persen dari total anggaran belanja operasi. Persentase capaian realisasi belanja operasi menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun pencatatan, dengan persentase realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 93,27 persen, sedangkan persentase realisasi terendah tercatat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 85,70 persen, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.129.
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2020	1.082.916.698.846	991.835.470.937	91,59
2021	1.140.630.004.211	1.061.663.361.282	93,08
2022	1.193.391.993.303	1.022.776.948.828	85,70
2023	1.124.740.021.559	1.039.743.737.399	92,44
2024	1.209.498.005.034	1.128.129.575.444	93,27

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Komponen belanja operasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama periode 2020 - 2024 terdiri dari 6 (enam) jenis belanja. Jenis belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan kontribusi realisasi sebesar 55,28 persen, diikuti belanja barang dan jasa sebesar 33,78 persen, belanja hibah sebesar 9,26 persen. Sementara itu, belanja bantuan sosial memberikan kontribusi sebesar 1,62 persen, kemudian belanja subsidi, dan belanja bantuan keuangan masing-masing sebesar 0,03 persen terhadap total belanja operasi. Kontribusi realisasi jenis-jenis belanja operasi ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited), diolah

Gambar 2.77 Kontribusi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Jenis Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

A.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen pengeluaran anggaran yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pegawai BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah. Selama periode 2020 - 2024 realisasi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencapai angka Rp. 2.898.728.250.492, atau 55,28 persen dari total realisasi belanja operasi dan sebesar 93,01 persen dari total anggaran belanja pegawai. Persentase capaian realisasi belanja pegawai menunjukkan tren

yang fluktuatif dalam lima tahun anggaran, dengan persentase realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 94,62 persen, sedangkan persentase realisasi terendah tercatat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 88,66 persen, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.130.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2020	711.768.671.375	671.430.409.146	94,33
2021	607.013.325.074	574.336.771.393	94,62
2022	605.238.184.364	536.632.469.662	88,66
2023	586.457.112.706	550.447.481.754	93,86
2024	606.176.690.002	565.881.118.537	93,35

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

A.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai manfaat kurang dari satu tahun anggaran, untuk mendukung implementasi program dan kegiatan pemerintahan. Selama periode 2020 s.d 2024, realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tercatat sebesar Rp. 1.771.600.759.324, atau 33,78 persen dari total realisasi belanja operasi dan sebesar 87,39 persen dari total anggaran belanja barang dan jasa. Persentase capaian realisasi belanja barang dan jasa menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun anggaran, dengan persentase realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 92,38 persen, sedangkan persentase realisasi terendah tercatat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 81,62 persen, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.131.
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Aceh Besar Tahun
2020 – 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2020	266.804.685.136	225.109.424.070	84,37
2021	433.990.376.873	382.520.657.258	88,14
2022	457.253.212.375	373.227.838.282	81,62
2023	402.222.147.237	359.411.906.885	89,36
2024	466.910.223.432	431.330.932.829	92,38

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

A.3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial dan tantangan ekonomi. Subsidi ini diperuntukkan kepada usaha milik swasta untuk kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan khusus yang berdampak pada Kabupaten Aceh Besar, terutama akibat dampak pandemi Covid-19. Belanja subsidi terbagi dalam 2 (dua) jenis peruntukan yaitu kepada BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta. Pada periode 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah merealisasikan belanja subsidi sebesar Rp. 1.581.195.000, atau 0,03 persen dari total realisasi belanja operasi dan sebesar 98,00 persen dari total anggaran belanja subsidi. Persentase capaian realisasi belanja subsidi menunjukkan tren dengan kecenderungan meningkat dalam lima tahun anggaran, dengan persentase realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 100,00 persen, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.132.
Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2020	0	0	0,00
2021	0	0	0,00
2022	0	0	0,00
2023	1.038.895.091	1.006.695.000	96,90
2024	574.500.000	574.500.000	100,00

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

A.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pihak lain, baik lembaga/organisasi, maupun pemerintah daerah. Hibah ini bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak wajib untuk dibayar kembali. Proses pemberian hibah dilakukan melalui naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak dilakukan secara terus menerus. Realisasi belanja hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama periode 2020 s.d 2024 menunjukkan tren meningkat, dengan realisasi sebesar Rp. 485.802.354.323, atau 9,26 persen dari total realisasi belanja operasi dan sebesar 96,04 persen dari total anggaran belanja hibah. Persentase capaian realisasi belanja hibah menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun anggaran, dengan persentase realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 105,97 persen, sedangkan persentase realisasi terendah tercatat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 88,08 persen, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.133.
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 s.d
2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2020	73.591.559.900	66.274.785.352	90,06
2021	86.923.384.000	92.111.494.367	105,97
2022	107.956.896.564	95.084.271.822	88,08
2023	122.979.931.515	118.736.801.483	96,55
2024	114.376.725.120	113.595.001.299	99,32

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

A.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa kepada masyarakat. Tujuan utama dari belanja ini adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada periode 2020 s.d 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah merealisasikan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 84.882.725.468, atau 1,62 persen dari total realisasi belanja operasi dan sebesar 86,31 persen dari total anggaran belanja hibah. Persentase capaian realisasi belanja bantuan sosial menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun anggaran, dengan persentase realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 99,93 persen, sedangkan persentase realisasi terendah tercatat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 77,72 persen, yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.134.
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2020	29.863.891.415	28.132.961.350	94,20
2021	12.037.000.000	12.028.520.000	99,93
2022	22.943.700.000	17.832.369.062	77,72
2023	12.041.935.010	10.140.852.277	84,21
2024	21.459.866.480	16.748.022.779	78,04

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

A.6. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk memberikan dukungan finansial kepada pihak tertentu, seperti partai politik, pemerintah desa, atau lembaga/individu, dalam bentuk uang, barang, atau jasa, yang tujuannya membantu mengurangi beban biaya, melindungi dari risiko sosial, serta meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat. Pada periode 2020 s.d 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah merealisasikan belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 1.553.809.283, atau 0,03 persen dari total realisasi belanja operasi dan sebesar

100,00 persen dari total anggaran belanja bantuan keuangan. Persentase capaian realisasi belanja bantuan keuangan menunjukkan tren yang stabil dalam dua tahun anggaran, namun tidak tersedia anggaran dan realisasi pada tahun 2022 - 2024, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.135.
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2020	887.891.019	887.891.019	100,00
2021	665.918.264	665.918.264	100,00
2022	0	0	0,00
2023	0	0	0,00
2024	0	0	0,00

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

B. Belanja Modal

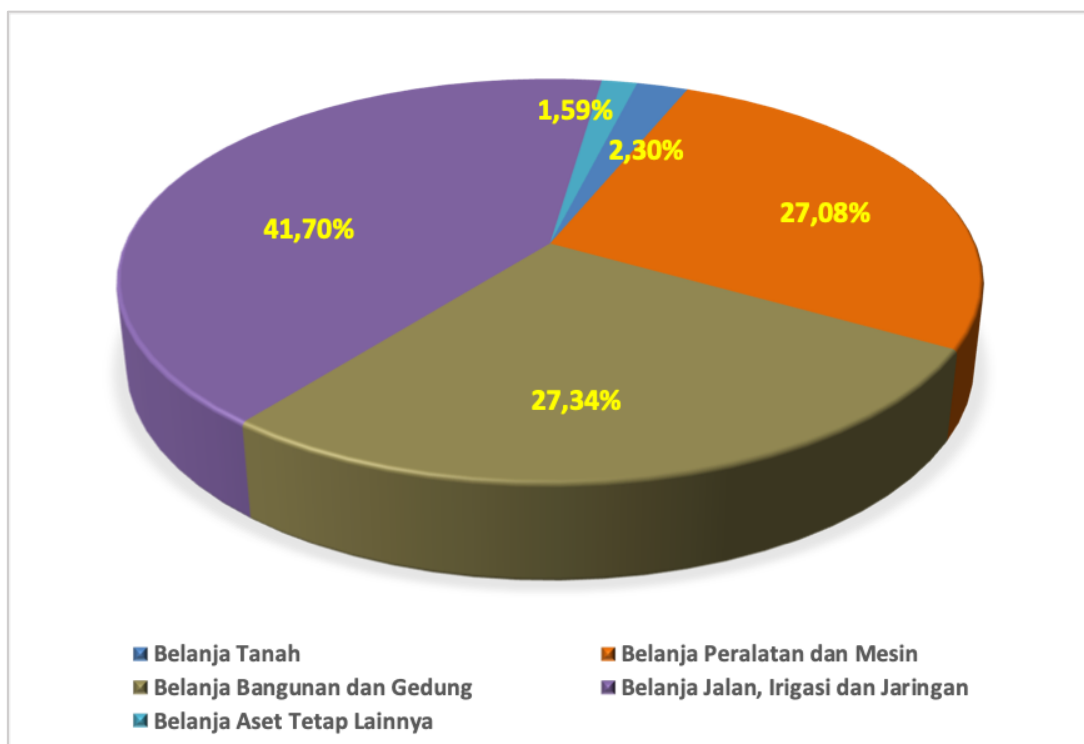
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti tanah, gedung, peralatan, mesin, dan aset tak berwujud. Pengeluaran ini bersifat investasi untuk membentuk modal pemerintah dan memberikan keuntungan ekonomis jangka Panjang. Pada periode 2020 - 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp. 907.933.196.441, atau 9,98 persen dari total realisasi belanja daerah dan sebesar 91,19 persen dari total anggaran belanja modal. Persentase capaian realisasi belanja modal menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun pencatatan, dengan persentase realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 95,60 persen, sedangkan persentase realisasi terendah tercatat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 85,43 persen, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.136.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020- 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2020	299.770.061.134	277.249.482.327	92,49
2021	236.597.419.848	215.169.455.613	90,94
2022	185.004.089.301	158.040.633.052	85,43
2023	104.679.780.933	95.315.206.876	91,05
2024	169.628.500.878	162.158.418.573	95,60

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Dari Gambar di bawah ini, dapat diketahui bahwa kontribusi realisasi terbesar dalam belanja modal selama periode 2020 - 2024 bersumber dari belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang mencapai Rp. 378.564.446.626, atau 41,70 persen dari total anggaran belanja modal. Selanjutnya kontribusi terbesar kedua adalah dari belanja modal Gedung dan bangunan yang mencapai 27,34 persen atau setara Rp. 248.263.218.624, diikuti oleh belanja modal peralatan dan mesin yang berkontribusi sebesar 27,08 persen atau setara Rp. 245.861.470.611. Sementara belanja modal tanah dan belanja modal aset tetap lainnya masing-masing memberikan berkontribusi sebesar 2,30 persen dan 1,59 persen dari total realisasi belanja modal.



Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited), diolah

Gambar 2.78 Kontribusi Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Jenis Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

Perkembangan realisasi jenis belanja dari kelompok belanja modal menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Mengingat bahwa wilayah Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata, sehingga investasi utama pada jalan, irigasi dan jaringan, menjadi sangat krusial untuk dibiayai guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan, dan penciptaan lapangan usaha, yang dapat berkontribusi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan mengatasi masalah pengangguran.

C. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan/atau keadaan darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi dan direncanakan sebelumnya. Pengeluaran ini sangat diperlukan untuk penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah ketika terjadi hal-hal di luar perkiraan normal. Selama periode 2020 - 2024 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah merealisasikan belanja ini sebesar Rp. 41.269.743.010, atau 0,45 persen dari total realisasi belanja daerah dan sebesar 58,59 persen dari total anggaran belanja tak terduga. Persentase capaian realisasi

belanja tak terduga menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dalam lima tahun pencatatan, dengan persentase realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 73,90 persen, sedangkan persentase realisasi terendah tercatat pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 4,53 persen, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.137.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2020	49.000.000.000	36.211.997.775	73,90
2021	6.137.869.955	3.136.896.468	51,11
2022	10.000.000.000	1.288.956.875	12,89
2023	1.500.000.000	459.841.000	30,66
2024	3.800.000.000	172.050.892	4,53

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada Pemerintah dibawahnya dalam mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kabupaten. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja transfer Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama periode 2020 s.d 2024 sebesar Rp. 2.903.528.372.539, atau 31,92 persen dari total realisasi belanja daerah dan sebesar 99,48 persen dari total anggaran belanja transfer. Persentase capaian realisasi belanja transfer menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun pencatatan, dengan persentase realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 99,89 persen, sedangkan persentase realisasi terendah tercatat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 98,01 persen, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.138.
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2020	606.063.461.700	605.097.176.845	99,84
2021	612.865.474.410	611.476.058.664	99,77
2022	552.962.146.830	541.933.216.513	98,01
2023	576.155.632.349	575.109.835.194	99,82
2024	570.549.459.706	569.912.085.323	99,89

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Perkembangan realisasi kelompok belanja transfer menunjukkan bahwa 98,01 persen merupakan realisasi dari jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Sedangkan sisanya sebesar 1,74 persen dan 0,25 persen, masing-masing merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten kota dan desa, dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Gambar 2.79 Kontribusi Realisasi Belanja Transfer Berdasarkan Jenis Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

2.2.1.2. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Aceh Besar bersumber terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang meliputi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan, penghematan belanja, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan, sisa belanja lainnya, penggunaan SiLPA FKTP, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Aceh Besar meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2.139.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	130.703.091.544	130.703.091.544	100,00	0,00
2021	100.213.737.824	100.207.746.989	99,99	-23,33
2022	35.103.024.334	35.103.024.334	100,00	-64,97
2023	60.963.390.653	60.950.854.026	99,98	73,63
2024	76.094.703.014	76.120.025.645	100,03	24,89

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sesuai Tabel 2.131 diatas menunjukkan tren fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi pembiayaan tercatat mencapai angka tertinggi yaitu sebesar Rp. 130.703.091.544. Sebaliknya, realisasi pembiayaan terendah pada tahun 2022 sebesar Rp. 35.103.024.334. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh besarnya

penerimaan pembiayaan, yang salah satu komponennya adalah SiLPA. Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga sangat tergantung pada besarnya dana yang dialokasikan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah. Lebih jelas tentang capaian pembiayaan keuangan ini diuraikan sebagai berikut:

A. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Total realisasi pembiayaan selama periode 2020 s.d 2024 sebesar Rp. 405.584.742.539 atau 100,00 persen realisasi penerimaan pembiayaan bersumber dari kelompok SiLPA yaitu sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Besarnya penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA daerah menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan anggaran, seperti perencanaan anggaran yang tidak sesuai, atau pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran, sehingga anggaran tidak digunakan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Rincian penerimaan pembiayaan periode 2020 - 2024 sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 2.140.

Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	131.703.091.544	131.703.091.544	100,00	0,00
2021	100.213.737.824	100.207.746.989	99,99	-23,91
2022	36.103.024.334	36.103.024.334	100,00	-63,97
2023	60.963.390.653	60.950.854.026	99,98	68,82
2024	76.594.703.014	76.620.025.645	100,03	25,71

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Aceh Besar diperuntukkan untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000.000 atau 100 persen dari total anggaran. Realisasi pengeluaran pembiayaan tertinggi tercatat pada tahun 2020 dan 2022, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000, dan terendah pada tahun 2024 sebesar Rp. 500.000.000, sedangkan pada tahun 2021 dan 2023 tidak ada alokasi. Realisasi pengeluaran pembiayaan yang besar tidak serta-merta baik atau buruk, efektivitasnya bergantung pada kualitas, ketepatan waktu, dan dampak positif yang dihasilkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rincian pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.141.
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2020	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	0,00
2021	-	-	0,00	-100,00
2022	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	0,00
2023	-	-	0,00	-100,00
2024	500.000.000	500.000.000	100,00	0,00

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

2.2.1.3. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan laporan yang menjelaskan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan bagian penting dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan berfungsi untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan posisi keuangan suatu pemerintah daerah yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah.

A. Aset

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (2), menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, dan (2) aset tidak lancar yang meliputi investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) aset lainnya, dan (5) property investasi.

Berdasarkan Neraca Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, selama periode 2020 s.d 2024, nilai aset menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rata rata pertumbuhan negatif sebesar -0,18 persen. Berdasarkan kelompoknya, pertumbuhan aset dilihat dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset Lancar menggambarkan pertumbuhan negatif sebesar -3,66 persen, namun pada jenis aset lancar kas mengalami pertumbuhan positif tertinggi dengan rata-rata sebesar 7,57 persen. Sebaliknya, terjadi penurunan atau pertumbuhan negatif pada jenis aset piutang dengan rata-rata sebesar -4,93 persen.

Pada kelompok Aset Tidak Lancar terdiri dari Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Properti Investasi. Jenis Aset Tetap memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 89,73 persen (Rp. 2.664.157.513.946,47) dari total Aset Tidak Lancar, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,27 persen. Namun rata-rata pertumbuhan tertinggi tercatat pada jenis Aset Lainnya sebesar 7,16 persen.

B. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari dua kelompok akun, yaitu:

1. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang penyelesaiannya

diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, seperti utang transfer pemerintah, bunga pinjaman, bagian lancar utang jangka Panjang dan utang jangka pendek lainnya.

2. Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Dari sisi pertumbuhan kewajiban keuangan selama periode 2020 s.d 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencatat tren yang fluktuatif, dengan rata rata pertumbuhan positif sebesar 93,17 persen yang seluruhnya merupakan kelompok kewajiban jangka pendek dari jenis kewajiban Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Total kewajiban jangka pendek selama lima tahun terakhir sebesar Rp. 55.962.958.492,66. Sedangkan kewajiban jangka panjang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam lima tahun terakhir.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan memiliki posisi keuangan yang lebih stabil dan sehat karena tidak menanggung utang besar yang jatuh tempo di masa mendatang, sehingga fokus hanya pada pembiayaan jangka pendek dan pendapatan rutin untuk mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan disiplin. Namun perlu kehati-hatian, meskipun terhindar dari beban utang, kondisi tanpa kewajiban jangka panjang dapat membuat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kesulitan dalam mengembangkan wilayahnya secara strategis dengan program-program berkelanjutan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, jalan, jaringan irigasi, dan lain-lain) menjadi sulit, dan berimplikasi terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, karena hanya mengandalkan dana yang tersedia setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan PAD yang negatif (-5,06 persen) selama tahun 2020-2024, bahkan cenderung stagnan.

C. Ekuitas

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi adalah selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan

aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang.

Selama periode 2020 s.d 2024 jumlah ekuitas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tercatat sebesar Rp. 15.534.613.038.508, dengan realisasi rata - rata pertumbuhan ekuitas negatif tercatat sebesar -0,27 persen selama lima tahun terakhir. Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang fluktuatif mencerminkan adanya ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah dan perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Implikasi dari ekuitas yang fluktuatif adalah ketidakpastian dalam kesehatan fiskal pemerintah daerah, sehingga menyulitkan perencanaan anggaran jangka panjang. Implikasi lainnya yaitu kinerja manajemen keuangan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, pengelolaan, atau pengawasan keuangan daerah. Jika ekuitas menurun terus-menerus, ini bisa menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan. Pada kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, perlu melakukan analisis untuk mencari tahu faktor-faktor spesifik yang menyebabkan perubahan pada ekuitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melaporkan kondisi keuangan secara jelas dan akurat, serta menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang bijak, agar tidak ada perubahan yang drastis dan tidak terprediksi pada kekayaan bersih daerah. Rincian ekuitas dana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.142.
Rata Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

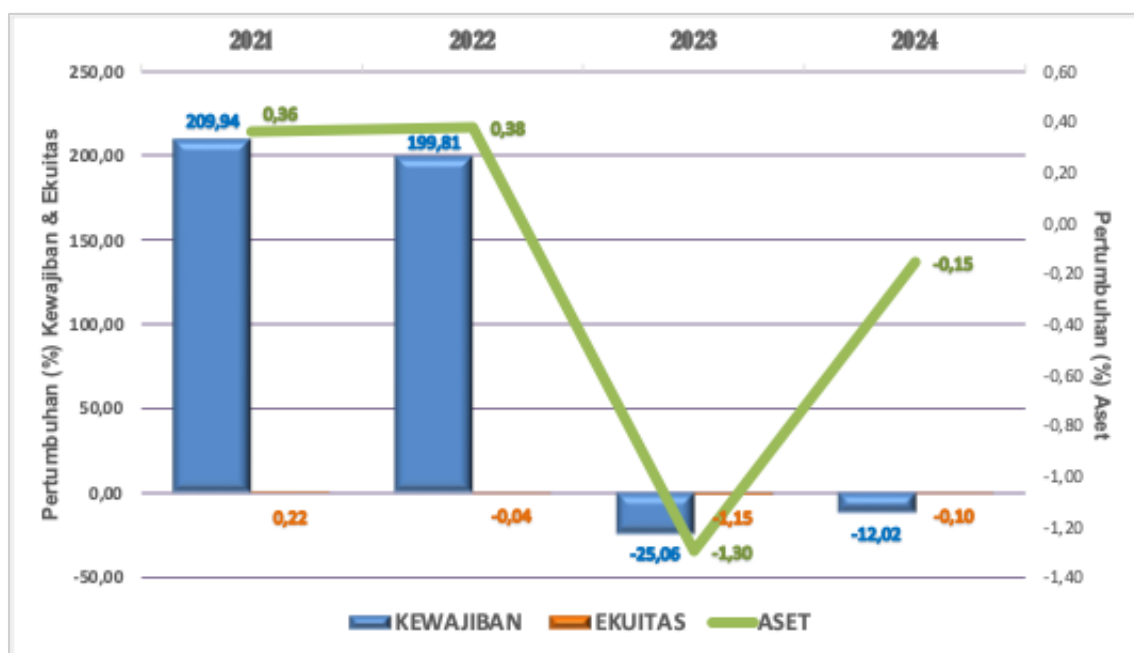
Kode	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
G.5.3.1	ASET						
G.5.3.1.1	ASET LANCAR	181.881.745.096,95	125.131.203.854,41	141.007.156.719,65	151.731.986.756,23	146.099.640.046,48	-3,66
G.5.3.1.1.1	Kas	100.511.478.512,37	36.597.102.389,06	60.993.212.128,30	76.594.703.014,08	77.836.858.441,36	7,57
G.5.3.1.1.2	Piutang	61.580.527.963,16	69.763.022.191,00	58.069.374.527,20	57.278.836.541,89	48.759.633.767,51	-4,93
G.5.3.1.1.3	Persediaan	19.789.738.621,42	18.771.079.274,35	21.944.570.064,15	17.858.447.200,26	19.503.147.837,61	0,59
G.5.3.1.1.4	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	138.798.215.299,27	138.546.231.722,93	139.326.356.647,93	140.745.892.253,40	139.346.245.022,00	0,10
G.5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.3.1.2.2	Investasi Permanen	138.798.215.299,27	138.546.231.722,93	139.326.356.647,93	140.745.892.253,40	139.346.245.022,00	0,10
G.5.3.1.3	ASET TETAP	2.658.442.966.121,63	2.710.642.722.057,25	2.702.807.706.545,35	2.621.001.258.559,33	2.627.892.916.448,81	-0,27
G.5.3.1.3.1	Tanah	593.833.904.805,00	619.550.563.062,00	619.104.738.033,00	602.872.597.333,00	602.054.613.208,00	0,38

Kode	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
G.5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	464.905.916.494,99	513.818.688.701,49	556.313.291.962,49	578.003.947.567,89	619.672.299.133,61	7,47
G.5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.171.859.489.282,51	1.226.414.293.846,51	1.270.037.106.829,51	1.281.967.056.522,51	1.338.360.273.160,51	3,39
G.5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.166.170.692.663,66	2.249.275.631.230,66	2.326.769.930.030,66	2.374.797.181.563,66	2.432.874.659.250,66	2,95
G.5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	52.880.472.453,00	55.476.290.227,00	58.849.980.742,00	63.605.006.252,00	68.236.582.632,00	6,59
G.5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.781.191.540,00	23.172.708.196,00	19.034.227.040,00	21.145.452.604,00	20.296.411.223,00	0,18
G.5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.811.988.701.117,53)	(1.977.065.453.206,41)	(2.147.301.568.092,31)	(2.301.389.983.283,73)	(2.453.601.922.158,97)	7,88
G.5.3.1.4	ASET LAINNYA	140.119.609.994,47	156.181.557.019,47	159.240.884.663,47	188.147.647.686,58	182.648.809.898,58	7,16
G.5.3.1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.3.1.4.2	Tuntutan Ganti Rugi	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
G.5.3.1.4.3	Aset Tidak Berwujud Neto	301.885.900,00	119.404.450,00	168.599.500,00	157.998.800,00	342.165.600,00	22,76
G.5.3.1.4.4	Aset Lain-lain	139.217.724.094,47	181.894.207.960,55	156.418.963.949,47	178.768.622.886,58	181.436.212.298,58	8,11

Kode	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
G.5.3.1.4.5	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility	0,00	(26.432.055.391,08)	2.053.321.214,00	8.621.026.000,00	270.432.000,00	28,81
G.5.3.1.5	PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	835.244.586,00	0,00
G.5.3.1.5.1	Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.310.000,00	0,00
G.5.3.1.5.2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	(205.065.414,00)	0,00
	JUMLAH ASET	3.119.242.536.512,32	3.130.501.714.654,06	3.142.382.104.576,40	3.101.626.785.255,54	3.096.822.856.001,87	-0,18
G.5.3.2	KEWAJIBAN						
G.5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.113.192.765,28	6.549.609.694,01	19.636.651.129,01	14.716.448.384,68	12.947.056.519,68	93,17
G.5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	133.255.608,00	8.366.862,00	0,00	0,00	0,00	-48,43
G.5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	117.436.026,33	192.727.693,01	521.125.000,01	410.416.666,68	361.666.666,68	50,35

Kode	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
G.5.3.2.1.3	Utang Belanja	134.112.760,00	6.348.515.139,00	19.115.526.129,00	14.306.031.718,00	12.585.389.853,00	1199,41
G.5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.728.388.370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
G.5.3.2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.3.2.2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.113.192.765,28	6.549.609.694,01	19.636.651.129,01	14.716.448.384,68	12.947.056.519,68	93,17
G.5.3.3	EKUITAS	3.117.129.343.747,04	3.123.952.104.960,05	3.122.745.453.447,39	3.086.910.336.870,86	3.083.875.799.482,19	-0,27
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.119.242.536.512,32	3.130.501.714.654,06	3.142.382.104.576,40	3.101.626.785.255,54	3.096.822.856.001,87	-0,18

Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi neraca Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat berfluktuasi selama tahun 2020-2024. Realisasi aset pada tahun 2021 dan 2022 menggambarkan pertumbuhan yang positif, dengan realisasi pertumbuhan masing-masing sebesar 0,36 persen dan 0,38 persen atau tumbuh sebesar 0,02 persen. Realisasi pertumbuhan ekuitas yang tercatat positif hanya pada tahun 2021 sebesar 0,22 persen, dan mengalami penurunan ke negatif pada tahun 2022 - 2024, dengan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar -1,15 persen.



Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited), diolah

Gambar 2.80 Pertumbuhan Realisasi Neraca Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

Secara nominal, besaran rata-rata realisasi kewajiban selama periode 2020-2024 hanya sebesar 0,36 persen atau setara Rp. 11.192.591.699 dari total rata-rata kewajiban dan ekuitas sebesar Rp. 3.118.115.199.400. Meskipun realisasi pertumbuhan tahun 2021 dan 2022 menunjukkan nilai sebesar 209,94 persen dan 199,81 persen, dan turun menjadi negatif pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar -25,06 persen dan -12,02 persen, yang seluruhnya dipengaruhi oleh kewajiban jangka pendek, terutama dari jenis utang belanja dan pendapatan diterima di muka. Kondisi ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh

Besar agar pengelolaan keuangan kedepan lebih efisien dan disiplin, tidak hanya untuk membiayai program dan kegiatan rutin, namun solusi terhadap pembiayaan program unggulan dan program prioritas daerah secara berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Instrumen analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan melalui analisis rasio keuangan pada laporan keuangan daerah (APBD), Tujuan utama analisis ini adalah untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu:

1. Rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek secara tepat pada waktu. Rasio likuiditas terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*).
2. Rasio solvabilitas, digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*).

Tabel berikut ini menunjukkan hasil analisis kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui perhitungan rasio likuidasi dan rasio solvabilitas.

Tabel 2.143.
Balance Sheet Ratio Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

Balance Sheet Ratio		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Liquidity Ratio	Current Ratio	86,07	19,11	7,18	10,31	11,28
	Quick Ratio	76,70	16,24	6,06	9,10	9,78

Balance Sheet Ratio		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Solvability Ratio	Debt to Assets Ratio	0,001	0,002	0,006	0,005	0,004
	Debt to Equity Ratio	0,001	0,002	0,006	0,005	0,004

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited), diolah

A. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar (*Current Ratio*) menunjukkan sejauh mana aset lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek (utang lancar), semakin besar perbandingan antar aset lancar dengan utang lancar, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Apabila rasio lancar 1 : 1 atau setara 100% berarti semua aset dapat menutupi utang. Rasio lancar berada dibawah 1, maka pemerintah daerah akan mengalami kendala dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Selama tahun 2020 s.d 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam kondisi sangat baik untuk melunasi kewajiban (utang).

B. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio ini merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lain. Quick aset ini terdiri dari piutang dan surat-surat berharga yang dapat direalisasi menjadi uang dalam relatif pendek. Semakin besar rasio ini semakin cepat pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama periode 2020 s.d 2024 sangat baik dan cepat dalam membayar kewajiban yang setiap tahunnya berada di atas angka 1.

C. Rasio Utang terhadap Asset (*Debt to Assets Ratio*)

Rasio utang terhadap aset merupakan rasio untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh utang. Rasio ini sangat penting guna melihat solvabilitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka panjang. Semakin kecil rasio kewajiban terhadap aset maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi semua kewajiban terhadap kreditor, namun demikian jika nilai rasio cukup besar atau berada di atas 1 maka kemampuan pemerintah daerah mulai sulit untuk melunasi kewajiban kepada kreditor. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 s.d 2024 memiliki kemampuan sangat baik untuk melunasi kewajiban dengan modal aset yang dimiliki, karena semua berada pada kisaran angka jauh dibawah 1.

D. Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini secara langsung membandingkan antara total utang dengan total ekuitas, yang menggambarkan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang dan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan ekuitas (modal) atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat baik untuk melunasi semua utang terhadap kreditor. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2020 - 2024 semua rasio berada pada kisaran angka jauh di bawah 1.

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan dengan memperhatikan dua aspek penting dan harus saling bersinergi yaitu kebijakan dari sisi pendapatan (*revenue policy*) dan kebijakan belanja (*expenditure policy*). Kebijakan belanja disusun berdasarkan kebutuhan

masyarakat yang didukung data dan fakta (*evidence based planning*) sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah. Sementara kebijakan pendapatan diharapkan mampu mendukung kebijakan anggaran untuk membiayai kebutuhan belanja.

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 hingga tahun 2024 diuraikan ke dalam substansi proporsi penggunaan anggaran dengan tujuan untuk melihat proporsi belanja yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan aparatur, dan analisis pembiayaan yang diuraikan ke dalam analisis sumber penutup defisit riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi penggunaan anggaran bertujuan untuk mendapatkan diskripsi tentang kebijakan pembelanjaan dan pembiayaan pengeluaran yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran daerah (belanja + pembiayaan pengeluaran). Kualitas belanja daerah dinilai semakin membaik apabila porsi belanja pegawai dalam APBD menunjukkan tren penurunan. Semakin kecil porsi belanja aparatur, semakin besar pula ruang fiskal untuk membiayai belanja yang lebih produktif, diantaranya belanja modal dan operasi yang secara langsung mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Undang - Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Data realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama periode Tahun 2020 hingga 2024 mencatat rata-rata persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran sedikit melampaui batasan tersebut yaitu sebesar 31,84 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi belanja daerah selama periode tersebut menjadi koreksi untuk perencanaan ke depan sesuai aturan perundang-undangan. Proporsi belanja pemenuhan aparatur periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.144.
Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
2020	671.430.409.146,00	1.911.394.127.884,00	35,13
2021	574.336.771.393,00	1.891.445.772.026,50	30,36
2022	536.632.469.662,00	1.725.039.755.268,00	31,11
2023	550.447.481.754,00	1.710.628.620.469,00	32,18
2024	565.881.118.537,00	1.860.872.130.232,00	30,41

Sumber: LRA Tahun 2020 s.d 2024 (Audited)

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, meskipun dengan persentase yang cenderung fluktuatif selama periode 2020-2024. Proporsi belanja tertinggi terdapat pada tahun 2020 mencapai 35,13 persen. Sedangkan proporsi belanja terendah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2024 sebesar 30,41 persen.

2.2.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit ataupun surplus yang terjadi dalam APBD. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Defisit/Surplus riil anggaran diperoleh dari pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Anggaran Kabupaten Aceh Besar tahun 2020-2021 berada pada posisi defisit. Namun pada tahun 2022 s.d 2024 terjadi surplus anggaran masing-masing mencapai Rp. 25.860.366.320 tahun 2022, kemudian Rp. 15.643.848.988 tahun 2023, dan tahun 2024 surplus tercatat sebesar Rp 1.716.832.796. Perkembangan surplus/defisit riil di Kabupaten Aceh Besar secara rinci dapat dilihat pada tabel Rata

Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sampai dengan 2024 di atas.

Dalam hal terjadi defisit APBD, maka pembiayaan ditetapkan untuk menutupi kekurangan tersebut, yang dapat bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Selama periode 2020 - 2024, SiLPA menunjukkan tren positif dan cukup fluktuatif. Tercatat bahwa SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 131.703.091.544, dan SiLPA terendah sebesar Rp. 36.103.024.334 terjadi pada tahun 2022.

2.2.3. Kerangka Pendanaan Daerah

Kerangka pendanaan daerah merupakan bagian dari kerangka keuangan daerah yang memuat analisis kemampuan daerah untuk membiayai belanja daerah, dengan tujuan untuk memastikan keselarasan antara target pembangunan daerah dan kemampuan anggaran daerah untuk membiayainya, mengidentifikasi kapasitas riil daerah dalam mengalokasikan dana untuk mendanai program-program pembangunan jangka menengah atau panjang, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyusunan rencana kinerja dan anggaran daerah.

Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kerangka pendanaan daerah disusun dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi:

- Pendapatan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- Belanja Daerah, terdiri dari pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.
- Pembiayaan Daerah, terdiri dari sumber pendanaan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melakukan penyusunan kerangka pendanaan daerah sebagai dasar dalam mengalokasikan anggaran ke berbagai pos belanja, memberikan arah kebijakan pengalokasian dan penggunaan dana secara lebih terarah sesuai prioritas pembangunan daerah, dan mempengaruhi

efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan desentralisasi fiskal.

Untuk menganalisis kerangka pendanaan, perlu dicermati terlebih dahulu jenis-jenis objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam struktur APBD sesuai kewenangan kabupaten, yang didukung oleh data realisasi anggaran dan neraca daerah periode 2020-2024. Data-data ini menjadi dasar dalam memproyeksikan kerangka pendanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk 5 (lima) tahun mendatang pada RPJMD 2025-2029, namun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, ditetapkan bahwa kerangka keuangan daerah diproyeksikan hingga tahun 2030.

2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan proyeksi hasil perhitungan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan mempertimbangkan tren, perkembangan historis dan asumsi dalam setiap komponen APBD periode sebelumnya, maka rincian proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Aceh Besar tahun 2025-2030 dijelaskan sebagai berikut.

A. Pendapatan Daerah

Hasil perhitungan proyeksi pendapatan Kabupaten Aceh Besar pada periode 2026-2030 menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh langkah antisipasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui optimalisasi pendapatan pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagai bagian dari strategi akan berakhirnya dana otonomi khusus Aceh pada tahun 2027 yang merupakan komponen pendapatan signifikan dari transfer Pemerintah Pusat sejak tahun 2008. Untuk melihat perkembangan pendapatan Kabupaten Aceh Besar dalam kerangka proyeksi 2026-2030, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Proyeksi BPKD Kabupaten Aceh Besar, diolah

Gambar 2.81 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2025-2030

Pada tahun 2026 pendapatan Kabupaten Aceh Besar diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 1,08 persen menjadi 1,81 triliun dari pendapatan tahun 2025 yang tercatat sebesar 1,83 triliun. Penurunan proyeksi pendapatan ini pada kelompok pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 19.833.526.500,-, terutama pada jenis pendapatan Pajak Daerah. Jika mencermati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterapkan mulai tahun 2025 seharusnya tidak berdampak pada penurunan pendapatan pajak kabupaten secara langsung, melainkan bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, termasuk kabupaten/kota, dalam jangka Panjang.

Namun realisasi pendapatan dari opsen pada masa transisi mungkin sedikit terhambat akibat isu-isu sosialisasi atau persepsi kenaikan pajak di masyarakat yang menyebabkan penundaan pembayaran, namun hal ini lebih bersifat tantangan implementasi awal, bukan dampak kebijakan jangka panjang yang direncanakan. Kondisi ini ditunjukkan dari perhitungan tren proyeksi yang terus meningkat oleh

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar hingga tahun 2030, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,18 persen.

A.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2026-2030 diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang signifikan, didorong oleh beberapa komponen pembentuknya, seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam memproyeksikan pendapatan dari sektor pajak, pendekatan yang dipakai yaitu melihat tren perkembangan yang stabil selama 3 (tiga) tahun terakhir (2022-2024), yang menunjukkan adanya kenaikan yang cukup konsisten. Berdasarkan proyeksi ini, penerimaan pajak Kabupaten Aceh Besar diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2030 dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 1,59 persen .

Penerimaan dari sektor pajak juga diperkirakan meningkat, seiring dengan kebijakan dari Pemerintah Aceh selama beberapa tahun terakhir terkait upaya pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Meskipun ini adalah pajak provinsi, namun hasilnya dibagi dengan pemerintah kabupaten/kota. Adapun jenis pajak daerah utama yang menjadi kontributor signifikan terhadap PAD Kabupaten Aceh Besar diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang sering kali menjadi salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang paling stabil dan besar. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pendapatan dari sektor properti dan transaksi tanah/bangunan, dimana Kabupaten Aceh Besar menjadi wilayah pembangunan perumahan dan permukiman yang cukup signifikan karena berbatasan langsung dengan ibukota provinsi Aceh. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga menjadi penyumbang pendapatan yang besar.

Penerimaan dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan juga meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata peningkatan masing-masing sebesar 4,05 persen, 0,42 persen, dan 2,16 persen. Pendapatan BLUD RSUD dan Ziswaf juga berkontribusi besar dalam peningkatan PAD setiap tahunnya.

Tabel 2.145.
Proyeksi Pendapatan Daerah Asli Daerah

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	177.844.173.500,00	181.962.593.175,00	185.787.616.494,00	188.681.561.072,00	191.018.741.649,00
4.1.01	Pajak Daerah	123.588.600.000,00	126.266.936.000,00	128.798.309.160,00	130.443.860.070,00	131.651.249.611,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.015.573.500,00	9.565.257.175,00	10.006.891.334,00	10.380.388.362,00	10.561.086.892,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000,00	6.550.000.000,00	6.580.000.000,00	6.600.000.000,00	6.610.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	38.740.000.000,00	39.580.400.000,00	40.402.416.000,00	41.257.312.640,00	42.196.405.146,00

Sumber : BPKD Aceh Besar Tahun 2025

A.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang menjadi penerimaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 2 (dua) kelompok utama yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : 1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan; 2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya.

Dengan memperhatikan tren penerimaan dari pendapatan transfer dalam 5 (lima) tahun terakhir yang cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,68 persen, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memproyeksikan perkiraan pendapatan transfer untuk periode 2026-2030 menggunakan pendekatan penerimaan tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.604.716.496.100,- setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat selama 5 (lima) tahun kedepan diproyeksikan sebesar Rp. 1.571.652.854.000,- setiap tahunnya. Proyeksi ini juga sudah memperhitungkan kenaikan sebesar 8 (delapan) persen kenaikan gaji pokok ASN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Proporsi Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan terdiri dari tiga komponen utama dengan uraian sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian daerah dari penerimaan pajak pusat dan penerimaan dari sumber daya alam, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta hasil sumber daya alam. Proporsi pembagian penerimaan PBB: 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah, yang kemudian 90% untuk daerah ini dibagi kembali misalnya 16,2% untuk provinsi, 64,8% untuk kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan. DBH sumber daya alam dibagi berdasarkan daerah penghasil dengan prinsip oleh asal (by origin).
2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer yang bersifat umum untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal antar daerah. Alokasi DAU didasarkan pada beberapa faktor seperti jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks pembangunan manusia. DAU bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara

daerah kaya dan daerah miskin.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu atau program prioritas yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan berdasar kebutuhan spesifik daerah dan biasanya memiliki syarat penggunaan dana yang lebih ketat daripada DAU.

Secara proporsional, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan, diikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang proporsinya lebih bervariasi tergantung kebijakan dan kebutuhan daerah. Perlu dicatat bahwa rincian alokasi persentase DBH kepada masing-masing daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, dan persentase tersebut bisa berbeda antar jenis pajak atau sumber daya alamnya. Pengaturan mekanisme alokasi Dana Perimbangan bertujuan untuk pemerataan, keadilan fiskal, dan dukungan terhadap pembangunan daerah.

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya terdiri dari komponen Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Penyesuaian. Tujuan transfer ini untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, mendukung pembangunan daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan khusus masing-masing, serta mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah.

Kelompok Pendapatan Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan Bantuan Keuangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga memproyeksikan besaran yang sama untuk pendapatan transfer ini setiap tahunnya sebesar Rp. 33.063.642.100,- berdasarkan pendekatan realisasi penerimaan tahun 2025.

Tabel 2.146.
Proyeksi Pendapatan Transfer Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2030

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.604.716.496.100,00	1.604.716.496.100,00	1.604.716.496.100,00	1.604.716.496.100,00	1.604.716.496.100,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.571.652.854.000,00	1.571.652.854.000,00	1.571.652.854.000,00	1.571.652.854.000,00	1.571.652.854.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.063.642.100,00	33.063.642.100,00	33.063.642.100,00	33.063.642.100,00	33.063.642.100,00

Tabel 2.147.
Proyeksi Pendapatan Transfer Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 - 2030

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.900.000.000,00	27.950.000.000,00	28.000.000.000,00	28.050.000.000,00	28.050.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.900.000.000,00	27.950.000.000,00	28.000.000.000,00	28.050.000.000,00	28.050.000.000,00

A.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana tren 5 (lima) tahun terakhir sangat fluktuatif. Pendapatan ini diperkirakan bersumber dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi), dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Pendapatan Hibah Dana BOS Pendapatan Dana Kapitasi JKN). Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memproyeksikan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 27.900.000.000,- dengan estimasi kenaikan setiap tahunnya sebesar 0,13 persen hingga tahun 2030, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.141 diatas.

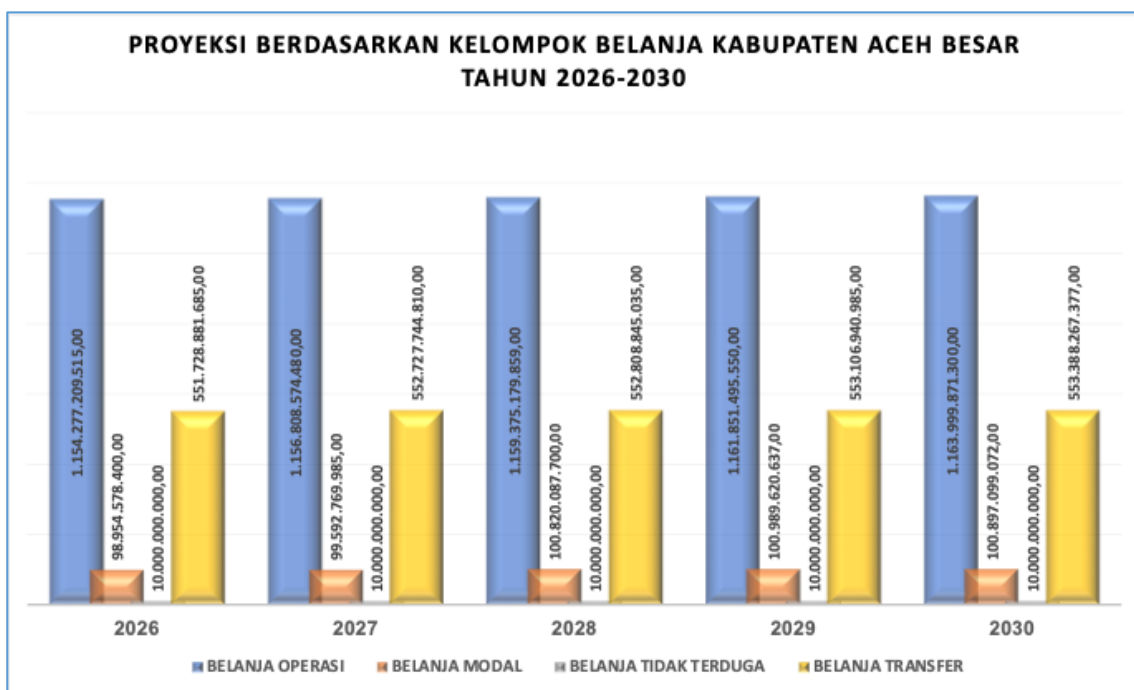
B. Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memproyeksikan belanja daerah pada periode 2026-2030 yang secara umum menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,18 persen. Meskipun Gambar di bawah ini, menunjukkan bahwa terjadi penurunan belanja pada tahun 2026 sebesar Rp. 39,33 milyar atau 2,12 persen dari total belanja tahun 2025. Proyeksi ini disesuaikan dengan perkembangan tren realisasi belanja periode sebelumnya 2020-2024, yang cenderung menunjukkan fluktuasi.



Gambar 2.82 Proyeksi Belanja Kabupaten Aceh Besar tahun 2025-2030

Kelompok belanja operasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,21 persen. Peningkatan ini terutama terjadi jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja subsidi, dengan perkiraan pertumbuhan tahunan masing-masing sebesar 0,21 persen, 0,68 persen, dan 2,53 persen. Proyeksi



Gambar 2.83 Proyeksi Berdasarkan Kelompok Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2030

pada jenis belanja pegawai ini telah mempertimbangkan kenaikan gaji pegawai sebesar 8 persen yang berlaku dari tahun 2024. Sementara itu, pada jenis belanja hibah dan belanja bantuan sosial diproyeksikan mengalami penurunan, masing-masing dengan rata-rata pertumbuhan minus 0,84 persen dan minus 4,24 persen.

Pada kelompok belanja modal, diproyeksikan menunjukkan tren peningkatan, meskipun rata-rata pertumbuhan tidak signifikan yaitu sebesar 0,49 persen. Proyeksi pertumbuhan belanja modal terutama terjadi pada jenis belanja modal peralatan dan mesin sebesar 0,50 persen, serta belanja modal gedung

dan bangunan sebesar 0,84 persen. Namun pada jenis belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya diproyeksikan cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing 0,01 persen, dan 0,51 persen.

Selanjutnya, kelompok Belanja Tidak Terduga (BTT) diproyeksikan akan dialokasikan sebesar 10 miliar setiap tahunnya hingga tahun 2030. Alokasi BTT ini digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat atau mendesak, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memproyeksikan kelompok belanja transfer, akan mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya dengan estimasi rata-rata pertumbuhan sebesar 0,08 persen. Pada jenis belanja bagi hasil dari komponen belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diperkirakan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,89 persen. Sedangkan pada jenis belanja bantuan keuangan dari komponen belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa, dan belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa tidak mengalami pertumbuhan dan diproyeksikan secara flat setiap tahunnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.148.

Proyeksi Berdasarkan Kelompok dan Jenis Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 - 2030

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
5	BELANJA DAERAH	1.814.960.669.600,00	1.819.129.089.275,00	1.823.004.112.594,00	1.825.948.057.172,00	1.828.285.237.749,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.154.277.209.515,00	1.156.808.574.480,00	1.159.375.179.859,00	1.161.851.495.550,00	1.163.999.871.300,00
5.1.01	Belanja Pegawai	684.685.900.600,00	691.532.759.600,00	698.448.087.150,00	701.940.327.600,00	703.363.372.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.836.640.700,00	363.205.460.400,00	364.113.474.149,00	364.477.587.500,00	360.832.811.700,00
5.1.04	Belanja Subsidi	450.000.000,00	450.000.000,00	454.500.000,00	468.180.000,00	496.818.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	85.274.012.615,00	81.010.312.000,00	75.707.856.000,00	74.345.114.850,00	81.779.626.400,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.030.655.600,00	20.610.042.480,00	20.651.262.560,00	20.620.285.600,00	17.527.242.800,00
5.2	BELANJA MODAL	98.954.578.400,00	99.592.769.985,00	100.820.087.700,00	100.989.620.637,00	100.897.099.072,00
5.2.01	Belanja Modal tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.204.961.700,00	32.365.986.585,00	32.527.816.500,00	32.690.455.600,00	32.853.907.870,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.951.675.500,00	38.710.709.000,00	39.484.923.200,00	39.623.723.063,00	39.227.485.832,00

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.186.672.200,00	27.904.805.400,00	28.183.853.600,00	28.051.703.090,00	28.191.961.600,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	611.269.000,00	611.269.000,00	623.494.400,00	623.738.884,00	623.743.770,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	551.728.881.685,00	552.727.744.810,00	552.808.845.035,00	553.106.940.985,00	553.388.267.377,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.878.360.350,00	14.877.223.475,00	14.958.323.700,00	15.256.419.650,00	15.537.746.042,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.976.803.000,00	13.920.697.640,00	13.957.634.500,00	14.218.380.750,00	14.481.637.450,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	901.557.350,00	956.525.835,00	1.000.689.200,00	1.038.038.900,00	1.056.108.592,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	537.850.521.335,00	537.850.521.335,00	537.850.521.335,00	537.850.521.335,00	537.850.521.335,00

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	422.529.527.000,00	422.529.527.000,00	422.529.527.000,00	422.529.527.000,00	422.529.527.000,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	115.320.994.335,00	115.320.994.335,00	115.320.994.335,00	115.320.994.335,00	115.320.994.335,00

Sumber: Proyeksi BPKD Kabupaten Aceh Besar.

C. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Kabupaten Aceh Besar diproyeksikan dalam kondisi tetap setiap tahun 2026 sampai tahun 2030. Hal ini disebabkan oleh penerimaan silpa yang ditargetkan tetap seiring dengan target realisasi belanja yang ingin di capai secara maksimal. Proyeksi Silpa yang akan dicapai setiap tahunnya berkisar antara tidak lebih dari 10 milyar. Untuk melihat proyeksi pembiayaan Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2026 sampai tahun 2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dalam APBD di perkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.

Tabel 2.149.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2030

Kode Rek.	URAIAN	APBD 2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	PEMBIAYAAN DAERAH	24,000,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,000,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000
	Pembiayaan Netto	24,000,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)						

Sumber : Proyeksi BPKD Kabupaten Aceh Besar , 2025

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, perhatian terhadap permasalahan yang menghambat pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan merupakan hal yang mendasar. Rumusan yang mendalam terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi, hingga dihasilkan isu strategis merupakan langkah untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, responsif dan efektif.

Capaian pembangunan daerah dapat diukur dengan indikator makro pembangunan di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, ketimpangan wilayah (indeks gini), dan inflasi. Tabel di bawah ini menunjukkan capaian indikator pembangunan dan gambaran kondisi dalam 10 tahun terakhir di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 2.150.
Capaian Indikator Makro Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Kabupaten/Provinsi/Nasional			Gambaran Kondisi
	Aceh Besar	Aceh	Nasional	
	2024	2024	2024	
PDRB Per Kapita (Juta)	42,99	43,78	78,62	PDRB Perkapita Aceh Besar lebih rendah dari PDRB Perkapita Provinsi Aceh dan Nasional
IPM	76,57	75,36	75,02	IPM Aceh Besar Tahun 2024 lebih tinggi dari IPM Provinsi Aceh dan IPM Nasional

Indikator Pembangunan	Kabupaten/Provinsi/Nasional			Gambaran Kondisi
	Aceh Besar	Aceh	Nasional	
	2024	2024	2024	
Laju pertumbuhan Ekonomi	4,95	4.66	5.03	Pada tahun 2024 ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar masih berada di bawah laju pertumbuhan nasional yang sebesar 5,20 % dan diatas laju pertumbuhan Propinsi Aceh yaitu sebesar 4,23 %.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,93	5.75	4,91	Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 sebesar 7,93 persen berada di atas angka pengangguran Propinsi Aceh 5.75 persen dan Angka Pengangguran Nasional 4,91 persen.
Persentase Penduduk miskin	13,21	14,23	9,79	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 sebesar 13,21 %, sudah berada dibawah persentase penduduk miskin Propinsi Aceh sebesar 14,23 % tetapi masih berada diatas Persentase Kemiskinan Nasional sebesar 9,79 %.
Ginie Rasio	0,262	0,294	0,379	Angka indeks Gini Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 berada dibawah dengan Propinsi Aceh yaitu sebesar 0,262 dan secara nasional Kabupaten Aceh Besar masih dibawah Nasional sebesar 0,379. Ini mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan kesenjangan walaupun dalam kategori sedang.

2.3.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana Masih Rendah

A. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

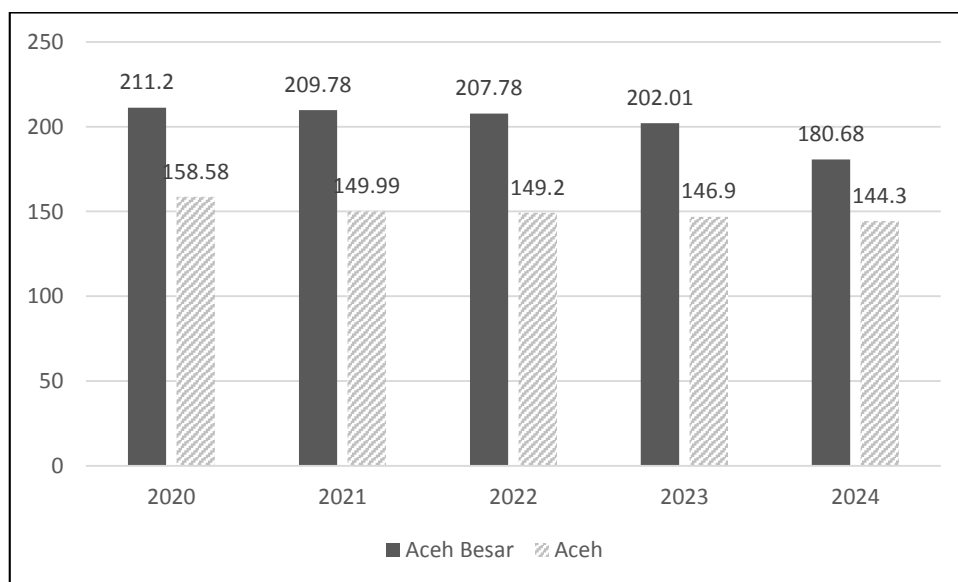
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pengukuran ketercapaian pembangunan lingkungan diukur menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini merupakan indeks pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja pengelolaan dan kinerja perlindungan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan dalam menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam melakukan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggunakan tiga komponen, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkategorikan nilai dari IKLH, di mana rentang nilai IKLH 90–100 dikategorikan “sangat baik”, rentang 70–90 dikategorikan “baik”, rentang 50–70 dikategorikan “sedang”, rentang 25–50 dikategorikan “kurang”, dan nilai kurang dari 25 dikategorikan “sangat kurang”.

Nilai IKLH dari tahun 2023 ke tahun 2024 terjadinya peningkatan dari 71.58 ke 84.71 dengan kategori baik. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkurangnya pencemaran yang masuk ke dalam lingkungan, upaya dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan melakukan penanaman pohon oleh pemerintah daerah maupun dari dinas terkait, Serta pengawasan lingkungan yang dilakukan di dinas

lingkungan hidup kabupaten Aceh Besar. peningkatan kesadaran masyarakat dengan turut menjaga kebersihan lingkungan, mempengaruhi perbaikan kualitas air di sejumlah daerah. Kualitas air sangat dipengaruhi oleh limbah atau sampah yang dibuang ke sungai atau perairan.

B. Kebencanaan

Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah yang rentan dan memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana Aceh, bencana yang berpotensi terjadi antara lain adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, epidemi dan wabah penyakit, tanah longsor, kegagalan teknologi, likuefaksi, dan tsunami. Pada tahun 2024 nilai indeks risiko bencana Kabupaten Aceh Besar mencapai 180,68 di mana angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (gambar 3.1) Walaupun demikian nilai indeks risiko bencana di Kabupaten Aceh Besar masih masuk dalam kategori tinggi dan masih berada di atas provinsi.



Gambar 2.84 Perbandingan IRBI Kabupaten Aceh Besar Dan Aceh Tahun 2020-2024

2.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar Belum Maksimal dan Fluktuatif

A. Pertumbuhan Ekonomi

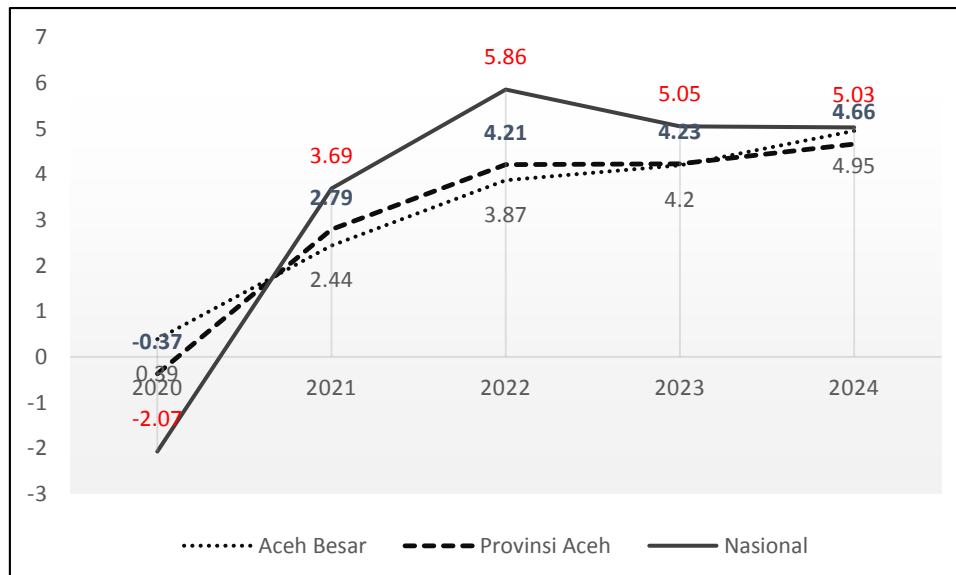
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar dalam satu dekade terakhir mengalami dinamika yang cukup fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar tercatat berada **di** atas rata-rata Provinsi Aceh, namun masih di bawah rata-rata nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan, meskipun belum sepenuhnya sejajar dengan kinerja ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar justru mengalami penurunan, dan berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh maupun nasional. Kondisi ini mencerminkan mulai melemahnya kinerja sektor-sektor ekonomi utama di daerah. Selanjutnya, pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda dan menyebabkan kontraksi ekonomi secara nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar turut mengalami penurunan yang signifikan. Namun demikian, penurunan tersebut masih lebih ringan dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional, yang disebabkan oleh masih bertahannya sektor pertanian sebagai penyangga utama perekonomian daerah.

Sejak tahun 2021 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi Aceh Besar mulai menunjukkan tren pemulihan, seiring dengan mulai pulihnya aktivitas sosial dan ekonomi pasca pandemi. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi daerah masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Aceh dan Nasional, menandakan perlunya strategi yang lebih agresif dalam mendorong sektor-sektor produktif.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur ekonomi Kabupaten Aceh Besar didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor konstruksi. Ketiga sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap perekonomian daerah. Namun, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan pada ketiga sektor tersebut cenderung fluktuatif dan mengalami perlambatan. Hal ini menjadi indikasi munculnya gejala deindustrialisasi dini, yaitu kondisi ketika produktivitas sektor industri

menurun dan sektor manufaktur tidak lagi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik.

Gambar 2.85 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Periode Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan hasil telaah dokumen dan Focus Group Discussion (FGD), perlambatan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya daya saing industri lokal, serta rendahnya realisasi investasi, yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja dan meningkatnya tingkat pengangguran. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya angkatan kerja, masih belum memenuhi standar dan kualifikasi pasar kerja yang semakin kompetitif.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dan penyerap tenaga kerja juga menghadapi tantangan serius. Kurangnya inovasi, akses permodalan, dan kapasitas produksi menjadi hambatan utama yang menghalangi peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM yang berorientasi pada kewirausahaan (entrepreneurship) menjadi sangat penting, guna membuka peluang inovasi,

menciptakan pasar baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selain sektor industri, Kabupaten Aceh Besar juga memiliki potensi besar pada sektor berbasis sumber daya alam (SDA), seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta peternakan. Sayangnya, produktivitas sektor-sektor ini masih stagnan dan belum menunjukkan performa yang optimal. Beberapa penyebab utama di antaranya adalah:

- 1) Kapasitas kelembagaan sektor yang belum kuat,
- 2) Operasional usaha tani dan nelayan yang masih tradisional,
- 3) Kualitas hasil produksi yang belum mampu bersaing di pasar.

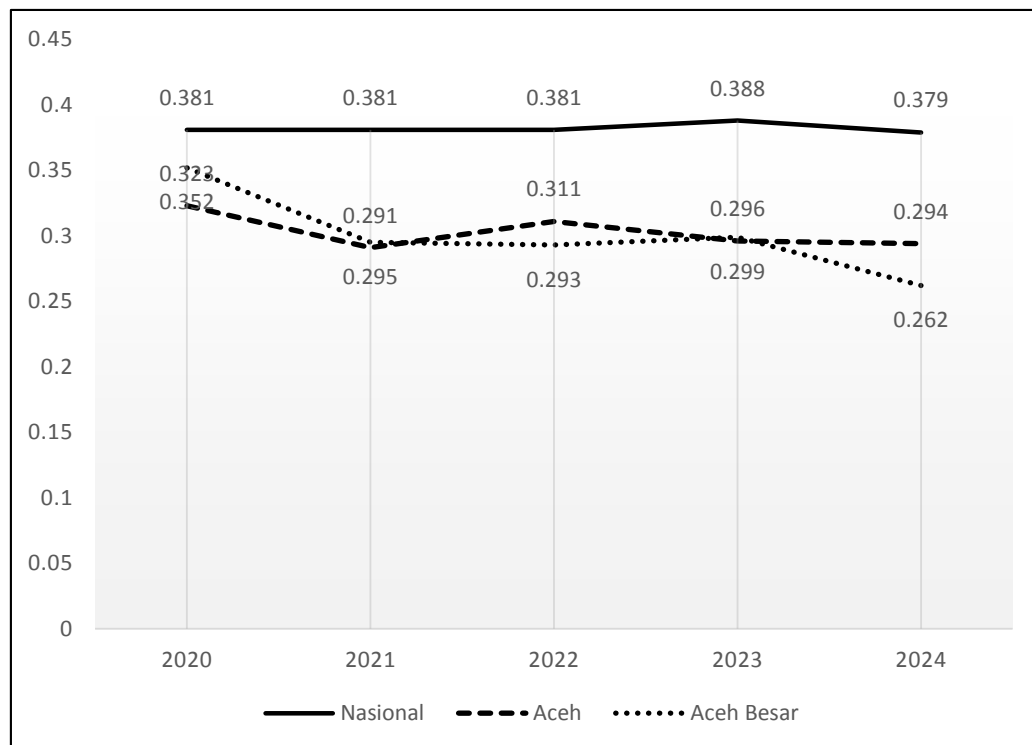
Salah satu faktor penting yang memengaruhi rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah terbatasnya ketersediaan air irigasi, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun, serta minimnya regenerasi petani muda. Sektor pertanian dan kelautan/perikanan sebenarnya memiliki peran strategis tidak hanya dalam mendukung kesejahteraan petani dan nelayan, tetapi juga sebagai pilar ketahanan pangan daerah serta pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang bergizi bagi masyarakat.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi untuk memperkuat sektor-sektor produktif, mendorong investasi, meningkatkan kapasitas SDM, serta membangun ekosistem usaha yang kondusif dan berdaya saing tinggi.

B. Indeks Gini (Ketimpangan pendapatan dan Regional)

Permasalahan lainnya adalah kesenjangan pembangunan ekonomi. Kesenjangan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Berdasarkan data BPS capaian Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 dalam kategori rendah yaitu 0,296, sementara Aceh sebesar 0,299 dan Nasional 0,388, tetapi diperlukan upaya untuk menurunkan ketimpangan. Ketimpangan dipicu oleh nilai tambah sektor pertanian yang rendah sementara industri padat modal yang menyerap

sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah tinggi. Produktivitas tenaga kerja yang rendah yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang rendah di beberapa sektor (pertanian, penyedia makan minum) akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat alias persentase penduduk miskin.

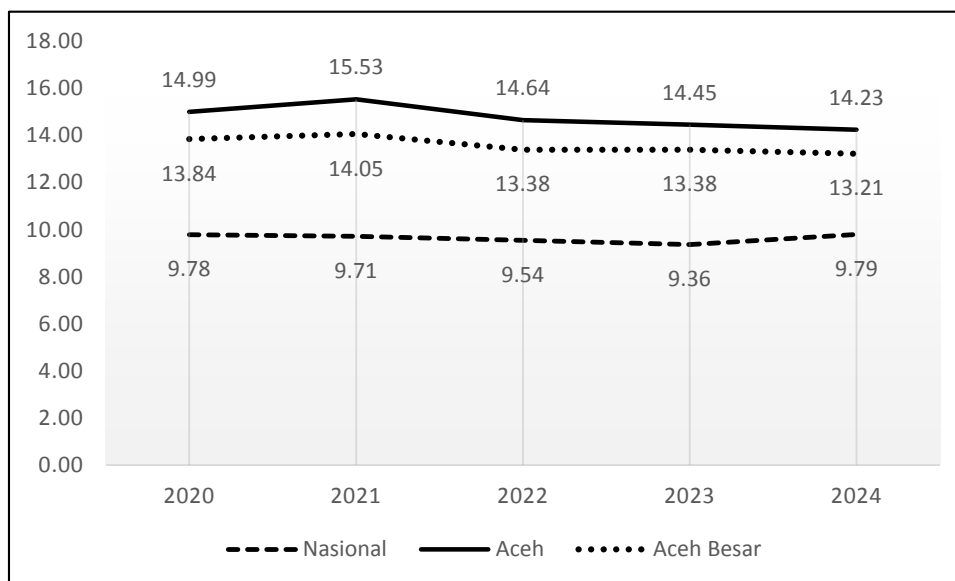


Gambar 2.86 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional (Ketimpangan Pendapatan) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

C. Tingkat Kemiskinan

pertumTingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator makroekonomi diharapkan terus mengalami penurunan kedepannya. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Besar selama tahun 2020 - 2024 memiliki tren yang menurun. Tingkat kemiskinan meningkat hingga 14,05 pada tahun 2021 persen dan kembali menurun hingga tahun 2024 sebesar 13,21 persen, sementara di kemiskinan di Aceh sebesar 14,23 persen dan Nasional 9,79 persen. Hal ini Penyebabnya adalah terdapat penduduk usia produktif dengan

pendapatan rendah, dampak dari pandemi, angka putus sekolah di tingkat SD - SMP yang meningkatkan TPT.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2.87 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Kabupaten Aceh Besar masih mengalami permasalahan tingginya angka kemiskinan yang mencapai 14,05 persen yang merupakan di atas rata-rata nasional serta juga diatas rata-rata Aceh, ditambah dengan dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020), namun pada tahun 2023 persentase kemiskinan masih di posisi tahun 2022 yaitu sebesar 13,87. Selain persoalan persentase kemiskinan yang tinggi, Kabupaten Aceh Besar mengalami kemiskinan ekstrem adalah dengan memastikan terpenuhinya layanan dasar, jaminan dan perlindungan sosial, serta pendapatan minimal di atas garis kemiskinan ekstrem (setara 1,9 USD) per hari.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan

pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berorientasi mengembangkan Aceh Besar menjadi daerah maju dan sejahtera dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi dan lain -lain.

Pemerintah Aceh Besar perlu mewaspadai kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini. Walaupun secara statistik tahun 2023 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 58,94 ribu orang atau 13,87 persen, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis.

Sekarang kemiskinan sudah memberikan dampak yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Kemiskinan memang dapat menyebabkan beragam masalah tapi untuk sekarang masalah yang paling penting adalah bagaimana caranya anak-anak kecil yang sama sekali tidak mampu dapat bersekolah dengan baik seperti anak-anak lainnya. Masalah utama itulah yang harus dipecahkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar karena jika masalah itu tidak dapat dibereskan maka akan muncul masalah-masalah baru yang lebih banyak lagi, dan juga banyak orang-orang miskin terkena penyakit tapi mereka sulit untuk berobat ke dokter karena mahal, walapun pemerintah sudah memberikan kartu kemiskinan tapi itu tidak menjamin di rumah sakit.

Upaya penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. Pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah, kalangan swasta, kalangan organisasi kemasyarakatan, kalangan universitas dan akademisi, kalangan politik dan tentunya masyarakat sendiri perlu membangun visi yang sama, pola pikir dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kemitraan yang saling menguatkan inilah maka berbagai sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik. Pemerintah sangat mendukung setiap prakarsa dan inovasi yang dijalankan serta dikembangkan

oleh semua pihak dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ini.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meningkatkan sarana prasarana pertanian, perikanan termasuk pasar rakyat dan pasar induk perlu dioptimalkan serta dikembangkan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Adapun cara pendekatan yang dipergunakan di dalam mencapai sasaran di atas adalah pendekatan yang secara menyeluruh, dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara wilayah yang komprehensif. Berkenaan dengan permasalahan diatas dipergunakan beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan, antara lain.

- a. kebijaksanaan umum yang ditujukan untuk menciptakan iklim, suasana, serta kerangka pengambilan keputusan secara menyeluruh sedemikian rupa sehingga kegiatan pembangunan yang bersifat intensif tenaga kerja dapat lebih mudah terwujud. Di bidang ekonomi-keuangan peralatan yang dipergunakan antara lain perkreditan, perpajakan, dan bea masuk.
- b. Kebijaksanaan sektor yang dituju adalah agar pilihan produk dan pilihan cara produksi di masing-masing sektor bersifat padat karya baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Kebijaksanaan untuk meningkatkan sektor pertanian. Kebijaksanaan ini merupakan langkah-langkah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani dan usaha peningkatan mutu tenaga kerja.
- d. Kebijaksanaan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam hubungan ini ditingkatkan perencanaan dan pelaksanaan usaha perluasan kesempatan kerja berdasarkan perencanaan daerah yang terpadu khususnya di daerah-daerah padat penduduk, minus dan miskin dan daerah-daerah pemukiman baru. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkatkan partisipasi golongan masyarakat yang langsung terlihat di dalam usaha perluasan lapangan kerja. Dengan demikian diciptakan satu kebijaksanaan perencanaan tenaga kerja yang menyeluruh.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahun membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan itu tenaga kerja juga akan bertambah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Aceh Besar selama periode tahun 2019 – 2024 cenderung naik dari 7.62 persen di tahun 2019 menjadi 7.7 persen atau setara dengan 14,291 orang di tahun 2021, berada di bawah rata-rata nasional sebesar 6,49 persen. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar tahun 2019 lebih rendah 0,29 point jika dibandingkan tahun 2024.

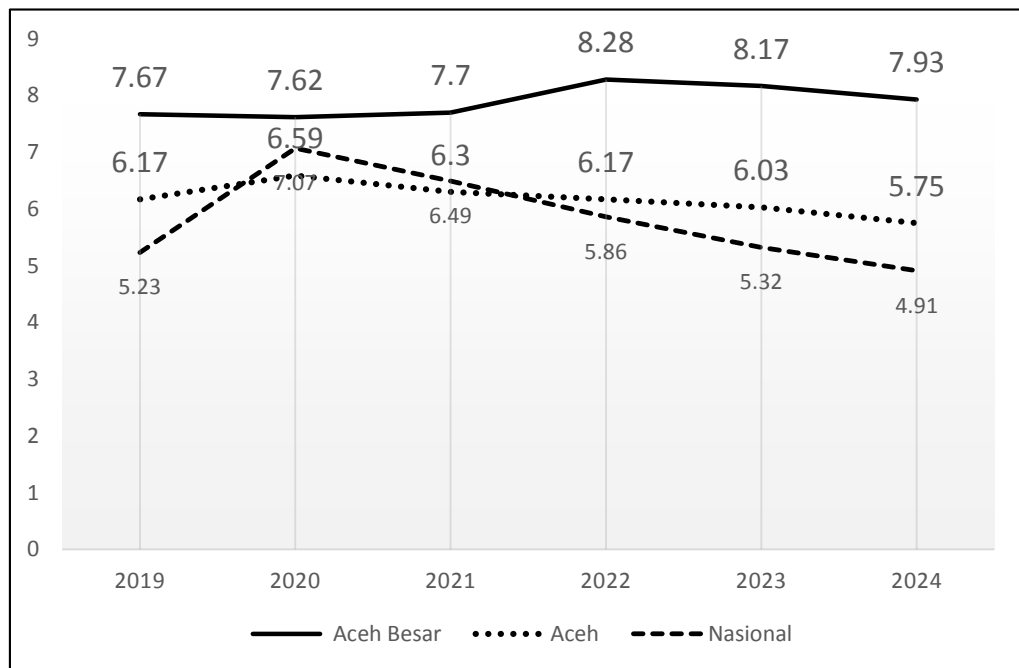
Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pada Tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,32 persen. Dalam kurun waktu 6 tahun (2017-2021), Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 0,79 persen lebih tinggi dari penurunan pada tingkat nasional yang justru mengalami kenaikan yaitu - 0,56 persen pada periode yang sama.

Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Indonesia selama tahun 2017 sampai dengan 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Besar selalu berada di rata-rata nasional. Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa lapangan usaha perekonomian Kabupaten Aceh Besar, menjadi faktor pendorong (*driving forces*) dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 yaitu sebesar 61,67 relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata TPT Aceh yang mencapai 31,78 persen.

Pemerintah Aceh Besar akan melakukan alokasi anggaran untuk investasi yang dapat menerapkan tenaga kerja. Dengan penambahan investasi baru tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini terjadi karena

pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang bertahap. Peningkatan inventaris sumber daya manusia secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mendorong pada peningkatan Produk Domestik Bruto Riil yang ditunjukkan oleh peningkatan stok kapital, neraca perdagangan dan konsumsi rumah tangga.

Kualitas tenaga kerja ditentukan oleh pendidikan formal yang dimiliki, pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja. Pendidikan merupakan investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan human capital melalui pendidikan akan mendorong peningkatan produktivitas kerja, di mana peningkatan produktivitas tersebut pada gilirannya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, pendidikan juga diperlukan dalam peningkatan teknologi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara mikro individu maupun rumah tangga, pendidikan (dan juga pelatihan) akan meningkatkan keahlian, kompetensi, kinerja dan daya saing individu dalam dunia kerja yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan upah dan pendapatan.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2.88 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 – 2024

Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Besar yaitu 8,17 persen (tahun 2023) dan berada di atas TPT Aceh 6,03 persen dan Nasional 5,32 persen dan kemudian turun Kembali di tahun 2024 menjadi 7.93 persen..

Isu strategis penciptaan lapangan kerja disebabkan semakin tingginya dan beragamnya lulusan pendidikan, baik pendidikan menengah, kejuruan maupun pendidikan tinggi (Universitas, politeknik, poltekkes dan lain lainnya) membutuhkan lapangan kerja yang memadai. Maka perlu peningkatan kompetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan pelatihan/training pada lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan pengusaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja/ usaha baru, peningkatan serta mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebelumnya kurang berfungsi, mengundang investor untuk berinvestasi, mengusahakan keamanan yang kondusif dan melaksanakan kerja sama

investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing. Mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra sentra industri yang telah ada dan mempromosikan kawasan industri khusus. Sasaran yang ingin dicapai adalah mengurangi angka pengangguran dari 7,62 pada tahun 2021 menjadi 5 persen pada tahun 2026, begitu juga halnya dapat menurunkan angka kemiskinan dari 14, 05% tahun 2021 turun hingga minimal 12 persen pada tahun 2026.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Penduduk miskin dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu penduduk miskin yang berada dalam angkatan kerja dan penduduk miskin yang berada di luar angkatan kerja. Penduduk miskin yang berada di luar angkatan kerja biasanya memiliki ketergantungan secara ekonomi terhadap penduduk yang berada dalam angkatan kerja. Sedangkan penduduk miskin yang berada dalam angkatan kerja terbagi dua yaitu penduduk miskin yang bekerja dan penduduk miskin yang tidak bekerja. Penduduk miskin yang tidak bekerja, sangat jelas bahwa kemiskinannya disebabkan ketiadaan pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama dan di negara berkembang seperti Indonesia yang tidak memiliki jaminan asuransi bagi penganggur, jumlah kelompok ini tidak begitu besar. Sebaliknya yang paling menarik adalah penduduk.

Penduduk miskin yang bekerja dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu kelompok setengah penganggur, pekerja paruh waktu dan kelompok yang bekerja penuh. Setengah penganggur adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu tetapi masih mencari pekerjaan,

sedangkan pekerja paruh waktu pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu dan tidak mencari pekerjaan. Selebihnya adalah pekerja penuh yaitu pekerja dengan jam kerja di atas 35 jam seminggu. Baik penduduk miskin yang setengah menganggur, bekerja paruh waktu maupun yang bekerja penuh, ketiganya memiliki ciri upah/pendapatan yang diterima pekerja cukup rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah serta umumnya bekerja di sektor informal. Kondisi inilah yang diduga diantara penyebab mereka terjebak dalam kondisi kemiskinan.

Miskin yang bekerja di mana pekerjaan yang dimilikinya tidak mampu memberikan penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Kelompok terakhir ini disinyalir memiliki proporsi terbesar dari seluruh penduduk miskin yang ada.

Penduduk miskin yang bekerja dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu kelompok setengah penganggur, pekerja paruh waktu dan kelompok yang bekerja penuh. Setengah penganggur adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu tetapi masih mencari pekerjaan, sedangkan pekerja paruh waktu pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu 35 jam dalam seminggu dan tidak mencari pekerjaan. Selebihnya adalah pekerja penuh yaitu pekerja dengan jam kerja di atas 35 jam seminggu. Baik penduduk miskin yang setengah menganggur, bekerja paruh waktu maupun yang bekerja penuh, ketiganya memiliki ciri upah/pendapatan yang diterima pekerja cukup rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah serta umumnya bekerja di sektor informal. Kondisi inilah yang diduga diantara penyebab mereka terjebak dalam kondisi kemiskinan.

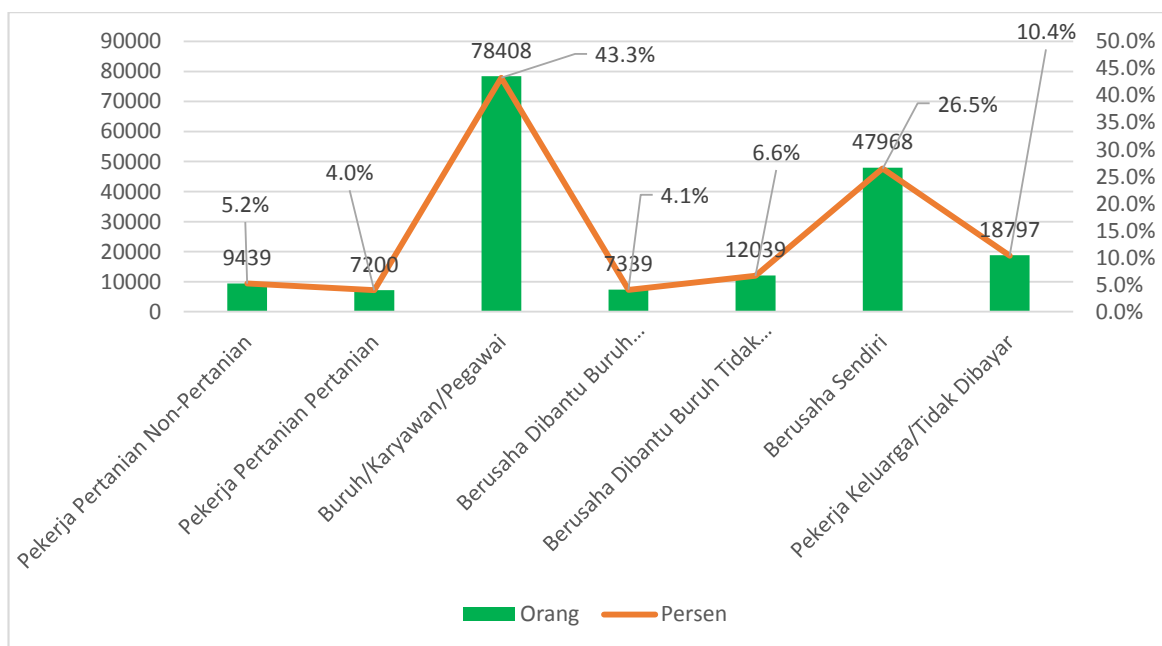
Tabel 2.151.
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2024

No	Lapangan Usaha	Aceh Besar	Aceh
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, forestry, and Fishing	55,672	946,649
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1,013	23,448
3	Industri Pengolahan/Manufacturing	15,778	176.000
4	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity dan Gas	897	4,998
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang/ Water supply; Sewerage, waste management and Remediation Activities	228	4,435
6	Konstruksi/Construction	19,312	178,702
7	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale dan Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	27,194	358,557
8	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	8,035	84,418
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	12,936	136,548
10	Informasi dan komunikasi/Information and Communication	643	9,379
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	222	12,515
12	Real Estat/ Real Estate Activities	202	1,495
13	Jasa Perusahaan/ Business Activities	4,202	24,597

No	Lapangan Usaha	Aceh Besar	Aceh
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence, Compulsary Social Security	13,547	160,113
15	Jasa Pendidikan/ Education	16,246	174.250
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	5,978	63,201
17	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	7,471	87,04
	Jumlah total	189,576	2.447.345

Sumber data : BPS, 2024

Begitu halnya status usaha penduduk di Kabupaten Aceh besar. Mayoritas penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Besar berstatus pada tahun sebagai buruh/karyawan dengan persentase sebesar 43 persen atau 78.408 jiwa. Kemudian status pekerjaan terbanyak kedua adalah berusaha sendiri sebesar 27 persen atau 47.968 Jiwa, dan yang ketiga adalah pekerja bebas sebanyak 18.226 jiwa atau 11 persen. Kemudian, 10 persen penduduk Kabupaten Aceh Besar memiliki status pekerjaan utama sebagai pekerja keluarga/tak dibayar atau sebanyak 18.797 jiwa, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 12.039 jiwa (7%) dan berusaha dibantu buruh tetap sebesar 4 persen atau sebesar 7.339 Jiwa. Sedangkan 4 persen penduduk memiliki status pekerjaan sebagai pekerja bebas pertanian dan 5 persen pekerja bebas non pertanian.

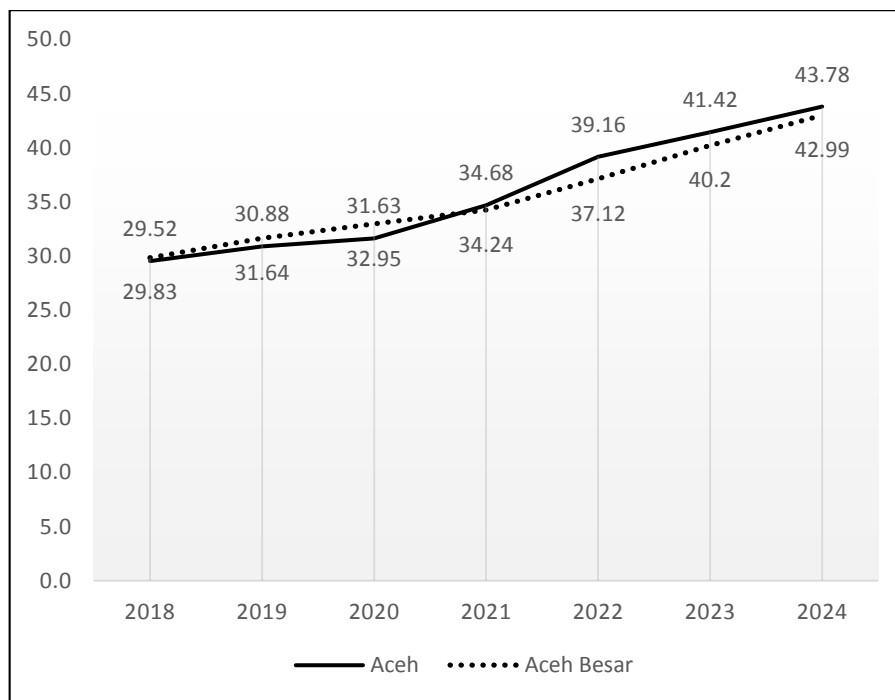


Gambar 2.89 Status pekerjaan penduduk di Kabupaten Aceh Besar

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Besar masuk dalam status pekerjaan dan tingkat Pendidikan yang rendah, hal ini akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan yang diperoleh. Dengan kualifikasi pendidikan seperti itu, maka upah yang diperoleh cenderung akan relatif rendah dan kesejahteraan yang minim.

E. PDRB Per Kapita

Kabupaten Aceh Besar memiliki PDRB per kapita pada tahun 2023 sebesar Rp.40,20 juta menunjukkan posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita nasional dan Provinsi Aceh. PDRB Aceh pada tahun 2023 mencapai Rp 41,42 juta, namun data spesifik per kapita untuk provinsi ini tidak tersedia dalam sumber yang ada dan untuk PDRB per kapita nasional sebesar Rp. 75,00 juta menunjukkan tingkat pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan Aceh Besar dan Aceh secara keseluruhan.



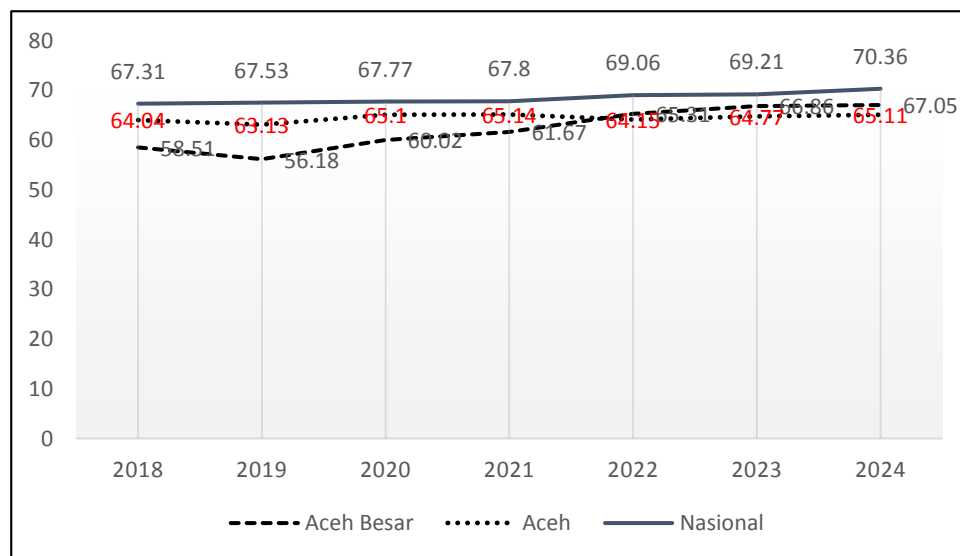
Gambar 2.90 PDRB Per Kapita Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024

F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas menurut lapangan usaha ekonomi yang dikelola masyarakat, yang diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran.

Berdasarkan lapangan usaha pada periode Agustus 2017 – Agustus 2021, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Besar adalah lapangan usaha jasa kemasyarakatan pertanian, dan lapangan usaha manufaktur, yang paling rendah menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha listrik, gas dan air. Tabel berikut memberikan informasi mengenai proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha. Secara perbandingan jenis kelamin, pada tahun 2021 penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Besar tergolong menjadi pengangguran terbuka dengan persentase lebih tinggi (52%) dibandingkan penduduk perempuan (48 persen).

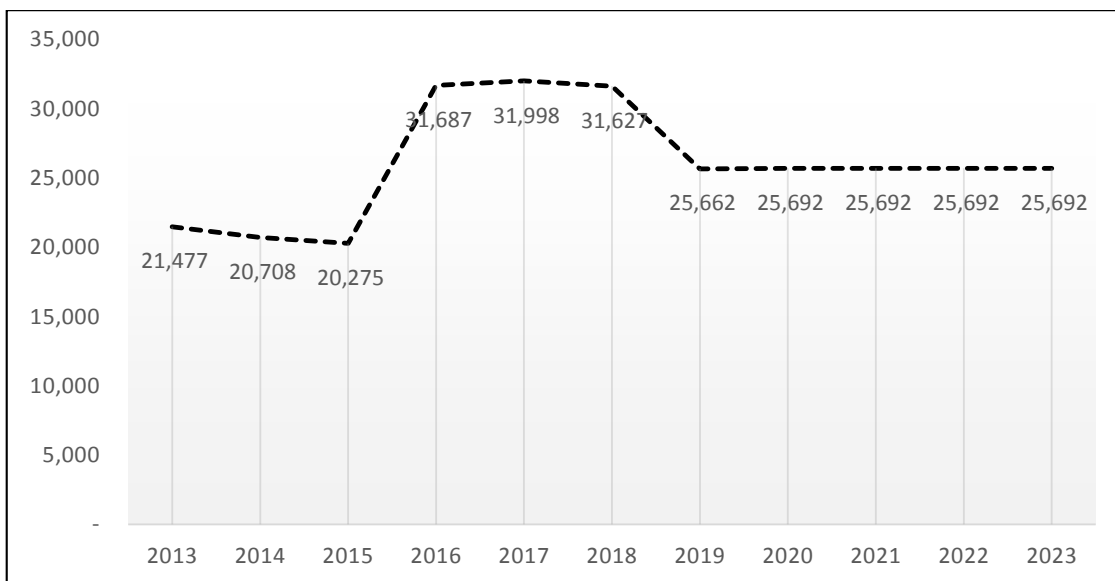
Jika dilihat dari lapangan pekerjaan utama, sektor jasa menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan persentase sebesar 59 persen (107.638 Jiwa). Sektor selanjutnya adalah sektor pertanian dengan persentase sebesar 22 persen (40.156 Jiwa). Sedangkan penduduk dengan sektor lapangan kerja utama di sektor manufaktur memiliki jumlah paling sedikit yaitu sebesar 33.396 jiwa (19%).



Gambar 2.91 TPAK Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024

G. Pertanian

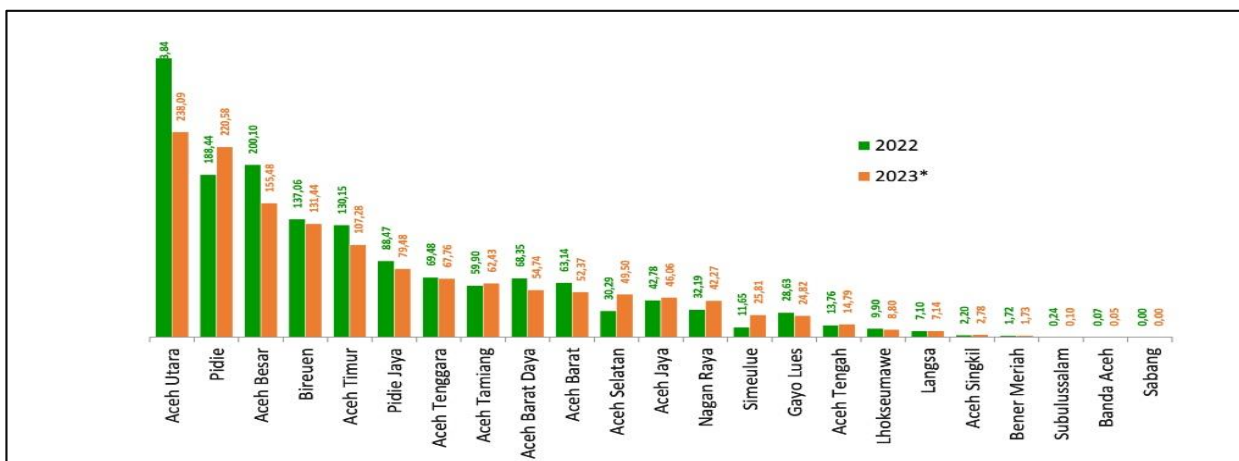
Ketersediaan pangan menjadi salah satu permasalahan pertanian mengingat produksi padi di Kabupaten Aceh dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi capaian karena tingginya ketergantungan pada faktor alam. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh meningkat hingga 2023 dengan tingkat rata-rata pertumbuhan mencapai 1,6 persen pertahun. Apabila laju pertumbuhan terus meningkat seperti tahun 2023, memungkinkan jika ada defisit dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga apalagi jika produksi padi cenderung fluktuatif.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.92 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 – 2023

Pada tahun 2019, ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh mengalami penurunan secara signifikan yang disebabkan oleh merosotnya total produksi padi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan luas lahan pertanian pada tahun 2013-2023 (Gambar 3.15) serta kemarau panjang tahun 2023 yang membuat musim tanam mundur dan penurunan luas tanam.

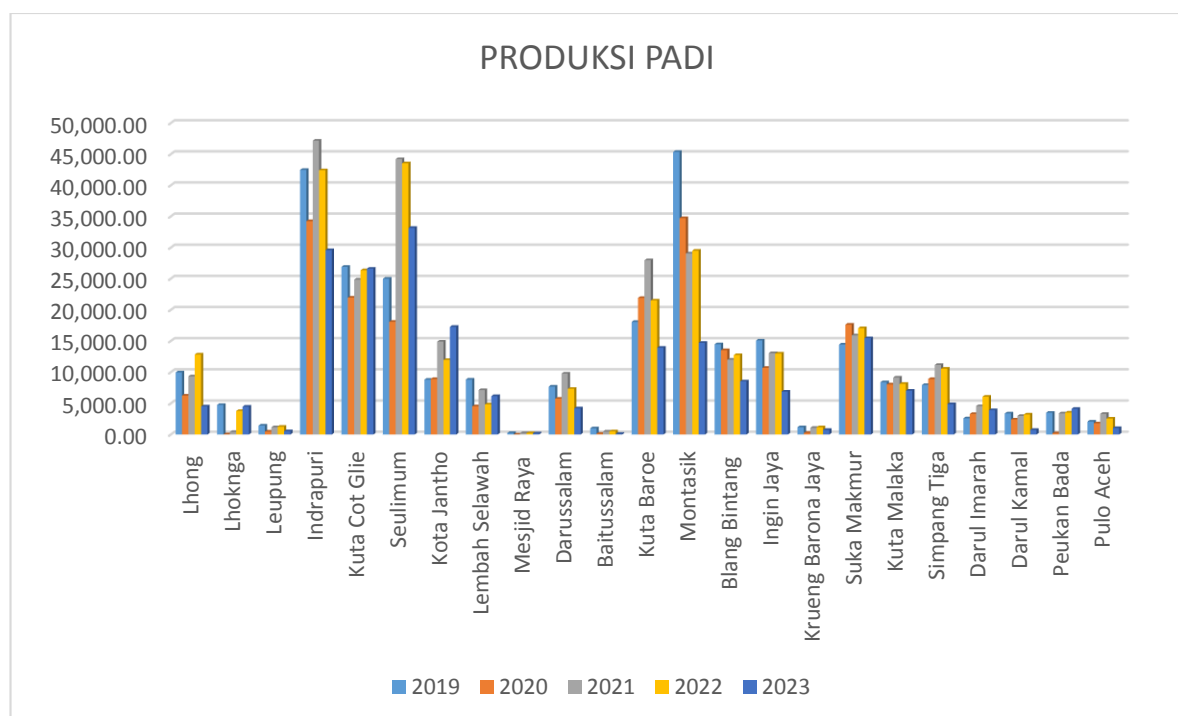


Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.93 Produksi Padi di Provinsi Aceh Menurut Kab/Kota (ribu ton GKG), 2023

Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah kabupaten ke tiga tertinggi produksi padi (GKG) tertinggi pada 2023 adalah Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Besar. Aceh Besar salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi besar terhadap pertanian di Aceh khususnya padi. Hal ini disebabkan karna selain jenis tanah yang subur untuk bertani, jumlah lahan sawah di Kabupaten Aceh tersebut cukup luas.

Peningkatan Produksi padi yang cukup besar pada 2023 terjadi di beberapa wilayah sentra produksi padi seperti Kecamatan Lhoknga, Kota Jantho, Lembah Seulawah, Kuta Cot Glie, Peukan Bada. Di sisi lain, terdapat beberapa Kecamatan yang mengalami penurunan produksi padi cukup besar, misalnya Kecamatan Lhoong, Leupung, Indrapuri, Seulimeum, Mesjid Raya, Darussalam, Baitussalam, Kuta Baroe, Montasik, Blang Bintang, Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya, Suka Makmur, Kuta Malaka, Simpang Tiga, Darul Imarah, Darul Kamal dan Pulo Aceh.



Sumber : Dinas Pertanian Aceh Besar (diolah) 2025

Gambar 2.94 Produksi Padi Per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023

Selain itu, produksi padi masih sangat tergantung pada perubahan cuaca seperti kemarau panjang dan curah hujan tinggi terutama untuk lahan sawah irigasi teknis. Teracatat banyaknya 16.904 Ha atau 65.79 persen dari luas sawah di kabupaten Aceh Besar tercatat masih tergolong sebagai lahan pertanian tadah hujan yaitu sebanyak 8.770 Ha atau 34.14 persen dari luas sawah di kabupaten Aceh Besar. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 610 Tahun 2022 tentang Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 maka luas lahan irigasi teknis dan tadah hujan sebagai berikut.

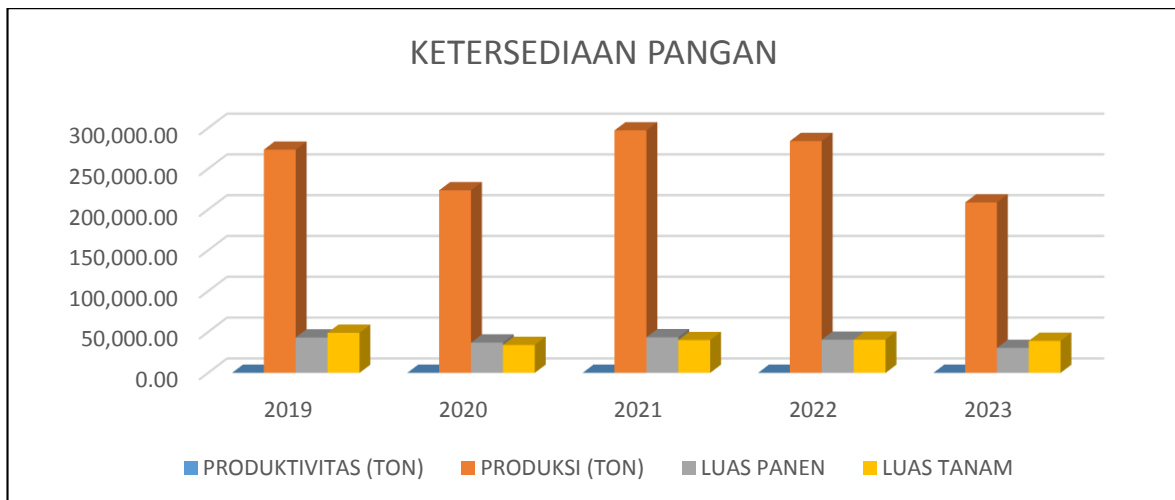
Tabel 2.152.
Luas Lahan Irigasi Teknis dan Tadah Hujan Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2024

No	Kecamatan	Lahan Baku Sawah (Ha)					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)				
		Irigasi Teknis	Irigasi Non Teknis	Tadah Hujan	Rawa Lebak	Total	Irigasi Teknis	Irigasi Non Teknis	Tadah Hujan	Rawa Lebak	Total
1	Baitussalam	-	-	71,51	-	71,51	-	-	57,05	-	57,05
2	Blang Bintang	1.015,69	73,21	16,69	-	1.105,59	1015,685745	73,21	16,69	-	1.105,59
3	Darul Imarah	-	-	555,40	-	555,40	-	-	460,46	-	460,46
4	Darul Kamal	0,01	-	404,79	-	404,80	0,007472	-	404,79	-	404,80
5	Darussalam	447,20	-	279,08	-	726,29	424,905973	-	232,12	-	657,03
6	Indrapuri	1.927,23	229,55	813,91	-	2.970,68	1922,381994	229,29	805,74	-	2.957,41
7	Ingin Jaya	609,97	326,73	165,10	-	1.101,80	517,999847	257,82	136,82	-	912,64
8	Kota Jantho	251,17	153,38	563,91	-	968,46	244,364169	149,04	556,66	-	950,06
9	Krueng Barona Jaya	-	23,20	40,28	-	63,48	-	18,76	37,02	-	55,78
10	Kuta Baro	1.647,49	1,33	18,84	2,23	1.669,88	1.643,22	1,32	18,84	2,21	1.665,60
11	Kuta Cot Glie	511,46	3,61	2.064,55	-	2.579,61	501,705283	3,61	2.028,15	-	2.533,46
12	Kuta Malaka	216,99	191,47	45,98	-	454,44	216,993638	191,47	45,98	-	454,44
13	Lembah Seulawah	190,42	133,74	48,23	-	372,39	188,333049	130,43	47,82	-	366,58
14	Leupung	-	53,74	45,11	-	98,85	-	50,43	39,67	-	90,10
15	Lhoknga	-	-	733	-	732,86	-	-	729,58	-	729,58
16	Lhoong	-	669,00	61,29	-	730,29	-	655,60	60,26	-	715,86
17	Mesjid Raya	-	-	32	-	32,09	-	-	32,09	-	32,09
18	Montasik	1.838,15	5,63	62,89	-	1.906,68	1.838,15	5,63	62,71	-	1.906,50
19	Peukan Bada	-	-	348	-	347,84	-	-	308,83	-	308,83
20	Pulo Aceh	-	-	256	-	256,03	-	-	239,93	-	239,93
21	Seulimeum	775,55	1.941,50	543,56	-	3.260,60	775,03	1.936,46	527,33	-	3.238,81
22	Simpang Tiga	99,64	256,14	212,64	-	568,43	99,64	256,14	212,64	-	568,43
23	Sukamakmur	692,69	53,84	71,15	-	817,68	691,77	53,84	71,15	-	816,76
Grand Total		10.223,65	4.116,07	7.453,73	2,23	21.795,68	10.080,19	4.013,04	7.132,34	2,21	21.227,79

Selain itu, pergeseran cuaca juga mengakibatkan serangan hama dan penyakit tumbuhan karena perubahan waktu pola tanam serempak. Perubahan iklim akibat pemanasan global berperan dalam memicu eksistensi OPT di alam.

Fluktuasi suhu dan kelembaban udara mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan OPT. Perubahan ini dapat memengaruhi status OPT di lapangan, penggunaan benih yang tidak bersertifikasi, penanaman yang tidak serentak dan penggunaan pestisida yang berlebihan juga berdampak bagi perkembangan hama dan penyakit pada tanaman padi yang berdampak pada penurunan produksi padi di Kabupaten Aceh Besar. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman padi di Kabupaten Aceh Besar yaitu Penyakit Blast, Penyakit Kresek, Penyakit HDB (hawa daun bakteri), Penggerek Batang, Hama putih palsu, Hama Putih Walang sangit dan Hama Wereng Coklat. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian menuju non-pertanian semakin pesat menyebabkan lahan yang ditanami semakin sempit. Luas rata-rata penguasaan tanah per rumah tangga pertanian, yang berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan di mana rata-rata penguasaan tanah di Kabupaten Aceh Besar diperkirakan hanya mencapai 0,2 hektar per rumah.

Penurunan produksi padi secara lokal nyatanya berdampak pada melemahnya keterjangkauan/ akses pangan dan pemanfaatan pangan pada tahun 2020 sampai tahun 2023 di Kabupaten Aceh Besar. Ketersediaan pangan mulai menguat kembali di tahun 2021 karena adanya peningkatan produksi padi di tahun 2021 dan di tahun 2022 terjadi penurunan sampai tahun 2023.

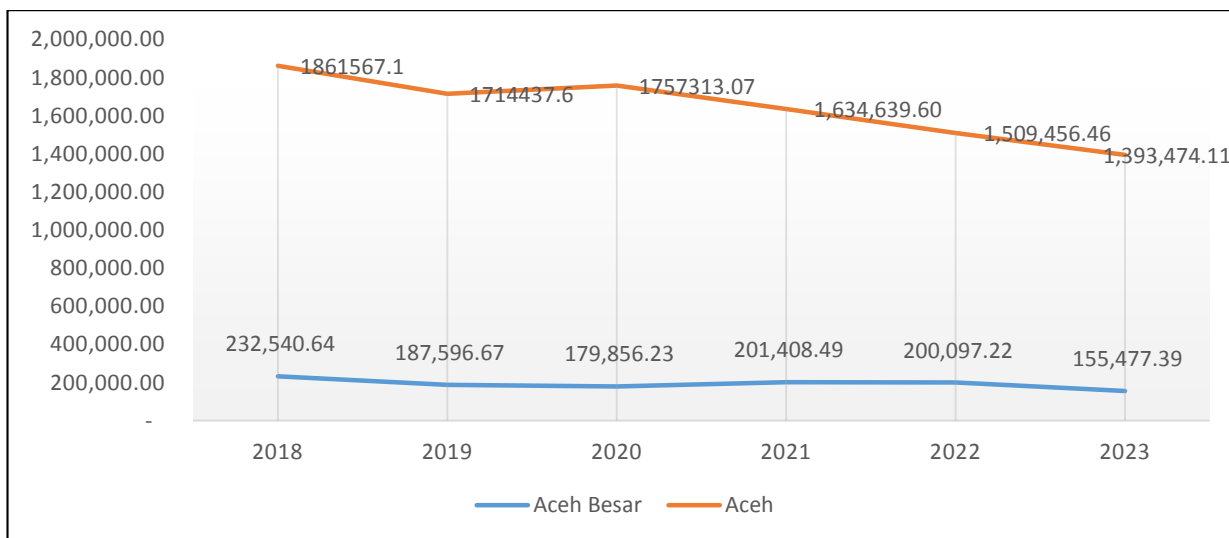


Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar

Gambar 2.95 Produktivitas, Produksi, Luas Panen dan Luas Tanam Padi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2023

Kabupaten Aceh Besar mampu menggenjot kembali produksi padi dan berhasil menempati posisi 3 di tahun 2021 sebagai produsen beras secara Provinsi tahun 2021 sampai tahun 2022 Aceh Besar masih terjadi peningkatan menjadi posisi ke 2 seprovinsi Aceh, namun di tahun 2023 terjadi penurunan menjadi posisi ke 3 se Provinsi Aceh. Beberapa langkah teknis dilakukan dalam upaya meningkatkan kembali produksi padi yang sempat anjlok di tahun 2020 melalui keragaman teknis perbaikan varietas unggul nasional dengan menggunakan varietas Ciherang, Inpari 32 dan Inpari 42.

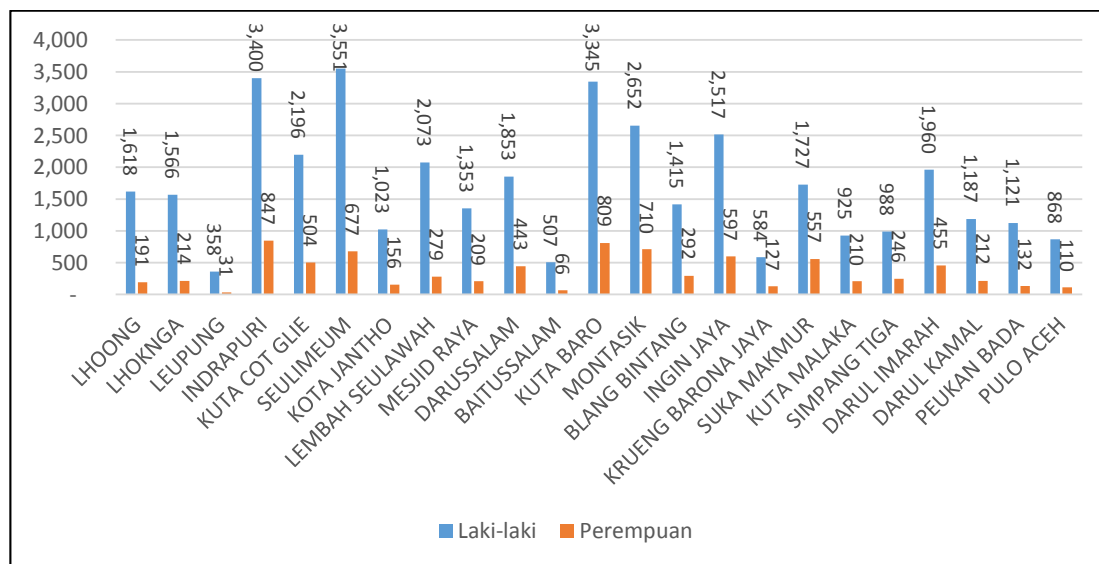
Keragaman teknologi pemupukan berimbang, serta penggunaan agensi hayati pada pengendalian hama terpadu. Peningkatan ketersediaan pangan ternyata belum disertai dengan peningkatan keterjangkauan/akses pangan dari 2021 ke tahun 2023. Persentase terus menurun selain disebabkan oleh penurunan produksi padi juga disebabkan oleh keterbatasan akses akibat pembatasan kegiatan masyarakat selama Pandemi Covid-19. Pemanfaatan pangan juga cenderung stagnan setelah penurunan yang cukup tajam dari tahun 2019 ke 2020.



Sumber Data : Provinsi dalam Angka, 2025

Gambar 2.96 Perbandingan Produksi Padi Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tahun 2018-2023

Rumah tangga usaha pertanian berdasarkan jenis kelamin setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber data : BPS, Aceh Besar 2023 (diolah)

Gambar 2.97 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Jumlah rumah tangga usaha pertanian akan mempengaruhi input sarana produksi pertanian di Kabupaten Aceh Besar. secara jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar cenderung menurun.

Menurunnya daya dukung ketersediaan pangan di pengaruhi oleh jasa Jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Aceh Besar berada pada kelas lingkungan penyedia pangan yang sangat rendah dengan luasan sebesar 200.178,39 Ha, luasan yang tertinggi berada di kecamatan Kota Jantho sebesar 50.762,31 Ha. Luas kelas jasa lingkungan penyedia pangan rendah sebesar 18.871,67 Ha, sedangkan luas jasa lingkungan penyedia pangan sangat tinggi sebesar 26.144,02 Ha. untuk luasan tertinggi pada kelas jasa lingkungan penyediaan pangan berada di Kecamatan Seulimeum dengan luas sebesar 3.846,36 ha.

Permasalahan lainnya yaitu laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian berlangsung cepat. Luas lahan pertanian yang mengalami penurunan setiap tahun berpotensi mempengaruhi potensi padi dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini, luas lahan pertanian di wilayah Kabupaten Aceh yang semakin menyusut dari waktu ke waktu berdampak pada penurunan jumlah produksi tanaman pangan dan populasi ternak.

Aceh Besar yang berada berbatasan langsung dengan ibu Kota Aceh, menyebabkan daerah ini menjadi salah satu alternatif kawasan urban penduduk pendatang. Selain itu perluasan industri juga banyak terjadi di Kabupaten Aceh Besar akibat letak geografis ini. Alih fungsi lahan ini terjadi tidak hanya karena adanya pembangunan properti dan sarana prasarana sektor industri, namun juga karena peralihan mata pencaharian utama masyarakat dari bertani ke industri.

Kabupaten Aceh Besar tercatat mengalami penambahan lahan pertanian namun total persentase penambahannya tidak sebanding dengan total alih fungsi lahan di wilayah lainnya di Aceh karen juga berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil analisis, hampir dipastikan ada alih fungsi lahan di Kabupaten Aceh Besar terutama di kawasan utara dekat dengan Kota Banda Aceh, seperti Kecamatan Krueng

Barona Jaya, Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah. Kemarau panjang menjadi salah satu penyebab petani kemudian mengalihfungsikan lahannya karena kerugian yang diderita. Sayangnya di tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 tidak ada penambahan kembali lahan pertanian di Kabupaten Aceh besar. Laju penyusutan lahan sawah dalam 10 tahun terakhir tertinggi adalah Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kecamatan Ingin Jaya. Terjadi alih fungsi lahan utamanya ke sektor industri, properti, dan infrastruktur non-pertanian lainnya. Laju penyusutan mencapai 68,07% untuk kecamatan Krueng Barona Jaya dan 55,01 persen untuk Kecamatan Ingin Jaya.

Permasalahan lainnya yaitu krisis regenerasi petani, di mana persentase petani tua yang sudah dinilai sudah kurang produktif lebih besar jika dibandingkan dengan persentase petani muda. Pada tahun 2023 berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2023, struktur umur petani di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018 sebesar 68,18 persen yang berumur di atas 45 tahun dan dikategorikan sudah tua. Proporsi petani usia muda hanya sedikit yaitu petani muda berumur di bawah 25 tahun sebanyak 110 jiwa (0,02 persen) dan petani muda berumur 25-34 tahun sebanyak 3.507 jiwa (7,84 persen).

Permasalahan pertanian lainnya yaitu Nilai Tukar Petani dan Peternak Rendah (kurang dari 100). $NTP < 100$ artinya Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih kecil daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata NTP Gabungan Kabupaten/Kota di Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2019- 2022 yaitu dari 98,4 menjadi 107,45. NTP Gabungan Provinsi Aceh berada di bawah 100 sampai dengan tahun 2022 yaitu sebesar 98,74, selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun. 2023.

Masalah pertanian lainnya berkaitan dengan sumber daya manusia pertanian yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Indikator pertama dapat dilihat dari jumlah petani berdasarkan pendidikan terakhir. Pada tahun 2018, sebagian besar petani di Kabupaten Aceh Besar merupakan lulusan dari SD/ sederajat dan tidak/ belum tamat SD/ sederajat. Hasil Kajian tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan menganalisis setiap usaha sehingga petani

dapat menjalankan usaha taninya dengan baik dan dapat memperoleh pendapatan yang maksimal. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan lebih baik cara berpikirnya sehingga memungkinkan petani akan bertindak lebih rasional dalam mengelola usaha taninya.

Permasalahan lainnya terkait sumber daya manusia pertanian yaitu minimnya pendampingan petani melalui penyuluhan. Hal tersebut menyebabkan wawasan tidak berkembang sehingga keinginan untuk mencari informasi secara mandiri rendah. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dari perbandingan jumlah penyuluh pertanian dan kelompok tani menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Tabel 2.153.
Perbandingan Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penyuluh					Jumlah KLP Tani				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peukan Bada	7	7	6	6	5	40	40	40	41	41
2	Kota Jantho	10	10	9	9	9	70	70	70	72	72
3	Lhoong	7	6	5	5	5	68	68	68	76	76
4	Blang Bintang	13	10	9	9	9	40	40	40	45	45
5	Kuta Baro	19	15	12	10	10	100	100	100	111	111
6	Ingin Jaya	12	12	11	10	10	107	107	107	112	112
7	Seulimeum	18	18	16	16	16	198	198	198	210	210
8	Sukamakmur	18	18	18	17	16	59	59	59	63	63
9	Montasik	16	16	14	14	14	102	102	102	106	106
10	Indrapuri	18	18	18	18	17	139	139	139	142	142
11	Darussalam	0	6	5	5	5	51	51	51	56	56
12	Darul Imarah	9	8	6	5	4	47	47	47	52	52
13	Baitussalam	5	4	2	2	1	35	35	35	39	39

No	Kecamatan	Jumlah Penyuluh					Jumlah KLP Tani				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
14	Pulo Aceh	4	4	4	3	4	27	27	27	29	29
15	Kuta Malaka	10	10	9	9	9	40	40	40	44	44
16	Lhoknga	5	5	4	4	3	46	46	46	53	53
17	Simpang Tiga	8	7	7	6	6	31	31	31	38	38
18	Lembah Seulawah	12	12	10	10	10	81	81	81	89	89
19	Kuta Cot Glie	13	13	12	12	11	98	98	98	110	110
20	Leupung	4	3	2	2	2	16	16	16	18	18
21	Darul Kamal	7	7	8	8	8	48	48	48	51	51
22	Krueng Barona Jaya	7	7	7	7	7	21	21	21	23	23
23	Mesjid Raya	2	2	2	1	1	50	50	50	55	55
	Jumlah	224	218	196	188	182	1514	1514	1514	1635	1635

H. Perikanan

peningkatan, konsumsi perikanan per kapita di Kabupaten Aceh Besar sesungguhnya saat ini pun masih terpaut jauh dari rata-rata Aceh dan rata-rata nasional yang mana per tahun 2022 konsumsi per kapita di Kabupaten Aceh Besar hanya Kabupaten Aceh Besar/tahun 2022 sebesar 39,28 kg/tahun di bawah konsumsi rata-rata Aceh dan juga di bawah konsumsi rata-rata nasional yaitu 56.48 kg/tahun. Masterplan Transformasi Ekonomi Kabupaten Aceh menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Aceh Besar memiliki angka konsumsi ikan per kapita yaitu sebesar 39,28 kg/tahun pada tahun 2022 . Konsumsi Ikan per kapita Kabupaten Aceh besar berada di bawah rata-rata Aceh konsumsi ikan per kapita yaitu sebesar 57,27 kg/tahun di bawah Nasional konsumsi ikan per kapita yaitu sebesar 56,48 kg/tahun.

Permasalahan utama perikanan di Kabupaten Aceh Besar adalah rendahnya peningkatan volume produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Dalam 10 tahun terakhir sejak 2014-2023, rata-rata peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 80,93 persen. Dan rata-rata untuk perikanan budidaya kenaikan sebesar 19,07 persen.

Masalah perikanan lainnya berkaitan dengan sumber daya manusia perikanan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2013 hingga 2023 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan minat masyarakat dalam bidang atau usaha perikanan.

I. Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, IKP kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 sebesar 83,09 sedangkan pada tahun 2022 IKP Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan menjadi 81,49 skor. Penyebab turunnya skor IKP Kabupaten Aceh Besar disebabkan oleh Indeks Keterjangkauan turun dari 75,57 pada tahun 2021 menjadi 73,67 pada tahun 2022 dan Indeks Pemanfaatan pangan dari 80,59 pada tahun 2021 menjadi 77,47 pada tahun 2022. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar berada pada peringkat ke 100 dari 416 kabupaten.

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen untuk menilai mutu gizi konsumsi pangan kelompok baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor. PPH Konsumsi Kabupaten Aceh Besar belum optimalnya pencapaian Skor Pola Pangan Harapan. Pada Tahun 2022 capaian Skor PPH konsumsi Kabupaten Aceh Besar sebesar 73,7 dari angka idealnya sebesar 100 skor. Dari nilai skor tersebut menggambarkan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Aceh Besar belum mencerminkan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang bila terlihat dari kontribusi kelompok pangan tertentu seperti kelompok umbi-umbian, pangan hewani,

kacang-kacangan serta sayur dan buah yang masih jauh dari angka sasaran yang ditetapkan dalam WNPG. Beras masih mendominasi dalam pola konsumsi pangan masyarakat, sedangkan konsumsi pangan sayur dan buah, umbi-umbian, pangan hewani serta kacang-kacangan masih rendah.

Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat Berkaitan dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Aceh Besar 2022 atau yang disebut dengan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) ada 10,43 persen desa yang rentan rawan pangan. Berdasarkan hasil analisis faktor, diperoleh faktor utama penyebab ketahanan pangan Kabupaten Aceh Besar adalah tingginya angka kemiskinan, faktor ini mempengaruhi daya beli bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup.

J. Industri dan Perdagangan

A1. Industri

Industri UMKM di Kabupaten Aceh Besar sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Lembah Selaewah sebesar 2,52 persen dari jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Besar di mana Kecamatan Lembah Seulawah memiliki 89 unit usaha dan Kecamatan Selimeum memiliki 201 unit usaha. Nilai produk dari UMKM di Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 sebesar 765,2 milyar rupiah dari 3536 unit usaha. Secara umum jenis konsumen yang menerima output UMKM di Kabupaten Aceh Besar adalah rumah tangga sebesar kurang lebih 90 persen dan pedagang eceran sebesar kurang 40 persen. Berdasarkan kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kelompok unit usaha terbesar adalah KBLI 10 alias usaha industri makanan yaitu sebanyak 2110 unit usaha (59,67 persen). Jumlah UMKM bidang makanan yang banyak di Kabupaten Aceh Besar juga dipengaruhi banyaknya dengan instansi pemerintah, perdagangan eceran, industri, dan jasa yang membutuhkan suplai makanan untuk para pekerja yaitu ± 60 persen konsumen utama industri makanan ada di

sektor tersebut. Maka dari itu, dengan adanya pembangunan Jalan Tol SIBANCEH tidak lagi mendukung UMKM di jalan lintas nasional dapat berimplikasi pada keberlangsungan industri makanan khusus.

Jika melihat data jumlah usaha dan nilai produk dari UMKM di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah unit usaha belum tentu selaras dengan nilai produk yang lebih tinggi. Misalnya Kabupaten Aceh Besar memiliki unit usaha UMKM sebanyak 3536 ribu memiliki nilai produk sebesar 765,2 miliar rupiah. Disisi lain besaran nilai produk dipengaruhi oleh skala produksi dan nilai tambah dari produk UMKM. Maka dari itu, dengan isu dalam pengembangan UMKM adalah diperlukan untuk mewadahi UMKM dari sisi keahlian tenaga kerja, jembatan untuk memperoleh bahan baku, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas skala pemasaran produk.

A2. Perdagangan

Lapangan usaha perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang menompang perekonomian aceh Besar dengan kontribusi 15 – 16 persen terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar dalam 10 tahun terakhir dengan pertumbuhan sektor lapangan yang terus meningkat 3-4 persen dalam 5 tahun terakhir. Aceh Besar merupakan daerah hinterland daerah ibukota provinsi Aceh yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sektor perdagangan tidak terlepas dari sektor industri, salah satu isu utama dari sektor perdagangan dalam mendorong daya saing kualitas komoditi produksi dalam perdagangan, permasalahan lemah nya daya saing adalah dari faktor kualitas dan kuantitas produk komoditi, kuranya sistem distribusi dan pemasaran dan minimnya pembinaan bagi pelaku usaha

K. Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata (makan Minum) pada PDRB di kabupaten Aceh Besar konsisten berada di atas 2,18 persen. Walaupun begitu, jika dilihat pada jumlah kunjungan wisatawannya tidak terlihat keselarasan. Jumlah

kunjungan wisatawan dari tahun 2018 sampai tahun 2023 berada pada kondisi fluktuatif, tapi cenderung menurun. Hubungan jumlah kunjungan yang fluktuatif terhadap konsistensi kontribusi sektor pariwisata “terlihat” tidak saling berpengaruh. Hal ini dapat menciptakan asumsi bahwa sektor pariwisata Kabupaten Aceh besar baik- baik saja. Padahal sebenarnya jumlah kunjungan wisata merupakan salah satu variabel utama dalam perhitungan nilai PDRB sektor pariwisata.

Jumlah kunjungan yang fluktuatif dan bahkan cenderung menurun akan sangat mungkin menciptakan penurunan nilai PDRB sektor pariwisata secara signifikan nantinya. Jasa-jasa pariwisata yang mengakomodasi kebutuhan wisatawan akan berangsur berkurang karena semakin berkurangnya jumlah penggunaan jasanya. Hal ini akan mengakibatkan penurunan nilai PDRB sektor pariwisata. Strategi yang tepat yang memperhatikan berbagai aspek sangat diperlukan untuk mempertahankan kekuatan pariwisata Kabupaten Aceh Besar. Permasalahandalam pariwisata meliputi:

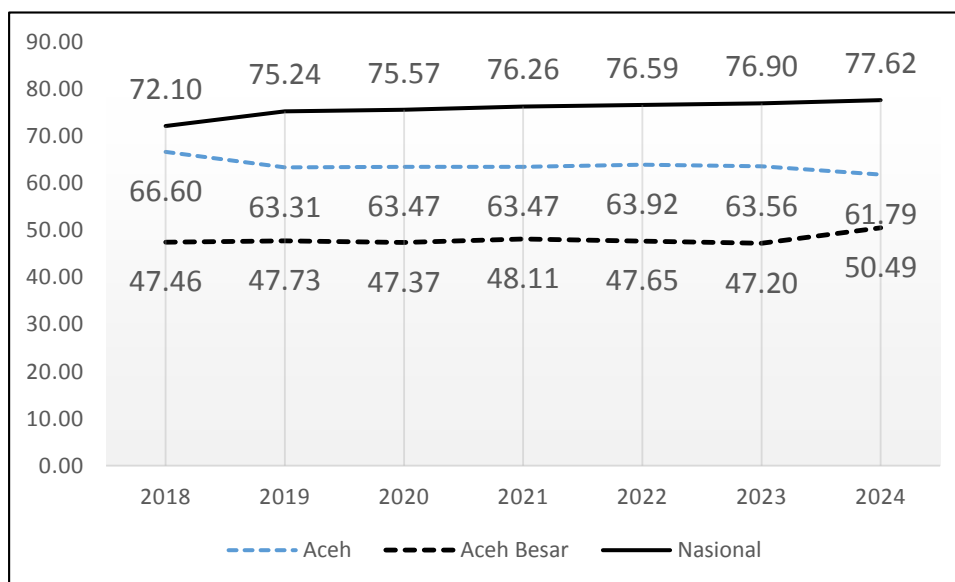
1. Belum terjaminnya kepastian waktu pelaksanaan event pariwisata daerah dan belum luasnya publikasi event;
2. Akses pasar produk kreatif yang masih terkendala;
3. Kurangnya standarisasi produk kreatif untuk pengembangan distribusi secara domestik maupun internasional;
4. Belum optimalnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif;
5. Belum optimalnya pemanfaatan co-working space oleh pelaku ekonomi kreatif;
6. Belum optimalnya branding Aceh Besar sebagai destinasi wisata.
7. Masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas;
8. Masih rendahnya kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan;
9. Kurangnya destinasi/promosi wisata unggulan;
10. Perlunya diversifikasi wisata untuk menjamin sustainable tourism;
11. Belum optimalnya penguatan destinasi pariwisata dan penyerapan produk lokal;

2.3.1.3 Implementasi Pelaksanaan Syariat Islam, Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Belum Optimal

A. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator yang menunjukkan besaran peran aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Dimensi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terdiri dari keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, serta distribusi pendapatan.

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan, tetapi mengalami penurunan pada 2019-2023. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Aceh Besar dan tahun 2024 naik menjadi 50.49 atau terjadi kenaikan sebesar 3.29 point, Aceh dan Nasional pada tahun 2018-2024 dimana Aceh Besar indeks pemberdayaan gender masih di bawah Aceh dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2.98 Indeks Pemberdayaan Gender Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024

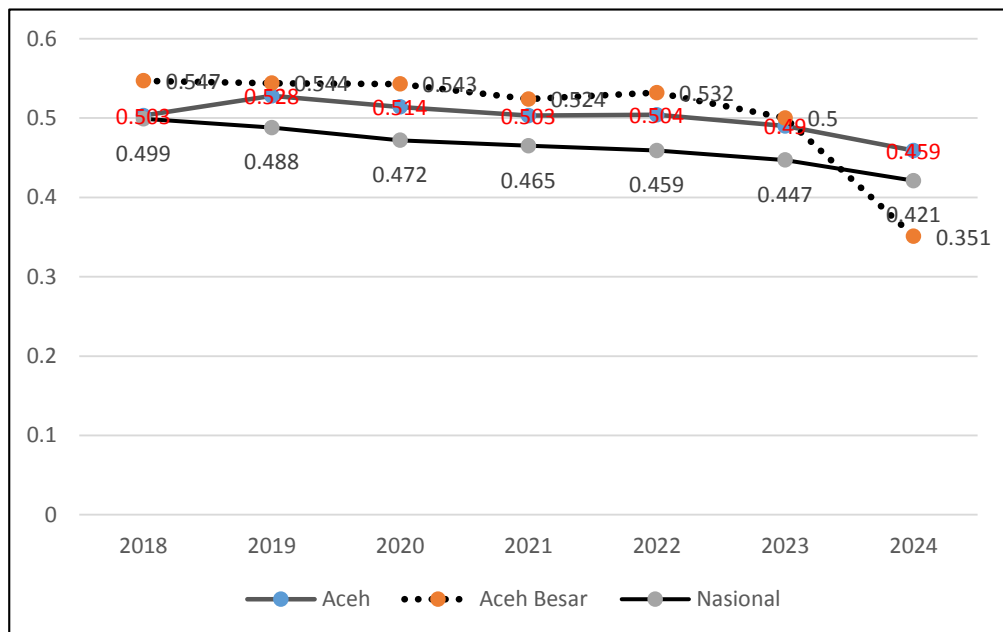
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur yang mencerminkan tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam aspek ekonomi dan politik. IDG fokus pada tingkat partisipasi dengan cara mengukur kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, partisipasi politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG memiliki beberapa dimensi, termasuk representasi di lembaga parlemen, proses pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi permasalahan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal. Selain itu adanya kondisi sosial yang lebih rendah di daerah pesisir juga memerlukan perhatian lebih. Sehingga aspek sumber daya manusia tidak hanya dilihat dalam capaian kualitas dan kuantitas namun pemerataannya juga. Kesenjangan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, yakni ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa terbatas gender tertentu. Mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui strategi sistematis Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satu aspek yang dapat merepresentasikan kesetaraan gender adalah aspek pembangunan gender dan pemberdayaan wanita dan anak. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Aceh Besar tidak terlalu signifikan. Selain itu, nilainya masih berada di bawah Aceh 61,79 dan Nasional 77,62, sementara Aceh Besar hanya 50,49. Menurut hasil yang disampaikan dalam FGD, hal tersebut disebabkan kurangnya keterlibatan perempuan dalam parlemen dan pemerintahan (2,86 persen), masih rendahnya kualitas hidup perempuan di Kabupaten Aceh Besar, termasuk dalam mengakses pendidikan, ekonomi dan sosial.

B. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender memberikan gambaran kegagalan atau kerugian dari pencapaian pembangunan akibat ketidaksetaraan gender. Indeks ketimpangan gender terdiri dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta

pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks ketimpangan gender terdiri dari proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan, proporsi wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun, persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA, persentase laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen, serta persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Berdasarkan gambar dibawah ini IKG di Kabupaten Aceh Besar mengalami fluktuasi, terlebih di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,532 turun menjadi 0,5 dibandingkan tahun 2023 dan di tahun 2024 turun menjadi 0.351 atau turun sebesar 0.149 poin. Penurunan ini berarti ketimpangan gender di Kabupaten Aceh Besar semakin membaik. Padahal, IKG di Aceh menunjukkan perbaikan dengan turun sebesar 0,031 menjadi 0,459 di tahun 2024. Kondisi Kabupaten Aceh Besar lebih bagus dalam ketimpangan yaitu memiliki IKG sebesar 0,351 pada tahun 2024, sementara Aceh 0,459 dan Nasional 0,421. Indeks ketimpangan gender menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks ketimpangan gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja.



Gambar 2.99 Indeks Ketimpangan Gender Nasional , Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024

C. Kebudayaan

Beberapa objek kebudayaan Aceh Besar yang ada, cenderung mengalami kepunahan, oleh karena semakin berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga kebudayaan yang aktif dalam melestarikan, membina dan mengembangkan suatu objek kebudayaan. Objek kebudayaan yang banyak mengalami kelemahan SDM dan kelembagaan di antaranya; objek tradisi lisan yang kekurangan penutur, objek pengetahuan dan teknologi tradisional yang tergerus oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi modern, demikian pula seni, permainan, dan olahraga tradisional. Adapun pada objek ritus kekurangan SDM pada aspek penerjemah naskah-naskah kuno.

Keseluruhan objek kebudayaan yang ada, memang secara faktual masih ada yang bertahan dan dilaksanakan, namun frekuensi pelaksanaannya sudah sangat minim oleh karena kurangnya sarana dan prasarana setiap objek kebudayaan yang ada, baik difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh

masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan data dan informasi masih terdapat sapras jenis objek kebudayaan tertentu berupa lembaga atau dewan adat, kelompok atau komunitas masyarakat, dan sapras yang disiapkan oleh pemerintah yang bersifat tentatif, seperti sapras pertunjukan dan pagelaran seni budaya, serta promosi kerajinan dan kuliner tradisional dalam setiap event.

Problem mendasar pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemajuan keseluruhan objek kebudayaan di Aceh Besar, di samping faktor kesadaran internal masyarakat dalam menjaga khazanah kebudayaannya, juga tidak terlepas dari konfogurasi globalisasi, terutama dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup generasi muda yang berimplikasi pada kurangnya minat, perhatian, kecintaan, dan sense of belonging terhadap nilai-nilai luhur dan budaya suku bangsanya. Oleh karena itu, upaya pemerintah Aceh Besar untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya dan adat berbasis iman dan takwa melalui visi pembangunan ber budaya dan beradat saat ini, sangat perlu didukung dan diapresiasi oleh seluruh komponen masyarakat Aceh Besar dan oleh pemerintah pusat, baik dukungan dalam bentuk moril maupun materil serta regulasi yang mendukung percepatan pemajuan kebudayaan.

Adapun Permasalahan pada Pendataan Cagar Budaya terdapat banyak situs cagar budaya karena lokasi yang susah dijangkau dikarenakan akses jalan yang belum dapat di lalui dengan kisaran 30% lokasi. Juga terkendala pembebasan lahan dari masyarakat pada letaknya cagar budaya tersebut. Adapun jumlah cagar budaya yang terbengkalai di karenakan tidak adanya anggaran untuk pembayaran juru pelihara situs cagar budaya Aceh Besar dengan kisaran 70%. Bantuan anggaran Gaji Juru Pelihara Cagar Budaya dari Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Aceh 20 persen, 8 Orang/8 Tempat Cagar Budaya Aceh Besar.

Dari aspek kesenian saat melakukan berbagai kegiatan dalam berkesenian setiap individu tidak terlepas dari berbagai masalah yang akan muncul Permasalahan yang dialami anggota sanggar ini tidak terbatas pada

lingkungan komunitas saja, pada saat berinteraksi dengan kehidupannya sehari-hari pun tidak jarang mereka juga dapat menghadapi suatu permasalahan, mulai dari permasalahan yang sederhana sampai dengan permasalahan yang kompleks. Permasalahannya pun didasarkan pada karakteristik mereka masing-masing karena mereka memiliki tingkat usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan yang berbeda atau dengan kata lain, ketika mereka berada diluar lingkungan komunitas kesenian mereka.

Adapun Permasalah dari segi sejarah masih banyak dari peninggalan situs sejarah tersebut kurang informasi dari ahli-ahli waris terutama dari sejarah peninggalan-peninggalan ulama Aceh. Situs-situs bersejarah di daerah sering menghadapi risiko kerusakan, pencurian, atau penghancuran karena kurangnya perawatan dan pengawasan yang memadai. Ini dapat mengakibatkan kehilangan warisan sejarah yang tidak dapat digantikan. Kurangnya kesadaran atau apresiasi masyarakat terhadap warisan sejarah lokal dapat mengakibatkan kurangnya dukungan untuk pelestarian. Kurikulum pendidikan masih kurang memberikan penekanan pada sejarah lokal, Hal ini dapat mengurangi kesadaran masyarakat tentang sejarah daerah mereka sendiri.

D. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat berbagai buku dikumpulkan berperan penting sebagai sarana membaca dan memperoleh pengetahuan bagi masyarakat di luar lembaga formal. Jumlah perpustakaan terakreditasi di Kabupaten Aceh Besar sampai tahun 2022 baru 1 (satu) perpustakaan yang memperoleh akreditasi dengan akreditasi “B”. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 414.490 ribu tahun 2022, artinya 1 perpustakaan di Kabupaten Aceh Besar melayani 414.490 ribu penduduk. Angka penduduk yang terlayani oleh 1 (satu) perpustakaan tersebut termasuk relatif kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Tidak cukup dengan ketersediaan bangunannya, urusan perpustakaan juga perlu dilihat dari dimensi-dimensi lainnya, seperti dimensi ketercukupan koleksi perpustakaan, dimensi tingkat kunjungan masyarakat per hari, dan lain-

lain. Melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang di dalamnya mencakup dimensi-dimensi tersebut, urusan perpustakaan dapat dinilai sudah sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2022, dengan IPLM sebesar 47,83, Kabupaten Aceh Besar menempati posisi 17 dari 23 kabupaten/kota (4 terendah). Posisi ini menggambarkan usaha yang kurang baik dari pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan.

E. Kepemudaan dan Olahraga

A1. Kepemudaan

Organisasi pemuda yang aktif merupakan sebagai gambaran keberhasilan pembangunan pemuda menjadi penting untuk dilihat. Persentase pemuda yang aktif saat ini di Kabupaten Aceh Besar mencapai 47,89 persen pada tahun 2024. Persentase angka organisasi pemuda aktif tersebut 4 tahun terakhir menunjukkan angka yang meningkat. Permasalahan utama dalam organisasi kepemudaan adalah faktor pemahaman pemuda tentang organisasi, adanya motivasi kepemudaan, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat, sikap dalam berorganisasi serta rendahnya pembinaan.

B2. Olah Raga

Pada urusan olah raga Sport Development Index (SDI) dapat dijadikan sebagai bahan untuk melihat usaha pemerintah daerah untuk memungkinkan setiap orang memiliki akses dalam melakukan aktivitas baik yang bermutu guna mendapatkan manfaat kebugaran, Kesehatan, Kesejahteraan psikis, perkembangan personal dan nilai tambah ekonomi. Lebih lanjut cabang olah raga binaan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 hanya 12 cabang olahraga sementara Aceh mencapai 14 cabang olahraga yang dibina. Permasalahan utama rendahnya cabang olah raga yang dibina di Kabupaten Aceh Besar antara lain rendahnya profesi atlet tidak atraktif. Olahraga tidak terbangun secara

terintegrasi dengan sistem pendidikan, Minimnya dana untuk pembinaan olahraga, Belum optimalnya ketelibatan berbagai pihak terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga, Sarana dan prasarana olahraga yang minim, Strategi, peran dan prioritas dari pemerintah.

F. Sosial

Banyaknya PPKS di Kabupaten Aceh Besar 6.102 jiwa, diantaranya anak terlantar sebanyak 21 jiwa, lansia sebanyak 4587 jiwa, penyandang disabilitas sebanyak 1.474 jiwa, pengemis sebanyak 20 jiwa. Sementara itu, penanganan PPKS di Kabupaten Aceh Besar masih di angka 18,02 persen pada tahun 2022, yaitu 1.100 jiwa (230 penyandang disabilitas, 129 anak terlantar, 725 lansia terlantar dan 16 pengemis) dibandingkan jumlah seluruh PMKS. Sementara itu, pencapaian terhadap target tahun 2022 sebesar 32,60 persen yaitu 1100 jiwa dibandingkan 3.374 jiwa (300 penyandang disabilitas, 129 anak terlantar, 945 lansia terlantar dan 20 pengemis).

Tingginya lansia telantar berpengaruh terhadap capaian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh besar. Menurut BPS Kabupaten Aceh Besar (2023) adanya kelompok penduduk yang tinggal sendiri dan keluarga yang memiliki kepala keluarga/ penanggungjawab keluarga perempuan (WRSE) dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja berdampak pada sulitnya mencapai nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Hal tersebut disebabkan kehidupan mereka cenderung bergantung pada bantuan dari pemerintah. Sementara itu ketika bantuan dari pemerintah tidak lagi ada, kelompok tersebut akan kembali masuk ke dalam kemiskinan ekstrem.

Selain dari data yang terencana, pada tahun 2022 terjadi banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum (baik sebagai korban maupun pelaku) yaitu 97 jiwa. Penyelesaian kasus tersebut berupa rujukan, rujukan bisa berupa pengembalian pengasuhan kepada keluarga, LKS maupun Darussaadah yang merupakan tempat penampungan kewenangan kementerian sosial.

G. Pemberdayaan Masyarakat Desa

IDM (Indeks Desa Membangun) dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sejak diberikan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat telah menunjukkan kenaikan 1%. Dalam kurun waktu 6 tahun ini telah tercapai 29 desa dengan status Mandiri, Maju:165 desa, Berkembang: 394 desa, Tertinggal: 16, Sangat Tertinggal: 0. Kenaikan nilai rata-rata IDM Aceh Besar (masuk kategori berkembang) adalah sebesar 0.6905, kenaikan yang diperoleh dalam kurun waktu lebih kurang 6 tahun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) provinsi Aceh tahun 2022 masih terdapat 78 desa sangat tertinggal, 1.381 desa tertinggal, telah ada 4.028 desa berkembang, maju 786 desa, sedangkan untuk desa mandiri, telah ada sebanyak 224 desa. Hampir 13 persen dari status Desa Mandiri merupakan inputan data dari Aceh Besar yang telah menyumbangkan 29 desa Status Mandiri. Tahun 2024 untuk Kabupaten Aceh Besar terdapat 7,3 persen desa mandiri atau 44 desa, 32.50 persen desa maju atau sebanyak 196 desa, 58.71 persen desa berkembang atau sebanyak 354 desa, dan 1.94 persen desa tertinggal atau sebanyak 9 desa.

H. Administrasi Kependudukan

Kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Aceh Besar masih menjadi masalah, masih terdapat anak usia 0-4 tahun maupun 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran.. Begitu juga rasio kepemilikan KTP-el dan NIK di Kabupaten Aceh besar juga belum mencapai 100%. Tidak hanya itu, masih terdapat pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Besar yang tidak memiliki buku nikah maupun akta perkawinan pada tahun 2024 persentase kepemilikan KTP baru mencapai 97 persen dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP, ini disebabkan kesadaran dari masyarakat yang sudah wajib memiliki identitas administrasi masih kurang.

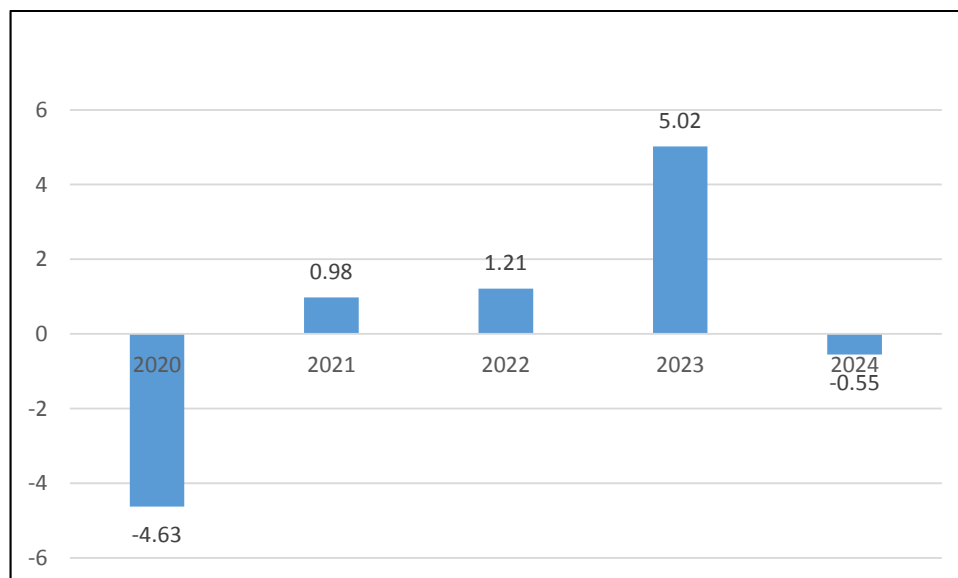
I. Kependudukan

Pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun dan terjadinya eging population, dari gambar di bawah ini menunjukkan bahwa tren pertumbuhan penduduk yang semakin berkurang, begitu halnya jika dibandingkan rata-rata

pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir Aceh Besar dengan rata-rata pertumbuhan 1.13 persen, sementara provinsi Aceh 1.56 persen dan Nasional sebesar 1.25 persen. Walaupun rata-rata pertumbuhan penduduk menurun tapi masih di bawah target nasional yaitu sebesar 0.9 persen.

Laju pertambahan penduduk yang relatif masih cukup tinggi disebabkan oleh masih tingginya angka migrasi dan tingkat kelahiran. Pertambahan penduduk berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian yang layak, serta sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan dalam jangka panjang serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang, untuk memenuhi kebutuhan hunian dan aktivitas penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk juga berdampak pada tingginya aktivitas lalu lintas orang, barang dan jasa, yang perlu ditopang dengan optimalisasi konektivitas wilayah.

Angka Ketergantungan penduduk Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Capaian rasio ketergantungan pada Tahun 2024 sebesar 42,92, yang berarti bahwa dari 100 (seratus) penduduk produktif pada Tahun 2024 menanggung usia tidak produktif (usia muda dan usia tua) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang.



Gambar 2.100 Rata-rata Pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2020 – 2024

Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sekitar 439.050 jiwa, dengan komposisi usia produktif (15–59 tahun) sebanyak 63,9 persen, usia anak-anak (0–14 tahun) 26,8 persen, dan lansia (>60 tahun) 9,3 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir hanya 1,03 persen per tahun, menunjukkan perlambatan dibanding periode sebelumnya yang sebesar 1,68 persen.

1. Lambatnya Pertumbuhan Populasi dan Potensi Regenerasi

Rendahnya laju pertumbuhan penduduk Aceh Besar (1,02 persen) lebih kecil dibanding tingkat pertumbuhan provinsi Aceh yang diperkirakan sekitar 1,32 persen pada tahun 2024. Dibandingkan dengan nasional yang mendekati 1,2 persen –1,4 persen, hal ini menandakan potensi stagnasi regenerasi penduduk dan kecenderungan migrasi keluar dari Aceh

2. Struktur Umur yang Belum Ideal

Aceh Besar didominasi kelompok usia produktif sebesar 63,9 persen, namun anak-anak (26,8 persen) masih cukup tinggi dan lansia (9,3 persen) pun terus meningkat. Sementara di tingkat provinsi Aceh, proporsi anak di bawah 15 tahun mencapai 28,7 persen dan penduduk usia kerja 65,9 persen, sedangkan lansia hanya 5,45 persen. Hal ini menunjukkan beban ketergantungan yang masih berat dan perlunya pemenuhan layanan anak dan lansia secara berimbang.

3. Kualitas SDM yang Terbatas & Ketimpangan Sosial

Data BPS Aceh Besar menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tahun 2024 adalah 13,21 persen, turun tipis dari 13,38 persen tahun sebelumnya. Angka ini sedikit lebih rendah daripada rata-rata Aceh (14,99 persen) dan mendekati batas nasional (~9–10 persen). Tingginya kemiskinan menunjukkan keterbatasan SDM dalam mengakses lapangan kerja produktif.

4. Tingkat Pengangguran Lebih Tinggi dari Provinsi

Menurut sensus SP2020, tingkat pengangguran (TPT) di Aceh Besar mencapai 7,62 persen, lebih tinggi dibanding TPT Aceh yang sebesar 6,59 persen. Dibandingkan nasional yang biasanya berkisar 5–6 persen, ini

menjadi tantangan serius dalam menciptakan lapangan kerja formal dan produktif.

5. Kesenjangan Distribusi Penduduk dan Urbanisasi

Aceh Besar termasuk dalam lima besar kabupaten berpenduduk terbesar di Aceh, dengan total penduduk sekitar 428–439 ribu jiwa pada 2024 . Kondisi ini menuntut adanya pemerataan pembangunan dan layanan antar-kawasan, terutama di wilayah pesisir, pedalaman, dan gampong terpencil.

Tabel 2.154.
Ringkasan Permasalahan Kependudukan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

Aspek	Aceh Besar (2024)	Provinsi Aceh (2024)	Nasional (2024)
Total Penduduk	± 439.050 jiwa	± 5,55 juta jiwa	± 270 juta jiwa
Pertumbuhan Tahunan	1,02 %	± 1,32 %	~1,2 %–1,4 %
Usia Anak (0–14 thn)	26,8 %	28,7 %	± 25 %
Usia Produktif	63,9 %	65,9 %	± 66 %
Usia Lansia (>60 tahun)	9,3 %	5,45 %	≥ 8 %
Tingkat Kemiskinan	13,21 %	14,99 %	~9–10 %
Tingkat Pengangguran (TPT)	7,62 %	6,59 %	~5–6 %

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2025 (diolah)

Permasalahan kependudukan di Kabupaten Aceh Besar meliputi antara lain: perlambatan pertumbuhan penduduk, struktur umur yang tidak ideal, kualitas SDM rendah, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi relatif, serta distribusi penduduk yang tidak merata. Dibandingkan dengan provinsi Aceh dan nasional, Aceh Besar menunjukkan perhatian khusus pada ketimpangan ekonomi, tingginya beban ketergantungan anak-lansia, serta keterbatasan kesempatan kerja formal.

Untuk itu, RPJMD Kabupaten Aceh Besar perlu memprioritaskan strategi seperti:

1. Penguatan layanan pendidikan dasar dan vokasi,
2. Peningkatan peluang kerja produktif dan UMKM,
3. Program percepatan pengurangan kemiskinan,

4. Penguatan pelayanan sosial di wilayah terpencil dan pedesaan,
5. Penataan demografi melalui migrasi balik dan promosi ketahanan keluarga.

J. Pengendalian Penduduk

Salah satu komponen dalam pertumbuhan penduduk adalah kelahiran. Dalam rangka mencapai angka kelahiran total sebesar 0,93 pada tahun 2045 dibutuhkan upaya untuk menekan kelahiran, salah satunya melalui penggunaan kontrasepsi. Namun, cakupan peserta KB di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 63.31 persen. Selain itu masih adanya *unmet need* KB (ingin ber-KB tidak terpenuhi) di Kabupaten Aceh Besar serta tingkat putus pakai kontrasepsi (*drop out*) yang terus mengalami peningkatan.

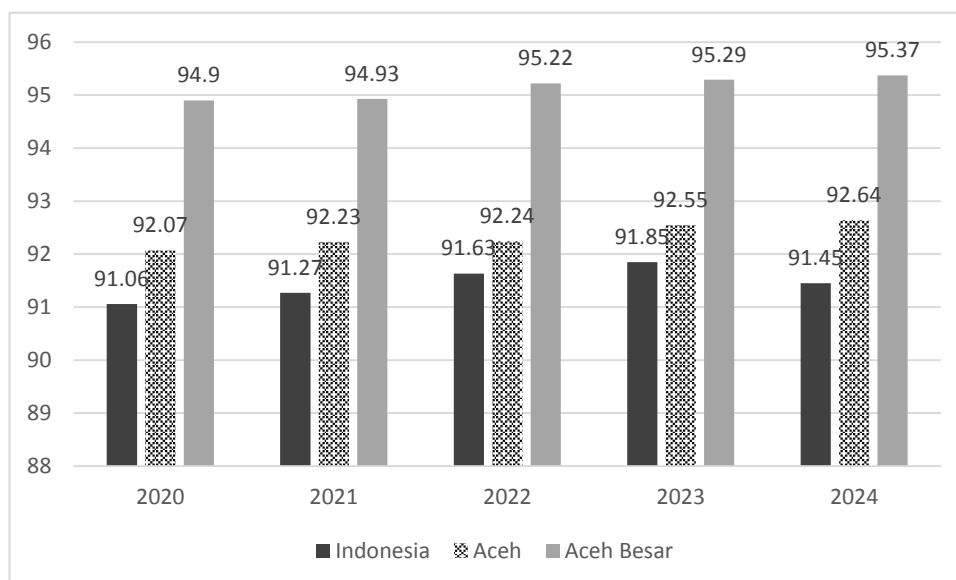
Penyebab tingkat putus pakai kontrasepsi mengalami peningkatan adalah penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah, padahal alat kontrasepsi MKJP yang memadai tersedia. MKJP adalah Kontrasepsi jangka panjang yang sangat efektif. Penggunaannya, dimana jangka pemakaian sampai dengan 10 tahun. Wilayah di Kabupaten Aceh Besar yang masih sulit untuk dijangkau khususnya wilayah Aceh Besar Bagian Selatan, pola penggarapan yang masih menitikberatkan pada pelayanan KB ulang dan ganti cara, masih banyaknya tempat pelayanan KB yang sulit dijangkau oleh masyarakat, serta penggarapan KIE yang belum tepat sasaran (LAKIP BKKBN Kabupaten Aceh Besar 2022). Hal tersebut senada dengan temuan jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan di Kabupaten Aceh Besar adalah kontrasepsi jenis non-MKJP, yaitu suntikan sebesar 21,17 persen, lalu diikuti oleh pil KB sebesar 8,67 persen.

Masalah lainnya terkait pengendalian penduduk adalah terkait masih adanya kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) di Kabupaten Aceh Besar. Meskipun angka tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 di atas rata-rata provinsi. Bahkan ASFR 15-19 tahun berada di atas rata-rata nasional. Hal tersebut perlu menjadi catatan karena dapat meningkatkan risiko kematian pada ibu.

K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Aceh Besar selama 2 tahun terakhir (2021 dan 2022) terus mengalami peningkatan walaupun sempat mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Secara umum jika dibandingkan tahun 2017 IPG Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 mengalami kenaikan, yaitu dari 94,59 persen pada tahun 2017 menjadi 95,22 persen pada tahun 2022. Selain itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2017 hingga 2023 di Kabupaten Aceh Besar selalu berada di atas rata-rata IPG Aceh dan nasional. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Aceh Besar memiliki peringkat ranking ke-6 di Provinsi Aceh dan ranking ke-97 di Indonesia.



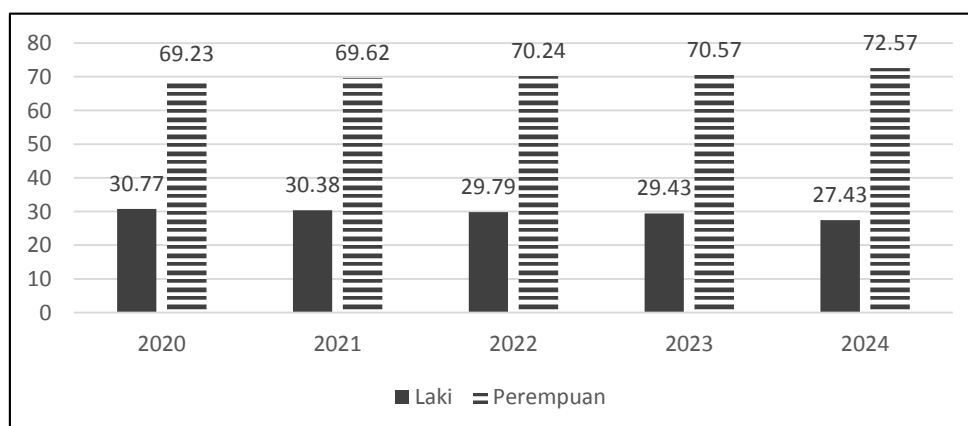
Gambar 2.101 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Nasional, Aceh dan Kabupaten Aceh Besar 2020 – 2024

L. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Persentase keterlibatan perempuan di parlemen menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam bidang politik. Dengan adanya peran aktif perempuan di bidang politik diharapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan lebih responsif gender dan fokus pada perlindungan anak.

Persentase keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2020 hingga 2024 cenderung konstan yaitu sebesar 2,86 persen (1 dari 35 anggota). Angka persentase keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Aceh Besar berada di bawah rata-rata Aceh yaitu sebesar 11,11 persen (9 dari 81 anggota). dan rata-rata Nasional sebesar 20,52 persen (118 dari 575 anggota).

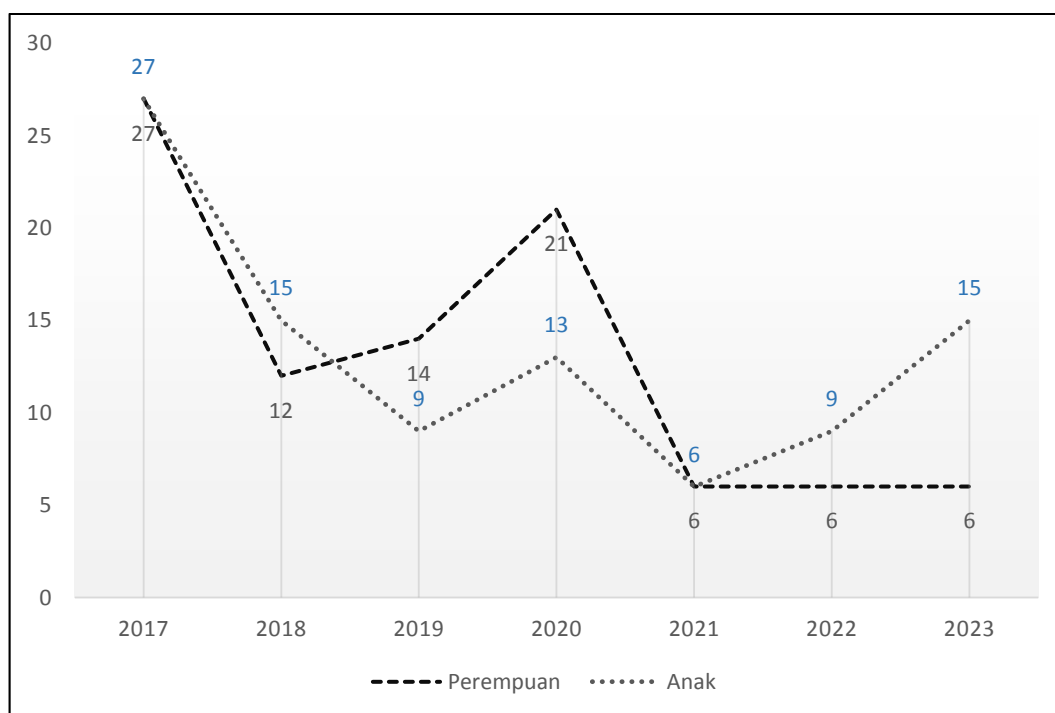
Keterlibatan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan Salah satu dimensi penyusun indeks pemberdayaan gender adalah pengambilan keputusan. Dimensi tersebut menggunakan indikator proporsi manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi pada pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Proporsi pegawai negeri perempuan yang berperan aktif sebagai pengambil keputusan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 sebesar 69,23 persen dan terus meningkat sampai tahun 2024 menjadi 72,57 persen, perbandingan ASN Perempuan laki-laki dan perempuan dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. .



Sumber data : Provinsi Dalam Angka, 2025

Gambar 2.102 Persentase Perbandingan ASN Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berdasarkan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Aceh Besar dari Januari 2017 – Maret 2022, yang merupakan laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah bervariasi setiap tahunnya. Pada akhir 2022, Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 26 kasus. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2017 sebanyak 54 kasus. Untuk data tahun 2022, yang tercatat di aplikasi SIGA Aceh Besar, tidak mencakup korban kekerasan KTP/KTA dari 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, melainkan data yang di laporkan oleh masyarakat khusus 13 kecamatan dan ditangani oleh P2TP2A Aceh Besar di wilayah Hukum Polres Aceh Besar. Untuk tahun 2023, tercatat sebanyak 21 kasus, yaitu kasus anak sejumlah 15 kasus dan dewasa 6 kasus dan ditangani semua oleh Unit PPA Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan bekerja sama dengan lintas sektor terkait.

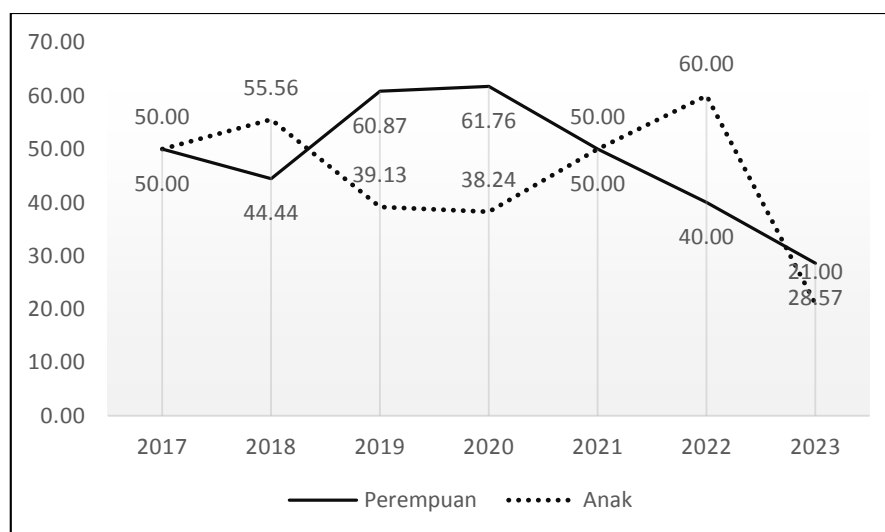


Sumber : SIGA Aceh Besar, 2025

Gambar 2.103 Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2017-2023

Perempuan korban kekerasan dalam pembahasan ini merupakan perempuan dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Sementara baik perempuan maupun laki-laki berusia kurang dari 18 tahun yang menjadi korban kekerasan dikategorikan sebagai anak korban kekerasan. Lokasi terjadinya kekerasan baik di dalam rumah tangga, tempat kerja, sekolah, fasilitas umum, lembaga pendidikan kilat, dan lainnya. Bentuk dari kekerasan berupa fisik, psikis, seksual, eksploitasi, maupun penelantaran. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Besar meningkat setiap tahunnya secara riil tetapi banyak yang tidak dilaporkan. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak bersifat fluktuatif setiap tahunnya

Selain itu, dari setiap 100.000 anak di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 terdapat 1-2 anak korban kekerasan. Secara nasional, rasio perempuan maupun anak korban kekerasan Kabupaten Aceh Besar menduduki peringkat lima yang terendah.



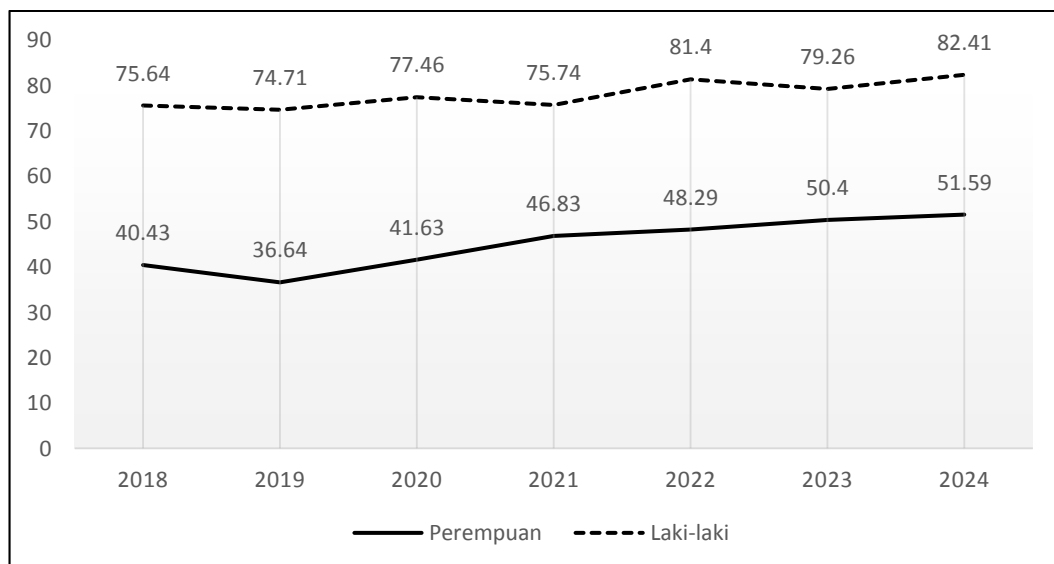
Sumber data : SIGA Kabupaten Aceh Besar (diolah), 2025

Gambar 2.104 Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Aceh Besar 2017-2023

Persentase Perempuan Korban KDRT Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Meskipun begitu korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. Di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023, sebesar 36,13 persen perempuan yang mengalami kekerasan dan dicatatkan dalam BKKBN menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Angka tersebut jauh di atas persentase perempuan korban KDRT Aceh dan nasional.

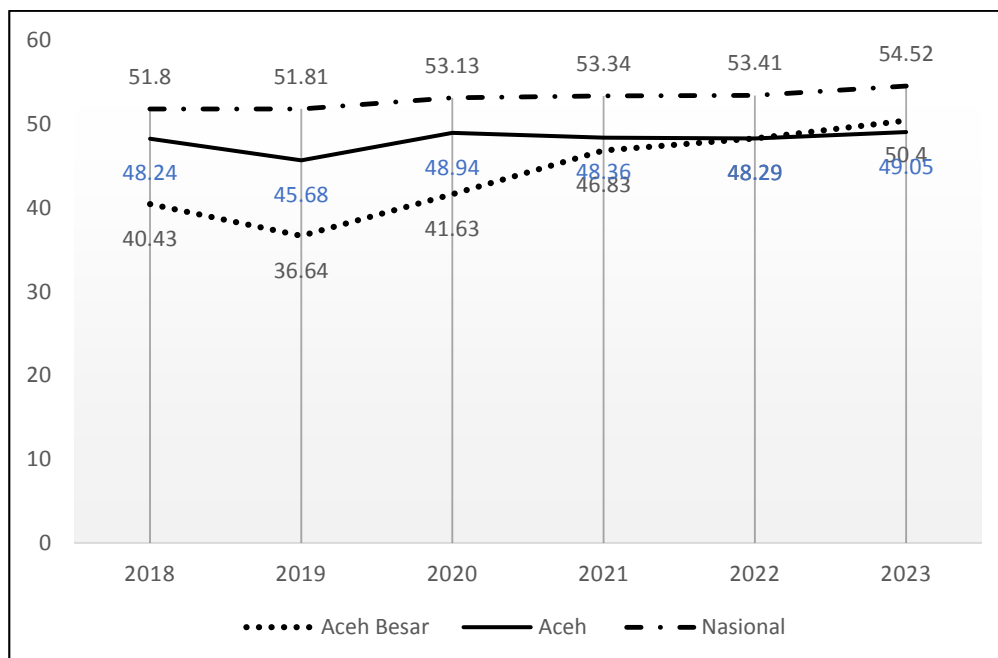
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan digunakan untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2018 hingga 2023 masih selalu berada di bawah partisipasi angkatan kerja laki-laki. Meskipun begitu, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar terus mengalami peningkatan dari 40,43 persen pada tahun 2018 menjadi 50,4 pada tahun 2023. Oleh karena itu dapat dikatakan partisipasi perempuan di dunia kerja semakin meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih jauh di bawah angka partisipasi kerja laki-laki.



Sumber Aceh Besar Dalam Angka (Diolah), 2025

Gambar 2.105 Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2024

Meski partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2018 hingga 2024 (hanya mengalami penurunan di tahun 2019), partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018 sampai dengan 2021 termasuk yang relatif rendah di Aceh. Namun, pada tahun 2022 angka partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Aceh Besar mengalami kenaikan yang cukup besar dari 46,83 menjadi 48,29 atau berada pada rangking ke-11 dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar menduduki peringkat ke-11 yang tertinggi di Aceh dan ke-376 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.



Sumber data : Provinsi dalam angka tahun 2025

Gambar 2.106 Perbandingan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh dan nasional Tahun 2018-2024

Stereotip gender atau disebut generalisasi pengharapan mengenai aktivitas, kemampuan, atribut dan pilihan yang sesuai jenis kelamin seseorang. membagi perempuan pada ranah domestik dan laki-laki sebagai pihak yang bekerja. Namun, seiring perkembangan zaman hal tersebut mulai mengalami

perubahan. Perempuan memiliki peran ganda, tidak hanya mengurus ranah domestik tetapi juga bekerja. Meskipun begitu, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar termasuk yang terendah ke 13 di Aceh, sebesar 48,29 persen di tahun 2022. Selain itu, proporsi perempuan yang menempati posisi pengambil keputusan (manajerial) di Kabupaten Aceh Besar masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pembangunan di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi kerja baik perempuan maupun laki-laki. Namun, pendidikan bagi perempuan di Kabupaten Aceh Besar masih perlu menjadi perhatian lantaran rata-rata lama sekolah perempuan tahun 2022 di Kabupaten Aceh Besar hanya sebesar 10,11 tahun. Angka tersebut lebih rendah daripada rata-rata lama sekolah laki-laki yang sebesar 10,55 tahun. Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, terutama bagi perempuan yang telah menikah, berdampak pada ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki. Hal ini menggambarkan ketidakberdayaan perempuan dalam ekonomi bisa meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Aceh Besar senada dengan data BKKBN didominasi oleh hubungan suami istri (Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Hal tersebut juga didukung oleh tingginya persentase perempuan korban KDRT di Kabupaten Aceh Besar tahun 2022, yakni 40 persen (Profil Perempuan Indonesia 2022). Selain itu, jumlah perempuan korban kekerasan dan rasio anak korban kekerasan per 100.000 anak terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021.

2.3.1.4 Sumber Daya Manusia Yang masih Rendah

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Besar mengalami pertumbuhan positif, menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat yang mencakup pendidikan,

kesehatan, dan standar hidup layak. Namun, bila dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi Aceh maupun nasional, IPM Aceh Besar masih menghadapi sejumlah tantangan penting. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang meliputi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal, meskipun ada upaya peningkatan di sektor kesehatan dan pendidikan, kualitas SDM di Aceh Besar masih perlu ditingkatkan. Tantangan ini mencakup rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan tenaga kerja yang terbatas, dan kurangnya tenaga kerja terampil di sektor-sektor tertentu. Hal ini menghambat daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketimpangan Antar wilayah yang Tinggi terdapat disparitas pembangunan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini mencakup akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan peluang ekonomi, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Ketahanan Pangan yang rentan dimana Aceh Besar masih menghadapi tantangan terkait ketahanan pangan, dengan ketidakpastian dalam pasokan pangan yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan produksi lokal.

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan, transformasi tata kelola pemerintahan di Aceh Besar masih perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Belum maksimal Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Aceh Besar masih memerlukan perhatian khusus agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini mencakup konservasi sumber daya alam, pengurangan kerusakan lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim.

Infrastruktur yang Belum Memadai keterbatasan infrastruktur, seperti jalan rusak, terbatasnya akses listrik di beberapa wilayah, dan kurangnya pelabuhan yang memadai, meningkatkan biaya logistik dan menghambat distribusi barang. Kondisi ini mempengaruhi daya saing produk lokal dan menghambat investasi.

Akses Permodalan UMKM yang terbatas banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena persyaratan yang rumit dan agunan yang minim. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan delapan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029. Misi-misi tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, transformasi tata kelola pemerintahan, peningkatan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, sehingga Aceh Besar dapat mencapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Data Perkembangan IPM di Kabupaten Aceh Besar terlihat bahwa dalam satu dekade terakhir, IPM Aceh Besar meningkat sebesar 5,37 poin, dari 70,61 pada 2013 menjadi 75,98 pada 2023. Namun, pertumbuhan ini cenderung melambat terutama pada masa pandemi (2020–2021), di mana kenaikan IPM nyaris stagnan.

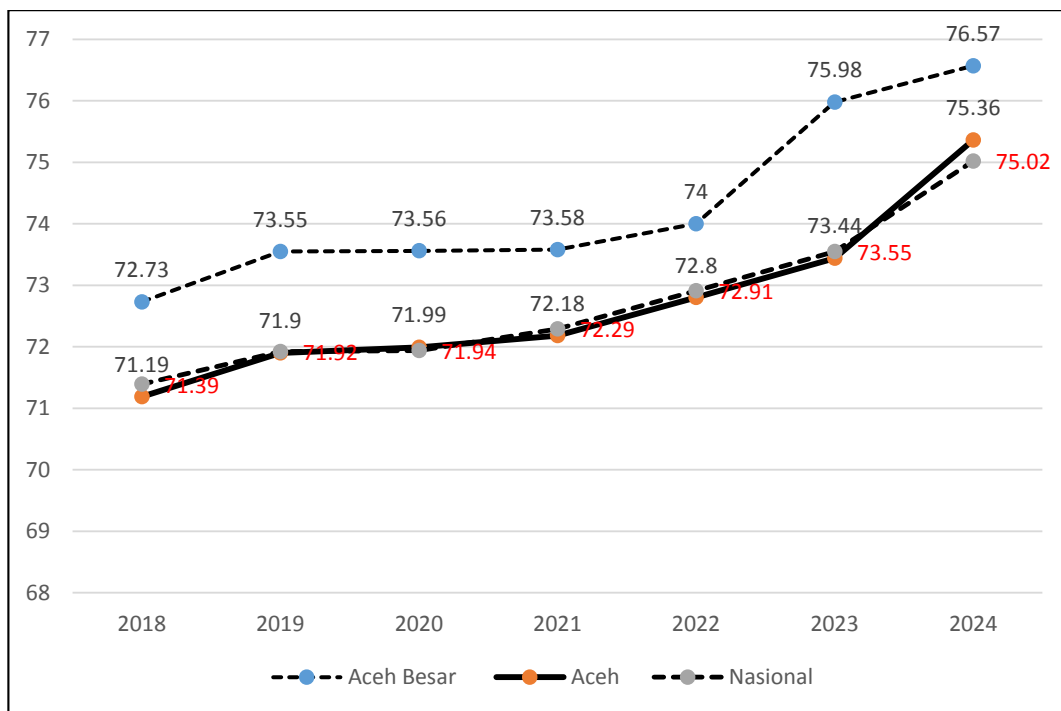
Komponen Penyusun IPM Aceh Besar: Tantangan Utama IPM terdiri dari tiga dimensi utama: kesehatan (UHH), pendidikan (HLS dan RLS), dan daya beli (pengeluaran per kapita). Berdasarkan data, Aceh Besar memiliki permasalahan antara lain Umur Harapan Hidup (UHH) stagnan di kisaran 69 tahun, jauh di bawah rata-rata nasional yang pada 2024 mencapai 73 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) hanya meningkat sedikit dari 14,21 tahun pada 2018 menjadi 14,76 tahun pada 2024. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meskipun meningkat dari 9,46 tahun menjadi 10,37 tahun, masih menunjukkan bahwa sebagian

masyarakat belum menyelesaikan pendidikan menengah. Pengeluaran per kapita pada 2023 sebesar Rp10,3 juta, masih tertinggal dari rata-rata nasional yang melebihi Rp12 juta per tahun. Ini menunjukkan bahwa meskipun IPM meningkat, dimensi pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapat perhatian serius.

Angka IPM Nasional dan Provinsi Aceh berdasarkan data BPS. Aceh Besar selalu berada di atas rata-rata Provinsi Aceh, yang menandakan bahwa pembangunan manusia di kabupaten ini cenderung lebih baik dibanding kabupaten/kota lain di provinsi tersebut. Namun, IPM Aceh Besar masih berada di bawah rata-rata nasional, yang menandakan adanya kesenjangan pembangunan manusia secara nasional, terutama pada aspek pendidikan dan ekonomi. Aceh Besar menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh, namun tetap tertinggal dari target-target pembangunan nasional.

Meskipun IPM Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan konsisten, beberapa tantangan krusial masih harus diatasi, terutama dalam hal: Peningkatan kualitas dan akses pendidikan, khususnya untuk jenjang menengah dan atas. Perluasan akses layanan kesehatan, termasuk fasilitas dan tenaga medis di kecamatan-kecamatan dengan kepadatan rendah. Penguatan ekonomi lokal, melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.

Untuk mengejar ketertinggalan dari IPM nasional, pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang lebih terarah, seperti intervensi program pendidikan vokasional, pelayanan kesehatan berbasis komunitas, dan pengembangan kawasan ekonomi desa. Perbandingan tren perkembangan IPM Nasional, Aceh dan Aceh Besar dapat di lihat pada gambar 2.107.

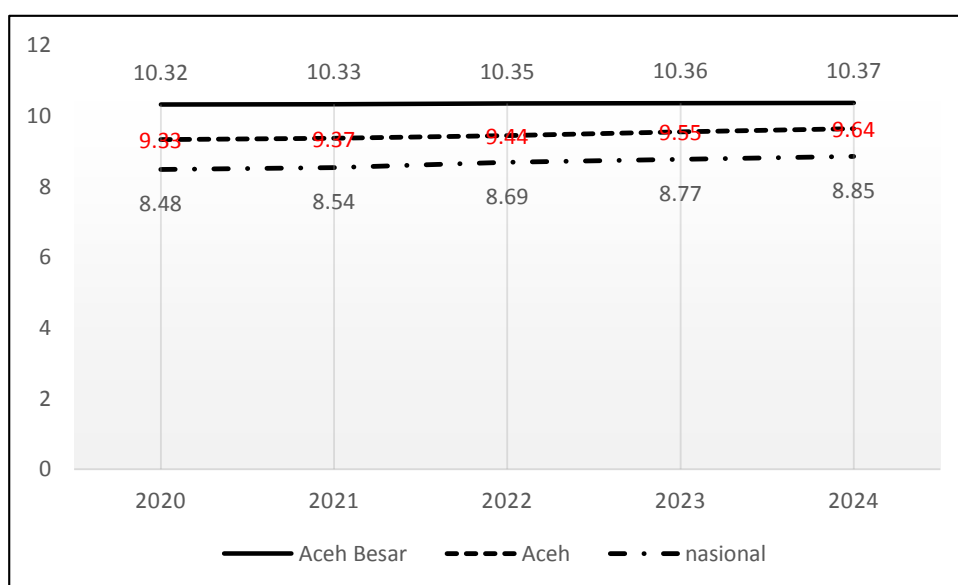


Gambar 2.107 Indek Pembangunan Manusia Nasional , Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024

B. Rata-rata Lama Sekolah

Kabupaten Aceh Besar memiliki angka rata-rata lam sekolah pada tahun 2023 rata-rata sebesar 10,36 tahun dimana laki-laki 10,56 tahun dan Perempuan 10.36 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,35 dimana laki-laki 10,55 tahun dan Perempuan 10.31 tahun. Angka rata-rata sekolah ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan gambar dibawah ini rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Besar lebih tinggi dibandingkan dengan Aceh, dan Nasional. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga

pengajar yang memadai. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM membantu menilai sejauh mana akses pendidikan merata di masyarakat, memastikan bahwa sebanyak mungkin individu dapat mengakses pendidikan pada berbagai tingkat adalah kunci untuk mengembangkan SDM yang seimbang dan berpotensi tinggi. Melalui APM, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memantau dan meningkatkan akses pendidikan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM di suatu wilayah. Begitu juga dengan Kabupaten Aceh Besar, APM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil.



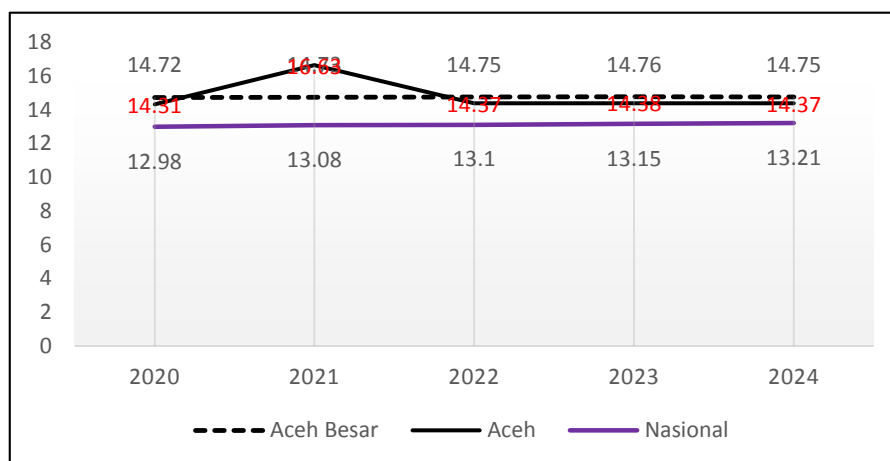
Gambar 2.108 Rata – rata Lama Sekolah Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2020 – 2024

C. Harapan Lama Sekolah

Angka HLS Kabupaten Aceh Besar yaitu 14,76 tahun mencerminkan perbaikan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia selama dekade terakhir dan angka capaian di Atas Aceh dan Nasional. . Sementara Aceh pada tahun

2023: Dengan angka HLS 14,38 tahun, Provinsi Aceh menempati posisi kedua tertinggi di Indonesia, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Sementara Secara Nasional Angka HLS nasional sebesar 13,15 tahun mencerminkan perbaikan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia selama dekade terakhir.

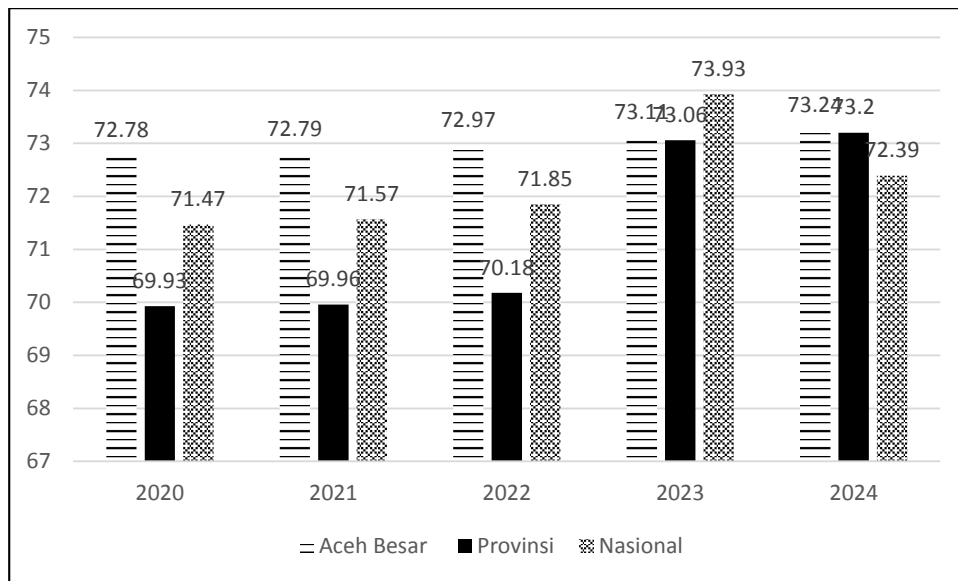
Permasalahan masih lambannya HLS di Kabupaten Aceh Besar antara lain Penyebab Harapan Lama Sekolah Rendah di Kabupaten Aceh Besar antara lain Keterbatasan Akses Pendidikan di Wilayah Tertinggal dan Pesisir, Banyak desa di wilayah Aceh Besar yang terpencil atau jauh dari pusat kota, membuat anak-anak kesulitan mengakses sekolah menengah atas atau pendidikan lanjutan. Selain itu penyebab lainnya Faktor Ekonomi Keluarga, Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tua bekerja, terutama di sektor informal seperti pertanian atau nelayan. Minimnya Kesadaran Pentingnya Pendidikan. Di beberapa komunitas, terutama pedesaan, pendidikan formal masih belum dianggap sebagai jalan utama menuju peningkatan kualitas hidup dan masih terdapat Perkawinan Dini. Praktik perkawinan usia muda dapat memutus jenjang pendidikan terutama bagi perempuan, yang menyebabkan HLS menjadi rendah. Rendahnya Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah yang kurang memadai (fasilitas, guru, perpustakaan, laboratorium) membuat siswa tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Tingginya Tingkat Dropout siswa serta banyak siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK karena alasan biaya, kurangnya motivasi, atau keterbatasan sekolah di daerah mereka.



Gambar 2.109 Harapan Lama Sekolah Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024

D. Usia Harapan Hidup

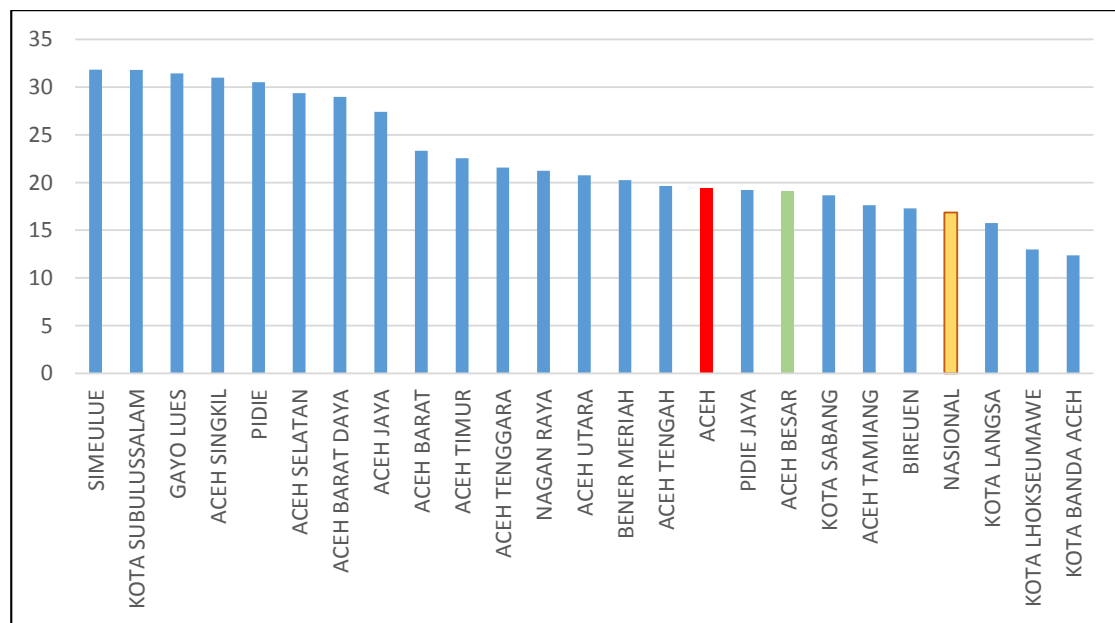
Usia Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka usia Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu wilayah, termasuk dalam hal ini Kabupaten Aceh Besar. Gambar di bawah ini menunjukkan UHH Kabupaten Aceh Besar dan wilayah sampai Tahun 2024, UHH di Kabupaten Aceh Besar sebesar 74.24 tahun naik dari tahun 2023. Angka ini di bawah Aceh 73,2 namun masih lebih tinggi dibandingkan UHH Nasional sebesar 72,39. Dalam rencana Pembangunan suatu wilayah, UHH dapat dijadikan acuan pemerintah dalam mengadakan program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 2.110 Usia Harapan Sekolah Nasional, Aceh dan Aceh Besar Tahun 2018 – 2024

E. Angka Kematian Bayi

Permasalahan kesehatan di Kabupaten Aceh Besar terkait dengan derajat kesehatan masyarakat di antaranya yaitu kematian bayi. Meskipun angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Besar merupakan peringkat 7 (tujuh) yang terendah di Aceh di tahun 2024, jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Aceh Besar dalam rentang tahun 2020 hingga tahun 2024 menjadi salah satu dari lima wilayah penyumbang kematian bayi terbanyak di Aceh. Pada tahun 2024 hampir 40 persen kasus kematian bayi terjadi di Kecamatan Kuta Baro, lalu diikuti oleh Kecamatan Darul Imarah.



Sumber : BPS Aceh, 2025

Gambar 2.111 Peringkat Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kematian bayi di Kabupaten Aceh Besar paling banyak terjadi pada usia 0-28 hari (neonatal). Kasus kematian neonatal tertinggi berada di Kecamatan Kuta Baro (5 kasus), Kecamatan Darul Imarah (5 kasus), serta Kecamatan Ingin Jaya (4 kasus). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar penyebab kematian neonatal (0-28 hari) paling banyak adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah < 2.500 gram) sebesar 25 kasus, lalu diikuti oleh asfiksia sebanyak 8 kasus. BBLR harus menjadi perhatian karena tidak hanya meningkatkan risiko mortalitas, tetapi juga anak dengan riwayat BBLR memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami stunting.

Salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko kematian bayi adalah mengoptimalkan kunjungan neonatal. Kunjungan neonatal sesuai standar diharapkan dapat mendeteksi secara dini adanya penyakit atau tanda bahaya yang dapat berujung pada kematian bayi. Namun, cakupan kunjungan bayi (neonatal) di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2023 belum mencapai 100%. Salah satu penyebabnya adalah akses masyarakat ke puskesmas maupun puskesmas pembantu yang masih terbatas, seperti di Kecamatan Kuta Baro

Perbandingan puskesmas dengan jumlah penduduk belum memadai (Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Besar 2022). Seperti di Kecamatan Kuta Baro yang memiliki waktu tempuh sebesar 30-60 menit untuk mencapai sarana kesehatan terdekat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023).

Salah satu penyebab banyaknya kasus BBLR yang menyebabkan kematian bayi adalah ibu hamil yang menderita anemia. Salah satu strategi untuk mengurangi kasus anemia pada ibu hamil adalah melalui pembagian tablet tambah darah. Namun, persentase ibu hamil di Kabupaten Aceh Besar yang mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2023 belum mencapai 100 persen. Bahkan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah di Kecamatan Lhoong, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Pulo Aceh belum mencapai 80 persen. Adanya ibu hamil yang belum mendapatkan tablet tambah darah berkaitan dengan kunjungan ibu hamil (K4) yang juga belum mencapai 100 persen. Masih terdapat perbedaan jumlah K1 dengan K4 yang dicatat sebagai angka *drop out*. Adanya *drop out* K4 disebabkan oleh perpindahan domisili ibu hamil yang tidak tercatat (Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Besar 2022).

Penyebab lain dari kematian post neonatal dan balita di Kabupaten Aceh Besar adalah diare. Pemerintah mencanangkan LINTAS DIARE (Lima Langkah Tuntas Diare) yang menganjurkan semua penderita diare mendapatkan oralit maupun zinc. Namun, persentase penderita diare semua umur dan balita adalah 21 persen dengan jumlah kasus 2118. Berdasarkan data kasus tertinggi di Kecamatan Darul Imarah dengan jumlah kasus 343. Tata laksana penderita diare perlu mendapat perhatian, karena pada umumnya ibu/ pengasuh anak belum mengetahui pengobatan dan perawatan penderita diare untuk mendapatkan oralit dan zinc masih di bawah 50 persen. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian lantaran diare yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan kehilangan cairan maupun hilangnya zat gizi yang dapat meningkatkan risiko gagal tumbuh atau stunting.

Masalah mortalitas di Kabupaten Aceh Besar tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi, tetapi juga masih tingginya jumlah kematian ibu. Kabupaten

Aceh Besar memiliki jumlah kematian ibu terbanyak ke 16 di Aceh. Tingginya jumlah kematian ibu terkait dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan maupun kondisi ibu. Kematian ibu di Kabupaten Aceh Besar paling banyak terjadi di masa nifas (60 persen). Pelayanan nifas menjadi strategi untuk mendeteksi dini komplikasi pasca melahirkan. Namun, cakupan pelayanan nifas di beberapa kecamatan belum mencapai 100 persen. Hanya di Kecamatan Peukan Bada dan Kecamatan Indrapuri yang memiliki cakupan pelayanan nifas (KF-3) 100 persen.

Kecamatan Baitussalam memiliki jumlah kematian ibu tertinggi. Di tahun 2023 kematian ibu di Kecamatan Baitussalam paling banyak terjadi setelah melahirkan. Kematian ibu hamil di Kecamatan Darul Imarah tahun 2020 banyak disebabkan oleh covid-19. Sementara itu di tahun-tahun sebelumnya kematian ibu di Kecamatan Darul Imarah disebabkan oleh perdarahan dalam kehamilan. Kematian ibu tertinggi kedua berada di Kecamatan Baitussalam Kematian ibu di Kecamatan Baitussalam paling banyak terjadi pada masa nifas yang disebabkan oleh perdarahan maupun hipertensi. Sementara itu, kematian ibu di Kecamatan Darul Imarah paling banyak terjadi di masa melahirkan. Hal tersebut senada dengan temuan (kementrian Kesehatan) belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (92,82 persen).

Masalah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Besar salah satunya diidentifikasi melalui rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk. Namun, rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk Kabupaten Aceh Besar masih berada di bawah angka 1 atau belum sesuai standar WHO. Masalah pelayanan kesehatan tidak hanya terjadi di tingkat rumah sakit, tetapi juga di tingkat (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Rasio posyandu per 1000 penduduk di beberapa kecamatan masih di bawah angka 1 atau belum ideal, yaitu Kecamatan Masjid Raya, Darul Imarah dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Selain jumlahnya yang belum ideal, persentase posyandu aktif di Kabupaten Aceh Besar sudah berada di 100 persen. Dimana seluruh posyandu di Kabupaten Aceh Besar sudah dinyatakan sebagai Posyandu Aktif.

Pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita di Kabupaten Aceh Besar menemui beberapa masalah. Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kecamatan

Baitussalam, Kecamatan Ingin Jaya, serta Kecamatan Blang Bintang masih belum mencapai 100%. Selain itu, cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Aceh Besar cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2022. Cakupan pelayanan kesehatan balita di Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Ingin Jaya, serta Kecamatan Blang Bintang masih di bawah rata-rata Kabupaten Aceh Besar dan persentase balita yang mendapatkan imunisasi campak di Kabupaten Aceh Besar menjadi yang terendah ke 17 dari 23 Kabupaten di Aceh. Cakupan Imunisasi dasar lengkap belum ada puskesmas di Aceh Besar yang mencapai target 100 persen. Sementara itu, cakupan imunisasi campak juga belum ada Puskesmas yang mencapai target 100 persen. Kedua masalah tersebut disebabkan karena penolakan oleh Sebagian Masyarakat. Untuk Ketersediaan vaksin di Aceh Besar Lengkap.

Sumber daya dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Besar juga masih menghadapi masalah, seperti rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Aceh Besar masih di bawah standar yang ditetapkan WHO. Selain itu, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Aceh Besar belum mencapai target yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 54 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan 2011-2025. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Aceh Besar masih jauh dari target yang ditetapkan. Meskipun rasio dokter di Kabupaten Aceh Besar sudah berhasil mencapai 23 per 100.000 penduduk, angka tersebut masih di bawah target WHO.

Permasalahan terkait status gizi di Kabupaten Aceh Besar terlihat dari persentase balita gizi buruk yang tertinggi/ terendah di Aceh pada tahun 2022 serta prevalensi stunting di kabupaten Aceh Besar tergolong medium menurut standar yang ditetapkan oleh WHO, bahkan Kecamatan Kuta Baro memiliki prevalensi stunting dengan kategori tinggi. Selain itu, prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Besar juga lebih tinggi daripada rata-rata Aceh. Stunting merupakan permasalahan yang multidimensi. Dari segi pemenuhan gizi, pemberian ASI eksklusif pada bayi <6 bulan penting untuk diperhatikan karena mempengaruhi terjadinya stunting pada anak usia 2-5 tahun. Namun, persentase bayi <6 bulan yang mendapatkan ASI

eksklusif di Kabupaten Aceh Besar masih rendah, cenderung di bawah/ atas capaian Aceh dan capaian nasional sejak tahun 2017 hingga 2022.

Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga oleh faktor tidak langsung, seperti sanitasi, edukasi ibu, kemiskinan, serta air bersih. Edukasi ibu menjadi hal yang perlu diperhatikan karena di Kabupaten Aceh Besar masih terdapat kelahiran oleh ibu yang berusia 15-19 tahun (ASFR 15-19 sebanyak 18,2%). Adanya kelahiran oleh ibu yang berusia 15-19 tahun di Kabupaten Aceh Besar dipicu oleh tingginya perkawinan pertama kurang dari 17 tahun. Dalam rangka menghilangkan stunting, perlu memperhatikan akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 86,82 persen di tahun 2024.

Angka notifikasi semua kasus tuberkulosis cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017- 2022. Masih terdapat beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Besar yang belum mencapai angka 0 untuk *Case Fatality Rate* kasus DBD, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Montasik, Kecamatan Suka Makmur , Lembah Seulawah, Kecamatan Lhoknga, dan Kecamatan Kuta Baro. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena Pemerintah Indonesia merencanakan nol kematian akibat demam berdarah pada tahun 2030. Masih ada kasus positif malaria di beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Lembah Seulawah dan Kecamatan Indrapuri. Saat ini pengobatan malaria yang terstandar dan dinilai efektif adalah *Artemisinin-based Combination Therapy* (ACT), persentase pengobatan ACT di Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 adalah 100 persen. (Profil Kesehatan Kabuapten Aceh Besar 2022).

Penemuan dan persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standart pada balita di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021, yaitu 129 jiwa dengan persentase realisasi temuan sebesar 6,26 persen (Profil Kesehatan Aceh/Kabupaten Aceh Besar 2022). Temuan kasus pneumonia pada balita tertinggi berada di Kecamatan Darul Imarah yaitu 47 Kasus. Hasil analisis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar menjelaskan adanya anggota keluarga yang merokok di dalam rumah dapat meningkatkan risiko pneumonia pada anak. Senada dengan hal itu, persentase rumah tangga anak usia dini (0-6 tahun) yang

tinggal dengan anggota rumah tangga perokok di Kabupaten Aceh Besar sebesar 72,87% (Profil Anak Usia Dini 2022).

2.3.1.5 Masih Tingginya Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan dengan pemenuhan layanan infrastruktur masyarakat dan kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Layanan tersebut diantaranya adalah layanan sanitasi, air minum, air bersih, drainase, irigasi, jalan, dan ruang terbuka publik. Permasalahan ditemukan dalam hal pemenuhan layanan air minum dan air limbah masyarakat.

A. Jalan

Proporsi kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2022 sebesar 779,41 Km atau 60,92 persen meningkat 1,56 persen pada tahun 2023 menjadi 779,41 Km atau 62,48 Km dari total Panjang jalan 1.279,44 Km. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten masih dibawah target nasional sebesar 65 persen. Salah satu permasalahan masih rendahnya tingkat kemantapan jalan Kabupaten adalah drainase yang tidak berfungsi, atau bahkan tidak adanya drainase yang mengakibatkan air menjadi tergenang di badan jalan. Kabupaten Aceh Besar merupakan lokasi Pertambangan galian C dan tingginya pertumbuhan Pembangunan Perumahan dikawasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang mengakibatkan terjadinya Overtonase Kendaraan yang melewati ruas jalan Kabupaten. Kondisi kemantapan jalan di kabupaten Aceh Besar tahun 2021 sebesar 63,39 persen sedangkan tahun 2023 kemantapan jalan menjadi 62,00 persen dimana terjadi penurunan sebesar 1,69 poin.

4. Air Minum

Rumah Tangga yang memiliki akses air minum Kabupaten Aceh Besar pada tahun anggaran 2022 sebesar 91,08 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 92,69 persen. Permasalahan pokok yang masih dihadapi

dalam penyediaan air bersih adalah tingkat pelayanan yang belum memadai karena layanan jaringan perpipaan yang tersedia belum mencakup secara keseluruhan, terutama desa yang terletak jauh dari perkotaan. Untuk wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan ini maka masih menggunakan air permukaan sebagai sumber air bersih dengan kualitas air baku dan kuantitas yang sangat fluktuatif pada saat musim hujan dan kemarau. Hal ini menyebabkan kualitas air tanah atau air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat. Perluasan jaringan perpipaan merupakan cara untuk peningkatan akses pelayanan air minum pada daerah-daerah yang sudah memiliki layanan air minum melalui jaringan perpipaan dan Pembangunan SPAM pada daerah-daerah pesisir dan kepulauan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih yang berkontribusi besar dalam rangka penanganan stunting. Tahun 2023 Kabupaten Aceh Besar Persentase RT yang memiliki akses air Minum Layak sebesar 92,69 persen sedang Provinsi Aceh sebesar 89,74 persen.

5. Air Limbah

Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi pada tahun 2022 sebesar 86,7 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 86,78 persen. Sedangkan permasalahan yang ditemukan dalam hal pemenuhan layanan di sektor air limbah adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat untuk dapat lebih bersih agar terciptanya lingkungan permukiman yang sehat. Selain itu masih kurangnya tanggungjawab dan peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga fasilitas sanitasi yang telah terbangun sehingga menyebabkan lingkungan permukiman masih tercemar dengan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri.

Sektor sanitasi merupakan faktor yang sangat menentukan untuk menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, dengan cara menyehatkan lingkungan sekitar berupa tanah, air dan

udara. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh setiap rumah tangga dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu langkah pencegahan stunting. Untuk Persentase RT yang memiliki akses sanitasi Layak tahun 2023 sebesar 89,78 persen sedangkan Provinsi Aceh sebesar 78,85 persen

D. Perbatasan Wilayah

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Aceh Besar tahun 2012 – 2032 tercantum arahan perkembangan kawasan strategis Kabupaten Aceh Besar dengan arahan meliputi tujuan mewujudkan dan sinkronisasi pemanfaatan ruang melalui integrasi wilayah perbatasan meliputi :

A1. Kawasan perbatasan negara.

Kawasan strategis perbatasan negara antara lain termasuk pulau-pulau kecil terdepan yang merupakan perbatasan NKRI dengan negara India/Thailand/Semenanjung Malaysia. Kawasan ini termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan. Di wilayah Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi bagian dari kawasan strategis ini adalah Pulau Rusa dan Pulau Benggala (menurut RTRWN). Pulau-pulau yang menjadi bagian KSN ini merupakan daerah tidak berpenghuni sehingga diarahkan untuk pengelolaan pertahanan dan keamanan oleh pemerintah pusat guna menjaga kedua pulau tersebut sebagai bagian terluar wilayah kedaulatan NKRI.

B1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.

Sudut kepentingan dari kawasan strategis nasional ini juga adalah pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini akan mencakup wilayah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar (termasuk pulau-pulau di Kepulauan Aceh Besar), dan Kabupaten Pidie. Pengembangan KAPET Bandar Aceh Darussalam serta

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang bila bersinergi akan memberikan peluang munculnya “pusat pertumbuhan” (*growth center*) di ujung utara Pulau Sumatera, yang akan menjadi “pintu gerbang” ekonomi Indonesia bagian barat berhadapan dengan ASEAN, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Global.

Cakupan KSN KAPET Bandar Aceh Darussalam yang berada di Kabupaten Aceh Besar meliputi seluruh kecamatan yang ada kecuali Kecamatan Pulo Aceh. Hal ini ditegaskan melalui Keputusan Gubernur Aceh No.139/297/2010 tentang Penyesuaian Wilayah Kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bandar Aceh Darussalam yaitu meliputi seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kota Banda Aceh.

Pengembangan KSN KAPET Bandar Aceh Darussalam di Kabupaten Aceh Besar adalah diarahkan untuk pengembangan kawasan industri baru di Ladong (Kecamatan Mesjid Raya) dan infrastruktur penunjang di sekitarnya. Sedangkan kecamatan lainnya di Kabupaten Aceh Besar apabila memungkinkan dan sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Besar ini dapat pula dikembangkan menjadi wilayah yang menunjang kegiatan strategis nasional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk percepatan ekonomi regional di wilayah yang termasuk dalam KAPET Bandar Aceh Darussalam.

C1. Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Ekonomi.

Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) Zona Pusat (Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Besar).

D1. KSK Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Banda Aceh

Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Banda Aceh terdiri atas Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya.

E1. KSK Koridor Perkotaan Lambaro – Sibreh

Kawasan Koridor Perkotaan Lambaro – Sibreh merupakan kawasan yang saat ini sedang mengalami percepatan pertumbuhan yang berada di Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Suka Makmur.

2.3.1.6 Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah Yang Belum Optimal

A. Persandian

Permasalahan utama persandian adalah belum optimalnya sarana dan prasarana persandian, belum optimalnya cakupan pengelolaan persandian, belum kuatnya keamanan informasi serta keterbatasan infrastruktur sumber daya pemerintahan.

B. Statistika

Statistika merupakan satu cara yang dapat menentukan bagaimana pembangunan daerah berjalan selama periode tertentu. Statistik bersifat konkrit dan kaku karena karakteristik daerah secara jelas dapat digambarkan melalui data-data dan angka-angka. Pada era modern saat ini statistika mulai mendapat tuntutan untuk bersifat terbuka dan transparan sehingga masyarakat secara umum dapat menilai kinerja pemerintah secara langsung. Dalam hal ini permasalahan ditemukan dalam hal tidak inventarisasi data secara baik dan sulit diakses. Hal ini menunjukkan, pengelolaan data statistik di Kabupaten Aceh

Besar perlu di tingkatkan sehingga tampilan data dapat diakses, dibuka, dan dipelajari lebih mudah oleh siapapun. Dengan kata lain masalah statistik di Kabupaten Aceh Besar antara lain belum optimalnya pengelolaan satu data/big data dan pola pemanfaatan secara geospasial.

C. Tata Kelola Pemerintah

Tata kelola pemerintah merupakan isu yang penting dalam harmonisasi hubungan antar pemerintah dan kelembagaan. Tata kelola pemerintah diukur dengan skor indeks capaian reformasi birokrasi di mana nilai indeks Kabupaten Aceh besar sebesar 44,99 atau kategori olah B pada tahun 2023. Upaya untuk meningkatkan reformasi birokrasi bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik berkualitas Good and Clean Governance serta layanan berbasis E-Government. Indikator lain dalam mengukur tata kelola pemerintah Kabupaten Aceh besar terlihat dalam tabel di bawah ini.:

Tabel 2.155.
Capaian Indikator Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Indikator tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (tahun 2024)	Satuan
Indeks Reformasi Birokrasi	50,23	Indeks
Indek Pelayanan Publik	3.58	Indeks
Indek Profesionalitas ASN	78.91	Indek
SAKIP	CC	
Nilai Maturitas SPIP	Level 3	
Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	
Implementasi SPBE	2.39	Indek
Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention)	86.22	Persen

2.3.2. Isu strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis ini memiliki sifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Isu strategis akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kinerja dan agenda kerja pembangunan yang tepat.

Isu jangka menengah Kabupaten Aceh Besar diperoleh dari hasil pemetaan masalah pembangunan dan telaah lingkungan strategis. Telaah ini untuk memahami isu pada konteks global, nasional, regional Sumatera dan Aceh. Selain itu, analisis untuk merumuskan isu strategis jangka menengah juga mengacu pada telaah isu strategis jangka panjang, isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RTRW. Dengan demikian, isu strategis yang akan dihasilkan memiliki rumusan yang sesuai kebutuhan daerah maupun untuk ikut merespon dinamika lingkungan strategis.

2.3.2.1 Megatren Isu Global

Megatren dapat diartikan sebagai transformasi global dalam periode jangka Panjang yang mempengaruhi aspek kehidupan transformasi global ini terdiri dari ini 10 (sepuluh) komponen yang terdiri dari :

1. Perkembangan Demografi Global:

- a. Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7 miliar jiwa dan akan semakin meningkat, hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 akan meningkatkan tantangan pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (pangan, energi dan air) dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan;
- b. Proporsi demografi seperti bertambahnya penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan;

- c. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis yang menyebabkan turunnya angka kelahiran.
2. Geopolitik dan Geoekonomi:
- a. Geopolitik:
 - 1. Eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru yang mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional;
 - 2. Perang antara Rusia dan Ukraina yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan tekanan bagi negara-negara lainnya, seperti inflasi global yang tinggi serta terjadinya krisis energi dan pangan;
 - 3. Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan.
 - b. Geoekonomi:
 - 1. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negeri berkembang;
 - 2. Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak tiga kali dibanding tahun 2015 yakni USD 74,0 triliun dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.
 - 3. Perkembangan Teknologi:
 - a. Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan Masyarakat;
 - b. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari Masyarakat;
 - c. Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor;
 - d. Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur dan sektor Pendidikan, menyebabkan sejumlah

jenis pekerjaan akan tergantikan oleh teknologi, serta berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi dan cara kerja pemerintah.

3. Peningkatan Urbanisasi Dunia:

- a. Dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di Kawasan perkotaan pada tahun 2050 di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies, dan urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota;
- b. Tekanan penduduk dan Pembangunan perkotaan pada di negara emerging economies umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik sehingga dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

4. Konstelasi Perdagangan Global:

- a. Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika;
- b. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital;
- c. Kerja sama Kawasan menciptakan hubungan perdagangan strategis.

5. Tata Kelola Keuangan Global:

- a. Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi pada perubahan struktur ekonomi dan demografi, di mana pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 berpotensi menyebabkan komposisi belanja negara akan lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun;
- b. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara;
- c. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan, di mana ke depan puluhan juta pekerjaan pada

jasa keuangan akan menghilang namun akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (skill) yang baru.

6. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*):
 - a. Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen dari populasi dunia, di mana pertumbuhan kelas menengah yang pesat tersebut akan menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik;
 - b. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru di masa mendatang, yakni pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi.
7. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, yakni kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang akibat bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi.
8. Perubahan iklim
 - a. Perubahan iklim, bersama kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (Triple Planetary Crisis) secara global akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari;
 - b. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global;
 - c. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.
9. Pemanfaatan Luar Angkasa (*Space Economy*), di mana tren eksplorasi antariksa semakin meningkat, dan pertumbuhan antariksa secara global akan tumbuh signifikan untuk jangka waktu yang panjang.

10. Peran Energi ekonomic

Adanya investasi sumberdaya manusia dan infrastruktur dan reformasi structural serta iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.

Berdasarkan pada uraian di atas, dinamika pembangunan saat ini dan masa depan akan dihadapkan pada tantangan megatren global yakni demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, peningkatan urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah (*middle class*), peningkatan persaingan pemanfaatan Sumber Daya Alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

Dari aspek demografi, ke depan diproyeksikan pertumbuhan populasi dunia akan terus meningkat hingga mencapai 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 kendati laju pertumbuhannya cenderung melambat, karena penambahan populasi dunia cenderung disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup. Proporsi demografi akan diwarnai dengan bertambahnya kelompok usia tua (*aging population*) dan tingginya penduduk usia muda, yang mana fenomena tersebut akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Sementara di sisi lain, tingginya populasi juga akan memberikan tantangan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di tengah keterbatasan pangan, energi dan air.

Dari aspek geopolitik, tantangan geopolitik yang dominan dan perlu diperhatikan adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan berpotensi memunculkan kekuatan baru. Peristiwa geopolitik yang saat ini sedang terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan berlangsung dalam waktu yang lama adalah perang antara Rusia dan Ukraina, dinamika kawasan Laut China Selatan dan persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang merupakan kawasan bernilai strategis dan diproyeksikan akan menjadi pusat ekonomi baru dunia. Sedangkan dari aspek geoekonomi, nilai *output* dunia

negara berkembang akan semakin dominan dan diproyeksikan akan menyumbang sebesar 55 persen dari nilai *output* dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama. Namun di sisi lain, sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan utama negara berkembang sehingga memberikan tantangan berupa kesiapan dalam menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Dari aspek perkembangan teknologi khususnya perkembangan teknologi digital seperti *Internet of Things* (IoT), *block chain*, *Artificial Intelligence* (AI), *auto robotic system*, dan semacamnya, di mana kecepatan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, memberikan tantangan berupa kesiapan yang adaptif dari masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang tentunya perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik.

Dari aspek urbanisasi dunia, di mana menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050 dan 95 persen penambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Mengingat peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota sementara pembangunan perkotaan pada negara *emerging economies* umumnya kurang terencana dengan baik, maka akan menimbulkan tantangan berupa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat guna memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

Dari aspek konstelasi perdagangan global, akan terjadi pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global yang mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Ke depan diproyeksikan bahwa perekonomian negara berkembang akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia dengan menggantikan posisi negara maju yang saat ini tergabung dalam G7. Salah satu tantangan yang muncul adalah penciptaan kerja sama kawasan guna menciptakan hubungan perdagangan strategis.

Dari aspek tata kelola keuangan global, tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara dan perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan dan mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan di mana ke depan puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang namun akan tergantikan oleh pekerjaan baru dengan kemampuan (skill) baru. Kondisi tersebut akan memberikan tantangan bagi tata kelola keuangan global untuk beradaptasi dengan praktik-praktik tata kelola keuangan baru.

Dari aspek pertumbuhan kelas menengah (middle class), diperkirakan bahwa jumlah kelas menengah dunia akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat akan mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life style). Kondisi tersebut memberikan tantangan bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan jenis pekerjaan baru yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan proses, konsumsi yang lebih beragam, serta kebutuhan gaya hidup baru (new life style).

Dari aspek persaingan sumber daya alam, di mana akan terjadi kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam berupa energi, air dan pangan akibat meningkatnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam. Hal ini menimbulkan tantangan berupa efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru dan perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

Dari aspek perubahan iklim, di mana perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global-The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena tersebut akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, lingkungan, penghidupan masyarakat dan laju pembangunan secara

keseluruhan. Secara umum dapat dikatakan perubahan iklim akan mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan signifikan. Tantangan yang diberikan atas perubahan iklim adalah meninggalkan paradigma Pembangunan lama yang berorientasi pada Business as Usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan, yakni melalui aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor (seperti sektor energi, industri, lahan dan sektor lainnya) yang selaras dengan tren kebijakan sekaligus strategi Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon.

Dari aspek pemanfaatan luar angkasa, di mana tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir dan melahirkan tiga isu utama yakni ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*), memberikan tantangan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi guna mengeksplorasi luar angkasa.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;

- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu dan Tantangan Pembangunan Nasional

1. Rendahnya Produktivitas
2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat
4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada usia produktif
5. Geopolitik dan Geoekonomi
6. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

2.3.2.3 Isu Strategis Aceh

A. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka stunting yang meliputi:

1. Peningkatan Akses Makanan Bergizi: Meningkatkan akses masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan anak-anak, ke makanan bergizi seimbang

melalui promosi praktik pemberian makanan tambahan, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, dan penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan.

2. **Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan:** Meningkatkan akses masyarakat, terutama ibu hamil dan anak-anak, ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan pertumbuhan anak, imunisasi, dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif.
3. **Pendidikan Kesehatan dan Penyuluhan Gizi:** Melakukan pendidikan kesehatan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dan keluarga dengan anak balita, tentang pentingnya pola makan sehat, praktik pemberian makan yang baik, dan pentingnya nutrisi selama masa kehamilan dan pertumbuhan anak.
4. **Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan:** Mengimplementasikan program pemberian makanan tambahan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak balita yang mengalami stunting.
5. **Peningkatan Akses Sanitasi dan Air Bersih:** Meningkatkan akses masyarakat, terutama di pedesaan, ke sanitasi yang layak dan air bersih untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi.
6. **Kolaborasi dan Sinergi:** Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya menurunkan stunting.
7. **Peningkatan Akses Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil:** Meningkatkan akses masyarakat di daerah pedesaan atau terpencil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan antenatal, imunisasi, layanan kesehatan reproduksi, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

B. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.

Pemerintah Aceh dapat mengimplentasikan pemerataan pendidikan, perkuatan pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca Masyarakat dengan cara sebagai berikut:

5. Menurunkan Disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk menurunkan disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh, diperlukan upaya lintas sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat
- b. Mendorong pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
- c. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
- d. Pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya
- e. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil

6. Memperkuat Pendidikan Vokasi

Untuk memperkuat pendidikan vokasi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi
- b. Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
- c. Membangun kemitraan dengan industri dan perusahaan lokal
- d. Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa
- e. Melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan vokasi

2. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan
- b. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Buku
- c. Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan
- d. Pembangunan Keterampilan Literasi Digital
- e. Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait
- f. Pengembangan Inisiatif Inovatif dalam promosi literasi
- g. Membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan

C. Penanggulangan Kemiskinan.

- a. Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk mengurangi kemiskinan, dengan cara sebagai berikut:
- b. Peningkatan Akses Layanan Dasar: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak.
- c. Pemberdayaan Ekonomi: Melakukan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pengembangan pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Bantuan Sosial: Memberikan bantuan tunai, pangan, atau pendidikan kepada keluarga miskin.
- e. Pemberdayaan Sosial dan Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
- f. Pembangunan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
- g. Pengembangan Sektor Pariwisata: Mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kemiskinan
- h. Perbaikan Tata Kelola: Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik.

D. Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pemerintah Aceh dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dengan cara sebagai berikut:

1. Dukungan UMKM: Memberikan akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk bagi UMKM
2. Investasi Pendidikan: Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan.
3. Membangun Infrastruktur: Membangun jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.
4. Promosi Investasi: Meningkatkan promosi investasi dan kemitraan dengan sektor swasta, serta menyediakan insentif dan kemudahan perizinan.
5. Promosi Pariwisata: Meningkatkan promosi pariwisata Aceh dan membangun infrastruktur pariwisata yang mendukung.
6. Diversifikasi Perekonomian: Mengembangkan sektor-sektor baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.
7. Keamanan dan Stabilitas: Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

E. Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk optimalisasi riset dan inovasi dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kapasitas: Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi.
- b. Pemanfaatan Teknologi Digital: Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik.
- c. Investasi R&D: Meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan melalui anggaran pemerintah dan kerjasama dengan lembaga penelitian.
- d. Infrastruktur Penelitian: Membangun infrastruktur penelitian dan inovasi untuk mendorong kolaborasi.

- e. Kolaborasi: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, universitas, dan perusahaan swasta.
- f. Budaya Inovasi: Membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh.
- g. Kebijakan Pendukung: Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset dan inovasi.

F. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat.

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara antara lain:

- a. Pengembangan UMKM: Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- b. Dukungan Petani dan Nelayan: Memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan teknologi pertanian modern, pelatihan keterampilan, dan akses pasar.
- c. Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan.
- d. Investasi Infrastruktur: Membangun infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.
- e. Investasi Strategis: Menginvestasikan dalam sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, dan industri manufaktur.
- f. Kemitraan Publik-Swasta: Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi.
- g. Pengembangan Ekonomi Berbasis Komunitas: Mengembangkan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik dan pariwisata berbasis masyarakat.
- h. Penguatan Sektor Pertanian dan Perikanan: Mengembangkan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani.
- i. Pengembangan Pariwisata: Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif.

G. Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk memperkuat industri pengolahan dan ekspor dengan cara:

- a. Pengembangan Kawasan Industri: Mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung.
- b. Investasi Infrastruktur: Membangun infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat.
- c. Akses Modal dan Teknologi: Memberikan akses mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan.
- d. Diversifikasi Produk: Mendorong diversifikasi produk-produk industri pengolahan dan mencari pasar ekspor baru.
- e. Peningkatan Kualitas: Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk industri pengolahan untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor.
- f. Kolaborasi: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan industri pengolahan.
- g. Kerjasama Internasional: Membangun jejaring dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan akses pasar internasional.

H. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.

Pemerintah Aceh dapat mengambil upaya strategis untuk pengembangan produktivitas pangan dan ekonomi hijau dengan cara sebagai berikut:

- a. Investasi Pertanian Berkelanjutan: Meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan dengan dukungan kepada petani.
- b. Infrastruktur Pertanian: Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk.
- c. Bantuan Petani: Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh sarana produksi yang ramah lingkungan.
- d. Pengembangan Pertanian Organik: Mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan.

- e. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.
- f. Energi Terbarukan: Mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g. Edukasi dan Promosi: Melakukan program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, serta mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Aceh.

I. Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk memperkuat dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan cara berikut:

- a. Investasi Infrastruktur: Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan.
- b. Pengembangan Kawasan Ekonomi: Mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan.
- c. Dukungan Sektor Ekonomi Lokal: Mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.
- d. Dukungan UMKM: Memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, dan promosi pasar.
- e. Pengembangan Pusat Pelayanan: Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan.
- f. Pengembangan Pariwisata: Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata.
- g. Dukungan Teknis: Memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada pengusaha lokal dan kelompok masyarakat lainnya.
- h. Fasilitas dan Layanan Publik: Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

J. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dengan cara sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika dan integritas.
- b. Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik.
- c. Pengawasan: Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian untuk memastikan penggunaan sumber daya publik yang efektif.
- d. Pencegahan Korupsi: Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika.
- e. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.
- f. Sistem Informasi: Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas.
- g. Komitmen Pemimpin: Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas.
- h. Kerjasama: Mengembangkan kerjasama dengan lembaga antikorupsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

K. Memperkuat Otonomi Khusus

Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan upaya untuk memperkuat otonomi khusus dengan cara sebagai berikut:

Implementasi Hukum: Memperkuat implementasi hukum dan peraturan terkait otonomi khusus Aceh.

- a. Kapasitas Institusi: Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan dalam mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.
- b. Rencana Pembangunan: Mengembangkan rencana pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi Aceh.

- c. Qanun: Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional.
- d. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat Aceh dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Kerjasama: Membangun kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
- f. Peran Lembaga Adat: Memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan dan kebudayaan.
- g. Keadilan bagi Semua: Memastikan implementasi otonomi khusus Aceh memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat Aceh.

L. Kemandirian dalam Ruang Fiskal

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian dalam ruang fiskal dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Pajak: Memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan reformasi perpajakan dan penegakan hukum.
- b. Kapasitas SDM: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perpajakan.
- c. Diversifikasi Pendapatan: Meningkatkan sumber pendapatan daerah di luar transfer pemerintah pusat.
- d. Promosi Investasi: Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- f. Pengelolaan Keuangan: Mengelola keuangan daerah secara efisien dan transparan.
- g. Perekonomian Mandiri: Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri.
- h. Kerjasama: Membangun kerjasama antara kabupaten/kota di Aceh untuk memperkuat kemandirian fiskal.

M. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk memperkuat syariat Islam dan Budaya Aceh dengan cara sebagai berikut:

- a. Kapasitas Lembaga: Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam.
- b. Pendidikan dan Penyuluhan: Melakukan program pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat.
- c. Implementasi Hukum Syariat: Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan.
- d. Promosi Budaya: Mendorong promosi dan pelestarian budaya Aceh sebagai bagian dari identitas daerah.
- e. Kerjasama: Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat sipil.
- f. Pariwisata Syariah: Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam.
- g. Pengakuan Hak: Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat Aceh untuk menjalankan agama dan budaya mereka.

N. Penanganan PMKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk Penanganan PMKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga dengan cara sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial: Memberikan bantuan sosial kepada PPKS dan penyandang disabilitas, termasuk santunan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan inklusif.
- b. Rehabilitasi: Mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas.
- c. Aksesibilitas: Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas.
- d. Pendidikan Inklusif: Mendorong implementasi pendidikan inklusif di Aceh.
- e. Pemberdayaan Ekonomi: Memberikan pelatihan keterampilan dan akses modal usaha bagi PPKS, penyandang disabilitas, dan perempuan.

- f. Perlindungan: Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
- g. Pendidikan Kesadaran Gender: Melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan kesetaraan gender.
- h. Dukungan Keluarga: Memberikan dukungan kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan keterampilan parenting

.

O. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk melaksanakan Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kebijakan Lingkungan: Mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial.
- b. Energi Terbarukan: Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan.
- c. Efisiensi Energi: Meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- e. Transportasi Berkelanjutan: Mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan.
- f. Pendidikan Lingkungan: Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat.
- g. Rencana Tata Ruang: Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi, deforestasi, alam dan alih fungsi lahan kawasan hutan lindung, mangrove dan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)/Kawasan Lindung Aceh.
- h. Kerjasama: Membangun kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan

P. Pengurangan Risiko Bencana

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk pengurangan risiko bencana dengan cara sebagai berikut:

- a. Rencana Penanggulangan Bencana: Membuat dan melaksanakan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dan terpadu.
- b. Infrastruktur dan Sistem Peringatan Dini: Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana.
- c. Pendidikan dan Pelatihan: Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan tindakan darurat.
- d. Pengendalian Pemanfaatan Lahan: Mengendalikan pemanfaatan lahan yang rawan bencana.
- e. Pengelolaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna), pengendalian pencemaran lingkungan dan mitigasi ancaman perubahan iklim.
- f. Infrastruktur Kedaruratan: Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, dan shelter.
- g. Pengelolaan Air dan Drainase: Meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir.
- h. Kapasitas Institusi Pemerintah: Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana.
- i. Kerjasama dan Sinergi: Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Q. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk memperkuat pembangunan kewilayahan dengan cara sebagai berikut:

- a. Investasi Infrastruktur: Melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, air bersih, dan listrik.

- b. Pengembangan SDM: Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses layanan kesehatan.
- c. Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong pengembangan ekonomi lokal di wilayah pinggiran dan terpencil.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- e. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan.
- f. Adopsi Inovasi dan Teknologi: Mendorong adopsi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- g. Pelayanan Dasar: Memastikan ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- h. Pengembangan Pusat Pertumbuhan: Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah terpinggirkan.

R. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

Pemerintah Aceh dapat melakukan Upaya untuk memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Infrastruktur: Mengembangkan rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang yang komprehensif dan terintegrasi.
- b. Alokasi Anggaran: Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dengan prioritas yang jelas.
- c. Infrastruktur Transportasi: Meningkatkan pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara.
- d. Infrastruktur Energi: Mengembangkan infrastruktur energi yang handal dan berkelanjutan.
- e. Air Bersih dan Sanitasi: Memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di seluruh wilayah Aceh.

- f. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
- h. Infrastruktur Pariwisata: Mengembangkan infrastruktur pariwisata yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

2.3.2.4 Isu Strategis Rencana Jangka Menengah Aceh Besar Tahun 2025 - 2029

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029, penting untuk memahami dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang akan mempengaruhi arah pembangunan di masa mendatang. Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu wilayah di Provinsi Aceh, dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan memahami isu-isu strategis ini, RPJMK Aceh Besar Tahun 2025-2029 dapat disusun secara lebih tepat sasaran, memastikan keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka menengah. Terdapat 10 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

A. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, percepatan penurunan Stunting serta peningkatan kualitas Pendidikan.

Pelayanan dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penyelenggaraan pelayanan dasar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu upaya untuk memastikan hal tersebut, pemerintah pusat mewajibkan standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh setiap daerah. Secara umum, capaian

SPM maupun pembangunan pada masing-masing urusan pelayanan dasar di Kabupaten Aceh Besar masih perlu dioptimalkan.

Pada aspek pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Aceh Besar diatas rata-rata Aceh. Capaian tersebut mengindikasikan rata-rata pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 25 tahun ke atas masih pada jenjang pendidikan SMP, sehingga secara kualifikasi dan kompetensi lulusan yang dihasilkan masih belum optimal. Upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada semua jenjang mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan kesetaraan hingga fasilitasi pendidikan tinggi perlu dioptimalkan pada setiap periode pembangunan. Pada aspek kesehatan, capaian angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 cukup tinggi, lebih tinggi dibanding Aceh, dilihat dari capaian kesehatan lainnya masih perlu ditingkatkan seperti masih adanya kasus stunting, angka kematian ibu dan bayi, penyakit menular dan tidak menular, fasilitas kesehatan dasar belum sesuai standar, dan sebagainya. Kesehatan merupakan aspek penting untuk memastikan individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi yang baik secara fisik, mental, dan sosial, sehingga memungkinkan untuk hidup produktif.

B. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tujuan Pembangunan berkelanjutan yakni "tanpa kemiskinan atau mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun". Melalui intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Presiden mengintruksikan agar capaian pada tahun 2024 atau 6 tahun lebih cepat dari SDGs. Oleh karena itu penghapusan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan global. Dalam upaya percepatan penanggulangan atau pengentasan kemiskinan tersebut membutuhkan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, karena permasalahan kemiskinan di tempatkan dalam kerangka multi dimensi.

Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas penting dalam agenda pembangunan Kabupaten Aceh Besar. Diperlukan implementasi program

bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran, seperti bantuan langsung tunai dan program keberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya ini harus disertai dengan pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, bagi masyarakat miskin. Pengembangan ekonomi local dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lokal yang menciptakan lapangan kerja yang produktif serta meningkatkan pemberdayaan Masyarakat melalui program ekonomi produktif, antara lain dengan cara pelatihan dan perintisan usaha, kemudahan dalam akses permodalan sehingga pada pendampingan untuk pengembangan usaha.

C. Meningkatkan Pendapatan Per Kapita serta Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Aceh Besar harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya serta mengoptimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar. Langkah-langkah ini melibatkan mendorong investasi di sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta memperkuat infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan Aceh Besar memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya dalam komoditas seperti padi, cacao, rambutan dan perkebunan pinang. Peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi pertanian modern, penggunaan bibit unggul, serta pemberian pelatihan kepada petani untuk meningkatkan hasil pertanian dapat mendorong pendapatan per kapita masyarakat. Selain itu, sektor perikanan juga menjadi sumber penting bagi pendapatan masyarakat, dengan program pemberdayaan nelayan dan pengolahan hasil laut untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang ada, salah satu langkah strategis adalah mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Misalnya,

pengolahan padi, pinang, cacao menjadi produk olahan, atau hasil perikanan yang diproses menjadi produk olahan seperti ikan kaleng, abon ikan, dan lainnya. Hal ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung ekonomi peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik dimana infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu meningkatkan aksesibilitas ke berbagai wilayah dengan memperbaiki dan membangun jalan, jembatan, serta fasilitas transportasi yang memadai. Hal ini akan membuka akses pasar bagi produk lokal dan meningkatkan efisiensi distribusi barang, yang pada gilirannya mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan.

Peningkatan sektor pariwisata Aceh Besar memiliki potensi pariwisata yang besar, dengan keindahan alam seperti pantai, pegunungan, serta wisata religi dan sejarah Aceh. Pengembangan destinasi wisata, perbaikan fasilitas wisata, dan promosi yang lebih efektif dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun internasional. Selain itu, sektor pariwisata juga menciptakan peluang usaha baru di bidang akomodasi, kuliner, transportasi, dan oleh-oleh, yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal.

Pengembangan ekowisata dan wisata berkelanjutan menjaga keberlanjutan lingkungan sangat penting, sehingga pengembangan ekowisata yang berfokus pada konservasi alam dan budaya lokal dapat menjadi pilihan yang tepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memberikan kesadaran dan pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.

Pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal menyertakan perempuan dan kelompok marginal dalam kegiatan ekonomi dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan pendapatan per kapita. Program pemberdayaan ekonomi berbasis gender, seperti pelatihan kewirausahaan dan pemberian akses modal untuk usaha kecil, akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi kelompok yang kurang terlayani.

D. Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat mendukung optimalisasi riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini melibatkan kemitraan antara lembaga riset, industri, dan pemerintah untuk meningkatkan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi, serta fasilitasi pelatihan dan sumber daya bagi masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital dalam usaha mereka.

Optimalisasi riset dan inovasi serta digitalisasi menjadi salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Aceh Besar, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah dan akselerasi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, ada beberapa upaya dan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan riset, inovasi, dan digitalisasi, dengan mengintegrasikan ketiganya dalam kebijakan pembangunan.

peningkatan infrastruktur digital dan akses teknologi dengan perluasan Akses Internet dan infrastruktur digital melalui peningkatan infrastruktur digital seperti jaringan internet berkecepatan tinggi di daerah pedesaan dan terpencil sangat penting untuk mendukung kegiatan riset, inovasi, serta adopsi teknologi digital di seluruh kabupaten. Tanpa infrastruktur yang memadai, upaya untuk mengembangkan riset dan inovasi berbasis teknologi akan terbatas. Program ini mencakup pembangunan jaringan internet fiber optik, peningkatan akses komunikasi data, dan penyediaan infrastruktur teknologi di daerah yang belum terjangkau.

Pembangunan infrastruktur teknologi yang mendukung riset selain internet, penting juga untuk membangun pusat riset dan inovasi di Aceh Besar, yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi canggih dan laboratorium untuk mendukung riset di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, kesehatan, dan teknologi informasi.

Pengembangan ekosistem inovasi dan riset berupa fasilitasi Kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan dunia Usaha dimana untuk mendorong riset

dan inovasi yang aplikatif dan berdampak langsung pada perekonomian daerah, kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas, peneliti, dan sektor swasta sangat penting. Dengan membangun kemitraan yang lebih erat antara sektor akademik dan dunia industri, hasil riset dapat lebih mudah diterapkan dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal maupun global.

Fokus pada riset yang berdampak ekonomi dimana dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, riset harus difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan relevansi lokal, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, energi terbarukan, dan industri kreatif. Misalnya, riset yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi pertanian cerdas atau pengembangan produk olahan hasil laut yang lebih bernilai.

Inovasi produk lokal dengan mengembangkan produk inovatif berbasis potensi lokal (seperti kopi, kelapa, produk olahan laut) yang menggunakan riset untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk tersebut. Ini dapat memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional.

Pemberdayaan SDM dalam riset dan teknologi dimana pelatihan dan pengembangan keterampilan digital dengan peningkatan keterampilan masyarakat dalam bidang digitalisasi dan teknologi informasi adalah kunci untuk mendorong inovasi. Program pelatihan untuk tenaga kerja muda di bidang teknologi informasi, programming, dan analisis data akan meningkatkan kemampuan SDM dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dengan keterampilan konvensional. Pelatihan ini juga bisa difokuskan pada sektor pertanian dan perikanan agar teknologi bisa diterapkan langsung di sektor-sektor tersebut.

Peningkatan pendidikan dan pelatihan inovasi dengan penyediaan program pelatihan dan pendidikan vokasi dalam pengembangan produk inovatif, desain produk, dan manajemen inovasi juga diperlukan untuk membekali SDM lokal agar lebih siap bersaing dalam era digital. Selain itu, program beasiswa untuk riset di bidang teknologi dan inovasi juga bisa diberikan kepada mahasiswa atau peneliti muda.

Digitalisasi pemerintahan dan layanan publik Dimana E-Government dan pelayanan digital dalam rangka mendorong efisiensi dan transparansi, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem e-government untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan efektif. Ini mencakup penyediaan layanan administrasi secara digital (seperti perizinan, registrasi usaha, dan layanan sosial) yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan tanpa harus mengunjungi kantor pemerintah.

Pengembangan aplikasi digital untuk Masyarakat, dengan pengembangan aplikasi berbasis digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, bertransaksi, dan mendapatkan pelayanan juga merupakan langkah penting. Misalnya, aplikasi untuk pasar digital yang memungkinkan petani atau nelayan menjual produk mereka langsung ke konsumen tanpa perantara atau aplikasi pelayanan kesehatan yang memungkinkan warga Aceh Besar untuk berkonsultasi dengan dokter secara online.

Inovasi dalam Sektor Ekonomi Lokal serta penerapan Teknologi untuk Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan, salah satu inovasi yang paling relevan untuk Aceh Besar adalah penerapan teknologi pertanian cerdas dan perikanan berbasis teknologi. Misalnya, penggunaan drone untuk pemantauan tanaman atau sistem irigasi otomatis yang lebih efisien, serta penerapan big data dan analitik untuk prediksi hasil pertanian. Di sektor perikanan, teknologi seperti sistem monitoring cuaca atau peta digital untuk menentukan lokasi tangkapan ikan bisa meningkatkan hasil produksi dan mengurangi kerugian.

Industri kreatif dan teknologi digital berupa pengembangan sektor industri kreatif dengan memanfaatkan digitalisasi, seperti desain grafis, animasi, dan game development, dapat membuka peluang usaha baru di Aceh Besar. Inovasi dalam sektor ini berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah.

Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan Lembaga Penelitian kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian, Pemerintah Aceh Besar dapat memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga

penelitian, baik lokal maupun nasional, untuk melakukan riset terapan yang mendukung pengembangan daerah. Misalnya, riset dalam pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, dan konservasi lingkungan yang dapat memberi solusi konkret bagi masalah daerah.

Memfasilitasi inkubator dan akselerator bisnis untuk mendukung inovasi dan riset yang mengarah pada pengembangan produk dan teknologi, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga inkubator bisnis atau akselerator untuk membantu startup lokal mengembangkan ide inovatif mereka menjadi produk yang siap diluncurkan ke pasar. Inkubator ini bisa menyediakan fasilitas riset, pendampingan, dan akses ke modal usaha.

Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan teknologi digunakan teknologi untuk konservasi alam dan pengelolaan Sumber Daya Alam: Dengan adanya teknologi, pengelolaan sumber daya alam (termasuk pertanian, perikanan, dan hutan) bisa dilakukan secara lebih berkelanjutan. Misalnya, teknologi untuk monitoring hutan dan manajemen sumber daya alam berbasis satelit dapat membantu pemerintah daerah mengelola kekayaan alamnya dengan lebih bijaksana, tanpa merusak ekosistem.

Pembangunan Ekosistem Start-up dan Digitalisasi Usaha dengan mendorong digitalisasi UMKM, program-program yang mendorong UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk mengadopsi teknologi digital (seperti penggunaan platform e-commerce, sistem pembayaran digital, dan pemasaran melalui media sosial) dapat mempercepat modernisasi sektor usaha kecil. Peningkatan kapasitas UMKM untuk berinovasi dan beradaptasi dengan tuntutan pasar global melalui pemanfaatan teknologi digital sangat penting dalam meningkatkan daya saing.

D. Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat

Isu strategis menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat di Kabupaten Aceh Besar merupakan fokus utama dalam RPJPD. Dalam upaya ini, melalui RPJM periode I pemerintah daerah berfokus pada

penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemanfaatan sektor-sektor unggulan yang dapat mendorong produktivitas masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi utama dalam RPJMK untuk mencapai tujuan tersebut:

- a. Pengembangan Sektor-sektor Unggulan untuk Menciptakan Lapangan Kerja
Peningkatan Produktivitas sektor Pertanian dimana Aceh Besar memiliki sektor pertanian yang sangat potensial, terutama di komoditas seperti padi, kelapa, kopi, kakao, dan hortikultura. Pemerintah daerah dapat mengembangkan program pemberdayaan petani dengan memberikan akses kepada teknologi pertanian, bibit unggul, alat pertanian modern, serta pelatihan teknik bertani yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Pengembangan agribisnis untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor pertanian, program pengembangan agribisnis dapat dioptimalkan. Ini mencakup pengembangan pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, seperti minyak kelapa, kopi olahan, dan produk pangan olahan lainnya yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional.

Perikanan dan Pengolahan Hasil Laut: Aceh Besar juga memiliki potensi besar di sektor perikanan. Upaya untuk meningkatkan produktivitas nelayan, pengolahan hasil laut (misalnya ikan kaleng, abon ikan, atau produk berbasis rumput laut), serta menciptakan usaha perikanan berbasis teknologi dapat membuka lapangan pekerjaan di daerah pesisir dan pedesaan.

- b. Pariwisata dan Ekowisata

Pengembangan pariwisata berkelanjutan dimana adanya potensi alam yang melimpah, Aceh Besar memiliki peluang besar dalam sektor pariwisata, baik wisata alam (seperti pantai, pegunungan, dan air terjun), maupun wisata budaya dan sejarah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi wisata, dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal di bidang perhotelan, pemandu wisata, dan kuliner untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan ekowisata yang fokus pada pengembangan pariwisata berbasis konservasi alam (seperti ekowisata)

dapat menciptakan peluang kerja di desa-desa sekitar area wisata dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata.

c. Industri Kreatif dan Digital

Pengembangan industri kreatif di Kabupaten Aceh Besar dapat mendorong sektor industri kreatif seperti kerajinan tangan, desain produk, fotografi, seni rupa, dan fashion untuk menciptakan peluang kerja baru. Produk-produk kreatif ini bisa dipasarkan melalui platform digital, memperkenalkan budaya dan produk lokal ke pasar global. Start-up teknologi dan E-Commerce dengan meningkatnya digitalisasi, pemerintah daerah bisa mengembangkan ekosistem start-up teknologi dan e-commerce untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja di sektor digital. Pelatihan mengenai pengelolaan bisnis online, pemasaran digital, serta pengembangan aplikasi mobile dapat membuka peluang usaha bagi anak muda lokal dan menciptakan pekerjaan yang fleksibel dan berbasis teknologi.

d. Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan Vokasi

Program pelatihan keterampilan sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM agar dapat bersaing di pasar kerja. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan vokasi, perusahaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyediakan pelatihan di bidang yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, seperti teknologi informasi, perikanan, pertanian modern, pariwisata, dan industri kreatif.

Pelatihan kewirausahaan, Untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan, pemerintah daerah juga dapat menyediakan program pelatihan kewirausahaan yang berfokus pada keterampilan manajerial, pemasaran, dan pengelolaan keuangan bagi para pemuda dan masyarakat setempat, agar mereka dapat menciptakan usaha mandiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

e. Beasiswa dan program pendidikan lanjut

Menyediakan beasiswa pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk

melanjutkan pendidikan tinggi di bidang yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti teknologi, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

f. Penguatan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pemberian Akses Pembiayaan: Salah satu langkah untuk menciptakan lapangan kerja adalah dengan memperkuat sektor UMKM, yang merupakan sumber utama lapangan kerja di banyak daerah. Pemerintah daerah dapat menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat) atau lembaga keuangan mikro untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah.

Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM: Pelatihan tentang pengelolaan usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk untuk UMKM akan membantu mereka berkembang lebih baik, sehingga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, pemasaran produk lokal melalui platform digital seperti e-commerce dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar bagi UMKM.

g. Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan Ekonomi.

Peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, yang mendukung kegiatan ekonomi di daerah. Infrastrukturnya juga mendukung perkembangan industri dan sektor lain, membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan cara pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor-sektor tertentu, seperti industri pengolahan, pariwisata, atau industri kreatif, dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru, mengingat fasilitas yang lengkap dan insentif bagi investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut.

h. Program Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kelompok miskin, perempuan, dan pemuda dapat mengurangi pengangguran dan menciptakan peluang kerja. Pemerintah daerah bisa mendorong kewirausahaan sosial dengan memberikan pelatihan dan akses modal untuk usaha berbasis

komunitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Program pengembangan desa dan ekonomi lokal dengan mengembangkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi desa sebagai pusat produksi pertanian, kerajinan tangan, atau pariwisata, dapat menciptakan banyak pekerjaan di tingkat desa dan mengurangi urbanisasi yang tidak terkendali.

i. Digitalisasi dan Teknologi untuk Peningkatan Produktivitas.

Pemerintah daerah dapat mendorong penerapan teknologi digital dalam sektor pertanian, industri, dan perdagangan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Misalnya, penggunaan sistem informasi pertanian, teknologi drone, dan robotik dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan.

C. Platform Digital untuk Pekerjaan Freelance dan Remote

Mengingat tren digitalisasi dan kerja jarak jauh (remote), Aceh Besar dapat mengembangkan platform freelance atau pekerjaan berbasis digital bagi masyarakat lokal, khususnya di kalangan pemuda, untuk bekerja di sektor-sektor digital seperti penulisan konten, desain grafis, programming, dan pemasaran digital.

E. Memperkuat Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercermin dalam sasaran Visi RPJPD. Beberapa program untuk memperkuat sektor-sektor tersebut dalam RPJMK Aceh Besar dapat mencakup hal-hal berikut:

Pengembangan Infrastruktur dan Logistik meliputi aksesibilitas yang lebih baik dengan peningkatan jalan, pelabuhan, dan transportasi yang mendukung distribusi barang dan pengolahan produk. Peningkatan fasilitas pergudangan dan distribusi Memperkuat rantai pasok untuk mempermudah perdagangan besar dan eceran, baik untuk produk lokal maupun impor.

Diversifikasi dan Peningkatan Kapasitas Industri Pengolahan dengan cara Inovasi dan peningkatan kualitas produk, pengembangan produk olahan lokal yang memiliki nilai tambah, seperti produk pertanian atau hasil laut, dengan penerapan teknologi yang lebih efisien. pelatihan dan pengembangan SDM, program pelatihan untuk tenaga kerja di sektor industri pengolahan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas.

Peningkatan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dengan cara peningkatan fasilitas pasar tradisional dan modern, memperbaiki infrastruktur pasar, termasuk pasar tradisional yang menjadi tempat penting untuk perdagangan eceran. penguatan sektor e-commerce dan digitalisasi, membantu pelaku usaha ritel untuk beradaptasi dengan teknologi digital agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional.

Pengembangan Sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam menghadapi perkembangan teknologi otomotif, fasilitas bengkel yang lebih baik: Peningkatan kualitas dan kapasitas bengkel, serta peralatan yang lebih modern untuk memberikan layanan reparasi yang cepat dan efisien. Pengembangan sektor suku cadang lokal: Mendorong produksi dan distribusi suku cadang kendaraan yang dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, membantu pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sektor perdagangan dan industri pengolahan untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka. Promosi produk lokal dengan mengadakan event atau pameran untuk mempromosikan produk lokal Aceh Besar, baik di tingkat regional maupun nasional.

Keberlanjutan dan ekonomi hijau, penerapan prinsip keberlanjutan, Mengarahkan industri pengolahan untuk memperhatikan aspek lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan efisiensi energi, guna mendukung ekonomi hijau.

F. Pengembangan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.

Isu strategis dalam Pengembangan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau di Kabupaten Aceh Besar berkaitan erat dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dan mendorong transformasi ekonomi yang ramah lingkungan. Beberapa isu strategis yang mungkin diangkat dalam RPJMK Aceh Besar dalam konteks ini meliputi:

a. Peningkatan Produktivitas Pangan Berkelanjutan

Optimalisasi Lahan Pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan teknologi ramah lingkungan, seperti penerapan sistem pertanian organik dan agroforestry, untuk mengurangi degradasi tanah dan memperbaiki kualitas hasil pertanian. Inovasi teknologi pertanian hijau, penggunaan teknologi pertanian berbasis ramah lingkungan seperti pertanian presisi, penggunaan pupuk dan pestisida organik, serta penerapan sistem pertanian berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi produksi pangan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

b. Pembangunan Infrastruktur Hijau untuk Pertanian

Infrastruktur irigasi berkelanjutan yaitu dengan cara pembangunan dan perbaikan sistem irigasi yang efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung produksi pangan, seperti penggunaan sistem irigasi tetes yang hemat air dan dapat mengurangi pemborosan air. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan pengelolaan lahan pertanian, hutan, dan kawasan pesisir secara terintegrasi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan mendukung ketahanan pangan. Ini termasuk pengembangan kawasan pertanian yang ramah lingkungan, serta konservasi dan restorasi lahan kritis.

1. Diversifikasi Sumber Pangan dan Pengembangan Produk Lokal

Diversifikasi pertanian yang dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas pangan dengan mendorong penanaman berbagai jenis tanaman pangan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, seperti jagung, kedelai, ubi jalar, dan berbagai jenis sayuran. Pemberdayaan produk lokal

yang mendorong pengembangan produk pangan lokal yang memiliki nilai tambah, seperti pengolahan produk pertanian menjadi makanan olahan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka peluang pasar baru.

2. Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Sektor Ekonomi Hijau yang mendorong pengembangan sektor-sektor yang berbasis ekonomi hijau, seperti pertanian organik, energi terbarukan (misalnya bioenergi dari limbah pertanian), serta industri pengolahan pangan berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Peningkatan penggunaan energi terbarukan yang mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan memanfaatkan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau biogas, untuk mendukung kegiatan pertanian dan industri pengolahan pangan.

3. Pemberdayaan Petani dan Masyarakat Lokal dalam Ekonomi Hijau

Pelatihan dan penyuluhan pertanian berkelanjutan: Meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani dalam praktik pertanian berkelanjutan melalui pelatihan tentang teknik-teknik ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Akses Pembiayaan untuk pertanian hijau untuk memberikan akses pembiayaan kepada petani untuk mendukung implementasi teknologi pertanian berkelanjutan, serta pembiayaan untuk usaha-usaha yang mendukung ekonomi hijau seperti pengolahan sampah organik menjadi kompos atau biogas.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kehutanan

Rehabilitasi dan konservasi hutan untuk mengembangkan program rehabilitasi hutan dan konservasi alam untuk memastikan keberlanjutan ekosistem yang mendukung ketahanan pangan dan memperbaiki kualitas udara serta sumber daya air. Agroforestry dan hutan kemasyarakatan untuk

mengintegrasikan sistem agroforestry untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kehutanan secara bersamaan, dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berbasis pada keberlanjutan.

5. Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Adaptasi terhadap perubahan Iklim dalam mengembangkan strategi adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan, seperti penanaman varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi iklim ekstrem dan perubahan pola curah hujan. Peningkatan ketahanan pangan local untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dengan memperkuat sistem pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

6. Sistem Pemasaran dan Distribusi Pangan yang Ramah Lingkungan

Pemasaran Produk Pertanian Berkelanjutan untuk memperkuat jaringan pemasaran produk pertanian ramah lingkungan dan pangan lokal, serta meningkatkan efisiensi distribusi pangan untuk mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan. Pengembangan pasar pangan organik untuk meningkatkan akses pasar bagi produk pangan organik dan ramah lingkungan melalui kerjasama dengan koperasi, supermarket, dan pasar lokal.

7. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan

Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk Menyusun kebijakan pembangunan yang mendukung penerapan prinsip ekonomi hijau, dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan emisi karbon. Insentif untuk inovasi hijau dalam memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mengimplementasikan

prinsip ekonomi hijau, seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam produksi pangan.

8. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam dan sektor pertanian untuk menciptakan kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

G. Memperkuat Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan perkotaan dan pendesaan harus menjadi fokus untuk menjadikan keduanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini membutuhkan investasi dalam infrastruktur yang memadai di kedua wilayah tersebut, serta pembangunan sektor-sektor ekonomi potensial yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

kebijakan pemerintah untuk membangun perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi antara lain: Pengembangan Infrastruktur dan Aksesibilitas dengan peningkatan infrastruktur transportasi dan konektivitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan, termasuk pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas transportasi publik yang efisien. Hal ini penting untuk memperlancar arus barang dan jasa antar wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi; Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Potensi Lokal dengan Memaksimalkan potensi alam yang dimiliki Aceh Besar, baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perdesaan, ini bisa melibatkan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sementara di perkotaan dapat difokuskan pada sektor industri, perdagangan, dan jasa; Peningkatan kualitas sumber daya manusia meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor, baik di perkotaan maupun perdesaan, melalui program

pelatihan, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Hal ini penting agar tenaga kerja di Aceh Besar siap menghadapi tantangan global dan dapat mendukung berbagai sektor ekonomi; Pengembangan Kawasan Industri dan Ekonomi Kreatif dapat mendorong pengembangan kawasan industri dan ekonomi kreatif, terutama di daerah perkotaan, untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kawasan ini juga dapat menjadi pusat inovasi yang mendukung perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

Selanjutnya diversifikasi ekonomi lokal mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan mendorong diversifikasi ekonomi di wilayah perdesaan, dengan mengembangkan sektor pariwisata, industri pengolahan hasil pertanian, dan sektor lainnya yang relevan dengan potensi lokal. Pemberdayaan masyarakat dan Kewirausahaan untuk endorog masyarakat untuk aktif dalam kegiatan kewirausahaan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Program kewirausahaan yang difokuskan pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dalam mengembangkan ekonomi baik di perkotaan maupun perdesaan, penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti pengelolaan hutan, pertanian organik, dan pengelolaan pesisir, menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan jangka panjang. Peningkatan kemitraan antara pemerintah dan Swasta Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendorong investasi, baik di perkotaan maupun perdesaan. Kemitraan ini dapat menciptakan peluang baru dalam hal investasi infrastruktur, industri, dan layanan publik yang lebih baik.

H. Tata Kelola Pemerintah yang berintegritas

Isu strategis tata kelola pemerintahan yang berintegritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Besar berfokus pada perbaikan dan penguatan sistem administrasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini bertujuan

untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah.

Berikut adalah beberapa isu strategis terkait tata kelola pemerintahan yang berintegritas dalam RPJMK Kabupaten Aceh Besar:

a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Penguatan Sistem Informasi dan Pelaporan: Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk transparansi, termasuk sistem informasi manajemen yang memudahkan akses publik terhadap data dan informasi terkait anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program pembangunan.

Pengawasan internal dan eksternal untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal (Inspektorat) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, dan masyarakat) untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, anggaran, dan program pemerintah terlaksana sesuai peraturan dan tidak terjadi penyimpangan.

b. Pemberantasan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Penyuluhan dan Pendidikan Anti-Korupsi, Meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi melalui pelatihan dan pendidikan kepada aparatur pemerintahan dan masyarakat. Pendekatan ini dapat meliputi penyuluhan anti-korupsi di instansi pemerintah dan pemeriksaan secara berkala terhadap praktek penyalahgunaan wewenang.

Penegakan hukum yang tegas untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap aparat yang terbukti terlibat dalam tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan adanya sanksi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Penguatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Reformasi birokrasi untuk melakukan perbaikan dalam sistem rekrutmen, mutasi, dan promosi pegawai untuk memastikan bahwa semua pegawai

negeri sipil (PNS) di Kabupaten Aceh Besar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip meritokrasi. Hal ini juga mencakup pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi dan pemberian sanksi tegas bagi pegawai yang tidak berintegritas.

Peningkatan Kompetensi Aparatur untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dalam hal manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pemahaman terhadap etika dan tata kelola yang baik.

d. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Peningkatan partisipasi publik dapat memastikan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan daerah melalui forum-forum partisipatif, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang lebih terbuka dan berbasis data.

Pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media: Meningkatkan kerja sama dengan LSM, media, dan organisasi masyarakat lainnya untuk melakukan pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran.

e. Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

Penerapan E-Procurement dapat memperkuat sistem e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah guna memastikan transparansi, mencegah praktik kolusi dan korupsi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Pengawasan pengadaan untuk memastikan pengawasan yang ketat dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pelaporan hasil pengadaan secara transparan kepada publik.

f. Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Manajemen keuangan yang efisien dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem akuntansi yang sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan.

Audit Keuangan secara berkala untuk mengimplementasikan audit keuangan secara rutin dan berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memastikan tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang ada.

g. Penguatan Etika dan Budaya Organisasi

Peningkatan Etika Pemerintahan untuk membangun dan memperkuat budaya kerja yang berbasis pada nilai-nilai integritas, etika publik, serta pelayanan yang berkualitas. Hal ini mencakup penanaman nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab di kalangan aparatur pemerintah.

Penyusunan dan implementasi kode etik yang jelas bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk membimbing perilaku dan tindakan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

h. Pemanfaatan Teknologi untuk Tata Kelola Pemerintahan

Digitalisasi layanan public untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk memastikan proses administrasi yang lebih cepat, transparan, dan bebas dari praktek percaloan atau pungutan liar (pungli).

Sistem pelaporan pengaduan Masyarakat untuk meningkatkan sistem pelaporan pengaduan masyarakat berbasis digital yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang atau ketidakberesan dalam pemerintahan, dengan tindak lanjut yang jelas.

i. Penyusunan Kebijakan yang Responsif dan Berkeadilan

Kebijakan yang berdasarkan data dan fakta untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang berbasis data yang valid dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau bersifat diskriminatif. Kebijakan berkeadilan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil

memperhatikan prinsip keadilan sosial, tanpa mengabaikan kelompok masyarakat yang rentan atau kurang terjangkau oleh layanan pemerintah.

I. Peningkatan Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana dan adaptasi perubahan iklim

Isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim melibatkan berbagai program dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan. Berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada, berikut adalah beberapa fokus utama terkait isu-isu tersebut:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dengan pengelolaan yang bijak, baik di sektor kehutanan, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk peningkatan pengelolaan limbah domestik dan industri, serta upaya untuk mengurangi polusi udara, air, dan tanah melalui teknologi ramah lingkungan. Restorasi ekosistem dan konservasi alam, untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem kritis seperti hutan mangrove, hutan pegunungan, dan kawasan perairan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

b. Mitigasi Bencana

Penguatan sistem peringatan dini bencana untuk meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini terhadap bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Pembangunan infrastruktur tahan bencana dalam membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana, seperti rumah tahan gempa, jembatan tahan banjir, dan sistem drainase untuk mencegah banjir di wilayah yang rawan bencana. Edukasi dan pelatihan mitigasi bencana untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang bencana alam dan cara-cara mitigasi melalui pelatihan dan simulasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

c. Adaptasi Perubahan Iklim

Pengembangan infrastruktur adaptasi iklim untuk pembentukan infrastruktur yang dapat menyesuaikan dengan perubahan iklim, misalnya, sistem irigasi yang efisien, pembangunan tanggul laut untuk mengatasi kenaikan permukaan air laut, serta pengelolaan kawasan pesisir yang lebih baik. Perlindungan sumber daya alam terhadap dampak perubahan iklim dalam upaya untuk melindungi hutan, pesisir, dan ekosistem penting lainnya agar tetap dapat berfungsi meskipun ada perubahan iklim yang signifikan. Diversifikasi sumber pendapatan dan pertanian untuk mengembangkan ketahanan ekonomi lokal melalui program diversifikasi pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan atau banjir, serta pengembangan sektor ekonomi hijau.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi bencana. Pemberdayaan komunitas dalam pengurangan risiko bencana untuk pelibatan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan membentuk kelompok-kelompok relawan atau komunitas siap bencana yang dapat merespons dengan cepat saat terjadi bencana.

e. Penguatan Kebijakan dan Peraturan

Penyusunan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Peningkatan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana, Penguatan peraturan daerah terkait perlindungan lingkungan hidup dan tata ruang, serta kebijakan yang mendorong investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan dan adaptasi perubahan iklim.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses bertahap yang melibatkan berbagai stakeholder untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah daerah juga menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun, berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2025-2029 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar, RPJMD Aceh serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendasarkan Visi dan Misi pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan pada nilai-nilai yang terkandung dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025–2045. Dalam RPJPD, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan menggunakan visi bersama sebagai etos kerja, yaitu: Kabupaten Aceh Besar Maju, Sejahtera, Islami, dan Berkelanjutan. Pemerintah menggunakan visi bersama dan etos kerja tersebut sebagai inspirasi dan acuan dalam merumuskan visi dan misi pemerintahan untuk periode jangka menengah, serta sebagai daya dorong bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar merumuskan visi, misi, dan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah disebutkan, serta mempertimbangkan kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang tercermin dalam isu-isu strategis.

Dalam penyusunan ini, tahap perumusan visi dan misi merupakan upaya keadaan yang menjadi muara dari berbagai penyelesaian permasalahan yang sering disebut sebagai isu strategis yang dirasakan sangat penting oleh masyarakat untuk diselesaikan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa visi daerah harus

jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang mencerminkan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu- isu strategis daerah.

3.1. Visi dan Misi Daerah

Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana atau Upaya visi itu diwujudkan, lebih lanjut visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi dirumuskan sebagai cita-cita kondisi yang jauh lebih baik dari kenyataan yang ada saat ini. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan salah satu butir upaya dalam merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada kondisi riil daerah dan lingkungan yang lebih luas, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam melakukan pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi pembangunan jangka menengah daerah yang kemudian diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, dan arah kebijakan serta program prioritas RPJMD dalam menjalankan Pembangunan oleh bupati terpilih priode 2025-2029. Visi berikut ini juga memperhatikan faktor internal berupa aspek potensial yang menjadi modal dasar dan kelemahan yang masih dirasakan, serta mempertimbangkan faktor eksternal baik berupa peluang maupun tantangan. Faktor eksternal antara lain berupa perkembangan global yang pesat, arah pembangunan tingkat nasional maupun regional, dan berbagai perkembangan eksternal lainnya yang terkait dan mempengaruhi kondisi dinamis masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

Perumusan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025–2029 didasarkan pada masalah utama atau isu strategis

Pembangunan. dari permasalahan dan isu strategis serta penyesuaian visi bupati terpilih maka :

**“ ACEH BESAR BERMARWAH DAN BERMARTABAT, ADIL, MAKMUR,
SEJAHTERA, BERSYARIAH DALAM BINGKAI AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH”**

Dengan penjelasan kata kunci Visi Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Aceh Besar yang “BERMARWAH DAN BERMARTABAT ” bermakna bahwa:

Mewujudkan masyarakat yang memiliki nilai-nilai moral, budaya, agama dan kehormatan masyarakatnya.

Aceh Besar “Adil” bermakna bahwa:

Aceh Besar Berkeadilan adalah pendekatan pembangunan yang memastikan bahwa manfaat dan hasil dari pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Aceh Besar “Makmur” bermakna bahwa:

Kabupaten Aceh Besar makmur adalah Kabupaten Aceh Besar yang maju secara ekonomi, adil dalam pembangunan, kuat dalam budaya, serta mampu memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh kehidupan masyarakat. Makmur memiliki makna harapan dan tujuan dalam jangka menengah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang bahagia, adil dan berkualitas dengan memanfaatkan potensi daerah secara optimum dan berkelanjutan.

Aceh Besar “SEJAHTERA” bermakna bahwa:

Sejahtera adalah masyarakat yang adil mencerminkan cita-cita dan harapan untuk mengembangkan Kabupaten Aceh Besar menjadi tempat yang berkualitas, dinamis, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya serta memberikan pemerataan pembangunan, akses maupun kesempatan dalam memperoleh manfaat serta mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam seluruh aspek kehidupan.

Aceh Besar “BERSYARIAH DALAM BINGKAI AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH”

Merupakan Pandangan atau tujuan jangka panjang yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat, yaitu hukum atau aturan yang berasal dari ajaran agama Islam. Visi ini mengedepankan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan

individu, sosial, dan bernegara, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejalan dengan ajaran Islam, baik dalam aspek moral, etika, hukum, maupun perilaku sehari-hari.

Visi Kabupaten Aceh Besar Berpedoman pada visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 -2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang disebut sebagai Asta Cita. Visi Kabupaten Aceh Besar juga berpedoman pada visi Pembangunan Aceh yaitu “Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan”. Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1.
Visi RPJM, RPJMA dan RPJMD Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2025 – 2029

NO	RPJMN 2025 -2029	RPJMA 2025-2029	RPJMD 2025 – 2029
1	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan	Aceh Besar Bermarwah dan Bermartabat, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bersyariah dalam Bingkai Ahlussunnah wal Jama'ah

Dari visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2029, maka sasaran visi sebagai berikut

Tabel 3.2.
Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2029

NO.	SASARAN VISI		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET (2025)	TARGET (2026)	TARGET (2027)	TARGET (2028)	TARGET (2029)	TARGET (2030)	POKOK VISI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Aceh Besar Bermawah dan Bermartabat, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bersyariah dalam Bingkai Ahlussunnah wal Jama'ah											
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita										
	a	PDRB per kapita	Rp Juta	42.99 (2024)	45.78	48.75	51.91	55.28	58.87	62.69	Makmur
	b	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.95 (2024)	5	5.05	5.1	5.15	5.2	5.25	Makmur
	c	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	4.27 (2024)	4.4	4.53	4.66	4.79	4.92	5.05	Makmur
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan										
	a	Tingkat Kemiskinan	%	13.21 (2024)	11.05	10.48	9.91	9.34	8.77	8.20	Sejahtera
	b	Rasio gini	Indeks	0.29(2024)	0.28	0.275	0.270	0.265	0.260	0.255	Adil
	c	Kontribusi PDRB Aceh Besar	%	7.91 (2024)	7.96	8.01	8.06	8.11	8.16	8.21	Sejahtera
3	Peningkatan Produktivitas Daerah berdaya Saing global , berkelanjutan dan Investasi, serta Penguatan Syariat Islam										
	a	Indek Daya Saing Daerah	Indeks	3.63	3.65	3.72	3.79	3.85	3.92	3.99	Bermawah dan Bermartabat

NO.	SASARAN VISI		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET (2025)	TARGET (2026)	TARGET (2027)	TARGET (2028)	TARGET (2029)	TARGET (2030)	POKOK VISI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	b	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	47,55	49.57	51.59	53,61	55,64	57,66	59.68	Bermarwah dan Bermartabat
	c	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	85.46 (2024)	85.5	85.98	86.45	86.925	87.4	87.88	Bersyariah dalam Bingkai Ahlussunnah wal Jama'ah
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat										
	a	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.57 (2024)	77.05	77.53	78	78.48	78.96	79.44	Bermarwah dan Bermartabat
5	Kualitas Lingkungan Hidup										
	a	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74.71 (2024)	78.76	78.94	79.11	79.28	79.45	79.62	Sejahtera

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, visi belum dapat dianggap utuh tanpa disertai serangkaian misi yang menjadi dasar arah pencapaian cita-cita pembangunan. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Aceh Besar, serta langkah-langkah strategis yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025–2029.

Adapun pencapaian Visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;

Melalui Misi 1, Dalam bidang pendidikan, upaya ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, dan menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran juga menjadi fokus utama. Di sektor kesehatan, kualitas layanan akan ditingkatkan melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang merata, pengadaan tenaga medis yang kompeten, serta kemudahan akses bagi masyarakat ke layanan kesehatan, termasuk promosi pola hidup sehat dan program pencegahan penyakit, serta pembangunan kesejahteraan keluarga.

2. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan

Melalui Misi 2, Perekonomian berbasis potensi daerah akan diperkuat dengan memberdayakan sektor basis seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Teknologi juga akan diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital. Selain itu, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil menjadi prioritas untuk memastikan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar.

3. Meningkatkan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan;

Melalui Misi 3, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan Membangun infrasktruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, serta infrastruktur dasar lainnya seperti air bersih, listrik, dan telekomunikasi yang ramah lingkungan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Tata ruang akan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masa depan serta menghindari konflik penggunaan lahan, sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjaga.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas, Inovatif, dan Penguatan Perdamaian.

Melalui Misi 4 ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk Membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, dan berbasis inovasi, serta memperkuat stabilitas dan harmoni sosial melalui pelestarian nilai-nilai perdamaian dan kearifan lokal. Pemerintahan yang Berintegritas, Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memperkuat etika pelayanan publik dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.

Mewujudkan birokrasi yang profesional dan melayani. Pemerintahan yang Inovatif adalah Mendorong penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik (e-government). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui ide-ide kreatif dan kebijakan yang solutif. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Penguatan Perdamaian dan Stabilitas Sosial adalah dengan cara Menjaga dan menguatkan hasil-hasil perdamaian pasca konflik Aceh, serta menciptakan ruang dialog yang konstruktif.

5. Memperkuat Syariat Islam, Adat, dan Budaya

Melalui Misi 5 ini Memperkuat pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, melestarikan adat istiadat yang selaras dengan nilai-nilai Islam, dan mengembangkan budaya lokal sebagai identitas daerah serta pilar pembangunan sosial masyarakat. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam, Menjalankan dan mengawasi pelaksanaan Qanun Syariat Islam secara konsisten dan berkeadilan. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk

pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi. Meningkatkan peran ulama, dayah, dan lembaga keagamaan dalam pembinaan moral dan akhlak masyarakat. Pelestarian Adat Istiadat. Menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal melalui peran tokoh adat, mukim, dan tuha peut. Mengatur dan melestarikan adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagai dasar kehidupan sosial masyarakat. Menyelaraskan adat dalam sistem penyelesaian konflik, pernikahan, musyawarah, dan tradisi gotong royong. Pengembangan Budaya Islami, Menjadikan budaya lokal sebagai sarana dakwah dan pembentukan karakter masyarakat. Mempromosikan kesenian, bahasa, dan tradisi yang mencerminkan identitas Aceh Besar dalam koridor syariat Islam. Menyediakan ruang kreatif dan festival budaya Islami sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan warisan budaya daerah.

Tabel 3.3.
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 - 2029

POKOK VISI	MISI
Bermarwah dan Bermartabat	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
Sejahtera	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan
Adil	Meningkatkan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan
Makmur	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas, Inovatif, dan Penguatan Perdamaian
Bersyariah dalam Bingkai Ahlussunah Wal Jama'ah	Menguatkan Syariat Islam, Adat, dan Budaya

3.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai misi dan visi Pembangunan, diperlukan tujuan dan sasaran yang jelas dalam rencana pembangunan jangka menengah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

1.1 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat

1.1.2 Meningkatnya Keluarga Sejahtera

1.1.3 Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan

Misi 2. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan

2.1 Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Merata

2.1.1 Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan

Misi 3 Meningkatkan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan

3.1 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan

3.1.1 Terpenuhi Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan berdasarkan Tata Ruang wilayah

3.1.2 Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas

3.1.3 Terwujudnya penurunan resiko bencana

Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas, Inovatif, dan Penguatan Perdamaian

4.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, dan Penguatan Perdamaian

4.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintah berintegritas dan dinamis

Misi 5 Memperkuat Syariat Islam, Adat, dan Budaya

5.1 Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam, serta Pelestarian Adat dan Budaya dalam tatanan kehidupan Masyarakat

5.1.1 Meningkatnya implementasi nilai-nilai Syariat Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat

5.1.2 Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah

3.3. Penjelaran dengan Visi dan Misi Aceh Besar dan Nasional

Perencanaan Pembangunan nasional akan terlaksana dengan baik, sinergi dan terarah apabila didukung oleh perencanaan Pembangunan daerah. Salah satunya adalah terjadinya keselarasan antara visi dan misi daerah dengan nasional. Wujud dari keselarasan dengan misi Aceh dan Nasional dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.
Penyelarasan Misi Nasional, Aceh dan Aceh Besar

Asta Cita No.	ASTA CITA/MISI RPJMN	MISI No.	MISI RPJMA	MISI No.	MISI ACEH ESAR
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Kehidupan Masyarakat secara kaffah	5	Menguatkan Syariat Islam, Adat, dan Budaya
		2	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh Sesuai MoU Helsinki dan UUPA	5	Menguatkan Syariat Islam, Adat, dan Budaya
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3	Mewujudkan kemandirian Ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.	2	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan

Asta Cita No.	ASTA CITA/MISI RPJMN	MISI No.	MISI RPJMA	MISI No.	MISI ACEH ESAR
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	3	Mewujudkan kemandirian Ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi di gital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.	2	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	3	Mewujudkan kemandirian Ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi di gital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.	2	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	5	Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (sdm), pemuda dan olah raga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas	1	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Asta Cita No.	ASTA CITA/MISI RPJMN	MISI No.	MISI RPJMA	MISI No.	MISI ACEH ESAR
5	Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	3	Mewujudkan kemandirian Ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi di gital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.	2	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	4	Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, konektivitas dan berkelanjutan	3	Meningkatkan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supermasi hukum	4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas, Inovatif, dan Penguatan Perdamaian
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya	3	Meningkatkan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan

3.4. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Pembangunan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat diukur dalam jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi RPJMD kabupaten Aceh Besar Tahun

2017-2022 dan RPD tahun 2023 – 2026 memberikan informasi beberapa indikator tujuan dan sasaran yang sudah tercapai dilaksanakan dan juga masih terdapat perencanaan yang harus dilanjutkan pelaksanaannya RPJMD Kabupaten Aceh Besar untuk periode 2025-2029.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi maka dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator disertai dengan target dari tahun 2026 sampai tahun 2029. Uraian indikator dan target dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa prioritas Pembangunan untuk mendukung Asta Cita, dan tidak terbatas.

Sasaran Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Adapun sasaran pokok. Sasaran pembangunan di RPK Aceh Besar tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Besar 2025 – 2029 Berdasarkan Misi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas												
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.57	77.05	77.53	78.00	78.48	78.96	79.44	79.44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.37	10.38	10.39	10.40	10.41	10.42	10.43	10.43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.77	14.78	14.79	14.80	14.81	14.82	14.83	14.83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.24	74.2	74.38	74.56	74.74	74.92	75.10	75.10	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting	%	32.3	31.24	30.32	29.41	28.50	27.58	26.67	26.67	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	67.76	68.82	69.83	70.8	71.71	72.58	73.42	73.42	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan	Persentase Atlit yang mengikuti even Olah raga	%	46.6	47.6	48.6	49.6	50.6	51.6	52.6	52.6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	55.86	56.36	56.86	57.36	57.86	58.36	58.86	58.86	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Misi 2 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan												

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Merata		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.95	5	5.05	5.1	5.15	5.2	5.25	5.25	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, BPKD, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
		Rasio Gine	Indeks	0.29	0.280	0.275	0.270	0.265	0.260	0.255	0.255	BPS
		Tingkat Kemiskinan	%	13.21	12.81	12.46	12.10	11.75	11.39	11.04	11.04	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						Kondisi Akhir	KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kontribusi PDRB Aceh Besar	%	7.91	7.96	8.01	8.06	8.11	8.16	8.21	8.21	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, BPKD, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
	Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3.43	3.53	3.62	3.72	3.81	3.91	4.00	4.00	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan
		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	4.27	4.39	4.51	4.64	4.76	4.88	5.00	5.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Persentase Peningkatan Investasi	%	-13 %	5%	10%	10%	12%	15%	15%	15%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84.72	84.92	85.12	85.32	85.52	85.72	85.92	85.92	Dinas Pangan
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	%	2.04	2.04	2.06	2.08	2.10	2.12	2.14	2.14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	56	57	58	59	60	61	61	Dinas Sosial
		Tingkat pengangguran terbuka	%	7.93	7.74	7.55	7.36	7.17	6.98	6.79	6.79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan												
Meningkatkannya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan		Rasio Konektivitas Kabupaten/kota	%	1.24	1.24	1.33	1.40	1.48	1.56	1.64	1.64	Dinas Perhubungan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74.71	78.76	78.94	79.11	79.28	79.45	79.62	79.62	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	69,32	65,58	66,48	67,40	68,33	69,25	70,18	70,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Terpenuhi Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan berdasarkan Tata Ruang wilayah	Persentase Rumah Tangga dengan air minum layak	%	92.98	93.02	93.27	93.55	93.84	94.12	94.40	94.40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak	%	87.09	87.105	87.11	87.27	87.44	87.6	87.77	87.77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Tingkat Kemantapan Jalan	%	63,32	42,83	44,03	45,23	46,43	47,63	48,83	48,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Air	Indeks	60.97	75.66	75.86	76.06	76.26	76.46	76.63	76.63	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	93.85	85.74	85.34	85.54	85.74	85.94	86.11	86.11	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	63.41	72.30	72.37	72.44	72.51	72.58	72.75	72.75	Dinas Lingkungan Hidup
	Terwujudnya penurunan resiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.38	0.39	0.4	0.43	0.45	0.46	0.48	0.48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas, Inovatif, dan Penguatan Perdamaian												
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, dan Penguatan Perdamaian		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50.23	61	62	63	64	65	66	66	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Terwujudnya tata kelola pemerintah berintegritas dan dinamis	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.58	3,6	3,62	3,64	3,66	3,68	3,7	3,7	Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Hukum'	Indeks	50,2	70	70	75	75	75	80	80	Sekretariat Daerah
		Indeks SPBE	Indeks	2,39	2,81	3,00	3,01	3.02	3.03	3,04	3,05	Dinas Komunikasi dan Infomatika
		Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3.16	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74,91	75	76	76	77	77	78	78	BPKSDM
		Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai dan Predikat	54,90	55.49	56.08	56.67	57.26	57.85	58,44	59	Sekretariat Daerah
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	74.00 (2023)	76.29	77.43	78.57	79.71	80.86	82.00	82.00	Bdan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase penanganan kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TRIBUMTRAMAS)	%	95.82	95.9	95.98	96.06	96.14	96.22	96.3	96.3	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase penyelesaian konflik sosial secara damai	%	20	20	25	30	35	40	45	45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0.703	0.806	0.905	1.020	1.230	1.351	1.460	1.460	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
		Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Misi 5 : Memperkuat Syariat Islam, Adat, dan Budaya												
Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam, serta Pelestarian Adat dan Budaya dalam tatanan kehidupan masyarakat		Indeks Pembangunan Syariah	Indeks	85.46	85.5	85.98	86.45	86.93	87.4	87.88	87.88	Dinas Syariat Islam

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya implementasi nilai-nilai Syariat Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	Dimensi Aqidah	%	88	84,2	88,98	89,45	89,93	90,4	90,88	90,88	Dinas Syariat Islam
		Dimensi Akhlak	%	82	85,09	82,98	83,45	83,93	84,4	84,88	84,88	Dinas Syariat Islam
		Dimensi Lembaga Keuangan Syariah	%	83	73,27	83,98	84,45	84,93	85,4	85,88	85,88	Dinas Syariat Islam
		Dimensi Kesadaran dan Ketaatan Pelaksanaan Syariat Islam	%	84	84,44	84,98	85,45	85,93	86,4	86,88	86,88	Dinas Syariat Islam
		Dimensi Kepatuhan Membayar Zakat	%	86	77,56	86,98	87,45	87,93	88,4	88,88	88,88	Dinas Syariat Islam
		Dimensi Manajemen Masjid/Meunasah	%	90	81,39	90,98	91,45	91,93	92,4	92,88	92,88	Dinas Syariat Islam
		Dimensi Melek Al-Qur""an	%	84	84,89	84,98	85,45	85,93	86,4	86,88	86,88	Dinas Syariat Islam

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dilestarikan	%	23.10	28.48	34.81	41.14	47.47	53.80	60.13	60.13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3.5. Strategi, Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Dalam kerangka tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, sementara arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.6 Analisis SWOT Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029

ANALISIS SWOT		
1	Strengths (Kekuatan)	
	a.	Letak strategis, Berdekatan dengan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi, serta memiliki akses ke pelabuhan dan bandara internasional.
	b.	Potensi sumber daya alam, Lahan pertanian subur, perikanan laut dan air tawar, hutan produksi, serta potensi pariwisata alam dan budaya.
	c.	Sektor pendidikan dan keagamaan kuat, Banyaknya lembaga pendidikan tinggi dan pesantren menjadikan Aceh Besar sebagai pusat pendidikan Islam
	d.	Budaya dan nilai religius yang kuat, Masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam mendukung stabilitas sosial dan moral Masyarakat
	e.	Cadangan energi dan air yang memadai, Potensi energi air dan energi terbarukan.
2	Weaknesses (Kelemahan)	
	a.	Ketimpangan infrastruktur antar wilayah, beberapa kecamatan tertinggal dalam akses jalan, listrik, dan internet.
	b.	Ketergantungan ekonomi pada sektor primer: Pertanian dan perikanan masih dominan, namun belum berorientasi pada industri hilir atau ekspor.

ANALISIS SWOT		
	c.	Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi, Terutama di daerah pedalaman dan pesisir.
	d.	Kapasitas SDM aparatur yang belum merata, Masih ada gap kompetensi dalam pengelolaan pemerintahan berbasis digital dan perencanaan strategis.
	e.	Pemanfaatan teknologi informasi rendah, Baik dalam layanan publik maupun sektor produktif masyarakat.
3	Opportunities (Peluang)	
	a.	Pengembangan kawasan agropolitan dan pariwisata halal: Didukung potensi alam, budaya, dan posisi geografis.
	b.	Dukungan program nasional dan internasional Seperti dana otonomi khusus dan program pembangunan berkelanjutan (SDGs).
	c.	Pertumbuhan ekonomi digital dan UMKM, Peluang besar untuk mendorong ekonomi lokal berbasis digital.
	d.	Investasi sektor pertanian dan perikanan terpadu seperti Agroindustri, cold storage, dan sistem logistik yang terintegrasi.
	e.	Peluang kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi: Untuk riset, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas SDM.
4	Threats (Ancaman)	
	a.	Risiko bencana alam tinggi seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan tanah longsor
	b.	Persaingan ekonomi antar daerah Terutama dalam menarik investasi dan pengembangan sektor unggulan
	c.	Urbanisasi dan alih fungsi lahan, Ancaman terhadap pertanian dan lingkungan hidup.
	d.	Kesenjangan sosial dan potensi konflik horizontal, Jika distribusi pembangunan tidak merata
	e.	Ketergantungan fiskal terhadap pusat, Kemandirian keuangan daerah masih rendah.

Selanjutnya penentuan strategis dan arah Kebijakan disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman, dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh strategi yang merupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

3.5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2025-2029, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan serta

pembangunan yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah. Berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka Perumusan tujuan, sasaran, strategi Pembangunan serta arah kebijakan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel.3.7 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas					
1. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia					
	1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat	1.1.1	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar yang Menyenangkan
					Peningkatan Peran Bunda PAUD Aceh Besar
					Peningkatan kopentesi guru melalui tenaga teknis
					Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal
					Pengembangan Kurikulum PAUD, pendidikan dasar dan non formal Berbasis Syariat Islam

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Nonformal
			1.1.2	Peningkatan minat baca masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan perpustakaan	Peningkatan transformasi perpustakaan gampong
					Peningkatan pustaka keliling
					Peningkatan minat baca masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan perpustakaan
			1.1.3	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas penanganan kesehatan ibu dan anak, dengan cara meningkatkan kunjungan ibu hamil (K4), peningkatan prevalensi ASI eksklusif dan penanganan kasus berisiko.
					Peningkatan kualitas penanganan gizi buruk dan prevalensi stunting dengan meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita dan perbaikan gizi.

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					peningkatan Pemberdayaan Kader Posyandu dan Keluarga
					Transformasi Layanan Kesehatan Primer
					Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
					Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam mendukung Germas (Gerakan Masyarakat) untuk hidup sehat
					Peningkatan Pemantauan dan Evaluasi bidang kesehatan
					Penanggulangan penyakit menular yaitu DBD, TB, Diare, Pneumonia, Hepatitis dan leptospirosis serta penyakit tidak menular yaitu seperti hipertensi, DM.

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Pemanfaatan Teknologi dan Data untuk Monitoring
					Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
					Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
	1.2	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	1.2.1	Peningkatan kesejahteraan sosial yang adaktif	Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
					Peningkatan jumlah perempuan pada lembaga legislatif, dan juga lembaga profesional
					Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan perempuan termasuk trafficking.
					Peningkatan kualitas pelayanan penguatan dan peningkatan kualitas keluarga

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Peningkatan kualitas pemenuhan hak anak
					Peningkatan kualitas pemantauan dan pelayanan tumbuh kembang anak
					penguatan kelembagaan penyelenggara pemenuhan hak anak seperti forum anak dan lembaga peduli anak
					Peningkatan kualitas perlindungan anak termasuk trafficking.
	1.3	Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan	1.3.1	Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Penguatan Kapasitas Pemuda melalui Pendidikan dan Pelatihan
					Pengembangan Potensi Pemuda dalam Teknologi Tepat Guna (TTG)
					Pemberdayaan Pemuda dalam Pengelolaan Dana Desa
					Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Fasilitasi minat dan bakat generasi muda
			1.3.2	Peningkatan Peran Pemuda dalam Olah Raga	Peningkatan Prestasi Olah raga dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pemuda dan olah raga
					Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlit
Misi 2 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan					
2. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Merata					
	2.1	Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan	2.1.1	Meningkatkan pola konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan dengan penyediaan pangan cukup, distribusi pangan dan keanekaragaman pangan lokal
					Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
			2.1.2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
					Peningkatan produksi dan produktivitas
					Peningkatan kualitas dan kesehatan ternak
					Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian
					Peningkatan inovasi produk dalam meningkatkan produksi pertanian
					Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata
			2.1.3	Meningkatkan produksi nilai tambah perikanan	Peningkatan kualitas penyediaan sarana produksi perikanan
					Penanganan pasca panen perikanan yang berkualitas
					Peningkatan pengawasan dan pengendalian

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
			2.1.4	Meningkatkan kualitas destinasi wisata	Penguatan kopetensi kelompok masyarakat sadar wisata
					Peningkatan Promosi dan exhibisi wisata di berbagai even dan media
					Peningkatan sarana dan prasarana serta daya tarik wisata pada destinasi wisata
					Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata
					Peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan destinasi wisata
			2.1.5	Meningkatkan Perdagangan, koperasi dan UMKM	Penguatan Kelembagaan Daerah
					Penguatan ekosistem usaha mikro,kecil dan menengah
					Peningkatan, pemberdayaan dan reformasi koperasi

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Pengembangan akses pasar dan digitalisasi
					Revitalisasi infrastruktur perdagangan dan UMKM
					Pengembangan wirausaha baru dan star-up lokal
					Meningkatkan Jumlah dan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
					Mendorong Integrasi Ekonomi Kreatif dengan Sektor Unggulan Daerah
			2.1.6	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan peran dan kompetensi PSKS dan TKSK dalam membangun kesejahteraan PPKS
					Peningkatan kualitas hidup dan kemandirian PPKS
			2.1.7	Meningkatkan nilai investasi	Penyederhanaan perizinan dan regulasi
					Peningkatan daya dukung investasi

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Penyediaan Data dan Informasi Investasi yang Transparan
					Penguatan Promosi dan Kemitraan Investasi
					Peningkatan sarana dan prasarana dalam peningkatan investasi
			2.1.8	Menurunnya penggangruran Terbuka	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penganggur dan atau pencari kerja
					Peningkatan Kopetensi tenaga Kerja
					Peningkatan investasi dalam rangka pembukaan lapangan kerja baru
			2.1.9	Mewujudkan Pengembangan ekonomi wilayah	Peningkatan infrastruktur pendukung
					pembangunan kawasan terpadu dan berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi
			2.1.10	Pemanfaatan ZISWAF secara produktif	Penguatan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara produktif dan transparan.
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan					
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan					
	3.1	Terpenuhi Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan berdasarkan Tata Ruang wilayah	3.1.1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata
					Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan
					Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman
					Penyediaan Infrastruktur Sarana dan prasarana lalu lintas
					Pemeliharaan infrastruktur secara berskala dan berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
			3.1.2	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang
					Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
	3.2	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	3.2.1	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berskala dan berkelanjutan
					Penanganan pencemaran lingkungan hidup
					Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan Ekosistem
					Peningkatan ketersediaan informasi tentang lingkungan hidup
					Peningkatan layanan penanganan limbah domestik dan limbah industri
			3.2.2	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan layanan penanganan sampah

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
	3.3	Terwujudnya penurunan resiko bencana	3.3.1	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
					Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
					Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi kebencanaan
					Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
					Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
					Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas, Inovatif, dan Penguatan Perdamaian					
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, dan Penguatan Perdamaian					

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
	4.1	Terwujudnya tata kelola pemerintah berintegritas dan dinamis	4.1.1	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi;
					peningkatan kapabilitas teknologi pemerintahan;
					peningkatan integritas organisasi dan penyelenggara pemerintahan
					peningkatan kualitas kebijakan daerah
					optimalisasi kelembagaan melalui evaluasi struktur organisasi dan perubahan organisasi
					perangkat daerah berbasis fungsi dan proses bisnis pembangunan daerah;
					Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepastian Hukum
			4.1.2	Optimalisasi Pemutakhiran data melalui sistem informasi kependudukan yang terintegrasi dan pembaruan data rutin	Peningkatan akurasi dan validasi data kependudukan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan
			4.1.3	Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum	Penataan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
			4.1.4	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun budaya damai dan penyelesaian konflik secara partisipatif.	peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
					penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
					meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
			4.1.5	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyediaan , penyajian data pendukung pemanfaatan kelitbangan	Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah
					Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah
					Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
					Memnfasilitasi Forum Perencanaan dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
			4.1.6	Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	Peningkatan dan pemenuhan kualitas/kompetensi sumber daya aparatur
			4.1.7	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan tata kelola keuangan daerah
					Optimalisasi pengelolaan aset- aset daerah
					Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah
			4.1.8	Optimalisasi Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
					Digitalisasi Sistem Pemungutan dan Pelaporan PAD
					Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak
					Penguatan Kelembagaan dan SDM Pengelola Pendapatan Daerah
					Peningkatan pendataan aset

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
			4.1.9	Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
					Optimalisasi asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan
			4.1.10	Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik
					Peningkatan pemenuhan sarana prasarana informasi dan komunikasi
					Peningkatan pengamanan informasi
			4.1.11	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan	Peningkatan tata kelola kearsipan
			4.1.12	Meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat	Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perijinan
					Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Penyederhanaan Perizinan dan Kepastian Regulasi
			4.1.13	Penguatan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran	Meningkatkan kapasitas DPRK dalam menjalankan tiga fungsi utama secara efektif dan akuntabel.
					Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Anggota DPRK
					peningkatan Modernisasi sistem administrasi dan layanan pendukung DPRK berbasis teknologi informasi.
					Pengembangan sistem dokumentasi dan manajemen informasi kelembagaan
					Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan DPRK.
			4.1.14	Meningkatkan ketahanan ideologi, politik, sosial, dan keamanan daerah guna mendukung stabilitas pembangunan dan partisipasi	Fasilitasi pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, dan kelompok renta

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
				masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	
					Penguatan ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan
					Pencegahan dan penanggulangan konflik sosial
			4.1.15	Penyelesaian konflik agraria dan sengketa tanah, perlindungan hak tanah adat, tanah wakaf, dan tanah ulayat	Fasilitasi mediasi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan investor
					Penataan kembali penguasaan tanah terlantar, dan tanah negara
					Pengembangan kecamatan sebagai pusat pelayanan administrasi terintegrasi
					Sosialisasi dan perlindungan hukum tanah wakaf dan hak milik ulayat

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Pemetaan dan pengakuan tanah adat/gampong berbasis masyarakat
					Penyusunan Qanun pelaksana untuk pengakuan hak adat
			4.1.16	Penguatan fungsi koordinasi pembangunan wilayah kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan
					Pengembangan kecamatan sebagai pusat pelayanan administrasi terintegrasi
Misi 5 : Memperkuat Syariat Islam, Adat, dan Budaya					
5. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam, serta Pelestarian Adat dan Budaya dalam tatanan kehidupan masyarakat					
	5.1	Meningkatnya implementasi nilai-nilai Syariat Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	5.1.1	Meningkatkan peran serta masyarakat dan tokoh agama dalam pembinaan akhlak dan penerapan syariat Islam	Memperkuat kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan syariat Islam di tingkat gampong hingga kabupaten.

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)		(4)
					Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam melalui pendidikan formal dan non-formal.
					Mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari penerapan syariat dalam sektor ekonomi.
	5.2	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	5.2.1	Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan daerah
					Pemasyarakatan tata nilai budaya Daerah
					Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan

3.5.2. Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029 yang diimplementasikan setiap tahunnya, untuk memberikan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahun, ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahunan sebagai berikut:

Tabel. 3.8 Pentahapan Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2029

Tahap	Arah Kebijakan	Tema Pembangunan
TAHAP I (2026)	Peningkatan pembangunan Kabupaten Aceh Besar berbasis kawasan, optimalisasi potensi lokal, kelestarian ekosistem, dan kualitas sumber daya manusia secara terintegrasi dan berkelanjutan serta peningkatan kelembagaan. Difokuskan penyediaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.	Memacu Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Peningkatan Daya Saing Manusia dan Infrastruktur yang terintegrasi
TAHAP II (2027)	Pengembangan potensi pertanian, pariwisata, dan pusat konsentrasi ekonomi masyarakat sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Difokuskan pada peningkatan akses menuju lokasi wisata, infrastruktur ekonomi masyarakat dan menyusun regulasi daerah	Akselerasi pembangunan daerah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan tatakelola pemerintah yang berintegrasi dan dinamis
TAHAP III (2028)	Pembangunan ekonomi dan infrastruktur daerah dalam rangka pengembangan wilayah pinggiran dan perbatasan difokuskan pada peningkatan pariwisata, riset dan inovasi, serta infrastruktur ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan difokuskan pada peningkatan kualitas UMKM dan peningkatan pasar tradisional	Peningkatan perekonomian yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan

Tahap	Arah Kebijakan	Tema Pembangunan
TAHAP IV (2029)	Peningkatan kualitas infrastruktur daerah dalam memperkuat pengembangan daerah pinggiran dan perbatasan di fokuskan pada perbaikan jalan, drainase, irigasi, pengelolaan sampah untuk meningkatkan daya saing daerah menuju kabupaten Aceh Besar yang bersyariah, maju dan berkelanjutan.	Penguatan Infrastruktur Dasar di Wilayah Pinggiran dan Perbatasan serta Pembangunan Infrastruktur Berkualitas untuk Mendukung Aceh Besar yang Bersyariah, Maju dan Berkelanjutan
TAHAP V (2030)	Pemantapan kualitas infrastruktur daerah mencapai universal akses kumuh, sanitasi dan air minum difokuskan pada terpenuhi perumahan rakyat dan ruang public	Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Ruang Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk memantapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Besar perlu didukung oleh prioritas pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.9. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Besar 2025 – 2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
20252029 - ACEH BESAR BERMARWAH DAN BERMARTABAT, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA, BERSYARIAH DALAM BINGKAI AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH					
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)	
		Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
				Umur Harapan Hidup (Tahun)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
			Ketersediaan dan aksesibilitas obat untuk masyarakat dan Kepatuhan terhadap standar mutu makanan dan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Presentase Kepuasan pasien (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Ratio Bed Occupation Rate (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
				Indeks Distribusi Guru (Indeks)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Meningkatnya mutu pendidikan dayah	Persentase bantuan Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia (%)	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH
				Persentase Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun (%)	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Skor Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Skor Kemampuan literasi SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Skor Kemampuan Literasi SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Kebinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Skor Kemampuan Numerasi SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
			Peningkatan kualitas Hidup dan penurunan angka prevalensi stunting	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan serta peningkatan pemanfaatan fasyankes hingga terwujudnya upaya kesehatan berkelanjutan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Peningkatan Sumber daya Manusia yang berkompetensi dan sesuai standar	Persentase Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (dinas kesehatan) (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Untuk Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan	Persentase Komite Sekolah yang Disupervisi dan Difasilitasi (%)	1.01.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Pemerintahan Daerah		
		Meningkatnya Keluarga Sejahtera		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (Indeks)	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				dalam Pelayanan Sosial (%)	
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) (%)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	
				Persentase Atlet yang mengikuti even Olah raga (%)	
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Prestasi Olah raga (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan	Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Merata			Tingkat Kemiskinan((%))	
				Kontribusi PDRB Aceh Besar (%)	
				Rasio Gini(Indeks)	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	
		Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan (%)	
				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	
				Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	
				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	
			Meningkatnya Konsumsi ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
					PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Pola Pangan Harapan Konsumsi (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			Meningkatnya kinerja ekspor barang untuk memperluas pasar internasional dan meningkatkan daya saing	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan yang mendukung kelancaran dan kenyamanan aktivitas perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
			Meningkatnya Pemamfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			Meningkatnya Pendapatan Ekonomi Tenaga Kerja Termasuk Yang Sudah Mengikuti Pelatihan	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/KAP/TH)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk lokal	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya realisasi investasi pada sektor industri dan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
			Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluhan dan	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Petani (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Kelembagaan Pertanian		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			Meningkatnya tertib administrasi dan kepastian hukum melalui penerbitan izin usaha industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Peningkatan Penerimaan ZIS serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF (%)	9.01.04 PROGRAM BAITUL MAL
			Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
			Rasio Wirausaha Baru	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			terkendalinya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sehingga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Tersedianya pengelolaan sistem informasi industri nasional yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan pembangunan industri		3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Tertampungnya Tenaga Kerja Yang Sesuai Dengan Bakat, Minat dan Keahlian Serta Terpenuhinya Tenaga Kerja Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Kerja Dalam Meningkatkan Produksi Barang/ Jasa	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Tertatanya Persebaran Penduduk Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi	Persentase Pengembangan SDM Warga Transmigrasi (%)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Harmonis dan Berkeadilan Serta Terlindunginya Hak-hak Normatif Pekerja di Perusahaan	Persentase Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Terwujudnya Kemandirian di Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian Sehingga Adanya Peningkatan Ekonomi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Terwujudnya produk & jasa yang sesuai standar, aman serta meningkatkan kepercayaan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Meningkatkan Infrastruktur yang	Meningkatnya Kualitas Pembangunan			Rasio konektivitas kabupaten/kota(%)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
Terintegrasi dan Ramah Lingkungan	Infrastruktur Terintegrasi dan Berkelanjutan				
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	
				Indeks Kualitas Infrastruktur (Indeks)	
		Terpenuhi Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan berdasarkan Tata Ruang wilayah		Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak (%)	
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	
			Meningkatnya Layanan Trasnportasi Laut	Konektivitas Laut	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transporatsi Darat	Konektivitas Darat (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi ideal (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Meningkatnya layanan persampahan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
			Meningkatnya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persentase Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat MBR	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persentase)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Air (Indeks)	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (Indeks)	
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional yang hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		Terwujudnya penurunan resiko bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	
			Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas, Inovatif, dan Penguatan Perdamaian	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, dan Penguatan Perdamaian			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	
		Terwujudnya tata kelola pemerintah berintegritas dan dinamis		Persentase penanganan kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TRIBUNTRAMAS) (Persentase)	
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	
				Persentase penyelesaian konflik sosial secara damai (%)	
				Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	
				Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Indeks Desa Membangun (IDM) (Indeks)	
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Indeks)	
				Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) (Nilai)	
			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Orang)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			Cakupan Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Capaian Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan yang terlaksana	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.10.14 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
			Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Meningkatnya Jumlah Fasilitas Penyelesaian Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)	2.10.17 PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN
			Meningkatnya kapasitas aparatur desa dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
			Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah dan Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya kualitas kerjasama antar desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
			Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran untuk usia 0- 4 Tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Persentase Akta Kelahiran untuk usia 0 -18 Tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 30% dari Perekaman KTP EL (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				Persentase Perekaman KTP Elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
					PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
			Meningkatnya Layanan Administrasi Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lain yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
			Meningkatnya Layanan pengembangan Kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Akses Data (OPD)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Penyediaan Jaringan VPN (OPD)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Pemanfaatan Buku Profil (OPD)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan (OPD)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Media Penyampaian Informasi (Media)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				PKS (Perjanjian Kerja Sama) (OPD)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, terselenggaranya Tibumtranmas, cakupan petugas perlindungan masyarakat yang memadai	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban serta penegakan syariat islam (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya Penetapan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan dan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			pelestarian nilai sosial budaya		
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
			Meningkatnya Tanah Ulayat yang telah ditetapkan	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan (%)	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
			Meningkatnya Tata Kelola administrasi Lahan Pemkab yang bersertifikat	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%)	2.10.12 PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH
			Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatkan tata kelola perbendaharaan, Meningkatkan tata kelola akuntansi dan pelaporan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Tepat Waktu)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan, Meningkatkan Sistem Informasi Keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Persentase Objek Pemeriksaan yang telah terbebas dari temuan hasil pengawasan (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
			Terlaksananya penanganan konflik sosial	Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
			Terlaksananya pendataan organisasi masyarakat yang aktif	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Terlaksananya pendidikan politik pada kader partai politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Menguatkan Syariat Islam, Adat, dan Budaya	Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam, serta Pelestarian Adat dan Budaya dalam tatanan kehidupan masyarakat			Indeks Pembangunan Syariah(Indeks)	
		Meningkatnya implementasi nilai-nilai Syariat Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat		Dimensi Aqidah	
				Dimensi Akhlak	
				Dimensi Lembaga Keuangan Syariah	
				Dimensi Kesadaran dan Ketaatan Pelaksanaan Syariat Islam	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Dimensi Kepatuhan Membayar Zakat	
				Dimensi Manajemen Masjid/Meunasah	
				Dimensi Melek Al-Quran	
			Meningkatnya Akses dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	Persentase mesjid yang tertata manajemen dan kemakmurannya (%)	9.01.02 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH
			Meningkatnya kapasitas dan peran ulama dalam pembangunan daerah	Persentase Kader Ulama yang di Tingkatkan Kompetensinya (%)	9.01.03 PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH
		Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dilestarikan (Persentase)	
			Menguatnya identitas lokal dan meningkatnya pemahaman masyarakat	Persentase Lembaga Adat Yang Memiliki Struktur dan Aturan Tertulis (%)	2.22.07 PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Tata Kelola Meseum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

3.5.3. Program Ketahanan Pangan dalam RPJM Kabupaten Aceh Besar 2025–2029 dalam mendukung arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan penguatan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pangan secara berkelanjutan melalui berbagai pendekatan strategis yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi wilayah.

Kabupaten Aceh Besar akan mengembangkan kawasan sentra pangan berbasis desa melalui revitalisasi lumbung pangan lokal, peningkatan produktivitas lahan pertanian, serta pengembangan irigasi dan sarana prasarana pertanian. Pemerintah daerah juga mendorong percepatan modernisasi pertanian melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi benih unggul, serta pelatihan teknologi pertanian presisi untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen.

Sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan *food estate*, Kabupaten Aceh Besar merencanakan pembentukan kawasan pertanian terpadu skala kabupaten di beberapa kecamatan potensial. Program ini akan didukung oleh pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, gudang hasil pertanian, dan fasilitas pengolahan pascapanen. Untuk memperkuat struktur ekonomi petani, pemerintah daerah akan membina dan memperkuat koperasi tani serta kelompok usaha bersama yang bergerak di sektor pertanian. Kolaborasi lintas sektor dengan BUMN, swasta, dan lembaga keuangan akan ditingkatkan guna memperluas akses pasar dan permodalan.

Sebagai upaya mendukung ketahanan gizi dan konsumsi pangan sehat, Aceh Besar akan mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di sekolah dasar, santri di pesantren, serta ibu hamil dan balita melalui posyandu. Program ini dilaksanakan secara terpadu bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Bappeda. Selain itu, konsep ketahanan pangan akan diintegrasikan dalam pendekatan *Food-Energy-Water (FEW) Nexus* dengan mengelola sumber daya air secara efisien untuk pertanian, pemanfaatan energi untuk pompa dan irigasi, serta pelestarian lingkungan pertanian.

Seluruh program akan didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data yang terukur, dengan indikator kinerja utama seperti produktivitas lahan, cakupan akses air irigasi, angka konsumsi pangan per kapita, serta prevalensi gizi buruk dan rawan pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk menyelaraskan arah kebijakan lokal dengan target nasional guna mewujudkan kemandirian pangan yang adil dan berkelanjutan.

1. Pengembangan Kawasan Lumbung Pangan Desa dan Daerah

Fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk pembangunan lumbung pangan desa/nasional, food estate, serta irigasi dan air baku, sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar di arahkan :

- a. Mengidentifikasi desa-desa berpotensi menjadi sentra pangan (padi, jagung, hortikultura).
- b. Mengaktifkan lumbung pangan desa melalui pembentukan *patok pangan desa* dan revitalisasi sistem irigasi primer dan tersier.
- c. Mengalokasikan program cetak sawah baru dan percepatan pembangunan irigasi.

2. Intensifikasi Pertanian dengan Teknologi Modern

Fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada Penerapan digitalisasi pertanian, precision irrigation, penggunaan alsintan, pupuk, benih unggul, sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar diarahkan :

- a. Penyediaan alsintan terintegrasi melalui kelompok tani dan dinas pertanian.
- b. Program pelatihan petani untuk penggunaan teknologi irigasi presisi dan sistem manajemen air skala lokal.
- c. Pemberian subsidi benih unggul dan pupuk sesuai rekomendasi BPS dan BMKG.

3. Proyek Food Estate Skala Kabupaten

Fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada Proyek food estate untuk memperluas hektar produktif hingga 4 juta ha guna menaikkan produksi 20 juta ton GKG, sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Besar diarahkan.

- a. Menetapkan satu atau dua kecamatan sebagai pilot project “food estate mini”, berkoordinasi dengan provinsi/kementan.
- b. Membangun infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, sistem drainase, dan fasilitas off-farm (gudang, penggilingan lokal).

4. Penguatan Kelembagaan Petani dan Koperasi

Fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada pengembangan koperasi pertanian dan UMKM untuk mendukung industri agro, penguatan kelembagaan petani, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar diarahkan pada :

- a. Memperkuat peran koperasi pertanian desa dalam penyaluran input, penyimpanan, dan pemasaran.
- b. Pelatihan manajemen usaha agribisnis untuk kelompok tani dan koperasi.
- c. Menjalin kemitraan dengan BUMNs (Perum Bulog, Pupuk Indonesia) dan swasta.

5. Program Hasil Terbaik Cepat Makan Bergizi Gratis (MBG)

Fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada Inisiatif MBG di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar diarahkan pada :

- a. Menyalurkan MBG di sekolah dasar, pesantren, dan posyandu desa, dengan anggaran APBD.
- b. Melibatkan puskesmas dalam pelaksanaan dan monitoring kualitas gizi.
- c. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan BKKBN.

6. Pendekatan FEW Nexus (Food–Energy–Water)

Fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada Pendekatan integratif food-energy-water nexus dalam pengelolaan pangan dan irigasi sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar diarahkan pada :

- a. Sinergi pembangunan irigasi (air) dan subsidi energi untuk pompa/bobot di sawah.
- b. Kolaborasi lintas sektor: Dinas Pertanian, PU, dan Lingkungan Hidup untuk menjaga kelestarian sumber air.

7. Pemantauan dan Evaluasi Indikator Ketahanan Pangan

Fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada Indikator nasional seperti prevalensi undernourishment dan produktivitas pangan sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar diarahkan pada :

- a. Mengadopsi indikator lokal: luas lahan panen, produktivitas, akses petani ke irigasi dan alsintan.
- b. Monitoring triwulan melalui dashboard kabupaten.
- c. Melaporkan capaian kepada provinsi sesuai RPJMN.

Tabel.3.10. Ringkasan Adaptasi Kebijakan

No.	Program Nasional (RPJMN)	Adaptasi Kabupaten Aceh Besar
1	Lumbung pangan desa/nasional	Pembentukan patok pangan desa + pengairan
2	Food estate dan cetak sawah	Pilot food estate mini di 1–2 kecamatan
3	Precision agriculture	Alsintan, benih unggul, irigasi modern
4	Koperasi dan UMKM	Penguatan kelembagaan dan kemitraan pertanian
5	MBG dan bantuan gizi	MBG di sekolah/pesantren/posyandu melalui APBD
6	FEW Nexus	Sinergi air dan energi untuk pertanian lokal
7	Indikator & dashboard	Monitoring triwulan & laporan ke RPJMN

Dengan menerjemahkan program nasional ketahanan pangan ke dalam program konkret di Aceh Besar, RPJM 2025–2029 dan RPJMA Tahun 2025 – 2029 akan:

- 1) Meningkatkan luas dan produktivitas lahan pangan
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan infrastruktur
- 3) Membentuk food estate skala lokal
- 4) Mendorong koperasi serta UMKM pertanian
- 5) Menjamin gizi anak dan ibu
- 6) Mengintegrasikan sumber daya air dan energi
- 7) Menyusun sistem pemantauan yang responsif

3.5.4. Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Perencanaan Pembangunan Kewilayahan adalah suatu proses perencanaan yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan di suatu wilayah tertentu agar lebih terkoordinasi, efisien, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, serta karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut. Ujian Perencanaan Pembangunan Kewilayahan:

- 1) Mengurangi ketimpangan antar wilayah
- 2) Mengoptimalkan potensi lokal agar mendukung pembangunan nasional
- 3) Mendukung pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan
- 4) Memperkuat konektivitas antarwilayah (aksesibilitas, transportasi, infrastruktur)
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

Perencanaan Pembangunan Kewilayahan, arah Kebijakan dan Strategi Wilayah untuk Kabupaten Aceh Besar dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Arah Kebijakan dan Strategi Wilayah Kabupaten Aceh Besar 2025–2029.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan, arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Aceh Besar 2025–2029 difokuskan pada pengembangan wilayah berbasis potensi lokal dan keunggulan komparatif masing-masing kecamatan. Pendekatan pembangunan

dilakukan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial, yang memadukan antara aspek sektoral dengan karakteristik kewilayahan. Arah kebijakan kewilayahan ini mencakup:

- a. Mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis potensi lokal.
- b. Memperkuat konektivitas antarwilayah untuk mendukung mobilitas barang, jasa, dan manusia.
- c. Mengembangkan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana serta perubahan iklim, terutama di kawasan pesisir dan pegunungan.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengembangan berkelanjutan.
- f. Mendorong sinergi antara wilayah penyangga dan pusat pertumbuhan ekonomi regional (Banda Aceh dan sekitarnya).

2. Strategi Pengembangan Wilayah

Strategi pembangunan wilayah disusun dengan mengelompokkan kecamatan dalam kawasan pengembangan berdasarkan fungsi, potensi, dan peran strategis wilayah. Berikut strategi pembangunan untuk masing-masing kawasan:

A. Kawasan Perkotaan dan Penyangga Ibu Kota Provinsi

Kawasan perkotaan dan penyangga ibu kota provinsi di kabupaten Aceh Besar meliputi Kecamatan Darussalam, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Peukan Bada , dengan strategi meliputi:

- a. Mengembangkan pusat layanan publik, ekonomi, dan pendidikan tinggi.
- b. Mendorong penerapan konsep smart district dan digitalisasi pelayanan.
- c. Menyediakan infrastruktur dasar dan penataan permukiman berbasis urbanisasi terkendali.

B. Kawasan Pesisir dan Bahari

Kawasan Pesisir dan bahari meliputi kecamatan Lhoknga, kecamatan Leupung, kecamatan Lhoong, kecamatan Peukan Bada, kecamatan Pulo Aceh, kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya, dengan strategi pembangunan meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan ekonomi berbasis kelautan dan pariwisata bahari.
- b. Memperkuat mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan pesisir.
- c. Memberdayakan nelayan dan pelaku ekonomi lokal melalui integrasi industri perikanan.

C. Kawasan Pertanian dan Agroindustri

Kawasan Pertanian dan agroindustri di kabupaten Aceh Besar meliputi kecamatan Indrapuri, kecamatan Montasik, kecamatan Seulimeum, kecamatan Kuta Cot Glie, kecamatan Suka Makmur, kecamatan Blang Bintang, kecamatanKuta Baro dan kecamatan Simpang Tiga, dengan strategi meliputi:

- a. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian.
- b. Membangun sistem pertanian berkelanjutan (smart farming, pertanian organik).
- c. Mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil tani dan peternakan.

D. Kawasan Konservasi dan Pegunungan

Kawasan konservasi dan pegunungan meliputi kecamatan Lembah Seulawah, kecamatan Pulo Aceh, kecamatan Kota Jantho, kecamatan Seulimeum, dan kecamatan Lhoong dengan strategi.

- a. Menetapkan wilayah lindung dan pengelolaan kawasan hutan secara lestari.
- b. Mengembangkan ekowisata dan agrowisata berbasis komunitas lokal.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga kawasan sumber air dan keanekaragaman hayati.

E. Kawasan Terpencil dan Tertinggal

Kawasan terpencil dan tertinggal meliputi kecamatan Pulo Aceh, beberapa gampong di kecamatan seulimeum dan Kecamatan Lhoong, dengan strategi meliputi:

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar meliputi listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Memperluas akses transportasi laut dan darat.
- c. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan sosial budaya.

3. Integrasi dengan Tema Prioritas Pembangunan Daerah

Setiap strategi kewilayahan diarahkan untuk mendukung 10 tema prioritas pembangunan daerah, seperti:

- a. Ketahanan pangan di kawasan pertanian,
- b. Digitalisasi di wilayah urban,
- c. Pariwisata dan ekonomi kreatif di pesisir,
- d. Ketahanan bencana di kawasan rawan gempa/tsunami, dan
- e. Pengurangan kemiskinan di daerah tertinggal.

Pendekatan ini mendukung visi pembangunan Kabupaten Aceh Besar 2025–2029: **“Aceh Besar Bermarwah dan Bermartabat, Adil, Makmur, Sejahterah. Bersyariah dalam bingkai Ahlussunah Wal jamaah”**.

Lebih lanjut Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025–2029, merupakan Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Aceh Besar dirancang sebagai upaya strategis untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten. Dengan luas wilayah mencapai lebih dari 2.900 km² yang terdiri atas dataran, pesisir, hingga kawasan pegunungan, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat potensi lokal tiap kawasan, memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru yang berbasis pada karakteristik wilayah.

Pola pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Aceh Besar 2025–2029 didasarkan pada pendekatan pengembangan wilayah berbasis potensi dan daya dukung lingkungan, dengan mempertimbangkan konektivitas antarwilayah, penguatan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, Kabupaten Aceh Besar dibagi ke dalam beberapa kawasan pengembangan strategis sebagai berikut:

1. Kawasan Perkotaan dan Peri-Urban

Kawasan ini diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat pelayanan publik, pendidikan, serta pengembangan sektor jasa dan UMKM berbasis teknologi dan kreativitas. Kedekatannya dengan Kota Banda Aceh menjadi peluang untuk penguatan peran sebagai kawasan penyangga dan mitra pertumbuhan.

2. Kawasan Pesisir dan Bahari

Diperkuat sebagai kawasan unggulan di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari yang berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Fokus diarahkan pada peningkatan infrastruktur pesisir, pemberdayaan nelayan, serta pengembangan destinasi wisata pantai dan selancar berstandar nasional. Kawasan ini meliputi kecamatan Lhoknga, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Leupung, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Seulimuem dan Kecamatan Mesjid Raya.

3. Kawasan Pertanian dan Agroindustri

Kawasan ini dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil pertanian. Pengembangan diarahkan pada peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi pertanian, dan pembangunan infrastruktur irigasi yang memadai.

4. Kawasan Pegunungan dan Konservasi

Diperlakukan sebagai kawasan lindung dan konservasi dengan fungsi strategis sebagai penyangga ekosistem serta sumber daya air untuk wilayah sekitarnya. Pendekatan pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian hutan, serta penguatan kelembagaan masyarakat adat dan lokal.

Seluruh kebijakan pembangunan kewilayahan Aceh Besar akan disinergikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), kebijakan provinsi Aceh, serta arah pembangunan nasional. Pendekatan integratif, partisipatif, dan berwawasan lingkungan menjadi landasan dalam pelaksanaan perencanaan ini agar seluruh wilayah Aceh Besar dapat berkembang secara harmonis, inklusif, dan berdaya saing.

Dengan pembangunan yang berbasis wilayah, diharapkan terwujud keseimbangan pertumbuhan antarwilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, serta pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Besar.

Sementara Itu Kabupaten Aceh Besar juga Perencanaan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Aceh Besar yang disesuaikan dengan 10 tema prioritas pembangunan RPJMK 2025–2029, lengkap dengan penyebutan wilayah kecamatan yang relevan untuk masing-masing tema:

1. Penguatan Ketahanan Pangan

Wilayah-wilayah pertanian seperti Montasik, Indrapuri, Seulimeum, Kuta Cot Glie, Lembah Seulawah, Balng Bintang, Kuta Baro, Darussalam , dan Suka Makmur diarahkan sebagai sentra produksi pangan strategis. Program prioritas mencakup pembangunan dan rehabilitasi irigasi, jalan usaha tani, penyuluhan pertanian terpadu, serta penguatan kelembagaan petani dan koperasi agribisnis.

2. Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Kecamatan Darul Imarah, Kota Jantho, Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya, Darussalam, dan Kuta Malaka yang dekat dengan pusat administrasi provinsi menjadi pilot dalam digitalisasi pelayanan. Kecamatan-kecamatan lain seperti Peukan Bada, Baitussalam, dan wilayah pesisir lainnya akan diperluas jangkauan jaringan digital melalui penguatan infrastruktur TIK dan literasi digital aparatur desa.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan

Program pengurangan ketimpangan difokuskan pada wilayah Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Leupung, Kecamatan Lhoong, Seulimeum dan Kecamatan Kuta Cot Glie, dengan intervensi berupa pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan kerja, penguatan BLT Dana Desa, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

4. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Kecamatan Darussalam, Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya, dan Darul Imarah diarahkan menjadi pusat ekonomi baru berbasis jasa, perdagangan, dan pendidikan

tinggi. Sementara itu, sektor UMKM diperkuat di kawasan Montasik, Suka Makmur, dan Indrapuri dengan pengembangan pusat logistik lokal dan pelatihan kewirausahaan digital.

5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Wilayah dengan potensi pariwisata tinggi seperti Lhoknga, Leupung, Lhoong, Peukan Bada, Mesjid Raya, dan Pulo Aceh akan difokuskan dalam pengembangan wisata bahari, wisata sejarah, dan budaya Islam. Ekonomi kreatif akan dikembangkan di Darussalam dan Ingin Jaya sebagai pusat produksi seni, kuliner, dan kerajinan berbasis kampus dan komunitas pemuda.

6. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antar wilayah

Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Indrapuri, dan Kecamatan Montasik sebagai daerah penghubung antarwilayah kabupaten dan provinsi akan diprioritaskan untuk penguatan infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan konektivitas ke wilayah terisolir seperti Pulo Aceh dan Lhoong juga menjadi fokus melalui transportasi laut dan darat yang andal.

7. Pelestarian Lingkungan dan Ketahanan Bencana

Kawasan rawan bencana dan sensitif lingkungan seperti Lhoong, Leupung, Pulo Aceh, Kecamatan Lembah Seulawah, dan Kecamatan Peukan Bada akan difokuskan pada upaya pelestarian hutan, konservasi pantai, penanggulangan abrasi, dan sistem peringatan dini bencana. Edukasi masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal menjadi bagian integral program ini.

8. Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar

Kecamatan Kota Jantho, Darussalam, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Darul Imarah, dan Kecamatan Krueng Barona Jaya dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional. Untuk peningkatan layanan dasar, intervensi khusus difokuskan ke Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Lhoong, dan Kecamatan Seulimeum, yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana dan tenaga kesehatan/pendidikan.

9. Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal

Setiap kecamatan didorong untuk mengembangkan potensi khasnya:

- a. Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Montasik fokus pertanian dan peternakan.
- b. Kecamatan Lhoknga dan Pulo Aceh fokus kelautan dan wisata bahari,
- c. Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Ingin Jaya fokus pendidikan dan ekonomi digital,
- d. Kecamatan Lembah Seulawah fokus konservasi dan agrowisata, melalui pendekatan *bottom-up* dan perencanaan partisipatif berbasis gampong.

10. Transformasi Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi hijau akan difokuskan pada pengembangan pertanian organik di Kuta Cot Glie, Suka Makmur, dan Seulimeum, energi terbarukan di Pulo Aceh dan Lembah Seulawah, serta pengelolaan sampah dan limbah terpadu di kawasan urban seperti Darul Imarah dan Ingin Jaya. Prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan akan diintegrasikan ke seluruh sektor pembangunan.

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan pembangunan wilayah, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui RPJM Tahun 2025–2029, arah pembangunan wilayah difokuskan pada penguatan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai strategi jangka panjang untuk mewujudkan Aceh Besar yang mandiri, tangguh, dan lestari.

Pembangunan ekonomi hijau menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), pengurangan emisi karbon, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup. Pendekatan ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan upaya nasional dalam pengendalian perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Arah Kebijakan dan Strategi Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan.

1. Transformasi Sektor Pertanian ke Sistem Pertanian Ramah Lingkungan

- a. Promosi praktik pertanian organik dan agroekologi, terutama di kawasan pertanian dataran tinggi dan pesisir barat.
- b. Penyediaan insentif dan pelatihan bagi petani untuk menerapkan teknologi pertanian berkelanjutan yang efisien air dan energi.
- c. Pengembangan sistem pertanian terintegrasi (pertanian, peternakan, dan perikanan) berbasis kawasan.

2. Penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Efisiensi Energi

- a. Pemanfaatan potensi tenaga surya, mikrohidro, dan biogas untuk kebutuhan energi masyarakat di daerah terpencil dan pertanian.
- b. Pembangunan infrastruktur pembangkit Listrik tenaga surya (PLTS) di fasilitas publik seperti sekolah, pesantren, puskesmas, dan kantor desa.
- c. Program Desa Mandiri Energi Hijau sebagai model desa berbasis energi terbarukan.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara Lestari

- a. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan lindung, hutan rakyat, dan daerah aliran sungai (DAS), khususnya di wilayah Jantho dan Seulawah.
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui skema hutan sosial dan hutan adat untuk mendukung ketahanan pangan dan konservasi.
- c. Pengendalian pemanfaatan tambang dan eksploitasi SDA berbasis prinsip kehati-hatian dan pelestarian lingkungan.

4. Pengembangan Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

- a. Penguatan sistem daur ulang dan pengelolaan sampah organik dan anorganik melalui bank sampah desa.
- b. Pengembangan UMKM berbasis limbah, seperti kerajinan dari plastik daur ulang, batako sampah organik, dan kompos pertanian.
- c. Kampanye publik dan edukasi lingkungan hidup, terutama di kalangan pelajar dan generasi muda.

5. Pengembangan Ekowisata dan Wisata Edukasi Berkelanjutan

- a. Pemanfaatan kawasan konservasi dan pesisir sebagai destinasi ekowisata berbasis partisipasi masyarakat lokal.
- b. Pengembangan fasilitas wisata hijau di kawasan Jantho, Lhoong, dan Leupung dengan pendekatan tata kelola yang lestari.
- c. Penguatan kapasitas SDM pariwisata untuk menjadi agen konservasi dan pengelola ekowisata profesional.

Dampak yang Diharapkan melalui pengembangan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menargetkan tercapainya:

- a. Pertumbuhan ekonomi berkualitas yang inklusif dan ramah lingkungan,
- b. Peningkatan ketahanan iklim dan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem,
- c. Penciptaan lapangan kerja hijau dan inovasi wirausaha berbasis sumber daya lokal,
- d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat dan akses energi bersih,

Perwujudan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan antar generasi.

Pengembangan Infrastruktur Pengairan dan Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Aceh Besar Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan, RPJMD Tahun 2025-2029 menetapkan penguatan sektor pertanian dan energi sebagai prioritas utama, khususnya Melalui pengembangan infrastruktur pengairan untuk mendukung swasembada pangan di wilayah pesisir barat, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

1. Pengembangan Infrastruktur Pengairan untuk Swasembada Pangan di Pesisir Barat Aceh Besar

Wilayah pesisir barat Aceh Besar, yang mencakup kecamatan-kecamatan seperti Lhoong, Leupung, Lhoknga, dan sekitarnya, memiliki potensi lahan pertanian yang luas namun belum sepenuhnya tergarap optimal akibat keterbatasan infrastruktur pengairan. Dalam RPJM 2025-2029, pembangunan sistem pengairan yang

terintegrasi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura.

Arah Kebijakan dan Strategi:

- a. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis, setengah teknis, dan irigasi desa di wilayah-wilayah pertanian produktif.
- b. Optimalisasi pemanfaatan sumber air permukaan (sungai, embung, dan mata air) untuk sistem irigasi lahan tadah hujan.
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan air irigasi secara berkelanjutan.
- d. Dukungan teknologi irigasi hemat air, seperti irigasi tetes dan pompa tenaga surya, khususnya di lahan kering pesisir.

Dampak yang Diharapkan:

- a. Peningkatan luas tanam dan indeks pertanaman (IP),
 - b. Pengurangan ketergantungan pangan dari luar daerah,
 - c. Tercapainya swasembada pangan berbasis kawasan,
 - d. Peningkatan kesejahteraan petani dan ekonomi wilayah pesisir barat.
2. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Mendukung Kemandirian Energi Wilayah

Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, terutama dari sumber air, surya, dan biomassa. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan tidak hanya mendukung agenda transisi energi nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan energi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil, perbukitan, dan kawasan pesisir yang belum sepenuhnya terlayani jaringan listrik konvensional.

Arah Kebijakan dan Strategi:

- a. Pemetaan potensi dan pembangunan infrastruktur EBT seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan biogas komunitas di desa-desa agraris dan pesisir.
- b. Pengembangan program "Desa Mandiri Energi" berbasis sumber daya lokal, bekerja sama dengan lembaga riset dan swasta.
- c. Integrasi EBT dengan sistem pertanian modern, seperti penggunaan panel surya untuk irigasi dan pengolahan hasil pertanian.

- d. Edukasi dan pelatihan masyarakat mengenai pemanfaatan dan perawatan instalasi EBT.

Dampak yang Diharapkan:

- a. Terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri,
- b. Penurunan emisi karbon dan dampak lingkungan akibat ketergantungan energi fosil,
- c. Tumbuhnya ekosistem ekonomi baru berbasis energi ramah lingkungan,
- d. Mendukung percepatan pembangunan desa tertinggal dan kawasan terpencil.

Sinergi Pembangunan Wilayah: Ketahanan Pangan dan Kemandirian Energi Integrasi antara pengembangan infrastruktur pengairan dan energi baru terbarukan menjadi pilar penting dalam strategi pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berwawasan lingkungan, dan berorientasi jangka panjang. Dalam kerangka RPJM 2025–2029, program-program pembangunan akan difokuskan pada kolaborasi antar-perangkat daerah, pelibatan masyarakat, dan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan dunia akademik untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

3.5.5. Keselarasan Arah Pembangunan RPJMN, RPJMA dengan RPJMD Kabupaten Aceh Besar

A. Lokasi Prioritas Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho

A.1 Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Banda Aceh-Jantho, antara lain melalui Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Banda Aceh–Jantho

Dalam rangka mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Banda Aceh memandang perlu untuk memperkuat keterpaduan kawasan perkotaan Banda Aceh–Jantho sebagai simpul pertumbuhan wilayah. Kawasan ini memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik, serta simpul konektivitas antarwilayah di Provinsi Aceh.

Salah satu fokus strategis dalam RPJMK Aceh Besar Tahun 2025-2029 adalah penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan yang terintegrasi

dengan rencana tata ruang, yang mengedepankan pendekatan kolaboratif dan holistik. Penyusunan ini bertujuan untuk mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan secara lebih terkendali, responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi, dan adaptif terhadap tantangan lingkungan serta perubahan iklim.

Pengembangan kawasan Banda Aceh-Jantho diarahkan untuk mengintegrasikan potensi kawasan, seperti:

- a. Pusat pemerintahan dan pendidikan di Jantho,
- b. Pusat ekonomi dan perdagangan di Banda Aceh,
- c. Konektivitas transportasi regional,
- d. Potensi pariwisata berbasis budaya dan sejarah Islam,
- e. serta kawasan hijau dan hutan lindung di sekitar Jantho.

Namun, kawasan ini juga menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, antara lain:

- a. Ketimpangan pembangunan antarwilayah,
- b. Urban sprawl dan konversi lahan produktif,
- c. Persoalan sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah,
- d. Terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang publik,
- e. serta lemahnya integrasi perencanaan antara dua wilayah administratif.

Oleh karena itu, penyusunan master plan akan diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan kawasan perkotaan Banda Aceh-Jantho yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan, dengan membentuk koridor pembangunan yang saling mendukung.
- b. Mengintegrasikan kebijakan tata ruang antara Banda Aceh dan Aceh Besar, khususnya dalam hal jaringan jalan, transportasi massal, pengendalian pemanfaatan ruang, dan perlindungan kawasan lindung.
- c. Mendorong pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara maksimal dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kebutuhan sosial masyarakat.
- d. Membangun pusat-pusat pertumbuhan baru (urban node) yang dapat menampung aktivitas sosial ekonomi dan mengurangi tekanan terhadap pusat kota.
- e. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar perkotaan, seperti air bersih, sanitasi, jaringan listrik, dan telekomunikasi secara merata.

Penyusunan masterplan ini akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa rencana yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan lokal dan memiliki daya dorong implementatif yang kuat. Dengan demikian, kawasan Banda Aceh-Jantho diharapkan dapat tumbuh sebagai kawasan metropolitan yang inklusif, resilien, produktif, dan berwawasan lingkungan, serta menjadi model kolaborasi antarwilayah di Provinsi Aceh.

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah serta memperkuat posisi strategis Aceh Besar dalam konteks regional dan nasional, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan pengembangan kawasan BASAJAN (Banda Aceh–Sabang–Jantho) sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Kawasan BASAJAN merupakan simpul strategis yang menghubungkan tiga pusat pertumbuhan utama di ujung utara Pulau Sumatra, yaitu:

- a. Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan jasa,
- b. Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan internasional, serta
- c. Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Besar yang dirancang sebagai pusat administrasi, pendidikan, dan konservasi lingkungan.

Pengembangan BASAJAN diarahkan untuk menciptakan konektivitas antarwilayah, integrasi ekonomi, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan potensi lokal, dan penguatan daya saing daerah.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan **BASAJAN**

1. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah

- a. Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung Jantho–Banda Aceh–Pelabuhan Ulee Lheue serta Jantho-Lamno-Calang.
- b. Penguatan konektivitas laut dan udara antara Banda Aceh dan Sabang melalui integrasi Pelabuhan Ulee Lheue dan Pelabuhan Balohan.
- c. Pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat BASAJAN.

2. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Investasi

- a. Mendorong pengembangan kawasan industri berbasis potensi lokal di sekitar Jantho dan pinggiran Banda Aceh.
- b. Kolaborasi dengan BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang) untuk mendorong investasi maritim, logistik, dan pariwisata di Sabang.
- c. Pemberdayaan UMKM lokal melalui integrasi rantai pasok antara desa-desa produktif di Aceh Besar dengan pasar di Banda Aceh dan Sabang.

3. Penguatan Peran Jantho sebagai *Smart Eco City*

- a. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan perkantoran terpadu, dan layanan publik berbasis digital.
- b. Pengembangan kawasan hijau, ekowisata, dan pendidikan berbasis konservasi lingkungan.
- c. Revitalisasi peran Jantho sebagai pusat pelatihan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia.

4. Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Budaya

- a. Penguatan identitas BASAJAN sebagai destinasi wisata sejarah, bahari, dan ekowisata unggulan.
- b. Peningkatan infrastruktur dan atraksi wisata di kawasan pantai barat Aceh Besar, perbukitan Jantho, serta jalur wisata halal di Banda Aceh dan Sabang.
- c. Promosi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari branding kawasan BASAJAN.

5. Kolaborasi Antar wilayah dan Tata Kelola Kawasan

- a. Mendorong kerjasama antar-pemerintah daerah (Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan BASAJAN.
- b. Pembentukan forum koordinasi pengembangan kawasan BASAJAN untuk sinkronisasi program lintas sektor dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Dampak yang Diharapkan dengan pengembangan kawasan strategis BASAJAN, Kabupaten Aceh Besar menargetkan:

- a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan wilayah,
- b. Pengurangan kesenjangan antarwilayah,
- c. Peningkatan akses layanan publik, dan

Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan.

A.2 Pemenuhan Layanan Dasar Air Minum, Penanganan Limbah, dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Banda Aceh–Jantho

Sebagai bagian dari upaya penataan dan pengembangan kawasan perkotaan Banda Aceh-Jantho yang terintegrasi dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menempatkan pemenuhan layanan dasar sebagai prioritas pembangunan dalam dokumen RPJMK Tahun 2025-2029. Tiga aspek penting yang menjadi fokus adalah penyediaan air minum yang layak, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).

1. Pemenuhan Layanan Air Minum Layak dan Aman

Wilayah Banda Aceh-Jantho menghadapi tantangan dalam pemerataan akses air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Masih terdapat masyarakat yang bergantung pada sumber air yang tidak terjamin kebersihannya, terutama di wilayah pinggiran dan perbatasan kota–kabupaten.

Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mendorong:

- a. Peningkatan cakupan layanan PDAM melalui rehabilitasi dan pembangunan jaringan distribusi baru,
- b. Optimalisasi sumber air baku yang berkelanjutan,
- c. Penguatan sistem pengelolaan air berbasis masyarakat,
- d. Integrasi layanan air minum dengan rencana tata ruang dan permukiman.

2. Penanganan Limbah dan Pengelolaan Lingkungan

Pertumbuhan kawasan perkotaan menyebabkan meningkatnya volume limbah domestik dan non-domestik. Ketidakterpaduan sistem sanitasi, minimnya fasilitas pengolahan limbah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah menjadi tantangan utama. Untuk itu, diarahkan kebijakan:

- a. Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu, termasuk instalasi pengolahan air limbah domestik (IPAL),
- b. Peningkatan cakupan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah,

- c. Penerapan prinsip reduce-reuse-recycle (3R) melalui TPS 3R berbasis komunitas,
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola limbah.

3. Penyediaan dan Pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekologis, estetika, dan sosial dalam mendukung kualitas hidup masyarakat perkotaan. Namun, urbanisasi yang pesat telah menekan ketersediaan RTH, terutama di kawasan inti kota.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk:

- a. Menambah luasan RTH publik dan privat sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang minimal 30 persen dari luas wilayah perkotaan),
- b. Melestarikan kawasan hijau yang ada, termasuk taman kota, hutan kota, dan sempadan sungai,
- c. Mengembangkan koridor hijau sebagai penghubung ekologis antarkawasan,
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan RTH secara berkelanjutan.

Penerapan kebijakan ini akan dilakukan secara terpadu melalui sinergi lintas sektor dan antar wilayah, serta didukung dengan pemutakhiran data, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas aparatur. Dengan demikian, pengembangan kawasan perkotaan Banda Aceh-Jantho tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

A.3 Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja yang Terintegrasi dengan Sektor Ketenagakerjaan

Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perkotaan Banda Aceh-Jantho sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan di wilayah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan penguatan sumber daya manusia sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Salah satu strategi penting yang dikedepankan dalam RPJMK Tahun 2025-2029 adalah penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan serta pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi langsung dengan kebutuhan sektor ketenagakerjaan.

Pertumbuhan kawasan perkotaan Banda Aceh-Jantho membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan produktif di berbagai sektor, seperti jasa, industri kreatif, teknologi informasi, pariwisata, serta UMKM. Namun demikian, tantangan yang dihadapi saat ini mencakup:

- a. Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja (*mismatch*),
- b. Rendahnya tingkat partisipasi pelatihan vokasional berkualitas,
- c. Terbatasnya fasilitas pelatihan yang terstandar dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Integrasi Layanan Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Penyusunan rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja akan dilakukan secara terkoordinasi antara sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan dunia usaha, hal ini meliputi:

- a. Penyelarasan kurikulum pendidikan menengah dan vokasi dengan kebutuhan industri lokal,
- b. Peningkatan kerja sama antara sekolah/BLK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI),
- c. Penyediaan sistem informasi pasar kerja untuk mengarahkan minat peserta pelatihan dan lulusan ke sektor potensial.

2. Penguatan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah daerah akan mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan melalui:

- a. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Jantho dan sekitarnya sebagai pusat pelatihan berbasis kompetensi,
- b. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar/instruktur sesuai standar nasional dan internasional,
- c. Pengembangan pelatihan berbasis digital dan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian tenaga kerja.

2. Peningkatan Akses dan Inklusivitas

Pemerintah akan memastikan bahwa layanan pendidikan dan pelatihan kerja dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Program pelatihan juga

akan diarahkan untuk menjawab tantangan pengangguran dan setengah pengangguran di kawasan perkotaan.

Melalui upaya ini, diharapkan kawasan Banda Aceh–Jantho tidak hanya tumbuh secara fisik dan ekonomi, tetapi juga memiliki fondasi sumber daya manusia yang unggul, siap kerja, dan mampu mendorong transformasi sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kawasan Banda Aceh–Jantho

Sebagai pusat pertumbuhan wilayah, kawasan perkotaan Banda Aceh–Jantho mengalami tekanan urbanisasi yang cukup tinggi, yang berdampak pada peningkatan permukiman dengan kualitas lingkungan yang tidak layak. Permukiman kumuh di kawasan ini umumnya ditandai dengan kepadatan bangunan yang tinggi, keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, drainase), dan rendahnya kualitas hunian. Keberadaan permukiman kumuh tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, kesehatan, dan ketimpangan ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, dalam RPJMK Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan penataan permukiman kumuh perkotaan sebagai salah satu agenda prioritas dalam kerangka pengembangan kawasan perkotaan Banda Aceh–Jantho secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

Adapun arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh meliputi:

1. Identifikasi dan Pemutakhiran Data Kumuh

Pemerintah akan melakukan pemetaan dan verifikasi lokasi-lokasi permukiman kumuh dengan pendekatan partisipatif berbasis komunitas, guna memastikan akurasi data dan kejelasan intervensi. Data ini akan menjadi dasar penetapan skala prioritas penanganan.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Upaya penataan akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman, seperti:

- a. Penyediaan jaringan air bersih dan sanitasi layak,
- b. Perbaikan drainase lingkungan untuk mengurangi genangan dan risiko banjir,

- c. Peningkatan akses jalan lingkungan dan penerangan umum,
 - d. Pengelolaan sampah berbasis komunitas.
3. Rehabilitasi dan Reorganisasi Permukiman
- Penataan kawasan kumuh dilakukan melalui pendekatan in-situ (di tempat) maupun relokasi terbatas jika diperlukan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan keterlibatan masyarakat. Reorganisasi ruang dilakukan untuk menciptakan permukiman yang lebih tertata, sehat, dan aman.
4. Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
- Pemerintah akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan lingkungan permukiman melalui penguatan kelembagaan lokal seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta kolaborasi dengan LSM, akademisi, dan sektor swasta.
5. Integrasi dengan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan
- Penataan kawasan kumuh akan diselaraskan dengan rencana tata ruang dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, untuk mencegah timbulnya kawasan kumuh baru di masa mendatang.

Dengan pelaksanaan program penataan permukiman kumuh secara terencana dan terpadu, kawasan Banda Aceh-Jantho diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah perkotaan yang layak huni, sehat, inklusif, dan manusiawi, serta mendukung visi pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

A.3 Pembangunan Jalan *Missing Link* Jantho–Keumala

Dalam rangka memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat pengembangan kawasan perkotaan Banda Aceh–Jantho, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan pembangunan jalan penghubung (*missing link*) Jantho-Keumala sebagai salah satu program strategis infrastruktur dalam RPJMK Tahun 2025-2029. Pembangunan ruas jalan ini memiliki peran penting dalam membuka akses wilayah tengah ke pesisir barat dan selatan Aceh, serta menjadi bagian dari upaya integrasi kawasan yang lebih luas antara Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan Pidie Jaya. Jalan Jantho-Keumala merupakan salah satu simpul konektivitas yang selama ini belum terhubung secara fungsional dan memadai. Keberadaan "*missing link*" ini menyebabkan:

- a. Terbatasnya akses langsung antara Jantho dan Keumala yang berdampak pada rendahnya pergerakan barang dan orang,
- b. Isolasi relatif wilayah tengah Aceh Besar yang kaya potensi alam namun belum tergarap optimal,
- c. Terhambatnya pemerataan pembangunan dan distribusi layanan dasar.

Oleh karena itu, pembangunan jalan penghubung Jantho–Keumala diarahkan untuk:

1. Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Terpadu

Ruas jalan ini akan menjadi koridor penghubung antara kawasan pusat pemerintahan di Jantho dan jalur lintas tengah Aceh di Keumala. Fungsinya sangat strategis untuk memperkuat peran Jantho sebagai simpul pengembangan wilayah dan memperluas jangkauan layanan publik ke kawasan pedalaman.

2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Masyarakat

Dengan tersambungny ruas Jantho–Keumala, waktu tempuh antardaerah akan lebih efisien, biaya logistik menurun, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM lokal.

3. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Antarwilayah

Pembangunan jalan ini menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah, membuka akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat pedalaman, serta mendorong pemerataan infrastruktur dasar di kawasan hinterland.

4. Mendukung Ketahanan Wilayah dan Penanganan Bencana

Ruas ini juga berfungsi sebagai jalur alternatif evakuasi dan distribusi bantuan dalam kondisi darurat bencana, terutama mengingat Aceh termasuk wilayah rawan bencana gempa dan banjir.

Pembangunan jalan missing link Jantho-Keumala akan dirancang secara terpadu dengan rencana tata ruang wilayah dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan didorong guna percepatan pembangunan dan pembiayaan.

Dengan tersambungny ruas ini, diharapkan terjadi percepatan integrasi wilayah antara Banda Aceh, Jantho, dan kawasan tengah Aceh, sehingga mampu

memperkuat daya saing regional, mendorong investasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

A.4 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banda Aceh–Aceh Besar

Salah satu isu strategis dalam pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Aceh Besar adalah pemenuhan kebutuhan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan kawasan permukiman, serta berkembangnya kawasan perkotaan yang saling terhubung antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, maka kebutuhan akan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terpadu menjadi semakin mendesak.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Aceh mendorong percepatan pengembangan SPAM Regional Banda Aceh–Aceh Besar. SPAM Regional ini dirancang untuk menjadi solusi penyediaan air minum lintas wilayah, yang efisien dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber air baku dari kawasan Sungai Krueng Aceh dan potensi sumber air lainnya.

Ketersediaan air minum yang aman dan layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta prasyarat penting dalam mewujudkan kesejahteraan, kesehatan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik wilayah urban-rural continuum, di mana aktivitas permukiman, perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan berlangsung secara terintegrasi dengan wilayah perkotaan Banda Aceh.

Namun demikian, tantangan pemenuhan kebutuhan air minum masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Aceh Besar. Berdasarkan data PDAM Tirta Mountala dan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, cakupan layanan air minum perpipaan masih tergolong rendah, terutama di wilayah-wilayah pinggiran perkotaan dan kawasan pertumbuhan baru. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kapasitas produksi PDAM, keterbatasan jaringan distribusi, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air secara regional.

Di sisi lain, terjadi peningkatan signifikan kebutuhan air minum akibat perkembangan kawasan strategis, seperti pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar di Jantho, kawasan pendidikan dan kampus, kawasan pariwisata, hingga kawasan pertumbuhan ekonomi di perbatasan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kebutuhan ini menuntut pendekatan lintas batas administratif dan pemanfaatan sumber daya bersama secara efisien.

Menanggapi tantangan dan potensi tersebut, inisiatif pengembangan SPAM Regional Banda Aceh–Aceh Besar muncul sebagai solusi strategis untuk memastikan ketersediaan layanan air minum yang aman, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat di kedua wilayah.

1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan SPAM Regional

Pengembangan SPAM Regional Banda Aceh–Aceh Besar bertujuan utama untuk:

- a. Meningkatkan cakupan layanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah urban dan perdesaan terdekat, dengan sistem terintegrasi yang menjamin efisiensi dan keberlanjutan.
- b. Mewujudkan kolaborasi antar pemerintah daerah (Aceh Besar dan Banda Aceh) dalam pengelolaan sumber daya air secara optimal dan terpadu.
- c. Mendukung pengembangan wilayah strategis dan kawasan ekonomi baru, termasuk kawasan pendidikan, pemerintahan, pariwisata, dan permukiman.
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan PDAM, baik dari sisi teknologi, kelembagaan, maupun tata kelola operasional.

Sasaran yang ingin dicapai hingga akhir periode RPJMK 2029 antara lain:

- a. Tersusunnya rencana induk dan studi kelayakan SPAM Regional yang komprehensif.
- b. Terbentuknya kelembagaan kerja sama antardaerah (KAD) dalam pengelolaan SPAM Regional.
- c. Terbangunnya sistem penyediaan air minum yang terdiri dari instalasi pengolahan air (IPA), jaringan transmisi dan distribusi utama, serta infrastruktur pendukung lainnya.
- d. Meningkatnya cakupan layanan PDAM minimal hingga 40% penduduk Aceh Besar.

- e. Terintegrasinya manajemen pelayanan antara PDAM Tirta Mountala (Aceh Besar) dan PDAM Tirta Daroy (Banda Aceh).

2. Komponen Infrastruktur dan Sumber Air Baku

SPAM Regional ini dirancang untuk memanfaatkan potensi sumber air baku dari Sungai Krueng Aceh yang memiliki debit memadai dan kualitas air relatif baik. Infrastruktur utama yang akan dikembangkan meliputi:

- a. Intake air baku di lokasi yang strategis di Krueng Aceh.
- b. Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas awal direncanakan sebesar 200 liter/detik, yang dapat dikembangkan bertahap.
- c. Jaringan transmisi dan distribusi menuju wilayah layanan di Aceh Besar, termasuk kawasan Lambaro, Blang Bintang, Ingin Jaya, Darussalam, hingga sebagian Jantho.
- d. Reservoir dan jaringan distribusi akhir ke pelanggan rumah tangga, institusi, dan layanan publik.

Pengembangan infrastruktur ini akan dibangun secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran dan skema pembiayaan yang disepakati.

3. Pendekatan Pembiayaan dan Kelembagaan

Pengembangan SPAM Regional membutuhkan pendekatan pembiayaan yang kreatif dan kolaboratif. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mendorong:

- a. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengelolaan infrastruktur dan operasional.
- b. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang air minum, terutama untuk pembangunan jaringan dan IPA.
- c. Dukungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.
- d. Kerja sama pendanaan dengan Kota Banda Aceh melalui skema cost-sharing dan penggunaan aset bersama.

Dari sisi kelembagaan, akan dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Unit Khusus SPAM Regional, yang mengatur operasional secara profesional dan terpisah dari urusan politik lokal, untuk menjamin kesinambungan layanan.

4. Dampak dan Manfaat Pembangunan SPAM Regional

Jika SPAM Regional ini dapat terwujud secara optimal, maka manfaat yang akan dirasakan mencakup:

- a. Ketersediaan air minum yang layak dan aman bagi puluhan ribu penduduk Aceh Besar, termasuk di kawasan yang selama ini mengalami kekurangan pasokan.
- b. Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan PDAM melalui integrasi sistem dan skala ekonomi yang lebih besar.
- c. Mendukung percepatan pembangunan wilayah dan investasi, khususnya di sektor perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
- d. Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) melalui pengurangan ketergantungan pada sumur bor dan sumber air tidak layak.

Pembangunan SPAM Regional Banda Aceh–Aceh Besar merupakan program strategis lintas sektor yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur dasar Kabupaten Aceh Besar dalam lima tahun mendatang. Komitmen dan sinergi antar pemangku kepentingan – pemerintah daerah, pusat, sektor swasta, serta masyarakat – menjadi prasyarat utama keberhasilan program ini. Dengan keberhasilan pengembangan SPAM Regional ini, Kabupaten Aceh Besar tidak hanya akan mampu meningkatkan akses terhadap layanan dasar air minum yang layak dan aman, tetapi juga memperkuat daya saing wilayah sebagai bagian dari metropolitan Banda Aceh yang maju, tangguh, dan berkelanjutan.

B. Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh (Kabupaten Aceh Besar)

B.1 Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Krueng Aceh dan Krueng Jreu dalam Mendukung Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh

Kawasan pesisir utara Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu wilayah strategis yang ditetapkan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi ketimpangan wilayah. Kawasan ini memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan subur, namun masih menghadapi kendala struktural dalam hal penyediaan air irigasi yang memadai dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan kawasan ini adalah kondisi jaringan irigasi teknis yang mengalami degradasi fungsi dan infrastruktur, sehingga berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani. Menanggapi hal tersebut, dalam RPJMK Aceh – Aceh Besar Tahun 2025–2029, pemerintah menetapkan rehabilitasi dan peningkatan Daerah Irigasi (D.I.) Krueng Aceh dan D.I. Krueng Jreu sebagai program prioritas infrastruktur pertanian, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

1. D.I. Krueng Aceh

Sebagai salah satu jaringan irigasi utama yang mengairi lahan pertanian produktif di wilayah pesisir utara, D.I. Krueng Aceh memiliki peran penting dalam menopang sistem produksi padi dan hortikultura. Namun, saat ini jaringan distribusi air, saluran primer-sekunder, serta struktur pendukung seperti pintu air dan bangunan pelimpah telah mengalami kerusakan dan sedimentasi yang mengganggu fungsi layanan irigasi. Rehabilitasi sistem ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan distribusi air ke lahan-lahan pertanian yang tersebar di kecamatan-kecamatan strategis seperti Kuta Cot Glie, Seulimeum, Indrapuri, Kutamalaka, Sukamakmur dan Ingin Jaya.

2. D.I. Krueng Jreu

Jaringan irigasi Krueng Jreu juga memegang peranan penting dalam mendukung intensifikasi pertanian di wilayah pesisir Aceh Besar. Permasalahan yang dihadapi mencakup keterbatasan jangkauan saluran, kerusakan saluran tersier, serta inefisiensi pengelolaan air oleh kelompok petani. Melalui peningkatan kapasitas dan perbaikan infrastruktur teknis di jaringan ini, pemerintah daerah mendorong penguatan pola tanam yang lebih intensif dan peningkatan indeks pertanaman (IP).

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan dan rehabilitasi dua daerah irigasi strategis ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan air irigasi secara adil, efisien, dan berkelanjutan,
- b. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan memperluas area tanam melalui sistem irigasi fungsional,

- c. Mendorong ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah,
- d. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan, terutama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan kementerian terkait (Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian),
- e. Mengembangkan kelembagaan petani, seperti P3A, dalam pengelolaan air pasca rehabilitasi.

Dengan dukungan pembiayaan dari APBN dan sinkronisasi perencanaan lintas level pemerintahan, rehabilitasi jaringan irigasi Krueng Aceh dan Krueng Jreu diharapkan menjadi motor penggerak transformasi kawasan pesisir utara Aceh Besar menjadi lumbung pangan regional, sekaligus memperkuat peran Kabupaten Aceh Besar dalam sistem ketahanan pangan Provinsi Aceh.

B.2 Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh

Dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan Kawasan Pesisir Utara sebagai Kawasan Swasembada Pangan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah 2025–2029. Kawasan ini memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan produktif, terutama untuk komoditas padi, jagung, dan hortikultura. Namun, produktivitas lahan masih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur irigasi, khususnya jaringan irigasi di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Permasalahan umum yang dihadapi saat ini antara lain:

- a. Kondisi jaringan irigasi sekunder dan tersier yang rusak atau tidak berfungsi optimal,
- b. Pendangkalan saluran akibat sedimentasi,
- c. Kebocoran saluran dan lemahnya sistem pengendalian air,
- d. Terbatasnya kemampuan operasional dan pemeliharaan oleh kelompok petani.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan program rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan daerah sebagai

salah satu prioritas utama untuk menunjang pengembangan Kawasan Swasembada Pangan. Program ini diarahkan pada:

1) Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder dan Tersier

Pemerintah daerah akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur irigasi di wilayah pesisir utara, kemudian melaksanakan rehabilitasi saluran irigasi yang mengalami kerusakan. Perbaikan akan mencakup perkuatan struktur saluran, pembuatan pintu air, dan peningkatan kapasitas aliran untuk menjamin ketersediaan air saat musim tanam.

2) Peningkatan Efisiensi Distribusi dan Pengelolaan Air

Selain infrastruktur fisik, program juga akan difokuskan pada peningkatan efisiensi distribusi air irigasi ke tingkat lahan. Hal ini dilakukan dengan:

- a. Memasang sistem pengaturan dan pemantauan distribusi air,
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, khususnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A),
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan melalui pendekatan berbasis komunitas.

3) Sinergi Perencanaan dan Pembiayaan

Program ini akan dijalankan secara sinergis antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan gampong. Sumber pembiayaan akan didorong dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang irigasi, serta optimalisasi dana desa untuk kegiatan pendukung operasional dan pemeliharaan.

Dengan terlaksananya rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan daerah secara terencana dan berkelanjutan, diharapkan produktivitas lahan pertanian di pesisir utara Aceh Besar dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan memperkuat posisi kawasan sebagai sentra produksi pangan utama, sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan pengurangan ketimpangan wilayah.

B.3 Peningkatan Daya Guna Lahan Pertanian (Intensifikasi) dalam Mendukung Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh

Kawasan Pesisir Utara Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu wilayah dengan potensi pertanian yang sangat besar, khususnya untuk komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan hortikultura. Dalam rangka menjadikan kawasan ini sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam RPJMK Tahun 2025–2029 menetapkan strategi utama berupa peningkatan daya guna lahan pertanian melalui pendekatan intensifikasi.

Peningkatan daya guna lahan menjadi penting mengingat keterbatasan ketersediaan lahan baru (ekstensifikasi) serta adanya tekanan alih fungsi lahan di kawasan pesisir dan peri-urban. Oleh karena itu, intensifikasi pertanian diarahkan untuk mengoptimalkan produktivitas lahan yang sudah ada secara berkelanjutan, efisien, dan berbasis teknologi tepat guna.

Arah Strategis Peningkatan Intensifikasi Pertanian:

1. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
 - a. Pemerintah daerah mendorong petani untuk meningkatkan jumlah musim tanam per tahun (dari IP 100 menjadi IP 200–300) dengan menjamin ketersediaan air irigasi, penyediaan benih unggul, dan pendampingan teknis.
 - b. Dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) akan dioptimalkan untuk efisiensi proses tanam dan panen.
2. Penggunaan Teknologi Pertanian Modern
 - a. Introduksi dan adopsi teknologi pertanian modern seperti sistem tanam jarak legowo, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu (PHT), dan digitalisasi pertanian melalui aplikasi manajemen lahan akan diprioritaskan.
 - b. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan balai penyuluhan pertanian akan diperkuat.
3. Penguatan Sistem Penyuluhan dan SDM Pertanian
 - a. Kapasitas penyuluh lapangan dan kelembagaan tani (kelompok tani, gapoktan) akan ditingkatkan melalui pelatihan, demplot, dan transfer pengetahuan berbasis kebutuhan lokal.

4. Peningkatan Akses terhadap Sarana Produksi Pertanian
 - a. Pemerintah daerah akan memfasilitasi ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, dan benih unggul secara tepat waktu dan sesuai standar mutu.
 - b. Skema pembiayaan petani melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan subsidi input produksi akan didorong.

Melalui peningkatan daya guna lahan berbasis intensifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menargetkan peningkatan produktivitas komoditas utama secara signifikan, sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya lahan. Strategi ini menjadi kunci untuk menjadikan kawasan pesisir utara Aceh Besar sebagai sentra produksi pangan daerah yang tangguh, efisien, dan mampu berkontribusi terhadap kedaulatan pangan Aceh dan nasional.

B.4 Peningkatan Produktivitas Peternakan dan Pangan Hewani dalam Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh

Sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menempatkan sektor peternakan dan pangan hewani sebagai salah satu fokus utama dalam pengembangan Kawasan Swasembada Pangan di Pesisir Utara Aceh pada periode RPJMK 2025–2029. Pengembangan sektor peternakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan hewani, tetapi juga untuk mendukung pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Fokus dan Strategi Peningkatan Produktivitas Peternakan

1. Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu
 - a. Pemerintah daerah akan mengembangkan kawasan-kawasan peternakan yang terintegrasi dengan lahan pertanian dan pemukiman, guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan mendukung diversifikasi produksi pangan.
 - b. Lokasi strategis dengan akses infrastruktur memadai akan dijadikan prioritas untuk pengembangan peternakan sapi potong, kambing, ayam, dan unggas lainnya.
2. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Ternak

- a. Program perbaikan genetika ternak melalui pembibitan unggul dan inseminasi buatan akan didorong untuk meningkatkan daya produksi dan ketahanan ternak.
- b. Penyediaan pakan berkualitas, manajemen pemeliharaan modern, serta pengendalian penyakit secara terpadu akan menjadi bagian dari upaya peningkatan produktivitas.

3. Fasilitasi Akses Teknologi dan Penyuluhan Peternakan

- a. Penyuluh peternakan akan diperkuat kapasitasnya untuk memberikan pendampingan teknis secara berkelanjutan kepada peternak, khususnya dalam penerapan teknologi tepat guna dan pengelolaan usaha peternakan yang ramah lingkungan.
- b. Pengembangan teknologi pakan alternatif dan sistem peternakan berkelanjutan akan diintegrasikan dalam program.

4. Penguatan Kelembagaan Peternak dan Akses Pasar

- a. Pemerintah daerah akan mendorong pembentukan dan penguatan kelompok peternak dan koperasi sebagai wadah pembinaan usaha dan pemasaran hasil peternakan.
- b. Peningkatan akses pasar dan pengembangan produk olahan peternakan juga menjadi perhatian untuk menambah nilai tambah hasil produksi.

5. Pengelolaan Lingkungan dan Sanitasi Peternakan

- a. Aspek pengelolaan limbah ternak dan penerapan standar kebersihan serta biosekuriti akan menjadi prioritas untuk menjaga kesehatan ternak dan lingkungan sekitar.

Dengan optimalisasi pengembangan sektor peternakan dan pangan hewani yang terencana dan terintegrasi dalam Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam produksi, kualitas, dan ketersediaan pangan hewani. Hal ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan konsumsi lokal tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.

B.5 Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Sentra produksi Kabupaten Aceh Besar.

Sebagai bagian dari upaya diversifikasi pangan dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menempatkan hortikultura sebagai sektor prioritas dalam pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh pada periode RPJMK 2025–2029. Hortikultura memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan petani, menyediakan kebutuhan gizi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Strategi Pengembangan Hortikultura:

1. Peningkatan Luas dan Intensitas Tanam Hortikultura
 - a. Pemerintah daerah mendorong perluasan areal tanam hortikultura yang meliputi sayuran, buah-buahan, dan tanaman rempah di wilayah pesisir utara dengan memanfaatkan lahan yang produktif dan beririgasi memadai.
 - b. Intensifikasi budidaya dilakukan melalui penggunaan benih unggul, teknologi budidaya modern, dan praktik agronomi yang baik untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk.
2. Pengembangan Infrastruktur Pendukung
 - a. Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung seperti rumah kaca, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), serta jaringan irigasi hortikultura akan dioptimalkan guna menjaga kontinuitas produksi dan mutu hasil panen.
 - b. Aksesibilitas jalan dan transportasi juga ditingkatkan untuk memudahkan distribusi produk hortikultura ke pasar.
3. Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluhan
 - a. Program pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani hortikultura akan diperkuat, dengan fokus pada pengelolaan budidaya, pengendalian hama terpadu, dan pascapanen.
 - b. Kerja sama dengan lembaga penelitian dan penyuluhan pertanian akan diperluas untuk transfer teknologi dan inovasi hortikultura.
4. Penguatan Kelembagaan dan Pemasaran

- a. Pengembangan kelembagaan petani hortikultura, seperti kelompok tani dan koperasi, akan didorong untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya tawar di pasar.
- b. Pemerintah daerah juga akan memfasilitasi pengembangan pasar lokal dan regional serta pengembangan produk olahan hortikultura bernilai tambah.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

- a. Penerapan teknologi digital dalam manajemen produksi, pemasaran, dan logistik hortikultura akan menjadi bagian dari strategi modernisasi pertanian di kawasan ini.

Dengan strategi pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura yang komprehensif, Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh diharapkan menjadi pusat produksi hortikultura unggulan di Provinsi Aceh. Hal ini akan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar.

B.6 Pembangunan dan Pengelolaan Tampungan Air serta Penyediaan Air Berkelanjutan untuk Sektor Pertanian, Peternakan, dan Hortikultura

Kawasan Pesisir Utara Kabupaten Aceh Besar ditetapkan sebagai Kawasan Swasembada Pangan dalam RPJMK 2025–2029, dengan komoditas unggulan meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan kawasan ini adalah ketersediaan air yang tidak merata sepanjang tahun, yang menghambat optimalisasi produktivitas lahan dan ketahanan sistem produksi pertanian.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memprioritaskan pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta sistem distribusi air yang berkelanjutan sebagai strategi kunci dalam mendukung keberhasilan kawasan swasembada pangan. Strategi dan Arah Kebijakan:

1. Pembangunan Infrastruktur Tampungan Air Skala Mikro dan Menengah
 - a. Pembangunan embung, bendungan kecil, dan kolam retensi akan diperluas di lokasi-lokasi strategis untuk menampung air hujan dan limpasan permukaan.

- b. Infrastruktur ini akan difungsikan sebagai cadangan air untuk musim kemarau dan sumber irigasi tambahan bagi lahan pertanian, kandang ternak, serta lahan hortikultura.
- 2. Penguatan Sistem Irigasi dan Distribusi Air
 - a. Sistem distribusi dari tampungan air akan dirancang untuk menjangkau berbagai subsektor, mencakup saluran irigasi tersier, jaringan pipa untuk peternakan, dan sistem irigasi tetes atau sprinkler untuk hortikultura.
 - b. Pengelolaan air dilakukan secara efisien dengan pendekatan hemat air dan teknologi pengairan modern.
- 3. Penyediaan Air Berkelanjutan untuk Multi-Sektor
 - a. Penyediaan air tidak hanya diarahkan untuk pertanian tanaman pangan, tetapi juga mencakup kebutuhan kawasan peternakan (minum ternak, sanitasi kandang) dan pengembangan hortikultura yang sensitif terhadap kekeringan.
 - b. Pemanfaatan air akan dikelola secara terpadu melalui sistem agroekologi berkelanjutan.
- 4. Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Air
 - a. Penguatan kelompok tani dan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan pemanfaatan tampungan air.
 - b. Pemerintah daerah juga akan mengembangkan sistem pengelolaan berbasis digital untuk memantau ketersediaan dan distribusi air secara real-time.
- 5. Mitigasi Risiko Kekeringan dan Perubahan Iklim
 - a. Pembangunan tampungan air menjadi bagian dari strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko gagal panen akibat kekeringan berkepanjangan.
 - b. Penambahan tutupan vegetasi dan konservasi daerah tangkapan air juga menjadi bagian dari pendekatan terpadu dalam menjaga ekosistem hulu.

Dengan tersedianya sistem tampungan dan pengelolaan air yang andal dan berkelanjutan, produktivitas sektor pangan di kawasan pesisir utara Aceh Besar diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini sekaligus memperkuat

ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan petani dan peternak, serta menjadikan kawasan ini sebagai model pengelolaan sumber daya air terintegrasi berbasis kawasan pangan.

B.7 Pengelolaan dan Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan jangka panjang dan menjamin keberlanjutan sumber daya pertanian, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian secara berkelanjutan sebagai salah satu prioritas dalam RPJMK 2025–2029, khususnya di Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh.

Lahan pertanian merupakan aset strategis yang harus dijaga kelestariannya di tengah tekanan konversi lahan, fragmentasi kepemilikan, dan penurunan kualitas tanah. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan lahan diarahkan tidak hanya untuk peningkatan produktivitas, tetapi juga untuk memastikan daya dukung ekologis dan sosial-ekonomi jangka panjang. Strategi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Lahan:

1. Kebijakan Tata Ruang untuk Perlindungan Lahan Pertanian
 - a. Pemerintah daerah akan memperkuat pengaturan tata ruang dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
 - b. Upaya perlindungan ini mencakup pengendalian alih fungsi lahan, zonasi pertanian tetap, dan penguatan regulasi yang melibatkan peran aktif masyarakat.
2. Reforma Agraria, Redistribusi, dan Konsolidasi Lahan
 - a. Pelaksanaan program reforma agraria dan redistribusi lahan dilakukan untuk memperbaiki struktur kepemilikan lahan dan memberikan kepastian hukum kepada petani.
 - b. Konsolidasi lahan pertanian didorong untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan, mendukung mekanisasi, serta memudahkan pengembangan infrastruktur pertanian.
3. Optimalisasi dan Revitalisasi Lahan Pertanian

- a. Lahan-lahan tidur, lahan marjinal, dan sawah tadah hujan akan diidentifikasi dan dioptimalkan melalui program revitalisasi lahan, termasuk peningkatan daya dukung air, kesuburan tanah, serta pengendalian degradasi lingkungan.
 - b. Peningkatan produktivitas dilakukan tanpa harus membuka lahan baru, guna menjaga keseimbangan ekologi.
4. Peningkatan Penggunaan Input Organik dan Ramah Lingkungan
- a. Pemerintah daerah akan mendorong penggunaan pupuk organik, pestisida hayati, dan pakan ternak alami untuk mengurangi ketergantungan pada input sintetis yang merusak lingkungan.
 - b. Dukungan diberikan dalam bentuk pelatihan, demplot teknologi pertanian ramah lingkungan, serta insentif bagi petani yang menerapkan pertanian organik atau semi-organik.
5. Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Petani
- a. Kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan koperasi akan diperkuat perannya dalam pengelolaan kolektif lahan, distribusi input produksi, serta advokasi perlindungan lahan.
 - b. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan petani menjadi dasar pendekatan pembangunan berbasis komunitas.

Dengan pendekatan pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam kebijakan tata ruang dan pemberdayaan petani, Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh diharapkan mampu menjadi contoh praktik pertanian berkelanjutan yang produktif, inklusif, dan resilien terhadap perubahan iklim. Kebijakan ini sekaligus memastikan bahwa generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap sumber pangan yang cukup, sehat, dan berkelanjutan

B.8 Pengembangan dan Penataan Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh (Kabupaten Aceh Besar)

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan pesisir utara Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk mengembangkan dan menata Kawasan Swasembada Pangan secara berkelanjutan pada periode 2025–2029. Strategi utama pembangunan kawasan ini difokuskan pada peningkatan

produktivitas melalui intensifikasi pertanian serta penguatan infrastruktur dan prasarana produksi.

Program ini dilaksanakan melalui berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Penyediaan dan Perluasan Akses terhadap Sarana Produksi Modern
Pemerintah akan memperluas akses petani terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, benih dan bibit unggul berkualitas, serta pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Dukungan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya operasional, dan menjamin hasil pertanian yang optimal.
2. Mitigasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Kesehatan Hewan
Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu melalui pendekatan bio-ekologis, teknologi ramah lingkungan, serta pelatihan petani dalam manajemen hama terpadu. Di sektor peternakan, fokus diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan hewan guna menjamin produktivitas dan keamanan pangan hewani.
3. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas dan Akses Digital bagi Petani
Pemerintah akan memperkuat infrastruktur konektivitas, terutama jalan tani dan akses transportasi dari lahan produksi ke pusat distribusi, serta memperluas akses digital melalui pelatihan petani dalam penggunaan aplikasi pertanian pintar, pemasaran digital, dan sistem informasi harga komoditas.
4. Peningkatan Kualitas Pascapanen melalui Penguatan Prasarana
Untuk mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah, akan dibangun serta ditingkatkan fasilitas pascapanen, seperti rumah pengering, gudang penyimpanan, cold storage, dan unit pengolahan hasil pertanian. Dukungan ini juga mencakup peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan dan pengolahan hasil pertanian.

Pengembangan kawasan ini akan dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Aceh, lembaga riset, perguruan tinggi, serta sektor swasta dan kelompok tani. Dengan pendekatan terintegrasi ini, kawasan pesisir utara Aceh diharapkan dapat menjadi sentra produksi pangan strategis yang mandiri, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

1. Pengembangan dan Penataan Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan *Pengembangan dan Penataan Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh* sebagai salah satu program prioritas dalam RPJMK Tahun 2025–2029. Kawasan ini akan menjadi model pengembangan kawasan pertanian terpadu yang berkelanjutan, berbasis kelembagaan tani yang kuat, akses pasar yang luas, serta sistem pembiayaan dan perlindungan usaha tani yang inklusif.

Program ini mencakup peningkatan manajemen usaha tani melalui penguatan kapasitas kelembagaan petani, seperti kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta peningkatan literasi keuangan petani untuk mendorong pengelolaan usaha tani yang lebih profesional dan mandiri. Langkah ini bertujuan agar petani mampu menyusun perencanaan usaha tani secara tepat, mencatat keuangan secara akuntabel, dan mengambil keputusan berbasis data.

Di samping itu, penguatan kelembagaan koperasi tani dan korporasi petani akan difokuskan untuk memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai komoditas pangan. Pemerintah Kabupaten akan mendorong pembentukan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani yang terintegrasi dari hulu ke hilir, guna meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi hasil panen.

Dalam hal pembiayaan, akan dikembangkan skema dana bergulir dan kredit lunak bagi petani, dengan melibatkan lembaga keuangan pemerintah maupun swasta. Akses pembiayaan ini akan dipermudah melalui penyederhanaan prosedur dan pendampingan intensif agar petani dapat mengakses modal kerja dan investasi alat produksi pertanian secara berkelanjutan.

Perluasan akses terhadap asuransi usaha tani juga akan diperkuat sebagai langkah mitigasi risiko terhadap perubahan iklim dan fluktuasi pasar. Pemerintah daerah akan bekerja sama dengan lembaga asuransi dan kementerian terkait untuk meningkatkan partisipasi petani dalam program asuransi pertanian, termasuk subsidi premi bagi petani kecil.

Untuk menjamin kepastian pasar dan mengurangi risiko fluktuasi harga saat panen raya, pemerintah akan melakukan peningkatan infrastruktur logistik dan memperluas akses layanan sistem resi gudang (SRG), yang memungkinkan petani menyimpan hasil panen dan menjualnya saat harga stabil. Di samping itu, pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

akan dilakukan melalui kemitraan dengan Bulog, BUMDes, koperasi, dan pelaku usaha lokal sebagai offtaker.

Dengan pendekatan ini, kawasan Pesisir Utara Aceh diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian yang modern, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Program ini sekaligus menjadi strategi jangka menengah untuk menekan angka kemiskinan perdesaan dan mewujudkan swasembada pangan daerah secara berkelanjutan.

B.9 Pengembangan dan Penataan Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh (Fokus: Pengembangan Pusat/Laboratorium Riset Pertanian Skala Lokal)

Sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Daerah menetapkan pengembangan pusat atau laboratorium riset pertanian skala lokal sebagai salah satu komponen utama dalam program *Pengembangan dan Penataan Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh*.

Pusat riset ini dirancang untuk menjadi wadah inovasi dan pengembangan teknologi pertanian berbasis lokal yang adaptif terhadap kondisi agroekosistem setempat. Fokus utama pengembangan laboratorium ini mencakup penelitian dan pengujian varietas unggul tanaman pangan lokal yang tahan terhadap perubahan iklim, memiliki produktivitas tinggi, serta sesuai dengan preferensi pasar dan karakteristik tanah di wilayah pesisir utara.

Selain itu, laboratorium ini juga akan mendukung budidaya lokal yang ramah lingkungan, efisien, dan berbasis kearifan lokal. Kegiatan riset akan diarahkan pada pemanfaatan teknologi pertanian presisi, pengembangan pupuk dan pestisida organik, serta sistem irigasi hemat air untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Pengembangan laboratorium riset ini juga diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan diseminasi hasil riset secara langsung kepada kelompok tani, koperasi, dan korporasi petani. Implementasi hasil riset di lapangan akan didorong melalui kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha, guna memastikan bahwa inovasi yang

dihasilkan benar-benar aplikatif dan bermanfaat bagi peningkatan produktivitas petani.

Penguatan ekosistem riset ini diharapkan mampu menciptakan siklus inovasi yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi produksi pertanian, serta mempercepat transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern yang berdaya saing tinggi. Keberadaan pusat riset ini juga menjadi landasan penting dalam pengembangan Aceh Besar sebagai lumbung pangan regional yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

B.10 Pengembangan dan Penataan Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh (Kabupaten Aceh Besar – Kecamatan Masjid Raya) RPJMK Aceh Besar 2025–2029

Pemenuhan Layanan Dasar di Kecamatan Perbatasan Prioritas Kecamatan Masjid Raya di Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kecamatan strategis yang terletak di wilayah pesisir utara Aceh, berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh. Kecamatan ini masuk dalam kategori wilayah perbatasan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Besar Tahun 2025–2029, khususnya dalam upaya pemenuhan layanan dasar dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal.

Sebagai wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, Kecamatan Masjid Raya diarahkan menjadi bagian dari Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh. Kawasan ini dirancang sebagai kawasan terpadu yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi lokal dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Tujuan Pengembangan

Pengembangan dan penataan kawasan ini bertujuan untuk:

- a) Memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat pesisir utara Aceh.
- b) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi) di wilayah perbatasan.
- c) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi pertanian, perikanan, dan kelautan secara berkelanjutan.

- d) Mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ruang Lingkup Strategi

1. Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik
 - a. Peningkatan infrastruktur jalan usaha tani dan akses antar-gampong.
 - b. Penyediaan layanan air bersih, sanitasi layak, dan listrik untuk rumah tangga rentan.
 - c. Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan fasilitas kesehatan (Puskesmas, Poskesdes, Posyandu).
2. Pengembangan Klaster Pangan Terpadu
 - a. Penataan lahan pertanian dan tambak rakyat sebagai pusat produksi pangan lokal.
 - b. Penerapan teknologi pertanian dan perikanan ramah lingkungan.
 - c. Pengembangan sentra produksi dan distribusi hasil pangan berbasis gampong.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal
 - a. Penguatan kelembagaan petani dan nelayan (kelompok tani, koperasi, BUMG).
 - b. Pelatihan dan penyuluhan peningkatan kapasitas produksi dan manajemen usaha.
 - c. Fasilitasi akses permodalan, pemasaran, dan kemitraan usaha lokal.
4. Integrasi dengan Program Provinsi dan Nasional
 - a. Sinkronisasi dengan program pengentasan kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan Provinsi Aceh.
 - b. Dukungan dari skema Dana Desa, DAK, dan APBN untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan.

Hasil yang Diharapkan

- a. Terwujudnya kawasan pesisir utara Aceh yang mandiri secara pangan dan berkelanjutan.
- b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Mesjid Raya melalui layanan dasar yang merata.

- c. Tumbuhnya ekonomi lokal yang inklusif dengan partisipasi aktif masyarakat.
- d. Penguatan posisi Kecamatan Mesjid Raya sebagai kawasan penyangga ekonomi dan sosial Kabupaten Aceh Besar.

Pengembangan dan penataan Kawasan Swasembada Pangan di Kecamatan Mesjid Raya merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan ketahanan pangan dan kesenjangan layanan dasar di wilayah perbatasan. Perencanaan ini sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Besar untuk menciptakan wilayah yang adil, mandiri, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arah pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

B.11 Pengembangan Hilirisasi Kepala

Komoditas kelapa kini telah ditetapkan sebagai salah satu sektor strategis nasional dengan masuknya program hilirisasi kelapa sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 menekankan pentingnya transformasi agribisnis kelapa dari hulu ke hilir untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan nilai tambah komoditas, dan membuka lapangan kerja di desa/daerah penghasil kelapa.

Potensi kelapa di kawasan pesisir Aceh Besar diperkuat oleh posisi geografis yang dekat dengan jalur perdagangan pesisir dan akses menuju pusat pertumbuhan ekonomi Banda Aceh. Kondisi ini membuka peluang besar bagi peningkatan rantai nilai, mulai dari budidaya, pengolahan pascapanen, hingga pemasaran produk turunan seperti minyak kelapa, VCO, arang tempurung, cocopeat, gula semut kelapa, dan produk kerajinan. Keunggulan geografis serta potensi pengembangan hilirisasi menjadikan kelapa sebagai komoditas yang selaras dengan orientasi pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam kerangka RPJMK 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menempatkan pengembangan komoditi kelapa sebagai salah satu fokus kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi pesisir, mendorong kemandirian pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ini diarahkan tidak hanya pada peningkatan produktivitas di tingkat hulu, tetapi juga pada penguatan industri pengolahan dan perluasan akses pasar, sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari sektor primer ke sektor bernilai tambah tinggi.

Kebijakan ini secara langsung terhubung dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029, terutama:

1. Prioritas Penguatan Ketahanan Pangan dan Sistem Pertanian Berkelanjutan, melalui peningkatan produktivitas komoditas perkebunan rakyat dan modernisasi pascapanen.
2. Prioritas Pengembangan Ekonomi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menekankan pemberdayaan masyarakat pesisir serta penguatan komoditas unggulan lokal.
3. Prioritas Penguatan UMKM dan Hilirisasi Produk Pertanian, yang mendorong pengembangan industri kecil berbasis kelapa untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.
4. Program Adaptasi Perubahan Iklim, yang relevan dengan pengelolaan kawasan pesisir Lhoknga dan Pulau Aceh yang rentan terhadap abrasi dan salinitas.

Selaras dengan prioritas nasional tersebut, pengembangan komoditi kelapa juga mendukung implementasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Aceh, antara lain:

1. Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah, termasuk perkebunan kelapa sebagai salah satu sektor andalan Aceh.
2. Program Ekonomi Pesisir yang Berdaya Saing, yang mendorong penguatan kelembagaan, pembiayaan, serta pemasaran produk kelautan dan perkebunan.
3. Program Aceh Mandiri Pangan, yang menekankan pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber pangan alternatif dan sumber ekonomi masyarakat.
4. Penguatan Infrastruktur Produktif, termasuk peningkatan konektivitas Pulau Aceh dan akses jalan produksi di wilayah pesisir Aceh Besar.

Integrasi antara kebijakan daerah, prioritas nasional, dan prioritas provinsi ini menjadi landasan kuat bagi pembangunan kawasan sentra kelapa yang lebih terarah dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang holistic-meliputi aspek hulu, hilir, kelembagaan, teknologi, pemasaran, serta lingkungan-pengembangan komoditi kelapa diharapkan mampu menciptakan transformasi ekonomi di desa-desa pesisir. Selain meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, kebijakan ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai

ekspor komoditas Aceh, serta memperkuat struktur ekonomi lokal yang tahan terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar global.

Dengan demikian, dalam periode RPJMK 2025 - 2029, pengembangan komoditi kelapa tidak hanya menjadi program teknis semata, tetapi menjadi strategi pembangunan daerah yang berperan memperkuat daya saing Aceh Besar, menghidupkan kembali sektor pesisir, dan membangun fondasi ekonomi lokal yang inklusif, berdaya, dan berkelanjutan.

1. Arah Kebijakan Pengembangan Komoditi Kelapa di Kabupaten Aceh Besar
 1. Peningkatan produktivitas dan kualitas kelapa melalui penyediaan benih unggul, revitalisasi tanaman tua, dan penerapan teknologi budidaya modern.
 2. Pengembangan hilirisasi dan industri rumah tangga/pengolahan seperti minyak kelapa, VCO, gula semut kelapa, sabut, arang tempurung, dan kerajinan berbasis kelapa.
 3. Penguatan kelembagaan petani dan tata kelola rantai pasok melalui BUMG, koperasi, dan kemitraan dengan pelaku usaha.
 4. Pengembangan kawasan sentra kelapa terpadu di Mesjid Raya, Pulau Aceh, dan Lhoknga sebagai basis pengembangan ekonomi pesisir.
 5. Penguatan akses permodalan, penguasaan teknologi, dan digitalisasi pemasaran produk kelapa.
 6. Adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan untuk melindungi lahan kelapa dari abrasi, salinitas, dan gagal panen.
2. Arah Kebijakan Berdasarkan Wilayah
 - a. Kecamatan Mesjid Raya
 - Penguatan kawasan sebagai sentra pembibitan dan budidaya kelapa unggul untuk kebutuhan Aceh Besar.
 - Peningkatan kapasitas petani melalui sekolah lapang dan demonstrasi teknologi budidaya.
 - Pengembangan usaha rumah tangga berbasis kelapa seperti VCO, minyak goreng tradisional, dan kerajinan tempurung.
 - Perbaikan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, irigasi tanah kering, serta akses pasar pesisir.
 - b. Pulau Aceh

- Penetapan Pulau Nasi dan Pulau Breuh sebagai kawasan kelapa berbasis ekonomi pesisir terpadu, mengingat kelapa merupakan komoditas utama masyarakat setempat.
- Penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pascapanen seperti mesin parut kelapa, pengering, dan alat produksi minyak kelapa.
- Penguatan logistik dan transportasi hasil produksi menuju daratan (Banda Aceh/Aceh Besar).
- Pengembangan diversifikasi produk seperti arang tempurung, cocopeat, dan sabut kelapa untuk pasar ekspor.

c. Kecamatan Lhoknga

- Revitalisasi kebun kelapa yang terdampak tsunami dan abrasi pantai melalui penanaman kembali kelapa varietas toleran salinitas.
- Penguatan integrasi komoditas kelapa dengan sektor pariwisata pantai di Lhoknga (branding produk lokal, UMKM kuliner berbasis kelapa).
- Pengembangan klaster industri kecil kelapa (minyak kelapa, nata de coco, briket tempurung).
- Pengembangan kemitraan usaha antara petani, BUMG, dan industri pengolahan.

3. Rumusan Arah Kebijakan 2025–2029

1. Mewujudkan sentra kelapa produktif di Mesjid Raya, Pulau Aceh, dan Lhoknga sebagai penggerak ekonomi wilayah pesisir.
2. Meningkatkan kualitas SDM petani kelapa melalui pelatihan, penyuluhan, dan penyediaan teknologi budidaya.
3. Mengembangkan hilirisasi dan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.
4. Meningkatkan akses pasar dan penguatan rantai pasok melalui digitalisasi dan kerja sama kemitraan.
5. Memperkuat resilensi iklim dan perlindungan kawasan pesisir agar produktivitas kelapa tetap terjaga.
6. Mengintegrasikan pengembangan kelapa dengan program nasional dan provinsi agar memperoleh dukungan pendanaan dan teknologi.

3.6. Prioritas Aceh Besar

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar ditentukan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati Terpilih.

Program program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aceh Besar Bersyariat

Aceh Besar Bersyariat adalah kondisi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Aceh Besar yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diterapkan secara adil, humanis, dan berkeadaban, guna mewujudkan ketertiban sosial, akhlak mulia, keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak seluruh warga masyarakat.

2. Merdeka Petani dan Nelayan

Merdeka Petani dan Nelayan adalah kondisi petani dan nelayan di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki kedaulatan dalam mengelola usaha tani dan perikanannya, akses yang adil terhadap sumber daya, sarana produksi, pembiayaan, teknologi, dan pasar, serta perlindungan dari risiko usaha dan praktik yang merugikan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan

3. Merdeka Kawasan Pesisir, Terisolir dan Tertinggal

Merdeka Kawasan Pesisir, Terisolir, dan Tertinggal adalah kondisi terwujudnya wilayah pesisir, kawasan terisolir, dan wilayah tertinggal di Kabupaten Aceh Besar yang bebas dari keterbatasan akses dasar, terhubung secara fisik, ekonomi, dan digital, memiliki pelayanan publik yang layak, serta mampu mengembangkan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga masyarakatnya memperoleh kesempatan dan kualitas hidup yang setara dengan wilayah lainnya.

4. Merdeka Pendidikan

Merdeka Pendidikan adalah kondisi terwujudnya sistem pendidikan di Kabupaten Aceh Besar yang menjamin akses pendidikan yang adil, bermutu, dan inklusif bagi seluruh warga, membebaskan peserta didik dari hambatan ekonomi, geografis, dan sosial, serta mengembangkan potensi, karakter, dan kecakapan hidup secara utuh, selaras dengan nilai budaya Aceh dan Syariat Islam, guna menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

5. Merdeka Lingkungan Hidup

Merdeka Lingkungan Hidup adalah kondisi terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Besar yang bebas dari praktik perusakan dan pencemaran, menjamin kelestarian sumber daya alam, meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menguatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, guna mendukung kehidupan yang aman, sehat, dan berkeadilan antar generasi.

6. Merdeka Ekonomi

Merdeka Ekonomi adalah kondisi terwujudnya perekonomian Kabupaten Aceh Besar yang berdaulat, inklusif, dan berkeadilan, ditopang oleh kemandirian pelaku ekonomi lokal, pemanfaatan potensi unggulan daerah, akses yang adil terhadap modal, pasar, dan teknologi, serta tata kelola ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

7. Merdeka Layanan Publik

Merdeka Layanan Publik adalah kondisi terwujudnya pelayanan publik di Kabupaten Aceh Besar yang mudah diakses, cepat, transparan, dan berkeadilan,

bebas dari praktik berbelit, diskriminatif, dan koruptif, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis digital, guna meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas hidup masyarakat.

8. Merdeka Infrastruktur

Merdeka Infrastruktur adalah kondisi terwujudnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Kabupaten Aceh Besar yang merata, andal, dan berkelanjutan, bebas dari ketimpangan akses antarwilayah, serta mendukung konektivitas, pelayanan dasar, dan aktivitas ekonomi masyarakat, melalui perencanaan terpadu, pembangunan tepat sasaran, dan pemeliharaan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup, daya saing wilayah, dan ketahanan daerah.

9. Merdeka Birokrasi

Merdeka Birokrasi adalah kondisi terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang profesional, lincah, dan berintegritas, bebas dari budaya kerja yang kaku, berbelit, dan tidak produktif, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan publik, melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur, penyederhanaan proses kerja, dan pemanfaatan teknologi informasi, guna mendukung pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

10. Aceh Besar Damai

Aceh Besar Damai adalah kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang aman, tenteram, dan harmonis, ditandai dengan terpeliharanya stabilitas sosial, ketertiban umum, serta hubungan yang saling menghormati antarwarga, bebas dari konflik dan kekerasan, serta ditopang oleh penegakan hukum yang adil, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan Bersama.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Rencana Program Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029 didukung dengan rencana program Perangkat Daerah yang merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Selanjutnya, perlu penegasan secara eksplisit bahwa pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini, harus buat rumusan rencana program tahun 2030 yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan 3 (satu) unsur kekhususan Aceh.

TABEL 4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					793,279,611,692		790,177,027,004		792,073,824,494		793,762,745,765		794,675,858,200		795,644,513,743	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					389,110,421,886		387,562,342,973		388,534,455,430		389,363,776,093		389,623,830,127		390,074,026,380	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	94.48	95	1,064,870,379	96	1,058,468,184	97	1,062,276,477	98	1,065,816,721	99	1,068,506,326	100	1,070,641,588	MPD
1.01.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase Komite Sekolah yang Disupervisi dan Difasilitasi (%)	%	19.14	19.72	599,690,520	19.84	599,690,520	20.14	599,690,520	20.14	599,690,520	20.16	599,690,520	20.16	599,690,520	MPD
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	98.09	95	2,925,662,554	95	3,329,976,844	95	3,337,114,870	95	3,366,905,808	95	3,405,422,013	95	3,418,652,450	DAYAH
1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1. Persentase Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	%	16	19	5,439,337,552	17	5,002,850,000	16	5,014,849,975	16	5,002,850,000	15	4,977,850,000	14	4,975,350,000	DAYAH
	2. Persentase bantuan Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	%	17	23		24		24		23		23		23		DAYAH

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	85.00	90.00	295,281,368,432	92.70	295,922,356,432	95.48	296,001,573,588	97.39	296,088,501,908	99.34	296,232,350,132	100.00	296,458,327,649	DISDIKBUD
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Skor Kemampuan literasi SD	Nilai	54.94	57.44	78,117,506,949	59.94	81,379,000,993	62.44	82,228,950,000	64.94	82,950,011,136	67.44	82,950,011,136	69.94	83,161,364,173	DISDIKBUD
	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	65.25	66.35		67.45		68.55		69.65		70.75		71.85		DISDIKBUD
	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	50.12	53.02		55.92		58.82		61.72		64.62		67.52		DISDIKBUD
	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	58.47	59.97		61.47		62.97		64.47		65.97		67.47		DISDIKBUD
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	78.40	78.81		79.22		79.63		80.04		80.46		80.87		DISDIKBUD
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	69.73	76.74		77.24		77.74		78.24		78.74		79.24		DISDIKBUD
	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	59.96	62.46		64.96		67.46		69.96		72.46		74.96		DISDIKBUD
	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	57.27	59.67		62.07		64.47		66.87		69.27		71.67		DISDIKBUD
	Iklim Keamanan SD	Nilai	77.43	78.33		79.23		80.13		81.03		81.93		82.83		DISDIKBUD
	Iklim Keamanan SMP	Nilai	71.13	72.63		74.13		75.63		77.13		78.63		80.13		DISDIKBUD

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	72.10	73.10		74.10		75.10		76.10		77.10		78.10		DISDIKBUD
	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	70.58	71.58		72.58		73.58		74.58		75.58		76.58		DISDIKBUD
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangk an Kurikulum Muatan Lokal	%	68.00	73.00	0	79.00	120,000,000	86.00	140,000,000	93.00	140,000,000	97.00	240,000,000	100.0 0	240,000,000	DISDIKBUD
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Indeks Distribusi Guru	%	0.35	0.56	5,681,985,500	1.01	150,000,000	1.81	150,000,000	3.27	150,000,000	5.88	150,000,000	10.58	150,000,000	DISDIKBUD
	2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	57.35	89.00		89.00		90.67		90.67		92.67		92.67		DISDIKBUD
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					294,739,157,493		293,605,538,846		294,279,862,60 7		294,906,723,745		295,382,964,607		295,761,049,473	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	100	100	136,110,502,738	100	153,857,322,677	100	153,857,322,67 7	100	153,857,322,677	100	153,857,322,677	100	153,857,322,677	DINKES
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.Angka Kematian Ibu (AKI)((per 100.000 kelahiran hidup))	orang	5	3	90,482,438,380	3	68,594,607,605	3	69,116,624,257	3	69,601,898,500	3	69,970,572,533	3	70,263,260,716	DINKES
	2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	%	32.3	31.24		30.32		29.41		28.50		27.58		26.67		DINKES

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	70	75	846,990,780	80	2,591,990,780	85	2,591,990,780	90	2,591,990,780	95	2,591,990,780	100	2,591,990,780	DINKES
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	100	100	461,886,000	100	793,074,600	100	793,074,600	100	793,074,600	100	793,074,600	100	793,074,600	DINKES
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	70	75	265,654,750	80	1,452,904,750	85	1,452,904,750	90	1,452,904,750	95	1,452,904,750	100	1,452,904,750	DINKES
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	80	80	17,353,349,012	85	44,428,444,807	87	42,186,456,000	87	43,331,056,000	90	47,965,456,000	90	45,587,456,000	RSUD
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Angka Presentase Kepuasan pasien	%	83	84	49,218,335,833	84.50	21,887,193,627	84.70	24,281,489,543	85	23,278,476,438	85.30	18,751,643,267	85.70	21,215,039,950	RSUD
	2. Ratio Bed Occupation Rate	%	30.5	60		60.3		60.5		60.7		60.9		61.3		RSUD
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					68,134,588,008		71,852,992,397		72,334,499,481		72,212,675,860		72,243,995,407		72,241,080,716	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	100	100	18,019,387,127	100	18,738,978,097	100	20,372,169,687	100	20,495,210,436	100	20,130,555,260	100	19,279,434,566	PUPR

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kot a yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Rasio	3.24	0.97	1,759,360,776	2.66	6,240,000,000	2.95	8,615,000,000	3.15	8,601,500,000	3.29	8,489,900,000	3.39	7,782,878,938	PUPR
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak (%)	%	92.96	93.02	15,084,805,000	93.27	10,115,000,000	93.55	10,165,000,000	93.84	10,665,000,000	94.12	10,865,000,000	94.40	10,765,000,000	PUPR
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	-	-	0	68.74	650,000,000	69.77	650,000,000	70.81	650,000,000	71.88	650,000,000	72.95	650,000,000	PUPR
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	87.07	87.09	4,616,911,000	87.10	8,070,000,000	87.27	3,570,000,000	87.44	3,420,000,000	87.60	4,120,000,000	87.77	4,120,000,000	PUPR
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	61.6	61.72	655,562,000	63.08	1,210,000,000	63.82	750,000,000	64.56	750,000,000	65.3	1,010,000,000	66.04	1,010,000,000	PUPR
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	%	38.23	40.25	9,523,748,000	41.5	1,360,000,000	42.15	1,350,000,000	43.85	1,485,000,000	44.1	1,633,500,000	45.5	1,633,500,000	PUPR

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan	%	34.78	0	0	38.47	40,000,000	40.82	40,000,000	42.17	40,000,000	43.52	60,000,000	45.86	60,000,000	PUPR
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	%	19.53	19.79	17,941,411,955	20.09	24,120,000,000	20.40	25,524,801,494	20.71	24,960,985,294	21.02	24,055,539,004	21.33	25,733,792,905	PUPR
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	%	0	6.67	53,430,000	17.78	132,450,000	31.11	121,110,000	47.78	189,770,000	71.11	204,770,000	100.0 0	274,770,000	PUPR
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang	%	21.05	47.37	479,972,150	52.63	1,176,564,300	57.89	1,176,418,300	68.42	955,210,130	73.68	1,024,731,143	78.94	931,704,307	PUPR
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					7,412,637,422		3,403,665,142		3,095,000,000		3,377,500,000		3,468,250,000		3,568,075,000	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	225,689,000	100	600,000,000	100	975,000,000	100	1,057,500,000	100	1,148,250,000	100	1,248,075,000	PUPR
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani	%	0	0	0	13.5	690,000,000	20.3	320,000,000	27.1	320,000,000	33.9	320,000,000	40.7	320,000,000	PUPR
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persentase)	%	0	71.02	2,822,249,000	72.04	1,200,000,000	73.06	1,200,000,000	74.08	1,200,000,000	75.1	1,200,000,000	76.12	1,200,000,000	PUPR
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	60	61	4,364,699,422	62	913,665,142	62	600,000,000	64	800,000,000	65	800,000,000	66	800,000,000	PUPR

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					23,589,022,730		23,498,295,198		23,552,263,727		23,602,433,652		23,640,548,901		23,670,808,378	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	77.45	80	7,037,702,596	85	9,548,592,063	90	9,474,016,102	92	9,427,678,102	94	9,612,627,012	96	9,691,788,826	SATPOL PP
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban serta penegakan syariat islam (%)	%	92.97	93.45	8,445,737,000	93.49	5,875,295,500	94.03	5,985,295,500	94.57	6,064,564,199	95.11	5,904,633,500	95.65	5,845,333,500	SATPOL PP
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	77.16	82	7,173,161,904	85	6,458,910,018	87	7,164,741,227	89	7,176,234,049	91	7,184,965,409	93	7,191,897,184	BPBD
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	85.93	87		89		91		92		93		95		BPBD
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	70	70	456,731,940	75	1,193,272,271	80	453,223,330	85	458,012,000	90	461,650,065	95	464,538,305	BPBD
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	75	80		80		80		85		90		95		BPBD

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	75	80	475,689,290	80	422,225,346	85	474,987,568	85	475,945,302	85	476,672,915	90	477,250,563	BPBD
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					10,293,784,153		10,254,192,448		10,277,743,249		10,299,636,415		10,316,269,158		10,329,473,796	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	80	80	4,871,651,853	85	5,418,900,700	85	5,516,847,501	90	5,478,390,667	90	5,397,693,700	90	5,495,003,700	DINSOS
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	21.3	4.9	189,649,500	8.97	882,253,000	14.8	598,303,000	19.73	638,303,000	24.66	648,303,000	29.6	669,877,348	DINSOS
	2. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	13.45	8.52		14.8		21.08		27.35		33.63		39.91		DINSOS

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	4.48	4.48		8.97		13.45		17.94		22.43		26.91		DINSOS
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	4.82	5.31	2,246,797,000	5.64	2,284,688,748	5.97	2,484,592,748	6.3	2,514,592,748	6.62	2,455,272,458	6.95	2,344,592,748	DINSOS
	2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	8.51	11.65		13.65		14.79		16.36		17.93		19.5		DINSOS
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	19.86	23.63		27.55		31.48		35.4		35.4		42.46		DINSOS
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	1.92	2.65	2,287,591,000	3.11	793,350,000	3.46	723,000,000	3.8	793,350,000	4.15	770,000,000	4.5	845,000,000	DINSOS
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	698,094,800	100	875,000,000	100	955,000,000	100	875,000,000	100	1,045,000,000	100	975,000,000	DINSOS
2. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN					111,473,213,008		111,453,190,836		111,245,915,336		112,019,637,731		112,562,640,621		112,751,692,235	

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5,199,731,931		5,179,483,030		5,191,527,923		5,202,725,029		5,211,231,729		5,211,231,931	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	90	100	3,072,986,931	100	3,052,738,030	100	3,064,782,923	100	3,072,986,931	100	3,072,986,931	100	3,072,986,931	NAKERTRANS
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasny a	%	28	30	2,000,000,000	33	2,000,000,000	42	2,000,000,000	48	2,000,000,000	50	2,000,000,000	55	2,000,000,000	NAKERTRANS
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	0	0	0		0		0	5	2,993,098	10	11,499,798	8	11,500,000	NAKERTRANS
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	7	9	126,745,000	10	126,745,000	12	126,745,000	14	126,745,000	16	126,745,000	18	126,745,000	NAKERTRANS
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5,463,546,669		5,532,346,669		5,512,906,073		5,553,876,669		5,653,876,669		5,593,876,669	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	80	85	5,120,442,824	85	5,139,242,824	85	5,099,802,228	85	5,190,772,824	90	5,250,772,824	90	5,190,772,824	DPPKBPPPA

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	50	50	46,400,000	60	56,400,000	60	76,400,000	70	66,400,000	80	66,400,000	80	66,400,000	DPPKBPPPA
	2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	51.59	54.62		54.95		55.28		55.61		55.94		56.27		DPPKBPPPA
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0	0	0		0		0	60	30,000,000	60	30,000,000	60	30,000,000	DPPKBPPPA
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	%	50	50	89,258,845	60	89,258,845	60	89,258,845	70	59,258,845	70	89,258,845	70	89,258,845	DPPKBPPPA
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	33	50	64,595,000	60	54,595,000	60	54,595,000	60	14,595,000	70	54,595,000	70	54,595,000	DPPKBPPPA
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	88	80	142,850,000	80	142,850,000	80	142,850,000	80	142,850,000	80	142,850,000	80	142,850,000	DPPKBPPPA
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1 . Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	80	82	0	84	50,000,000	85	50,000,000	87.3	50,000,000	88	20,000,000	90	20,000,000	DPPKBPPPA

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	72	73		75		76		76.50		76		78		DPPKBPPPA
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					5,195,671,729		5,175,688,261		5,187,575,263		5,198,625,592		5,207,020,782		5,213,685,675	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	70	75	3,127,325,784	80	3,675,688,261	85	3,687,575,263	90	3,506,677,826	95	3,707,020,782	100	3,511,941,388	PANGAN
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/KAP/TH)	kg/kapita / tahun	219.57	220.0 7	5,000,000	220.57	175,000,000	221.07	5,000,000	221.57	100,000,000	222.0 7	6,000,000	222.5 7	7,000,000	PANGAN
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pola Pangan Harapan Konsumsi (Skor)	Skor	81.41	81.61	896,110,800	81.81	809,000,000	82.01	979,000,000	82.21	1,003,947,766	82.41	978,000,000	82.61	1,037,000,000	PANGAN
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	17.05	16.72	136,188,000	16.39	309,000,000	16.06	309,000,000	15.73	361,000,000	15.40	309,000,000	15.23	420,744,287	PANGAN
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	95	95.5	1,031,047,145	95.8	207,000,000	96.3	207,000,000	96.5	227,000,000	96.7	207,000,000	97.0	237,000,000	PANGAN
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2,378,552,579		2,369,404,247		2,374,846,057		2,379,904,842		2,383,748,118		2,386,799,273	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	100	85	2,353,681,579	85	2,311,286,911	85	2,327,846,057	85	2,333,049,809	85	2,339,953,655	85	2,315,799,273	PERTANAHAN

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	%	0			1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	PERTANAHAN
2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	%	60	0	0	0	0	85	20,000,000	50	6,855,033	65	5,000,000	65	20,000,000	PERTANAHAN
2.10.12 PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	85	85	0	85	0	85,30	10,000,000	85,30	10,000,000	85,32	5,000,000	85,34	10,000,000	PERTANAHAN
2.10.14 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	78	79	24,871,000	79	30,000,000	0	0	79	10,000,000	79	20,000,000	79	24,000,000	PERTANAHAN
2.10.17 PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	%	84.97	85.56	0	85.57	18,117,336	85.58	7,000,000	85.59	10,000,000	86	8,794,463	86	12,000,000	PERTANAHAN
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					14,377,023,125		14,321,726,565		14,354,619,270		14,385,196,806		14,408,427,265		14,426,869,792	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	94.31	95	3,910,633,479	95	6,597,173,603	95	6,619,316,308	96	6,765,067,272	98	6,786,525,949	98	6,824,046,099	DLH

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	0	0	0	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	9,000,000	DLH
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	%	0	0	51,765,130	45	131,528,130	50	122,028,130	55	122,578,130	60	118,183,130	65	116,528,130	DLH
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	%	0.64	0.64	149,999,603	0.64	290,000,000	0.80	300,000,000	0.88	300,250,000	0.96	302,455,000	0.98	290,000,000	DLH
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	51	56	26,950,570	62	20,000,000	67	20,250,000	69	10,512,500	73	10,788,125	78	11,077,532	DLH
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	%	20	25	12,795,000	30	12,795,000	40	12,795,000	47	12,795,000	55	12,795,000	60	12,795,000	DLH

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	0	0	0	1.6	0	2.3	10,000,000	2.3	10,000,000	2.6	10,000,000	2.9	10,000,000	DLH
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	10	20	20,721,000	35	5,000,000	21	5,000,000	24	5,000,000	25	5,000,000	25	5,000,000	DLH
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	1.20	1.50	39,684,000	1.77	39,684,000	1.89	39,684,000	2.03	39,684,000	2.17	39,684,000	2.32	39,684,000	DLH
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100	11,095,832	100	11,095,832	100	11,095,832	100	11,095,832	100	11,095,832	100	11,095,832	DLH
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	46.8	48	10,153,378,511	50	7,199,450,000	52	7,199,450,000	54	7,093,214,072	56	7,096,900,229	58	7,097,643,199	DLH
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7,152,976,574		7,125,464,967		7,141,830,021		7,157,043,212		7,168,601,023		7,177,776,703	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	84	85	5,466,978,574	88	5,748,513,135	89	5,886,743,755	90	6,011,673,212	91	5,999,103,755	92	5,948,396,703	DUKCAPIL

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	99,21	99,21	1,596,882,000	99.99	1,222,991,832	99.99	971,410,000	99.99	971,410,000	99.99	971,410,000	99.99	986,380,000	DUKCAPIL
	2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 30% dari Perekaman KTP EL	%	7.60	7.60		20		30		40		50		50		DUKCAPIL
	3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	51.22	51.22		65		70		75		80		80		DUKCAPIL
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	31,145,000	100	43,960,000	100	53,960,000	100	53,960,000	100	78,087,268	100	105,000,000	DUKCAPIL
	2. Persentase Akta Kelahiran untuk usia 0 - 18 Tahun	%	98.36	98.36		98.73		98.83		98.93		99.03		99.13		DUKCAPIL
	3. Persentase Akta Kelahiran untuk usia 0- 4 Tahun	%	98.85	98.85		99.10		99.20		99.20		99.30		99.40		DUKCAPIL
	4. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	%	100	100		100		100		100		100		100		DUKCAPIL
	5. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	%	100	100		100		100		100		100		100		DUKCAPIL

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	9	100	42,176,000	100	45,000,000	100	164,716,266	100	55,000,000	100	55,000,000	100	73,000,000	DUKCAPIL
	2. PKS (Perjanjian Kerja Sama)	OPD	9	9		10		12		13		15		15		DUKCAPIL
	3. Akses Data	OPD	1	1		1		2		3		3		3		DUKCAPIL
	4. Penyediaan Jaringan VPN	OPD	1	1		1		2		3		3		3		DUKCAPIL
	5. Pemanfaatan Buku Profil	OPD	30	30		30		30		30		30		30		DUKCAPIL
	6. Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan	OPD	30	30		30		30		30		30		30		DUKCAPIL
	7. Media Penyampaian Informasi	Media	4	4		4		4		4		4		4		DUKCAPIL
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Buku Profil Kependudukan	%	100	100	15,795,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	DUKCAPIL
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7,578,761,979		7,549,612,727		7,566,951,920		7,583,070,686		7,595,316,484		7,605,038,352	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	90	90	4,474,489,298	90	4,474,488,893	90	4,474,489,298	90	4,474,489,298	90	4,474,489,298	90	4,477,498,604	DPMG
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	0	0	0	90	20,000,000	90	20,000,000	90	20,000,000	90	20,000,000	90	20,000,000	DPMG
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	72	75	1,418,889,721	85	1,398,889,721	85	1,409,889,721	90	1,423,198,428	93	1,427,499,933	90	1,436,847,041	DPMG

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	70	78		80		80		93		95		95		DPMG
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	85	1,685,382,960	87	1,656,234,113	90	1,662,572,901	90	1,665,382,960	95	1,673,327,253	90	1,670,692,707	DPMG
	2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	90		90		93		93		98		100		DPMG
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					11,739,996,000		11,605,028,148		11,663,828,148		11,659,446,625		11,587,244,186		11,669,312,510	
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) (%)	%	0	5.65	0	4.62	50,506,000	3.92	50,506,000	3.45	15,506,000	3.14	25,506,000	2.92	25,506,000	DPPKBPPPA
	2. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita	%	2.19	2.18		2.16		2.14		2.13		2.12		2.11		DPPKBPPPA
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	89	69	11,739,996,000	74	11,394,522,148	75	11,453,322,148	76	11,553,940,625	78	11,521,738,186	85	11,603,806,510	DPPKBPPPA

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	89	73.69		77.05		78.46		79.71		80.83		81.83		DPPKBPPPA
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	0	0	0	80	160,000,000	85	160,000,000	86	90,000,000	90	40,000,000	95	40,000,000	DPPKBPPPA
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					9,182,241,353		9,146,924,837		9,167,932,577		9,187,461,676		9,202,298,383		9,214,077,159	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	84	85	5,234,210,843	87	5,684,579,776	88	5,699,587,516	89	5,713,236,676	90	5,728,073,383	92	5,702,852,159	DISHUB
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Konektivitas Darat	%	9.6	9.7	3,948,030,510	10.3	3,462,345,061	10.5	3,448,345,061	10.8	3,454,225,000	11.3	3,454,225,000	11.5	3,491,225,000	DISHUB
	2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	91	92		93		94		95		97		98		DISHUB
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut (Unit)	Unit	0	0	0	1	0.00	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	DISHUB
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					10,142,899,151		10,078,727,429		10,102,081,942		10,123,792,636		10,140,286,751		10,153,381,334	

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	99	99	3,549,113,151	99	4,148,127,429	99	4,171,481,942	99	4,193,192,636	99	4,209,686,751	99	4,222,781,334	DISKOMINFO
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	85	85	5,955,414,000	86	5,311,600,000	86	5,311,600,000	86	5,311,600,000	86	5,311,600,000	86	5,311,600,000	DISKOMINFO
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik (Indeks)	indeks	2.39	2.81	638,372,000	3.00	619,000,000	3.01	619,000,000	3.02	619,000,000	3.03	619,000,000	3.04	619,000,000	DISKOMINFO
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7,006,137,184		7,321,660,851		7,344,143,024		7,354,634,499		7,358,003,621		7,369,137,184	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	90	100	6,451,137,184	100	6,561,660,851	100	6,584,143,024	100	6,589,634,499	100	6,583,003,621	100	6,584,137,184	KOP-UKM DAG
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	0	50	555,000,000	56	660,000,000	65	660,000,000	70	665,000,000	75	675,000,000	80	685,000,000	KOP-UKM DAG
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	%	0	0	0	59	100,000,000	65	100,000,000	68	100,000,000	74	100,000,000	79	100,000,000	KOP-UKM DAG

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					8,936,669,167		8,902,297,165		8,922,743,068		8,941,749,876		8,956,189,787		8,967,653,548	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	84	85	5,235,545,533	90	6,322,822,687	90	6,650,753,532	95	6,904,760,340	95	7,023,727,287	95	7,254,691,048	DPMPPTSP
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	55.32	75	411,705,437	80	470,000,000	84	330,000,000	87	240,000,000	91	215,000,000	94	80,000,000	DPMPPTSP
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	5	10	326,197,000	10	150,000,000	12	220,000,000	12	163,000,000	15	135,000,000	15	65,000,000	DPMPPTSP
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	90	90.75	2,730,922,301	91.25	1,575,462,500	92	1,446,989,536	92.50	1,443,989,536	92.55	1,410,462,500	92.75	1,400,462,500	DPMPPTSP
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	92	92.50	46,428,000	93	130,000,000	94	125,000,000	95	90,000,000	96.50	72,000,000	98	65,000,000	DPMPPTSP
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	95	95	185,870,896	95.20	254,011,978	95.40	150,000,000	95.60	100,000,000	95.80	100,000,000	96	102,500,000	DPMPPTSP
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					9,572,770,346		9,550,962,739		9,185,830,857		9,748,846,791		9,766,372,619		9,780,286,272	

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	89.32	95.00	3,373,337,046	95.00	4,365,329,439	95.00	4,652,143,381	95.00	4,563,213,491	95.00	4,580,739,319	95.00	4,594,652,972	PARPORA
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirusaha Pemuda	%	0	2.90	94,400,000	3.00	250,000,000	3.10	250,000,000	3.20	250,000,000	3.30	250,000,000	3.40	250,000,000	PARPORA
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga	%	46.60	47.60	5,605,033,300	48.60	4,685,633,300	49.60	4,033,687,476	50.60	4,685,633,300	51.60	4,685,633,300	52.60	4,685,633,300	PARPORA
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	3.35	3.35	500,000,000	3.45	250,000,000	3.55	250,000,000	3.65	250,000,000	3.75	250,000,000	3.85	250,000,000	PARPORA
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					60,090,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000	
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.80	2.80	60,090,000	2.80	70,000,000	2.82	70,000,000	2.83	70,000,000	2.84	70,000,000	2.85	70,000,000	DISKOMINFO
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					5,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	65	65	5,000,000	66	20,000,000	67	20,000,000	68	20,000,000	68	20,000,000	68	20,000,000	DISKOMINFO
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2,512,831,506		2,554,658,495		2,478,527,650		2,482,124,472		2,854,857,061		2,907,026,447	
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	7	7	644,835,000	7	410,000,000	7	410,000,000	7	410,000,000	7	530,000,000	7	530,000,000	DISDIKBUD
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	82.73	85.49	76,833,500	88.58	210,000,000	91.05	130,000,000	92.59	130,000,000	93.21	330,000,000	95.37	380,000,000	DISDIKBUD

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	82.73	85.49		88.58		91.05		92.59		93.21		95.37		DISDIKBUD
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	0.38	2.75	100,000,000	55.64	250,000,000	61.76	250,000,000	67.87	250,000,000	70.93	300,000,000	78.27	300,000,000	DISDIKBUD
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	90	91.38	975,663,006	91.8	975,663,006	92.5	979,532,161	93	983,128,983	93.5	985,861,572	94	987,852,804	MAA
2.22.07 PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase Lembaga Adat Yang Memiliki Struktur dan Aturan Tertulis (%)	%	69	69	715,500,000	71	708,995,489	73	708,995,489	75	708,995,489	77	708,995,489	78	709,173,643	MAA
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4,842,093,715		4,462,654,394		4,628,021,543		4,658,588,320		4,625,166,143		4,631,539,386	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	91.56	91.75	2,808,248,938	91.95	3,167,000,173	92.35	3,088,021,543	92.85	3,192,517,320	93.50	3,208,095,643	93.95	3,213,920,172	ARPUS
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	70.23	71.85	1,913,865,777	72.30	1,135,654,221	72.87	1,420,000,000	73.45	1,341,071,000	73.89	1,347,070,500	74.25	1,302,619,214	ARPUS
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	12.19	18.60	119,979,000	23.91	160,000,000	27.08	120,000,000	33.33	125,000,000	36.00	70,000,000	40.38	115,000,000	ARPUS
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					126,220,000		486,550,312		332,550,000		312,550,000		354,000,000		354,000,000	
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	60.56	60.69	126,220,000	60.85	486,550,312	70.00	332,550,000	70.15	312,550,000	70.25	354,000,000	70.35	354,000,000	ARPUS

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					60,565,371,021		59,975,194,310		60,494,191,207		60,084,618,697		60,188,268,872		60,268,850,527	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6,343,645,040		6,319,246,265		6,333,759,676		6,347,251,553		6,357,501,644		6,365,639,131	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan	%	98	95	3,832,897,690	95	4,389,246,265	98	4,333,759,676	98	4,856,626,311	99	4,895,950,000	99	4,289,265,065	DKP
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	ton	6280,2	6468,61	649,892,000	6662,67	850,000,000	6862,55	865,000,000	7068,43	550,000,000	7280,48	550,000,000	7498,89	700,000,000	DKP
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	ton	2383,64	2455,15	1,577,849,350	2,528.8	880,000,000	2604,66	900,000,000	2,682.8	650,000,000	2763,28	611,551,644	2846,18	1,000,000,000	DKP
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	kg/kapita /tahun	63.6	63.7	283,006,000	63,9	200,000,000	64	235,000,000	64,1	290,625,242	64,2	300,000,000	64,3	376,374,066	DKP
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1,273,732,071		1,253,822,121		1,643,769,350		1,103,822,121		1,103,822,121		1,103,822,121	
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	59.14	61.14	1,003,822,121	63.84	803,822,121	66.84	1,193,769,350	70.44	703,822,121	74.44	703,822,121	79.44	703,822,121	PARPORA
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%		75	0	75	150,000,000	80	100,000,000	85	100,000,000	90	100,000,000	95	100,000,000	PARPORA
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	51.64	53.99	269,909,950	58.69	300,000,000	62.91	350,000,000	73.71	300,000,000	75.12	300,000,000	95.31	300,000,000	PARPORA

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					49,625,391,600		49,434,523,614		49,548,059,871		49,653,604,820		49,733,789,752		49,797,448,106	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	90	100	27,261,375,414	100	28,967,375,414	100	28,567,375,414	100	28,567,375,414	100	28,567,375,414	100	28,567,375,414	DISTAN
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	ekor	300	300	7,568,568,411	350	6,748,568,411	400	7,002,104,668	500	7,007,649,617	600	6,955,888,638	700	6,955,888,638	DISTAN
	2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peningkatan Produksi Hortikultura	Ton	296,188 .15	290,1 88.00		290,288.15		290,313.2 0		290,338 .15		290,3 63.15		290,3 88.15		DISTAN
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan dalam LP2B	Ha	0	22,32 1	10,815,697,220	22,421	10,115,697,220	22,721	10,355,697,220	22,821	10,355,697,220	22,92 1	10,391,165,089	23,22 1	10,454,823,443	DISTAN
	2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	%	90	100		100		100		100		100		100		DISTAN
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	0	100	2,700,000,000	100	2,400,000,000	100	2,420,000,000	100	2,500,000,000	100	2,548,239,021	100	2,548,239,021	DISTAN
	2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	0	100		100		100		100		100		100		DISTAN

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Petani	%	100	100	1,279,750,555	100	1,202,882,569	100	1,202,882,569	100	1,222,882,569	100	1,271,121,590	100	1,271,121,590	DISTAN
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	19	23		23		23		23		23		23		DISTAN
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3,257,650,310		2,552,650,310		2,553,650,310		2,564,988,203		2,578,203,355		2,580,235,951	
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	0	45	2,369,000,000	45	1,676,719,333	46	1,675,709,806	47	1,676,845,330	50	1,691,419,482	50	1,686,368,174	KOP-UKM DAG
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	69	69	50,666,000	69	50,400,000	70	50,420,000	71	50,430,000	74	50,666,000	74	50,666,000	KOP-UKM DAG
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	Nilai	1.8	1.23	500,307,310	1.25	503,230,977	1.26	503,240,000	1.27	503,245,000	1.30	507,000,000	1.35	508,000,000	KOP-UKM DAG
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	79.17	80	137,677,000	83	162,300,000	85	164,020,000	95	174,077,369	100	165,727,369	100	170,201,777	KOP-UKM DAG
3.30.07 PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	99	99	200,000,000	100	160,000,000	100	160,260,504	100	160,390,504	100	163,390,504	100	165,000,000	KOP-UKM DAG
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					0		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000	

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	95	0	0	90	150,000,000	90	150,000,000	90	150,000,000	90	150,000,000	90	150,000,000	KOP-UKM DAG
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	0	0	0	90	100,000,000	90	100,000,000	90	100,000,000	90	100,000,000	90	100,000,000	KOP-UKM DAG
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	%	0	0	0	50	100,000,000	70	100,000,000	85	100,000,000	90	100,000,000	100	100,000,000	KOP-UKM DAG
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					64,952,000		64,952,000		64,952,000		64,952,000		64,952,000		71,705,218	
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan SDM Warga Transmigrasi (%)	%	50	100	24,952,000	100	24,952,000	100	24,952,000	100	24,952,000	100	24,952,000	100	31,705,218	NAKERTRANS
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	10	20	40,000,000	50	40,000,000	60	40,000,000	70	40,000,000	80	40,000,000	90	40,000,000	NAKERTRANS
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					85,957,237,814		85,626,631,156		85,823,289,817		86,006,106,556		86,144,996,649		86,255,260,691	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					38,667,155,195		38,518,434,514		38,606,899,792		38,689,138,396		38,751,616,960		38,801,218,331	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	90	85	34,668,786,365	90	34,520,065,684	95	34,608,530,962	95	34,690,769,566	95	34,753,248,130	100	34,802,849,501	SETDA
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah	%	75	80	2,036,195,753	85	2,036,195,753	90	2,036,195,753	92	2,036,195,753	93	2,036,195,753	95	2,036,195,753	SETDA

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai	2.7	2.73		2.75		2.80		2.85		2.90		2.95		SETDA
	3. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	85	85		90		90		95		95		95		SETDA
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	93.56	95.34	1,962,173,077	96.76	1,962,173,077	97.15	1,962,173,077	97.8	1,962,173,077	98	1,962,173,077	98.5	1,962,173,077	SETDA
4.02 SEKRETARIAT DPRD					47,290,082,619		47,108,196,642		47,216,390,025		47,316,968,160		47,393,379,689		47,454,042,360	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	93	98	30,492,870,019	98	31,385,181,042	98	31,365,181,767	98	31,425,181,560	98	31,565,181,089	98	31,415,181,760	SET. DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1 . Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	85.71	85.71	16,797,212,600	83.33	15,723,015,600	85.71	15,851,208,258	71.43	15,891,786,600	60	15,828,198,600	75	16,038,860,600	SET. DPRD
	2. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		100		SET. DPRD
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					663,481,334,208		660,929,468,285		662,447,424,814		663,858,539,196		664,930,595,333		665,781,694,501	
5.01 PERENCANAAN					9,153,358,836		9,453,674,873		9,476,190,970		9,497,122,261		9,513,024,245		9,615,648,738	

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	100	100	6,809,673,537	100	7,233,353,607	100	7,191,555,718	100	7,264,573,607	100	7,235,073,607	100	7,377,208,238	BAPPEDA
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	1,335,016,299	100	1,102,436,589	100	1,152,436,589	100	1,102,248,654	100	1,115,950,638	100	1,076,440,500	BAPPEDA
	2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100		100		100		100		100		100		BAPPEDA
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	100	1,008,669,000	100	1,117,884,677	100	1,132,198,663	100	1,130,300,000	100	1,162,000,000	100	1,162,000,000	BAPPEDA
5.02 KEUANGAN					646,515,925,184		644,029,311,209		645,508,453,153		646,883,484,932		647,928,128,285		648,757,464,602	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	90	90	82,277,588,263	90	75,615,200,063	95	76,691,522,596	95	76,841,522,596	100	77,714,457,594	100	84,104,435,241	BPKD
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Tepat Waktu	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	561,466,894,518	Tepat Waktu	565,614,111,146	Tepat Waktu	566,016,930,557	Tepat Waktu	567,231,962,336	Tepat Waktu	567,398,670,691	Tepat Waktu	561,833,029,361	BPKD
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	90	90	1,290,446,812	90	1,305,000,000	93	1,305,000,000	93	1,315,000,000	95	1,315,000,000	95	1,320,000,000	BPKD
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9.01	9.01	1,480,995,591	9.01	1,495,000,000	9.51	1,495,000,000	9.51	1,495,000,000	10.1	1,500,000,000	10.1	1,500,000,000	BPKD

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03 KEPEGAWAIAN					6,201,131,226		6,589,482,203		6,605,780,691		6,610,932,003		6,617,442,803		6,625,581,161	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	90	95	5,780,690,418	96	6,171,982,203	97	6,172,280,691	98	6,172,432,003	99	6,172,942,803	100	6,173,081,161	BKPSDM
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	98	98	420,440,808	98	417,500,000	98	433,500,000	99	438,500,000	100	444,500,000	98	452,500,000	BKPSDM
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					922,750,680		507,000,000		507,000,000		517,000,000		522,000,000		523,000,000	
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	8.84	4.00	922,750,680	9.00	507,000,000	10.00	507,000,000	11.00	517,000,000	12.00	522,000,000	13.00	523,000,000	BKPSDM
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					688,168,282		350,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000		260,000,000	
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	0	100	522,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	130,000,000	BAPPEDA
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	17	17	166,168,282	21	200,000,000	24	200,000,000	27	200,000,000	30	200,000,000	33	130,000,000	BAPPEDA
6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					12,164,248,752		12,117,462,911		12,145,293,085		12,171,164,418		12,190,819,466		12,206,423,495	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					12,164,248,752		12,117,462,911		12,145,293,085		12,171,164,418		12,190,819,466		12,206,423,495	

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	84.24	85.5	9,287,278,652	86.5	8,928,492,811	87.50	8,956,322,985	88.50	8,982,194,318	89.50	9,001,849,366	90.00	9,052,453,395	INSPEKTORAT
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Objek Pemeriksaan yang telah terbebas dari temuan hasil pengawasan	%	78.87	89.91	2,533,370,000	80	2,810,370,000	81	2,810,370,000	83	2,810,370,000	85	2,810,370,000	85	2,810,370,000	INSPEKTORAT
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintahan (APIP)	Level	3	3	343,600,100	3	378,600,100	3	378,600,100	3.00	378,600,100	3.00	378,600,100	3.00	343,600,100	INSPEKTORAT
7. UNSUR KEWILAYAHAN					54,764,303,405		54,553,670,250		54,678,963,651		54,795,438,207		54,883,926,619		54,954,177,055	
7.01 KECAMATAN					54,764,303,405		54,553,670,250		54,678,963,651		54,795,438,207		54,883,926,619		54,954,177,055	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	2,088,368,601	95	2,089,183,784	100	2,094,629,452	100	2,089,721,823	100	2,103,537,823	100	2,106,591,141	KECAMATAN LHOONG
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	39,870,000	100	29,900,000	100	29,900,000	100	39,870,000	100	29,900,000	100	29,900,000	KECAMATAN LHOONG
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam	%	100	100	217,200,000	100	217,200,000	100	217,200,000	100	217,200,000	100	217,200,000	100	217,200,000	KECAMATAN LHOONG

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	perencanaan pembangunan															
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	KECAMATAN LHOONG
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	1,887,853,689	95	1,879,703,036	95	1,884,551,385	100	1,889,058,480	100	1,892,482,625	100	1,895,201,033	KECAMATAN LHOONGA
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	9,990,000	95	9,990,000	95	9,990,000	100	9,990,000	100	9,990,000	100	9,990,000	KECAMATAN LHOONGA
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	186,513,896	100	186,513,896	100	186,513,896	100	186,513,896	100	186,513,896	100	186,513,896	KECAMATAN LHOONGA
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	KECAMATAN LHOONGA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	2,235,935,951	95	2,226,093,813	100	2,231,948,328	100	2,237,390,770	100	2,241,525,518	100	2,244,808,071	KECAMATAN INDRAPURI
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	220,405,000	95	220,405,000	100	220,405,000	100	220,405,000	100	220,405,000	100	220,405,000	KECAMATAN INDRAPURI

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	64,800,000	100	64,800,000	100	64,800,000	100	64,800,000	100	64,800,000	100	64,800,000	KECAMATAN INDRAPURI
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	KECAMATAN INDRAPURI
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	2,436,208,830	95	2,425,715,659	95	2,431,957,436	100	2,437,759,881	100	2,442,168,133	100	2,445,667,819	KECAMATAN SEULIMUEM
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	74,799,800	95	74,799,800	95	74,799,800	100	74,799,800	100	74,799,800	100	74,799,800	KECAMATAN SEULIMUEM
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	217,200,000	100	217,200,000	100	217,200,000	100	217,200,000	100	217,200,000	100	217,200,000	KECAMATAN SEULIMUEM
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	2,468,765,608	95	2,458,176,994	100	2,464,475,544	100	2,470,330,767	100	2,474,779,116	100	2,478,310,634	KECAMATAN MONTASIK
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	127,658,200	95	127,658,200	100	127,658,200	100	127,658,200	100	127,658,200	100	127,658,200	KECAMATAN MONTASIK

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	118,800,000	100	118,800,000	100	118,800,000	100	118,800,000	100	118,800,000	100	118,800,000	KECAMATAN MONTASIK
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	KECAMATAN MONTASIK
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	2,103,277,599	95	2,094,255,409	95	2,099,622,184	100	2,104,611,217	100	2,108,401,500	100	2,111,340,584	KECAMATAN SUKAMAKMUR
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	33,159,999	95	33,159,999	100	33,159,999	100	33,159,999	100	33,159,999	100	33,159,999	KECAMATAN SUKAMAKMUR
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	171,518,337	100	171,518,337	100	171,518,337	100	171,518,337	100	171,518,337	100	171,588,337	KECAMATAN SUKAMAKMUR
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	KECAMATAN SUKAMAKMUR

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	86.55	95	2,413,011,483	95	2,343,874,896	95	2,350,555,590	95	2,375,680,976	95	2,380,484,296	95	2,389,230,077	KEC. DARUL IMARAH
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	98	95	246,622,456	95	150,525,000	95	150,525,000	95	150,525,000	95	150,525,000	95	150,525,000	KEC. DARUL IMARAH
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	221,770,370	100	375,773,370	100	375,773,370	100	355,858,453	100	355,773,370	100	350,773,370	KEC. DARUL IMARAH
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	38,650,000	100	38,650,000	100	38,650,000	100	39,650,000	100	39,650,000	100	39,650,000	KEC. DARUL IMARAH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	2,772,248,784	95	2,760,699,547	100	2,767,569,516	100	2,773,955,938	100	2,778,807,851	100	2,782,659,756	KECAMATAN PEUKAN BADA
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	24,735,504	95	24,735,504	95	24,735,504	100	24,735,504	100	24,735,504	100	24,735,504	KECAMATAN PEUKAN BADA

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	168,000,000	100	168,000,000	100	168,000,000	100	168,000,000	100	168,000,000	100	168,000,000	KECAMATAN PEUKAN BADA
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	KECAMATAN PEUKAN BADA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	1,760,841,095	95	1,752,995,891	100	1,757,662,546	100	1,762,000,736	100	1,765,296,559	100	1,767,913,094	KECAMATAN MESJID RAYA
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	141,500,000	95	141,500,000	95	141,500,000	100	141,500,000	100	141,500,000	100	141,500,000	KECAMATAN MESJID RAYA
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	137,400,000	100	137,400,000	100	137,400,000	100	137,400,000	100	137,400,000	100	137,400,000	KECAMATAN MESJID RAYA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	2,654,831,192	95	2,643,346,160	100	2,650,177,937	100	2,654,438,856	100	2,664,263,795	100	2,668,094,287	KECAMATAN INGIN JAYA
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	35,150,000	95	35,150,000	100	35,150,000	100	35,150,000	100	30,150,000	100	30,150,000	KECAMATAN INGIN JAYA

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	258,310,000	100	258,310,000	100	258,310,000	100	260,400,000	100	260,400,000	100	260,400,000	KECAMATAN INGIN JAYA
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	KECAMATAN INGIN JAYA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	2,480,009,958	95	2,469,370,639	100	2,475,699,350	100	2,481,582,612	100	2,486,052,262	100	2,489,600,691	KECAMATAN KUTA BARO
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	34,607,000	95	34,607,000	100	34,607,000	100	34,607,000	100	34,607,000	100	34,607,000	KECAMATAN KUTA BARO
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	213,790,000	100	213,790,000	100	213,790,000	100	213,790,000	100	213,790,000	100	213,790,000	KECAMATAN KUTA BARO
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	KECAMATAN KUTA BARO

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	100	2,173,974,783	100	2,164,746,020	100	2,170,235,674	100	2,175,338,935	100	2,179,216,001	100	2,182,293,981	KECAMATAN DARUSSALAM
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	90	41,232,620	95	41,232,620	100	41,232,620	100	41,232,620	100	41,232,620	100	41,232,620	KECAMATAN DARUSSALAM
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	140,507,000	100	140,507,000	100	140,507,000	100	140,507,000	100	140,507,000	100	140,507,000	KECAMATAN DARUSSALAM
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	43,750,000	100	43,750,000	100	43,750,000	100	43,750,000	100	43,750,000	100	43,750,000	KECAMATAN DARUSSALAM
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	1,702,300,161	100	1,694,533,653	100	1,699,153,496	100	1,703,448,170	100	1,706,710,932	100	1,709,301,221	KECAMATAN PULO ACEH
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	261,200,000	95	261,200,000	100	261,200,000	100	261,200,000	100	261,200,000	100	261,200,000	KECAMATAN PULO ACEH

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	17,980,335	100	17,980,335	100	17,980,335	100	17,980,335	100	17,980,335	100	17,980,335	KECAMATAN PULO ACEH
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	95	95	37,800,000	95	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	KECAMATAN PULO ACEH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	1,786,521,845	95	1,779,045,251	100	1,783,492,641	100	1,787,627,000	100	1,790,767,967	100	1,793,261,563	KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	21,181,250	95	21,181,250	100	21,181,250	100	21,181,250	100	21,181,250	100	21,181,250	KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	98,400,000	100	98,400,000	100	98,400,000	100	98,400,000	100	98,400,000	100	98,400,000	KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten	%	95	95	2,058,381,412	95	2,049,962,604	95	2,054,970,463	100	2,058,381,412	100	2,058,381,412	100	2,058,381,412	KECAMATAN KOTA JANTHO

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	yang dilaksanakan															
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	92,696,044	95	92,696,044	95	92,696,044	100	93,940,473	100	97,477,271	100	100,285,114	KECAMATAN KOTA JANTHO
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	KECAMATAN KOTA JANTHO
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	1,835,182,695	95	1,830,691,668	95	1,835,266,612	100	1,839,519,546	100	1,842,750,599	100	1,845,315,712	KECAMATAN KUTA COT GLIE
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	43,272,660	95	40,072,660	95	40,072,660	100	40,072,660	100	40,072,660	100	40,072,660	KECAMATAN KUTA COT GLIE
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	76,800,000	100	76,800,000	100	76,800,000	100	76,800,000	100	76,800,000	100	76,800,000	KECAMATAN KUTA COT GLIE
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	44,400,000	100	44,400,000	100	44,400,000	100	44,400,000	100	44,400,000	100	44,400,000	KECAMATAN KUTA COT GLIE

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	1,752,018,243	95	1,744,826,597	95	1,749,104,488	100	1,753,081,278	100	1,756,102,537	100	1,758,501,097	KECAMATAN KUTA MALAKA
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	9,999,853	95	9,999,853	95	9,999,853	100	9,999,853	100	9,999,853	100	9,999,853	KECAMATAN KUTA MALAKA
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	68,199,000	100	68,199,000	100	68,199,000	100	68,199,000	100	68,199,000	100	68,199,000	KECAMATAN KUTA MALAKA
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	39,600,000	100	39,600,000	100	39,600,000	100	39,600,000	100	39,600,000	100	39,600,000	KECAMATAN KUTA MALAKA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	2,057,732,767	95	2,050,710,461	95	2,055,743,599	100	2,060,322,477	100	2,063,877,129	100	2,066,699,146	KECAMATAN SIMPANG TIGA
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	30,594,000	95	12,660,000	95	12,660,000	100	12,660,000	100	12,660,000	100	12,660,000	KECAMATAN SIMPANG TIGA

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	76,800,000	100	93,295,000	100	93,295,000	100	93,395,000	100	93,395,000	100	93,395,000	KECAMATAN SIMPANG TIGA
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	KECAMATAN SIMPANG TIGA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	2,560,048,635	95	2,549,841,916	95	2,555,913,299	100	2,561,557,344	100	2,565,845,256	100	2,569,249,404	KECAMATAN DARUL KAMAL
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	6,683,000	95	6,683,000	95	6,683,000	100	6,683,000	100	6,683,000	100	6,683,000	KECAMATAN DARUL KAMAL
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	49,200,000	100	49,200,000	100	49,200,000	100	49,200,000	100	49,200,000	100	49,200,000	KECAMATAN DARUL KAMAL
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	100	37,800,000	KECAMATAN DARUL KAMAL

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	2,020,389,961	95	2,011,968,913	95	2,016,978,104	100	2,021,634,721	100	2,025,172,460	100	2,027,981,050	KECAMATAN BAITUSSALAM
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	17,969,876	95	17,969,876	95	17,969,876	100	17,969,876	100	17,969,876	100	17,969,876	KECAMATAN BAITUSSALAM
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	74,800,000	100	74,800,000	100	74,800,000	100	74,800,000	100	74,800,000	100	74,800,000	KECAMATAN BAITUSSALAM
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	76,300,000	100	76,300,000	100	76,300,000	100	76,300,000	100	76,300,000	100	76,300,000	KECAMATAN BAITUSSALAM
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	100	100	2,506,747,514	100	2,497,467,870	100	2,503,582,632	100	2,508,267,003	100	2,512,585,551	100	2,516,014,021	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	14,995,500	95	13,995,500	95	13,995,500	100	14,995,500	100	14,995,500	100	14,995,500	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	116,149,000	100	116,149,000	100	116,149,000	100	116,149,000	100	116,149,000	100	116,149,000	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	Persen	95	95	1,739,182,679	95	1,739,182,679	95	1,743,434,381	100	1,747,386,824	100	1,750,229,301	100	1,752,613,177	KECAMATAN LEUPUNG
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	Persen	85	95	70,390,000	95	60,400,000	95	60,400,000	100	60,400,000	100	60,400,000	100	60,400,000	KECAMATAN LEUPUNG
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	100	13,997,332	100	16,839,714	100	16,839,714	100	16,839,714	100	17,000,000	100	17,000,000	KECAMATAN LEUPUNG
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	Persen	100	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	KECAMATAN LEUPUNG

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	95	1,980,711,888	95	1,967,769,832	95	1,972,732,036	100	1,977,344,971	100	1,980,849,525	100	1,983,631,770	KECAMATAN BLANG BINTANG
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	400,000	95	5,000,000	95	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	KECAMATAN BLANG BINTANG
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	153,010,000	100	153,010,000	100	153,010,000	100	153,010,000	100	153,010,000	100	153,010,000	KECAMATAN BLANG BINTANG
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	100	34,800,000	KECAMATAN BLANG BINTANG
8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					8,310,141,574		8,278,179,307		8,297,191,799		8,314,866,088		8,328,293,652		8,338,953,717	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8,310,141,574		8,278,179,307		8,297,191,799		8,314,866,088		8,328,293,652		8,338,953,717	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	90	90	3,179,833,580	90	3,368,212,513	90	3,368,212,513	90	3,368,212,513	90	3,369,176,858	90	3,368,212,513	KESBANG
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	50	65	1,824,645,500	65	1,202,171,000	65	1,221,183,492	65	1,235,608,000	65	1,248,071,219	65	1,259,695,629	KESBANG

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	0	45	1,138,503,494	45	2,006,796,794	45	2,006,796,794	45	2,010,046,575	45	2,010,046,575	45	2,010,046,575	KESBANG
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	17	17	915,234,000	17	153,394,000	17	153,394,000	17	153,394,000	17	153,394,000	17	153,394,000	KESBANG
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	0	40	277,125,000	40	423,905,000	40	423,905,000	40	423,905,000	40	423,905,000	40	423,905,000	KESBANG
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (%)	%	0	20	974,800,000	20	1,123,700,000	30	1,123,700,000	35	1,123,700,000	40	1,123,700,000	45	1,123,700,000	KESBANG

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SAT.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												SKPD
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9. UNSUR KEKHUSUSAN					31,972,818,626		31,849,845,541		31,922,995,072		31,990,995,936		32,042,657,760		32,083,671,785	
9.01 KEKHUSUSAN ACEH					31,972,818,626		31,849,845,541		31,922,995,072		31,990,995,936		32,042,657,760		32,083,671,785	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	91.38	91.8	1,287,939,506	92.5	1,348,450,224	93	1,348,450,224	93.5	1,356,766,436	94	1,360,666,436	94.5	1,364,475,995	MPU
9.01.03 PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Kader Ulama yang di Tingkatkan Kompetensinya	%	8.29	10.78	1,681,833,120	14.59	1,609,900,134	18.41	1,616,694,576	22.22	1,614,694,576	26.04	1,615,593,148	29.85	1,615,593,148	MPU
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	86	90	1,726,451,914	90	2,245,229,706	90	2,176,429,706	90	2,100,063,745	90	2,156,682,393	90	2,101,672,885	BAITUL MAL
9.01.04 PROGRAM BAITUL MAL	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF (%)	%	76.94	76.9	15,860,568,706	76.9	15,274,148,139	76.9	15,383,184,889	78	15,496,955,516	78	15,468,754,055	78	15,546,323,804	BAITUL MAL
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	95	100	3,222,697,380	100	4,672,117,338	100	4,113,235,677	100	3,982,515,663	100	4,020,961,728	100	3,890,605,953	DSI
9.01.02 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Persentase mesjid yang tertata manajemen dan kemakmurannya (%)	%	78	80	8,193,328,000	83	6,700,000,000	86	7,285,000,000	89	7,440,000,000	92	7,420,000,000	87.88	7,565,000,000	DSI
	TOTAL				1,821,968,280,100		1,814,960,669,600		1,819,129,089,275		1,823,004,112,594		1,825,948,057,172		1,828,285,237,749	

4.2. Indikator Kinerja

Pada bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini berupa indikator kinerja makro daerah, indikator kinerja utama daerah (sasaran daerah) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (sasaran perangkat daerah).

Indikator Kinerja adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi, baik ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja yang dicapai dalam RPJMD setiap tahunnya akan diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Indikator kinerja lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan pemerintahan yang ditunjukkan dengan capaian parameter dari indikator-indikator kinerja tersebut. Indikator kinerja makro bertujuan menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Indikator kinerja makro Kabupaten Aceh Besar tahun 2025-2029 sebagai berikut:

4.2.1 Indikator Makro Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2029

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, Indeks Gini dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator makro pembangunan Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian 2024/2025	Proyeksi Target Tahun						Kondisi Ahkir Periode
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.95	5	5.05	5.1	5.15	5.2	5.25	5.25
2	Angka Kemiskinan	%	13.21	11.05	10,48	9,91	9,34	8,77	8,20	8.20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7.93	7.74	7.55	7.36	7.17	6.98	6.79	6.79
4	Rasio Gini	Indeks	0.29	0.28	0.275	0.27	0.65	0.60	0.55	0.55
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.57	77.05	77.53	78.00	78.48	78.96	79.44	79.44
6	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	74.71	78.76	78.94	79.11	79.28	79.45	79.62	79.62

4.2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan. Penetapan indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Besar sampai akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025-2029. Dengan demikian peran dari perangkat daerah menjadi penting untuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Utama Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.57	77.05	77.53	78.00	78.48	78.96	79.44	79.44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.37	10.38	10.39	10.40	10.41	10.42	10.43	10.43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.77	14.78	14.79	14.80	14.81	14.82	14.83	14.83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.24	74.2	74.38	74.56	74.74	74.92	75.10	75.10	Dinas Kesehatan
15	Prevalensi Stunting	%	32.3	31.24	30.32	29.41	28.50	27.58	26.67	26.67	Dinas Kesehatan
16	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	67.76	68.82	69.83	70.8	71.71	72.58	73.42	73.42	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Persentase Atlit yang mengikuti even Olah raga	%	46.6	47.6	48.6	49.6	50.6	51.6	52.6	52.6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
18	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	55.86	56.36	56.86	57.36	57.86	58.36	58.86	58.86	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
19	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.95	5	5.05	5.1	5.15	5.2	5.25	5.25	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, BPKD, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
20	Rasio Gine	Indeks	0.290	0.280	0.275	0.270	0.265	0.260	0.255	0.255	BPS

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Tingkat Kemiskinan	%	13.21	12.81	12.46	12.10	11.75	11.39	11.04	11.04	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
22	Kontribusi PDRB Aceh Besar	%	7.91	7.96	8.01	8.06	8.11	8.16	8.21	8.21	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, BPKD, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
23	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3.43	3.53	3.62	3.72	3.81	3.91	4.00	4.00	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	4.27	4.39	4.51	4.64	4.76	4.88	5.00	5.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
25	Persentase Peningkatan Investasi	%	-13 %	5%	10%	10%	12%	15%	15%	15%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
26	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84.72	84.92	85.12	85.32	85.52	85.72	85.92	85.92	Dinas Pangan
27	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	%	2.04	2.04	2.06	2.08	2.10	2.12	2.14	2.14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
28	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	56	57	58	59	60	61	61	Dinas Sosial
29	Tingkat pengangguran terbuka	%	7.93	7.74	7.55	7.36	7.17	6.98	6.79	6.79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Rasio Konektivitas Kabupaten/kota	%	1.24	1.24	1.33	1.40	1.48	1.56	1.64	1.64	Dinas Perhubungan
31	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74.71	78.76	78.94	79.11	79.28	79.45	79.62	79.62	Dinas Lingkungan Hidup
32	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	69,32	65,58	66,48	67,40	68,33	69,25	70,18	70,18	Dinas Lingkungan Hidup
33	Persentase Rumah Tangga dengan air minum layak	%	92.98	93.02	93.27	93.55	93.84	94.12	94.40	94.40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak	%	87.09	87.105	87.11	87.27	87.44	87.6	87.77	87.77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Tingkat Kemantapan Jalan	%	63,32	42,83	44,03	45,23	46,43	47,63	48,83	48,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36	Indeks Kualitas Air	Indeks	60.97	75.66	75.86	76.06	76.26	76.46	76.63	76.63	Dinas Lingkungan Hidup
37	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93.85	85.74	85.34	85.54	85.74	85.94	86.11	86.11	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	63.41	72.30	72.37	72.44	72.51	72.58	72.75	72.75	Dinas Lingkungan Hidup
39	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.38	0.39	0.4	0.43	0.45	0.46	0.48	0.48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
40	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50.23	61	62	63	64	65	66	66	Sekretariat Daerah
41	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.58	3,6	3,62	3,64	3,66	3,68	3,7	3,7	Sekretariat Daerah
42	Indeks Reformasi Hukum'	Indeks	50,2	70	70	75	75	75	80	80	Sekretariat Daerah
43	Indeks SPBE	Indeks	2,39	2,81	3,00	3,01	3.02	3.03	3,04	3,05	Dinas Komunikasi dan Infomatika
44	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3.16	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	Inspektorat
45	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74,91	75	76	76	77	77	78	78	BPKSDM

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46	Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai dan Predikat	54,90	55.49	56.08	56.67	57.26	57.85	58,44	59	Sekretariat Daerah
47	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	74.00 (2023)	76.29	77.43	78.57	79.71	80.86	82.00	82.00	Bdan Pengelolaan Keuangan Daerah
48	Persentase penanganan kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TRIBUMTRAMAS)	%	95.82	95.9	95.98	96.06	96.14	96.22	96.3	96.3	Satuan Polisi Pamong Praja
49	Persentase penyelesaian konflik sosial secara damai	%	20	20	25	30	35	40	45	45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
50	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.703	0.806	0.905	1.020	1.230	1.351	1.460	1.460	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
51	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
53	Indeks Pembangunan Syariah	Indeks	85.46	85.5	85.98	86.45	86.93	87.4	87.88	87.88	Dinas Syariat Islam
54	Dimensi Aqidah	%	88	84.2	88,98	89,45	89,93	90,4	90,88	90,88	Dinas Syariat Islam
55	Dimensi Akhlak	%	82	85,09	82,98	83,45	83,93	84,4	84,88	84,88	Dinas Syariat Islam
56	Dimensi Lembaga Keuangan Syariah	%	83	73,27	83,98	84,45	84,93	85,4	85,88	85,88	Dinas Syariat Islam
57	Dimensi Kesadaran dan Ketaatan Pelaksanaan Syariat Islam	%	84	84,44	84,98	85,45	85,93	86,4	86,88	86,88	Dinas Syariat Islam
58	Dimensi Kepatuhan Membayar Zakat	%	86	77,56	86,98	87,45	87,93	88,4	88,88	88,88	Dinas Syariat Islam

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	TARGET						KONDISI AKHIR	KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
59	Dimensi Manajemen Masjid/Meunasah	%	90	81,39	90,98	91,45	91,93	92,4	92,88	92,88	Dinas Syariat Islam
60	Dimensi Melek Al-Qur'an	%	84	84,89	84,98	85,45	85,93	86,4	86,88	86,88	Dinas Syariat Islam
61	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dilestarikan	%	23.10	28.48	34.81	41.14	47.47	53.80	60.13	60.13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.2.3 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur spesifik yang secara kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Indikator kinerja kunci (IKK) adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintahan, IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penetapan dan proyeksi IKD dan IKK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.4 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,71	78,76	78,94	79,11	79,28	79,45	79,62	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,38	0,39	0,4	0,43	0,45	0,46	0,48	BPBD
3	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak	%	92,96	93,02	93,27	93,55	93,84	94,12	94,40	PUPR
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	87,07	87,09	87,11	87,27	87,44	87,6	87,77	PUPR
5	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	84,72	84,92	85,12	85,32	85,52	85,72	85,92	Dinas Pangan
6	Presentase timbulan sampah yang tertangani	Persentase	66,68	67,72	68,74	69,77	70,81	71,88	72,95	Dinas Lingkungan Hidup
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,39	1,35	1,36	1,5	1,3	1,33	1,32	Dukcapil/BPS
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	195,61	190,5	187,3	178,11	171,2	169,2	159,3	BPBD
9	Kapasitas Air Baku	(%)	0,555	0,555	0,566	0,577	0,588	0,599	0,610	PUPR
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	3	3,51	3,851	4,192	4,533	4,874	5,22	PUPR
11	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	153	149,49	151,60	153,40	155,32	157,23	159,11	BPS (Indikator PJPK)
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	92	92,22	92,42	92,62	92,82	93,02	93,22	PUPR
13	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	8,13	7,9	7,7	7,5	7,3	7,1	6,9	Dinas Pangan
14	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persentase	84,97	85,56	85,57	85,58	85,59	85,6	85,61	Dinas Pertanahan
17	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	46,8	48	50	52	54	56	58	Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Presentase Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu lintas (%)	Persentase	91	93	95	97	99	100	100	DISHUB
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,57	77,05	77,53	78,00	78,48	78,96	79,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	5	5,05	5,1	5,15	5,2	5,25	BPS
3	Rasio Gini	Indeks	0.29	0.28	0.275	0.27	0.65	0.60	0.55	BPS
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	13,21	12,81	12,46	12,10	11,75	11,39	11,04	BPS
5	Kontribusi PDRB Aceh Besar (%)	%	7,91	7,96	8,01	8,06	8,11	8,16	8,21	BPS
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,37	10,38	10,39	10,40	10,41	10,42	10,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,77	14,78	14,79	14,80	14,81	14,82	14,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,24	74,2	74,38	74,56	74,74	74,92	75,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	32,3	31,24	30,32	29,41	28,50	27,58	26,67	Dinas Kesehatan
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,93	7,74	7,55	7,36	7,17	6,98	6,79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	50,12	53,02	55,92	58,82	61,72	64,62	67,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	N/a	68,45	69,42	70,35	71,24	72,09	72,09	PPKBPPPA
13	Demand Satisfied	%	N/A	75,47	77,05	78,46	79,71	80,83	81,83	PPKBPPPA
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	36	60	65	70	75	80	85	Disnakertrans
15	Indeks pembangunan literasi Masyarakat	Indeks	76,92	77,08	77,35	77,70	80,25	80,85	81,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	47,20	55	60	64	65	68	70	PPKBPPPA
17	Indeks Distribusi Guru	Indeks	0,35	0,56	1,01	1,81	3,27	5,88	10,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	65,25	66,35	67,45	68,55	69,65	70,75	71,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Tingkat Inflasi	(%)	2,16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	%	0	5,65	4,62	3,92	3,45	3,14	2,92	PPKBPPPA
21	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	46	12	11	10	10	9	9	Dinas Kesehatan
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	51,59	54,62	54,95	55,28	55,61	55,94	56,27	PPKBPPPA
23	PDRB per kapita	Rp. Juta Per Tahun	42,99	45,78	48,75	51,91	55,28	58,87	62,69	BPS
25	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
26	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	0	72	73	74	75	76	78	PPKBPPPA
27	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	5	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
28	Proporsi penduduk dengan aktivitas yang cukup	(%)	62.6	65	66.10	67.90	69.70	71.50	73.30	Dinas Kesehatan
29	Cakupan Penerima pemeriksaan kesehatan gratis	(%)	N/A	36	46	55	61	70	79	Dinas Kesehatan
30	Persentase hipertensi dalam pengendalian	(%)	15	20	25	30	35	40	45	Dinas Kesehatan
31	Cakupan imunisasi bayi lengkap	(%)	N/A	80	85	90	93	95	97	Dinas Kesehatan
32	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,37	95,40	95,60	96	97	98	99	PPKBPPPA
33	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	58,47	59,97	61,47	62,97	64,47	65,97	67,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34	Indeks Keluarga Sehat	Angka	N/A	0,500	0,500	0,500	0,600	0,700	0,800	PPKBPPPA
35	Skor Kemampuan literasi SD	Nilai	54,94	57,44	59,94	62,44	64,94	67,44	69,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.49	0.49	0.481	0.476	0.467	0.461	0.457	PPKBPPPA
38	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	N/A	7,31	5,32	4,52	4,21	4,08	4,03	PPKBPPPA
39	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A	56	57	58	59	60	61	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	72	73	75	76	76,50	76	78	PPKBPPPA
41	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	32,3	31,24	30,32	29,41	28,50	27,58	26,67	Dinas Kesehatan
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	2,04	2,04	2,06	2,08	2,10	2,12	2,14	Disparpora
2	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	Ribu Orang	N/A	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	Disparpora
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	N/A	71,02	72,04	73,06	74,08	75,10	76,12	DinasPUPR
4	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	1,01	1,01	1,06	1,11	1,15	1,2	1,25	BPS
5	Presentase Desa Mandiri	%	4.86	7.5	9.95	11.27	12.60	13.59	14.92	DPMG
6	Angka Ketergantungan	%	47,51	46,82	46,35	46,03	45,84	45,68	45,53	PPKBPPPA
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67.05	70	74	78	82	86	90	Disnakertrans
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0.5	0,53	0,65	0,77	0,88	1,00	1,12	BPKD
9	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	47.55	53.41	54.74	56.07	57.40	58.73	60.06	Bappeda
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	0	36,68	36,72	36,76	36,80	36,83	36,87	BPKD
12	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	0	1,65	1,89	2,30	2,55	3,25	3,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	2.85	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
14	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0	4,4	4,53	4,66	4,79	4,92	5,05	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,58	3,6	3,62	3,64	3,66	3,68	3,7	Sekretariat Daerah
2	Indeks Pembangunan Syariah	Indeks	85,46	85,5	85,98	86,45	86,93	87,4	87,88	Dinas Syariat Islam
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	50,2	70	70	75	75	75	80	Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,39	2,81	3,00	3,01	3,02	3,03	3,04	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,703	0,806	0,905	1,020	1,230	1,351	1,460	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
6	Persentase Koordinasi yang di tindak lanjutin	%	100	100	100	100	100	100	100.00	Kecamatan
7	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.63	3.65	3.72	3.79	3.85	3.92	3.99	Bappeda
8	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
9	Persentase Total Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Yang di tindak lanjuti Oleh Pemberintah Daerah	%	8.33	8.33	16.67	33.33	50	75	100	Majelis Pendidikan Aceh
10	Persentase Pelestarian dan Pembinaan Adat Aceh	%	69	69	70	71	72	73	74	Majelis Adat Aceh
11	Persentase pelestarian dan pembinaan adat Aceh	%	N/a	69	71	73	75	77	78	Majelis Adat Aceh
12	Persentase Kader Ulama yang ditingkatkan kompetensinya	%	N/a	10.78	14.59	18.41	22.22	26.04	29.85	Majelis Pemusyawaratan Ulama
13	Persentase komite sekolah yang disupervisi dan difasilitasi	%	N/a	19.72	19.84	20.14	20.14	20.16	20.16	Majelis pendidikan Aceh
14	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,91	2,99	3,03	3,08	3,12	3,16	3,18	Sekretariat Daerah
15	Survey Penilaian Intergritas	%	N/A	73,00	74,50	76,00	77,50	79,00	80,50	Inspektorat
16	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Indeks	39.96	42,16	44,36	46,56	48,78	50,96	53,16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	80	85	87	90	93	95	98	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
18	Capaian Supervisi Aksi Pencegahan Korupsi (Monitoring Centre For Prevention)	%	86.22	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	Inspektorat
19	Presentase Dayah Mandiri	%	N/A	1,59	1,71	1,82	2,12	2,47	2,71	Dinas Pendidikan Dayah
20	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	Baitul Mall

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	N/A	40,01	45	50	55	60	65	Satuan Polisi Pamong Praja dan WH
22	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	%	85,00	85,56	85,57	85,58	85,59	85,6	85,61	Dinas Pertanahan
23	Persentase Menurunnya Pelanggaran Syariat Islam	%	0	3.08	5	7.5	9	11.5	15	Satpol PP dan WH
24	Persentase Raperda yang Disahkan	%	0	85,71	83,33	85,71	71,43	60,00	75,00	Sekretariat DPRK
25	Persentase konflik sosial yang berhasil dicegah/difasilitasi	%			25	25	18	19	13	Kesbangpol
26	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	N/A	78	80	83	85	88	90	Satpol PP dan WH

Tabel. 4.5 Indikator Kinerja Kunci

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
Persentase Komite Sekolah yang Disupervisi dan Difasilitasi (%)	%	19.14	19.72	19.84	20.14	20.14	20.16	20.16	MPD
Persentase Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	%	16	19	17	16	16	15	14	DAYAH
Persentase bantuan Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	%	17	23	24	24	23	23	23	DAYAH
Skor Kemampuan literasi SD	Nilai	54.94	57.44	59.94	62.44	64.94	67.44	69.94	DISDIKBUD
Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	65.25	66.35	67.45	68.55	69.65	70.75	71.85	DISDIKBUD
Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	50.12	53.02	55.92	58.82	61.72	64.62	67.52	DISDIKBUD
Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	58.47	59.97	61.47	62.97	64.47	65.97	67.47	DISDIKBUD
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	78.40	78.81	79.22	79.63	80.04	80.46	80.87	DISDIKBUD
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	69.73	76.74	77.24	77.74	78.24	78.74	79.24	DISDIKBUD
Iklim Inklusivitas SD	Nilai	59.96	62.46	64.96	67.46	69.96	72.46	74.96	DISDIKBUD
Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	57.27	59.67	62.07	64.47	66.87	69.27	71.67	DISDIKBUD
Iklim Keamanan SD	Nilai	77.43	78.33	79.23	80.13	81.03	81.93	82.83	DISDIKBUD
Iklim Keamanan SMP	Nilai	71.13	72.63	74.13	75.63	77.13	78.63	80.13	DISDIKBUD

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iklim Kebinekaan SD	Nilai	72.10	73.10	74.10	75.10	76.10	77.10	78.10	DISDIKBUD
Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	70.58	71.58	72.58	73.58	74.58	75.58	76.58	DISDIKBUD
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	68.00	73.00	79.00	86.00	93.00	97.00	100.00	DISDIKBUD
Indeks Distribusi Guru	%	0.35	0.56	1.01	1.81	3.27	5.88	10.58	DISDIKBUD
Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	57.35	89.00	89.00	90.67	90.67	92.67	92.67	DISDIKBUD
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
Angka Kematian Ibu (AKI)((per 100.000 kelahiran hidup))	orang	5	3	3	3	3	3	3	DINKES
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	%	32.3	31.24	30.32	29.41	28.50	27.58	26.67	DINKES
Persentase Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	70	75	80	85	90	95	100	DINKES
Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	70	75	80	85	90	95	100	DINKES
1. Angka Presentase Kepuasan pasien	%	83	84	84.50	84.70	85	85.30	85.70	RSUD
2. Ratio Bed Occupation Rate	%	30.5	60	60.3	60.5	60.7	60.9	61.3	RSUD
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Rasio	3.24	0.97	2.66	2.95	3.15	3.29	3.39	PUPR
Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak (%)	%	92.96	93.02	93.27	93.55	93.84	94.12	94.40	PUPR
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	-	-	68.74	69.77	70.81	71.88	72.95	PUPR
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	87.07	87.09	87.10	87.27	87.44	87.60	87.77	PUPR
Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	61.6	61.72	63.08	63.82	64.56	65.3	66.04	PUPR
Persentase Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	%	38.23	40.25	41.5	42.15	43.85	44.1	45.5	PUPR

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Penataan bangunan dan lingkungan	%	34.78	0	38.47	40.82	42.17	43.52	45.86	PUPR
Persentase Jalan Kondisi Baik (%)	%	19.53	19.79	20.09	20.40	20.71	21.02	21.33	PUPR
Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	%	0	6.67	17.78	31.11	47.78	71.11	100.00	PUPR
Persentase Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang	%	21.05	47.37	52.63	57.89	68.42	73.68	78.94	PUPR
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	PUPR
Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani	%	0	0	13.5	20.3	27.1	33.9	40.7	PUPR
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persentase)	%	0	71.02	72.04	73.06	74.08	75.1	76.12	PUPR
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	60	61	62	62	64	65	66	PUPR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban serta penegakan syariat islam (%)	%	92.97	93.45	93.49	94.03	94.57	95.11	95.65	SATPOL PP
Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilaksanakan	%	77.16	82	85	87	89	91	93	BPBD
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	85.93	87	89	91	92	93	95	BPBD
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	70	70	75	80	85	90	95	BPBD
Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	75	80	80	80	85	90	95	BPBD
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	75	80	80	85	85	85	90	BPBD
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	21.3	4.9	8.97	14.8	19.73	24.66	29.6	DINSOS

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	13.45	8.52	14.8	21.08	27.35	33.63	39.91	DINSOS
Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	4.48	4.48	8.97	13.45	17.94	22.43	26.91	DINSOS
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	4.82	5.31	5.64	5.97	6.3	6.62	6.95	DINSOS
Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	8.51	11.65	13.65	14.79	16.36	17.93	19.5	DINSOS
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	19.86	23.63	27.55	31.48	35.4	35.4	42.46	DINSOS
Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	1.92	2.65	3.11	3.46	3.8	4.15	4.5	DINSOS
Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS
2. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	28	30	33	42	48	50	55	NAKERTRANS
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	0	0			5	10	8	NAKERTRANS
Persentase Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	7	9	10	12	14	16	18	NAKERTRANS
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	50	50	60	60	70	80	80	DPPKBPPPA
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	51.59	54.62	54.95	55.28	55.61	55.94	56.27	DPPKBPPPA
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0	0			60	60	60	DPPKBPPPA
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	%	50	50	60	60	70	70	70	DPPKBPPPA

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	33	50	60	60	60	70	70	DPPKBPPPA
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	88	80	80	80	80	80	80	DPPKBPPPA
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	80	82	84	85	87.3	88	90	DPPKBPPPA
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	72	73	75	76	76.50	76	78	DPPKBPPPA
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
Ketersediaan Pangan Utama (Kg/KAP/TH)	kg/kapita/ tahun	219.57	220.07	220.57	221.07	221.57	222.07	222.57	PANGAN
Pola Pangan Harapan Konsumsi (Skor)	Skor	81.41	81.61	81.81	82.01	82.21	82.41	82.61	PANGAN
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	17.05	16.72	16.39	16.06	15.73	15.40	15.23	PANGAN
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	95	95.5	95.8	96.3	96.5	96.7	97.0	PANGAN
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	%	0		1	1	1	1	1	PERTANAHAN
Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	%	60	0	0	85	50	65	65	PERTANAHAN
Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	85	85	85	85,30	85,30	85,32	85,34	PERTANAHAN
Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	78	79	79	0	79	79	79	PERTANAHAN
Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	%	84.97	85.56	85.57	85.58	85.59	86	86	PERTANAHAN
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	0	0	100	100	100	100	100	DLH
Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	%	0	0	45	50	55	60	65	DLH
Persentase RTH	%	0.64	0.64	0.64	0.80	0.88	0.96	0.98	DLH
Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	51	56	62	67	69	73	78	DLH

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	%	20	25	30	40	47	55	60	DLH
Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	0	0	1.6	2.3	2.3	2.6	2.9	DLH
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	10	20	35	21	24	25	25	DLH
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	1.20	1.50	1.77	1.89	2.03	2.17	2.32	DLH
Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	DLH
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	46.8	48	50	52	54	56	58	DLH
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL									
Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	99,21	99,21	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	DUKCAPIL

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 30% dari Perekaman KTP EL	%	7.60	7.60	20	30	40	50	50	DUKCAPIL
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	51.22	51.22	65	70	75	80	80	DUKCAPIL
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	DUKCAPIL
Persentase Akta Kelahiran untuk usia 0 -18 Tahun	%	98.36	98.36	98.73	98.83	98.93	99.03	99.13	DUKCAPIL
3. Persentase Akta Kelahiran untuk usia 0- 4 Tahun	%	98.85	98.85	99.10	99.20	99.20	99.30	99.40	DUKCAPIL
4. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	%	100	100	100	100	100	100	100	DUKCAPIL
Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	%	100	100	100	100	100	100	100	DUKCAPIL
Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	9	100	100	100	100	100	100	DUKCAPIL
PKS (Perjanjian Kerja Sama)	OPD	9	9	10	12	13	15	15	DUKCAPIL
Akses Data	OPD	1	1	1	2	3	3	3	DUKCAPIL
Penyediaan Jaringan VPN	OPD	1	1	1	2	3	3	3	DUKCAPIL
Pemanfaatan Buku Profil	OPD	30	30	30	30	30	30	30	DUKCAPIL
Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan	OPD	30	30	30	30	30	30	30	DUKCAPIL
Media Penyampaian Informasi	Media	4	4	4	4	4	4	4	DUKCAPIL

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cakupan Pengelolaan Buku Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	DUKCAPIL
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	0	0	90	90	90	90	90	DPMG
Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	72	75	85	85	90	93	90	DPMG
Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	70	78	80	80	93	95	95	DPMG
Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	85	87	90	90	95	90	DPMG
Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	90	90	93	93	98	100	DPMG
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) (%)	%	0	5.65	4.62	3.92	3.45	3.14	2.92	DPPKBPPPA
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	%	2.19	2.18	2.16	2.14	2.13	2.12	2.11	DPPKBPPPA
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	89	69	74	75	76	78	85	DPPKBPPPA

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	89	73.69	77.05	78.46	79.71	80.83	81.83	DPPKBPPPA
Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	0	0	80	85	86	90	95	DPPKBPPPA
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Konektivitas Darat	%	9.6	9.7	10.3	10.5	10.8	11.3	11.5	DISHUB
Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	91	92	93	94	95	97	98	DISHUB
Konektivitas Laut (Unit)	Unit	0	0	1	1	1	1	1	DISHUB
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	85	85	86	86	86	86	86	DISKOMINFO
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	indeks	2.39	2.81	3.00	3.01	3.02	3.03	3.04	DISKOMINFO
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	0	50	56	65	70	75	80	KOP-UKM DAG
Pertumbuhan Wirausaha	%	0	0	59	65	68	74	79	KOP-UKM DAG
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	55.32	75	80	84	87	91	94	DPMPTSP
Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	5	10	10	12	12	15	15	DPMPTSP
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	90	90.75	91.25	92	92.50	92.55	92.75	DPMPTSP
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	92	92.50	93	94	95	96.50	98	DPMPTSP
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	95	95	95.20	95.40	95.60	95.80	96	DPMPTSP
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
Rasio Wirausaha Pemuda	%	0	2.90	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	PARPORA
Persentase Prestasi Olahraga	%	46.60	47.60	48.60	49.60	50.60	51.60	52.60	PARPORA
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	3.35	3.35	3.45	3.55	3.65	3.75	3.85	PARPORA
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.80	2.80	2.80	2.82	2.83	2.84	2.85	DISKOMINFO

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	65	65	66	67	68	68	68	DISKOMINFO
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	7	7	7	7	7	7	7	DISDIKBUD
Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	82.73	85.49	88.58	91.05	92.59	93.21	95.37	DISDIKBUD
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	82.73	85.49	88.58	91.05	92.59	93.21	95.37	DISDIKBUD
Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	0.38	2.75	55.64	61.76	67.87	70.93	78.27	DISDIKBUD
Persentase Lembaga Adat Yang Memiliki Struktur dan Aturan Tertulis (%)	%	69	69	71	73	75	77	78	MAA
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	70.23	71.85	72.30	72.87	73.45	73.89	74.25	ARPUS
Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	12.19	18.60	23.91	27.08	33.33	36.00	40.38	ARPUS
Tingkat Ketersediaan Arsip	%	60.56	60.69	60.85	70.00	70.15	70.25	70.35	ARPUS
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	ton	6280,2	6468,61	6662,67	6862,55	7068,43	7280,48	7498,89	DKP
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	ton	2383,64	2455,15	2,528.8	2604,66	2,682.8	2763,28	2846,18	DKP
Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH	kg/kapita/tahun	63.6	63.7	63,9	64	64,1	64,2	64,3	DKP
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	59.14	61.14	63.84	66.84	70.44	74.44	79.44	PARPORA
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%		75	75	80	85	90	95	PARPORA
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	51.64	53.99	58.69	62.91	73.71	75.12	95.31	PARPORA
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	ekor	300	300	350	400	500	600	700	DISTAN
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peningkatan Produksi Hortikultura	Ton	296,188.15	290,188.00	290,288.15	290,313.20	290,338.15	290,363.15	290,388.15	DISTAN
Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan dalam LP2B	Ha	0	22,321	22,421	22,721	22,821	22,921	23,221	DISTAN
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	%	90	100	100	100	100	100	100	DISTAN
Persentase Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	0	100	100	100	100	100	100	DISTAN
Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	0	100	100	100	100	100	100	DISTAN

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Petani	%	100	100	100	100	100	100	100	DISTAN
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	19	23	23	23	23	23	23	DISTAN
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	0	45	45	46	47	50	50	KOP-UKM DAG
Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	69	69	69	70	71	74	74	KOP-UKM DAG
Nilai Ekspor Barang	Nilai	1.8	1.23	1.25	1.26	1.27	1.30	1.35	KOP-UKM DAG
Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	79.17	80	83	85	95	100	100	KOP-UKM DAG
Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	99	99	100	100	100	100	100	KOP-UKM DAG
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	95	0	90	90	90	90	90	KOP-UKM DAG
Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	0	0	90	90	90	90	90	KOP-UKM DAG
Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	%	0	0	50	70	85	90	100	KOP-UKM DAG
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
Persentase Pengembangan SDM Warga Transmigrasi (%)	%	50	100	100	100	100	100	100	NAKERTRANS

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	10	20	50	60	70	80	90	NAKERTRANS
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01 SEKRETARIAT DAERAH									
Efektivitas Kerja Sama Daerah	%	75	80	85	90	92	93	95	SETDA
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai	2.7	2.73	2.75	2.80	2.85	2.90	2.95	SETDA
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	85	85	90	90	95	95	95	SETDA
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	93.56	95.34	96.76	97.15	97.8	98	98.5	SETDA
4.02 SEKRETARIAT DPRD									
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	85.71	85.71	83.33	85.71	71.43	60	75	SET. DPRD
Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	SET. DPRD
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01 PERENCANAAN									
Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
5.02 KEUANGAN									
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Tepat Waktu)	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKD
Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	90	90	90	93	93	95	95	BPKD
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9.01	9.01	9.01	9.51	9.51	10.1	10.1	BPKD
5.03 KEPEGAWAIAN									
Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	98	98	98	98	99	100	98	BKPSDM
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	8.84	4.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	BKPSDM
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	0	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	17	17	21	24	27	30	33	BAPPEDA
6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01 INSPEKTORAT DAERAH									
Persentase Objek Pemeriksaan yang telah terbebas dari temuan hasil pengawasan	%	78.87	89.91	80	81	83	85	85	INSPEKTORAT
Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintahan (APIP)	Level	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00	INSPEKTORAT
7. UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01 KECAMATAN									
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	100	100	100	100	100	KECAMATAN LHOONG
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN LHOONG
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN LHOONG
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN LHOKNGA
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN LHOKNGA
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN LHOKNGA
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	100	100	100	100	KECAMATAN INDRAPURI

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN INDRAPURI
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN INDRAPURI
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN SEULIMUEM
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN SEULIMUEM
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	100	100	100	100	KECAMATAN MONTASIK
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN MONTASIK
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN MONTASIK
Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	95	100	100	100	100	KECAMATAN SUKAMAKMUR
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN SUKAMAKMUR
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN SUKAMAKMUR

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	98	95	95	95	95	95	95	KEC. DARUL IMARAH
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KEC. DARUL IMARAH
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KEC. DARUL IMARAH
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN PEUKAN BADA
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN PEUKAN BADA
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN PEUKAN BADA
Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN MESJID RAYA
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN MESJID RAYA
Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	95	100	100	100	100	KECAMATAN INGIN JAYA
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN INGIN JAYA
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN INGIN JAYA

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	100	100	100	100	KECAMATAN KUTA BARO
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN KUTA BARO
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN KUTA BARO
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	90	95	100	100	100	100	KECAMATAN DARUSSALAM
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN DARUSSALAM
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN DARUSSALAM
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	100	100	100	100	KECAMATAN PULO ACEH
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN PULO ACEH
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	95	95	95	100	100	100	100	KECAMATAN PULO ACEH
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	100	100	100	100	KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN KOTA JANTHO
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN KOTA JANTHO
Persentase tingkat kepuasan Masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN KUTA COT GLIE
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN KUTA COT GLIE
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN KUTA COT GLIE
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN KUTA MALAKA
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN KUTA MALAKA
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN KUTA MALAKA
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN SIMPANG TIGA

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN SIMPANG TIGA
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN SIMPANG TIGA
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN DARUL KAMAL
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN DARUL KAMAL
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN DARUL KAMAL
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN BAITUSSALAM
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN BAITUSSALAM

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN BAITUSSALAM
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	Persen	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN LEUPUNG
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN LEUPUNG
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN LEUPUNG
Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	85	95	95	95	100	100	100	KECAMATAN BLANG BINTANG

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN BLANG BINTANG
Capaian Pemberdayaan Perangkat Desa dan Mukim	%	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN BLANG BINTANG
8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	50	65	65	65	65	65	65	KESBANG
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	0	45	45	45	45	45	45	KESBANG
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	17	17	17	17	17	17	17	KESBANG

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	0	40	40	40	40	40	40	KESBANG
Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (%)	%	0	20	20	30	35	40	45	KESBANG
9. UNSUR KEKHUSUSAN									
9.01 KEKHUSUSAN ACEH									
Persentase Kader Ulama yang di Tingkatkan Kompetensinya	%	8.29	10.78	14.59	18.41	22.22	26.04	29.85	MPU
Pendistribusian dan Pendencygunaan ZISWAF (%)	%	76.94	76.9	76.9	76.9	78	78	78	BAITUL MAL
Persentase mesjid yang tertata manajemen dan kemakmurannya (%)	%	78	80	83	86	89	92	87.88	DSI

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arah pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Besar periode tahun 2025-2029.

Penyusunan perencanaan pembangunan dilihat berdasarkan prosesnya antara lain adalah dengan pendekatan teknokratik dan politis. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik adalah proses perencanaan yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah, data empiris, dan analisis teknis yang mendalam. Pendekatan ini lebih menekankan pada penggunaan metode dan alat yang objektif dan rasional untuk mencapai keputusan yang efisien dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pelaksanaan visi dan misi bupati terpilih. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratik dan politis melalui analisis data dan informasi dengan metode ilmiah terhadap kondisi umum daerah, kinerja pembangunan daerah, dan kerangka pendanaan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Dari analisis tersebut, kemudian menghasilkan rumusan permasalahan pembangunan utama dan isu strategis untuk lima tahun ke depan.

Sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, RPJMD Kabupaten Aceh Besar 2025–2029 juga mengarusutamakan lima (5) pengarusutamaan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yaitu:

1. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, untuk memastikan pembangunan yang adil, setara, dan tidak meninggalkan kelompok rentan.
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kerangka pembangunan yang menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3. Transformasi digital, guna mempercepat modernisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Pembangunan rendah karbon, yang mendorong penggunaan energi bersih dan pengurangan emisi dalam setiap tahapan pembangunan.
5. Pembangunan berketahanan iklim, untuk memastikan Aceh Besar memiliki kemampuan adaptif terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata, terutama pada wilayah pesisir dan kepulauan.

Integrasi pengarusutamaan tersebut memperkuat orientasi pembangunan Aceh Besar agar lebih inklusif, modern, berkelanjutan, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD. Lebih lanjut Permendagri No. 86 tahun 2017 tersebut menjelaskan, Pemerintah Daerah harus menyusun RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik dan politis sebagai sayarat dalam menjalankan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Isu strategis merupakan permasalahan utama atau tantangan maupun peluang yang bersifat mendesak dan penting serta berdampak luas serta perlu untuk direspon dengan tepat. Hasil perumusan isu rencana jangka menengah tersebut, perlu untuk disandingkan dengan isu rencana jangka panjang nasional, Aceh, dan Kabupaten Aceh Besar tahun 2025-2045 untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang kontekstual dan mampu menyelesaikan isu strategis berupa kinerja dan dan kerja dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 tahun ke depan sesuai dengan pedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029. Hasil dari penyusunan ini selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih tahun 2025 – 2029.

Secara keseluruhan, dinamika pembangunan di Kabupaten Aceh Besar tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan tersebut mencakup perubahan arah kebijakan dan regulasi di tingkat nasional, dinamika sosial ekonomi masyarakat lokal, serta peningkatan eksposur terhadap risiko bencana alam dan ketidakpastian global yang dipicu oleh perkembangan geopolitik, perubahan iklim, dan krisis ekonomi dunia. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyadari bahwa keberhasilan pembangunan jangka menengah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengidentifikasi, mengelola, dan merespons risiko-risiko strategis tersebut secara adaptif dan terukur.

Sebagai respon terhadap realitas tersebut, pendekatan manajemen risiko menjadi elemen kunci yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJM Kabupaten Aceh Besar ini, manajemen risiko diintegrasikan sebagai kerangka dasar yang melandasi proses perumusan kebijakan, perencanaan program, serta penyusunan strategi pembangunan. Pendekatan ini melibatkan serangkaian tahapan mulai dari identifikasi risiko, penilaian dampaknya terhadap capaian pembangunan, hingga perumusan strategi mitigasi dan adaptasi yang kontekstual sesuai karakteristik lokal.

Beberapa risiko strategis utama yang telah diidentifikasi dan dianalisis dalam dokumen ini antara lain:

1. **Ketergantungan terhadap Dana Transfer Pusat**, yang berpotensi terganggu akibat dinamika kebijakan fiskal nasional, dan dapat berdampak langsung pada kapasitas fiskal dan stabilitas pembiayaan pembangunan daerah.

2. **Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia**, khususnya dalam sektor pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, yang dapat memperlambat realisasi program-program prioritas dan menurunkan kualitas pelayanan publik.
3. **Risiko Bencana Alam**, seperti banjir, longsor, dan gempa bumi, yang cukup sering terjadi di wilayah Aceh Besar dan memberikan dampak signifikan terhadap infrastruktur, lingkungan hidup, serta aspek sosial ekonomi masyarakat.
4. **Ketimpangan Wilayah dan Aksesibilitas**, yang berpotensi menimbulkan ketidakmerataan pembangunan antar kecamatan dan desa, sehingga dapat memperluas kesenjangan sosial dan menghambat kohesi sosial.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengembangkan berbagai strategi mitigasi dan adaptasi, antara lain: penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dan teknologi informasi; peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam perencanaan berbasis risiko; serta penerapan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Lebih lanjut, integrasi manajemen risiko ini juga diarahkan untuk membangun resiliensi daerah, yakni kemampuan kelembagaan dan struktural Kabupaten Aceh Besar dalam menghadapi serta pulih dari berbagai bentuk guncangan (shocks) dan tekanan (stresses), baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Komitmen untuk mengarusutamakan pendekatan ini dalam seluruh siklus perencanaan dan penganggaran ditunjukkan oleh pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pasca pandemi, perubahan iklim, serta tekanan ekonomi dan sosial yang makin kompleks.

Kaidah pelaksanaan dirumuskan dengan menetapkan prinsip, standar, serta mekanisme operasional yang menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan. Rumusan ini didasarkan pada analisis kebutuhan daerah, kapasitas sumber daya, regulasi yang berlaku, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan mencakup aspek teknis, administratif, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung efektif, efisien, dan transparan.

Sistem pendanaan dirancang dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup identifikasi sumber dana baik dari APBD, APBN, bantuan pemerintah pusat, Bantuan Pemerintah Aceh, hibah, serta potensi pendapatan asli daerah

(PAD). Sistem ini memuat mekanisme alokasi dan penggunaan dana secara tepat sasaran dan berkelanjutan, dengan mengacu pada prioritas program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pendanaan juga dipastikan mengakomodasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat jangka menengah serta memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan perundang-undangan.

Sistem pembiayaan meliputi pengaturan tata cara pengelolaan dana pembangunan, termasuk mekanisme pencairan, pertanggungjawaban, dan pengawasan penggunaan anggaran. Dalam rumusan ini, digunakan pendekatan manajemen keuangan daerah yang profesional dan akuntabel, didukung oleh sistem informasi keuangan yang transparan. Pembiayaan diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program pembangunan.

Dengan dirumuskannya kaidah pelaksanaan, sistem pendanaan dan pembiayaan, serta kerangka pengendalian dan evaluasi dalam RPJMD Aceh Besar Tahun 2025–2029, maka dokumen ini telah disusun sebagai instrumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang sistematis, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah serta mendorong efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan melalui mekanisme evaluasi kinerja yang terukur.

Penyusunan kerangka pengendalian dan evaluasi dilengkapi dengan sistem pemantauan yang berbasis indikator kinerja utama (IKU), guna memastikan ketercapaian sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Sementara itu, mekanisme perubahan yang telah diatur memberikan ruang fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional, kondisi sosial ekonomi, maupun faktor-faktor eksternal yang memengaruhi jalannya pembangunan daerah.

Perlu ditekankan bahwa RPJMD Aceh Besar Tahun 2025–2029 ini disusun dalam konteks masa transisi pemerintahan, di mana keberlanjutan arah pembangunan menjadi faktor krusial. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman teknis pelaksanaan pembangunan, tetapi juga menjadi jembatan strategis dalam menjaga kesinambungan visi dan misi pembangunan antarperiode, agar akselerasi pembangunan daerah tetap berjalan secara konsisten dan selaras dengan perencanaan nasional maupun provinsi.

Dengan landasan tersebut, RPJMD ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan serta peluang pembangunan ke depan, khususnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat Aceh Besar secara adil dan berkelanjutan.

Di sisi lain, mekanisme perubahan telah dirancang sebagai instrumen adaptif untuk menghadapi dinamika kebijakan nasional, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun bencana dan keadaan luar biasa lainnya. Hal ini memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan RPJMD tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan konsistensi arah pembangunan.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Aceh Besar ini tidak hanya menjadi dokumen arah kebijakan pembangunan lima tahunan, tetapi juga menegaskan pentingnya pembangunan yang tangguh terhadap risiko dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi RPJM sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip-prinsip manajemen risiko dapat diterapkan secara konsisten, inklusif, dan berbasis data. Diharapkan pendekatan ini mampu meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta menciptakan fondasi yang kokoh bagi terwujudnya Kabupaten Aceh Besar yang maju, berdaya saing, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Sebagai tambahan penegasan, penyusunan RKPD Tahun 2030 wajib mengacu pada RPJMD Aceh Besar 2025–2029 sepanjang belum ditetapkan RPJMD baru oleh kepala daerah hasil pemilihan berikutnya. Ketentuan ini memastikan kesinambungan pembangunan dan mencegah terjadinya kekosongan arah perencanaan pada masa transisi pemerintahan. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah tetap memiliki pedoman yang jelas untuk merumuskan rencana kerja tahunan, menjaga stabilitas pembangunan, dan menghindari deviasi kebijakan dalam masa pergantian pemerintahan.

Mengingat dokumen ini disusun pada masa transisi kepemimpinan, kesinambungan arah pembangunan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis administratif, tetapi juga menjadi jembatan strategis antar periode pemerintahan dalam menjaga arah pembangunan Aceh Besar agar tetap konsisten dengan perencanaan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam merencanakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Perangkat Daerah wajib menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Dengan demikian, Bab V ini menegaskan bahwa pelaksanaan RPJMD Aceh Besar 2025–2029 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara administratif, tetapi merupakan proses kolaboratif yang mengedepankan integrasi, efisiensi, dan kesinambungan pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi kepala daerah secara optimal.